LEMBARAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

No. 4, 2025 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 151);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Dan

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Banten adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada Tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.

16. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi RPJMD.
17. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMN.
18. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
19. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
20. Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
21. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* kinerja (bukan *cascading indicator*).
22. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya dapat memengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
23. *Outcome* adalah manfaat yang diperoleh oleh penerima manfaat dalam jangka waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
24. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

25. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
26. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
27. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
28. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMD Provinsi Banten, dan RPJMN.

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
   a. Bab I memuat pendahuluan;
   b. Bab II memuat gambaran umum Daerah;
   c. Bab III memuat visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
   d. Bab IV memuat program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. Bab V memuat penutup.

(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan:

a. RKPD;
b. Renstra Perangkat Daerah; dan
c. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, RKPD Provinsi Banten, dan Program Strategis Nasional serta pedoman penyusunan RKPD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 9

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD, Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 21 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN: (4,29/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 22 Agustus 2025
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah dalam ikatan Negara Republik Indonesia.

Untuk menjamin kegiatan pembangunan daerah berjalan dengan efektif dan efisien, maka proses pembangunan perlu didasarkan pada suatu perencanaan. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan Perangkat Daerah. Dokumen RPJPD dijabarkan oleh dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, selanjutnya dioperasionalkan dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkewajiban untuk segera menyusun RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dan harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif dan akuntabel, penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, model logika, berfikir sistem, dan dinamika sistem. RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 juga disusun melalui proses partisipatif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dengan demikian perencanaan yang disusun merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan yang berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 156

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 1
DAFTAR TABEL..... 4
DAFTAR GAMBAR 12
BAB I. PENDAHULUAN..... 14
1.1. Latar Belakang..... 14
1.2. Dasar Hukum 15
1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya..... 17
1.4. Maksud dan Tujuan..... 19
1.5. Sistematika Penulisan..... 19
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 23
2.1. Aspek Geografi dan Demografi 23
2.1.1. Geografi Daerah..... 23
2.1.2. Posisi dan Peran Strategis Daerah 37
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)..... 38
2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 56
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas 60
2.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim..... 69
2.1.7. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah..... 84
2.1.8. Demografi..... 85

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 90
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 90
2.2.2. Kesehatan Untuk Semua 102
2.2.3. Pendidikan Berkualitas Untuk Semua 106
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif 112
2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 113
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Gender, dan Masyarakat Inklusif 114
2.3. Aspek Daya Saing Daerah 118
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia 118
2.3.2. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 122
2.3.3. Transformasi Digital 128
2.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 130
2.3.5. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 131
2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro 133
2.3.7. Inklusi Keuangan 134
2.4. Aspek Pelayanan Umum 135
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 135
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 138
2.4.3. Ketangguhan Daerah 141
2.4.4. Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Daerah 143
2.5. Standar Pelayanan Minimum 148
2.6. Kerja Sama Pembangunan Daerah 149
2.7. Badan Usaha Milik Daerah 158
2.8. Gambaran Keuangan Daerah 161
2.8.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 162
2.8.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030 ... 183
2.9. Permasalahan dan Isu Strategis 189
2.9.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 189
2.9.2. Isu Strategis Daerah 194
BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 214
3.1. Visi dan Misi 214
3.1.1. Visi 214
3.1.2. Misi 217
3.2. Tujuan dan Sasaran 221
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 227
3.3.1. Strategi Pembangunan Daerah 227
3.3.2. Arah Kebijakan Daerah 239
3.4. Program-Program Prioritas Daerah 279

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 323

4.1. Program Perangkat Daerah 323

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 372

4.2.1. Indikator Makro 372

4.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 385

4.2.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) 391

BAB V. PENUTUP 404

5.1. Kesimpulan 404

5.2. Kaidah Pelaksanaan 406

5.3. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) dalam Perencanaan Pembangunan 407

5.4. Pendanaan Pembangunan 408

5.5. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi 409

5.6. Sistem Insentif 411

5.7. Mekanisme Perubahan 412

5.8. Komunikasi Publik 412

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Daftar Kecamatan di Kota Tangerang Selatan.....23
Tabel II.2. Distribusi Luas Kelas Elevasi Wilayah Kota Tangerang Selatan menurut Kecamatan.....25
Tabel II.3. Distribusi Luas Kelas Lereng Wilayah Kota Tangerang Selatan menurut Kecamatan.....26
Tabel II.4. Rata-Rata Suhu dan Kelembapan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020–2024 27
Tabel II.5. Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020–2024 29
Tabel II.6. Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan tahun 2022 30
Tabel II.7. Luas Penggunaan Lahan 2017-2022 Kota Tangerang Selatan 32
Tabel II.8. Debit Sungai di Kota Tangerang Selatan 33
Tabel II.9. Data Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Tangerang Selatan 33
Tabel II.10. Indeks Pencemaran dan Status Mutu Air Sungai Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 34
Tabel II.11. Lokasi dan Luas Situ di Kota Tangerang Selatan.....35
Tabel II.12. Indeks Pencemar dan Status Mutu Air pada Situ di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 35
Tabel II.13. Distribusi Luas Kelas Geologi Litologi Wilayah Kota Tangerang Selatan 36
Tabel II.14. Pembagian Sub-DAS di Kota Tangerang Selatan.....39
Tabel II.15. Ketersediaan Air di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 40
Tabel II.16. Total Kebutuhan Air Kota Tangerang Selatan (Liter/detik) 40
Tabel II.17. Status Daya Dukung Daya Tampung Air Kota Tangerang Selatan per Kecamatan 41
Tabel II.18. Ambang Batas Penduduk Kota Tangerang Selatan Per Kecamatan.....42
Tabel II.19. Ketersediaan Pangan berdasarkan Nilai Kalori Tahun 2023 44
Tabel II.20. Angka Kecukupan Energi Kota Tangerang Selatan 45
Tabel II.21. Kebutuhan Pangan berdasarkan Nilai Kalori Tahun 2023 45
Tabel II.22. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018.....47
Tabel II.23. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan.....47
Tabel II.24. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Tahun 2018.....49
Tabel II.25. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan.....49

Tabel II.26. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2018.....50
Tabel II.27. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan.....51
Tabel II.28. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018 52
Tabel II.29. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan 52
Tabel II.30. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir Tahun 2018 53
Tabel II.31. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir Tahun 2018 berdasarkan Kecamatan.....54
Tabel II.32. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Tahun 2018 55
Tabel II.33. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan 55
Tabel II.34. Konsumsi Listrik per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 57
Tabel II.35. Debit dan Ketersediaan Air Baku di Kota Tangerang Selatan 58
Tabel II.36. Indeks Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 59
Tabel II.37. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 59
Tabel II.38. Indikator Pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 61
Tabel II.39. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024 61
Tabel II.40. Tingkat Pelayanan SPAM Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 62
Tabel II.41. Capaian Penyelenggaraan Sanitasi Kota Tangerang Selatan 63
Tabel II.42. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024 63
Tabel II.43. Perkembangan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024.....64
Tabel II.44. Perkembangan Rasio Daur Ulang Sampah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 64
Tabel II.45. Jumlah Rumah Menurut Kondisi di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024.....65
Tabel II.46. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan 66
Tabel II.47. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kota Tangerang Selatan....70
Tabel II.48. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan.....71
Tabel II.49. Indeks Ketahanan Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023-2024 71

Tabel II.50. Nilai Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat.....72
Tabel II.51. Rekapitulasi Sebaran Risiko Gempa Bumi di Kota Tangerang Selatan 73
Tabel II.52. Rekapitulasi Sebaran Risiko Banjir di Kota Tangerang Selatan 74
Tabel II.53. Rekapitulasi Sebaran Risiko Tanah Longsor di Kota Tangerang Selatan 75
Tabel II.54. Rekapitulasi Sebaran Risiko Cuaca Ekstrem di Kota Tangerang Selatan 76
Tabel II.55. Rekapitulasi Sebaran Risiko Kekeringan di Kota Tangerang Selatan 77
Tabel II.56. Rekapitulasi Sebaran Risiko Kebakaran Gedung dan Permukiman di Kota Tangerang Selatan.....78
Tabel II.57. Rekapitulasi Sebaran Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit di Kota Tangerang Selatan 79
Tabel II.58. Rekapitulasi Sebaran Risiko Kegagalan Teknologi di Kota Tangerang Selatan 80
Tabel II.59. Rekapitulasi Sebaran Risiko Konflik Sosial di Kota Tangerang Selatan 81
Tabel II.60. Penilaian Perwujudan Program RTRW di Kota Tangerang Selatan 85
Tabel II.61. Data Kependudukan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 86
Tabel II.62. Proyeksi Struktur Kependudukan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2030.....89
Tabel II.63. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 90
Tabel II.64. Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan dalam Konstelasi Regional dan Nasional Tahun 2020-2024 92
Tabel II.65. Distribusi Persentase PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024.....93
Tabel II.66. Potensi Sektor Lapangan Usaha di Kota Tangerang Selatan (berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2023-2024).....95
Tabel II.67. PDRB Per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 96
Tabel II.68. Kondisi Kemiskinan pada Kabupatan/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024 98
Tabel II.69. Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten Tahun 2020-2024 99
Tabel II.70. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Banten Tahun 2020-2024 100
Tabel II.71. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023-2024 100
Tabel II.72. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan

	Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023-2024	101
Tabel II.73.	Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019-2024	101
Tabel II.74.	IPM menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2020-2024	102
Tabel II.75.	Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2020-2024	102
Tabel II.76.	Indeks Keluarga Sehat di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023	103
Tabel II.77.	Kondisi stunting di Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024	104
Tabel II.78.	Angka Kematian Ibu di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024	104
Tabel II.79.	Cakupan penemuan dan pengobatan Tahun 2020-2023	105
Tabel II.80.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	106
Tabel II.81.	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2020-2024	106
Tabel II.82.	Angka Partisipasi Sekolah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2025	106
Tabel II.83.	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2020-2024	108
Tabel II.84.	Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2022-2024	109
Tabel II.85.	Kualitas Satuan PAUD dan Guru PAUD di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024	109
Tabel II.86.	Iklim Inklusivitas, Iklim Kebhinnekaan, dan Iklim Keamanan pada Satuan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2025	110
Tabel II.87.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023-2024	111
Tabel II.88.	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Masyarakat Kota Tangerang Selatan Tahun 2024	112
Tabel II.89.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Soaial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024	112
Tabel II.90.	Indeks Pembangunan Keluarga Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024	115
Tabel II.91.	IPG, IDG dan IKG Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024	115
Tabel II.92.	Keterlibatan di Parlemen Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024	116
Tabel II.93.	Sumbangan dalam Pendapatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024	116

Tabel II.94. Persentase Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024 116
Tabel II.95. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2024 118
Tabel II.96. Komposisi Penduduk berdasarkan Usia di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 119
Tabel II.97. Proyeksi Komposisi Penduduk berdasarkan Usia di Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 120
Tabel II.98. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2024..... 123
Tabel II.99. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2024 123
Tabel II.100. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024..... 124
Tabel II.101. Rasio Kewirausahaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 125
Tabel II.102. Indeks Inovasi Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 128
Tabel II.103. Indeks Kapabilitas Inovasi Tangerang Selatan Tahun 2023-2024 128
Tabel II.104. Nilai IMDI Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022-2024 129
Tabel II.105. Nilai Pilar IMDI Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 129
Tabel II.106. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024..... 130
Tabel II.107. Perkembangan Ekspor Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024 131
Tabel II.108. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 132
Tabel II.109. Persentase Rumah Tangga dengan Rumah Layak Huni berdasarkan Luasan Rumah di Kota Tangerang Selatan 132
Tabel II.110. Indeks Kota Layak Huni Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024 132
Tabel II.111. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024..... 133
Tabel II.112. Nilai ICOR dan Realisasi Investasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024..... 134
Tabel II.113. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024..... 135
Tabel II.114. Capaian sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kota Tangerang Selatan 136
Tabel II.115. Capaian Indeks Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan 137
Tabel II.116. Capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2021-2024 Kota Tangerang Selatan 138
Tabel II.117. Hasil Survei Penilaian Integritas Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024..... 138

Tabel II.118. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024 139
Tabel II.119. Capaian Aksi Ham Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 139
Tabel II.120. Capaian Aksi HAM Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 140
Tabel II.121. Capaian Aksi HAM Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 140
Tabel II.122. Indeks Demokrasi Indonesia Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024 141
Tabel II.123. Indeks Rasa Aman Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023 141
Tabel II.124. Indeks Daya Saing Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2022-2024 142
Tabel II.125. Capaian Indikator Kinerja Kunci Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024 143
Tabel II.126. Rekapitulasi Penerapan Capaian SPM per bidang Layanan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 149
Tabel II.127. Kerja Sama antar Daerah Dalam Negeri Tahun 2024 150
Tabel II.128. Laporan Auditor Independen Perseroan Daerah (Perseroda) PITS Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 160
Tabel II.129. Rasio Keuangan PITS Kota Tangerang Selatan Tahun 2023-2024 160
Tabel II.130. Kinerja Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2020-2024 164
Tabel II.131. Rincian Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020-2024 166
Tabel II.132. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 166
Tabel II.133. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 167
Tabel II.134. Kriteria Penilaian Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 167
Tabel II.135. Tingkat Desentralisasi Fiskal Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 167
Tabel II.136. Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 168
Tabel II.137. Tingkat Ketergantungan Keuangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 168
Tabel II.138. Kategori Rasio PAD terhadap PDRB 168
Tabel II.139. Rasio PAD terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 168
Tabel II.140. Rasio PAD terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 169
Tabel II.141. Kontribusi Komponen PAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 170
Tabel II.142. Pertumbuhan Komponen PAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 170
Tabel II.143. Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 173

Tabel II.144. Surplus/Defisit APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 173
Tabel II.145. Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 175
Tabel II.146. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 175
Tabel II.147. Rincian Komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020-2024 176
Tabel II.148. Laporan Neraca Daerah Kota Tangerang Selatan Periode tahun 2020-2024..... 178
Tabel II.149. Analisa Rasio Likuiditas Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024 180
Tabel II.150. Analisa Rasio Solvabilitas Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024 180
Tabel II.151. Rasio Aktivitas Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024 181
Tabel II.152. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur tahun 2020-2024 182
Tabel II.153. Proyeksi Kerangka Pendanaan Indikatif Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2030 184
Tabel II.154. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 190
Tabel II.155. Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029..... 193
Tabel II.156. Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Prioritas dan Justifikasi Pendukungnya pada KLHS RPJMD 2025-2029 202
Tabel II.157. Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 205
Tabel III.1. Penyelarasan Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 ..219
Tabel III.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 221
Tabel III.3. Tema Pembangunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 228
Tabel III.4. Strategi Penahapan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 228
Tabel III.5. Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 239
Tabel III.6. Penyelarasan Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dengan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 257
Tabel III.7. Penyelarasan Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dengan Arah Pembangunan Kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 261
Tabel III.8. Penyelarasan Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dengan Arah Pembangunan Kewilayahan Nasional, Kawasan Aglomerasi

	Jabodetabekpunjur, dan Rancangan Akhir RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045	266
Tabel III.9.	Program Prioritas RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	279
Tabel III.10.	Rencana Tindak/Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029	313
Tabel III.11.	Alternatif Skema Pendanaan Non APBD Rencana Tindak/Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029	318
Tabel IV.1.	Indikatif Program Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2026-2030	324
Tabel IV.2.	Daftar Indikator Makro RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029	372
Tabel IV.3.	Proyeksi PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030	374
Tabel IV.4.	Proyeksi PDRB ADHB dan PDRB ADHB per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030	375
Tabel IV.5.	Proyeksi Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap PRDB Provinsi Banten Tahun 2025– 2030	376
Tabel IV.6.	Proyeksi IPM dan Indeks Penyusunnya Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030	377
Tabel IV.7.	Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030	378
Tabel IV.8.	Proyeksi Rasio Gini Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030	379
Tabel IV.9.	Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030	381
Tabel IV.10.	Proyeksi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030	381
Tabel IV.11.	Proyeksi Penurunan Intensitas Emisi GRK Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030	382
Tabel IV.12.	Proyeksi Target Indikator Makro Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030	384
Tabel IV.13.	Proyeksi Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2030	385
Tabel IV.14.	Proyeksi Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2030	392

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan....18
Gambar II.1. Peta Administrasi Kota Tangerang Selatan 24
Gambar II.2. Peta Topografi Kota Tangerang Selatan 25
Gambar II.3. Peta Elevasi/Ketinggian Wilayah Kota Tangerang Selatan 26
Gambar II.4. Rata-Rata Suhu di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020–2024....28
Gambar II.5. Peta Curah Hujan di Wilayah Kota Tangerang Selatan 29
Gambar II.6. Peta Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022....31
Gambar II.7. Penggunaan Lahan Kota Tangerang Selatan 2017-2022...32
Gambar II.8. Peta DAS di Wilayah Kota Tangerang Selatan....34
Gambar II.9. Peta Geologi Wilayah Kota Tangerang Selatan 37
Gambar II.10. Peta DAS di Kota Tangerang Selatan 39
Gambar II.11. Peta Ketersediaan Air Kota Tangerang Selatan Tahun 2023....40
Gambar II.12. Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Tangerang Selatan 42
Gambar II.13. Peta Ambang Batas Penduduk Kota Tangerang Selatan....43
Gambar II.14. Proyeksi Perbandingan Kebutuhan Air Total dengan Ketersediaan Air 44
Gambar II.15. Daya Dukung Pangan berdasarkan Nilai Kalori Tahun 2023....46
Gambar II.16. Proporsi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018....48
Gambar II.17. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018....48
Gambar II.18. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2018....50
Gambar II.19. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018....53
Gambar II.20. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir Tahun 2018....54
Gambar II.21. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Tahun 2018....56
Gambar II.22. Peta Sebaran Permukiman Kumuh Kota Tangerang Selatan 68
Gambar II.23. Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan 69
Gambar II.24. Diagram Kegiatan Prioritas Hasil Pengkajian Indeks Kapasitas Daerah....72
Gambar II.25. Peta Risiko Gempa Bumi di Kota Tangerang Selatan 73
Gambar II.26. Peta Risiko Banjir di Kota Tangerang Selatan....74
Gambar II.27. Peta Risiko Tanah Longsor di Kota Tangerang Selatan....75
Gambar II.28. Peta Risiko Cuaca Ekstrem di Kota Tangerang Selatan....76
Gambar II.29. Peta Risiko Kekeringan di Kota Tangerang Selatan....77

Gambar II.30. Peta Risiko Kebakaran Gedung dan Permukiman di Kota Tangerang Selatan 78
Gambar II.31. Peta Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit di Kota Tangerang Selatan 80
Gambar II.32. Peta Risiko Kegagalan Teknologi di Kota Tangerang Selatan 81
Gambar II.33. Peta Risiko Konflik Sosial di Kota Tangerang Selatan 82
Gambar II.34. Perubahan Suhu Permukaan Lahan (LST) Kota Tangerang Selatan 2005-2018 83
Gambar II.35. Suhu Permukaan Tanah wilayah Jakarta dan sekitarnya, termasuk Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 84
Gambar II.36. Piramida Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 120
Gambar II.37. Proyeksi Piramida Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 122
Gambar II.38. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024..... 126
Gambar II.39. Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019-2024 149
Gambar II.40. Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 163
Gambar II.41. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 163
Gambar II.42. Tren Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 171
Gambar II.43. Tren Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 172
Gambar II.44. Isu Megatrend Global..... 196
Gambar II.45. Risiko Global Jangka Menengah 197
Gambar III.1. Keterkaitan Visi Kota Tangerang Selatan 2025-2029 dengan Visi Nasional 2025-2029 dan Visi Provinsi Banten 2025-2029 216
Gambar III.2. Keterkaitan Visi Kota Tangerang Selatan 2025-2029 dengan Visi Nasional 2025-2029 dan Visi Kota Tangerang Selatan 2025-2045 217
Gambar IV.1. Diagram sebab akibat *(causal loop diagram)* kinerja pembangunan Kota Tangerang Selatan 373
Gambar V.1. Kerangka Pengawalan Visi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029..... 405
Gambar V.2. Kerangka Kerja Logis RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 408
Gambar V.3. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 410

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang terarah, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan di tingkat daerah dibagi berdasarkan durasi atau periode waktu, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku selama 1 (satu) tahun. Meskipun memiliki perbedaan jangka waktu, pada dasarnya seluruh rencana pembangunan daerah tersebut saling terintegrasi dan harmonis. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka rencana pembangunan daerah harus selaras dengan rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Provinsi.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah memiliki RPJPD periode tahun 2025–2045 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2024. Dalam RPJPD, telah ditetapkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Kota Tangerang Selatan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan, yang implementasinya dibagi dalam 4 (empat) tahapan pembangunan dan disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan untuk masa bakti selama 5 tahun, yaitu tahun 2025-2030 telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025. Selanjutnya, RPJMD Kota Tangerang Selatan dengan periodisasi Tahun 2025-2029 yang selaras dengan periodisasi RPJMN Tahun 2025-2029 harus segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045, yang diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 juga dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah, terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029, adalah:

1. Pendekatan teknokratik, melalui manajemen strategik, *logic model*, berpikir sistem dan sistem dinamis;
2. Pendekatan partisipatif;

3. Pendekatan politis;
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
5. Pendekatan holistik-tematik;
6. Pendekatan integratif; dan
7. Pendekatan spasial.

Hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029, yang di dalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan substansi RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045;
3. RPJMD Kota Tangerang Selatan disusun dengan memerhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029;
4. RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan substansi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
5. RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029;
6. RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan memerhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029;
7. RPJMD Kota Tangerang Selatan disusun dengan memerhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ-PID);
8. RPJMD Kota Tangerang Selatan disusun dengan memerhatikan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Naisonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101):
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 151).

1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian dokumen yang saling terkait dan terintegrasi, mulai dari tingkat perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek. Masing-masing dokumen memiliki peran dan tujuan yang spesifik, namun secara keseluruhan membentuk suatu sistem yang koheren untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Secara umum, hierarki dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut

1. RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD memuat visi dan misi daerah, arah kebijakan daerah serta sasaran pokok pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan;
2. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
3. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen 5 (lima) tahunan yang disiapkan sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan disusun dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik;
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD;
5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJ-PID) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemis,

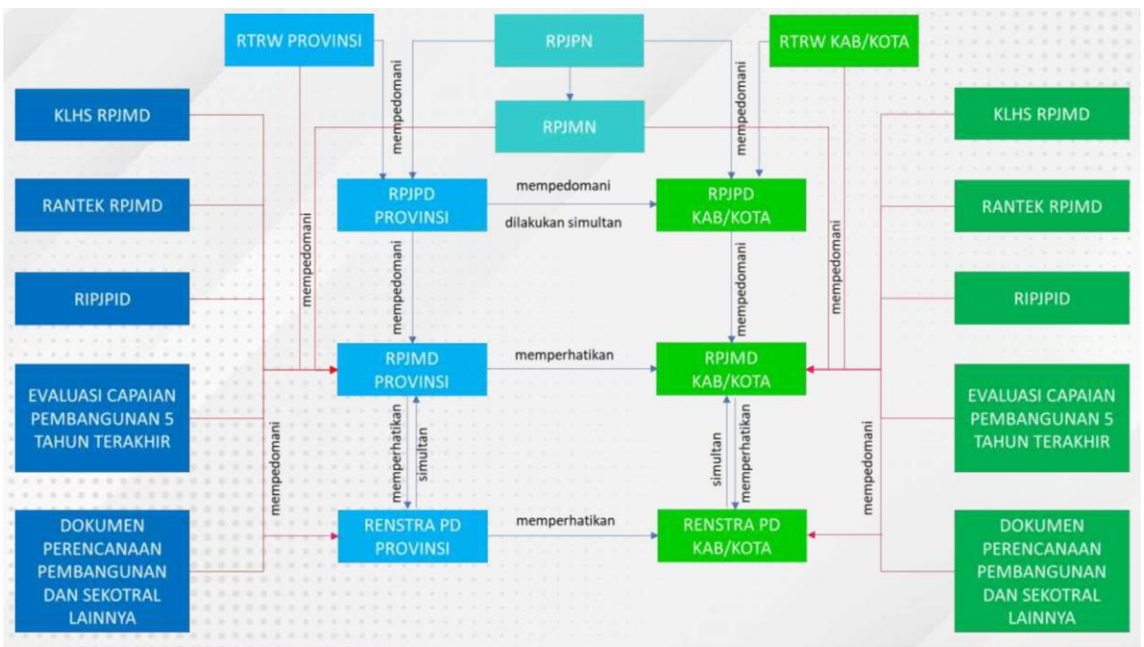
komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah;

6. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berpedoman pada RPJMD dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
8. Recana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut di atas, yaitu:

1. Keterkaitan vertikal, di mana terdapat hubungan hierarkis yang selaras dan konsisten antara dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang hingga perencanaan tahunan, termasuk antara dokumen perencanaan Daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
2. Keterkaitan horizontal, di mana antar dokumen perencanaan dengan linimasa rencana yang sama saling mendukung dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan disajikan dalam **Gambar I.1** berikut.



Gambar I.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan
Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka meningkatkan resiliensi dalam menghadapi bencana, pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1). Hal ini juga menggambarkan keterkaitan RPJMD dengan berbagai dokumen sektoral lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan terpilih periode tahun 2025-2030, disusun dengan maksud untuk menyediakan arah penyelenggaraan pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya sehingga tercipta keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan daerah supaya program-program pembangunan daerah terintegrasi dalam satu kerangka yang utuh. Tujuan penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 adalah

a) menyelaraskan arah dan kebijakan pembangunan daerah dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara sinergis;
b) menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan dalam menjabarkan prioritas program dan kegiatan operasional dalam RKPD dan Renja PD;
c) menetapkan target dan indikator kinerja yang digunakan sebagai standar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
d) memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan dari waktu ke waktu.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025- 2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJ-PID, Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.

1.4. Maksud dan Tujuan
Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

1.5. Sistematika Penulisan
Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing Bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Memuat gambaran mengenai a) Geografi Daerah; b) Posisi dan Peran Strategis Daerah; c) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; d) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan; e) Lingkungan Hidup Berkualitas; f) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim; f) Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW dan g) Demografi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Memuat gambaran mengenai a) Kesejahteraan Ekonomi; b) Kesehatan untuk Semua; c) Pendidikan Berkualitas untuk Semua; d) Perlindungan Sosial yang Adaptif; e) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; f) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Memuat gambaran mengenai a) Daya Saing Sumber Daya Manusia; b) IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; c) Transformasi Digital; d) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; e) Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; f) Stabilitas Ekonomi Makro.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Memuat gambaran mengenai a) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif; b) Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah, dan Demokrasi Substansial; c) Ketangguhan Daerah; d) Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Daerah.

2.5. Standar Pelayanan Minimum

Memuat data-data dan informasi mengenai capaian Standar Pelayanan Minimum setiap urusan di lingkup Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.

2.6. Kerja Sama Pembangunan Daerah

Memuat data-data dan informasi mengenai kerja sama yang telah diimplementasikan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.

2.7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Memuat data-data dan informasi mengenai BUMD yang ada di Kota Tangerang Selatan.

2.8. Gambaran Keuangan Daerah

2.8.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.8.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029

Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030 yang disusun berdasarkan kinerja keuangan tahun 2020-2024, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis. Proyeksi keuangan ini seyogyanya bersumber dari perangkat daerah yang mengampu pendapatan dan belanja keuangan daerah.

2.9. Permasalahan dan Isu Strategis

2.9.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rumusan

permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antaa realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja, sehingga yang disajikan dalam Subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

2.9.2. Isu Strategis Daerah

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat memengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB 3. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi dan Misi

Visi disajikan sesuai dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tercantum pada persyaratan ketika mendaftar di KPUD. Misi dapat disesuaikan dengan pendekatan teknokratik agar sesuai dengan kaidah penyusunan misi, dengan tetap menjaga janji politik untuk mewujudkan visi.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan dalam strategi pembangunan daerah adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

3.4. Program Prioritas Daerah

Program prioritas daerah dihasilkan dari *cascading* kinerja (bukan *cascading* indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

BAB 4. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra PD termasuk Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretaris Perangkat daerah. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disajikan melalui Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU merupakan alat ukur terseleksi yang menggambarkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sedangkan IKD adalah alat ukur yang menggambarkan target penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung target pembangunan nasional. IKD memuat IKU dan juga merupakan bagian dari Indikator Utama Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode berikutnya.

BAB 5. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembentukan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom pada tahun 2008 di Provinsi Banten merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan melalui peningkatan pelayanan pemerintahan, pengembangan potensi daerah, serta pembangunan kota. Kota Tangerang Selatan terbentuk melalui hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi Daerah

2.1.1.1. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis

Kota Tangerang Selatan secara geografis berada pada 06˚13'30"-06˚22'30" Lintang Selatan dan 106˚38'0"-106˚47'0" Bujur Timur. Kota Tangerang Selatan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan. Sebagaimana **Gambar II.1,** secara rinci batas wilayah Kota Tangerang Selatan sebagai berikut

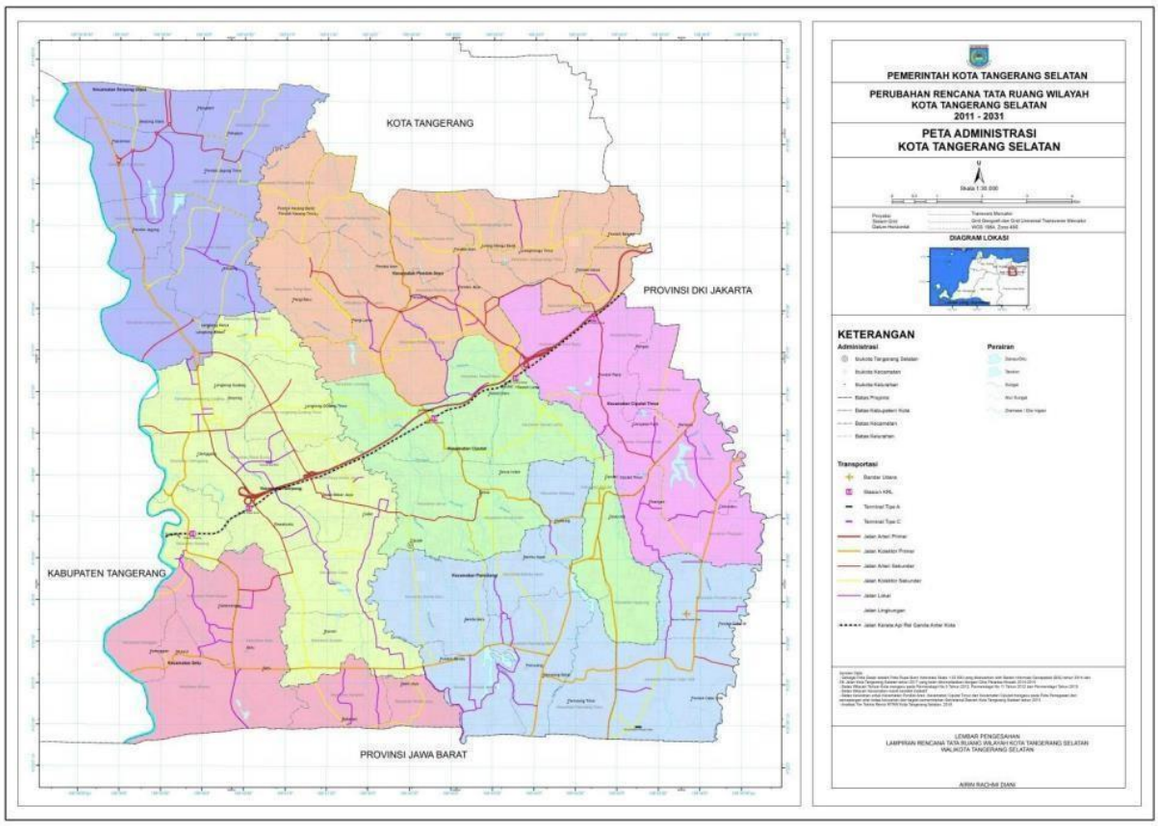
Sebelah Utara : Kecamatan Larangan, Kecamatan Ciledug, dan Kecamatan Pinang di Kota Tangerang Provinsi Banten
Sebelah Selatan : Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari di Kota Depok serta Kecamatan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
Sebelah Barat : Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Cisauk di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Sebelah Timur : Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Kebayoran Lama, dan Kecamatan Cilandak di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta Kecamatan Cinere dan Kecamatan Limo di Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Kota Tangerang Selatan memiliki total luas wilayah sebesar 164,86 km², di mana wilayah terluas adalah Kecamatan Pondok Aren dengan luas 29,78 km² (18,06%), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Setu dengan luas 16,73 km² (10,15%). Secara rinci luas wilayah pada setiap kecamatan di Kota Tangerang Selatan disajikan pada Tabel II.1.

Tabel II.1. Daftar Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km²)	Persentase
1	Setu	Kademangan	6	16,73	10,15
2	Serpong	Serpong	9	28,44	17,25
3	Pamulang	Pamulang Barat	8	28,65	17,38
4	Ciputat	Sawah	7	21,03	12,76
5	Ciputat Timur	Pondok Ranji	6	17,97	10,90
6	Pondok Aren	Perigi Baru	11	29,78	18,06
7	Serpong Utara	Pondok Jagung	7	22,26	13,50
Kota Tangerang Selatan			**54**	**164,86**	**100**

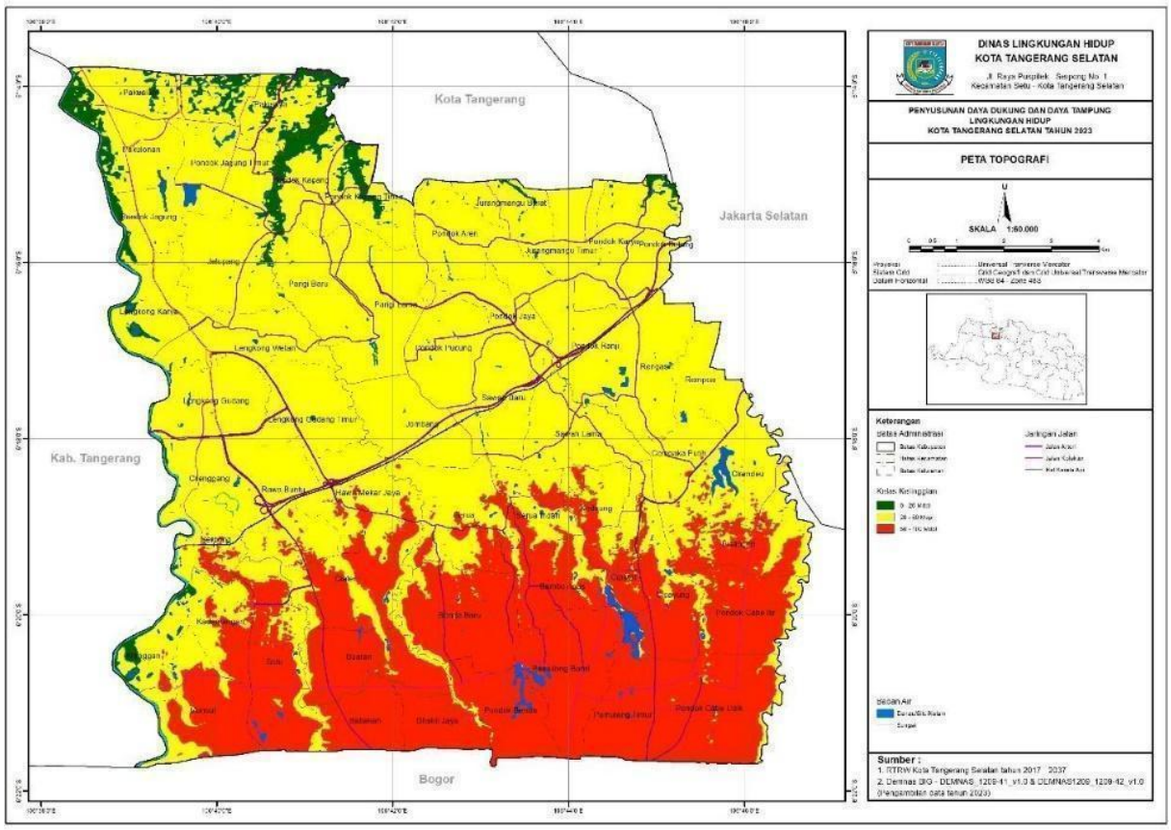
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022



Gambar II.1. Peta Administrasi Kota Tangerang Selatan
Sumber: RTRW Kota Tangerang Selatan 2011-2031

2.1.1.2. Topografi

Topografi merupakan penggambaran permukaan bumi berdasarkan parameter tertentu seperti perbedaan ketinggian tempat dari permukaan laut, bentuk wilayah dan kemiringan lereng. Kota Tangerang Selatan secara umum merupakan wilayah dataran rendah dengan dominasi proporsi luas kelas lereng landai/berombak yang diikuti oleh kelas lereng agak miring/bergelombang, kelas lereng datar, dan kelas lereng miring berbukit. Untuk peta topografi Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada **Gambar II.2**.



Gambar II.2. Peta Topografi Kota Tangerang Selatan

Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)

Berdasarkan kelas elevasi wilayah di Kota Tangerang Selatan, sebagian besar wilayah berada pada elevasi 20-50 Mdpl dan 50-100 Mdpl dengan total luas mencapai 11.576,26 ha atau 70.22% dari total luas wilayah administrasi Kota Tangerang Selatan, sedangkan untuk kelas kelerengan Kota Tangerang Selatan secara umum merupakan wilayah dataran rendah yang didominasi kelas lereng 0-3% total luas total luas mencapai 16.481,17 ha. Untuk distribusi luas kelas elevasi dan distribusi luas kelas kemiringan lereng dapat dilihat pada **Tabel II.2** dan **Tabel II.3**.

Tabel II.2. Distribusi Luas Kelas Elevasi Wilayah Kota Tangerang Selatan menurut Kecamatan

Kecamatan	Elevasi	Luas (ha)
Ciputat	20 - 50 Mdpl	1.624,14
	50 - 100 Mdpl	491,66
Ciputat Timur	0 - 20 Mdpl	0,34
	20 - 50 Mdpl	1.570,18
	50 - 100 Mdpl	213,50
Pamulang	20 - 50 Mdpl	383,06
	50 - 100 Mdpl	2.485,30
Pondok Aren	0 - 20 Mdpl	155,11
	20 - 50 Mdpl	2.822,51
Serpong	0 - 20 Mdpl	35,04
	20 - 50 Mdpl	2.156,08
	50 - 100 Mdpl	652,73
Serpong Utara	0 - 20 Mdpl	353,68
	20 - 50 Mdpl	1.863,87
Setu	0 - 20 Mdpl	63,05

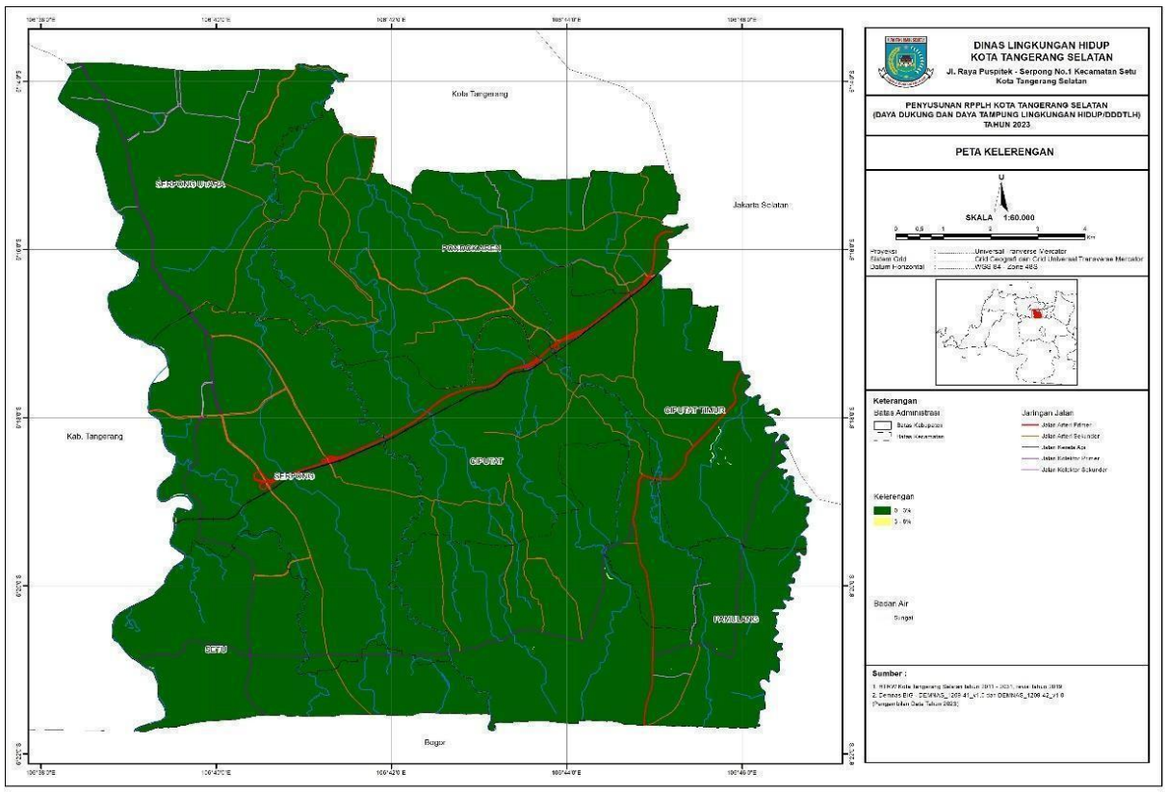
Kecamatan	Elevasi	Luas (ha)
	20 - 50 Mdpl	548,66
	50 - 100 Mdpl	1.066,61
Jumlah		**16.485,52**

Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)

Tabel II.3. Distribusi Luas Kelas Lereng Wilayah Kota Tangerang Selatan menurut Kecamatan

Kecamatan	Kelas Kelerengan	Luas (ha)
Ciputat	0 - 3%	2.115,80
Ciputat Timur	0 - 3%	1.782,14
	3 - 8%	1,88
Pamulang	0 - 3%	2.867,63
	3 - 8%	0,73
Pondok Aren	0 - 3%	2.977,62
	3 - 8%	0,00
Serpong	0 - 3%	2.842,53
	3 - 8%	1,32
Serpong Utara	0 - 3%	2.217,33
	3 - 8%	0,21
Setu	0 - 3%	1.678,12
	3 - 8%	0,20
Jumlah		**16.485,52**

Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)



Gambar II.3. Peta Elevasi/Ketinggian Wilayah Kota Tangerang Selatan
Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)

Hasil pengamatan distribusi kelas elevasi pada **Gambar II.3** menunjukkan pola gradien ketinggian wilayah yang naik dari arah Utara di Kecamatan Serpong Utara dan Pondok Aren ke arah Selatan di Kecamatan Pamulang dan Setu. Pola ini mengikuti kondisi gradien elevasi bentang alam pada skala yang lebih luas yakni dari arah Utara di wilayah pesisir pantai Utara/Teluk Jakarta ke arah Selatan di wilayah dataran tinggi/pegunungan di Bogor. Informasi pola gradien ketinggian ini juga dapat digunakan untuk memetakan wilayah hulu-hilir suatu daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir dari wilayah pegunungan yang tinggi ke wilayah pesisir yang lebih rendah. Wilayah dataran rendah biasanya menjadi wilayah dataran banjir (*flood plain*) DAS yang tentunya secara alami akan lebih rentan/berisiko terhadap banjir daripada wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi. Wilayah Kota Tangerang Selatan itu sendiri dilalui oleh 2 (dua) DAS, yakni DAS Cisadane dan DAS Angke-Pesanggrahan.

2.1.1.3. Klimatologi

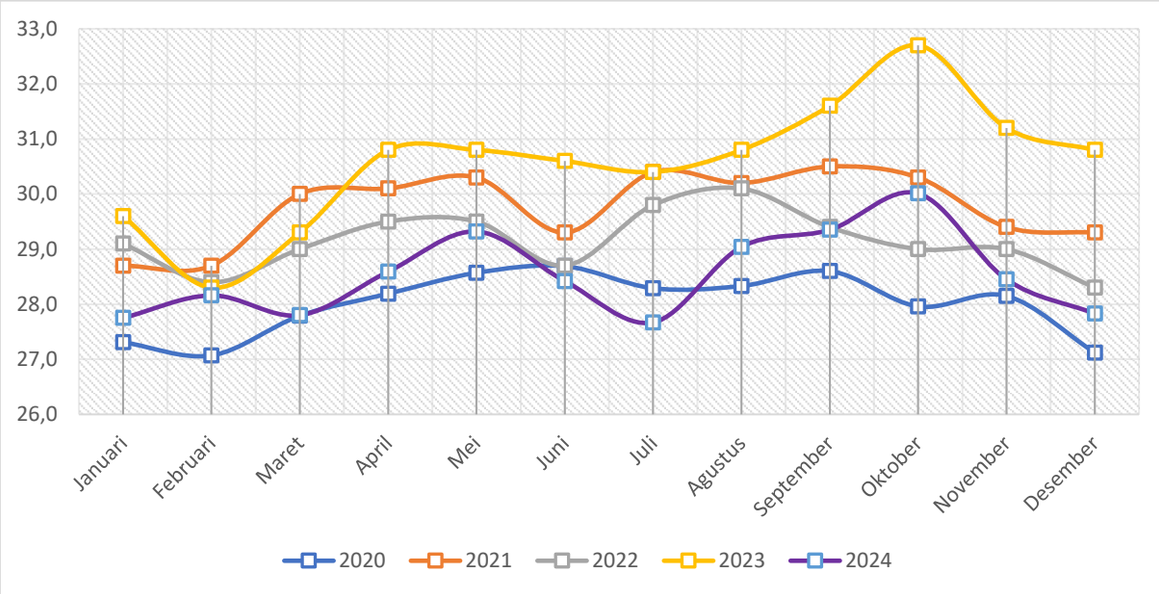
Keadaan iklim Kota Tangerang Selatan diukur dengan parameter suhu, kelembapan, curah hujan, dan hari hujan. Suhu udara di Kota Tangerang Selatan umumnya lebih tinggi pada bulan Oktober dan November, di mana suhu tertinggi rata-rata terjadi pada bulan Oktober 2023 yaitu 32,7°C. Suhu udara lebih rendah pada bulan Januari dan Februari, di mana suhu terendah rata-rata terjadi pada bulan Februari 2020 sebesar 27,1°C. Secara umum, rata-rata suhu di Kota Tangerang Selatan mengalami sedikit peningkatan yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Kelembapan rata-rata di Kota Tangerang Selatan selama lima tahun berkisar antara 60,2% hingga 86,6%. Rata-rata kelembapan tertinggi sebesar 83,3 % pada tahun 2022, sementara rata-rata kelembapan terendah 62,7 % pada tahun 2023. Kelembapan udara di Kota Tangerang Selatan umumnya lebih tinggi pada bulan Desember dan Januari, dan lebih rendah pada bulan Agustus dan September. Berdasarkan data suhu dan kelembapan di Kota Tangerang Selatan dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel II.4** menunjukkan bahwa kelembapan udara dan suhu bersifat terbalik. Ketika suhu udara meningkat, kelembapan udara cenderung menurun, dan sebaliknya. Secara umum, rata-rata kelembapan di Kota Tangerang Selatan mengalami sedikit penurunan yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024, begitu juga dengan suhu rata-rata pada tahun 2020 sampai dengan 2024 (**Gambar II.4**) terlihat tidak stabil. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian pola cuaca yang dipengaruhi oleh perubahan iklim global.

Tabel II.4. Rata-Rata Suhu dan Kelembapan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020–2024

Bulan	Suhu (°C)					Kelembapan (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	27,3	28,7	29,1	29,6	27.8	85,9	76,1	76,6	71,3	82.6
Februari	27,1	28,7	28,4	28,3	28.2	86,6	78,9	78,9	77,0	82.5
Maret	27,8	30,0	29,0	29,3	27.8	83,3	71,3	77,3	75,7	83.1
April	28,2	30,1	29,5	30,8	28.6	82,0	70,5	75,7	69,0	81.8
Mei	28,6	30,3	29,5	30,8	29.3	79,8	70,6	76,6	70,6	76.3
Juni	28,7	29,3	28,7	30,6	28.4	75,6	74,4	78,3	69,0	78.4
Juli	28,3	30,4	29,8	30,4	27.7	73,2	65,5	74,7	65,8	78.0
Agustus	28,3	30,2	30,1	30,8	29.0	73,5	67,5	77,1	62,7	72.8
September	28,6	30,5	29,4	31,6	29.4	73,7	65,8	79,1	60,2	71.7
Oktober	28,0	30,3	29,0	32,7	30.0	78,8	67,7	80,5	60,6	71.6

Bulan	Suhu (°C)					Kelembapan (%)				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
November	28,2	29,4	29,0	31,2	28.5	79,8	72,1	80,6	70,8	79.6
Desember	27,1	29,3	28,3	30,8	27.8	81,5	75,4	83,3	70,6	80.8
Rata-Rata	**28,0**	**29,8**	**29,2**	**30,6**	**28.5**	**79,5**	**71,3**	**78,2**	**68,6**	**78.3**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan (diolah)



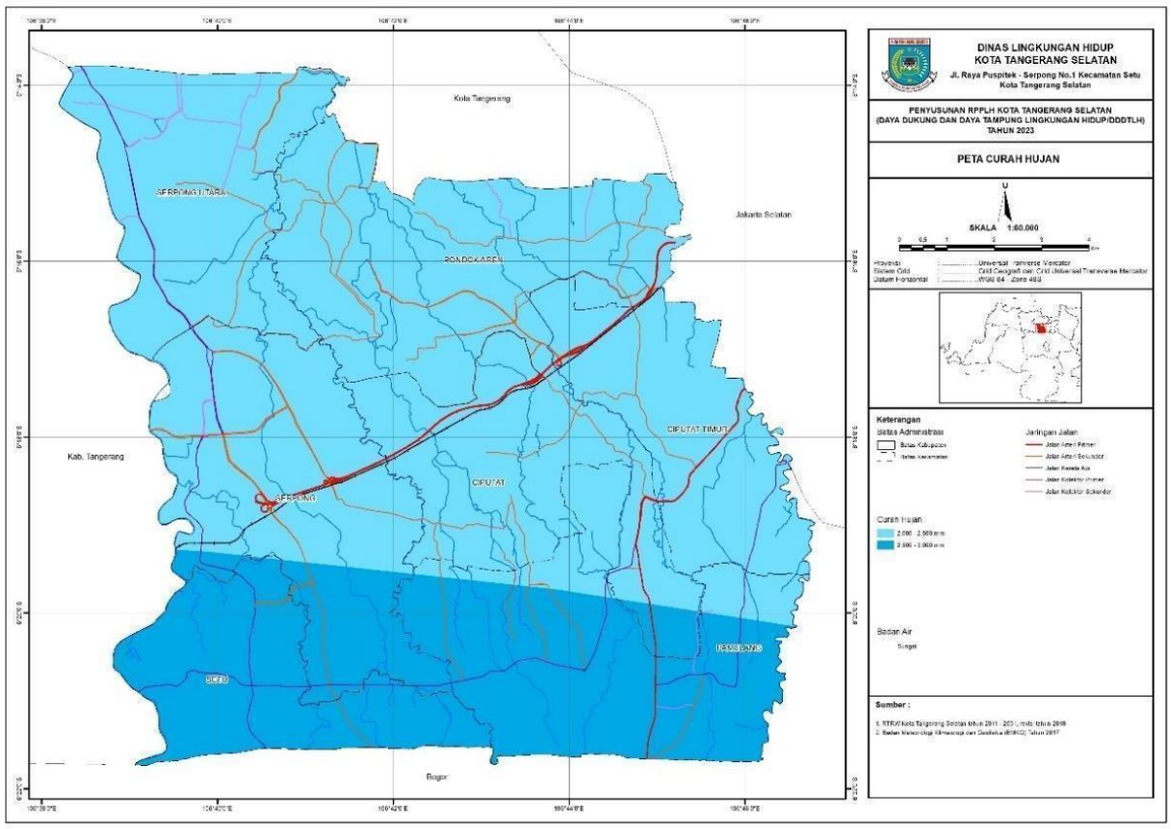
Gambar II.4. Rata-Rata Suhu di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020–2024
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan (diolah)

Secara umum, curah hujan di Kota Tangerang Selatan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Bulan terbasah di Kota Tangerang Selatan adalah bulan Januari tahun 2024 dengan curah hujan rata-rata 601,1 mm. Bulan terkering di Kota Tangerang Selatan adalah bulan September tahun 2020 dengan curah hujan rata-rata 0 mm. Curah hujan di Kota Tangerang Selatan umumnya lebih tinggi pada bulan Februari dan Maret, dan lebih rendah pada bulan September dan Oktober. Jumlah hari hujan di Kota Tangerang Selatan mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Bulan dengan hari hujan terbanyak di Kota Tangerang Selatan adalah bulan Agustus, Oktober, dan Desember tahun 2024 dengan rata-rata 31 hari hujan. Bulan dengan hari hujan tersedikit di Kota Tangerang Selatan adalah bulan Oktober tahun 2023 dengan rata-rata 1 hari hujan. Jumlah hari hujan di Kota Tangerang Selatan umumnya lebih banyak pada bulan Desember dan Januari, dan lebih sedikit pada bulan September dan Oktober. Dalam periode 2020-2024, hari hujan rata-rata menunjukkan tren serupa, di mana tahun 2024 memiliki jumlah hari hujan terbanyak, yaitu rata-rata 25 hari per bulan, sedangkan tahun 2023 rata-rata hanya 11 hari per bulan. Tren tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan anomali cuaca ekstrem. Untuk Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Tangerang Selatan dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel II.5** dan **Gambar II.5**.

Tabel II.5. Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020–2024

Bulan	Curah Hujan (mm)					Hari Hujan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	282,0	154,0	143,2	90,4	601.1	23	21	19	13	23
Februari	158,8	537,9	169,1	338,2	230.7	19	22	20	25	22
Maret	145,3	215,9	274,6	161,7	294.0	16	15	18	19	26
April	383,8	118,0	215,7	68,6	420.6	20	16	19	9	22
Mei	171,0	328,6	238,1	143,6	127.4	9	16	17	10	12
Juni	105,2	350,2	288,5	114,9	154.0	6	17	18	12	15
Juli	3,0	54,3	145,5	61,4	239.5	1	8	10	6	29
Agustus	8,4	220,8	144,7	61,7	81.1	2	9	10	5	31
September	0,0	77,7	291,4	27,7	37.2	0	15	17	2	30
Oktober	45,1	88,2	281,2	2,5	79.2	6	15	17	1	31
November	113,2	269,0	347,6	262,6	445.4	15	19	17	19	30
Desember	188,2	226,9	337,6	265,8	166.5	24	22	19	15	31
Rata-Rata	**133,7**	**220,1**	**239,8**	**133,3**	**239.7**	**12**	**16**	**17**	**11**	**25**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan (diolah)



Gambar II.5. Peta Curah Hujan di Wilayah Kota Tangerang Selatan
Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) (diolah)

Gambar II.5 menunjukkan adanya variasi spasial intensitas hujan di wilayah Tangerang Selatan. Distribusi intensitas curah hujan tersebut mengindikasikan bahwa Area berwarna biru tua menandakan secara konsisten mengalami curah hujan tinggi dan memiliki risiko banjir lebih tinggi pula jika ketersediaan drainase tidak memadai. Sementara itu, area dengan warna biru yang lebih muda mengindikasikan curah hujan yang lebih rendah, sehingga pada saat kemarau berpotensi mengalami kekeringan karena penurunan ketersediaan air tanah.

2.1.1.4. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan kawasan di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh kawasan terbangun, yang digunakan antara lain untuk permukiman, pekarangan, sarana sosial, perdagangan dan jasa, perkantoran swasta dan pemerintahan. Pemanfaatan lahan di Kota Tangerang Selatan meningkat seiring dengan tingginya aktivitas perkotaan, yang menyebabkan harga lahan tinggi.

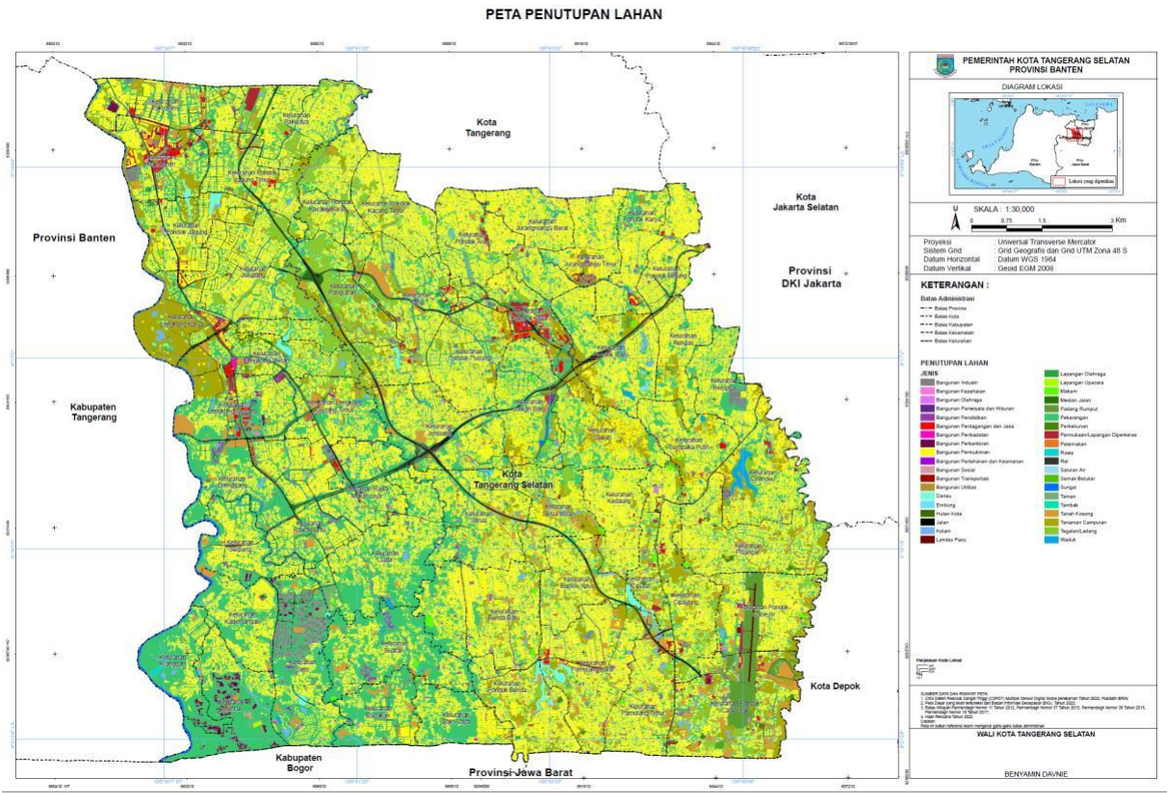
Tabel II.6. Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan tahun 2022

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Bangunan Industri	89,65	0,544%
2	Bangunan Kesehatan	7,64	0,046%
3	Bangunan Olahraga	9,37	0,057%
4	Bangunan Pariwisata dan Hiburan	4,79	0,029%
5	Bangunan Pendidikan	58,63	0,356%
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	73,38	0,445%
7	Bangunan Peribadatan	31,16	0,189%
8	Bangunan Perkantoran	52,62	0,319%
9	Bangunan Permukiman	5.150,91	31,244%
10	Bangunan Pertahanan dan Keamanan	2,99	0,018%
11	Bangunan Sosial	4,83	0,029%
12	Bangunan Transportasi	6,78	0,041%
13	Bangunan Utilitas	2,63	0,016%
14	Danau	63,29	0,384%
15	Embung	7,99	0,048%
16	Hutan Kota	0,43	0,003%
17	Jalan	1.323,14	8,026%
18	Kolam	102,50	0,622%
19	Landas Pacu	10,61	0,064%
20	Lapangan Olahraga	25,76	0,156%
21	Lapangan Upacara	1,69	0,010%
22	Makam	41,29	0,250%
23	Median Jalan	62,97	0,382%
24	Padang Rumput	135,46	0,822%
25	Pekarangan	6.490,95	39,373%
26	Perkebunan	11,56	0,070%
27	Permukaan/Lapangan Diperkeras	156,95	0,952%
28	Peternakan	0,22	0,001%
29	Rawa	4,82	0,029%
30	Rel	16,72	0,101%
31	Saluran Air	3,68	0,022%
32	Semak Belukar	4,10	0,025%
33	Sungai	125,42	0,761%
34	Taman	87,15	0,529%
35	Tambak	2,01	0,012%
36	Tanah Kosong	487,54	2,957%
37	Tanaman Campuran	1.307,68	7,932%
38	Tegalan/Ladang	483,33	2,932%
39	Waduk	33,29	0,202%
	Total	**16.485,52**	**100**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan data penggunaan lahan di Kota Tangerang Selatan pada **Tabel II.6** menunjukkan bahwa lahan permukiman mencapai 31,244% dari total wilayah, sementara pekarangan mencapai 39,373% yang umumnya

menyatu dengan kawasan hunian. Sementara itu, lahan yang belum terbangun di Kota Tangerang Selatan berupa tanah kosong hanya tersisa 2,957 persen atau 487,54 ha. Hal tersebut menandakan bahwa keterbatasan ruang untuk ekspansi wilayah tanpa perencanaan ulang tata guna lahan yang matang. Di sisi lain, ruang terbuka hijau dan kawasan ekologis seperti taman, sungai, dan perairan masih memiliki porsi kecil sehingga menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas lingkungan. Penggunaan lahan untuk infrastruktur jalan (8,026%) mencerminkan tingginya kebutuhan mobilitas antar kawasan. Ke depan, pengelolaan ruang perlu diarahkan pada optimalisasi lahan eksisting, pengendalian alih fungsi lahan, dan perencanaan ruang yang adaptif dan berkelanjutan guna menjawab tekanan urbanisasi yang terus meningkat. Untuk detail penggunaan lahan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam **Gambar II.6**.

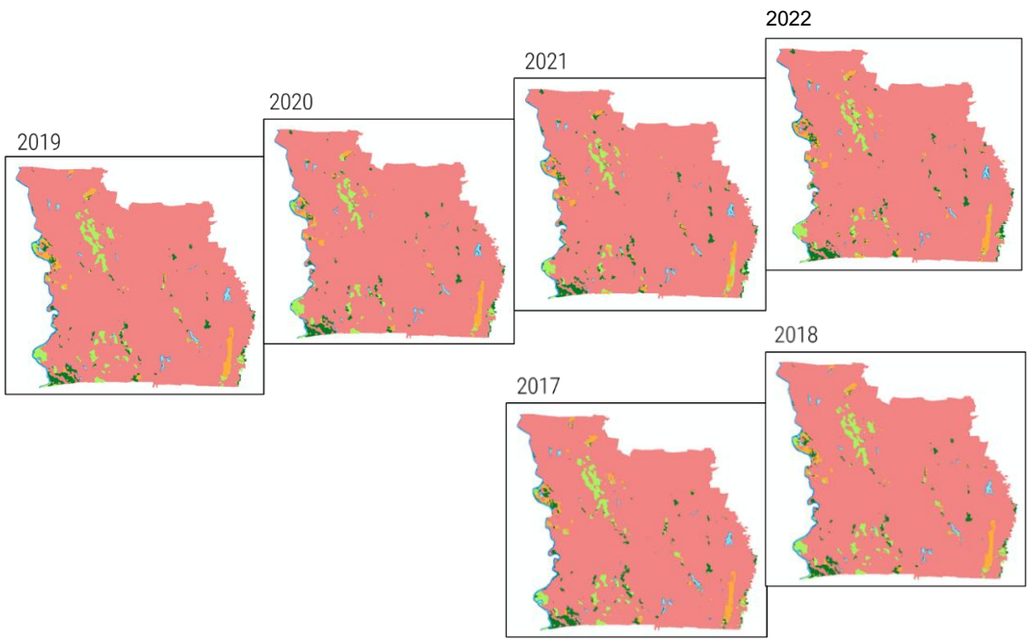


Gambar II.6. Peta Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Penggunaan lahan dalam konfigurasi ruang merupakan salah satu indikator yang banyak digunakan untuk mengukur tingkat perubahan antar waktu dalam perkembangan suatu kota atau wilayah. Jika dilihat secara spasial pada **Gambar II.7**, data yang diolah dari Sentinel menunjukkan sejak tahun 2017 penggunaan lahan terbangun dan permukiman menempati luas lahan yang tinggi mencapai 90% lebih dari total luas wilayah. Perkembangan luas ini terus meningkat di tahun 2019 dengan laju pertambahan sekitar 30%, sementara lahan pertanian dan tutupan vegetasi cenderung mengalami penurunan luas lahan. Pada tahun 2018, tutupan semak belukar/lahan kering dan lahan terbuka di wilayah Kota Tangerang Selatan semakin berkurang dan digantikan oleh lahan terbangun. Perubahan lahan yang paling mencolok pada tahun 2018 adalah pembangunan jalan tol yang membelah utara-selatan pusat kota bagian barat Tangerang Selatan, yang semula merupakan semak belukar/lahan kering pada tahun 2013. Arah perubahan tutupan lahan yang dibangun oleh Tangerang Selatan berasal

dari Kota Jakarta, dari arah timur menuju ke arah barat menjauhi Kota Jakarta dan menuju ke arah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang. Tutupan vegetasi dengan kerapatan tinggi, lahan semak belukar/lahan kering dan lahan pertanian cenderung terus berkurang setiap tahunnya, diiringi dengan bertambahnya luas lahan terbangun.

Gambar II.7 menunjukkan tingkat perubahan penggunaan dan tutupan lahan di Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu 2017 sampai 2022, yang menunjukkan kecenderungan perkembangan lahan terbangun dan permukiman yang semakin tinggi. Kecenderungan penurunan luas lahan terbangun di tahun 2020 sampai 2021 sebagian disebabkan intensitas pembangunan yang tidak berjalan, hal tersebut disebabkan kontraksi pembangunan akibat pandemi Covid-19.



Gambar II.7. Penggunaan Lahan Kota Tangerang Selatan 2017-2022
Sumber: Dokumen RPJPD Kota Tangerang Selatan 2005-2045

Tabulasi hasil klasifikasi tipe tutupan penggunaan lahan di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada **Tabel II.7**.

Tabel II.7. Luas Penggunaan Lahan 2017-2022 Kota Tangerang Selatan

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Vegetasi tutupan rapat	403,3	402,3	292,2	350,8	427,5	384,6
2	Vegetasi rawa	0,5	0,5	0,1	0,9	0,4	3,1
3	Lahan pertanian	532,4	530,4	477,4	462,4	411,7	416,8
4	Belukar	0,0	0,0	2,1	0,2	0,2	0,1
5	Lahan pengembalaan	312,6	315,6	267,4	273,5	259,3	357,3
6	Lahan Terbuka dan permukiman	15.015,7	15.015,7	15.240,1	15.200,5	15.184,4	15.162,0
7	Tubuh air	220,5	220,5	205,7	196,7	201,6	161,2
Total Luas (ha)		**16.485,0**	**16.485,0**	**16,485,0**	**16.485,0**	**16.485,0**	**16.485,0**

Sumber: Dokumen RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2045

2.1.1.5. Hidrologi

Keadaan hidrologi umumnya berkaitan dengan fisiografi daerah yang berpengaruh langsung terhadap sumber daya lahan dan potensinya. Sistem

hidrologi Kota Tangerang Selatan terdiri atas air permukaan, yaitu air yang mengalir atau muncul di permukaan. Aliran air permukaan yang terdapat di Kota Tangerang Selatan berupa aliran air Sungai Cisadane, Sungai Angke dan sebagian wilayah dilewati Sungai Pesanggrahan. Ada juga saluran-saluran alam yang dialiri air sepanjang tahun sebagai penampung drainase lokal. Saluran semacam ini cenderung meluap pada musim hujan.

Sungai Cisadane menjadi sungai terpanjang yang melewati Kota Tangerang Selatan dengan panjang ± 122 Km dengan debit 76,22 m^3/dtk. Panjang dan debit sungai di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam **Tabel II.8**, sedangkan gambaran wilayah kecamatan di Kota Tangerang Selatan yang dilewati oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) disajikan dalam **Tabel II.9** dan **Gambar II.8**.

Tabel II.8. Debit Sungai di Kota Tangerang Selatan

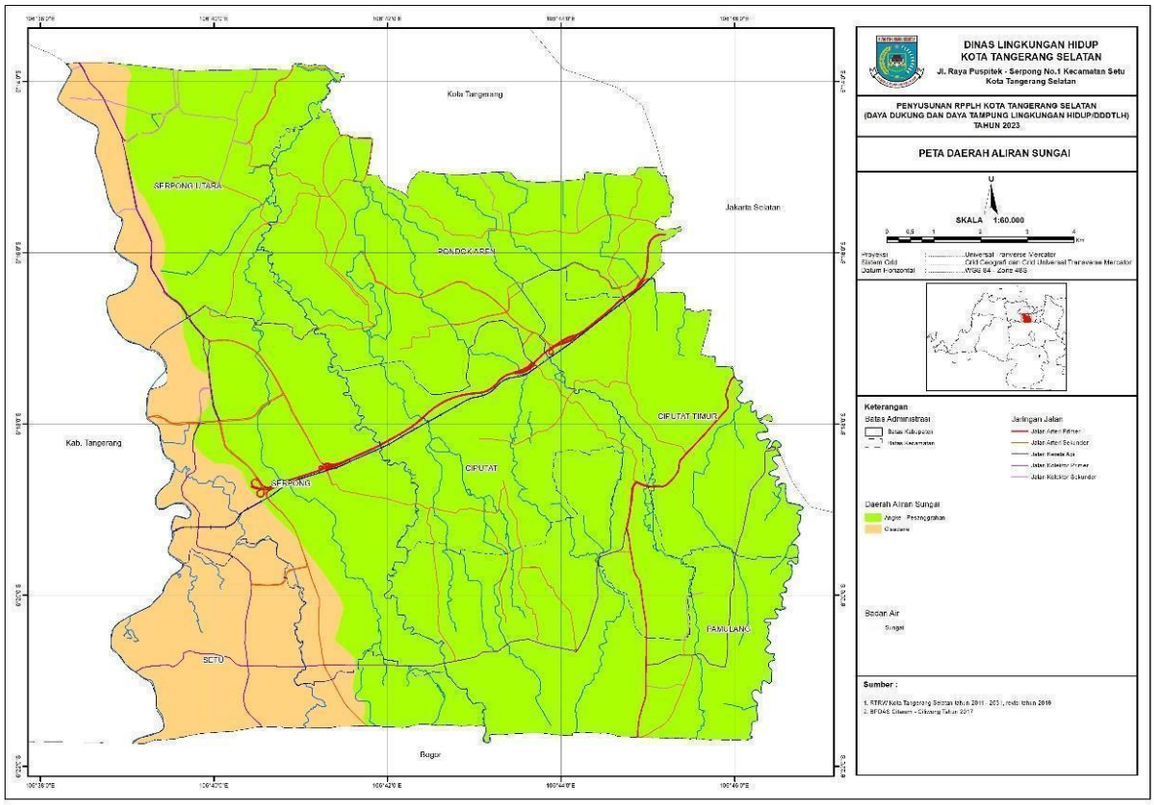
No	Nama Sungai	Panjang (km)	Debit (m^3/dtk)
1	Sungai Kali Angke	+ 62,5	2,62
2	Sungai Cisadane	+ 122	76,22
3	Sungai Pesanggrahan	+ 71,8	1,53

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Tabel II.9. Data Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Tangerang Selatan

Kecamatan	Nama Daerah Aliran Sungai	Luas (ha)
Ciputat	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	2.115,80
Ciputat Timur	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	1.784,02
Pamulang	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	2.868,36
Pondok Aren	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	2.977,62
Serpong	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	1.950,50
	Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane	893,35
Serpong Utara	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	1.645,75
	Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane	571,79
Setu	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	300,88
	Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane	1.377,44
Jumlah		**16.485,52**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Gambar II.8. Peta DAS di Wilayah Kota Tangerang Selatan
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal Coliform, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Berdasarkan hasil pemantauan air sungai di Kota Tangerang Selatan yang dilakukan pada 25 titik pantau, terdapat sebanyak 20 titik pantau menunjukkan nilai status mutu air dengan kategori memenuhi baku mutu dan sebanyak 5 titik pantau dengan kategori cemar ringan, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.10**.

Tabel II.10. Indeks Pencemaran dan Status Mutu Air Sungai Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

No	Nama Aliran	Pij	Kategori
1	Kali Jalentreng Tengah	0,954	Memenuhi BM
2	Kali Jalentreng Hulu	0,800	Memenuhi BM
3	Kali Jalentreng Hilir	0,755	Memenuhi BM
4	Kali Cisalak Hulu	1,084	Cemar Ringan
5	Kali Cisalak Hilir	0,715	Memenuhi BM
6	Sungai Cisadane Hulu	0,709	Memenuhi BM
7	Sungai Cisadane Tengah I	0,746	Memenuhi BM
8	Sungai Cisadane Tengah Ii	0,655	Memenuhi BM
9	Sungai Cisadane Hilir	0,586	Memenuhi BM
10	Sungai Angke Hulu	0,748	Memenuhi BM
11	Sungai Angke Tengah 1	0,755	Memenuhi BM
12	Sungai Angke Hilir	0,765	Memenuhi BM
13	Sungai Pesanggrahan Hulu	0,762	Memenuhi BM
14	Sungai Pesanggrahan Tengah	0,899	Memenuhi BM
15	Sungai Pesanggrahan Hilir	0,725	Memenuhi BM
16	Kali Legoso Hulu	0,946	Memenuhi BM

No	Nama Aliran	Pij	Kategori
17	Kali Legoso Hilir	1,073	Cemar Ringan
18	Kali Cirompang Hulu	1,145	Cemar Ringan
19	Kali Cirompang Hilir	1,014	Cemar Ringan
20	Kali Ciledug Hulu	0,741	Memenuhi BM
21	Kali Ciledug Hilir	0,830	Memenuhi BM
22	Kali Kedaung Hulu	1,053	Cemar Ringan
23	Kali Kedaung Hilir	0,893	Memenuhi BM
24	Kali Baru Hulu	0,757	Memenuhi BM
25	Kali Baru Hilir	0,864	Memenuhi BM

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Pemantauan kualitas air selain dilakukan pada air sungai, juga dilakukan pada air danau/situ yang terdapat di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan memiliki 9 Situ, sebagaimana tertuang dalam **Tabel II.11**. Hasil pemantauan kualitas air situ terhadap 13 titik pantau air adalah sebanyak 5 titik pantau berkategori status mutu air memenuhi baku mutu dan sebanyak 8 titik pantau berkategori status mutu air cemar ringan, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.12**.

Tabel II.11. Lokasi dan Luas Situ di Kota Tangerang Selatan

No	Situ	Kecamatan	Luas Situ (ha)
1	Situ Legoso/Situ Kuru	Ciputat Timur	0,54
2	Situ Pamulang	Ciputat dan Pamulang	25,8
3	Situ Bungur	Ciputat Timur	2,91
4	Situ Rompong	Ciputat Timur	1,77
5	Situ Parigi	Pondok Aren	4,14
6	Situ Ciledug	Pamulang	23,05
7	Situ Kayu Antap	Ciputat Timur	1,64
8	Situ Pondok Jagung/Rawa Kutuk	Serpong Utara	7,59
9	Bendungan Gintung	Ciputat Timur	22,57

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Tabel II.12. Indeks Pencemar dan Status Mutu Air pada Situ di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

No	Nama Aliran	Pij	Kategori
1	Situ Ciledug Inlet	1,021	Cemar Ringan
2	Situ Sasak Inlet	1,036	Cemar Ringan
3	Situ Perigi Inlet	0,955	Memenuhi BM
4	Situ Pondok Jagung Inlet	1,047	Cemar Ringan
5	Situ Pondok Jagung Outlet	0,933	Memenuhi BM
6	Situ Bungur Inlet	1,055	Cemar Ringan
7	Situ Bungur Outlet	1,039	Cemar Ringan
8	Situ Rompang Inlet	1,121	Cemar Ringan
9	Situ Rompang Outlet	1,015	Cemar Ringan
10	Situ Gintung Inlet	0,816	Memenuhi BM
11	Situ Gintung Outlet	0,787	Memenuhi BM
12	Situ Kuru Inlet	1,548	Cemar Ringan
13	Situ Kuru Outlet	0,951	Memenuhi BM

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

2.1.1.6. Geologi

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang relatif datar, adapun pada beberapa Kecamatan terdapat lahan yang bergelombang seperti di perbatasan antara Kecamatan Setu dan Kecamatan Pamulang, serta sebagian di Kecamatan Ciputat Timur. Kondisi Geologi Kota Tangerang Selatan umumnya adalah batuan alluvial, yang terdiri dari batuan lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah. Berdasarkan klasifikasi dari *United Soil Classification System*, batuan ini mempunyai kemudahan dikerjakan atau *work ability* yang baik sampai sedang, unsur ketahanan terhadap erosi cukup baik, sehingga wilayah Kota Tangerang Selatan masih cukup layak untuk kegiatan perkotaan. Pada konteks wilayah kota Tangerang Selatan, informasi karakteristik geologi dan jenis tanah berguna untuk menilai kelayakan pembangunan konstruksi infrastruktur permukiman wilayah perkotaan, kelayakan sipil bangunan, serta untuk menekan risiko dari aktivitas pembangunan yang ditimbulkannya serta mitigasi bencana. Pemahaman terhadap sebaran geologi menjadi landasan penting dalam pengelolaan ruang wilayah Kota Tangerang Selatan secara berkelanjutan. Sebagai contoh, wilayah dengan dominasi kipas aluvial dan aluvial memiliki kerentanan terhadap gedangan, erosi, dan potensi penurunan muka tanah bila tidak dikelola secara tepat. Sedangkan kawasan dengan formasi batuan keras (formasi bojongmanik, formasi serpong, tuff banten, batuan gunungapi muda) dapat dijadikan zona pengembangan infrastruktur berat dan kawasan lindung sesuai daya dukung. Data distribusi luas kelas geologi litologi wilayah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada **Tabel II.13.**

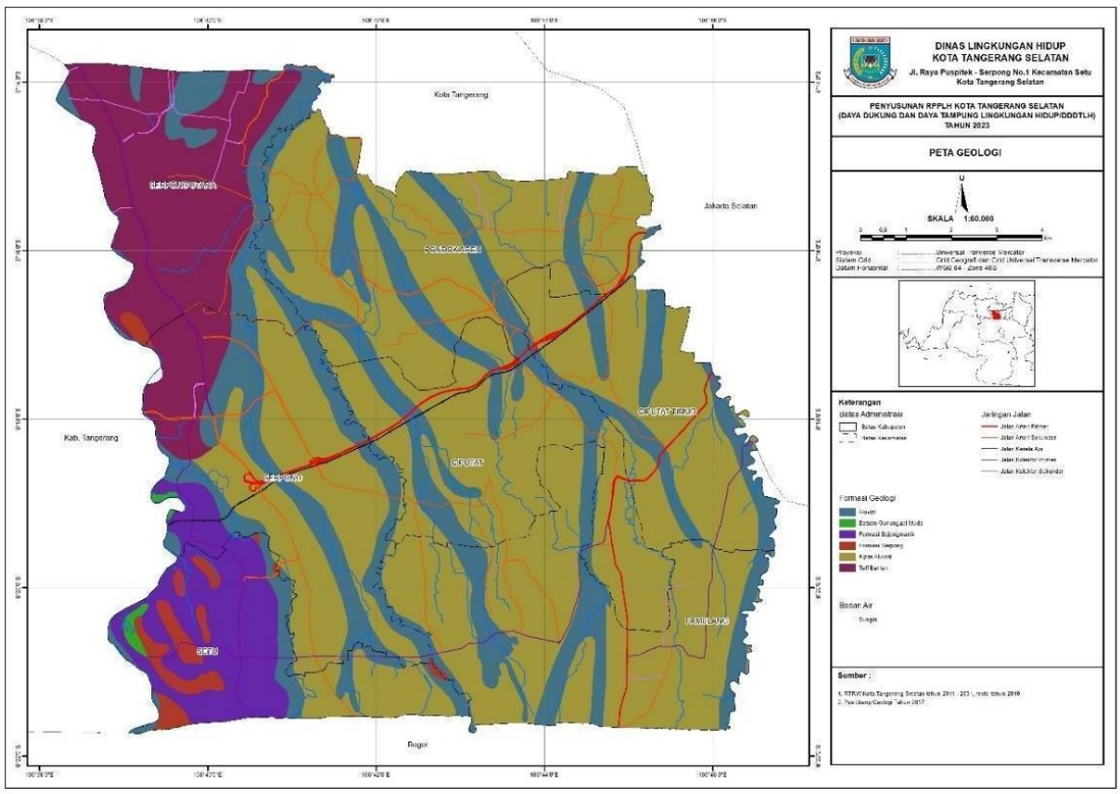
Tabel II.13. Distribusi Luas Kelas Geologi Litologi Wilayah Kota Tangerang Selatan

Kecamatan	Formasi	Luas (ha)
Ciputat	Aluvial	684,79
	Kipas Aluvial	1.662,20
Ciputat Timur	Aluvial	452,40
	Kipas Aluvial	1.331,62
Pamulang	Aluvial	399,04
	Formasi Serpong	3,42
	Kipas Aluvial	2.234,71
Pondok Aren	Aluvial	809,63
	Kipas Aluvial	2.168,00
Serpong	Aluvial	835,90
	Batuan gunungapi muda	10,37
	Formasi Bojongmanik	155,49
	Formasi Serpong	5,11
	Kipas Aluvial	1.423,48
	Tuff Banten	413,49
Serpong Utara	Aluvial	468,72
	Formasi Serpong	25,83
	Kipas Aluvial	57,08
	Tuff Banten	1.665,92
Setu	Aluvial	229,98
	Batuan gunungapi muda	28,09
	Formasi Bojongmanik	862,83
	Formasi Serpong	229,11
	Kipas Aluvial	328,31
Jumlah		**16.485,52**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Merujuk pada Peta Geologi Kota Tangerang Selatan (**Gambar II.9**), bagian timur dan tengah Kota Tangerang Selatan, seperti Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang dan sebagian Pondok Aren dan Serpong Utara didominasi

oleh aluvial dan kipas aluvial. Berdasarkan karakteristiknya wilayah tersebut relatif datar dan berpotensi untuk permukiman dan pengembangan kawasan kota, namun rawan banjir dan penurunan tanah. Sementara bagian barat dan barat daya yaitu Serpong, Setu, dan sebagian Pondok Aren terdapat formasi batuan keras. Berdasarkan karakteristiknya wilayah tersebut cenderung lebih berbukit serta lebih cocok untuk konservasi, zona lindung atau pembangunan yang membutuhkan stabilitas tinggi. Adapun garis biru gelap yang tersebar di hampir seluruh wilayah, merupakan pola aliran sungai yang berperan penting dalam sistem drainase alami tetapi juga berpotensi menjadi zona rawan banjir atau genangan terutama di wilayah aluvial.



Gambar II.9. Peta Geologi Wilayah Kota Tangerang Selatan
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

2.1.2. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kota Tangerang Selatan merupakan kota yang memiliki posisi strategis secara geografis dan fungsional, karena berada di wilayah perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Letak ini menjadikan Kota Tangerang Selatan berperan penting dalam konstelasi pembangunan regional Provinsi Banten maupun dalam struktur ruang Nasional. Dalam konteks regional Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I dengan arahan fungsi dan peran sebagai penyangga kawasan Jabodetabek serta wilayah perbatasan daerah untuk pengembangan kegiatan jasa, perdagangan, permukiman atau perumahan dan pendidikan. Kota ini juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekunder yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten. Konstribusi ini terutama berasal dari sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, informasi dan komunikasi, *real estat* serta konstruksi. Keempat sektor ini menjadi motor utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah, mencerminkan karakteristik Kota Tangerang Selatan sebagai pusat bisnis, jasa, dan teknologi di wilayah metropolitan Jabodetabek.

Secara nasional, Kota Tangerang Selatan sebagai kawasan strategis nasional (KSN) Jabodetabekpunjur serta berstatus sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional dan beberapa Provinsi. Kota Tangerang Selatan termasuk dalam kawasan Budi Daya yang memiliki karakteristik sebagai kawasan dengan tingkat pelayanan sarana dan prasarana tinggi. Selain itu, Kota Tangerang Selatan juga ditetapkan sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Jakarta yang menjadi prioritas pengembangan wilayah nasional.

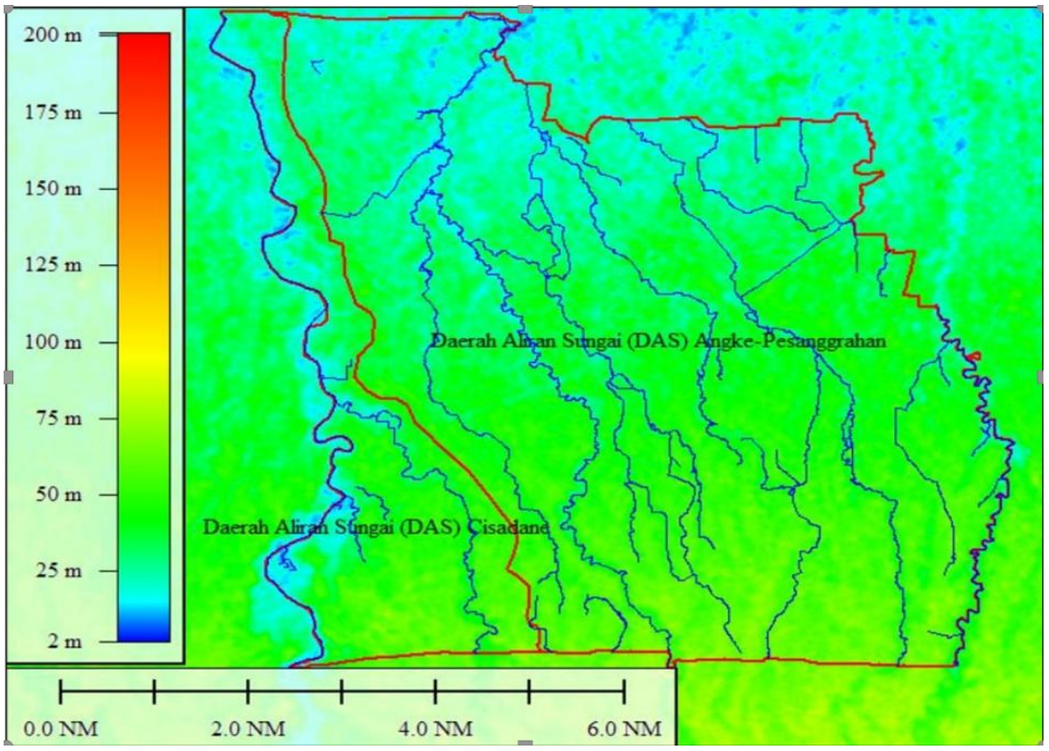
Kota Tangerang Selatan memiliki aksesibilitas dan konektivitas yang cukup baik. Kedekatannya dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadikan wilayah ini mudah untuk diakses. Kota Tangerang Selatan terhubung dengan berbagai infrastruktur transportasi utama, seperti Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) yang menghubungkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, serta Jalan Tol Kunciran–Serpong, Jalan Tol Tangerang–Merak dan koridor Jalan Kolektor Primer Provinsi Banten. Tangerang selatan juga dilayani jaringan perkeretaapian *Commuter Line* Tanah Abang-Rangkas Bitung yang menghubungkan Jakarta-Banten. Akses tersebut mendukung peran strategis Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabek-Punjur, terutama dalam menunjang kegiatan perdagangan, jasa, dan permukiman skala besar yang terintegrasi dalam Kawasan Aglomerasi Jakarta.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyediakan sumber daya alam (air, udara, tanah, bahan pangan) bagi populasi makhluk hidup tanpa menyebabkan degradasi, sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap dan memulihkan diri dari dampak aktivitas manusia (limbah, polusi, kerusakan ekosistem). Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah batas alam yang harus dijadikan acuan untuk pembangunan berkelanjutan.

2.1.3.1. Daya Dukung Air

Secara umum, terdapat 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melewati Kota Tangerang Selatan yaitu DAS Angke-Pesanggrahan dan DAS Cisadane yang terbagi dalam beberapa sub DAS sebagaimana tersaji dalam **Gambar II.10** dan **Tabel II.14**.



Gambar II.10. Peta DAS di Kota Tangerang Selatan
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Tabel II.14. Pembagian Sub-DAS di Kota Tangerang Selatan

No	Sub DAS	Luas (km²)
1	Sub-DAS Pesanggrahan	17,639
2	Sub-DAS Ciputat	27,259
3	Sub-DAS Cibenda	44,374
4	Sub-DAS Angke	48,592
5	Sub-DAS Cisadane	26,99

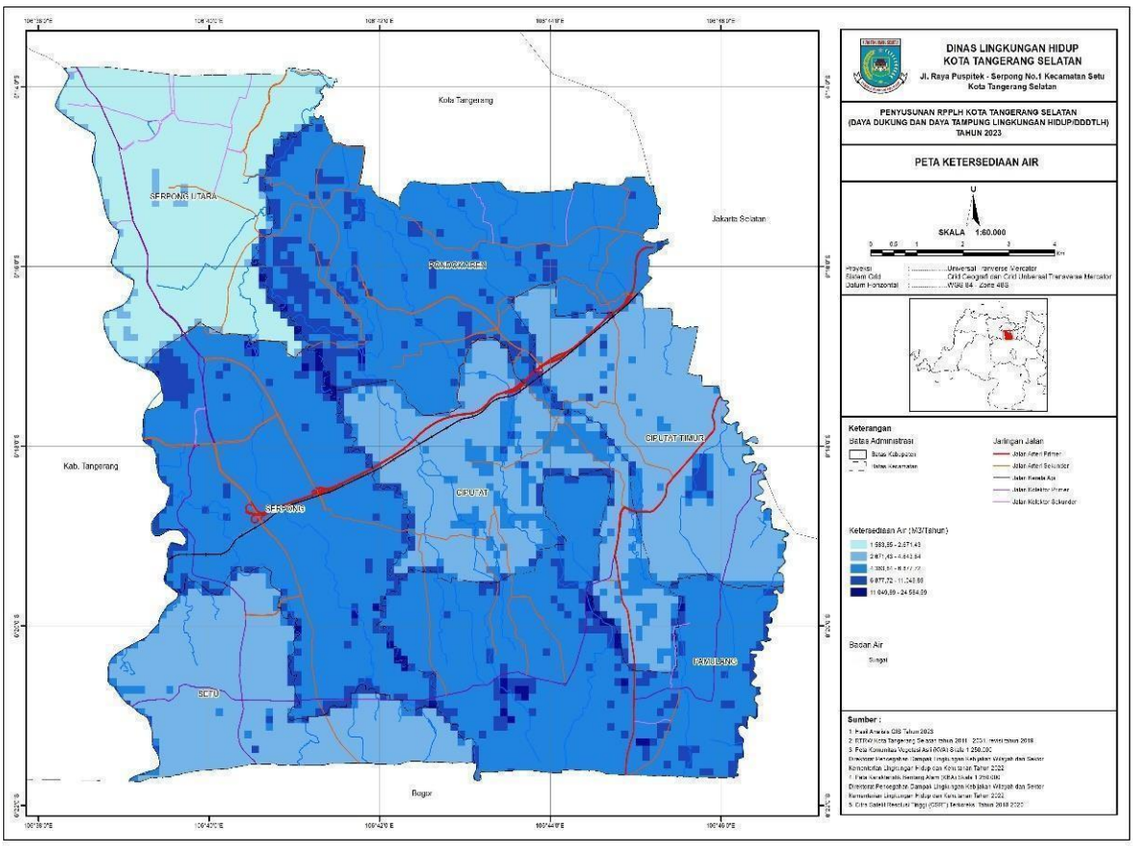
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Ketersediaan air di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 sebesar 35,69 juta m³/tahun. Jumlah ini memberikan gambaran umum mengenai total volume air yang dapat dimanfaatkan di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan dalam satu tahun. Jika ditinjau ketersediaan air per Kecamatan sebagaimana tersaji dalam **Tabel II.15**, terlihat bahwa distribusi ketersediaan air antar kecamatan cukup timpang, dengan jumlah ketersediaan air tertinggi di Kecamatan Pondok Aren (8,09 juta m³/tahun), Pamulang (7,46 juta m³/tahun), dan Serpong (7,37 juta m³/tahun), sedangkan ketersediaan air terendah tercatat di Serpong Utara (1,80 juta m³/tahun), Setu (2, 53 juta m³/tahun), dan Ciputat Timur (3,21 juta m³/tahun). Data tersebut menandakan bahwa walaupun Kota Tangerang Selatan memiliki potensi air yang cukup besar namun distribusinya tidak merata. Ketersediaan air dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti curah hujan, kondisi sumber air pemukaan (sungai, waduk, situ, tandon) sebagai penyedia air utama, kuantitas dan kedalaman aquifer serta kemampuan tanah menyerap hujan untuk mengisi cadangan air tanah. Ketersediaan air per Kecamatan secara spasial disajikan dalam **Gambar II.11**.

Tabel II.15. Ketersediaan Air di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Kecamatan	Total Ketersediaan Air (m³/tahun)
Ciputat	5.229.120,43
Ciputat Timur	3.208.884,14
Pamulang	7.464.630,43
Pondok Aren	8.089.833,77
Serpong	7.370.828,39
Serpong Utara	1.798.631,56
Setu	2.528.461,16
Jumlah	**35.690.389,88**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Gambar II.11. Peta Ketersediaan Air Kota Tangerang Selatan Tahun 2023
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Kebutuhan air terdiri dari kebutuhan domestik dan kebutuhan berbasis lahan. Perhitungan kebutuhan air berbasis lahan menggunakan data spasial tutupan lahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (produksi). Adapun total kebutuhan air di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dalam **Tabel II.16**.

Tabel II.16. Total Kebutuhan Air Kota Tangerang Selatan (Liter/detik)

No	Kecamatan	Kebutuhan Air Domestik (Liter/Detik)	Kebutuhan Air Berbasis Lahan (Liter/Detik)	Total Kebutuhan Air (Liter/Detik)
1	Setu	123,16	252,26	375,42
2	Serpong	221,22	175,15	396,37
3	Pamulang	432,21	139,99	572,20
4	Ciputat	296,22	143,33	439,55

No	Kecamatan	Kebutuhan Air Domestik (Liter/Detik)	Kebutuhan Air Berbasis Lahan (Liter/Detik)	Total Kebutuhan Air (Liter/Detik)
5	Ciputat Timur	240,43	87,08	337,51
6	Pondok Aren	412,03	262,47	674,49
7	Serpong Utara	189,27	153,40	342,67
Total		**1.914,54**	**1.223,68**	**3.138,22**

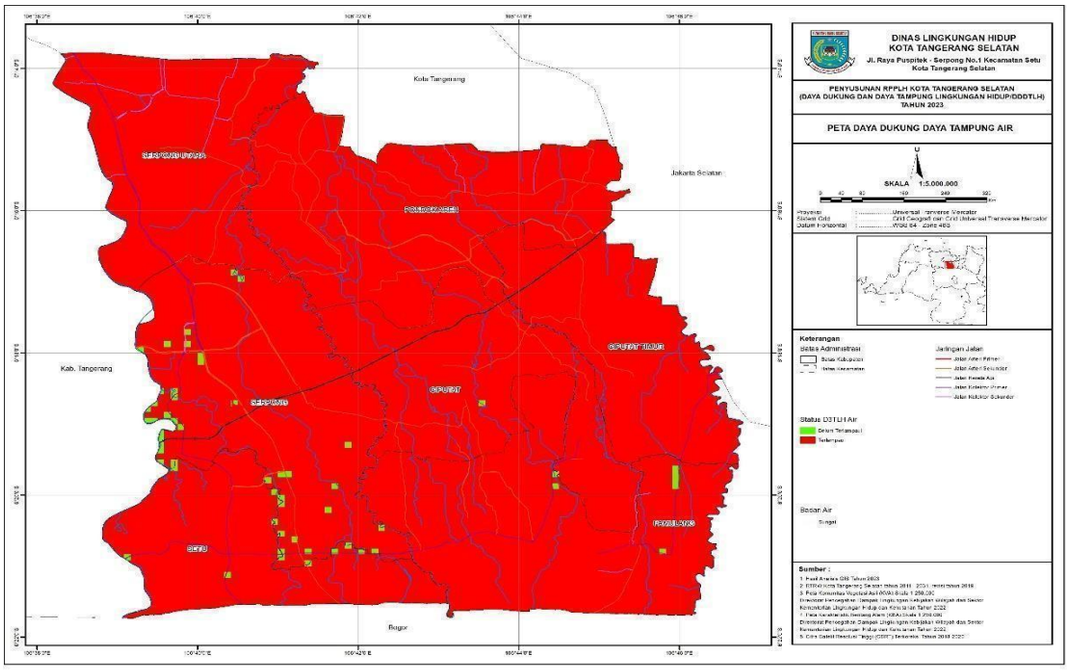
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Data pada **Tabel II.16** digunakan sebagai informasi dasar untuk membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan air sehingga dapat diketahui status daya dukung air pada suatu wilayah. Daya dukung air (*water carrying capacity*) mengacu pada kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan air bersih yang berkelanjutan bagi populasi dan aktivitas (pertanian, industri, rumah tangga) tanpa mengalami kelangkaan atau kerusakan ekosistem. Berdasarkan status daya dukung air per wilayah Kecamatan di Kota Tangerang Selatan sebagaimana tersaji dalam **Tabel II.17**, terlihat sebagian besar daya dukung dan daya tampung air pada seluruh kecamatan di Kota Tangerang Selatan telah terlampaui, dengan total pelampauan sebesar 99,22% dari luas wilayah Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan air melebihi dari ketersediaan air. Wilayah Kecamatan Ciputat, Pamulang, Serpong dan Setu, walaupun masih memiliki daya dukung dan daya tampung air dibandingkan wilayah Kecamatan lain, namun persentasenya sangat kecil. Gambaran daya dukung dan daya tampung air per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan secara spasial disajikan dalam **Gambar II.12**. Warna merah yang mendominasi peta mengindikasikan bahwa kapasitas lingkungan untuk menyerap, menyimpan, dan mengalirkan air secara alami telah melampaui batas kemampuannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya alih fungsi lahan dan minimnya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

Tabel II.17. Status Daya Dukung Daya Tampung Air Kota Tangerang Selatan per Kecamatan

Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase (%)
BELUM TERLAMPAUI	Ciputat	4,72	0,03
	Pamulang	16,52	0,10
	Serpong	102,02	0,62
	Setu	4,57	0,03
Jumlah		**127,84**	**0,78**
TERLAMPAUI	Ciputat	2.440,94	14,81
	Ciputat Timur	1.795,11	10,89
	Pamulang	2.740,64	16,62
	Pondok Aren	2.951,39	17,90
	Serpong	2.759,57	16,74
	Serpong Utara	2.110,61	12,80
	Setu	1.559,42	9,46
Jumlah		**16.357,68**	**99,22**
Total		**16.485,52**	**100,00**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Gambar II.12. Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

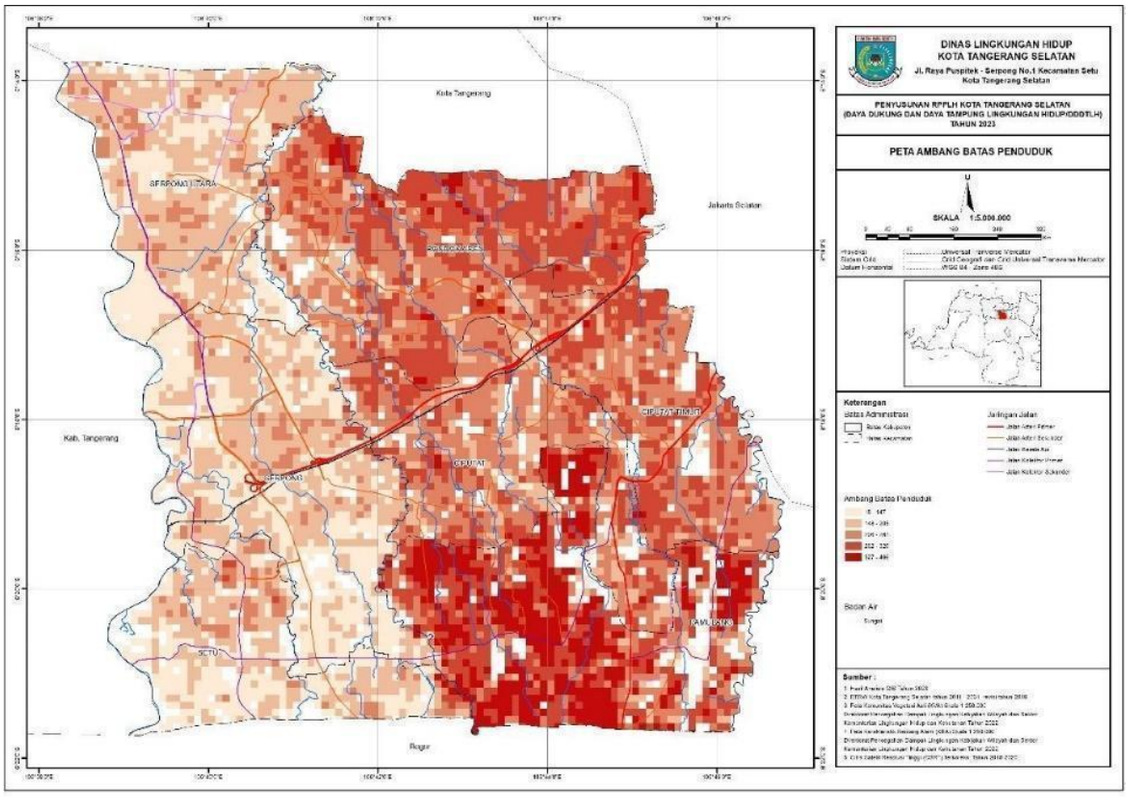
Salah satu faktor yang memengaruhi daya dukung air pada suatu wilayah adalah penggunaan air yang berhubungan dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas penduduk yang membutuhkan air. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk maka kebutuhan air akan meningkat. Berdasarkan kebutuhan air dan ketersediaan, dapat dihitung ambang batas penduduk Kota Tangerang Selatan yang dapat didukung kebutuhan airnya sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.18** dan digambarkan dalam **Gambar II.13**.

Mengacu pada jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2022 sebesar 1.378.466 jiwa, maka selisih ambang batas penduduk Kota Tangerang Selatan yang masih dapat dipenuhi kebutuhan airnya adalah sebesar 39.001 jiwa. Jika dianalisis terhadap jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2024 sebesar 1.429.530 jiwa maka ambang batas penduduk yang dapat terpenuhi kebutuhan airnya telah terlampaui. Hal ini perlu diwaspadai di masa mendatang di mana kondisi ketersediaan air yang ada tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan air.

Tabel II.18. Ambang Batas Penduduk Kota Tangerang Selatan Per Kecamatan

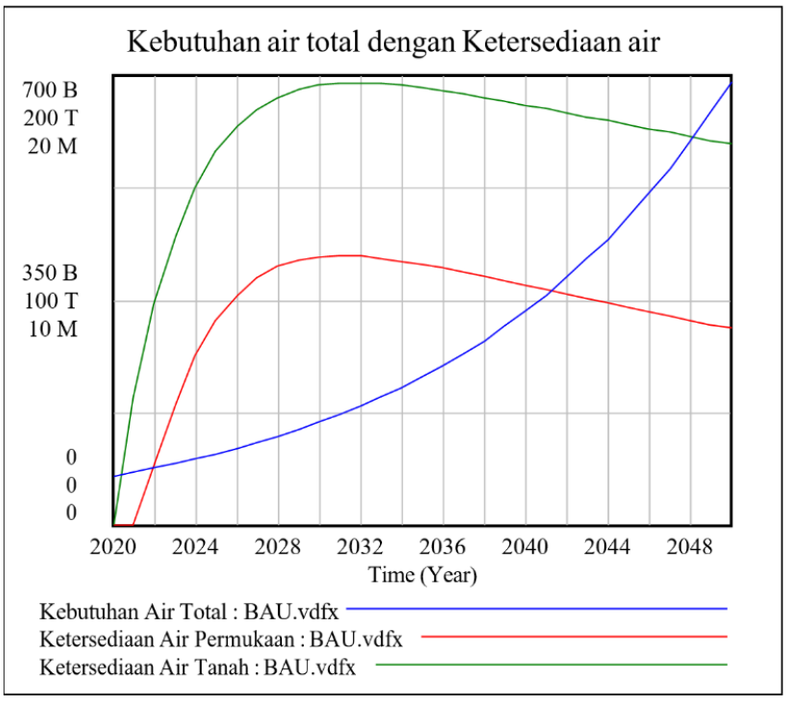
Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Ambang Batas Penduduk (Jiwa)	Selisih Ambang Batas (jiwa)
Ciputat	213.275	219.060	5.785
Ciputat Timur	173.110	176.551	3.441
Pamulang	311.189	319.094	7.905
Pondok Aren	296.659	305.799	9.140
Serpong	159.281	167.716	8.435
Serpong Utara	136.276	138.163	1.887
Setu	88.676	91.084	2.408
Jumlah	**1.378.466**	**1.417.467**	**39.001**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Gambar II.13. Peta Ambang Batas Penduduk Kota Tangerang Selatan
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan analisa sistem dinamik dalam KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan dalam **Gambar II.14**, terlihat bahwa kebutuhan air total semakin meningkat di Kota Tangerang Selatan tiap tahunnya hingga tahun 2048. Sementara itu, ketersediaan air tanah dan air permukaan sangat rendah dan cenderung menurun dengan lambat hingga tahun 2048. Dari hasil analisis sistem dinamik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa isu ketersediaan air bersih menjadi isu pokok dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang ke depan.



Gambar II.14. Proyeksi Perbandingan Kebutuhan Air Total dengan Ketersediaan Air

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

2.1.3.2. Daya Dukung Pangan

Banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung ketersediaan pangan salah satunya dengan memanfaatkan nilai kalori seluruh bahan pangan yang dihasilkan di dalam wilayah Kota Tangerang Selatan. Analisis daya dukung pangan dihitung menggunakan pertimbangan kecukupan lahan pertanian yang dikonversikan sebagai potensi produksi beras dan komoditas lainnya. Sedangkan nilai kebutuhan pangan dihitung berdasarkan populasi penduduk yang tinggal di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil konversi bahan pangan, maka ketersediaan pangan berdasarkan kalori bahan pangan di Kota Tangerang Selatan yaitu sekitar 505.101.987 kkal, sebagaimana terlihat pada **Tabel II.19**.

Tabel II.19. Ketersediaan Pangan berdasarkan Nilai Kalori Tahun 2023

No.	Jenis Produksi Komoditas	Kalori (kkal/100 gram)
1	Beras	2.878.074
2	Jagung	359.759
3	Kedelai	-
4	Kacang Tanah	215.856
5	Ubi Kayu	57.561.480
6	Ubi Jalar	-
7	Sayur	43.171.110
8	Buah Buahan	1.698.863
Total		**505.101.987**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Untuk perhitungan kebutuhan pangan didasarkan pada kalori, dihitung dengan menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) yang menggambarkan standar minimum gizi dari sisi kalori yang seyogyanya dipenuhi oleh

masyarakat Indonesia untuk hidup layak dan sehat seperti terlihat pada **Tabel II.20**.

Tabel II.20. Angka Kecukupan Energi Kota Tangerang Selatan

Umur Penduduk	AKE Laki (kkal)	AKE Perempuan (kkal)
0-9	1.650	0
10-14	2.400	2.050
15-19	2.650	2.100
20-24	2.650	2.250
25-29	2.650	2.250
30-34	2.550	2.150
35-39	2.550	2.150
40-44	2.550	2.150
45-49	2.550	2.150
50-54	2.150	1.800
55-59	2.150	1.800
60-64	2.150	1.800
65<	1.800	1.550

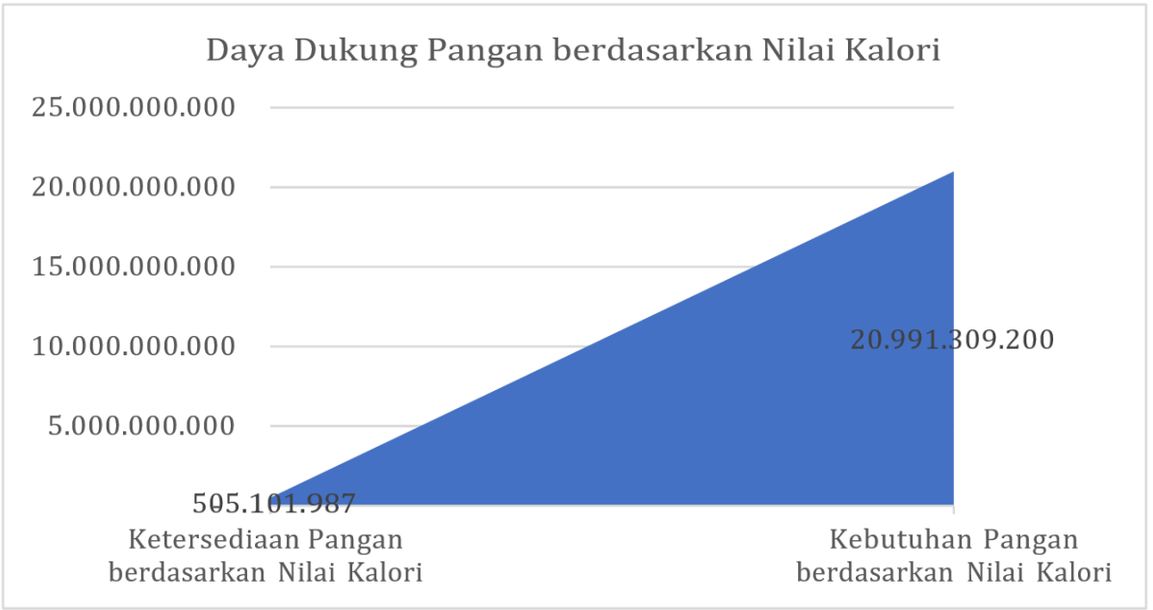
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Tabel II.21. Kebutuhan Pangan berdasarkan Nilai Kalori Tahun 2023

Kategori	Kebutuhan Pangan (kkal)
kanak-kanak (5-11 tahun)	1.284.605.100
remaja (12-25 tahun)	3.233.367.600
dewasa (26-45 tahun)	8.635.025.000
lansia (46-65 tahun)	7.838.311.500
Total	**20.991.309.200**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan pada Angka Kebutuhan Energi pada **Tabel II.20**, kebutuhan pangan di Kota Tangerang Selatan diperkirakan mencapai 20.991.309.200 kkal, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.21**. Jika dibandingkan dengan ketersediaan pangan pada **Tabel II.19** dapat disimpulkan bahwa ketersediaan pangan lokal hanya mencukupi sebagian kecil dari kebutuhan energi total sehingga ketahanan pangan Kota Tangerang Selatan sangat bergantung pada pasokan dari luar wilayah. Gambaran daya dukung pangan berdasarkan ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan disajikan dalam **Gambar II.15**.



Gambar II.15. Daya Dukung Pangan berdasarkan Nilai Kalori Tahun 2023
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan **Gambar II.15**, terlihat bahwa selisih ketersediaan dan kebutuhan pangan dari sisi kalori menunjukkan defisit pangan atau ketersediaan kalori jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhannya. Hal ini menunjukkan daya dukung pangan Kota Tangerang Selatan dari sisi kecukupan nilai kalori secara indikatif terlampaui. Dengan demikian, perlunya memaksimalkan ketersediaan logistik pangan dari daerah lain untuk memastikan kecukupan pangan di Kota Tangerang Selatan, karena Kota Tangerang Selatan tidak memiliki lahan pertanian. Sebagian besar pasokan komoditi pangan Kota Tangerang Selatan seperti beras, daging sapi dan daging ayam dipasok dari luar daerah. Untuk itu, sangat perlu untuk selalu memastikan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan terpenuhi di Kota Tangerang Selatan.

2.1.3.3. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup

Jasa lingkungan hidup sebagai salah satu metode yang direkomendasikan dalam untuk mengukur dan menentukan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) suatu wilayah. Pendekatan jasa lingkungan hidup ini diadopsi dari *Millenium Ecosystem Assessment* (MEA) yang diprakarsai oleh PBB / United Nations mulai tahun 2001. MEA bekerja dengan asumsi semakin tinggi jasa lingkungan hidup di suatu wilayah maka akan semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya. Pendekatan jasa lingkungan hidup ini dinilai berdasarkan kondisi ekoregion dan tutupan lahan (*land cover*) sebagai penaksir atau *proxy* penilaiannya. Jenis kelas ekoregion dan/atau kelas tutupan lahan tertentu akan memiliki kaitan nilai/derajat kepentingan yang berbeda dengan setiap jenis jasa lingkungan hidup yang dinilai. Informasi jasa lingkungan hidup yang disajikan merupakan data sekunder hasil analisis dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Jawa. Terdapat 6 (enam) jenis jasa lingkungan hidup, yakni jasa lingkungan hidup penyedia air bersih, jasa lingkungan hidup penyedia pangan, jasa lingkungan hidup pengaturan air, jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara, jasa lingkungan hidup pengaturan perlindungan banjir, dan jasa lingkungan hidup pengaturan iklim.

A. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga ketersediaannya menjadi penting. Ketersediaan *recharge area* di suatu daerah akan menjaga stabilitas pasokan air. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air merupakan gambaran kemampuan lingkungan dalam memberikan fungsi penyediaan air permukaan yang sepatutnya dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Indeks jasa lingkungan hidup penyedia air membahas hal-hal dalam kemampuan lingkungan untuk menyediakan air sebagaimana potensi manfaatnya agar dapat berperan dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup yang dapat dikategorikan di tiap daerah. Kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air di Kota Tangerang Selatan yang akan dianalisis adalah kondisi kinerja pada Tahun 2018. Kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh wilayah berkinerja rendah seluas 14.335,23 ha atau 89,69% dari total luasan Kota Tangerang Selatan, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.22** dan **Gambar II.16**. Data kondisi kinerja jasa lingkungan penyedia air per wilayah kecamatan di Kota Tangerang Selatan tersaji dalam **Tabel II.23** dan **Gambar II.17** di mana Kecamatan Serpong memiliki luasan tertinggi yang berkinerja rendah.

Tabel II.22. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018

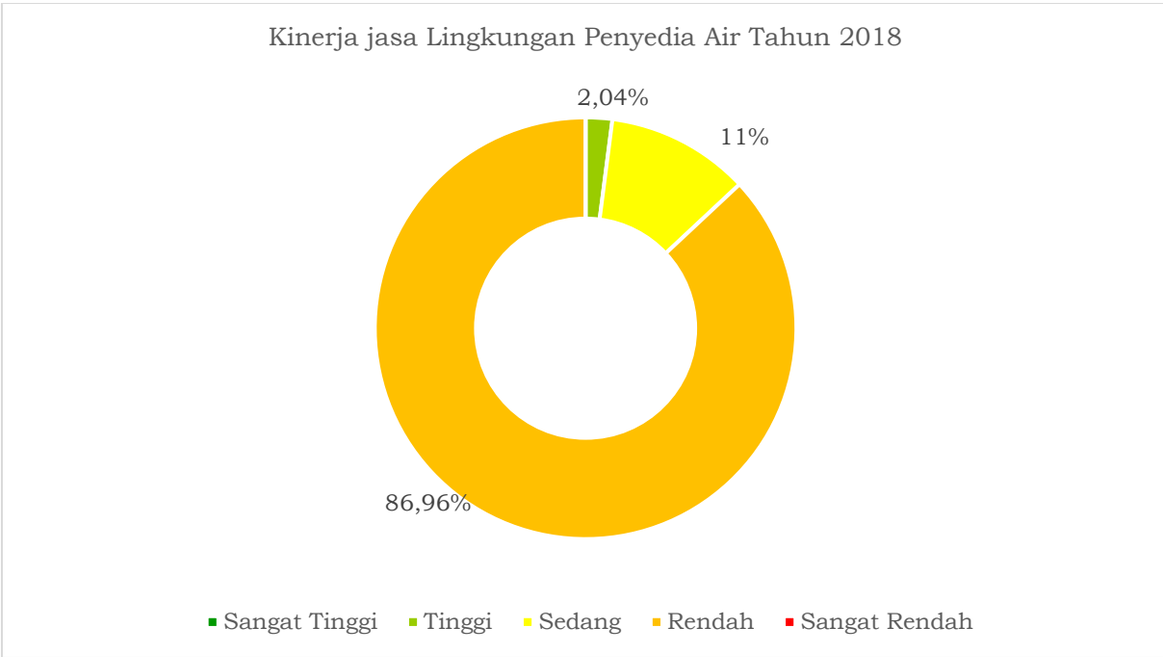
Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	336,19	2,04%
Tinggi	-	-
Sedang	1.814,09	11,00%
Rendah	14.335,23	86,96%
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	**16.485,52**	**100%**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

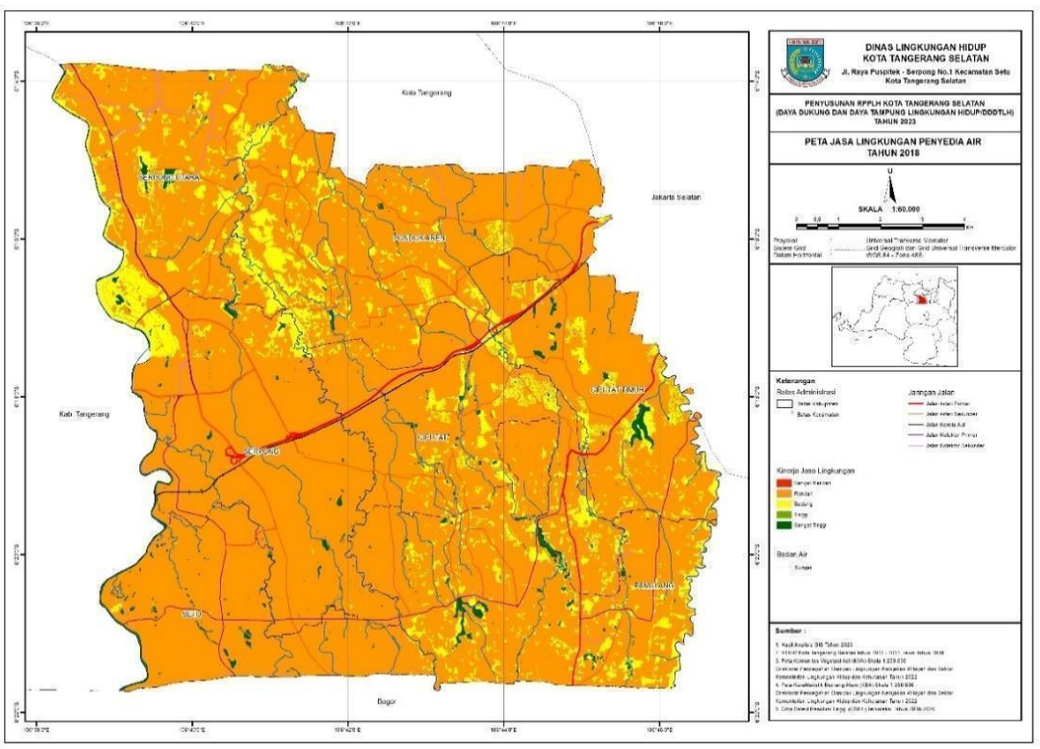
Tabel II.23. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Satuan	Klasifikasi					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	ha	27	-	264,3	1.824,60	-	2.115,80
	%	0,2	-	1,5	11,1	-	12,8
Ciputat Timur	ha	48,1	-	235,7	1.500,30		1.784,00
	%	0,3	-	1,4	9,1	-	10,8
Pamulang	ha	71	-	334,5	2.462,80	-	2.868,40
	%	0,4	-	2	15		17,4
Pondok Aren	ha	30,9	-	424,7	2.522,10		2.977,60
	%	0,2	-	2,6	15,3		18,1
Serpong	ha	57,6	-	122	2.664,30		2.843,80
	%	3	-	0,7	16,2		17,3
Serpong Utara	ha	53,8	-	424,2	1.739,60		2.217,60
	%	0,3	-	2,6	10,6		13,5
Setu	ha	47,9	-	8,8	1.621,70		1.678,30
	%	3	-	0,1	9,8		10,2
Jumlah Total	**ha**	**336,2**	**-**	**1.814,10**	**14.335,20**		**16.485,50**
	%	**2**	**-**	**11**	**87**		**100**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Gambar II.16. Proporsi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Gambar II.17. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air yang rendah perlu menjadi perhatian karena konsekuensinya akan terjadi penurunan ketersediaan air permukaan, sehingga masyarakat beralih melakukan ekstraksi air tanah yang berlebihan. Jika air tanah dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa melakukan *recharge*, kondisi tersebut dapat memicu terjadinya penurunan muka tanah/amblesan. Selain itu, air tanah diprioritaskan sebagai cadangan air yang diperuntukkan dalam kondisi kurang mendukung seperti kemarau panjang sehingga eksploitasi air tanah akan mengancam keberlanjutan cadangan air.

B. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Jasa lingkungan penyedia pangan merupakan jasa lingkungan yang menyediakan dukungan pangan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Penyediaan pangan tersebut dapat berupa langsung diperoleh dari alam dan dari hasil budidaya.

Kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia pangan di Kota Tangerang Selatan yang akan dianalisis adalah kondisi kinerja pada Tahun 2018. Kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia pangan di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh wilayah berkinerja rendah seluas 14.335,23 ha atau 89,69% dari total luasan Kota Tangerang Selatan, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.24**. Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum daya dukung ekologi untuk menyediakan pangan secara alami di Kota Tangerang Selatan tergolong sangat rendah, kemungkinan karena tekanan alih fungsi lahan, urbanisasi pesat dan minimnya lahan pertanian produktif.

Tabel II.24. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Tahun 2018

Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	293,90	1,78%
Tinggi	1844,39	11,19%
Sedang	11,99	0,07%
Rendah	14.335,23	86,96%
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	**16.485,52**	**100%**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Data kondisi kinerja jasa lingkungan penyedia air per wilayah kecamatan di Kota Tangerang Selatan tersaji dalam **Tabel II.25**.

Tabel II.25. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Satuan	Klasifikasi					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	Ha	26,9	262,5	1,8	1.824,60	-	2.115,80
	%	0,2	1,6	0	11,1		12,8
Ciputat Timur	Ha	30,2	248,8	4,8	1.500,30		1.784,00
	%	0,2	1,5	0	9,1	0	10,8
Pamulang	Ha	45,9	354,3	5,4	2.462,80		2.868,40
	%	0,3	2,1	0	14,9	0	17,4
Pondok Aren	Ha	30,9	424,7		2.522,10		2.977,60
	%	0,2	2,6	0	15,3	0	18,1
Serpong	Ha	57,9	121,7		2.664,30		2.843,80
	%	0,4	0,7	0	16,2	0	17,3
Serpong Utara	Ha	53,8	424,2		1.739,60		2.217,60
	%	0,3	2,6	0	10,6	0	13,5
Setu	Ha	48,3	8,3		1.621,70		1.678,30
	%	0,3	0,1	0	9,8	0	10,2
Jumlah Total	**Ha**	**293,9**	**1.844,40**	**12**	**14.335,20**		**16.485,50**
	%	**1,8**	**11,2**	**0,1**	**87**	**0**	**100**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Data pada **Tabel II.24** dan **Tabel II.25**, mengindikasikan bahwa Kota Tangerang Selatan bukan wilayah dengan fungsi produksi pangan utama

melainkan lebih condong ke fungsi konsumtif dan distribusi/logistik pangan. Kondisi tersebut menempatkan Kota Tangerang Selatan pada posisi sangat tergantung terhadap pasokan pangan dari wilayah lain sehingga diperlukan upaya perlindungan dan optimalisasi kantong-kantong lahan bernilai ekologis tinggi, baik melalui kebijakan ruang, peningkatan RTH produktif maupun penguatan ketahanan pangan perkotaan.

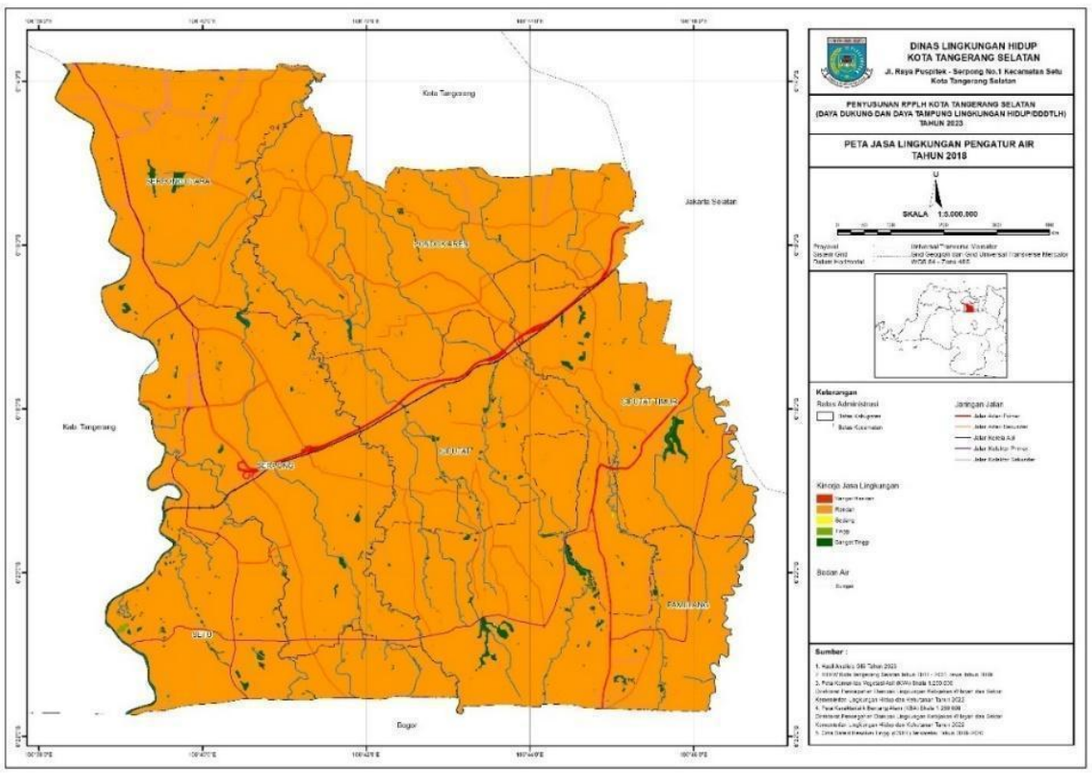
C. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air

Kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air merepresentasikan peran bentang alam dan penutupan lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala. Infiltrasi berkaitan dengan fungsi peresapan, sementara pelepasan air berkaitan dengan fungsi tata alir air dan *discharge*. Kondisi kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air di Kota Tangerang Selatan yang dianalisa adalah kinerja tahun 2018, di mana sebagian besar wilayah di Kota Tangerang Selatan memiliki kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air yang rendah, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.26** dan **Gambar II.18** Kecamatan Pondok Aren merupakan kecamatan dengan luasan wilayah tertinggi kategori kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air rendah sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.27**.

Tabel II.26. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2018

Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Air Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	336,19	2,04%
Tinggi	4,82	0,03%
Sedang	2,47	0,015%
Rendah	16.142,03	97,92%
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	**16.485,53**	**100%**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Gambar II.18. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2018
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Tabel II.27. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Satuan	Klasifikasi					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	Ha	26,96		0,46	2.088,37	-	2.115,80
	%	0,16	0	0	12,67		12,83
Ciputat Timur	Ha	48,06		0,63	1.735,34		1.784,03
	%	0,29	0	0	10,53	0	10,82
Pamulang	Ha	71,04	0,06	1,38	2.795,88		2.868,36
	%	0,43	0	0,01	16,96	0	17,4
Pondok Aren	Ha	30,88			2.946,75		2.977,63
	%	0,19	0	0	17,87	0	18,06
Serpong	Ha	57,56	0,63		2.785,65		2.843,84
	%	0,35	0	0	16,9	0	17,25
Serpong Utara	Ha	53,81	0,23		2.163,50		2.217,55
	%	0,33	0	0	13,12	0	13,45
Setu	Ha	47,88	3,9		1.626,54		1.678,32
	%	0,29	0,02	0	9,87	0	10,18
Jumlah Total	Ha	336,2	4,82	2,47	16.142,03		16.485,52
	%	**2,04**	**0,03**	**0,02**	**97,92**	**0**	**100**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

D. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara

Kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara merupakan representasi kapasitas ekosistem untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer. Indikator kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara dilihat berdasarkan luas penggunaan lahan yang bervegetasi (ha). Perbedaan tipe vegetasi turut memengaruhi fungsinya dalam melakukan serapan karbon untuk memperbaiki kualitas udara. Vegetasi mampu menangkap partikel dan menyerap gas penyebab polusi udara, seperti CO_2, SO_2, NO_2, dan sebagainya, terutama bila luas permukaan daunnya lebih besar (pohon lebat dan banyak). Penyerapan CO_2 oleh tumbuhan, tentunya juga mampu mengurangi efek perubahan iklim. Diperkirakan taman atau hutan kota mampu menyaring 85% partikel penyebab polusi. Sedangkan pohon besar di pinggir jalan bisa mengurangi 2/3 polusi yang ada (Duniadiny, 2015).

Kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara di Kota Tangerang Selatan yang dianalisis adalah kondisi kinerja tahun 2018, di mana sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan (16.126,40 ha atau 97,82% dari luas wilayah Kota) memiliki kondisi kinerja yang rendah. Kecamatan Pondok Aren merupakan kecamatan dengan luasan wilayah tertinggi yang kondisi kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udaranya rendah. Profil kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara tahun 2018 di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam **Tabel II.28**, **Tabel II.29** dan **Gambar II.19**.

Tabel II.28. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018

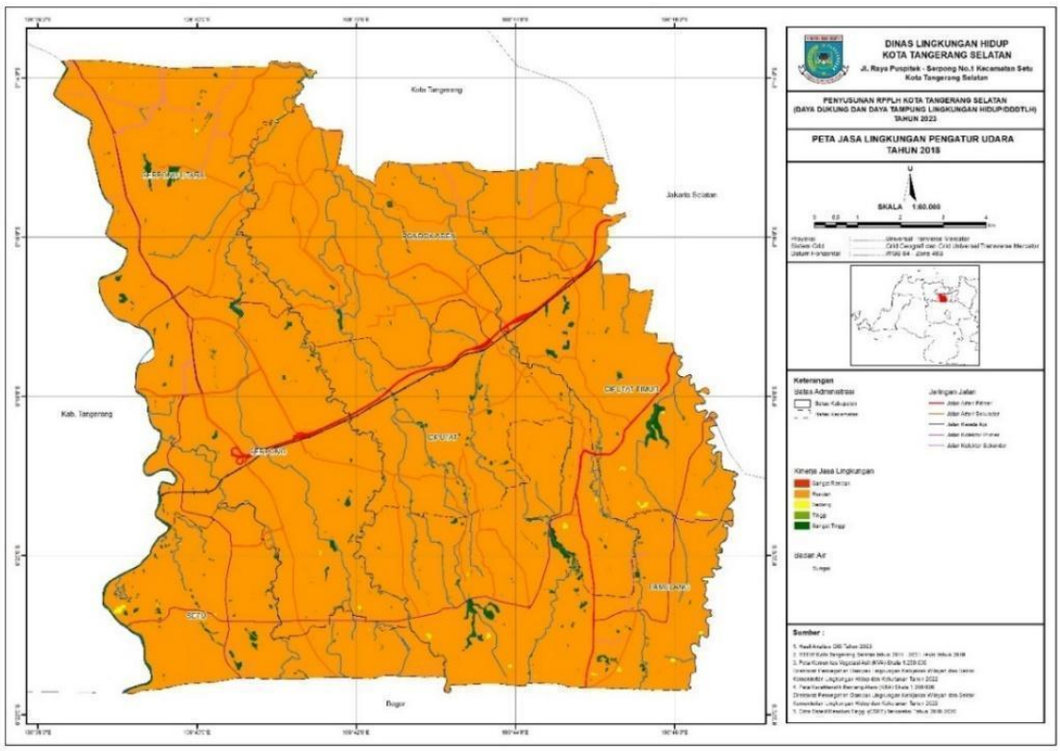
Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	336,19	2,04%
Tinggi	-	-
Sedang	22,92	0,14%
Rendah	16.126,40	97,82%
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	**16.485,52**	**100%**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Tabel II.29. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Satuan	Klasifikasi					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	ha	26,96		1,84	2.086,99	-	2.115,80
	%	0,16	0	0,01	12,66		12,83
Ciputat Timur	ha	48,06		4,78	1.731,18		1.784,02
	%	0,29	0	0,03	10,5	0	10,82
Pamulang	ha	71,04		6,65	2.790,67		2.868,36
	%	0,43	0	0,04	16,93	0	17,4
Pondok Aren	ha	30,88		0,36	2.946,39		2.977,63
	%	0,19	0	0	17,87	0	18,06
Serpong	ha	57,56		0,98	2.785,30		2.843,84
	%	0,35	0	0,01	16,9	0	17,25
Serpong Utara	ha	53,81		3,98	2.159,76		2.217,55
	%	0,33	0	0,02	13,1	0	13,45
Setu	ha	47,88		4,33	1.626,11		1.678,32
	%	0,29	0	0,03	9,86	0	10,18
Jumlah Total	ha	336,2		22,92	16.126,40		16.485,52
	%	**2,04**	**0**	**0,14**	**97,82**	**0**	**100**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Gambar II.19. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

E. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir

Perubahan terhadap bentang alam dari sisi geologi dan minimnya vegetasi, menyebabkan rendahnya tingkat kinerja jasa lingkungan hidup yang berfungsi sebagai pengatur mitigasi bencana banjir di Kota Tangerang Selatan. Hal ini dikarenakan bentang alam dan vegetasi alami telah berubah menjadi lahan hunian dan usaha, namun tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas yang dapat menggantikan fungsi mitigasi banjir.

Kinerja jasa lingkungan pengaturan perlindungan banjir di Kota Tangerang Selatan yang dianalisa adalah kinerja tahun 2018 di mana sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan idominasi kinerja jasa lingkungan rendah, yaitu sebesar 86,97% dari luas kota atau seluas 14.337,24 ha. Kecamatan Serpong merupakan kecamatan dengan luas wilayah tertinggi yang memiliki kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan perlindungan banjir yang rendah. Profil kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan perlindungan banjir tahun 2018 di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam **Tabel II.30**, **Tabel II.31** dan **Gambar II.20**.

Tabel II.30. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir Tahun 2018

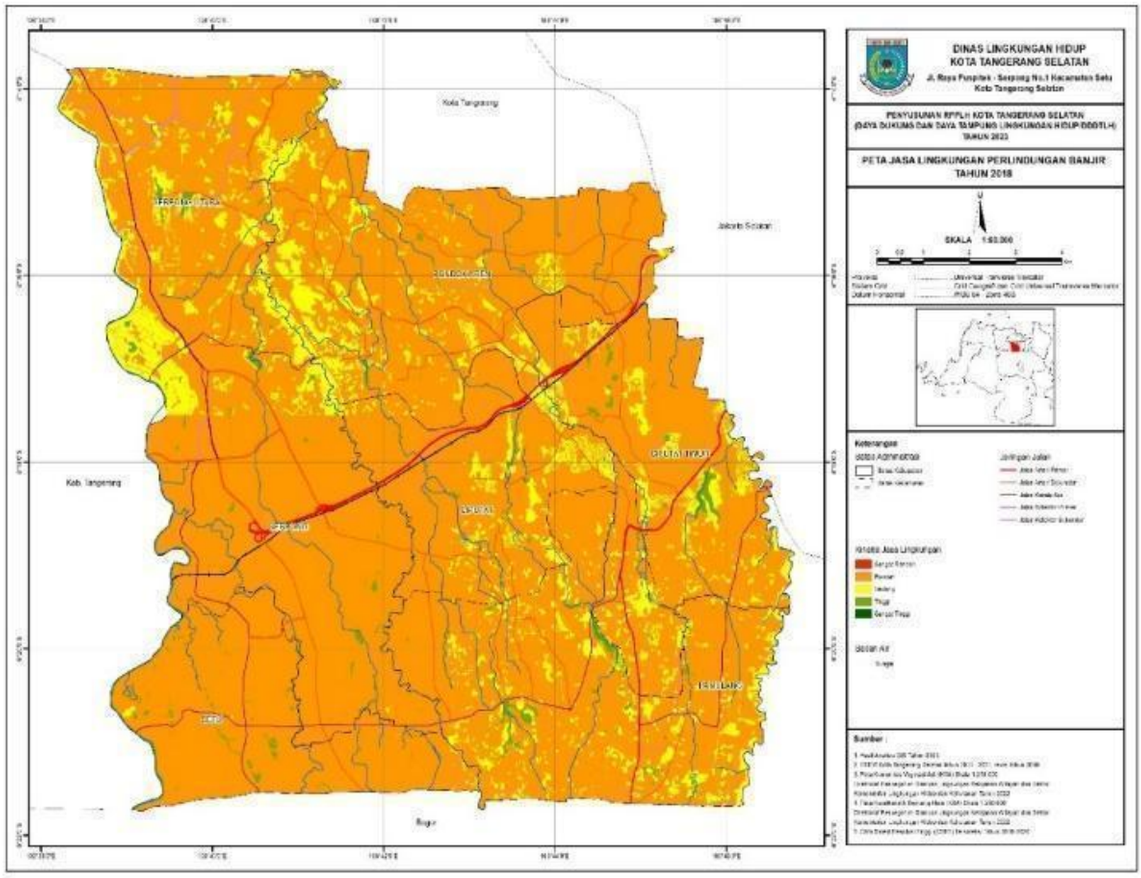
Kinerja Jasa Lingkungan Perlindungan Banjir Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	-	-
Tinggi	336,62	2,04%
Sedang	1.811,66	10,99%
Rendah	14.337,24	86,97%
Sangat Rendah	-	-
Jumlah	**16.485,52**	**100%**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Tabel II.31. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir Tahun 2018 berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Satuan	Klasifikasi					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	ha		27,39	263,84	1.824,57	-	2.115,80
	%	0	0,17	1,6	11,07		12,83
Ciputat Timur	ha		48,06	235,67	1.500,29		1.784,02
	%		0,29	1,43	9,1		10,82
Pamulang	ha		71,04	333,32	2.464,00		2.868,36
	%		0,43	2,02	14,95	0	17,4
Pondok Aren	ha		30,88	424,68	2.522,07		2.977,63
	%		0,19	2,58	15,3	0	18,06
Serpong	ha		57,56	121,65	2.664,63		2.843,84
	%	0	0,35	0,74	16,16	0	17,25
Serpong Utara	ha		53,81	424,17	1.739,57		2.217,55
	%	0	0,33	2,57	10,55	0	13,45
Setu	ha		47,88	8,33	1.622,11		1.678,32
	%	0	0,29	0,05	9,84	0	10,18
Jumlah Total	**ha**	**0**	**336,62**	**1.811,66**	**14.337,24**	**0**	**16.485,52**
	%	**0**	**2,04**	**10,99**	**86,97**	**0**	**100**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Gambar II.20. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Perlindungan Banjir Tahun 2018

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

F. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim

Kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan iklim merupakan kinerja lingkungan yang berkontribusi pada iklim lokal maupun global. Kinerja jasa lingkungan ini dipengaruhi oleh tutupan lahan yang bervegetasi diantaranya yaitu hutan, perkebunan, ruang terbuka hijau dan lain sebagainya. Semakin besar luas tutupan lahan yang bervegetasi dan semakin rapatnya vegetasi maka kinerja jasa lingkungan pengaturan iklim semakin baik. Hal ini terjadi semakin luas dan semakin rapatnya vegetasi maka luas bidang dedaunan yang melakukan evapotranspirasi semakin besar yang mana akan menghasilkan oksigen dan uap air. Uap air dan oksigen yang dihasilkan inilah yang menyebabkan lingkungan sekitar menjadi lebih sejuk dan lebih baik kualitasnya.

Kondisi kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan iklim di Kota Tangerang Selatan yang dianalisis adalah kondisi kinerja tahun 2018, di mana sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan seluas 14.333,41 ha atau sebesar 86,95% dari luas kota memiliki kinerja sangat rendah. Kecamatan Serpong merupakan kecamatan dengan luas wilayah tertinggi yang memiliki kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan iklim sangat rendah. Profil kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan iklim tahun 2018 di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam **Tabel II.32**, **Tabel II.33** dan **Gambar II.21**.

Tabel II.32. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Tahun 2018

Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Tahun 2018	Luas (ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	44,30	0,27%
Tinggi	294,36	1,79%
Sedang	1.809,62	10,98%
Rendah	3,83	0,02%
Sangat Rendah	14.333,41	86,95%
Jumlah	**16.485,52**	**100%**

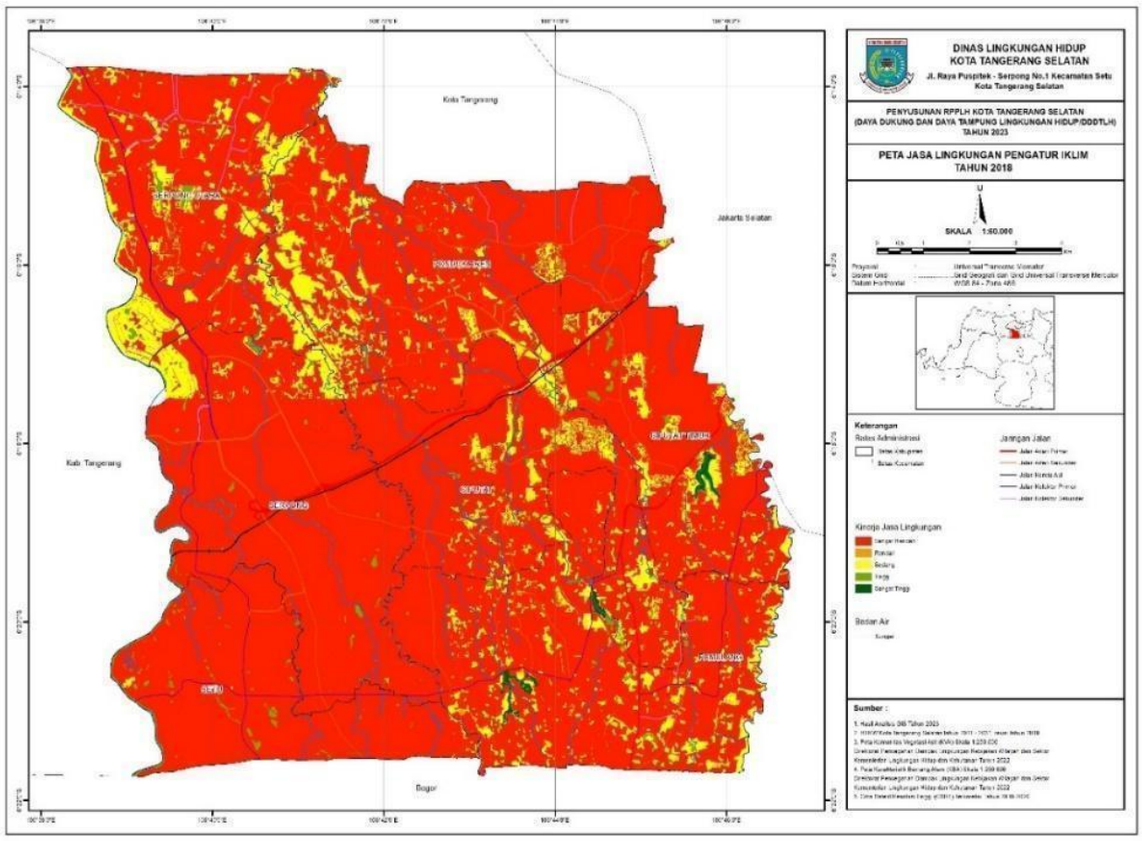
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Tabel II.33. Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Tahun 2018 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Satuan	Klasifikasi					Total (ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Ciputat	ha	0,03	27,4	263,8		1.824,57	2.115,80
	%	0	0,17	1,6	0	11,07	12,83
Ciputat Timur	ha	17,89	30,79	235,04	0,11	1.500,19	1.784,02
	%	0,11	0,19	1,43	0	9,1	10,82
Pamulang	ha	26,37	46,04	331,94	2,94	2.461,06	2.868,35
	%		0,28	2,01	0,02	14,93	17,24
Pondok Aren	ha		30,88	424,68		2.522,07	2.977,63
	%		0,19	2,58	0	15,3	18,06
Serpong	ha		57,56	121,65	0,35	2.664,28	2.843,84
	%	0	0,35	0,74	0	16,16	17,25
Serpong Utara	ha		53,81	424,17	0	1.739,57	2.217,55
	%	0	0,33	2,57	0	10,55	13,45

Kecamatan	Satuan	Klasifikasi					Total (ha)
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Setu	ha		47,88	8,33	0,43	1.621,67	1.678,31
	%	0	0,29	0,05	0	9,84	10,18
Jumlah Total	**ha**	**44,29**	**294,36**	**1.809,61**	**3,83**	**14.333,41**	**16.485,50**
	%	**0,27**	**1,79**	**10,98**	**0,02**	**86,95**	**100**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029



Gambar II.21. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim Tahun 2018
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita adalah perbandingan antara jumlah penjualan tenaga listrik dibagi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah (mengacu pada Statistik Ketenagalistrikan Kementerian ESDM). Akses terhadap listrik sangat penting untuk berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Konsumsi listrik per kapita yang tinggi dapat mengindikasikan akses yang lebih baik terhadap layanan listrik. Indikator konsumsi listrik per kapita dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, bahkan seringkali mengindikasikan tingkat industrialisasi dan urbanisasi yang tinggi di suatu wilayah. Berdasarkan **Tabel II.34**, konsumsi listrik per kapita Kota Tangerang Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan membutuhkan pasokan listrik yang besar untuk mendukung

kegiatan produksi, transportasi, dan layanan publik karena akses masyarakat terhadap listrik sangat tinggi. Wilayah dengan konsumsi listrik per kapita tinggi biasanya memiliki ekonomi yang berkembang pesat, yang mendorong penggunaan energi yang lebih banyak, baik untuk industri, rumah tangga, maupun sektor lainnya.

Tabel II.34. Konsumsi Listrik per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan	1.354.350	1.365.688	1.378.466	1.404.785	1.429.530
Penjualan Tenaga Listrik (Listrik Terjual)	3.528.809.547	3.532.482.350	NA	4.036.739.986	4.444.366.496
Konsumsi Listrik Per Kapita Kota Tangerang Selatan	**2.605,54**	**2.586,60**	**NA**	**2.873,56**	**3.108,97**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024 (diolah)

2.1.4.2. Ketersediaan Air Baku

Ketersediaan air baku di Kota Tangerang Selatan untuk kebutuhan air minum masyarakat dipenuhi oleh Sungai Cisadane dan Kali Angke. Sungai Cisadane merupakan DAS terbesar yang melewati Kota Tangerang Selatan dan menjadi sumber utama air baku. Sungai ini memiliki panjang sekitar 73 km dengan lebar rata-rata 103,3 meter. Debit maksimumnya mencapai 950.000 liter per detik, sedangkan debit minimumnya sekitar 67.000 liter per detik. Sungai Cisadane merupakan salah satu sungai penting di Provinsi Banten dan Jawa Barat, dengan sumber air yang berasal dari Gunung Salak-Pangrango di Kabupaten Bogor. Aliran sungai ini sangat bergantung pada curah hujan, sehingga debit air meningkat pada musim hujan dan berkurang pada musim kemarau. Air dari Sungai Cisadane diambil melalui beberapa titik Intake yang tersebar di berbagai lokasi. WTP Tirta Traya memiliki kapasitas pengambilan terbesar dari sungai ini, yaitu sebesar 3.500 L/det, yang menjadi sumber utama penyediaan air bagi wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya. Selain itu, WTP Sempora juga menggunakan Sungai Cisadane dengan kapasitas pengambilan sebesar 400 L/det, mendukung kawasan BSD yang berkembang. WTP Alam Sutera yang juga memanfaatkan Sungai Cisadane mengambil air dengan kapasitas sebesar 95 L/det, melayani kebutuhan air di kawasan perumahan dan komersial Alam Sutera

Selain Sungai Cisadane, Kali Angke juga menjadi sumber air permukaan yang penting. Meskipun sungai ini tidak pernah kering selama musim kemarau karena berhulu di wilayah pegunungan di Bogor, sungai ini mengalami pencemaran yang cukup tinggi, terutama dari limbah domestik di sekitar aliran sungai. Selain itu, terdapat defisit air pada bulan-bulan kering seperti Agustus hingga Oktober. Air dari Kali Angke dimanfaatkan oleh PT. Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) dan PT. Jaya Real Property.

Data ketersediaan air baku yang bersumber dari Sungai Cisadane dan Kali Angke berdasarkan neraca air tahun 2021-2023 disajikan dalam **Tabel II.35**, di mana terlihat bahwa ketersediaan air pada kedua sungai tersebut cenderung menurun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan

diversifikasi sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum jaringan perpipaan.

Tabel II.35. Debit dan Ketersediaan Air Baku di Kota Tangerang Selatan

Uraian	Ketersediaan Air (m^3/detik)		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
DAS Cisadane	37,95	39,58	29,87
DAS Angke	14,13	21,25	3,45

Sumber: RISPAM Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Potensi air permukaan di wilayah Tangerang Selatan merupakan salah satu solusi penting dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih yang semakin meningkat. Salah satu sumber air permukaan yang cukup berpotensi adalah Kali Salak, yang terletak di Kecamatan Setu dan melewati beberapa kelurahan seperti Keranggan dan Muncul. Sungai ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber air baku melalui sistem pengelolaan air permukaan, yang dapat digunakan untuk keperluan domestik di wilayah sekitarnya. Debit air dari Kali Salak bervariasi dengan estimasi debit minimal antara 68 liter per detik hingga 76 liter per detik. Dari debit tersebut, sekitar 13,6 hingga 15,2 liter per detik dapat diambil dan diolah menjadi air bersih.

Berdasarkan rencana pembangunan yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Waduk Karian dirancang untuk mengembangkan sumber daya air di Sungai Ciujung dan Cidurian. Waduk ini diharapkan mampu menyediakan pasokan air baku yang berkelanjutan bagi kebutuhan perkotaan dan industri di Serang, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Jakarta. Dengan kapasitas sebesar 4,6 m^3/detik, Wilayah Kota Tangerang Selatan dialokasikan 14% (empat belas persen) dari kapasitas waduk yaitu sekitar 0,65 m^3/detik.

Sungai Pesanggrahan merupakan salah satu sumber air permukaan yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai air baku di kota Tangerang Selatan. Pengolahan air dari Sungai Pesanggrahan dapat dilakukan melalui instalasi pengolahan air (IPA) yang dirancang untuk menyaring dan membersihkan air sungai sebelum didistribusikan kepada warga.

2.1.4.3. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu wilayah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan, IKP digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu daerah secara makro, membandingkan pencapaian antar daerah atau dari waktu ke waktu, dan menjadi dasar kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan. IKP dihitung berdasarkan pengukuran komposit dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Indeks ketahanan pangan di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam **Tabel II.36**, di mana ketahanan pangan di Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan.

Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Pangan di Kota Tangerang Selatan mencerminkan adanya perbaikan multidimensional dalam aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pasokan pangan.

Tabel II.36. Indeks Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Indeks Ketahanan Pangan	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Tangerang Selatan	83,14	83,74	78,74	87,43	88,67

Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

2.1.4.4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU atau *Prevalence of Undernourishment*) merupakan indikator penting untuk mengukur jumlah penduduk yang tidak mendapatkan asupan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian mereka agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan difokuskan pada daya beli (harga pangan vs pendapatan), akses mikro (jarak ke sumber pangan, keterjangkauan) dan kualitas gizi (konsumsi protein, sayur, buah). Data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 beserta pertumbuhannya disajikan dalam **Tabel II.37**.

Tabel II.37. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	1,51	1,89	1,50	1,92	3,13	24,07%

Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

Peningkatan angka PoU menggambarkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang tidak mendapatkan asupan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian mereka agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Peningkatan prevalensi ketidakcukupan pangan di Kota Tangerang Selatan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

a. Inflasi harga pangan
   Berdasarkan data BPS Tahun 2024, inflasi pangan di Kota Tangerang Selatan mencapai ±8,5% (delapan koma lima persen), lebih tinggi dari rata-rata nasional (6,2%). Kenaikan harga bahan pokok (beras, telur, daging) dipicu akibat gangguan rantai pasok global seperti konflik Ukraina dan perubahan iklim;

b. Penurunan daya beli
   Dengan kenaikan harga pangan sementara pendapatan yang stagnan, menyebabkan daya beli masyarakat menurun;

c. Ketergantungan impor/ pasokan dari daerah lain
   Pasokan beras dan pangan lainnya di Kota Tangerang Selatan bergantung pada daerah lain dan impor sehingga rentan terhadap fluktuasi harga;

d. Urbanisasi dan kepadatan penduduk
   Pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan meningkatkan tekanan pada stok pangan;

e. Kesenjangan sosial
   Pada tahun 2024, rasio gini di Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan, yang menggambarkan tingkat kesenjangan/ketimpangan sosial

meningkat. Berdasarkan data Kemensos RI Tahun 2024 menyatakan bahwa 20% (dua puluh persen) rumah tangga rentan miskin dan miskin kesulitan mengakses pangan bergizi;

f. Cadangan pangan daerah dan diversifikasi pangan belum optimal Belum adanya insentif untuk pelaku urban farming;

g. Distribusi pangan tidak merata, di mana pangan bergizi lebih banyak terkonsentrasi di pusat perbelanjaan modern;

h. Kualitas Konsumsi yang Buruk, di mana masyarakat beralih ke pangan murah rendah gizi seperti mie instan saat harga pangan naik

Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kota Tangerang Selatan yang diiringi kenaikan PoU merupakan fenomena yang tampak paradoks. Hal tersebut menggambarkan bahwa IKP bisa meningkat karena pasokan cukup, tetapi jika harga mahal atau distribusi timpang, rumah tangga rentan miskin dan miskin tetap tidak mampu membeli.

Langkah antisipasi atas peningkatan PoU di Kota Tangerang Selatan adalah dengan menerapkan beberapa strategi terkait dengan penguatan rantai pasok dan akses distribusi pangan, seperti:

a) Membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, fasilitas penyimpanan (gudang, lumbung pangan), serta infrastruktur logistik lainnya untuk memperlancar distribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen.
b) Membangun dan mengoptimalkan jaringan distribusi pangan yang efisien dari produsen ke konsumen, termasuk melalui pasar tradisional, koperasi, atau *e-commerce* lokal.
c) Menjalin kerja sama atau kemitraan yang kuat dengan daerah-daerah produsen pangan di sekitarnya (misalnya, Kabupaten Tangerang, Bogor, Lebak) untuk memastikan pasokan pangan yang stabil dan harga yang terjangkau.
d) Menyediakan bantuan pangan atau bantuan tunai bersyarat bagi kelompok masyarakat rentan dan miskin, terutama saat terjadi gejolak harga atau krisis ekonomi.
e) Mengoptimalkan pengawasan harga dan stok pangan untuk mencegah penimbunan dan spekulasi yang dapat memicu kenaikan harga.
f) Mendorong pengembangan pasar lokal seperti pasar tradisional dan modern yang mudah diakses oleh masyarakat, serta membangun jaringan distribusi yang efisien antara petani dan konsumen.
g) Mendukung dan memberikan fasilitas UMKM di sektor pangan lokal untuk berkembang, sehingga menciptakan lapangan kerja dan menyediakan produk pangan yang terjangkau.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup berkualitas adalah kondisi di mana sumber daya alam, ekosistem, dan lingkungan fisik mendukung kehidupan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Parameter untuk mengukur kualitas lingkungan hidup menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Kualitas lingkungan hidup diukur berdasarkan aspek fisik dan kimia (kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan), aspek biologis (keanekaragaman hayati dan kondisi ekosistem), dan aspek sosial (akses lingkungan sehat dan pengelolaan limbah). Komponen IKLH terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Kualitas

lingkungan hidup di Kota Tangerang Selatan saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Pertumbuhan perkotaan yang cepat telah menyebabkan peningkatan jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas industri, yang semuanya memberikan tekanan tambahan pada lingkungan.

IKLH Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.38**. di mana terlihat bahwa terdapat peningkatan kualitas lingkungan. Komponen IKLH yang mengalami perbaikan yaitu IKU. IKTL mengalami sedikit peningkatan seiring dengan adanya kebijakan untuk menambah taman-taman pada beberapa lokasi di Kota Tangerang Selatan. Sementara itu pada nilai IKA cenderung memiliki tren penurunan. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh pengelolaan sampah yang memiliki keterkaitan dengan nilai IKLH melalui IKA. Sampah yang tidak dikelola dengan baik, terutama sampah organik dan anorganik berbahaya, seringkali mencemari sumber air seperti sungai, danau, dan air tanah. Sampah yang membusuk menghasilkan lindi (*leachate*) yang mengandung bahan pencemar. Hal ini dapat meningkatkan tingkat BOD (*Biochemical Oxygen Demand*), COD (*Chemical Oxygen Demand*), dan kandungan logam berat dalam air, menurunkan nilai IKA. Pengelolaan sampah yang komprehensif, termasuk pemilahan, daur ulang, pengomposan, dan pembuangan akhir yang sesuai standar (misalnya, di TPA *sanitary landfill*), akan mencegah pencemaran air. Ini akan membantu menjaga dan meningkatkan kualitas air, sehingga berkontribusi pada nilai IKLH yang lebih tinggi.

Tabel II.38. Indikator Pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	68,67	67,78	66,00	66,70	64,00
Indeks Kualitas Udara (IKU)	56,13	57,87	65,56	71,08	71,59
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	31,87	45,19	36,62	36,34	36,38
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**55,53**	**58,78**	**56,66**	**57,93**	**61,03**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan (2025)

2.1.5.2. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap air minum layak mengacu pada kemampuan suatu rumah tangga untuk mendapatkan air yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan untuk kebutuhan minum, masak, dan sanitasi sehari-hari. Data rumah tangga di Kota Tangerang Selatan yang memiliki akses terhadap air minum layak disajikan dalam **Tabel II.39**, di mana pada tahun 2024, jumlah Rumah Tangga di Kota Tangerang Selatan merupakan yang tertinggi ketiga setelah Kota Cilegon dan Kota Serang dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten, yakni sebesar 98,37%. Secara umum sejak tahun 2020, persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Kota Tangerang Selatan konsisten berada pada 97-99%.

Tabel II.39. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Pandeglang	75,83	82,01	77,27	78,11	78,51
2	Kab. Lebak	73,49	73,32	73,27	75,64	77,92
3	Kab. Tangerang	98,48	97,97	98,55	97,02	97,79
4	Kab. Serang	89,95	92,33	91,91	94,62	94,75
5	Kota Tangerang	98,37	98,00	95,58	97,12	98,04
6	Kota Cilegon	94,98	98,72	99,08	99,18	99,61

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kota Serang	99,10	98,38	97,61	96,72	99,27
8	**Kota Tangerang Selatan**	**99,08**	**99,22**	**98,64**	**97,91**	**98,37**
Provinsi Banten		**92,87**	**93,51**	**92,71**	**92,95**	**94,01**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

Hal yang sangat penting dalam hal terpenuhinya akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum layak adalah ketersediaan air bersih yang aman. Sebagaimana telah digambarkan dalam sub bab 2.1.3.3 bahwa kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air di Kota Tangerang Selatan berkategori rendah. Untuk itu, mutlak diperlukan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kota Tangerang Selatan, terutama SPAM jaringan perpipaan yang dapat menjamin ketersediaan air bersih aman untuk air minum layak yang berkelanjutan kepada masyarakat. Tingkat pelayanan SPAM Kota Tangerang Selatan sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam **Tabel II.40**, di mana terdapat beberapa klasifikasi tingkat pelayanan. Klasifikasi pertama adalah akses aman yaitu akses air bersih dari PDAM. Klasifikasi kedua adalah akses layak dasar yaitu akses air bersih dari mini SPAM yang terdiri atas Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Jaringan perpipaan merupakan sistem distribusi air bersih dengan Sambungan Rumah (SR), sedangkan Bukan Jaringan Perpipaan merupakan distribusi dengan Kran Umum serta Hidran Umum. Kemudian, klasifikasi ketiga adalah akses layak terbatas yang berupa SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) individu, yaitu Sumur dan Penampung Air Hujan (PAH).

Berdasarkan **Tabel II.40** terlihat bahwa persentase penduduk dengan akses air bersih aman di Kota Tangerang Selatan masih rendah, yaitu sebesar ±21% (dua puluh satu persen). Wilayah dengan persentase penduduk yang memiliki akses air bersih aman terbanyak adalah Kecamatan Serpong, yaitu sebanyak 65% (enam puluh lima persen). Sementara itu, Kecamatan Ciputat Timur merupakan wilayah dengan persentase penduduk berakses air minum aman paling sedikit, yaitu sebanyak 0% (nol persen). Sebagian besar penduduk di Kecamatan Ciputat mengakses air bersih layak terbatas, yaitu sebanyak 99,6% (sembilan puluh sembilan koma enam persen).

Tabel II.40. Tingkat Pelayanan SPAM Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Akses Aman (%)	Akses Layak Dasar		Akses Layak Terbatas (%)	Akses Tidak Layak (%)	Tidak Ada Akses (%)
				Jaringan Perpipaan (%)	Bukan Jaringan Perpipaan (%)			
1.	Serpong	163.451	65,00	0,20	0,00.	34,80	0,00.	0,00.
2.	Serpong Utara	138.209	42,30	0,40	0,00.	57,30	0,00.	0,00.
3.	Pondok Aren	295.812	27,40	1,30	0,00.	71,30	0,00.	0,00.
4.	Ciputat	222.186	5,00	0,00	0,00.	95,00	0,00.	0,00.
5.	Ciputat Timur	169.555	0,00.	0,40	0,00.	99,60	0,00.	0,00.
6.	Pamulang	324.059	4,30	0,30	0,00.	95,30	0,00.	0,00.
7.	Setu	91.513	5,50	3,00	0,00.	91,50	0,00.	0,00.
Total		**1.404.785**	**21,00**	**0,80**	**0,00**	**77,80**	**0,00**	**0,00**

Sumber: Reviu RISPAM Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025-2030

2.1.5.3. Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Aman

Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi dasar yang memisahkan manusia dari kotorannya, tetapi belum sepenuhnya menjamin pengolahan limbah yang aman. Sementara itu, sanitasi aman adalah kondisi di mana rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi yang digunakan hanya oleh mereka sendiri, menggunakan kloset leher angsa, dan memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang disedot secara berkala atau melalui jaringan perpipaan terpusat. Sanitasi aman juga mengacu pada pengolahan air limbah domestik yang baik, sehingga tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Saat ini, status akses sanitasi di Kota Tangerang Selatan masih berkategori layak, belum berkategori aman, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.41**. Hal ini disebabkan karena Kota Tangerang Selatan belum memiliki IPLT tingkat Kota.

Tabel II.41. Capaian Penyelenggaraan Sanitasi Kota Tangerang Selatan

Komponen	Target RPJMN Tahun 2020-2024	Target Prov Banten Tahun 2024	Target Kota Tangsel Tahun 2024	Target Kota Tangsel Jangka Pendek	Capaian Tahun 2021	Gap terhadap Target Kota Tahun 2024	Gap terhadap target kota jangka pendek
Akses Aman	15%	15%	12%	7%	0,20%	11,8%	6,80%
Akses Layak	90%	90%	80%	87%	98,84%	-	-

Sumber: Reviu RISPAL Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025-2045

Data rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.42**, di mana terlihat bahwa jumlahnya di Kota Tangerang Selatan paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten.

Tabel II.42. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Pandeglang	50,15	49,11	62,14	62,08	63,66
2	Kab. Lebak	63,35	56,82	67,40	68,83	70,23
3	Kab. Tangerang	82,23	85,89	86,63	87,75	89,38
4	Kab. Serang	77,57	80,34	82,38	84,07	85,31
5	Kota Tangerang	95,10	94,94	94,43	94,95	96,93
6	Kota Cilegon	94,38	97,07	87,72	96,23	97,10
7	Kota Serang	87,34	90,76	91,55	92,36	92,71
8	**Kota Tangerang Selatan**	**97,45**	**98,84**	**97,56**	**99,29**	**99,34**
Provinsi Banten		**71,10**	**82,00**	**82,89**	**86,41**	**87,93**

Sumber: BPS Provinsi Banten (2025)

2.1.5.4. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu bagian dari Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur yang terus berkembang pesat menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), produksi sampah harian di Kota Tangerang Selatan sebesar 1.022,65 ton atau setara dengan 373.267,45 ton/tahun, dengan komposisi didominasi oleh sisa makanan (*food waste*).

Sektor rumah tangga menjadi penyumbang terbesar 77,41 persen dari total timbulan.

Berdasarkan dalam **Tabel II.43**, pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan selama periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan kinerja, di mana terlihat timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah meningkat hingga tahun 2022. Pada tahun 2023-2024, terjadi penurunan capaian pengelolaan sampah, terutama disebabkan oleh keterbatasan kapasitas TPA Cipeucang yang sudah *over capacity*. Kondisi ini menekankan perlunya pengembangan strategi pengurangan dan daur ulang sampah sebagai upaya untuk menekan timbulan sampah yang masuk ke TPA.

Tabel II.43. Perkembangan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton/thn) (A)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/thn) (B)	% Pengurangan Sampah (B/A)	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun) (C)	% Penanganan Sampah (C/A)	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun) (B+C)	% Sampah Terkelola (B+C)/A
2020	390.753,87	45.280,98	11,59	224.600,93	57,48	269.881,91	69,07
2021	291.659,27	71.294,40	24,44	184.036,20	63,10	255.330,59	87,54
2022	355.009,43	81.786,00	23,04	271.510,54	76,48	353.296,55	99,52
2023	369.177,50	101.557,27	27,51	265.235,57	71,84	366.792,84	99,35
2024	373.267,45	96.016,05	25.72	265.428,00	71.11	361.444,05	96.83

Sumber: SIPSN, Tahun 2024

Data pada **Tabel II.44**, menunjukkan bahwa kemampuan daur ulang sampah di Kota Tangerang Selatan selama periode 2020–2024 masih relatif terbatas, dengan rata-rata rasio daur ulang sebesar 22,3 persen. Meskipun terdapat peningkatan dari 15,20 persen pada tahun 2020 menjadi 27,93 persen pada tahun 2023, capaian tersebut masih jauh dari potensi optimal, sehingga penguatan program daur ulang melalui inovasi teknologi, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan bahan baku sampah menjadi strategi penting dalam mengurangi beban TPA dan meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan.

Tabel II.44. Perkembangan Rasio Daur Ulang Sampah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) (A)	Daur ulang Sampah Tahunan (ton/tahun) (B)	Bahan baku Sampah Tahunan (ton/tahun) (C)	*Recycling Rate* (B+C)/A
2020	390.753,87	45.048,84	14.335,38	15,20
2021	291.659,27	51.040,73	1.893,90	18,15
2022	355.009,43	81.786,00	267,00	23,11
2023	369.177,50	101.557,27	1.559,57	27,93
2024	373.267,45	95.991,19	5.183,00	27.11

Sumber: SIPSN, Tahun 2024

2.1.5.5. Rumah Tidak Layak Huni dan Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan berbagai definisi dan standar, rumah tidak layak huni dapat diartikan sebagai kondisi tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat minimum kesehatan, keamanan, dan keselamatan bagi penghuninya. Oleh karena itu rumah tidak layak huni yang terdapat di suatu wilayah perlu segera ditangani. Penanganan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Penanganan ini mencakup

perbaikan fisik rumah, penyediaan infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Pada tahun 2022-2024, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan intervensi untuk mencegah timbulnya kawasan kumuh melalui perbaikan rumah tidak layak huni. Hasil intervensi tersebut dapat terlihat pada penurunan jumlah rumah tidak layak huni sebagaimana tersaji dalam **Tabel II.45**.

Tabel II.45. Jumlah Rumah Menurut Kondisi di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Rumah Layak Huni	378.834	378.834	378.834
Rumah Tidak Layak Huni	**2.471**	**1.337**	**1.025**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2024

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Tangerang Selatan merupakan permasalahan kompleks yang berkaitan dengan kesesuaian peruntukan lokasi dengan tata ruang, status kepemilikan tanah, tingkat kepadatan penduduk dan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Provinsi Banten dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Banten Nomor 600.1.14.2/BA.755-PERKIM/DPRKPP/2024, Nomor 000.3/BA.194/Perkim-3/2024 dan Nomor 181.4/BA/Cb11/2024 disepakati pembagian luas kawasan kumuh di Kota Tangerang Selatan yang akan ditangani oleh Pemerintah Pusat seluas 15,02 ha, yang akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Banten seluas 8,68 ha dan yang akan ditangani oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan seluas 32,93 ha.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 600.2.1/Kep.237-Huk/2024 lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Tangerang Selatan terletak pada 32 lokasi di 7 Kecamatan dengan luas total sebesar 56,63 ha. Detail lokasi perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditampilkan secara tabular pada **Tabel II.46**, yang menunjukkan bahwa mayoritas kawasan kumuh termasuk kategori “kumuh ringan” dengan nilai kekumuhan 19–37, sedangkan kategori “kumuh sedang” terdapat di beberapa lokasi dengan nilai 39–44. Kawasan kumuh terkonsentrasi di wilayah Setu, Pamulang, dan Serpong, yang juga terlihat jelas pada peta dengan titik-titik warna merah menandai lokasi permukiman kumuh (**Gambar II.22**). Kepadatan penduduk di kawasan ini bervariasi antara kurang dari 150 jiwa per hektare hingga 201–400 jiwa per hektare, menunjukkan adanya konsentrasi yang lebih tinggi pada beberapa permukiman kumuh sedang.

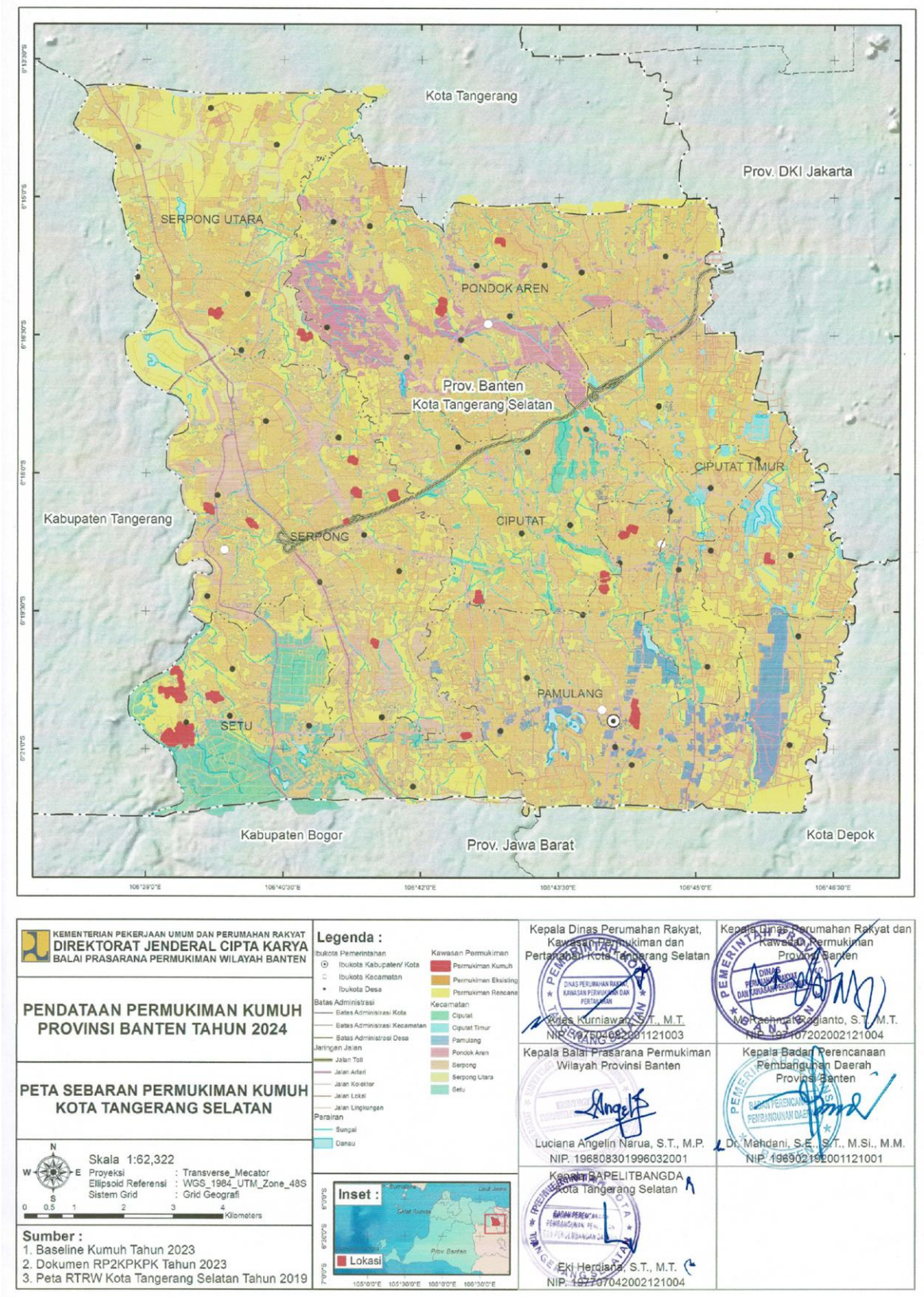
Peta Sebaran Permukiman Kumuh Kota Tangerang Selatan pada **Gambar II.22** memperkuat pemahaman spasial terkait lokasi kumuh dan menjadi dasar penting bagi perencanaan intervensi. Kawasan “kumuh ringan” tersebar lebih merata, sedangkan “kumuh sedang” cenderung terkonsentrasi di beberapa titik strategis, menandakan potensi risiko sosial, kesehatan, dan lingkungan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, program penataan dan peremajaan permukiman kumuh perlu difokuskan pada kawasan “kumuh sedang” dengan kepadatan menengah hingga tinggi, termasuk penyediaan fasilitas dasar, perbaikan sanitasi, akses jalan, dan drainase. Integrasi data pada tabel dengan peta sebaran memungkinkan pemerintah kota untuk menyusun strategi intervensi yang lebih efektif dan terfokus, sehingga tujuan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan pengurangan ketimpangan sosial dapat tercapai secara berkelanjutan.

Tabel II.46. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan

No	Nama Lokasi	Luas (ha)	Lingkup Administrasi			Kependudukan		Koordinat		Kekumuhan	
			RT/RW	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah	Kepadatan (Jiwa/ha)	Lintang	Bujur	Nilai	Tingkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KERANGGAN	3,05	RT002-RW001	KERANGGAN	SETU	416	<150	-6,33804	106,65629	27	KUMUH RINGAN
2	KERANGGAN	0,34	RT003-RW001	KERANGGAN	SETU	352	<150	-6,33599	106,65508	28	KUMUH RINGAN
3	KERANGGAN	5,29	RT004-RW002	KERANGGAN	SETU	285	<150	-6,34005	106,65476	31	KUMUH RINGAN
4	KERANGGAN	1,02	RT014-RW003	KERANGGAN	SETU	272	<150	-6,34623	106,65605	31	KUMUH RINGAN
5	KERANGGAN	2,96	RT009-RW004	KERANGGAN	SETU	548	<150	-6,34639	106,65741	33	KUMUH RINGAN
6	KERANGGAN	4,18	RT011-RW005	KERANGGAN	SETU	322	<150	-6,34813	106,65756	37	KUMUH RINGAN
7	KERANGGAN	2,66	RT012-RW005	KERANGGAN	SETU	322	<150	-6,34800	106,65597	31	KUMUH RINGAN
8	KERANGGAN	4,19	RT013-RW005	KERANGGAN	SETU	447	<150	-6,34800	106,65429	36	KUMUH RINGAN
9	MUNCUL	2,67	RT001-RW001	MUNCUL	SETU	848	<150	-6,34058	106,66246	22	KUMUH RINGAN
10	KEDAUNG	1,40	RT012-RW011	KEDAUNG	PAMULANG	532	201-400	-6,31000	106,73838	44	KUMUH SEDANG
11	KEDAUNG	1,21	RT013-RW011	KEDAUNG	PAMULANG	420	151-200	-6,31108	106,73685	26	KUMUH RINGAN
12	CILENGGANG	1,20	RT005-RW002	CILENGGANG	SERPONG	657	<150	-6,30906	106,66924	32	KUMUH RINGAN
13	CILENGGANG	1,71	RT011-RW004	CILENGGANG	SERPONG	587	201-400	-6,30639	106,66141	35	KUMUH RINGAN
14	LENGKONG GUDANG TIMUR	1,14	RT001-RW003	LENGKONG GUDANG TIMUR	SERPONG	395	<150	-6,29757	106,68753	34	KUMUH RINGAN
15	RAWA MEKAR JAYA	0,32	RT001-RW002	RAWA MEKAR JAYA	SERPONG	596	201-400	-6,30871	106,68636	44	KUMUH SEDANG
16	RAWA MEKAR JAYA	1,70	RT004-RW002	RAWA MEKAR JAYA	SERPONG	371	<150	-6,30398	106,69500	35	KUMUH RINGAN
17	RAWA MEKAR JAYA	1,72	RT005-RW002	RAWA MEKAR JAYA	SERPONG	536	201-400	-6,30342	106,68822	41	KUMUH SEDANG
18	BUARAN	0,95	RT003-RW004	BUARAN	SERPONG	539	201-400	-6,34750	106,70825	35	KUMUH RINGAN
19	JELUPANG	1,43	RT013-RW004	JELUPANG	SERPONG UTARA	202	<150	-6,27488	106,67871	30	KUMUH RINGAN
20	JELUPANG	2,14	RT017-RW006	JELUPANG	SERPONG UTARA	644	151-200	-6,27095	106,66261	31	KUMUH RINGAN
21	PAMULANG BARAT	1,20	RT001-RW003	PAMULANG BARAT	PAMULANG	288	<150	-6,34196	106,73888	41	KUMUH SEDANG
22	PAMULANG BARAT	1,78	RT002-RW003	PAMULANG BARAT	PAMULANG	322	151-200	-6,34367	106,73898	30	KUMUH RINGAN
23	PAMULANG BARAT	1,72	RT003-RW003	PAMULANG BARAT	PAMULANG	537	151-200	-6,34504	106,73888	29	KUMUH RINGAN
24	BAMBU APUS	1,80	RT001-RW001	BAMBU APUS	PAMULANG	798	201-400	-6,31862	106,73340	41	KUMUH SEDANG
25	BAMBU APUS	0,30	RT003-RW001	BAMBU APUS	PAMULANG	564	201-400	-6,32068	106,73362	39	KUMUH SEDANG
26	BAMBU APUS	0,83	RT004-RW001	BAMBU APUS	PAMULANG	718	201-400	-6,32095	106,73306	39	KUMUH SEDANG
27	CIATER	0,44	RT007-RW003	CIATER	SERPONG	294	<150	-6,33088	106,69178	41	KUMUH SEDANG

No	Nama Lokasi	Luas (ha)	Lingkup Administrasi			Kependudukan		Koordinat		Kekumuhan	
			RT/RW	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah	Kepadatan (Jiwa/ha)	Lintang	Bujur	Nilai	Tingkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	CIATER	0,39	RT009-RW003	CIATER	SERPONG	332	<150	-6,33051	106,69142	44	KUMUH SEDANG
29	CIREUNDEU	1,12	RT001-RW005	CIREUNDEU	CIPUTAT TIMUR	261	<150	-6,31540	106,76356	20	KUMUH RINGAN
30	PONDOK AREN	0,95	RT005-RW011	PONDOK AREN	PONDOK AREN	543	201-400	-6,25794	106,71430	19	KUMUH RINGAN
31	PARIGI	3,05	RT001-RW001	PARIGI	PONDOK AREN	442	<150	-6,26977	106,70364	29	KUMUH RINGAN
32	SERUA	1,79	RT002-RW004	SERUA	CIPUTAT	325	<150	-6,32243	106,71046	25	KUMUH RINGAN
	JUMLAH	**56,63**	**32**	**15**	**7**	-	-	-	-	-	-

Sumber: Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 600.2.1/Kep.237-Huk/2024

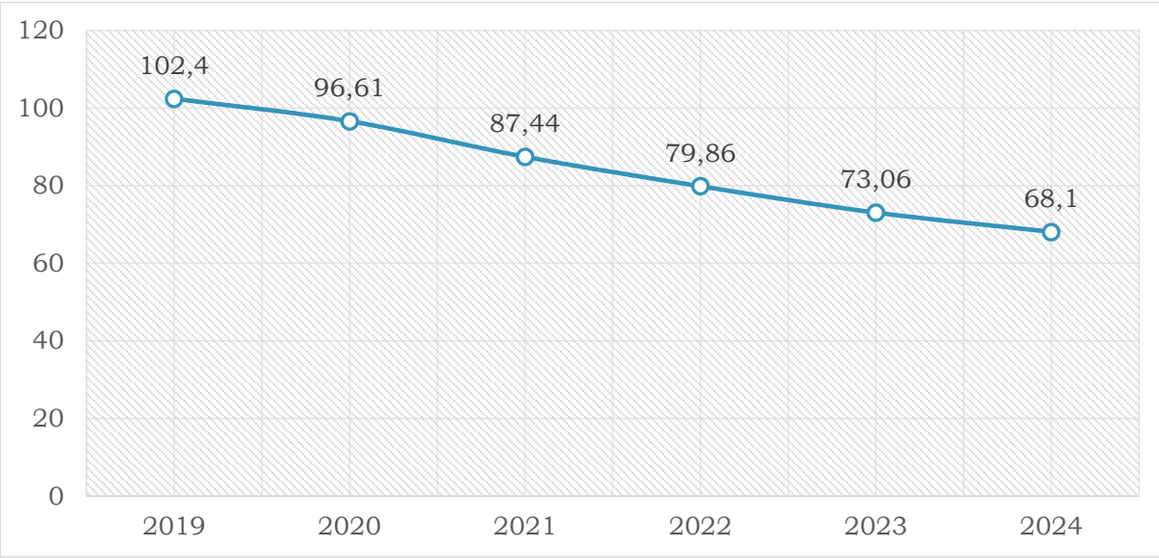


Gambar II.22. Peta Sebaran Permukiman Kumuh Kota Tangerang Selatan
Sumber: Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 600.2.1/Kep.237-Huk/2024

2.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.6.1. Indeks Risiko Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melakukan kajian terhadap risiko bencana yang ada di seluruh wilayah Indonesia melalui Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). IRBI merupakan indikator untuk mengukur tingkat risiko bencana suatu daerah terhadap berbagai ancaman, seperti gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Kajian IRBI dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya *(hazard),* kerentanan *(vulnerability),* dan kapasitas *(capacity)* di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logisitik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. IRB di Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 disajikan dalam **Gambar II.23**, di mana terlihat tingkat risiko bencana di Kota Tangerang Selatan dapat diturunkan dengan upaya meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.



Gambar II.23. Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan
Sumber: Dokumen Risiko Bencana Indonesia

Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2024-2026 telah memuat hasil dari analisis ancaman/bahaya berupa luas potensi bahaya dan peta bahaya dari setiap Bencana menurut tingkat ancamannya. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Pengkajian risiko Bencana merupakan upaya dalam menghasilkan informasi terkait tingkat risiko Bencana pada suatu wilayah. Tingkat risiko Bencana disusun berdasarkan analisis tiga komponen yaitu analisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas daerah.

2.1.6.1.1. Rekapitulasi Ancaman/Bahaya

Rekapitulasi ancaman/bahaya bencana disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu kemungkinan terjadi suatu ancaman dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana yang terjadi tersebut. Skala tingkat bahaya dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah (0-0,33), sedang (>0,33-0,66) dan tinggi (>0,66-1,00). Hasil dari rekapitulasi ancaman/bahaya berupa luas potensi bahaya menurut tingkat ancamannya sebagaimana disajikan pada **Tabel II.47** di mana terdapat 4 (empat) bencana yang masuk ke dalam kategori bahaya tinggi yaitu gempa bumi, banjir, cuaca ekstrem, dan kegagalan teknologi. Kemudian terdapat 4 (empat) bencana yang masuk ke dalam kategori bahaya sedang yaitu kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, kebakaran gedung dan permukiman. Sedangkan bencana tanah longsor masuk ke dalam kategori bahaya rendah.

Tabel II.47. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kota Tangerang Selatan

No	Jenis Bahaya	Luas Bahaya (ha)			Total Luas (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Gempa Bumi	13.811,30	2.673,18	0,99	16.485,47	Tinggi
2	Banjir	415,35	440,82	741,33	1.597,50	Tinggi
3	Tanah Longsor	57,06	-	-	57,06	Rendah
4	Cuaca Ekstrim	-	13.325,84	3.159,63	16.485,47	Tinggi
5	Kekeringan	16.053,38	432,09		16.485,47	Sedang
6	Kebakaran Gedung dan Permukiman	520,29	11.770,02		12.290,31	Sedang
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	1.926,72	8.902,98	-	10.829,70	Sedang
8	Kegagalan Teknologi	13.292,36	2.775,33	417,78	16.485,47	Tinggi
9	Konflik Sosial	308,43	141,21	-	449,64	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026

2.1.6.1.2. Rekapitulasi Kerentanan

Potensi kerentanan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dengan kelas kerentanan yang diperoleh berdasarkan nilai indeks kerentanan. Perlu diingat bahwa pengkelasan dibuat berdasarkan luasan kelas dominan tertinggi dari setiap kelurahan yang ada di tiap kecamatan

Nilai indeks kerentanan Kota Tangerang Selatan berdasarkan jenis bencana dapat dilihat pada **Tabel II.48**, di mana terdapat 8 jenis bencana yang memiliki potensi jumlah penduduk yang terpapar tinggi yaitu gempa bumi, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran gedung dan permukiman, epidemi dan wabah penyakit, kegagalan teknologi serta konflik sosial. Sementara itu, terdapat 1 (satu) jenis bencana yang memiliki potensi jumlah penduduk yang terpapar rendah, yaitu bencana tanah longsor. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang terpapar termasuk kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, penduduk miskin, dan penyandang disabilitas. Misalnya, bencana gempa bumi dan cuaca ekstrem masing-masing berpotensi memengaruhi lebih dari 208 ribu orang dari kelompok rentan, menekankan perlunya prioritas mitigasi untuk melindungi kelompok sosial yang paling rentan. Dengan demikian, fokus pengelolaan risiko harus diberikan pada bencana dengan kerentanan tinggi, sambil tetap memonitor bencana dengan kerentanan rendah untuk mengantisipasi kemungkinan dampak.

Tabel II.48. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan

No	Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Gempa Bumi	1.378.466	208.126	22.196	345	Tinggi
2	Banjir	133.358	15.817	1.489	23	Tinggi
3	Tanah Longsor	576	68	10	13	Rendah
4	Cuaca Ekstrim	1.378.466	207.487	22.155	344	Tinggi
5	Kekeringan	1.378.466	208.022	22.188	345	Tinggi
6	Kebakaran Gedung dan Permukiman	1.378.466	204.474	21.777	338	Tinggi
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	1.378.466	203.957	21.727	338	Tinggi
8	Kegagalan Teknologi	1.378.466	155.425	13.836	185	Tinggi
9	Konflik Sosial	38.182	4.421	517	7	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026

2.1.6.1.3. Rekapitulasi Kapasitas/Ketahanan Daerah

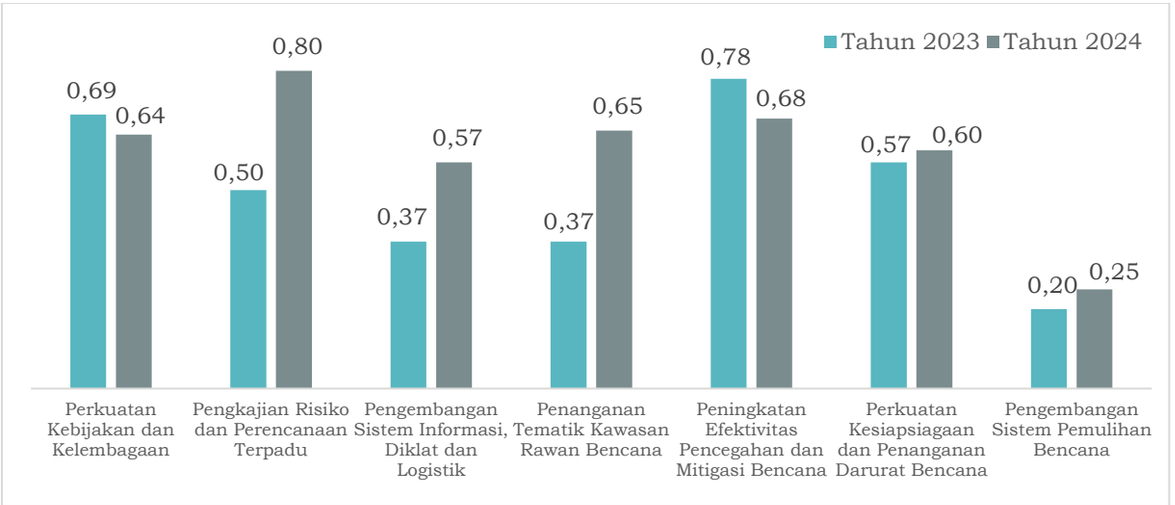
Rekapitulasi kapasitas dalam suatu Kajian Risiko Bencana dapat mengidentifikasi sumber daya, kemampuan, dan mekanisme yang dimiliki oleh suatu komunitas atau wilayah untuk mengurangi, menghadapi, dan pulih dari bencana. Rekapitulasi kapasitas yang dianalisis terkait kebencanaan di Kota Tangerang Selatan meliputi gambaran ketahanan daerah dan kesiapsiagaan masyarakat. Ketahanan daerah Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi potensi Bencana digambarkan berdasarkan indeks kapasitas daerah, di mana menunjukkan bahwa pada tahun 2024, nilai indeks kapasitas Kota Tangerang Selatan meningkat dibandingkan tahun 2023, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.49** dan **Gambar II.24**. Hal tersebut menggambarkan adanya peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana. Komponen kegiatan prioritas yang masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana adalah penguatan kebijakan dan kelembagaan serta peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Selain itu, jika dibandingkan dengan keseluruhan nilai komponen kegiatan prioritas pengkajian kapasitas daerah, terlihat bahwa kegiatan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana mencatatkan nilai paling kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya-upaya yang inovatif untuk mengembangkan sistem pemulihan bencana yang terintegrasi dan efektif.

Tabel II.49. Indeks Ketahanan Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023-2024

No.	Prioritas	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,69	0,53	SEDANG	0,64	0,58	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,50			0,80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,37			0,57		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,37			0,65		
5	Peningkatan Efektivitas	0,78			0,68		

No.	Prioritas	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
	Pencegahan dan Mitigasi Bencana						
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,57			0,60		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20			0,25		

Sumber: BPBD Kota Tangerang Selatan, 2024



Gambar II.24. Diagram Kegiatan Prioritas Hasil Pengkajian Indeks Kapasitas Daerah

Tingkat kesiapsiagaan masyarakat Kota Tangerang Selatan terhadap berbagai bencana masih rendah, dengan indeks rata-rata kota 0,31 dan mayoritas kecamatan berada pada kelas rendah (**Tabel II.50**). Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya-upaya inovatif dan efektif untuk meningkatkan level kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi seluruh potensi bencana, guna meminimalkan kemungkinan kerugian besar baik dari segi materiil maupun non-materiil. Beberapa kecamatan, seperti Ciputat Timur, Pamulang, dan Setu, menunjukkan kesiapsiagaan menengah pada beberapa parameter, namun secara keseluruhan masyarakat masih memerlukan peningkatan pengetahuan, kemampuan tanggap, kemandirian, dan partisipasi untuk menghadapi bencana secara lebih optimal.

Tabel II.50. Nilai Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat

No	Kecamatan	PK	PTD	PKM	KTMDT	PM	Kelas
1	Ciputat	0,34	0,19	0,41	0,34	0,53	Rendah
2	Ciputat Timur	0,35	0,01	0,43	0,78	0,51	Sedang
3	Pamulang	0,16	0,47	0,72	0,27	0,58	Sedang
4	Pondok Aren	0,18	0,00	0,38	0,43	0,00	Rendah
5	Serpong	0,21	0,09	0,55	0,33	0,00	Rendah
6	Serpong Utara	0,16	0,06	0,44	0,63	0,00	Rendah
7	Setu	0,36	0,27	0,50	0,46	0,55	Sedang
Kota Tangerang Selatan		**0,25**	**0,16**	**0,49**	**0,46**	**0,31**	**Rendah**

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026
PK = Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana
PTD = Pengelolaan Tanggap Darurat
PKM = Pengaruh Kerentanan Masyarakat
KMDP = Ketidaktergantungan Masyarakat Daerah Terhadap Pemerintah
PM = Partisipasi Masyarakat

2.1.6.1.4. Rekapitulasi Risiko Bencana per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

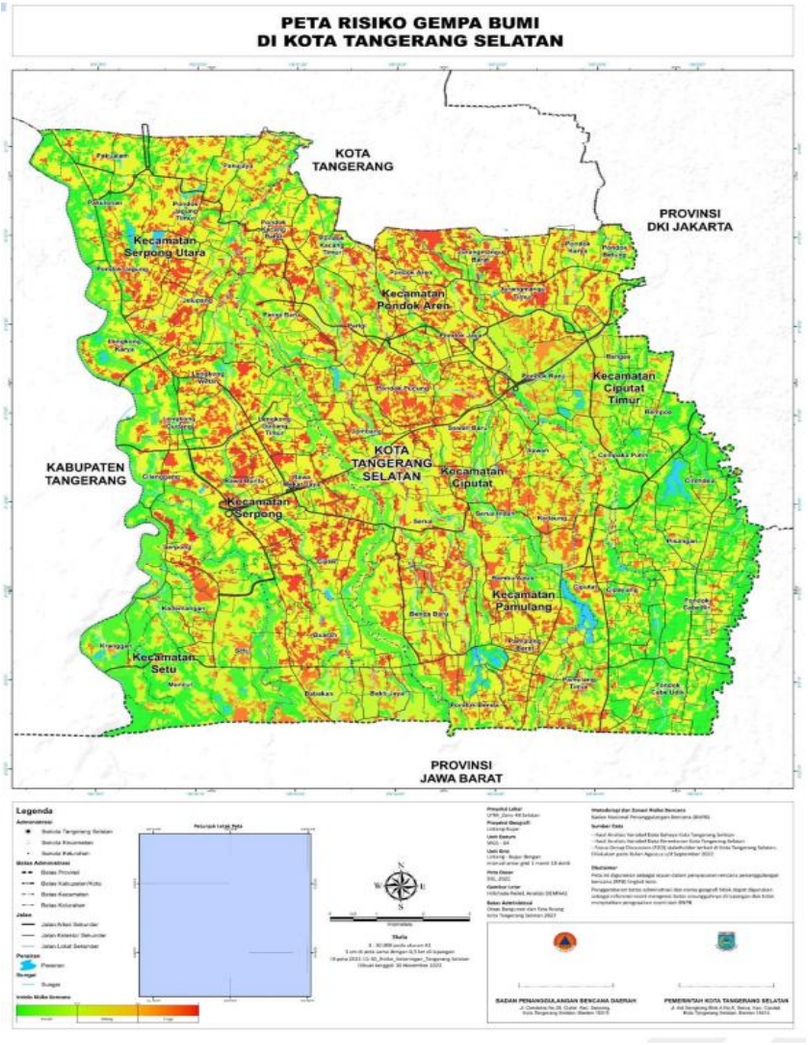
1) Gempa Bumi

Sebaran tingkat risiko gempa bumi per Kecamatan yang diperoleh dari hasil kajian tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas ditunjukkan dalam **Tabel II.51** dan **Gambar II.25**, di mana rata-rata luasan berisiko gempa bumi berkategori rendah.

Tabel II.51. Rekapitulasi Sebaran Risiko Gempa Bumi di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Ciputat	1.729,16	386,64	-	2.115,80
2	Ciputat Timur	1.646,23	137,79	-	1.784,02
3	Pamulang	2.431,13	437,22	-	2.868,35
4	Pondok Aren	2.308,71	668,88	-	2.977,59
5	Serpong	2.314,19	528,66	0,99	2.843,84
6	Serpong Utara	1.895,98	321,57	-	2.217,55
7	Setu	1.485,90	192,42	-	1.678,32
Kota Tangerang Selatan		**13.811,30**	**2.673,18**	**0,99**	**16.485,47**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



Gambar II.25. Peta Risiko Gempa Bumi di Kota Tangerang Selatan
(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)

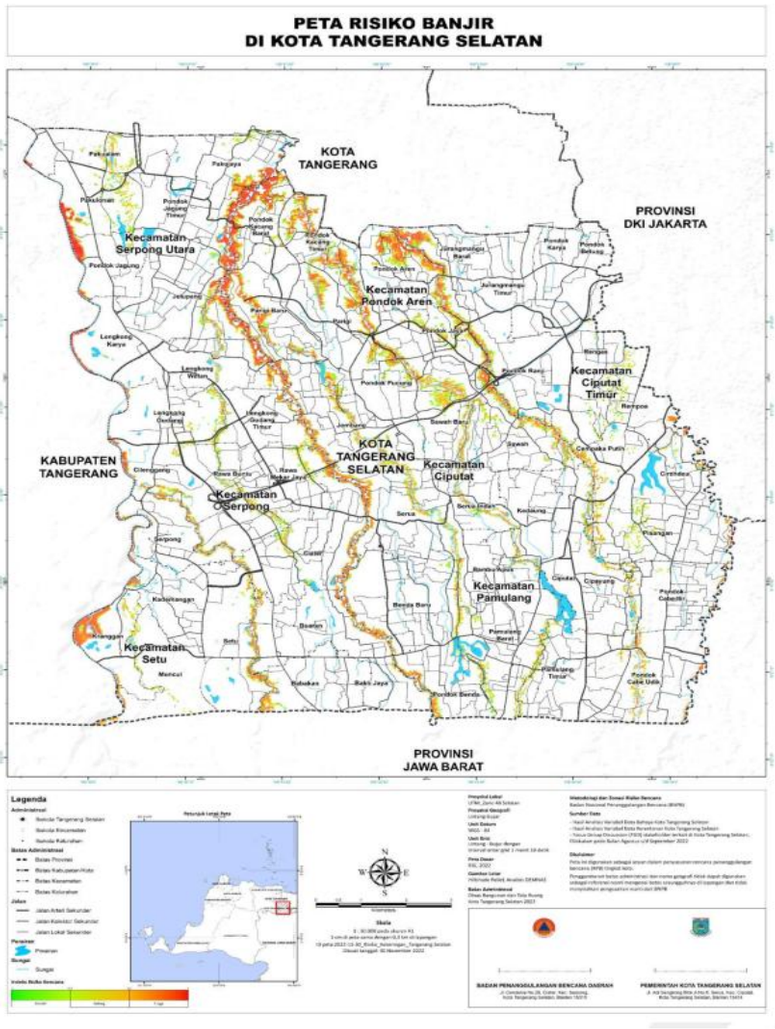
2) Banjir

Sebaran tingkat risiko banjir per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan dalam **Tabel II.52** dan **Gambar II.26**, memberikan gambaran bahwa sebaran risiko banjir sebagian besar kecamatan di Kota Tangerang Selatan memiliki luasan risiko kategori tinggi yang signifikan. Secara total, dari luas wilayah kota 1.596,78 ha, sekitar 740,88 ha atau hampir 46 persen termasuk dalam kategori risiko tinggi, 440,73 ha (28 persen) kategori sedang, dan 415,17 ha (26 persen) kategori rendah. Kecamatan Pondok Aren memiliki luasan risiko tinggi terbesar, yaitu 245,61 ha, diikuti Serpong (106,65 ha) dan Setu (72,27 ha). Analisis ini menegaskan perlunya prioritas mitigasi dan pengelolaan risiko banjir di wilayah dengan kategori tinggi, termasuk peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penguatan infrastruktur penahan banjir, serta perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap bencana.

Tabel II.52. Rekapitulasi Sebaran Risiko Banjir di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Ciputat	68,67	79,02	115,74	263,43
2	Ciputat Timur	43,29	41,49	38,25	123,03
3	Pamulang	49,14	59,40	69,66	178,20
4	Pondok Aren	118,80	125,73	245,61	490,14
5	Serpong	63,09	62,82	106,65	232,56
6	Serpong Utara	52,83	50,04	92,70	195,57
7	Setu	19,35	22,23	72,27	113,85
Kota Tangerang Selatan		**415,17**	**440,73**	**740,88**	**1.596,78**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



Gambar II.26. Peta Risiko Banjir di Kota Tangerang Selatan
(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)

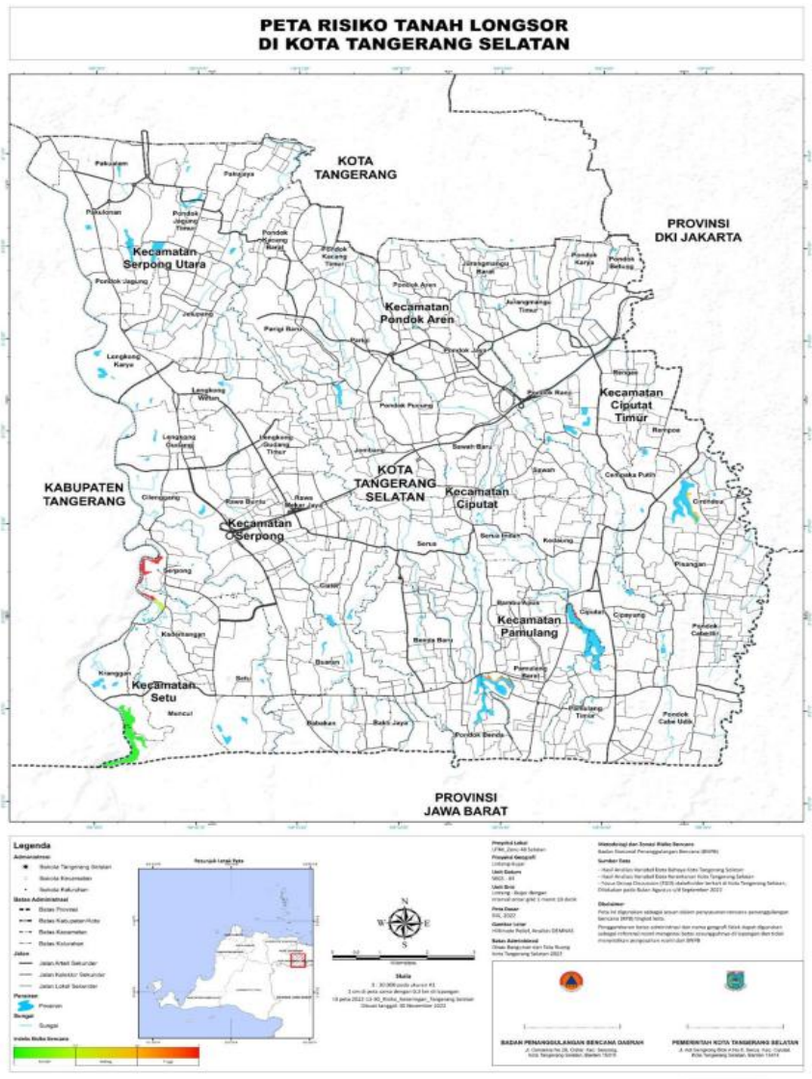
3) Tanah Longsor

Sebaran tingkat risiko tanah longsor per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam **Tabel II.53** dan **Gambar II.27**, di mana rata-rata luasan risiko tanah longsor berkategori rendah.

Tabel II.53. Rekapitulasi Sebaran Risiko Tanah Longsor di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Ciputat	1,35	-	-	1,35
2	Ciputat Timur	5,31	-	-	5,31
3	Pamulang	9,27	-	-	9,27
4	Pondok Aren	-	-	-	-
5	Serpong	9,27	-	-	9,27
6	Serpong Utara	-	-	-	-
7	Setu	31,77	-	-	31,77
Kota Tangerang Selatan		**56,97**	**-**	**-**	**56,97**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



Gambar II.27. Peta Risiko Tanah Longsor di Kota Tangerang Selatan
(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)

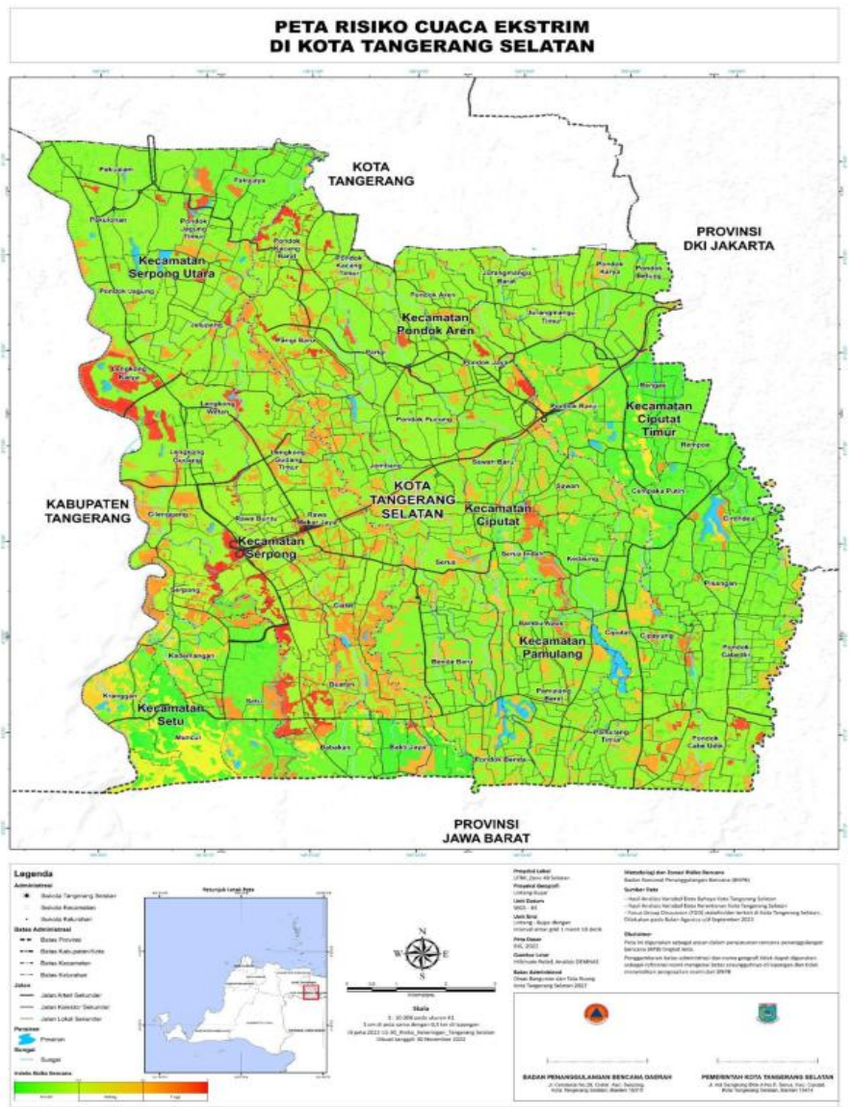
4) Cuaca Ekstrem

Sebaran tingkat risiko cuaca ekstrem per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam **Tabel II.54** dan **Gambar II.28**, di mana rata-rata luasan risiko cuaca ekstrem berkategori sedang.

Tabel II.54. Rekapitulasi Sebaran Risiko Cuaca Ekstrem di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Ciputat	-	1.665,98	449,82	2.115,80
2	Ciputat Timur	-	1.587,10	196,92	1.784,02
3	Pamulang	-	2.366,51	501,84	2.868,35
4	Pondok Aren	-	2.628,57	349,02	2.997,59
5	Serpong	-	2.068,13	775,71	2.843,84
6	Serpong Utara	-	1.926,49	291,06	2.217,55
7	Setu	-	1.100,25	578,07	1.678,32
Kota Tangerang Selatan		**-**	**13.343,03**	**3.142,44**	**16.485,47**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



Gambar II.28. Peta Risiko Cuaca Ekstrem di Kota Tangerang Selatan
(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)

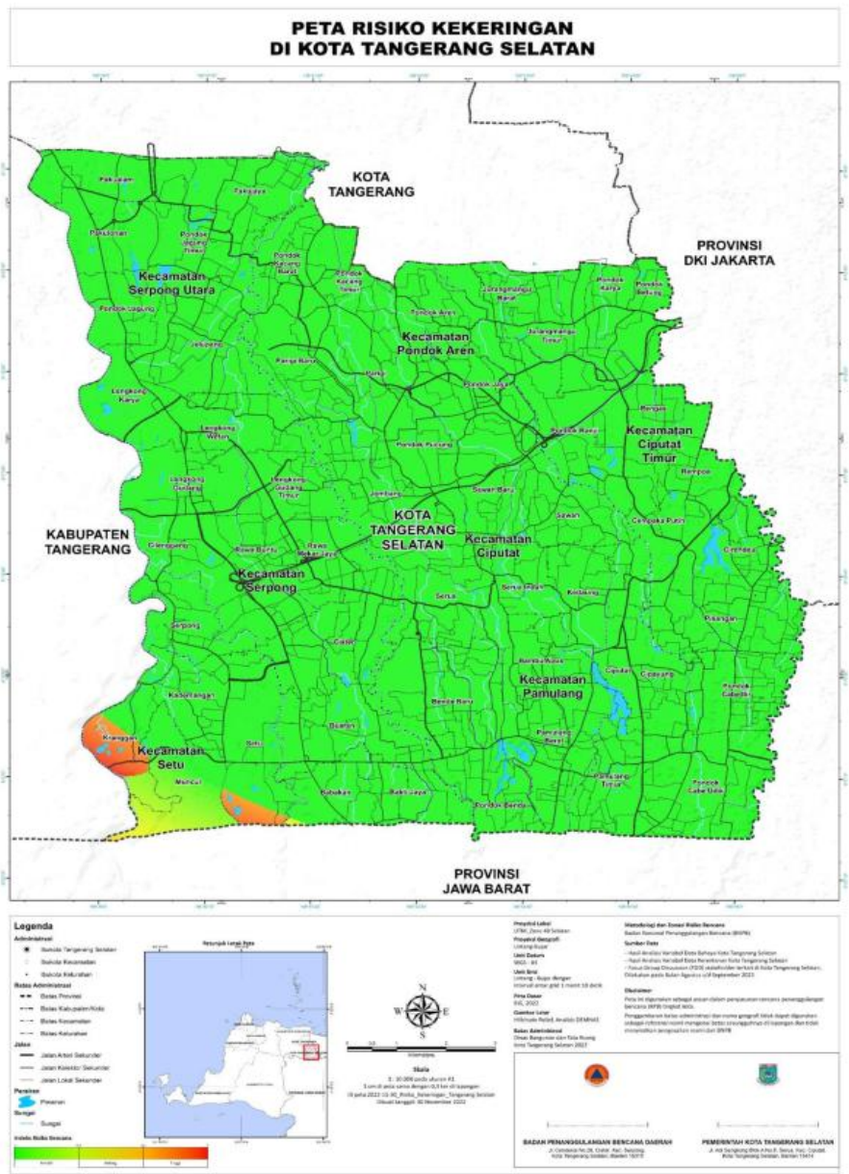
5) Kekeringan

Sebaran tingkat risiko kekeringan per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam **Tabel II.55** dan **Gambar II.29**, di mana rata-rata luasan risiko kekeringan berkategori rendah.

Tabel II.55. Rekapitulasi Sebaran Risiko Kekeringan di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Ciputat	2.115,80	-	-	2.115,80
2	Ciputat Timur	1.784,02	-	-	1.784,02
3	Pamulang	2.868,35	-	-	2.868,35
4	Pondok Aren	2.977,59	-	-	2.997,59
5	Serpong	2.843,84	-	-	2.843,84
6	Serpong Utara	2.217,55	-	-	2.217,55
7	Setu	1.246,23	435,09	-	1.678,32
Kota Tangerang Selatan		**16.053,38**	**432,09**	**-**	**16.485,47**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



Gambar II.29. Peta Risiko Kekeringan di Kota Tangerang Selatan
(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)

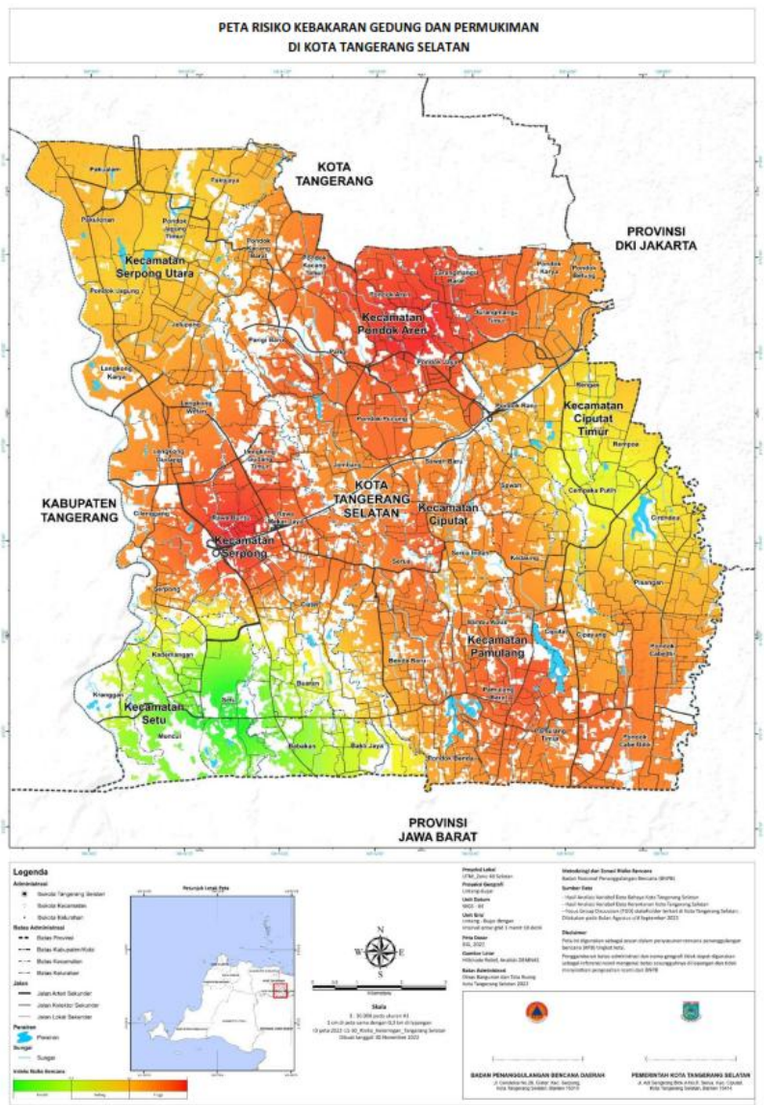
6) Kebakaran Gedung dan Permukiman

Sebaran tingkat risiko kebakaran gedung dan permukiman per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam **Tabel II.56** dan **Gambar II.30**, di mana rata-rata luasan risiko kebakaran gedung dan permukiman berkategori sedang.

Tabel II.56. Rekapitulasi Sebaran Risiko Kebakaran Gedung dan Permukiman di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Ciputat	-	1.567,80	-	1.567,80
2	Ciputat Timur	-	3.065,13	-	3.065,13
3	Pamulang	-	2.206,26	-	2.206,26
4	Pondok Aren	-	2.334,24	-	2.334,24
5	Serpong	85,23	1.794,60	-	1.879,83
6	Serpong Utara	-	1.811,25	-	1.811,25
7	Setu	435,06	555,48	-	990,54
Kota Tangerang Selatan		**520,29**	**13.334,76**	**-**	**13.855,05**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



Gambar II.30. Peta Risiko Kebakaran Gedung dan Permukiman di Kota Tangerang Selatan

(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)

Berdasarkan hasil analisis data pada **Tabel II.56** dan peta pada **Gambar II.30**, risiko kebakaran gedung dan permukiman di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh kategori sedang dengan luas sekitar 13.334,76 ha atau lebih dari 96 persen dari total wilayah berisiko. Hampir seluruh kecamatan, seperti Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, dan Serpong Utara, termasuk dalam kategori ini. Sementara itu, kategori risiko rendah hanya mencakup 520,29 ha, terutama di Kecamatan Setu dan sebagian Serpong. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah dengan ruang terbuka hijau lebih luas dan kepadatan permukiman rendah cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih kecil.

Peta juga memperlihatkan adanya kantong-kantong kawasan dengan potensi risiko lebih tinggi, terutama di Serpong dan Pondok Aren, yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan permukiman padat. Hal ini menegaskan bahwa kepadatan bangunan dan aktivitas manusia merupakan faktor utama penyebab kerentanan. Oleh karena itu, upaya mitigasi kebakaran perlu diarahkan pada penguatan sarana pemadam kebakaran di wilayah rawan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta integrasi kebijakan pencegahan dengan penataan ruang dan penyediaan ruang terbuka hijau.

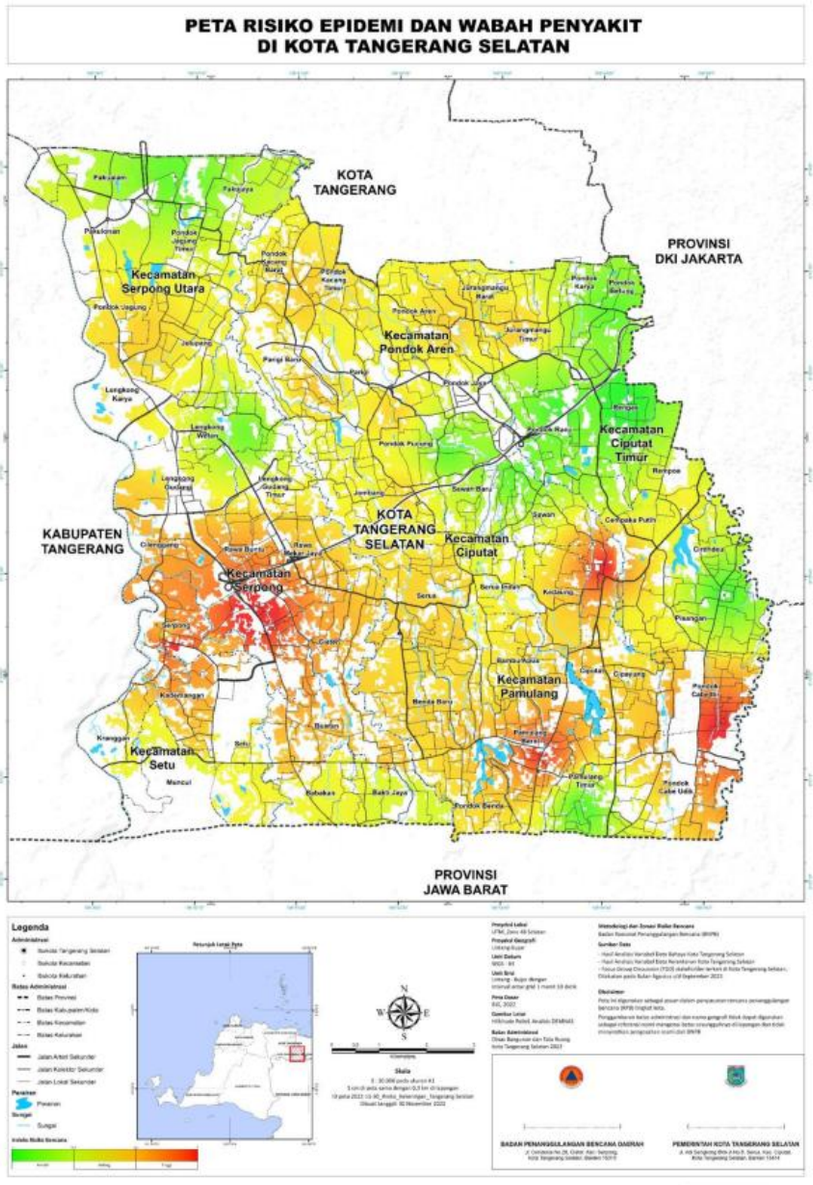
7) Epidemi dan Wabah Penyakit

Sebaran tingkat risiko Epidemi dan Wabah Penyakit per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam **Tabel II.57** dan **Gambar II.31**, di mana rata-rata luasan risiko Epidemi dan Wabah Penyakit berkategori sedang.

Tabel II.57. Rekapitulasi Sebaran Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Ciputat	236,25	1.296,36	-	1.532,61
2	Ciputat Timur	617,76	808,29	-	1.426,05
3	Pamulang	103,86	1.830,78	-	1.934,64
4	Pondok Aren	401,49	1.731,87	-	2.133,36
5	Serpong	138,51	1.469,97	-	1.608,48
6	Serpong Utara	428,22	1.029,51	-	1.457,73
7	Setu		733,95	-	733,95
Kota Tangerang Selatan		**1.926,09**	**8.900,73**	**-**	**10.826,82**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



Gambar II.31. Peta Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit di Kota Tangerang Selatan

(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)

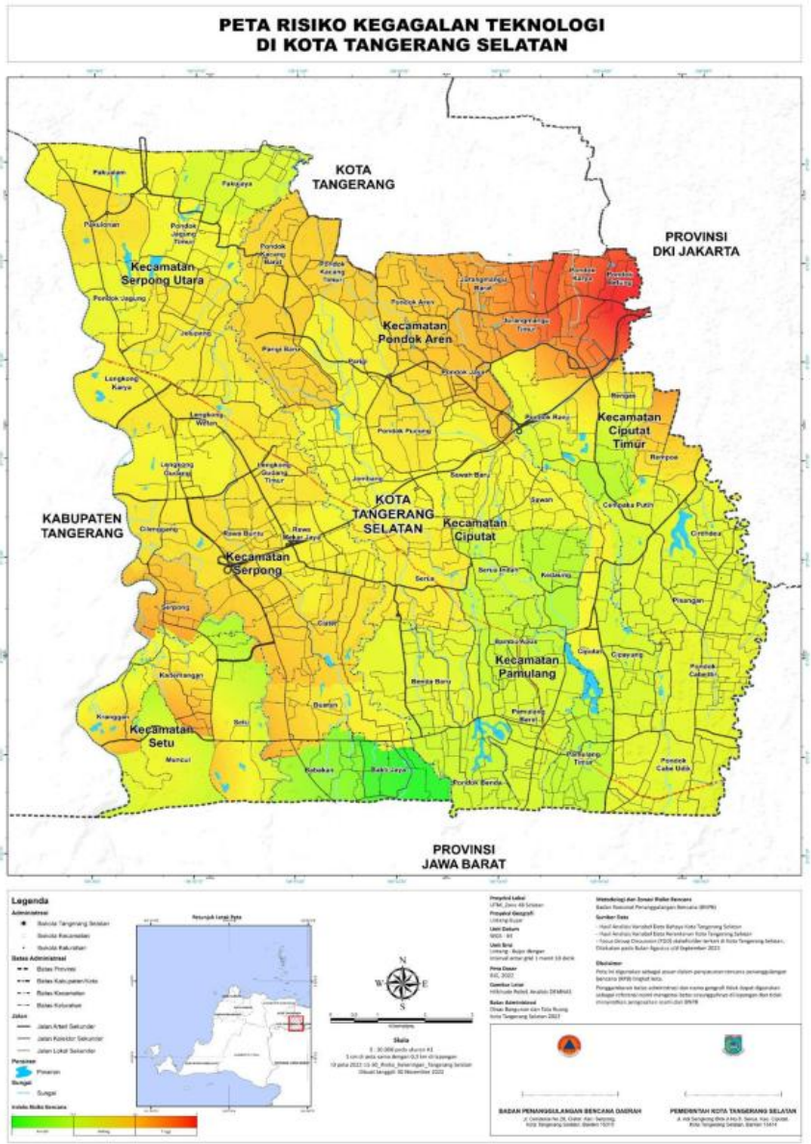
8) Kegagalan Teknologi

Sebaran tingkat risiko kegagalan teknologi per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam **Tabel II.58** dan **Gambar II.32**, di mana rata-rata luasan risiko kegagalan teknologi berkategori rendah.

Tabel II.58. Rekapitulasi Sebaran Risiko Kegagalan Teknologi di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Ciputat	2.106,53		9,27	2.115,80
2	Ciputat Timur	1.782,76	1,26		1.784,02
3	Pamulang	2.829,56	23,94	14,85	2.868,35
4	Pondok Aren	2.694,36	280,44	2,79	2.977,59
5	Serpong	1.585,10	1.251,54	7,20	2.843,84
6	Serpong Utara	2.213,86		3,69	2.217,55
7	Setu	81,45	1.217,07	379,80	1.678,32
Kota Tangerang Selatan		**13.293,62**	**2.774,25**	**417,60**	**16.485,47**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



Gambar II.32. Peta Risiko Kegagalan Teknologi di Kota Tangerang Selatan
(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)

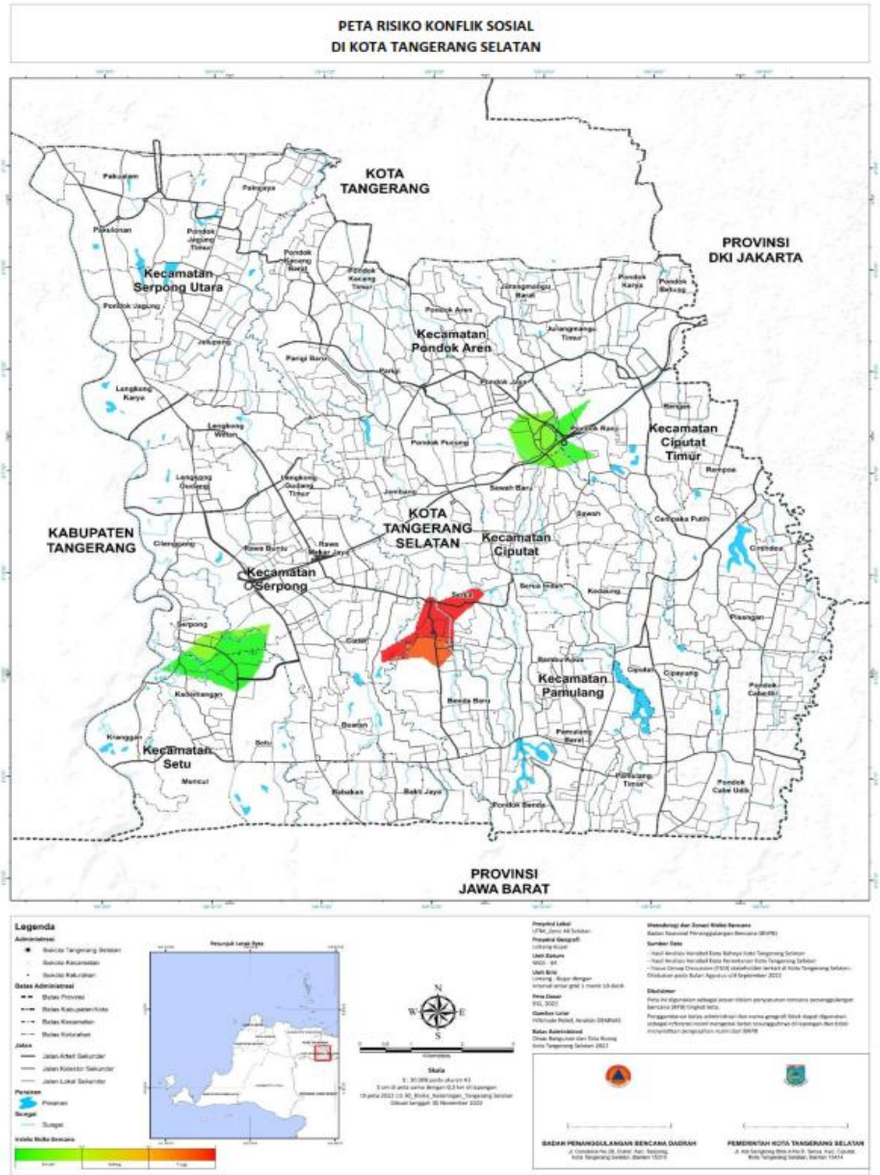
9) Konflik Sosial

Sebaran tingkat risiko konflik sosial per Kecamatan di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam **Tabel II.59** dan **Gambar II.33**, di mana rata-rata luasan risiko konflik sosial berkategori rendah.

Tabel II.59. Rekapitulasi Sebaran Risiko Konflik Sosial di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Ciputat	53,82	83,61	-	137,43
2	Ciputat Timur	39,87	-	-	39,87
3	Pamulang	-	42,93	-	42,93
4	Pondok Aren	43,02	-	-	43,02
5	Serpong	36,90	14,67	-	51,57
6	Serpong Utara	-	-	-	
7	Setu	134,82	-	-	134,82
Kota Tangerang Selatan		**308,43**	**141,21**	**-**	**449,64**

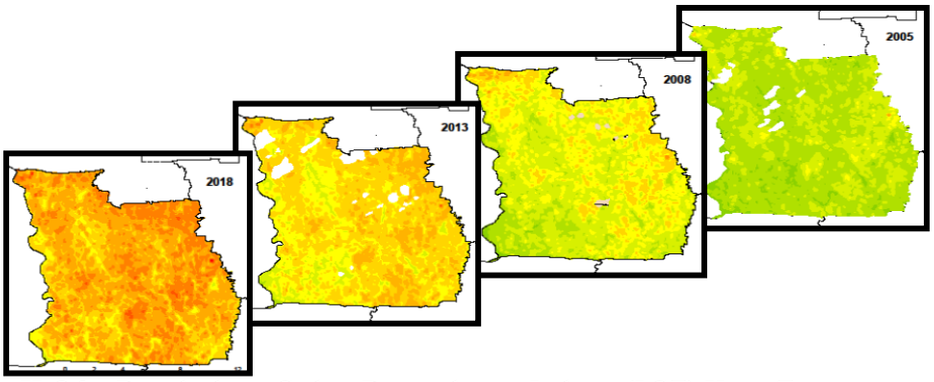
Sumber: Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2022-2026



Gambar II.33. Peta Risiko Konflik Sosial di Kota Tangerang Selatan
(Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026)

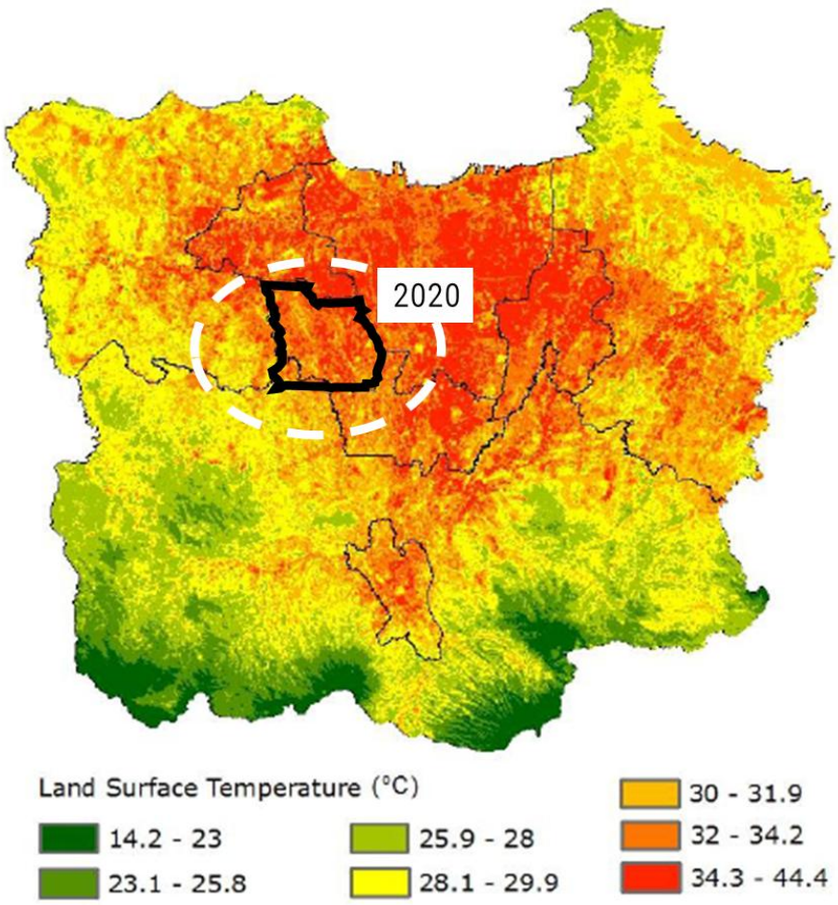
2.1.6.2. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan nitro oksida (N_2O) berperan sebagai penyumbang utama pemanasan global melalui efek rumah kaca. Ketika GRK terakumulasi di atmosfer, mereka menyerap dan memantulkan kembali radiasi panas dari Bumi ke permukaan, sehingga meningkatkan suhu rata-rata global (*global warming*). Peningkatan suhu rata-rata global dirasakan di Kota Tangerang Selatan. Penelitian mengenai *Urban Heat Island/UHI* di Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh Stella Oktavianingrum et al., 2020 menunjukkan bahwa selama periode 2005-2018 telah terjadi kenaikan suhu permukaan lahan sebagai akibat dari perubahan tutupan vegetasi selama periode waktu penelitian. Perubahan tutupan lahan bervegetasi menjadi non vegetasi berkecenderungan meningkatkan suhu permukaan lahan di wilayah Kota Tangerang Selatan, sebagaimana digambarkan dalam **Gambar II.34**. Perubahan tutupan lahan dari vegetasi menjadi non vegetasi penunjang aktivitas manusia (permukiman, dan infrastruktur) secara masif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mempercepat perubahan iklim.



Gambar II.34. Perubahan Suhu Permukaan Lahan (LST) Kota Tangerang Selatan 2005-2018
Sumber: analisis (2023)

Penelitian suhu permukaan tanah di wilayah Jakarta dan sekitarnya termasuk Kota Tangerang Selatan juga dilakukan oleh A.B Raya dan H.S Hasibuan, 2020, di mana Jakarta dan daerah pinggiran di Metropolitan (Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Depok) memiliki suhu permukaan di atas 30°C. Konfigurasi ruang menunjukkan bahwa suhu permukaan lahan semakin menurun seiring dengan bertambahnya jarak dari Kota Jakarta. Sebaran suhu permukaan lahan (*Land Surface Temperature*/LST) di wilayah Jabodetabek tahun 2020, menunjukkan nilai LST yang semakin meningkat sebagai mana ditunjukkan dalam **Gambar II.35**.



LST	Jakarta	Tangerang Ct.	Bekasi Ct.	Depok Ct.	Bogor Ct.	Tangsel Ct.
28-30	2.65%	3.51%	1.07%	4.64%	18.75%	2.70%
30-32	8.81%	16.35%	10.26%	26.07%	32.46%	17.48%
32-34	35.36%	38.40%	39.60%	41.93%	37.49%	49.15%
34-45	52.75%	41.59%	48.94%	27.32%	8.90%	30.65%

Gambar II.35. Suhu Permukaan Tanah wilayah Jakarta dan sekitarnya, termasuk Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Sumber: analisis (2023)

2.1.7. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan indikator kunci dalam menilai kesesuaian pembangunan fisik suatu daerah dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan ruang RTRW dilakukan terhadap tingkat kesesuaian perwujudan struktur ruang dan tingkat kesesuaian perwujudan pola ruang. Penilaian kesesuaian struktur ruang dilakukan berdasarkan kesesuaian program dan lokasi program yang membentuk struktur ruang. Sementara itu penilaian kesesuaian pola ruang dilakukan berdasarkan pada:

1. Kesesuaian program dan lokasi program untuk semua pemanfaatan ruang yang membentuk pola ruang;
2. Kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan pada hasil overlay peta rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW dengan peta tutupan lahan eksisting tahun 2023;
3. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan melihat pula kesesuaian program, kesesuaian lokasi, dan juga kesesuaian waktu pelaksanaan pada dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Pembangunan Tangerang Selatan sebagai bahan sandingan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kesesuaian program kegiatan perwujudan struktur ruang dan perwujudan pola ruang Kota Tangerang Selatan dengan RTRW Kota Tangerang Selatan dan RDTR Kota Tangerang Selatan didapat hasil sebagai berikut:

1. Kesesuaian program 63,27 persen;
2. Kesesuaian lokasi 65,41 persen; dan
3. Kesesuaian waktu pelaksanaan sebesar 64,95 persen.

Terdapat 3 (tiga) kategori penilaian atas hasil evaluasi perwujudan program rencana tata ruang yaitu:

1. Terwujud, jika nilai perwujudannya > 85 persen (delapan puluh lima persen) artinya pelaksanaan (realisasi) sudah bersesuaian dengan program rencana tata ruang.
2. Belum Terwujud, jika nilai perwujudannya < 85 persen (delapan puluh lima persen) artinya pelaksanaan (realisasi) belum bersesuaian dengan program rencana tata ruang.
3. Tidak sesuai, jika nilai perwujudannya 0 persen artinya program rencana tata ruang belum terealisasi (terlaksana) atau tidak sesuai dengan program rencana tata ruang (terindikasi terjadi pelanggaran).

Berdasarkan kategori tersebut, keseluruhan hasil evaluasi (penilaian) perwujudan program RTRW Kota Tangerang Selatan adalah belum terwujud dengan rata-rata nilai perwujudan 62,73 persen, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.60**. Hal tersebut mengamanatkan perlunya dokumen RTRW Kota Tangerang Selatan dilakukan revisi, tidak hanya untuk menyesuaikan substansi dengan perkembangan kebijakan nasional dan daerah, tetapi juga untuk memperkuat instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Revisi

tersebut perlu diarahkan pada peningkatan integrasi dokumen perencanaan, harmonisasi regulasi serta penguatan mekanisme implementasi dan pengawasan, sehingga risiko ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, konflik penggunaan lahan, serta menurunnya kualitas lingkungan dan daya dukung wilayah yang semakin besar dapat ditekan.

Tabel II.60. Penilaian Perwujudan Program RTRW di Kota Tangerang Selatan

No	Aspek Penilaian	Nilai Akhir	Nilai Bobot (%)	Perkalian Bobot
1.	Kualitas RTRW	2,14	30	64,20
2.	Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan	2,00	30	60,00
3.	Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	1,60	40	64,00
Total		**5,74**	**100**	**188,20**
Rata-Rata Nilai Penilaian Akhir		**1,91**		**62,73**

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

2.1.8. Demografi

2.1.8.1. Struktur Kependudukan

Pembangunan daerah dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Karena itulah, data kependudukan merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan. Data kependudukan di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.61.**

Tabel II.61. Data Kependudukan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Umur	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
0–4	52.970	50.640	51.500	49.210	50.200	47.920	49.070	46.820	48.100	45.960
5–9	56.880	54.270	56.330	54.080	55.630	53.670	54.780	53.000	53.580	51.860
10–14	56.950	53.120	57.140	53.480	57.220	53.830	57.140	54.120	56.790	54.170
15–19	54.920	52.000	55.260	52.060	55.650	52.240	56.080	52.510	56.300	52.700
20–24	54.280	53.490	54.290	53.200	54.280	52.840	54.340	52.510	54.070	51.860
25–29	54.410	54.960	54.490	54.750	54.440	54.490	54.320	54.230	53.810	53.430
30–34	53.550	56.370	53.530	56.130	53.680	55.880	53.970	55.640	53.850	55.090
35–39	55.920	57.470	55.590	57.520	55.020	57.360	54.340	57.070	53.540	56.540
40–44	53.820	54.660	54.400	55.310	54.910	55.970	55.310	56.580	55.320	56.910
45–49	49.290	50.740	50.220	51.830	51.020	52.650	51.740	53.270	52.280	53.740
50–54	42.190	42.310	43.420	43.770	44.660	45.440	45.870	47.200	46.940	48.790
55–59	34.650	36.200	35.970	37.530	37.160	38.550	38.270	39.430	39.330	40.340
60–64	25.130	25.510	26.450	27.340	27.960	29.380	29.540	31.470	31.050	33.410
65–69	18.180	17.610	19.330	19.030	20.160	20.240	20.840	21.350	21.590	22.570
70–74	7.180	7.430	8.700	8.900	10.450	10.640	12.240	12.480	13.850	14.240
75+	6.310	7.920	6.470	8.150	6.710	8.500	7.120	9.020	7.750	9.770
Jumlah	**676.630**	**674.700**	**683.090**	**682.290**	**689.150**	**689.600**	**694.970**	**696.700**	**698.150**	**701.380**
Jumlah Total	**1.351.330**		**1.365.380**		**1.378.750**		**1.391.670**		**1.399.530**	
laju pertumbuhan	**0,47**		**1,12**		**1,01**		**0,99**		**0,88**	
Kepadatan (jiwa/km^2)	**8.197**		**8.282**		**8.363**		**8.442**		**8,489**	

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020 Laju pertumbuhan dihitung menggunakan rumus geometrik terhadap tahun dasar sensus (tahun 2020)

Berdasarkan data dalam **Tabel II.61**, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu 2020-2024 menurun dibandingkan tahun 2020 (tahun sensus). Penurunan ini dapat disebabkan karena menurunnya tingkat kelahiran di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SIPERINDU) BKKBN, *Total Fertility Rate* (TFR) Kota Tangerang Selatan tahun 2022-2024 sebesar 1,71, yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15-49 tahun). Sebagai daerah urban, karakteristik fertilitas di Kota Tangerang Selatan yang rendah disebabkan karena faktor pendidikan, ekonomi dan akses KB yang baik. Analisa penduduk berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan di Kota Tangerang Selatan meningkat dibandingkan jumlah penduduk laik-laki. Kondisi menggambarkan pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kota Tangerang Selatan.

2.1.8.2. Struktur Kependudukan berdasarkan Proyeksi Penduduk

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan. Perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. Hasil sensus, survei, dan data administratif menyediakan informasi penduduk untuk kondisi saat pendataan tersebut dilakukan. Namun, penyusunan perencanaan dan kebijakan sesuai dinamika waktu di masa mendatang membutuhkan informasi proyeksi penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk akan membantu memonitor dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta merancang kebijakan.

Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Pembentukan asumsi untuk ketiga komponen tersebut dilakukan menggunakan data-data yang menggambarkan tren di masa lampau, faktor-faktor yang memengaruhi, dan hubungannya satu sama lain. Penerapan asumsi yang digunakan akan menentukan hasil proyeksi jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan.

Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Kesehatan, serta para pakar kependudukan dalam menyusun asumsi perhitungan proyeksi penduduk. Proyeksi ini disusun dengan menggunakan metode komponen kohort berdasarkan asumsi kecenderungan fertilitas, mortalitas, serta migrasi (baik migrasi internasional maupun migrasi internal antarprovinsi) yang dipekirakan terjadi selama periode 30 (tiga puluh) tahun ke depan. Proyeksi penduduk Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada tahap pertama, dilakukan penghitungan proyeksi penduduk nasional. Selanjutnya, dihitung proyeksi penduduk per provinsi. Adapun hasil proyeksi penduduk nasional digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi proyeksi pada level provinsi. Dengan demikian, total penduduk seluruh provinsi akan konsisten dengan proyeksi penduduk nasional yang digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi. Setelah itu, dihitung proyeksi penduduk per kabupaten/kota. Hasil proyeksi penduduk pada tingkat provinsi digunakan sebagai acuan dalam proses iterasi proyeksi di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, total penduduk seluruh kabupaten/kota dalam suatu

provinsi akan konsisten dengan hasil proyeksi penduduk provinsi yang digunakan sebagai acuan tersebut.

Penduduk dasar yang digunakan dalam proyeksi penduduk 2020–2035 adalah penduduk pertengahan tahun hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Mengingat pentingnya akurasi data penduduk dasar, dilakukan *assessment* terhadap komposisi penduduk dasar menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Dengan mempertimbangkan struktur piramida penduduk hasil SP2020 yang mengindikasikan terjadinya *age heaping*, maka dilakukan perapihan umur dengan teknik Arriaga agar kesalahan pelaporan umur tidak berlanjut sepanjang periode proyeksi. Hasil proyeksi sangat ditentukan oleh asumsi yang digunakan. Oleh karena itu, penetapan asumsi merupakan kunci penghitungan proyeksi penduduk. Secara umum, asumsi mengenai kecenderungan angka kelahiran, angka kematian, serta perpindahan penduduk ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di masa lalu. Namun, informasi ini belum dapat ditentukan sebagai dasar proyeksi, masih diperlukan pandangan pakar demografi dan pemangku kebijakan sehubungan dengan kebijakan di masa datang. Masukan dari pertemuan tersebut menjadi pedoman tim teknis BPS dalam menentukan asumsi yang dipakai dalam penghitungan proyeksi. Selanjutnya, tim teknis BPS melakukan penghitungan proyeksi penduduk dengan menggunakan program *Rural Urban Projection* (RUP). Angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi di masa mendatang tidak dapat diprediksi, maka diperlukan beberapa kemungkinan perubahan yang akan terjadi pada setiap asumsi.

Proyeksi penduduk yang disajikan dalam bab ini bukanlah merupakan suatu prediksi atau perkiraan. Proyeksi di dalam bab ini adalah penilaian tentang apa yang akan terjadi pada penduduk Kota Tangerang Selatan jika diasumsikan perubahan komponen penduduk seperti kelahiran, kematian, dan migrasi diproyeksikan selama dua puluh tahun ke depan dari tahun 2025 hingga 2045. Data proyeksi penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2030 disajikan dalam **Tabel II.62**, di mana terlihat bahwa pada tahun 2029 jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan dinilai akan mencapai 1.415.180 jiwa dengan kepadatan 8.584 jiwa/km^2 dan tahun 2030 akan mencapai 1.419.140 jiwa dengan kepadatan 8.608 jiwa/km^2.

Tabel II.62. Proyeksi Struktur Kependudukan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2030

Umur	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
0–4	47.220	45.360	46.750	44.900	46.160	44.330	45.500	43.690	44.790	43.010	44.140	42.370
5–9	52.210	50.290	50.540	48.660	49.140	47.270	48.000	46.170	47.130	45.400	46.340	44.870
10–14	56.130	53.930	55.290	53.470	54.300	52.770	53.160	51.820	51.870	50.590	50.640	49.160
15–19	56.300	52.770	56.220	52.900	56.070	53.050	55.820	53.180	55.470	53.220	54.930	53.090
20–24	53.590	51.060	53.360	50.580	53.360	50.390	53.530	50.450	53.810	50.720	54.060	51.050
25–29	52.930	52.120	52.170	50.910	51.520	49.830	50.990	48.900	50.620	48.200	50.510	47.830
30–34	53.220	54.110	52.520	53.110	51.810	52.090	51.120	51.070	50.490	50.030	49.990	49.120
35–39	52.660	55.770	52.050	55.050	51.630	54.350	51.340	53.660	51.030	52.980	50.690	52.250
40–44	54.900	56.890	54.190	56.620	53.280	56.170	52.280	55.590	51.400	54.980	50.720	54.370
45–49	52.640	54.120	52.960	54.570	53.220	55.030	53.370	55.460	53.310	55.750	53.020	55.830
50–54	47.820	50.040	48.580	51.000	49.220	51.680	49.780	52.170	50.280	52.610	50.710	53.060
55–59	40.370	41.420	41.460	42.780	42.570	44.350	43.650	46.000	44.660	47.540	45.570	48.820
60–64	32.390	35.030	33.570	36.290	34.640	37.260	35.630	38.080	36.610	38.960	37.640	40.050
65–69	22.520	24.010	23.700	25.740	25.030	27.660	26.440	29.640	27.800	31.480	29.040	33.040
70–74	15.130	15.770	16.070	17.050	16.760	18.140	17.330	19.170	17.980	20.300	18.810	21.650
75+	8.650	10.810	9.830	12.170	11.260	13.830	12.830	15.720	14.430	17.730	15.970	19.800
Jumlah	**698.680**	**703.500**	**699.260**	**705.800**	**699.970**	**708.200**	**700.770**	**710.770**	**701.680**	**713.500**	**702.780**	**716.360**
Jumlah Total	**1.402.180**		**1.405.060**		**1.408.170**		**1.411.540**		**1.415.180**		**1.419.140**	
Kepadatan (jiwa/km²)	**8.505**		**8.523**		**8.542**		**8.562**		**8.584**		**8.608**	

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Banten

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu wilayah urban yang berkembang pesat di Provinsi Banten, dengan dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh kedekatannya dengan Provinsi DKI Jakarta. Untuk memahami tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dapat dianalisis melalui beberapa indikator ekonomi utama, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB per Kapita, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Indeks Gini, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan digambarkan berdasarkan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di mana PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu tanpa memerhatikan kepemilikan faktor produksi yang digunakan (residen-non residen). Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. Perkembangan PDRB ADHK Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.63**, di mana terlihat bahwa Perekonomian Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun 2023. Laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Selatan tahun 2024 sebesar 5,02 persen, sedangkan tahun 2023 sebesar 5,36 persen.

Tabel II.63. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,33	0,73	1,78	0,58	-3,88
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	-8,72	1,67	8,35	3,66	7,96
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-7,05	4,27	10,45	2,98	6,93
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,20	5,85	3,26	5,59	3,93
F. Konstruksi	-5,03	11,79	6,07	1,99	3,97
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,76	2,573	7,25	3,84	3,92
H. Transportasi dan Pergudangan	-8,06	10,64	6,23	5,86	5,44
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,75	4,87	8,78	9,55	9,04
J. Informasi dan Komunikasi	8,78	6,69	6,65	8,59	5,98
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,55	4,89	0,22	2,90	0,68
L. *Real estat*	1,78	3,15	6,01	3,99	2,20
M,N. Jasa Perusahaan	-5,92	-1,06	7,03	8,82	5,58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,71	-5,09	7,35	5,46	21,93
P. Jasa Pendidikan	0,87	-0,97	-1,19	6,71	5,48
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,95	10,91	0,95	7,53	8,49
R,S,T,U. Jasa lainnya	-6,87	1,49	5,74	10,76	5,48
Pertumbuhan PDRB	**-1,01**	**4,81**	**5,82**	**5,36**	**5,02**

*Catatan / Note: * Angka sementara ** Angka sangat sementara*
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Hampir semua lapangan usaha pada tahun 2024 mencatat pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan tertinggi di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan sosial wajib sebesar 21,93 persen. Lapangan usaha ini merupakan satu-satunya yang tumbuh hingga dua digit. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh tinggi diantaranya adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,04 persen dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial sebesar 8,49 persen. Sementara itu, Konstruksi yang merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian Kota Tangerang Selatan, mencatat pertumbuhan sebesar 3,97 persen. Sementara itu, hanya ada satu lapangan usaha yang mengalami kontraksi di tahun 2024 yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang terkontraksi sebesar 3,88 persen.

Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan peraturannya. Selama tahun 2020- 2024 peranannya relatif stabil, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 1,42 persen (2020), 1,30 persen (2021), 1,33 persen (2022), 1,34 persen (2023), dan 1,58 persen (2024). Pertumbuhan signifikan lapangan usaha ini pada tahun 2024 disebabkan karena penyelenggaraan Pilkada dan Pilpres secara serentak. Peningkatan aktivitas Pemerintahan dan anggaran penyelenggaraan Pilkada dan Pilpres mendorong pertumbuhannya. Selain itu, umumnya saat momen politik tersebut, Pemerintah baik Pusat dan Daerah cenderung meningkatkan belanja pada program jaminan sosial sebagai stimulus untuk menjaga stabilitas sosial. Adanya dana kampanye juga turut mendorong pertumbuhan sektor Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan sosial wajib. Walaupun pertumbuhannya sangat tinggi pada tahun 2024, namun pertumbuhan sektor lapangan usaha ini sifatnya sementara/temporary dan hanya terjadi menjelang Pilkada/Pilpres saja.

Pada tahun 2024, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan sebesar 3,04 persen, di mana sebesar 3,01 persen merupakan kontribusi dari sub lapangan usaha Penyediaan Makan Minum (99,13 persen terhadap total lapangan usaha) dan sebesar 0,03 persen disumbangkan oleh sub lapangan usaha Penyediaan Akomodasi (0,87 persen terhadap total lapangan usaha). Masing-masing sub kategori pada lapangan usaha ini mengalami kenaikan pertumbuhan, yaitu Penyediaan Akomodasi sebesar 0,18 persen dan Penyediaan Makan Minum sebesar 9,13 persen. Sektor lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Tangerang Selatan berkaitan erat dengan sektor pariwisata. Upaya promosi pariwisata melalui *city branding* destinasi wisata untuk menarik minat wisatawan datang dan menginap lama di Kota Tangerang Selatan sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan kontribusi sub sektor penyediaan akomodasi.

Jasa kesehatan dan Kegiatan sosial mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2024, kontribusinya terhadap perekonomian Kota Tangerang Selatan sebesar 5,04 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 8,49 persen. Hal tersebut didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap di Kota Tangerang Selatan. Pertumbuhan tinggi pada sektor jasa kesehatan di Kota Tangerang Selatan merupakan gambaran potensi yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan *health tourism* menjadi wisata unggulan di Kota Tangerang Selatan.

Selain tiga sektor lapangan usaha dari kelompok lapangan usaha tersier yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 sebagaimana digambarkan di atas, terdapat sektor lapangan usaha sekunder yang mencatatkan pertumbuhan tinggi juga, yaitu sektor Industri Pengolahan. Pada lapangan usaha Industri Pengolahan, sub lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar adalah Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yaitu sebesar 59,44 persen pada tahun 2024. Selanjutnya diikuti oleh Industri Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media sebesar 24,60 persen. Dari sisi pertumbuhan pada tahun 2024, sub lapangan usaha Industri Pengolahan yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yaitu sebesar 10,35 persen, diikuti Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik yaitu sebesar 9,53 persen, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik sebesar 9,38 persen, dan Industri Makanan dan Minuman sebesar 6,85 persen. Pertumbuhan sub sektor Industri Makanan dan Minuman yang menempati posisi keempat tertinggi menggambarkan potensi kontribusi sub sektor ini, apalagi jika dikaitkan dengan pertumbuhan sektor lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencatatkan pertumbuhan kedua tertinggi pada tahun 2024.

Jika disandingkan dalam konstelasi regional Provinsi Banten, pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Kota Tangerang. Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan berada sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional. Gambaran tersebut disajikan dalam **Tabel II.64**.

Tabel II.64. Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan dalam Konstelasi Regional dan Nasional Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023*	2024**
Kab Pandeglang	-0,67	3,1	3,47	2,53	2,75
Kab Lebak	-0,91	3,18	3,80	2,80	2,95
Kab Tangerang	-3,76	4,7	5,47	5,18	5,00
Kab Serang	-2,73	3,74	5,04	4,80	4,78
Kota Tangerang	-7,36	3,9	5,98	5,57	5,04
Kota Cilegon	-1,23	5,24	4,51	4,82	4,84
Kota Serang	-1,29	3,88	4,71	4,74	4,71
Kota Tangerang Selatan	**-1,01**	**4,81**	**5,82**	**5,36**	**5,02**
Provinsi Banten	**-3,38**	**4,44**	**5,03**	**4,81**	**4,79**
Nasional	**-2,07**	**3,69**	**5,31**	**5,05**	**5,03**

*Catatan / Note: * Angka sementara ** Angka sangat sementara*
Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

Selain berdasarkan pertumbuhan, perekonomian Kota Tangerang Selatan dapat tergambar dari struktur ekonominya, yaitu dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. Selama periode 2020-2024, struktur ekonomi masyarakat Tangerang Selatan telah bergeser dari kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier yang terlihat dari besarnya kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2024, kelompok lapangan usaha tersier memberikan sumbangan sebesar 74,60 persen yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 76,11 persen. Kelompok lapangan usaha primer tahun 2024 memberikan sumbangan sebesar 0,19 persen. Kelompok lapangan usaha primer mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 0,22 persen. Sementara lapangan usaha sekunder sebesar 25,21 persen mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang sebesar 23,66 persen. Apabila dilihat menurut lapangan usahanya, ada tiga lapangan usaha utama yang menopang perekonomian Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024, yaitu lapangan usaha Konstruksi, *Real estat* dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor. Lapangan usaha Konstruksi memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 16,94 persen, kemudian disusul lapangan usaha *Real estat* sebesar 16,93 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor sebesar 16,68 persen. Selanjutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi menyumbang 10,95 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan memberikan sumbangan sebesar 8,31 persen dan Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 8,09 persen. Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan disajikan dalam **Tabel II.65**.

Tabel II.65. Distribusi Persentase PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	7,84	7,58	7,96	7,82	8,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F. Konstruksi	15,64	17,29	17,82	17,39	16,94
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,64	16,21	16,73	16,70	16,68
H. Transportasi dan Pergudangan	3,20	3,41	3,50	3,69	3,72
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,87	2,84	2,87	2,93	3,04
J. Informasi dan Komunikasi	11,14	11,13	10,93	11,01	10,95
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,48	1,47	1,42	1,40	1.34
L. *Real estat*	18,55	18,12	17,68	17,42	16,93
M,N. Jasa Perusahaan	3,76	3,54	3,57	3,72	3,71
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,42	1,30	1,33	1,34	1,58
P. Jasa Pendidikan	9,33	8,71	7,95	8,01	8,31
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,69	4,98	4,79	4,89	5,04
R,S,T,U. Jasa lainnya	3,13	3,02	3,07	3,30	3,29
Total %	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

*Catatan / Note: * Angka sementara ** Angka sangat sementara*
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025

Berdasarkan gambaran Distribusi Persentase PDRB Kota Tangerang Selatan disajikan dalam **Tabel II.65**, struktur perekonomian Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024 didominasi sektor *real estat*, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan informasi dan komunikasi. Sektor real estat cenderung menurun dari 18,55% pada tahun 2020 menjadi 16,93% pada tahun 2024. Sementara konstruksi relatif stabil meskipun mulai

melandai akibat keterbatasan lahan. Perdagangan besar dan eceran tetap kuat di kisaran 16-17%, sedangkan informasi dan komunikasi sedikit melemah. Pada saat yang sama, sektor jasa publik seperti pendidikan dan kesehatan menunjukkan peran signifikan, terutama kesehatan yang terus meningkat sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan perkembangan tersebut, potensi diversifikasi ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor prospektif.

Data pada **Tabel II.66** menunjukkan sektor informasi–komunikasi dan jasa pendidikan termasuk kategori prima, sedangkan penyediaan akomodasi–makan minum, jasa kesehatan, jasa perusahaan, dan jasa lainnya tergolong potensial. Adapun konstruksi, *real estat*, dan perdagangan besar–eceran masuk kategori berkembang, sementara sektor seperti pertanian, keuangan, dan pengadaan air–limbah berada pada kategori terbelakang. Dengan demikian, arah diversifikasi ekonomi perlu difokuskan pada sektor prospektif melalui riset, inovasi, dan kebijakan pendukung agar mampu menjadi motor pertumbuhan baru di luar sektor dominan saat ini. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar), masih menyimpan ruang peningkatan produktivitas, terutama melalui penguatan UMKM agar lebih terintegrasi dengan rantai pasok domestik maupun global. Sektor *real estat* meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian *real estat* serta penyediaan jasa real estat lainnya juga tetap potensial, khususnya dengan pengembangan lingkungan hunian yang inklusif dan nyaman, yang dapat menarik generasi muda untuk tinggal dan beraktivitas di Tangerang Selatan. Arah pengembangan ini sejalan dengan Visi Kota Tangerang Selatan 2045 yang ingin mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai hunian yang nyaman dan maju.

Tabel II.66. Potensi Sektor Lapangan Usaha di Kota Tangerang Selatan (berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2023-2024)

Kategori	Uraian Lapangan Usaha	PDRB (miliar rupiah)	PDRB (miliar rupiah)	Pertumbuhan (SEKTOR) (%)	Kontribusi	Rerata kontribusi sektoral terhadap PDRB	Rerata laju pertumbuhan sektoral	Tipologi Klassen	Potensi Sektor
		2023	2024						
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	118,47	113,87	-3,88%	0,16%	<	<	Sektor Terbelakang	Non-Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0			0,00%	-		-	-
C	Industri Pengolahan	5.221,97	5.637,87	7,96%	7,72%	>	>	Sektor Prima	Non-Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	66,81	71,44	6,93%	0,10%	>	<	Sektor Potensial	Non Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34,86	36,23	3,93%	0,05%	<	<	Sektor Terbelakang	Non Basis
F	Konstruksi	9571,44	9951,07	3,97%	13,62%	<	>	Sektor Berkembang	Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.939	11.369	3,92%	15,56%	<	>	Sektor Berkembang	Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	2.158,91	2.276,28	5,44%	3,12%	>	<	Sektor Potensial	Non-Basis
I	Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2.124,38	2.316,39	9,04%	3,17%	>	<	**Sektor Potensial**	**Basis**
J	Informasi dan Komunikasi	13.074	13.856	5,98%	18,97%	>	>	**Sektor Prima**	**Basis**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	868,18	874,08	0,68%	1,20%	<	<	Sektor Terbelakang	Non Basis
L	*Real estat*	13.003	13.288	2,19%	18,19%	<	>	Sektor Berkembang	Basis
M,N	Jasa Perusahaan	2.217,94	2.341,76	5,58%	3,21%	>	<	Sektor Potensial	Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	656,57	800,55	21,93%	1,10%	>	<	Sektor Potensial	Non Basis
P	Jasa Pendidikan	4.536,15	4.784,64	5,48%	6,55%	>	>	**Sektor Prima**	**Basis**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.106,11	3.369,75	8,49%	4,61%	>	<	**Sektor Potensial**	**Basis**
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.836,82	1.965,97	7,03%	2,69%	>	<	Sektor Potensial	Basis
Jumlah		**69.562,29**	**73.052,84**	**5,02%**	**100%**				
Rerata PDRB		**4.090,31**	**4.565,80**						

2.2.1.2. PDRB per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Pada tahun 2024, secara agregat PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan mencapai 80,18 juta rupiah atau sebesar US$ 5.059,03. PDRB per kapita tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,90 persen, walaupun mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun 2023, yang mencatatkan nilai 75,01 juta rupiah (US$ 4.922,68). Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2024, tren peningkatan ekonomi di Kota Tangerang Selatan masih berlanjut, yang juga menggambarkan pendapatan masyarakat masih berlanjut untuk mengalami peningkatan. Data PDRB per Kapita Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.67**. Tantangan ke depan adalah memastikan PDRB per kapita tumbuh berkelanjutan dan inklusif. Diversifikasi ekonomi, penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif, serta penciptaan lapangan kerja produktif perlu terus didorong agar kenaikan pendapatan per kapita tidak hanya bersifat agregat, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel II.67. PDRB Per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB per Kapita (juta rupiah)	61,02	64,50	69,73	75,01	80,18
PDRB per Kapita (US $)	4.191,93	4.507,63	4.696,33	4.922,68	5.059,03
Indeks Perkembangan PDRB per Kapita (2010=100)	259,54	274,35	296,59	319,05	341,05
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)	23,65	5,71	8,11	7,57	6,90

*Keterangan: *) Hasil perhitungan sementara*
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025

2.2.1.3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan multi dimensi yang mencakup ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di suatu wilayah, digunakan beberapa indikator kemiskinan, yaitu garis kemiskinan (GK), persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Keempat indikator ini juga digunakan sebagai alat perencanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Penghitungan angka kemiskinan menggunakan garis kemiskinan yang diperoleh dari data pengeluaran, sebagai batas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Adapun penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Data-data kemiskinan yang digunakan bersumber dari Susenas yang dilaksanakan oleh BPS pada tiap bulan Maret dan September. Dimensi kemiskinan di Kota Tangerang Selatan beserta Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten disajikan dalam **Tabel II.68**. menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kota Tangerang Selatan terus meningkat sepanjang periode 2020–2024, dan pada tahun 2024 mencapai Rp828.278 per kapita per bulan, tertinggi di Provinsi Banten. Peningkatan garis kemiskinan ini terjadi seiring naiknya harga barang/jasa serta

perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin kompleks, mencerminkan standar hidup minimum yang juga meningkat. Peningkatan garis kemiskinan ini terjadi seiring dengan naiknya harga barang dan jasa serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin kompleks, mencerminkan standar hidup minimum yang juga meningkat, ditunjukkan dengan kriteria "tidak miskin" lebih tinggi dari sebelumnya. Peningkatan garis kemiskinan ini jika tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat maka secara statistik akan meningkatkan persentase penduduk miskin.

Meskipun garis kemiskinan meningkat, persentase penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan justru mengalami penurunan, dari 2,57% pada tahun 2023 menjadi 2,36% pada tahun 2024, dan merupakan yang terendah di Provinsi Banten. Indeks kedalaman (P1) sebesar 0,27 dan keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,05 juga menunjukkan tren menurun, yang berarti sebagian besar penduduk miskin tidak berada jauh di bawah garis kemiskinan dan kesenjangan di antara mereka relatif kecil. Rendahnya tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan, bukan berarti masalah kemiskinan tidak lagi menjadi prioritas utama di Kota Tangerang Selatan. Tingginya garis kemiskinan menunjukkan bahwa biaya hidup di Kota Tangerang Selatan relatif mahal sehingga kelompok rentan tetap berisiko jatuh miskin apabila terjadi tekanan ekonomi. Implikasi dari kondisi ini adalah perlunya kebijakan yang tidak hanya fokus pada penurunan angka kemiskinan absolut, tetapi juga pada penguatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, dukungan UMKM, serta program perlindungan sosial yang adaptif agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Tabel II.68. Kondisi Kemiskinan pada Kabupatan/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten (rupiah/kapita/bulan)					Persentase Penduduk Miskin - Maret					Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Pandeglang	361.713,00	390.754,00	416.248,00	455.297,00	479.886,00	9,92	10,72	9,32	9,27	9,18	1,00	1,49	1,21	1,56	1,52	0,16	0,33	0,33	0,38	0,35
Kab Lebak	334.509,00	358.479,00	380.681,00	419.066,00	440.705,00	9,24	10,29	8,91	8,68	8,44	1,14	1,66	1,35	1,73	1,02	0,24	0,40	0,33	0,51	0,23
Kab Tangerang	520.742,00	545.065,00	576.122,00	604.362,00	632.941,00	6,23	7,12	6,92	6,93	6,55	0,95	1,21	1,06	1,31	1,20	0,22	0,29	0,26	0,39	0,34
Kab Serang	341.074,00	362.102,00	385.864,00	425.751,00	449.291,00	4,94	5,49	4,96	4,85	4,51	0,40	0,61	0,56	0,67	0,79	0,05	0,12	0,11	0,15	0,20
Kota Tangerang	632.835,00	655.061,00	695.225,00	746.468,00	785.113,00	5,22	5,93	5,77	5,89	5,43	0,74	1,08	0,72	0,88	0,94	0,15	0,27	0,13	0,19	0,23
Kota Cilegon	504.571,00	540.032,00	572.780,00	632.703,00	663.533,00	3,69	4,24	3,64	3,98	3,75	0,39	0,50	0,42	0,48	0,44	0,06	0,11	0,09	0,10	0,07
Kota Serang	411.595,00	431.210,00	460.613,00	511.575,00	540.786,00	6,06	6,79	5,94	6,20	5,65	0,57	0,92	0,77	0,75	0,75	0,10	0,22	0,17	0,16	0,16
Kota Tangerang Selatan	643.083,00	665.610,00	712.717,00	782.543,00	828.278,00	2,29	2,57	2,50	2,57	2,36	0,31	0,34	0,32	0,45	0,27	0,08	0,07	0,07	0,12	0,05
Provinsi Banten	508.091,00	530.363,00	570.368,00	618.721,00	654.213,00	5,92	6,66	6,16	6,17	5,84	1,00	1,09	1,03	1,20	0,97	0,23	0,26	0,27	0,36	0,25

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT memberikan gambaran tentang seberapa efisien pasar tenaga kerja suatu negara dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia. Berdasarkan data dalam **Tabel II.69**, terlihat bahwa pada tahun 2020-2021 tingkat pengangguran di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan secara signifikan yang disebabkan oleh pengaruh Covid-19. Hal ini juga tidak hanya terjadi di Kota Tangerang Selatan, namun juga kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Pada tahun 2022, seiring dengan dimulainya pemulihan aktivitas ekonomi, tingkat pengangguran di Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan hingga mencapai 5,09 persen pada tahun 2024. Tingkat pengangguran di Kota Tangerang Selatan tercatat paling rendah di Provinsi Banten.

Tabel II.69. Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (jiwa)															Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen)				
	Bekerja					Pengangguran Terbuka					Jumlah									
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Pandeglang	481.092	509.778	500.022	537.026	610.793	48.470	42.523	50.910	53.406	53.743	529.562	552.301	550.932	590.432	664.536	9,15	7,7	9,24	9,05	8,09
Kab Lebak	596.379	585.592	581.080	668.109	738.076	63.527	49.970	54.310	54.745	49.003	659.906	635.562	635.390	722.854	787.079	9,63	7,86	8,55	7,57	6,23
Kab Tangerang	1.596.938	1.675.211	1.822.512	1.573.582	1.589.366	239.788	166.798	155.846	117.435	102.510	1.836.726	1.842.009	1.978.358	1.691.017	1.691.876	13,06	9,06	7,88	6,94	6,06
Kab Serang	614.320	634.825	643.277	717.583	786.378	85.538	75.111	76.368	79.236	79.521	699.858	709.936	719.645	796.819	865.899	12,22	10,58	10,61	9,94	9,18
Kota Tangerang	1.030.255	1.038.183	1.106.436	876.844	931.798	97.344	103.537	85.324	63.530	58.613	1.127.599	1.141.720	1.191.760	940.374	990.411	8,63	9,07	7,16	6,76	5,92
Kota Cilegon	178.699	185.593	211.688	192.157	191.758	25.976	20.914	18.663	15.010	12.421	204.675	206.507	230.351	207.167	204.179	12,69	10,13	8,1	7,25	6,08
Kota Serang	292.638	290.045	312.198	336.725	348.081	29.846	30.139	27.760	27.125	26.686	322.484	320.184	339.958	363.850	374.767	9,26	9,41	8,17	7,45	7,12
Kota Tangerang Selatan	761.851	779.117	763.405	614.630	601.673	70.572	73.318	53.832	37.945	32.257	832.423	852.435	817.237	652.575	633.930	8,48	8,6	6,59	5,81	5,09
Provinsi Banten	**5.552.172**	**5.698.344**	**5.940.618**	**5.516.656**	**5.797.923**	**661.061**	**562.310**	**523.013**	**448.432**	**414.754**	**6.213.233**	**6.260.654**	**6.463.631**	**5.965.088**	**6.212.677**	**10,64**	**8,98**	**8,09**	**7,52**	**6,68**

Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

Jika dilihat dari partisipasi penduduk usia produktif yang terlibat dalam pasar kerja sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.70**, pada tahun 2024 terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja dibandingkan tahun 2023, walaupun pada tahun 2024 tingkat kesempatan kerja di Kota Tangerang Selatan lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2023. Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2024 di Kota Tangerang Selatan tercatat paling rendah di Provinsi Banten. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor seperti pendidikan panjang di mana penduduk usia produktif memilih melanjutkan pendidikan dibandingkan bekerja dan adanya pengangguran tersembunyi. Hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan jumlah bukan angkatan kerja kategori "sekolah" dan "lainnya" yang disajikan dalam **Tabel II.71**.

Tabel II.70. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen)					Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Pandeglang	60,28	62,32	61,66	60,33	66,92	90,85	92,30	90,76	90,95	91,91
Kab Lebak	69,97	66,75	66,17	67,90	72,82	90,37	92,14	91,45	92,43	93,77
Kab Tangerang	65,43	63,94	67,05	66,87	65,88	86,94	90,94	92,12	93,06	93,94
Kab Serang	63,46	63,86	64,25	63,22	67,77	87,78	89,42	89,39	90,06	90,82
Kota Tangerang	64,97	64,52	66,08	63,39	66,02	91,37	90,93	92,84	93,24	94,08
Kota Cilegon	61,83	61,37	67,39	62,70	60,83	87,31	89,87	91,90	92,75	93,92
Kota Serang	63,79	62,16	64,80	68,44	69,10	90,74	90,59	91,83	92,55	92,88
Kota Tangerang Selatan	62,49	62,56	58,67	60,50	58,13	91,52	91,40	93,41	94,19	94,91
Provinsi Banten	**64,48**	**63,79**	**64,72**	**64,44**	**66,17**	**89,36**	**91,02**	**91,91**	**92,48**	**93,32**

Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

Tabel II.71. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023-2024

Kegiatan Utama	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Angkatan Kerja	**423.384**	**229.191**	**652.575**	**413.797**	**220.133**	**633.930**
1. Bekerja	402.732	211.898	614.630	394.088	207.585	601.673
2. Pengangguran Terbuka	20.652	17.293	37.945	19.709	12.548	32.257
Bukan Angkatan Kerja	**111.476**	**314.563**	**426.039**	**126.524**	**330.029**	**456.553**
1. Sekolah	48.762	53.416	102.178	55.716	59.870	115.586
2. Mengurus Rumah Tangga	22.526	247.228	269.754	19.620	261.373	280.993
3. Lainnya	40.188	13.919	54.107	51.188	8.786	59.974

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025

Jika diamati berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja di Kota Tangerang Selatan sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.72**, terlihat bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan tinggi dibandingkan tahun 2023.

Tabel II.72. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023-2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun 2023				Tahun 2024			
	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah		Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
< Sekolah Dasar	93.036	1.548	94.584	98,36	60.072	-	60.072	100
SMP/ Sederajat	75.522	3.698	79.220	95,33	56.656	2.424	59.080	95,9
SMA/ Sederajat	266.556	22.416	288.972	92,24	288.534	20.865	309.399	93,26
Perguruan Tinggi	179.516	10.283	189.799	94,58	196.411	8.968	205.379	95,63

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025

2.2.1.5. Rasio Gini

Rasio Gini (*Gini Ratio*) adalah indikator statistik yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilainya berkisar antara 0 (kesetaraan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Sejak tahun 2020 hingga 2024, tingkat ketimpangan di Kota Tangerang Selatan dalam kategori sedang, di mana Indeks Gini berada pada kisaran nilai antara 0,3-0,4, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.73**. Pada tahun 2024, Kota Tangerang Selatan menjadi kota dengan ketimpangan tertinggi, yaitu mencapai 0,395. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam kategori ketimpangan sedang, Kota Tangerang Selatan tetap perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi melalui kebijakan yang lebih merata, tepat sasaran dan inklusif.

Tabel II.73. Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	Rasio Gini				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Pandeglang	0,305	0,266	0,302	0,243	0,245
Kab. Lebak	0,314	0,332	0,312	0,271	0,257
Kab. Tangerang	0,285	0,294	0,282	0,286	0,269
Kab. Serang	0,303	0,264	0,284	0,274	0,267
Kota Tangerang	0,339	0,343	0,383	0,379	0,325
Kota Cilegon	0,373	0,363	0,318	0,362	0,360
Kota Serang	0,352	0,34	0,354	0,306	0,324
Kota Tangerang Selatan	**0,368**	**0,37**	**0,359**	**0,359**	**0,395**
Provinsi Banten	**0,363**	**0,365**	**0,363**	**0,368**	**0,353**

Sumber: BPS Provinsi Banten, tahun 2025

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu: (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, IPM Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan hingga mencapai nilai >80 atau kategori Sangat Tinggi, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.74**. IPM Kota Tangerang Selatan tercatat paling tinggi di Provinsi Banten.

Tabel II.74. IPM menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Pandeglang	68,86	69,02	69,7	70,28	70,88
Kab Lebak	66,39	66,5	67,19	67,68	68,33
Kab Tangerang	74,09	74,47	75,15	75,56	76,19
Kab Serang	70,93	71,05	71,99	72,63	73,28
Kota Tangerang	79,83	80,08	80,44	80,98	81,53
Kota Cilegon	76,8	77,11	77,68	78,24	78,83
Kota Serang	75,25	75,53	76,01	76,43	76,9
Kota Tangerang Selatan	**82,73**	**82,98**	**83,28**	**83,57**	**84,16**
Provinsi Banten	**74,41**	**74,68**	**75,25**	**75,77**	**76,35**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

Berdasarkan **Tabel II.74** terlihat bahwa IPM di Kota Tangerang Selatan paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten sejak tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2024, nilai IPM Kota Tangerang Selatan mencapai 84,16. Sementara nilai IPM untuk kabupaten lainnya berkisar antara 67 hingga 80. Tingginya nilai IPM menunjukkan bahwa semakin tingginya kualitas hidup manusia di Kota Tangerang Selatan. Dengan melihat indikator-indikator pembentuk IPM, terlihat bahwa semua indikator penyusun IPM di Kota Tangerang Selatan juga paling tinggi di Provinsi Banten.

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir atau dari usia tertentu, dengan asumsi pola kematian pada saat perhitungan tetap berlaku sepanjang hidupnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, UHH Kota Tangerang Selatan mencapai nilai 75,80 tahun yang tergolong pada usia harapan hidup yang tinggi. UHH masyarakat Kota Tangerang Selatan cenderung meningkat dari waktu ke waktu selama kurun tahun 2020-2024 dan merupakan UHH paling tinggi di Provinsi Banten sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.75**. Peningkatan ini mencerminkan upaya signifikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, serta penyediaan permukiman sehat yang terus diperbaiki setiap tahunnya.

Tabel II.75. Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil Long Form SP2020 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Pandeglang	73,10	73,22	73,63	74,01	74,22
Kab Lebak	72,93	73,04	73,43	73,80	73,99
Kab Tangerang	74,56	74,59	74,91	75,18	75,34
Kab Serang	73,70	73,81	74,22	74,62	74,91
Kota Tangerang	74,78	74,78	75,02	75,30	75,50
Kota Cilegon	74,23	74,25	74,51	74,81	75,03
Kota Serang	74,43	74,54	74,84	75,13	75,31

Kabupaten/Kota	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil Long Form SP2020 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kota Tangerang Selatan	**75,16**	**75,16**	**75,40**	**75,64**	**75,80**
Provinsi Banten	**74,12**	**74,17**	**74,46**	**74,77**	**74,97**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

2.2.2.2. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah indikator komposit yang mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan keluarga secara holistik, mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indeks ini digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi program seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan deteksi dini masalah keluarga berisiko (contoh: berisiko stunting atau penyakit menular). IKS menggambarkan kemampuan keluarga dalam:

1. Memenuhi kebutuhan kesehatan dasar (gizi, sanitasi, akses layanan kesehatan);
2. Mencegah risiko penyakit (imunisasi, pola hidup bersih, deteksi dini);
3. Membangun ketahanan kesehatan (penanganan darurat, adaptasi pada lingkungan sehat),dan
4. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

IKS Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2023 disajikan dalam **Tabel II.76**, yang menggambarkan status keluarga sehat di Kota Tangerang Selatan dalam kategori Pra Sehat, di mana dimensi keluarga sehat terpenuhi sebagian. Adapun dimensi keluarga sehat pada tahun 2023 yang memerlukan intervensi segera karena ketercapaiannya di bawah 76 persen, yaitu keikutsertaan keluarga secara aktif dalam program keluarga berencana, pengobatan sesuai standar bagi pasien tuberkulosis paru, pengobatan teratur bagi penderita hipertensi, pengobatan bagi penderita gangguan jiwa dan kebiasaan tidak merokok.

Tabel II.76. Indeks Keluarga Sehat di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023

Indeks	2020	2021	2022	2023
Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,19	0,26	0,35	0,58

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas program-program upaya kesehatan masyakarat dan perorangan untuk memberikan pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif-preventif dan kuratif-rehabilitatif pada setiap fase kehidupan. Salah satu upaya mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah Program Ngider Sehat, berupa program kunjungan rumah tenaga kesehatan yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan dan obat-obatan.

2.2.2.3. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi anak di bawah lima tahun yang tidak dapat berkembang karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Penyebab dari stunting dapat dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi merupakan faktor yang memengaruhi status gizi anak dan berdampak langsung pada stunting. Sementara itu faktor tidak langsung berupa akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan. Angka stunting di Kota Tangerang Selatan selama tahun 2022-2024

mengalami peningkatan sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.77**. Walaupun begitu, capaian angka stunting di Kota Tangerang Selatan telah melampaui target angka stunting yang diamanatkan Nasional, yaitu sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Tabel II.77. Kondisi stunting di Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting (%)	19	9	9,2	10,5

Sumber: Survey Status Gizi Indonesia, Kementerian Kesehatan, Tahun 2024

Peningkatan stunting di Kota Tangerang Selatan sebagian disebabkan karena adanya balita yang mengalami stunting sekaligus memiliki penyakit penyerta yang menghambat pertumbuhan. Kondisi ini menyebabkan anak tersebut tetap terhitung sebagai kasus stunting meskipun penanganan gizi telah dilakukan, karena faktor penyakit penyerta membuat perbaikan pertumbuhan berlangsung lebih lambat. Penyebab lainnya antara lain: masih kurangnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan rutin pada ibu hamil, remaja putri dan balita dan masih adanya pola asuh keluarga yang tidak sehat (perokok dan konsumsi makanan tidak sehat). Upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menekan angka stunting adalah:

a. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis dan optimalisasi Program Ngider Sehat melalui “Program Ngider Sehat Premium” serta PSC 119;
b. Menunjuk Rumah Sakit Rujukan Tumbuh Kembang untuk penanganan stunting;
c. Membentuk Pos Gizi dan penguatan kompetensi tenaga kesehatan dan kader kesehatan, termasuk kader remaja;
d. Penguatan bina wilayah untuk memonitoring pasangan pengantin berisiko, ibu hamil berisiko dan balita berisiko;
e. Pemberian makanan tambahan lokal untuk balita yang bermasalah gizi.

2.2.2.4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan risiko kematian perempuan yang terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas (42 hari setelah melahirkan). Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas sistem kesehatan, akses layanan maternal, dan tingkat kesejahteraan perempuan di suatu wilayah. AKI di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021-2024 mengalami tren menurun sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.78**.

Tabel II.78. Angka Kematian Ibu di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	31,60	27,83	28,96	28,72

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Tangerang Selatan dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari penguatan sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan swasta untuk memastikan penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan dapat dilakukan secara tepat waktu. Efisiensi ini diperkuat oleh penerapan layanan obstetri emergensi dasar dan komprehensif, serta peningkatan kualitas pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) yang membantu deteksi dini risiko tinggi pada ibu hamil.

2.2.2.5. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (TB) mengacu pada persentase jumlah kasus TB yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dari total estimasi kasus TB yang ada di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Penemuan kasus TB yang optimal sangat penting untuk memastikan bahwa individu yang terinfeksi mendapatkan diagnosis yang tepat dan cepat, sehingga pengobatan dapat segera dilakukan. Secara garis besar, data pada **Tabel II.79** menunjukkan bahwa cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kota Tangerang Selatan mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2023. Terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2021, namun cakupan tersebut kembali menurun di tahun-tahun berikutnya sebelum naik lagi pada 2023. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan program, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan, sumber daya, dan dampak pandemi. Sementara itu, angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis untuk kasus yang sensitif terhadap obat secara umum tergolong tinggi, dengan capaian di atas 80 persen selama periode 2020–2022. Namun, tidak tersedia data untuk tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa program pengobatan cukup efektif, meskipun tetap diperlukan upaya penguatan program, pemantauan dan evaluasi rutin berkelanjutan, peningkatan akses layanan diagnosis, serta intervensi pada kelompok rentan untuk memastikan konsistensi hasil pengobatan dan menekan angka kasus di tahun-tahun mendatang.

Tabel II.79. Cakupan penemuan dan pengobatan Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	53	63	70	96	100
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis untuk Sensitif Obat (%)	92	83	82	85	81
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis untuk Resisten Obat (%)	N/A	N/A	N/A	56,60	74

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

2.2.2.6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menggambarkan proporsi penduduk suatu wilayah yang telah terdaftar sebagai peserta program JKN, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kota Tangerang Selatan hingga tahun 2024 disajikan dalam **Tabel II.80**, yang menggambarkan akses universal terhadap layanan kesehatan di Kota Tangerang Selatan berkategori tinggi dan melebihi capaian nasional. Perluasan cakupan kepesertaan JKN merupakan upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk semua masyarakat Kota Tangerang Selatan. Keterjangkauan tersebut dicapai melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Konsistensi upaya ini mengantarkan Kota Tangerang Selatan meraih *Universal Health Coverage* (UHC) Award pada 2023 dan 2024, sebagai pengakuan atas keberhasilan perluasan cakupan JKN sekaligus pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Walaupun persentase kepesertaan telah mendekati 100 persen, diperlukan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan kepesertaan, keakuratan data, serta mutu pelayanan kesehatan, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penduduk.

Tabel II.80. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	80,50	85,06	98,53	98,91	98,58

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

2.2.3. Pendidikan Berkualitas Untuk Semua

2.2.3.1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah indikator yang menggambarkan tingkat pendidikan formal yang berhasil diselesaikan oleh penduduk suatu wilayah dalam satuan tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 berada pada kisaran 11,80 tahun hingga 11,86 tahun dan mencatatkan sebagai yang tertinggi di Provinsi Banten, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.81**. RLS Kota Tangerang Selatan menggambarkan sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama, serta banyak yang melanjutkan hingga menengah atas.

Tabel II.81. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab Pandeglang	7,1	7,11	7,13	7,15	7,16
Kab Lebak	6,4	6,41	6,59	6,6	6,61
Kab Tangerang	8,39	8,61	8,92	8,93	9,06
Kab Serang	7,5	7,51	7,78	7,79	7,88
Kota Tangerang	10,69	10,83	10,84	10,91	11,14
Kota Cilegon	9,87	10,08	10,34	10,38	10,39
Kota Serang	8,76	8,89	8,9	8,91	8,93
Kota Tangerang Selatan	**11,81**	**11,82**	**11,84**	**11,85**	**11,86**
Provinsi Banten	**8,89**	**8,93**	**9,13**	**9,15**	**9,23**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

Tingginya tingkat rata-rata lama sekolah di Kota Tangerang Selatan didukung dengan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Tangerang Selatan yang mencapai cakupan di atas 90 persen, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.82**. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dihitung berdasarkan jumlah anak pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk anak pada kelompok umur tersebut. Berdasarkan data dalam **Tabel II.82**, terlihat bahwa tingkat partisipasi sekolah di Kota Tangerang Selatan masih memerlukan upaya-upaya peningkatan terutama pada partisipasi sekolah anak usia dini, kesetaraan dan disabilitas.

Tabel II.82. Angka Partisipasi Sekolah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2025

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
APS Usia 5-6 Tahun (%)	N/A	60,24	65,48	56,75
APS Usia 7-12 Tahun (%)	99,50	99,72	99,63	99,22
APS Usia 13-15 Tahun (%)	98,27	98,26	98,59	97,47
APS Usia 7-15 Tahun (%)	N/A	99,31	98,68	98,67

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
APS Disabilitas Usia 4-18 Tahun	N/A	34,62	56,47	56,47
APS Disabilitas Usia 7-12 Tahun (%)	95,79	33,89	33,89	33,89
APS Disabilitas Usia 13-15 Tahun (%)	69,06	29,99	43,39	43,39
APS Usia 7-18 Tahun Kesetaraan	N/A	17,44	25,57	24,34

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, Tahun 2022-2025

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) sebanyak 1.243 orang yang tersebar pada seluruh Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Ciputat, terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) sebanyak 285 orang, yang terdiri atas 228 orang Lama Tidak Sekolah (LTM), 28 orang *Drop Out* (DO) dan 29 orang Putus Sekolah;
2. Kecamatan Ciputat Timur, terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) sebanyak 82 orang, yang terdiri atas 50 orang Lama Tidak Sekolah (LTM), 9 orang *Drop Out* (DO) dan 23 orang Putus Sekolah;
3. Kecamatan Pamulang, terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) sebanyak 230 orang, yang terdiri atas 160 orang Lama Tidak Sekolah (LTM), 33 orang *Drop Out* (DO) dan 37 orang Putus Sekolah;
4. Kecamatan Pondok Aren, terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) sebanyak 282 orang, yang terdiri atas 208 orang Lama Tidak Sekolah (LTM), 37 orang *Drop Out* (DO) dan 37 orang Putus Sekolah;
5. Kecamatan Serpong, terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) sebanyak 178 orang, yang terdiri atas 148 orang Lama Tidak Sekolah (LTM), 2 orang *Drop Out* (DO) dan 28 orang Putus Sekolah;
6. Kecamatan Serpong Utara, terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) sebanyak 104 orang, yang terdiri atas 92 orang Lama Tidak Sekolah (LTM), 4 orang *Drop Out* (DO) dan 8 orang Putus Sekolah;
7. Kecamatan Setu, terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) sebanyak 82 orang, yang terdiri atas 61 orang Lama Tidak Sekolah (LTM), 5 orang *Drop Out* (DO) dan 16 orang Putus Sekolah;

Upaya penanganan terhadap anak tidak sekolah tersebut akan dilakukan secara lintas sektoral agar komprehensif dan efektif, yaitu antara lain:

a. Melakukan verifikasi dan validasi data sasaran untuk mengidentifikasikan penyebab anak tidak sekolah;
b. Memasukan kembali anak usia sekolah pada jenjang pendidikan formal atau pendidikan kesetaraan dengan program pendidikan gratis dan bantuan sosial;
c. Melakukan edukasi pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.

2.2.3.2. Harapan Lama Sekolah (RLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat diselesaikan oleh seorang anak selama hidupnya, mulai dari usia sekolah (biasanya 7 tahun) hingga dewasa. Indikator ini digunakan untuk memprediksi potensi akumulasi pendidikan suatu generasi dan menjadi tolok ukur kualitas sistem pendidikan suatu wilayah. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.83**. HLS

Kota Tangerang Selatan yang berada pada kisaran 14,42 tahun hingga 14,70 tahun mengindikasikan bahwa anak-anak di Kota Tangerang Selatan yang saat ini berusia tujuh tahun memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang akademi atau perguruan tinggi tingkat tiga (Diploma III). Nilai HLS Kota Tangerang Selatan tahun 2024 menjadi nilai HLS tertinggi di Provinsi Banten. Capaian ini merupakan upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk terus meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat hingga pendidikan tinggi melalui program-program bantuan pendidikan dan beasiswa pendidikan.

Tabel II.83. Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab Pandeglang	13,47	13,49	13,72	13,73	13,74
Kab Lebak	11,97	11,98	12,09	12,1	12,11
Kab Tangerang	12,82	12,84	12,85	12,87	12,88
Kab Serang	12,57	12,58	12,78	12,86	12,87
Kota Tangerang	13,85	13,87	13,88	13,89	13,90
Kota Cilegon	13,16	13,18	13,2	13,21	13,23
Kota Serang	12,78	12,79	12,81	12,82	12,83
Kota Tangerang Selatan	**14,47**	**14,66**	**14,67**	**14,68**	**14,70**
Provinsi Banten	**12,89**	**13,02**	**13,05**	**13,09**	**13,10**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

2.2.3.3. Kualitas Pembelajaran

Untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045, prioritas pembangunan bidang pendidikan tidak hanya difokuskan pada peningkatan partisipasi sekolah, namun juga difokuskan pada kualitas pembayaran yang diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul. Salah satu ukuran kualitas pembelajaran yang diamanatkan dalam pembangunan Nasional yaitu kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Kemampuan literasi dan numerasi adalah kompetensi penting yang harus dimiliki peserta didik di era globalisasi ini.

Kemampuan literasi merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sementara itu, kemampuan numerasi merupakan kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Kemampuan literasi dan numerasi pendidikan dasar di Kota Tangerang Selatan dihitung berdasarkan nilai rerata peserta didik berdasarkan asesmen Nasional, dengan data disajikan dalam **Tabel II.84**. Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2022-2024 mengalami peningkatan yang menggambarkan peningkatan kualitas pembelajaran jenjang pendidikan dasar di Kota Tangerang Selatan.

Tabel II.84. Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2022-2024

Jenjang	Literasi	Numerasi
Sekolah Dasar (SD)		
Tahun 2022	57,46	40,41
Tahun 2023	59,90	44,63
Tahun 2024	66,89	52,27
Tahun 2025	67,17	57,29
Sekolah Menengah Pertama (SMP)		
Tahun 2022	69,26	56,45
Tahun 2023	72,73	59,47
Tahun 2024	77,93	67,79
Tahun 2025	81,28	69,60

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, Tahun 2022-2025

Untuk mengukur kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tangerang Selatan, digunakan indikator Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B dan Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.85**. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mendorong pemerataan kualitas layanan untuk jenjang PAUD cukup baik. Selain itu, rata-rata mutu kinerja dan kompetensi pendidik di satuan PAUD formal sangat baik, karena proporsi pendidik dengan kualifikasi minimal S1/D4 relatif tinggi.

Tabel II.85. Kualitas Satuan PAUD dan Guru PAUD di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	86,44	88,33	80,32	77,56
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	N/A	68,83	75,14	69,89

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, Tahun 2022-2025

2.2.3.4. Dukungan Lingkungan Sekolah

Satuan pendidikan berperan sebagai wadah pembentuk karakter bangsa yang mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, kebhinnekaan, dan keamanan. Ketiga aspek ini menjadi fondasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, adil, dan menghargai perbedaan, sekaligus mencerminkan kekayaan budaya lokal.

Satuan pendidikan harus dapat menjamin akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk penyandang disabilitas, anak dari keluarga kurang mampu, atau kelompok marginal. Prinsip inklusivitas dapat diwujudkan melalui:

a. Pembelajaran yang Ramah: Modifikasi kurikulum, metode pengajaran fleksibel, dan sarana prasarana aksesibel (contoh: jalur kursi roda, buku braille);

b. Dukungan Psikososial: Guru dan teman sebaya memberikan pendampingan untuk mencegah diskriminasi; serta

c. Kolaborasi dengan Komunitas: Kemitraan dengan dinas sosial atau LSM lokal untuk program beasiswa dan pelatihan inklusi.

Selain iklim inklusivitas, satuan pendidikan juga harus mampu menciptakan rasa aman dan kenyamanan bagi peserta didik dari hal perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Satuan pendidikan juga harus mampu berperan sebagai miniatur kebhinnekaan Indonesia di mana dapat menjamin peserta didik dari suku, adat, ras dan agama dapat bersekolah secara aman dan nyaman tanpa diskriminasi. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Nomor 400.3.9.9/Kep.247-Dindik/2024, telah ditetapkan 43 (empat puluh tiga) satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi yang terdiri dari 17 SD Negeri, 10 SD Swasta, 8 SMP Negeri, 5 SMP Swasta dan 3 PKBM (Pusat Kebiatan Belajar Mengajar).

Gambaran iklim inklusivitas, iklim kebhinnekaan dan iklim keamanan pada satuan pendidikan di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam **Tabel II.86**. Iklim inklusifitas satuan pendidikan jenjang SD dan SMP di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2025 menggambarkan capaian satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. Sementara itu, terkait iklim kebhinekaan, satuan pendidikan jenjang SD dan SMP di Kota Tangerang Selatan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme. Selain itu, dalam hal iklim keamanan, satuan pendidikan jenjang SD dan SMP di Kota Tangerang Selatan juga memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan. Walaupun iklim inklusivitas, iklim kebhinnekaan dan iklim keamanan pada satuan pendidikan di Kota Tangerang Selatan digambarkan termasuk dalam kategori baik sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih memerlukan upaya peningkatan.

Tabel II.86. Iklim Inklusivitas, Iklim Kebhinnekaan, dan Iklim Keamanan pada Satuan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2025

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Sekolah Dasar (SD)				
Iklim Inklusivitas	54,71	56,29	56,78	59,39
Iklim Kebhinnekaan	60,26	70,58	73,65	71,31
Iklim Keamanan	73,40	71,63	73,87	75,01
Sekolah Menengah Pertama (SMP)				
Iklim Inklusivitas	53,25	59,42	58,31	60,53
Iklim Kebhinnekaan	61,12	69,39	74,20	72,29
Iklim Keamanan	76,82	71,05	71,31	72,93

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, Tahun 2022-2025

2.2.3.5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Dengan menggunakan IPLM, Pemerintah Daerah dapat memantau perkembangan literasi masyarakat dari waktu ke waktu, mengidentifikasi area di mana intervensi diperlukan, dan merancang kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan tingkat literasi secara keseluruhan.

IPLM di Kota Tangerang Selatan selama tahun 2023-2024 mengalami tren meningkat, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.87**. Pembangunan literasi masyarakat termasuk dengan kategori Sedang, yang menggambarkan pembangunan literasi masyarakat sudah memenuhi standar namun berada dalam kategori sedang. Adapun area pembangunan yang perlu diintervensi adalah:

1. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan, merujuk pada partisipasi dan interaksi aktif masyarakat dalam program-program yang diselenggarakan oleh perpustakaan guna mempromosikan dan meningkatkan pemahaman serta apresiasi terhadap peran perpustakaan. Program tersebut meliputi kegiatan perpustakaan yang melibatkan masyarakat baik secara luring maupun daring;
2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, merujuk pada pemenuhan jumlah koleksi yang mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat, baik koleksi cetak maupun digital;
3. Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, merujuk pada pemenuhan SDM perpustakaan, yaitu tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan, penyediaan, dan penyelenggaraan layanan di perpustakaan. Mereka adalah individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan khusus dalam bidang perpustakaan dan informasi, serta memiliki peran penting dalam memastikan operasional perpustakaan yang efektif dan berkualitas; dan
4. Pemerataan Layanan Perpustakaan, upaya untuk menyediakan akses yang adil, merata, dan inklusif terhadap layanan perpustakaan bagi seluruh anggota masyarakat yang ditunjukkan oleh jumlah kelembagaan perpustakaan yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Tabel II.87. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023-2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		Komponen Pembentuk IPLM Tahun 2024						
Tahun 2023	Tahun 2024	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan
54,69	57,93	0,417	0,115	0,408	1,000	1,000	0,116	1,000

Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

2.2.3.6. Tingkat Kegemaran Membaca

Membaca merupakan salah satu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Membaca menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dan

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan membaca harus ditumbuhkembangkan sejak usia dini dalam satuan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan literasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. Pada Tahun 2024, tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kota Tangerang Selatan tercatat sebesar 87,99 dan merupakan paling tinggi di Provinsi Banten. Capaian ini antara lain dipengaruhi oleh upaya perluasan jangkauan literasi melalui penyediaan Taman Baca Masyarakat (TBM). Hingga 2024, terdapat sekitar 132 TBM yang tersebar di 54 kelurahan. Rincian nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 disajikan dalam **Tabel II.88**.

Tabel II.88. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Masyarakat Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Dimensi TGM	NIlai	Interpretasi
Frekuensi Membaca	98,21	Rata-rata frekuensi membaca per minggu yaitu lebih dari 6 kali
Durasi Membaca	82,87	Rata-rata durasi membaca per hari yaitu 2 jam s.d 2 jam 59 menit
Jumlah Bahan Bacaan	83,03	Rata-rata jumlah bahan bacaan yang dibaca per tiga bulan yaitu 5-6 bahan bacaan
Frekuensi Akses Internet	93,11	Rata-rata frekuensi akses internet untuk membaca/mencari informasi per minggu yaitu lebih dari 6 kali
Durasi Akses Internet	82,12	Rata-rata durasi akses internet untuk membaca/mencari informasi per hari yaitu 2 jam s.d 2 jam 59 menit
Nilai TGM	87,99	Tinggi

Sumber : Perpustakaan RI, Tahun 2025

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen perlindungan sosial yang adaptif, yang bertujuan memberikan perlindungan bagi pekerja. Sejak tahun 2024, Pemerintah Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dalam pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagai upaya perluasan perlindungan sosial. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022-2024 disajikan dalam **Tabel II.89**.

Tabel II.89. Cakupan Kepesertaan Jaminan Soaial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024

Wilayah	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kota Tangerang Selatan	43,90%	44,71%	46,73%

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan meningkat dari 43,90% pada 2022 menjadi 46,73% pada 2024. Peningkatan ini didorong oleh sinergi kebijakan publik, layanan infrastruktur, dan komunikasi yang efektif. Pemerintah Kota bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan mengalokasikan dana untuk mendaftarkan pekerja rentan, termasuk pekerja berpenghasilan rendah dan sektor informal, agar mendapatkan perlindungan Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) secara gratis. Upaya ini diperkuat dengan pembukaan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di Tangsel serta program

edukasi dan sosialisasi intensif, termasuk kolaborasi dengan komunitas lokal, yang secara bertahap meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat jaminan sosial.

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah sebuah indikator yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengukur tingkat kerukunan antarumat beragama di suatu daerah. IKUB terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu kerukunan internal umat beragama, kerukunan antarumat beragama dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. IKUB Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sebesar 72,39, yang menggambarkan bahwa ada dinamika dalam kerukunan umat beragama di Kota Tangerang Selatan, tetapi masih terkendali.

2.2.5.2. Indeks Harmoni

Indeks Harmoni adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keharmonisan dalam suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Indeks ini biasanya mengukur berbagai dimensi, yaitu :

1. Dimensi Ekonomi;
2. Dimensi Sosial;
3. Dimensi Budaya;
4. Dimensi Religius/keberagamaan.

Pengukuran Indeks atas dimensi ini bertujuan untuk mengukur stabilitas ekonomi, sosial, keberagamaan, dan toleransi antar kelompok di dalam masyarakat Indonesia. Indeks ini juga sering digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi situasi sosial, serta sebagai dasar untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam mempromosikan harmoni dan persatuan di tengah keragaman masyarakat. Indeks harmoni di Kota Tangerang Selatan tahun 2024 sebesar 7,29 dari skala 9, berada dalam kategori sangat baik. Kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan seimbang.

2.2.5.3. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan di daerah. IPK dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based*) dan menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor pembangunan kebudayaan. Pengukuran IPK memiliki 7 (tujuh) dimensi, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Ketujuh dimensi ini menggambarkan pembangunan kebudayaan harus dilaksanakan secara holistik dan sinergi dengan melibatkan berbagai bidang pembangunan terkait.

Pada tahun 2022, nilai IPK Kota Tangerang Selatan sebesar 52,50. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai IPK Provinsi Banten sebesar 51,41 (Kemendikbud, 2024). Pada tahun 2023, nilai IPK Kota Tangerang Selatan menurun menjadi sebesar 52,11, kemudian pada tahun 2024, nilai IPK Kota Tangerang Selatan kembali meningkat menjadi 52,50. Penurunan capaian pembangunan kebudayaan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Beberapa penyebab utama dapat meliputi:

1. Globalisasi dan Dampak Budaya Asing: Pengaruh budaya asing yang kuat akibat globalisasi bisa menggeser minat dan prioritas masyarakat dari budaya lokal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal, serta mengurangi keberagaman budaya yang terukur dalam IPK;
2. Penurunan Minat Masyarakat: Jika masyarakat tidak menunjukkan minat atau partisipasi aktif dalam kegiatan kebudayaan, hal ini dapat berdampak pada penurunan IPK. Kurangnya minat ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan gaya hidup atau kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan;
3. Keterbatasan Akses Pendidikan Kebudayaan: Kurangnya akses atau kualitas pendidikan kebudayaan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan dapat mengurangi pengetahuan dan keterampilan terkait kebudayaan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi IPK;
4. Kurangnya Dukungan dan Kerja Sama dari Sektor Swasta: Tanpa dukungan yang memadai dari sektor swasta dalam bentuk sponsor, kemitraan, atau investasi dalam proyek-proyek kebudayaan, pengembangan kebudayaan bisa terhambat, yang berdampak pada IPK;
5. Perubahan Sosial dan Teknologi: Perubahan cepat dalam teknologi dan media yang tidak diimbangi dengan adaptasi dalam cara kebudayaan disajikan atau dilestarikan dapat menyebabkan penurunan dalam pengukuran IPK.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.2.6.1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah sebuah metode evaluasi yang mengukur mutu sebuah keluarga melalui tingkat ketenangan, kemandirian, dan kebahagiaan yang ada di dalamnya. Konsep ini mencerminkan peran serta fungsi keluarga di berbagai daerah di Indonesia. iBangga berfungsi sebagai petunjuk penting untuk menilai keberhasilan dalam upaya meningkatkan mutu keluarga. Penilaian iBangga membantu dalam mengelompokkan wilayah-wilayah sebagai daerah yang memiliki keluarga tangguh, berkembang, atau rentan secara pembangunan. Menurut BKKBN 2020, nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori yaitu: (1) iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40, (2) iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70, dan (3) iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

iBangga di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021-2024 disajikan dalam **Tabel II.90**, di mana terlihat bahwa pembangunan keluarga di Kota Tangerang Selatan dalam kategori cukup baik (berkembang). Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan sinergi program lintas sektor yang difokuskan untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui berbagai inisiatif. Beberapa faktor utama yang berkontribusi antara lain implementasi Program Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas), integrasi layanan Posyandu Terpadu, penyediaan pelayanan KB gratis, serta gerakan “Orang Tua Asuh Stunting” (GENTING) yang digagas bersama BAZNAS untuk menekan risiko keluarga terdampak stunting. Upaya-upaya tersebut berhasil meningkatkan dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan—tiga dimensi utama dalam perhitungan iBangga.

Tabel II.90. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
iBangga	54,16	57,72	64,22	65,65

Sumber: SIPERINDU BKKBN, 2024

2.2.6.2. Gender, Anak dan Disabilitas

Indikator terkait gender yang digunakan untuk mengukur kesenjangan, kesetaraan, atau peran gender dalam pembangunan antara lain Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik suatu negara, serta memiliki kekuatan pengambilan keputusan. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan seberapa besar potensi pembangunan manusia hilang karena ketidaksetaraan gender (skala 0–1, di mana 0 = setara sempurna, 1 = sangat timpang). Indikator Gender di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.91**.

Tabel II.91. IPG, IDG dan IKG Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,58	93,80	93,96	94,23	94,47
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,171	0,155	0,170	0,200	0,176
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,85	73,08	72,67	72,36	70,59

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

Berdasarkan data dalam **Tabel II.91**, IPG Kota Tangerang Selatan cenderung meningkat selama tahun 2020-20204 seiring dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi semakin mengecil. Jika dianalisis berdasarkan indeks ketimpangan gender, pada tahun 2024 terlihat ketimpangan gender di Kota Tangerang Selatan menurun dibandingkan tahun 2023, yang menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan dapat menurunkan potensi kerugian pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketidaksetaraan gender.

Berbeda dengan IPG, IDG di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Hal kontradiktif tersebut dapat dijelaskan bahwa konteks pemberdayaan gender tidak hanya terbatas pada akses dasar saja, namun juga akses terhadap kekuasaan, pengaruh, dan representasi perempuan di ruang publik. Jika dianalisis berdasarkan komponen pembentuk IDG sebagaimana tersaji dalam **Tabel II.92** hingga **Tabel II.94**, penurunan IDG di Kota Tangerang Selatan disebabkan karena keterlibatan perempuan dalam politik dan sumber daya ekonomi mengalami penurunan.

Tabel II.92. Keterlibatan di Parlemen Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Laki-laki					Perempuan				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Pandeglang	86,00	86,00	86,00	85,71	80,00	14,00	14,00	14,00	14,29	20,00
Kab Lebak	92,00	92,00	92,00	92,00	86,00	8,00	8,00	8,00	8,00	14,00
Kab Tangerang	88,00	88,00	86,00	86,00	80,00	12,00	12,00	14,00	14,00	20,00
Kab Serang	88,00	88,00	88,00	86,00	88,00	12,00	12,00	12,00	14,00	12,00
Kota Tangerang	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Kota Cilegon	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kota Serang	86,67	86,67	86,67	86,67	91,11	13,33	13,33	13,33	13,33	8,89
Kota Tangerang Selatan	**68,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**74,00**	**32,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**26,00**
Provinsi Banten	**82,35**	**82,35**	**82,35**	**81,18**	**86,00**	**17,65**	**17,65**	**17,65**	**18,82**	**14,00**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

Tabel II.93. Sumbangan dalam Pendapatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Laki-laki					Perempuan				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Pandeglang	70,09	69,60	70,31	69,64	68,97	29,91	30,40	29,69	30,36	31,03
Kab Lebak	68,39	68,30	68,78	67,97	67,26	31,61	31,70	31,22	32,03	32,74
Kab Tangerang	71,55	71,02	71,70	71,26	71,50	28,45	28,80	28,30	28,74	28,50
Kab Serang	73,27	72,97	73,19	72,35	72,83	26,73	27,03	26,81	27,65	27,17
Kota Tangerang	67,79	67,94	68,00	68,02	67,94	32,21	32,06	32,00	31,98	32,06
Kota Cilegon	78,89	79,07	79,33	79,27	78,79	21,11	20,93	20,67	20,73	21,21
Kota Serang	72,34	72,12	72,34	71,69	71,97	27,66	27,88	27,66	28,31	28,03
Kota Tangerang Selatan	73,84	73,56	73,64	73,65	73,29	26,16	26,44	26,36	26,35	26,71
Provinsi Banten	**68,26**	**68,05**	**68,29**	**67,86**	**67,66**	**31,74**	**31,95**	**31,71**	**32,14**	**32,34**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

Tabel II.94. Persentase Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Laki-laki					Perempuan				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab Pandeglang	56,70	59,85	54,60	54,04	58,13	43,30	40,15	45,40	45,96	41,87
Kab Lebak	58,76	60,62	63,74	51,39	46,46	41,24	39,38	36,26	48,61	53,54
Kab Tangerang	55,60	52,80	55,76	55,88	53,39	44,40	47,20	44,24	44,12	46,61
Kab Serang	54,22	53,45	61,60	58,29	55,40	45,78	46,55	38,40	41,71	44,60
Kota Tangerang	54,19	51,91	58,62	59,60	53,84	45,81	48,09	41,38	40,40	46,16
Kota Cilegon	57,54	50,32	58,90	57,61	50,70	42,46	49,68	41,10	42,39	49,30
Kota Serang	59,64	58,70	53,81	52,24	48,35	40,36	41,30	46,19	47,76	51,65
Kota Tangerang Selatan	57,29	55,90	58,61	56,90	58,92	42,71	44,10	41,39	43,10	41,08
Provinsi Banten	**56,03**	**54,28**	**57,75**	**56,79**	**54,30**	**43,97**	**45,72**	**42,25**	**43,21**	**45,70**

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

Tabel II.94 menggambarkan persentase tenaga kerja perempuan dan laki-laki di posisi manajerial, profesional, administrasi, dan teknisi di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten selama tahun 2020–2024. Secara

spesifik, tabel ini menunjukkan Distribusi jenis kelamin dalam posisi strategis dan profesional, termasuk manajer, profesional, administrasi, dan teknisi; Perbandingan tren tahunan antara laki-laki dan perempuan di setiap kabupaten/kota; dan Keterwakilan perempuan di posisi-posisi penting yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan manajerial. Berdasarkan tabel tersebut, keterlibatan perempuan di posisi manajerial dan profesional merupakan salah satu indikator utama pemberdayaan gender. Misalnya, di Kota Tangerang Selatan, persentase perempuan di posisi tersebut sedikit menurun dari 42,71% pada 2020 menjadi 41,08 persen pada 2024, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan representasi perempuan di posisi strategis.

Berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak, Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kota yang ramah anak melalui partisipasi aktif dalam program Kota Layak Anak (KLA) yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI. Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), capaian predikat KLA di Tangerang Selatan mengalami perkembangan yang signifikan, mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam memenuhi indikator layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Capaian predikat Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 2020: predikat KLA Kategori Pratama, menandakan awal komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memenuhi standar dasar kota layak anak;
2. Tahun 2021: predikat KLA Kategori Pratama;
3. Tahun 2022: predikat KLA Kategori Madya, menunjukkan peningkatan dalam layanan kesehatan ramah anak, penguatan forum partisipasi anak, serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang lebih terstruktur;
4. Tahun 2023: predikat KLA Kategori Madya;
5. Tahun 2024: predikat KLA Kategori Nidya, menunjukkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melampaui standar minimal dan memiliki komitmen kuat dalam pemenuhan hak anak secara holistik.

Untuk mewujudkan pembangunan inklusif di Kota Tangerang Selatan, selain gambaran tentang gender dan anak, juga diperlukan gambaran tentang masyarakat dengan disabilitas di Kota Tangerang Selatan yang tercatat sebanyak 1.298 orang pada tahun 2024 (Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024) dengan rincian sebagai berikut:

1. Disabilitas Fisik, sebanyak 112 orang;
2. Disabilitas Tuna/Netra, sebanyak 113 orang;
3. Disabilitas Rungu/Wicara, sebanyak 210 orang;
4. Disabilitas Mental/Jiwa, sebanyak 738 orang;
5. Disabilitas Fisik dan Mental, sebanyak 37 orang;
6. Disabilitas lainnya, sebanyak 88 orang.

2.2.6.3. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) digunakan sebagai alat ukur untuk melihat gambaran sejauh mana pemuda di suatu wilayah berkembang secara optimal dan memiliki kesempatan yang adil. Lingkup pembangunan pemuda yang diukur terdiri atas lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi serta kepemimpinan, Sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.95**, IPP Kota Tangerang Selatan selama tahun 2021-2024 menunjukkan tren meningkat.

Nilai IPP Kota Tangerang Selatan yang berada pada kisaran nilai 52-56 menggambarkan kualitas pembangunan pemuda di Kota Tangerang Selatan berkategori sedang.

Tabel II.95. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2024

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Pembangunan Pemuda	52,31	53,43	54,53	55,86

Sumber: LKPJ Kota Tangerang Selatan 2021-2024

Peningkatan IPP di Kota Tangerang Selatan mencerminkan adanya kemajuan kualitas hidup dan kesempatan yang lebih luas bagi pemuda di Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendorong peningkatan akses pendidikan melalui program beasiswa dan pelatihan keterampilan, memperluas layanan kesehatan remaja, membuka peluang kerja sama industri untuk magang dan penyerapan tenaga kerja muda, serta memfasilitasi ruang partisipasi dan kepemimpinan pemuda melalui forum, komunitas, dan organisasi kepemudaan. Sinergi kebijakan lintas sektor ini berkontribusi terhadap peningkatan IPP, yang kini berada pada kategori sedang namun menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1. Angka Ketergantungan/ Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Aspek demografi berdasarkan usia yang sangat penting dianalisis dalam dokumen perencanaan adalah Rasio Ketergantungan *(dependency ratio)* yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Misal Rasio Ketergantungan 40, hal ini dapat dimaknai bahwa, setiap 100 Penduduk Usia Produktif, menanggung 40 Penduduk Usia Belum Produktif/Tidak Produktif. Angka ketergantungan dapat menggambarkan kondisi Bonus Demografi pada suatu daerah. Bonus demografi terjadi saat nilai rasio ketergantungan kecil. Semakin kecil rasio ketergantungan maka semakin besar bonus demografi. Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan Rumus Berikut ini:

$$DR = \frac{P_{(0-14)} + P_{(65+)}}{P_{(15-64)}} x100$$

Keterangan:

DR	=	*Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan)
$P_{(0-14)}$	=	Jumlah penduduk usia muda atau belum produktif (0-14 tahun)
$P_{(65+)}$	=	Jumlah penduduk usia tidak produktif atau tua (65 tahun ke atas)
$P_{(15-64)}$	=	Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)

Analisa kependudukan berdasarkan usia disajikan dalam **Tabel II.96**. Jika ditinjau berdasarkan komposisi penduduk menurut usia, terlihat bahwa persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020-2023 menunjukkan tren yang meningkat, lalu pada tahun 2024 persentasenya menurun. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2024 Kota Tangerang Selatan mulai memasuki masa penuaan penduduk (*aging population*). Hal tersebut juga ditandai tren persentase penduduk lanjut usia (>65 tahun) yang mengalami peningkatan. Pengarusutamaan

inklusifitas perlu dilaksanakan dalam pembangunan di Kota Tangerang Selatan, seperti perlindungan sosial untuk lansia dan pemberdayaan ekonomi bagi lansia yang masih memiliki kemampuan bekerja. Aging population juga dapat membuka peluang kebutuhan tenaga kerja perawatan (*caregiver*) bagi calon tenaga kerja lokal.

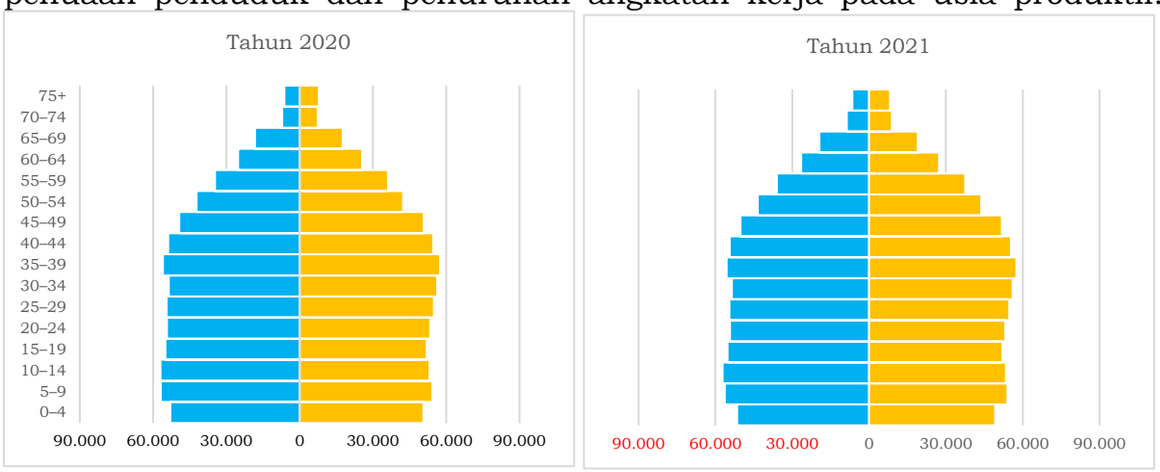
Walaupun mulai tahun 2024 mengalami penurunan, komposisi penduduk usia produktif masih mendominasi struktur penduduk Kota Tangerang Selatan. Persentase penduduk usia produktif yang rata-rata mencapai 71%, menggambarkan bahwa Kota Tangerang Selatan masih mengalami bonus demografi. Kondisi ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui peningkatan kualitas SDM menjadi lebih unggul dan berdaya saing global sehingga penduduk usia produktif di Kota Tangerang Selatan dapat menjadi sumber tenaga kerja profesional yang dapat diserap oleh pasar kerja Nasional dan Dunia.

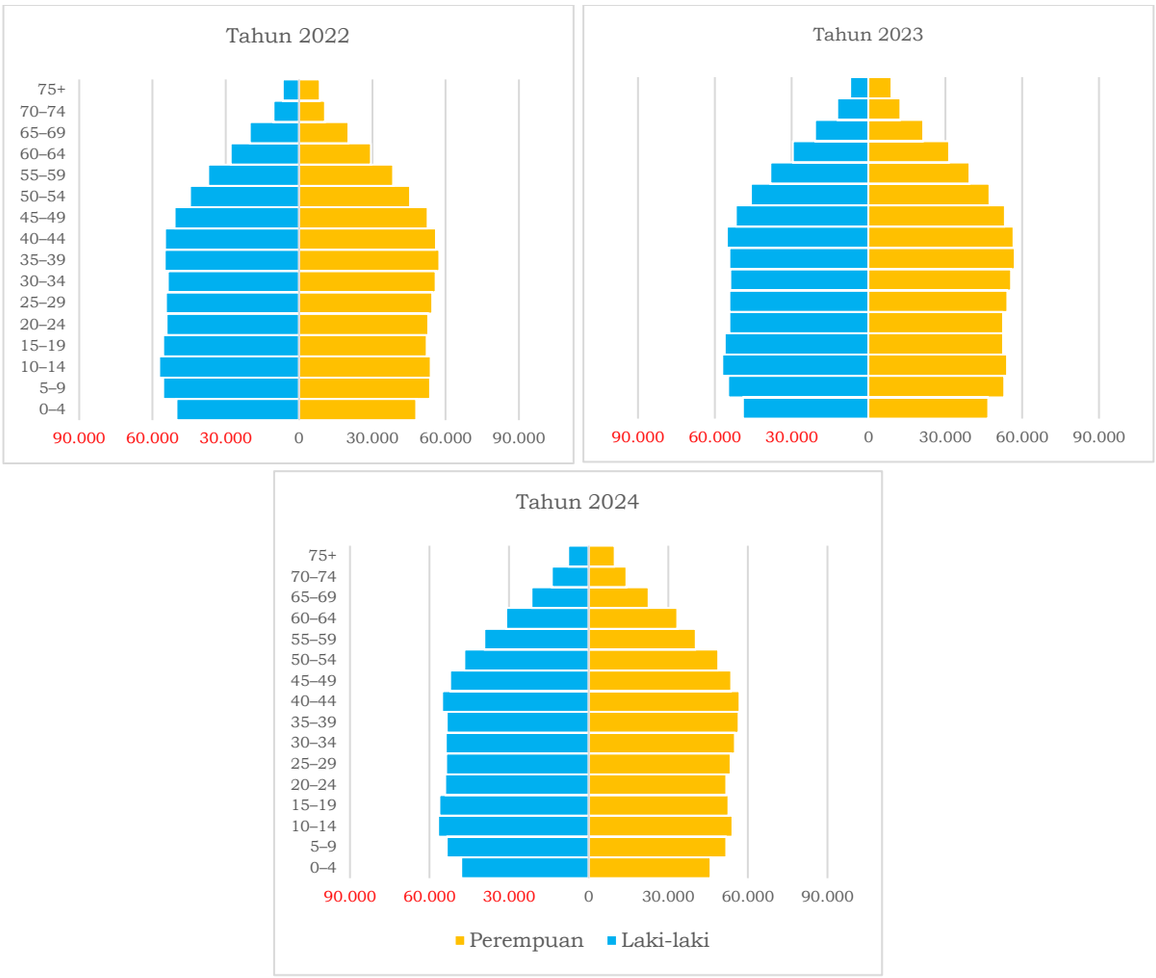
Tabel II.96. Komposisi Penduduk berdasarkan Usia di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	Periode Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Muda (<15 Tahun) (jiwa)	324.830	321.740	318.470	314.930	310.460
Persentase Penduduk Usia Muda (%)	24,04%	23,56%	23,10%	22,63%	22,18%
Penduduk Usia Tua (>65 Tahun) (jiwa)	64.630	70.580	76.700	83.050	89.770
Persentase Penduduk Usia Tua (%)	4,78%	5,17%	5,56%	5,97%	6,41%
Penduduk Usia Produktif (15-65 Tahun) (jiwa)	961.870	973.060	983.580	993.690	999.300
Persentase Penduduk Usia Produktif (%)	71,18%	71,27%	71,34%	71,40%	71,40%
Angka Ketergantungan	40,49	40,32	40,18	40,05	40,05

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025, diolah

Komposisi penduduk berdasarkan usia selama tahun 2020-2024 membentuk piramida tipe stasioner sebagaimana disajikan dalam **Gambar II.36**. Piramida penduduk stasioner menggambarkan kondisi demografis yang stabil dengan tingkat kelahiran dan kematian yang seimbang, di mana pada jangka panjang, demografis di Kota Tangerang Selatan akan mengalami penuaan penduduk dan penurunan angkatan kerja pada usia produktif.





Gambar II.36. Piramida Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

Komposisi proyeksi penduduk berdasarkan usia sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.97**, memperlihatkan persentase penduduk usia produktif di Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan selama kurun waktu tahun 2025-2029. Sementara itu, proyeksi persentase penduduk lansia meningkat pada tahun 2025-2029, di mana pada tahun 2029 diproyeksikan penduduk lanjut usia akan mencapai 9,17% dari proyeksi total penduduk Kota Tangerang Selatan.

Walaupun secara komposisi persentase penduduk usia produktif masih mendominasi struktur penduduk, namun dengan meningkatnya persentase penduduk lanjut usia menyebabkan meningkatnya angka ketergantungan di Kota Tangerang Selatan hingga mencapai 41,14% pada tahun 2029. Peningkatan angka ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa tanggungan beban untuk menghidupi penduduk usia non-produktif oleh penduduk usia produktif meningkat. Persentase penduduk usia produktif yang masih lebih besar dibandingkan usia tidak produktif menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan 2024-2029 masih mengalami bonus demografi pada tahun 2025-2029.

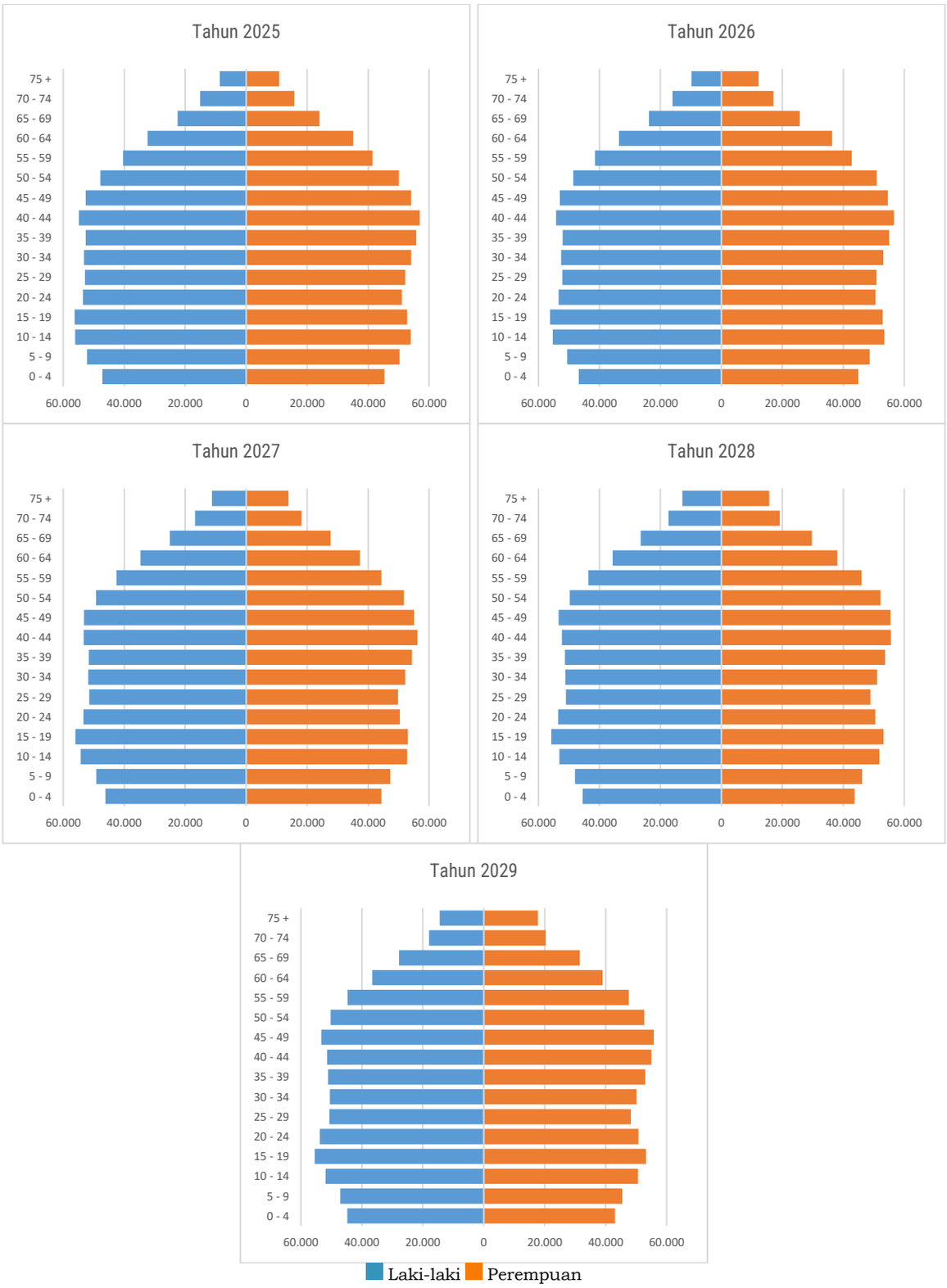
Tabel II.97. Proyeksi Komposisi Penduduk berdasarkan Usia di Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Kelompok Umur	Periode Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penduduk Usia Muda (<15 Tahun) (jiwa)	305.140	299.610	293.970	288.340	282.790	136.400

Kelompok Umur	Periode Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Penduduk Usia Muda (%)	21,76%	21,32%	20,88%	20,43%	19,98%	19,04%
Penduduk Usia Tua (>65 Tahun) (jiwa)	96.890	104.560	112.680	121.130	129.720	74.490
Persentase Penduduk Usia Tua (%)	6,91%	7,44%	8,00%	8,58%	9,17%	10,40%
Penduduk Usia Produktif (15-65 Tahun) (jiwa)	1.000.150	1.000.890	1.001.520	1.002.070	1.002.670	505.470
Persentase Penduduk Usia Produktif (%)	71,33%	71,23%	71,12%	70,99%	70,85%	70,56%
Angka Ketergantungan	40,20%	40,38%	40,60%	40,86%	41,14%	41,72%

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Banten

Dalam periode tahun 2024-2029 struktur usia penduduk di Kota Tangerang Selatan masih cenderung berupa piramida tipe stasioner sebagaimana disajikan dalam **Gambar II.37**. Dalam beberapa tahun ke depan dengan pola atau laju pertumbuhan proyeksi penduduk, maka pergeseran struktur usia penduduk di Kota Tangerang Selatan akan menuju ke arah piramida konstruktif. Piramida penduduk konstruktif menunjukkan komposisi penduduk dewasa dan usia tua yang lebih besar dari penduduk muda. Piramida konstruktif menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada suatu wilayah mengalami penurunan dan pertumbuhannya lambat di mana tingkat kelahirannya lebih rendah dari angka kematian. Menuju kepada kondisi ini maka Kota Tangerang Selatan harus mulai mempersiapkan kebijakan pembangunan dan infrastruktur yang ramah lansia dan sistem jaminan sosial yang kuat sebagai antisipasi adanya *aging communities* di masa mendatang.



Gambar II.37. Proyeksi Piramida Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Banten

2.3.2. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Sebagaimana digambarkan dalam Sub Bab 2.2.1, pada tahun 2024 terdapat sektor lapangan usaha sekunder di Kota Tangerang Selatan yang

mencatatkan pertumbuhan tinggi, yaitu sektor Industri Pengolahan. Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan selama tahun 2019-2024 disajikan dalam **Tabel II.98**, di mana besaran rasionya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, rasio sektor ini tercatat sebesar 8,39%, kemudian mengalami penurunan berturut-turut hingga mencapai 7,58% pada tahun 2021. Meskipun sempat meningkat pada tahun 2022 menjadi 7,96%, angkanya kembali turun sedikit tipis menjadi 7,82% persen pada 2023. Pada tahun 2024 rasio PDRB sektor industri pengolahan ini kembali naik menjadi 8,09%. Pergerakan ini mencerminkan dinamika sektor industri pengolahan yang perlahan mulai pulih setelah tekanan akibat pandemi dan mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan sektor ini sebagai penggerak ekonomi daerah jika didukung oleh kebijakan dan investasi yang tepat.

Tabel II.98. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (miliar rupiah)	6.942,05	6.470,60	6,679,48	7.654,56	8.162,24	9.083,26
Total PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	82.769,48	82.531,47	88.065,80	96.153,92	104.386,99	112.213,99
Rasio PDRB Industri Pengolahan	**8,39**	**7,83**	**7,58**	**7,96**	**7,82**	**8,09**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2025

2.3.2.2. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB akomodasi dan makan minum yang menunjukkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Tangerang Selatan menunjukkan tren yang relatif stabil selama periode 2019 hingga 2024, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.99**. Penurunan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terjadi pada tahun 2020-2021 pada saat terjadi pandemi Covid-19. Sejak tahun 2022, kontribusi sektor ini kembali meningkat secara perlahan yang mencerminkan adanya pemulihan di sektor pariwisata dan kuliner. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan besaran yang bahkan melampaui besaran sebelum pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan, seiring dengan membaiknya mobilitas masyarakat dan meningkatnya konsumsi rumah tangga di sektor jasa.

Tabel II.99. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB (ADHB) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (miliar rupiah)	2.500,53	2.368,02	2.499,81	2.758,77	3.060,74	3.409,63
Total PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	82.769,48	82.531,47	88.065,80	96.153,92	104.386,99	112.213,99
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	**3,02**	**2,87**	**2,84**	**2,87**	**2,93**	**3,04**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025

2.3.2.3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif menggambarkan kontribusi sektor ekonomi kreatif (ekraf) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah, yang mencerminkan:

1. Tingkat perkembangan sektor kreatif (seperti fashion, kuliner, film, musik, dan teknologi digital) terhadap perekonomian daerah;
2. Potensi daya saing daerah, di mana daerah dengan proporsi PDRB ekonomi kreatif tinggi umumnya memiliki kekuatan budaya dan pariwisata (contoh: kerajinan, festival seni) serta *startup* digital dan industri kreatif yang berkembang;
3. Transformasi Struktural Ekonomi, di mana ekonomi kreatif menjadi indikator peralihan dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis pengetahuan, kreativitas, dan inovasi;
4. Dampak pada Tenaga Kerja, di mana proporsi PDRB ekonomi kreatif yang tinggi biasanya berkorelasi dengan lapangan kerja inklusif bagi generasi muda dan UMKM serta peningkatan produktivitas berbasis kreativitas.

PDRB ekonomi kreatif di Kota Tangerang Selatan dihitung dari komponen PDRB sektor industri pengolahan (sub sektor industri makanan dan minuman, industri pakaian jadi dan industri alas kaki), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan (sub sektor angkatan darat wisata) serta sektor jasa lainnya. Proporsi PDRB ekonomi kreatif di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam **Tabel II.100**. Pada tahun 2024, proporsi PDRB ekonomi kreatif mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menggambarkan adanya potensi sektor ekonomi kreatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan.

Tabel II.100. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Proporsi sektor industri makanan dan minuman	0,055	0,055	0,060	0,062	0,062
Proporsi sektor industri pengolahan sub sektor industri tekstil dan pakaian jadi	4,541	4,326	4,689	4,555	4,809
Proporsi sektor industri pengolahan sub sektor kulit, barang dari kulit, dan alas kaki	0,688	0,683	0,697	0,636	0,613
Proporsi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	2,870	2,840	2,870	2,930	3,040
Proporsi sektor transportasi dan pergudangan sub sektor angkutan darat	2,426	2,561	2,587	2,699	2,669
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	**10,580**	**10,464**	**10,903**	**10,882**	**11,194**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2025, diolah

2.3.2.4. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga

kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha Rasio ini digunakan sebagai indikator penting untuk menilai kondisi ekonomi dan perkembangan kewirausahaan suatu daerah. Rasio kewirausahaan yang tinggi menunjukkan bahwa banyak orang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menciptakan lapangan kerja baru, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Jika bercermin kepada negara maju, rasio kewirausahaan minimal 4%.

Rasio kewirausahaan Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.101**. Pada tahun 2024, rasio kewirausahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut perlu ditangani mengingat kewirausahaan terutama pada sektor UMKM yang merupakan potensi aktivitas perekonomian yang sangat penting, baik dari segi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan memajukan potensi lokal. Diperlukan upaya-upaya dukungan komprehensif dalam penciptaan iklim berwirausaha yang dapat meningkatkan kembali rasio kewirausahaan di Kota Tangerang Selatan antara lain berupa:

1. Pemberian kemudahan perizinan, bantuan modal, dan pelatihan kewirausahaan;
2. Memasukkan kurikulum kewirausahaan sejak dini;
3. Kolaborasi dengan swasta untuk program pendampingan dan akses pasar.
4. Mendorong ekonomi digital dengan pelatihan teknologi untuk UMKM.

Tabel II.101. Rasio Kewirausahaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pekerja yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	24.402	17.585	24.268	24.094	12.012
Jumlah Angkatan Kerja	852.435	817.237	817.237	652.575	601.673
Rasio Kewirausahaan	**2,86**	**2,15**	**2,97**	**3,69**	**1,99**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2021-2025

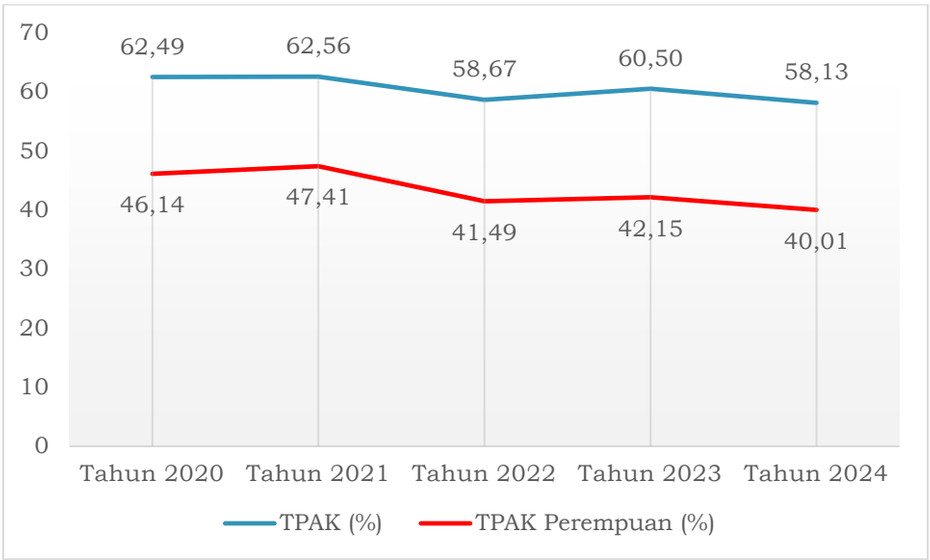
2.3.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah indikator ketenagakerjaan yang mengukur keterlibatan aktif penduduk dalam kegiatan ekonomi. TPAK diperoleh dari perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Perkembangan TPAK di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam **Gambar II.38**, di mana terlihat bahwa TPAK Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 mengalami penurunan, yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi (bekerja atau mencari kerja) menurun. Jika berdasarkan gambaran dalam sub bab 2.2.1, tingkat kesempatan kerja di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 malahan meningkat dibandingkan tahun 2023. Kondisi kontradiktif ini perlu mendapatkan penanganan karena penurunan TPAK dapat berdampak pada perekonomian dan sosial, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi melambat: Jika lebih sedikit orang yang bekerja, output ekonomi (PDB) bisa menurun karena tenaga kerja adalah faktor produksi utama;

2. Meningkatnya Beban Ketergantungan: Jika banyak usia kerja tidak bekerja, beban ekonomi beralih ke kelompok yang bekerja;
3. Masalah Sosial dan Kesejahteraan;
4. Penurunan Daya Saing Daerah: Jika generasi muda tidak masuk pasar kerja (misalnya karena memilih kuliah terlalu lama atau "NEET" [*Not in Education, Employment, or Training*]), Kota Tangerang Selatan bisa kalah bersaing dengan daerah lain karena kehilangan SDM potensial;
5. Investasi Menurun: Investor mungkin enggan masuk ke daerah dengan TPAK rendah karena kekurangan tenaga kerja terampil.

Jika ditinjau berdasarkan gender, terlihat juga pada tahun 2024 terjadi penurunan partisipasi penduduk usia kerja berjenis kelamin perempuan yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kondisi ini juga memperkuat kondisi penurunan indeks pemberdayaan perempuan pada tahun 2024 yang digambarkan pada sub bab 2.2.6.2.



Gambar II.38. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2021-2025

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, terdapat 515 penyandang disabilitas, dengan 313 orang di antaranya berada dalam usia angkatan kerja (18-64 tahun). Dari jumlah tersebut, 143 orang (45,7%) berhasil terserap di sektor formal, sementara 33 orang (10,5%) bekerja di sektor informal. Meskipun hampir setengah penyandang disabilitas di Tangerang Selatan telah bekerja di sektor formal, masih terdapat 137 orang (43,8%) yang belum terserap dalam lapangan kerja, baik formal maupun informal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya inklusi ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih memerlukan perbaikan untuk memastikan kesempatan kerja yang lebih merata dan berkelanjutan. Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di sektor formal, yaitu:

a. Peningkatan Aksesibilitas dan Akomodasi di Tempat Kerja, melalui kerja sama dengan dunia usaha untuk memastikan tempat kerja yang ramah disabilitas, seperti penyediaan akses fisik (lift, toilet inklusif), alat bantu kerja, serta modifikasi jam atau beban kerja jika diperlukan. Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat memberikan insentif bagi

perusahaan yang merekrut penyandang disabilitas dan menyediakan fasilitas inklusif;

b. Pelatihan Keterampilan dan Keterhubungan dengan Pasar Kerja, dengan mengadakan program pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, seperti digital skills, administrasi, atau kerajinan, yang disesuaikan dengan kemampuan penyandang disabilitas. Selain itu, membangun kemitraan dengan perusahaan melalui program magang atau job matching khusus disabilitas dapat diupayakan untuk meningkatkan *link and match* dengan pasar kerja;

c. Sosialisasi dan Kampanye Kesadaran Inklusi, dengan melakukan edukasi kepada pengusaha dan masyarakat tentang potensi dan hak pekerja disabilitas untuk mengurangi stigma dan diskriminasi serta memperkuat peran Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dalam advokasi kebijakan dan pendampingan pencari kerja;

d. Penguatan Regulasi dan Monitoring untuk memastikan implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, termasuk kuota 2% pekerja disabilitas di sektor publik dan 1% di swasta. Membentuk tim pemantau independen juga diperlukan untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan dan efektivitas program inklusi ketenagakerjaan;

e. Pengembangan Kewirausahaan Inklusif, dengan memberikan bantuan modal, pelatihan bisnis, dan pendampingan bagi penyandang disabilitas yang ingin membuka usaha mandiri serta memfasilitasi pemasaran produk UMKM disabilitas melalui *platform* digital atau pameran khusus.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kota Tangerang Selatan dapat memperkuat ekosistem ketenagakerjaan inklusif, sehingga lebih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan pekerjaan layak dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah.

2.3.2.6. Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kapabilitas Inovasi

Indeks Inovasi Daerah (IID) mengukur kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan dan menerapkan inovasi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Perhitungan IID yaitu rasio antara skor total dengan skor total maksimum. Skor total maksimum yang menjadi acuan adalah 250, yang merupakan gabungan dari skor maksimal pada dua aspek utama, yaitu Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID). Aspek SPD memiliki proporsi sebesar 25,20%. Sementara itu, aspek SID memiliki proporsi sebesar 74,80. Skor dan kategori Indeks Inovasi Daerah terbagi menjadi 4 kategori, yaitu:
a. Sangat inovatif: 65,01 – 100,00
b. Inovatif: 35,00 – 65,00
c. Kurang inovatif: 0,01 – 34,99
d. Tidak dapat dinilai: 0

Indeks inovasi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019-2024 disajikan dalam **Tabel II.102**. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, kinerja inovasi Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, yaitu semula berpredikat Sangat Inovatif menjadi Inovatif. Penurunan indeks inovasi Kota Tangerang Selatan tersebut disebabkan oleh kombinasi dari penurunan kuantitas/kualitas inovasi yang dilaporkan, kekurangan dokumentasi, serta minimnya dukungan atau perhatian terhadap agenda inovasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan daerah. Untuk mengembalikan predikat “Sangat Inovatif”, diperlukan penguatan dalam manajemen inovasi, peningkatan kualitas bukti dan dokumentasi, serta

pelibatan aktif seluruh OPD dalam menyusun dan melaporkan inovasi secara sistematis.

Tabel II.102. Indeks Inovasi Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
Predikat Indeks inovasi daerah	Sangat inovatif	Inovatif (51,66)	Inovatif (59,88)	Inovatif (60,15)	Inovatif (50,45)

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Tahun 2021-2024

Selain dilihat dari indeks inovasi daerah, indeks kapabilitas inovasi juga dapat menjadi gambaran ekosistem pemajuan IPTEK dan inovasi di Kota Tangerang Selatan. Indeks kapabilitas inovasi merupakan bagian dari pilar pembentuk Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diukur tahunan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah, indeks kapabilitas inovasi juga memberikan gambaran sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indeks kapabilitas inovasi Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, yaitu semula skor 3,48 menjadi skor 3,29, sebgaimana disajikan dalam **Tabel II.103**. Untuk itu, Kota Tangerang Selatan perlu mengangkat derajat kolaborasi dan riset mulai dari pengembangan kluster, belanja riset, publikasi hasil riset, indeks keunggulan lembaga riset dan penyebaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara intensif. Peningkatan ekosistem kebijakan berbasis bukti juga merupakan upaya peningkatan peran riset dan inovasi sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan daerah.

Tabel II.103. Indeks Kapabilitas Inovasi Tangerang Selatan Tahun 2023-2024

Uraian	Tahun 2023	Skor Nasional Tahun 2023	Keterangan	Tahun 2024	Skor Nasional Tahun 2024	Keterangan
Indeks Kapabilitas Inovasi	3,48	3,03	Melebihi Capaian Standar Nasional	3,29	3,13	Melebihi Capaian Standar Nasional

Sumber: BRIN, Tahun 2023-2024

2.3.3. Transformasi Digital

2.3.3.1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Transformasi digital tidak hanya sekadar proses adopsi teknologi, tetapi juga mencakup perubahan yang lebih luas pada pola pikir, cara kerja, dan interaksi masyarakat. Transformasi digital telah menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan di berbagai aspek kehidupan, dari ekonomi, pendidikan, hingga layanan publik. Sebagai bagian dari cita-cita Visi Indonesia Emas, transformasi digital berperan penting dalam mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang berdaya saing global dengan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, masyarakat digital menjadi aktor utama yang memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk menciptakan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses ke peluang.

Keberhasilan transformasi digital memerlukan pengukuran yang tepat untuk memahami kondisi masyarakat digital secara menyeluruh. Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan instrumen strategis untuk memetakan tingkat adopsi teknologi, literasi digital, pemberdayaan ekonomi

digital serta kesenjangan yang masih ada. Indeks ini tidak hanya menggambarkan pencapaian, tetapi juga memberikan arahan bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengidentifikasi tantangan serta peluang.

Kerangka kerja IMDI terdiri atas 4 (tiga) pilar, yaitu:

1. Pilar Infrastruktur dan Ekosistem, merupakan pilar yang menjadi landasan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital pada masyarakat. Pilar ini menekankan pentingnya kesetaraan akses untuk membangun ekosistem digital yang inklusif;
2. Pilar Keterampilan Digital, berperan sebagai alat dalam mencapai pembangunan digital yang lebih inklusif. Dalam IMDI, pilar keterampilan mencakup literasi digital dan keterampilan digital dasar;
3. Pilar Pemberdayaan, mencerminkan kemampuan digital masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan. Keberadaan *platform* digital menawarkan peluang ekonomi baru, kesempatan pendapatan yang lebih tinggi kepada masyarakat, kualitas hidup yang lebih baik, dan inklusi keuangan;
4. Pilar Pekerjaan, terdiri dari keterampilan digital yang banyak dibutuhkan dan kemampuan pekerja dalam menggunakan teknologi digital terkait pekerjaan.

Nilai IMDI Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022-2024 beserta Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten disajikan dalam **Tabel II.104**, di mana tergambar bahwa nilai IMDI Kota Tangerang Selatan tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan paling tinggi di Provinsi Banten.

Tabel II.104. Nilai IMDI Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	Kategori IMDI Tahun 2024
Kota Cilegon	48,29	47,83	45,68	Cukup
Kota Serang	40,70	44,42	45,33	Cukup
Kota Tangerang	43,15	45,00	43,81	Cukup
Kota Tangerang Selatan	**48,87**	**46,93**	**49,82**	**Tinggi**
Kabupaten Lebak	49,54	44,22	48,86	Tinggi
Kabupaten Pandeglang	43,14	40,00	45,17	Cukup
Kabupaten Serang	35,88	41,17	43,43	Cukup
Kabupaten Tangerang	46,15	44,87	43,46	Cukup

Sumber: KOMDIGI, Tahun 2025

Sementara itu, nilai dari tiap pilar IMDI Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 disajikan dalam **Tabel II.105**, di mana terlihat bahwa pilar yang perlu mendapatkan perhatian dan intervensi adalah pilar pemberdayaan dan pilar pekerjaan.

Tabel II.105. Nilai Pilar IMDI Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Indikator	Pilar Infrastruktur dan Ekosistem	Pilar Keterampilan Digital	Pilar Pemberdayaan	Pilar Pekerjaan
Indeks Mayarakat Digital Indonesia	66,53	62,95	32,74	35,36

Sumber: KOMDIGI, Tahun 2025

2.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.4.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

Selama periode 2020-2024, nilai PMTB Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data pada **Tabel II.106** menunjukkan bahwa nilai nominal PMTB pada 2020-2021 menunjukkan adanya kenaikan, yaitu dari 38.169,27 miliar pada tahun 2020 sebagai imbas dari pandemi Covid-19 menjadi 41.362,81 miliar pada tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 nilai PMTB Kota Tangerang Selatan mengalami sedikit kenaikan menjadi sebesar 45.937,29 miliar. Pada tahun 2023 PMTB Kota Tangerang Selatan sebesar 48.343,16 miliar menjadi 48.628,9 miliar pada tahun 2024.

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung melambat tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB non bangunan.

Tabel II.106. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total PMTB					
a. ADHB (Milyar Rp)	38.169,27	41.362,81	45.937,29	48.343,16	48.628,90
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	23.778,73	25.060,99	26.082,50	26.488,28	26.943,09
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	46,25	46,97	47,78	46,31	43,34
Struktur PMTB					
a. Bangunan (Milyar Rp)	35.482,79	38.510,51	42.759,37	44.717,79	44.839,71
(%)	92,96	93,12	93,08	92,50	92,20
b. Non Bangunan (Milyar Rp)	2.686,48	2.852,30	3.177,91	3.625,38	3789,19
(%)	7,04	6,90	6,92	7,50	7,80
Total PMTB	**38.169,27**	**41.362,81**	**45.937,29**	**48.343,16**	**48.628,90**
%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Pertumbuhan					
a. Bangunan	-0,48	5,43	4,03	1,04	1,59
b. Non bangunan	0,96	4,77	4,74	9,27	3,44
Total PMTB	**-0,39**	**5,39**	**4,08**	**1,56**	**1,72**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2021-2025

2.3.4.2. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Tangerang Selatan, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Secara total, dalam kurun waktu 2020-2024 nilai ekspor barang dan jasa di Kota Tangerang Selatan menunjukkan fluktuasi setiap tahun, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.107**. Pada tahun 2020 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 39.407,33 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 yaitu masing-masing sebesar 51.823,23 (2021), 61.648,38 (2022), 57.432,49 (2023) dan 57.656,57 (2024). Nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 cenderung menunjukkan arah pertumbuhan yang hampir sama, yaitu cenderung berfluktuasi dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar 29.160,87 miliar rupiah (2020), 31.337,02 miliar rupiah (2021), 33.947,14 miliar rupiah (2021), 30.781,15 miliar rupiah (2022) dan 36.884,80 miliar rupiah (2023). Sementara itu, Proporsi ekspor dalam PDRB menunjukkan tren yang fluktuatif, yaitu sebesar 47,74 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 58,85 persen (2021) dan 64,13 persen (2022). Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 55,02 persen dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 51,38 persen.

Tabel II.107. Perkembangan Ekspor Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Milyar Rp)	39.407,33	51.823,23	61.648,38	57.932,49	57.656,57
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	29.160,87	31.337,02	33.947,14	30.781,15	36.884,80
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	**47,74**	**58,85**	**64,13**	**55,02**	**51,38**
Pertumbuhan	**-0,50**	**7,46**	**8,33**	**-9,33**	**19,33**

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2021-2025

2.3.5. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.5.1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur merupakan indikator untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. IKLI berfungsi sebagai instrumen untuk mendapatkan pandangan masyarakat yang objektif, komprehensif, dan dapat dipercaya, baik dari segi pembangunan fisik maupun manfaat yang dihasilkan. Indikator pada sektor infrastruktur yang akan dinilai meliputi: ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, efektivitas pemanfaatan, dan kontribusi ekonomi.

Data dalam **Tabel II.108** menunjukkan bahwa IKLI Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021-2023, walaupun nilainya masih di bawah capaian pada tahun 2020. IKLI Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebesar 8,29 (dari skala 1-10), masuk pada tingkat mutu layanan A atau Baik Sekali. Variabel layanan dengan Indeks Kepuasan tertinggi adalah Kontribusi Terhadap Perekonomian sebesar 4,34, sedangkan variabel layanan dengan Indeks Kepuasan terendah adalah Kualitas Fisik sebesar 3,94.

Tabel II.108. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI)	9,08	5	5,75	7,03	8,29

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

2.3.5.2. Akses Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi kecukupan minimum luas bangunan dan standar kesehatan penghuni rumah. Empat kriteria rumah layak huni berdasarkan Kementerian PUPR dan SDGs adalah ketahanan bangunan, kecukupan luas bangunan, akses sanitasi, serta akses air minum yang bersih.

Jika mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), luas minimal rumah layak huni adalah minimal 7,2 meter persegi per jiwa atau 28,8 meter persegi untuk satu keluarga berjumlah empat orang. Gambaran rumah tangga dengan akses terhadap rumah layak huni berdasarkan standar luas rumah di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam **Tabel II.109**, sedangkan gambaran rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi dan air bersih layak disajikan dalam sub bab 2.1.5.2 dan 2.1.5.3. di mana rata-rata rumah tangga di Kota Tangerang Selatan memiliki akses terhadap rumah layak huni.

Tabel II.109. Persentase Rumah Tangga dengan Rumah Layak Huni berdasarkan Luasan Rumah di Kota Tangerang Selatan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Rumah Dengan Luas Lantai Per Kapita Minimal 7,2 M^2	-94,96	95,26	96,13

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025

2.3.5.3. Indeks Kota Layak Huni

Indeks Kota Layak Huni merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kelayakan huni suatu kota atau wilayah. Indeks ini mencakup sejumlah indikator yang mencerminkan kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, dan ketersediaan layanan dasar di dalam kota. Nilai IKLH terbagi atas 5 kelompok yaitu:

a) Nilai indeks 81-100 = sangat baik
b) Nilai indeks 61-80 = baik
c) Nilai indeks 41-60 = cukup
d) Nilai indeks 21-40 = buruk
e) Nilai indeks 0-20 = sangat buruk

Indeks Kota Layak Huni Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021-2024 sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.110** menunjukkan tingkat kelayakan huni dalam kategori baik. Pada tahun 2024, komponen ketersediaan layanan dasar dengan skor indeks tertinggi adalah fasilitas pendidikan, telekomunikasi, fasilitas peribadatan, penyediaan air bersih serta fasilitas administrasi dan pelayanan publik. Sementara itu fasilitas kesenian budaya, fasilitas pejalan kaki dan fasilitas kelompok rentan merupakan nilai indeks terendah pada Kota Tangerang Selatan.

Tabel II.110. Indeks Kota Layak Huni Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024

IKLH	2021	2022	2023	2024
Kota Tangerang Selatan	68,38	68,84	69,50	70,03

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.6.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB menggambarkan tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap perekonomian suatu wilayah. Rasio ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kemampuan fiskal daerah: Seberapa besar pemerintah daerah mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan, relatif terhadap ukuran ekonominya;
2. Efektivitas pemungutan pajak: Tingkat keberhasilan daerah dalam memobilisasi potensi pajak dari aktivitas ekonomi;
3. Ketergantungan pada transfer pusat: Rasio rendah dapat mengindikasikan ketergantungan tinggi pada dana pusat (DAU/DBH)

Rasio pajak daerah terhadap PDRB ADHK Kota Tangerang Selatan dalam periode 2020–2024 disajikan dalam **Tabel II.111** yang menunjukkan tren peningkatan. Nilai rasio yang di bawah 5% (rasio rendah) mengindikasikan potensi pajak belum tergali optimal.

Tabel II.111. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah (miliar rupiah)	1.345,14	1.523,11	1.794,85	1.917,84	2.093,59
Total PDRB (ADHK) (miliar rupiah)	59.531,08	62.392,12	66.021,24	69.561,56	73.052,84
Total PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	82.531,47	88.065,80	96.135,92	104.386,99	112.213,99
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHK	2,26%	2,44%	2,72%	2,76%	2,87%
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB	1,63%	1,73%	1,87%	1,84%	1,87%

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2025

2.3.6.2. Iklim Investasi

Untuk mengetahui seberapa besar efisiensi investasi yang ditanamkan di suatu daerah, dapat digunakan parameter *Incremental Capital Output Ratio* (*ICOR*). Nilai *ICOR* yang menunjukkan produktivitas investasi yang baik adalah antara 3–4. Semakin tinggi *ICOR* mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. Sebaliknya, *ICOR* yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal (Imelda, 2015). Nilai ICOR Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.112**.

Berdasarkan data ICOR, terlihat bahwa pada tahun 2022 hingga 2024 Kota Tangerang Selatan telah mengalami pemulihan ekonomi secara bertahap setelah terdampak pandemi Covid-19 sejak Maret tahun 2020. Pada tahun 2024 ICOR Kota Tangerang Selatan tercatat sebesar 7,72, yang mengindikasikan bahwa untuk setiap peningkatan output sebesar 1 miliar rupiah diperlukan tambahan kapital sebesar 7,72 miliar rupiah. Nilai ICOR yang semakin tinggi menunjukkan efisiensi investasi yang semakin menurun. Hal ini menggarisbawahi bahwa produktivitas investasi di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 masih dalam proses pemulihan menuju kondisi optimal seperti sebelum pandemi. Tren ICOR yang cenderung meningkat dari 7,48 pada tahun 2023 menjadi 7,72 pada tahun 2024 menggambarkan ketergantungan pada investasi padat modal dengan produktivitas rendah dan struktural ekonomi yang belum terdiversifikasi, seperti dominasi sektor jasa/logistik dengan nilai tambah terbatas.

Gambaran tersebut menjadi tantangan dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan kapital untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal, dengan upaya antara lain pemberian insentif untuk proyek ber-multiplier effect tinggi (misalnya industri hijau atau digital) dan reformasi birokrasi untuk memangkas *cost of doing business.*

Berdasarkan data realisasi investasi terlihat bahwa pertumbuhan investasi di Kota Tangerang Selatan menggambarkan pertumbuhan volatil, di mana pada tahun 2021 terjadi lonjakan pertumbuhan investasi pasca pandemi Covid-19 yang dipacu pemulihan aktivitas ekonomi, stimulus fiskal dan relaksasi perizinan. Pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi invesatsi akibat ketidakpastian global (perang Ukraina dan inflasi AS). Semantara itu pada tahun 2023 kembali terjadi pemulihan yang didorong percepatan proyek infrastruktur strategis Nasional. Pada tahun 2024 realisasi investasi mencapai capaian tertinggi selama kurun waktu tahun 2020-2024, namun pertumbuhannya melambat yang menandakan tantangan *sustainability* (keberlanjutan).

Tabel II.112. Nilai ICOR dan Realisasi Investasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai ICOR	-39,24	8,76	7,19	7,48	7,72
Realisasi Investasi Total (Rp Triliun)	3,933	5,677	4,658	7,449	8,480
a. Realisasi PMA (Rp Triliun)	0,685	1,462	0,999	1,224	0,816
b. Realisasi PMDN (Rp Triliun)	3,248	4,215	3,659	6,225	7,664
Pertumbuhan Investasi (%)		44,34	-17,95	59,92	13,84

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2025

2.3.7. Inklusi Keuangan

2.3.7.1. Indeks Akses Keuangan Daerah

Inklusi keuangan adalah kondisi ketika setiap orang memiliki akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhannya serta bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan ditekankan menjadi bagian penting dari untuk mewujudkan stabilitas ekonomi makro dan diharapkan dapat mendukung optimalnya fungsi intermediasi sektor keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Inklusi keuangan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan partisipasi seluruh masyarakat ke dalam sektor keuangan seperti perbankan, kredit, dan asuransi hingga mendorong pertumbuhan kewirausahaan, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Ketersediaan akses dan penggunaan layanan keuangan merupakan faktor krusial dalam inklusi keuangan dan berdampak terhadap outcome perekonomian, di mana Daerah yang memiliki akses kepada layanan keuangan yang lebih baik memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, upaya peningkatan inklusi keuangan perlu dilakukan secara intensif dan ekstensif sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah.

Terdapat berbagai tantangan disparitas inklusi keuangan di Daerah, salah satunya adalah masih terdapat kelompok masyarakat yang belum menjangkau layanan keuangan formal. Oleh karena itu diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang terukur, objektif, berbasis data yang kredibel, dan juga mampu mengidentifikasi disparitas inklusi keuangan. Indeks Akses

Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menganalisis capaian program inklusi keuangan serta sebagai masukan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. IKAD terdiri dari tiga dimensi utama yaitu penggunaan, ketersediaan dan kedalaman.

Berdasarkan data dari BAPPENAS RI, IKAD Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022-2024, yaitu 6,26 (Tahun 2022); 5,11 (Tahun 2023) dan 5,03 (Tahun 2024). Terlihat bahwa IKAD Kota Tangerang Selatan mengalami tren penurunan yang perlu dilakukan intervensi.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif menjelaskan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan mencerminkan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam menjalankan kebijakan serta pelayanan kepada masyarakat. Proses ini didasarkan pada pertukaran informasi yang terbuka dan transparan, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, tata kelola pemerintahan harus mematuhi kerangka hukum yang berlaku guna memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

2.4.1.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.113**, yang menunjukkan tren meningkat.

Tabel II.113. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	61,11/B	63,48/B	65,61/B	76,79/BB	85.61/BB
Komponen IRB:					
a. Indeks Sistem Merit	N/A	277,5	292,5	N/A	326
b. Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	36,53	36,53	N/A	65
c. Indeks Profesional ASN	N/A	30,78	44,92	N/A	79
d. Indeks SPBE	N/A	2,48 (cukup)	2,54 (cukup)	3,18 (baik)	3,48 (baik)
e. Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	36,43	39,10	N/A	75,56
f. Indeks Pelayanan Publik	N/A	4,22	4,48	N/A	4,25
g. Indeks Internal Audit Capability Model (Kapasitas APIP)	N/A	3	3	N/A	N/A
h. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	N/A	3	3	N/A	3,2

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
i. Keptuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	N/A	72,21	88,83	N/A	96,45
j. Kualitas Pengelolaan Arsip/ Tingkat Digitalisasi Arsip	N/A	66,92	60,07	N/A	65,45
k. Reformasi Hukum	N/A	N/A	75,45	76,09	99,16
l. Nilai SAKIP	66,61	66,88	66,92	67,33	69,06
m. Indeks Pembangunan Statistik	N/A	N/A	N/A	N/A	2,63
n. Indeks berAkhlak	N/A	N/A	N/A	N/A	79,75
o. Survey Penilaian Integritas	N/A	70.90	73.32	74.29	76,25
p. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: SETDA Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

2.4.1.2. Indeks Reformasi Hukum

Indeks reformasi hukum daerah dapat menggambarkan kualitas Peraturan Perundang-Undangan yang diharapkan responsif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran Indeks reformasi hukum sangat penting, terutama terkait gambaran kepastian hukum untuk iklim bisnis, perlindungan hak warga negara dan alat evaluasi bagi Pemerintah Daerah untuk perbaikan tata kelola hukum.

Indeks reformasi hukum Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sebesar 76,09 (predikat BB/ Baik) dan tahun 2024 sebesar 99,16 (predikat AA/ Istimewa) Peningkatan nilai indeks yang sangat signifikan dapat menggambarkan adanya perbaikan yang substansial dalam tata kelola hukum, baik dari aspek transparansi, efisiensi, maupun kepatuhan terhadap regulasi.

2.4.1.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki empat tujuan, antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, kemudian mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. Indeks SPBE Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021-2024 disajikan dalam **Tabel II.114**, yang menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan menuju transformasi digital pemerintahan untuk mempercepat proses pelayanan publik dan meningkatkan transparansi.

Tabel II.114. Capaian sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kota Tangerang Selatan

Layanan	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,48 (cukup)	2,54 (cukup)	3,18 (baik)	3,48 (baik)

Sumber: Diskominfo Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Untuk mewujudkan transformasi tata kelola untuk peningkatan kualitas layanan publik, maka salah satu strategi yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 adalah Transformasi Digital Pemerintah (TDP) berupa penerapan Pemerintah Digital (Pemdi) dengan aspek berupa: 1) Penguatan tata kelola Pemdi, 2) Penguatan teknologi Pemdi, 3) Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, 4) Transformasi digital layanan publik prioritas, dan 5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.

Target peran Pemdi sebagai pengungkit pembangunan 2025-2029, secara umum meliputi: 1) Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu, 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi, 3) Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, 4) Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta 5) Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup). Berdasarkan hal tersebut, maka Indeks SPBE akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) pada tahun 2026.

2.4.1.4. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme sumberdaya manusia, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu komponen pengukuran reformasi birokrasi. Indeks Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.115**. Pada tahun 2024, Indeks Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan yang signifikan dan merupakan pencapaian tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Tabel II.115. Capaian Indeks Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan

Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	3,87	4,22	4,37	3,90	4,25

Sumber: SETDA Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

2.4.1.5. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan indikator yang mengukur tingkat digitalisasi transaksi keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana transaksi telah beralih dari sistem manual atau konvensional ke sistem digital. Berdasarkan klasifikasinya, ETPD terbagi menjadi tiga kategori: Konvensional (0%-25%) yang menunjukkan sebagian besar transaksi masih dilakukan secara manual; Semi Digital (25%-75%) di mana proses digitalisasi sudah mulai diterapkan namun belum menyeluruh; serta Digital (75%-100%) yang menandakan bahwa mayoritas transaksi telah terdigitalisasi sepenuhnya.

Berdasarkan data capaian indeks ETPD Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2021-2024 sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.116** menunjukkan tren peningkatan digitalisasi transaksi keuangan yang mengindikasikan penguatan sistem pembayaran nontunai, efisiensi proses

administrasi keuangan, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Nilai indeks yang semakin mendekati angka maksimum (100) menunjukkan Kota Tangerang Selatan berada pada fase maturitas tinggi dalam implementasi transaksi digital Pemerintah Daerah.

Tabel II.116. Capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2021-2024 Kota Tangerang Selatan

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	87,9	97,9	96,2	98,3

Sumber: Bapenda Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

2.4.1.6. Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan sebuah survei yang dilakukan oleh KPK untuk memetakan risiko korupsi di instansi pemerintah. Perhitungannya melibatkan penilaian internal, eksternal, dan ahli, serta dikoreksi dengan faktor prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan SPI. Faktor koreksi ini dihitung berdasarkan data sekunder, seperti laporan pengaduan masyarakat ke KPK, jumlah kasus korupsi, dan hasil observasi survei. Indeks ini bertujuan untuk mendefinisikan integritas organisasi publik, menciptakan alat ukur yang objektif dan dapat diandalkan, serta mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Indeks ini menjadi salah satu acuan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan antikorupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Hasil SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu Rentan (indeks <73), Waspada (indeks di antara 73-77) dan Terjaga (indeks 78-100). Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/ mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Nilai SPI Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2024 disajikan dalam **Tabel II.117**, dengan kisaran nilai antara 70-75 yang menggambarkan integrasi instansi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkategori rentan hingga waspada. Hal tersebut perlu menjadi perhatian dan ditangani segera karena akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan di Kota Tangerang Selatan.

Tabel II.117. Hasil Survei Penilaian Integritas Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024

No	Layanan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Survei Penilaian Integritas	70.90	73.32	74.29	76,25

Sumber: Kementerian PAN dan RB, Tahun 2024

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.4.2.1. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepastian hukum. Perda yang ditegakkan dengan konsisten tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah

dalam menjalankan regulasi, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam menciptakan ketertiban, keamanan, serta kepatuhan di masyarakat. Implementasi Perda yang optimal berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga, sekaligus memastikan bahwa kebijakan daerah dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Persentase Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditegakkan sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.118**, menunjukkan peningkatan signifikan dalam empat tahun terakhir. Peningkatan ini juga mendukung terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, sejalan dengan prinsip pembangunan hukum yang berlandaskan hak asasi manusia.

Tabel II.118. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	77,78%	100%	100%	100%

Sumber: Dokumen LPPD 2021-2024

2.4.2.2. Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM)

Pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Daerah. Untuk memastikan implementasi HAM yang merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025. Regulasi ini mengatur peran aktif Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan dan program yang mendukung pemajuan HAM di wilayahnya masing-masing. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan setiap daerah dapat mengoptimalkan langkah-langkah strategis dalam melindungi hak-hak warga, terutama kelompok rentan, agar tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Persentase capaian aksi HAM di Kota Tangerang Selatan per aksi selama tahun 2022-2024 disajikan dalam **Tabel II.119** hingga **Tabel II.121** di mana tren capaian aksi HAM mengalami peningkatan. Aksi yang masih perlu diupayakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan karena pada tahun 2024 capaiannya mengalami penurunan, yaitu:

a. Aksi 1 : Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah, dan:
b. Aksi 3 : Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.

Tabel II.119. Capaian Aksi Ham Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

Aksi	Keterangan Aksi	Realisasi Nilai
Aksi 1	Penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	86,7
Aksi 2	Peningkatan kesadaran dan kapasitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum.	86,3
Aksi 3	Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum.	88,5

Aksi	Keterangan Aksi	Realisasi Nilai
Aksi 4	Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.	79
Aksi 5	Meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok: panti asuhan/ sosial, penghayat kepercayaan, minoritas agama, dan Kelompok Masyarakat Adat (KMA), Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Anak luar kawin.	93,5
Aksi 6	Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.	71,2
Rata-rata		**84,2**

Sumber: Kemenkumham, 2023

Tabel II.120. Capaian Aksi HAM Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Aksi	Keterangan Aksi	Realisasi Nilai
Aksi 1	Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.	93,3
Aksi 2	Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum	100
Aksi 3	Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum	100
Aksi 4	Meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok: panti asuhan/ sosial, penghayat kepercayaan, minoritas agama, dan kelompok masyarakat adat (KMA), anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan anak luar kawin.	86,7
Aksi 5	Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok: a. Tinggal di daerah 3T/Kantong Kemiskinan (Perpres Nomor 63 Tahun 2020); b. Kelompok Masyarakat Adat (KMA); c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).	70
Aksi 6	Pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok: a. Tinggal di daerah 3T/Kantong Kemiskinan (Perpres Nomor 63 Tahun 2020); b. Kelompok Masyarakat Adat (KMA); c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS)	86,7
Aksi 7	Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.	96,7
Rata-rata		**90,49**

Sumber: Kemenkumham, 2024

Tabel II.121. Capaian Aksi HAM Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Aksi	Keterangan Aksi	Realisasi Nilai
Aksi 1	Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah	90,00
Aksi 2	Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum	100
Aksi 3	Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas	96,7
Aksi 4	Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama	100
Aksi 5	Implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya	100
Aksi 6	Membangun sarana dan prasarana transportasi aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Permenhub 98/2017 pasal 3 dan 4 dalam ruang lingkup kewenangan daerah	100
Rata-rata		97,80

Sumber: Kemenkumham, 2025

2.4.2.3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) digunakan sebagai suatu alat ukur yang dapat menggambarkan tingkat perkembangan demokrasi berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. IDI diperoleh dengan menggabungkan berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi dalam suatu wilayah. Nilai IDI Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022-2024 disajikan dalam **Tabel II.122**, di mana tingkat perkembangan demokrasi pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari predikat baik menjadi predikat sedang. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya dinamika demokrasi atas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024.

Tabel II.122. Indeks Demokrasi Indonesia Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Sedang	Baik	81 (sedang)

Sumber: BPS, 2024

2.4.2.4. Indeks Rasa Aman

Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Persepsi dan realitas keamanan yang dirasakan oleh penduduk atau pemangku kepentingan dalam suatu area tertentu digambarkan dalam indeks rasa aman. Kota Tangerang Selatan memiliki nilai indeks rasa aman pada tahun 2021 hingga 2024 yang termasuk dalam kategori aman, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.123**.

Tabel II.123. Indeks Rasa Aman Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023	2024
Indeks Rasa Aman	Aman	Aman (66,97)	Aman (73,50)	Aman (66,97)

Sumber: LKPJ, 2024

2.4.3. Ketangguhan Daerah

2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.

IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 (dua belas) pilar daya saing. Empat komponen pembentuk daya saing tersebut yaitu: Komponen Lingkungan Pendukung, Komponen Sumber Daya Manusia, Komponen Pasar dan Komponen Ekosistem Inovasi. Adapun pilar-pilar dalam masing-masing keempat komponen tersebut adalah:

a. Komponen Lingkungan Pendukung, meliputi empat pilar, yaitu:
   1. Pilar 1 institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan memengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah;
   2. Pilar 2 infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah;
   3. Pilar 3 adopsi TIK yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan
   4. Pilar 4 stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup
b. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu:
   1. Pilar 5 kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup; dan
   2. Pilar 6 keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
c. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu:
   1. Pilar 7 pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi;
   2. Pilar 8 pasar tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja;
   3. Pilar 9 sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan
   4. Pilar 10 ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan IPTEK.
d. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu:
   1. Pilar 11 dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja: dan
   2. Pilar 12 kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Kategori nilai IDSD terdiri dari nilai 0 sampai dengan nilai 5, di mana nilai 0 s/d 1,25 termasuk kategori rendah, nilai 1,26 s/d 2,50 termasuk kategori sedang, nilai 2,51 s/d 3,75 termasuk kategori tinggi, dan nilai 3,76 s/d 5 termasuk kategori sangat tinggi. Nilai IDSD Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022-2024 disajikan dalam **Tabel II.124**, yang berkategori Sangat Tinggi.

Tabel II.124. Indeks Daya Saing Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2022-2024

Kota Tangerang Selatan		**2022**	**2023**	**2024***
Lingkungan Pendukung	Pilar 1	4,28	4,14	4,64
	Pilar 2	N/A	3,75	4,36
	Pilar 3	3,88	4,93	4,95
	Pilar 4	3,78	3,54	4,83
SDM	Pilar 5	4	4,06	4,01
	Pilar 6	3,79	4,11	3,93

Kota Tangerang Selatan		2022	2023	2024*
Pasar	Pilar 7	5,00	5,00	5,00
	Pilar 8	3,21	3,81	3,95
	Pilar 9	1,14	1,29	4,49
	Pilar 10	4,09	4,94	4,97
Ekosistem Inovasi	Pilar 11	5	2,65	3,30
	Pilar 12	3,92	3,48	3,29
Skor IDSD		**N/A**	**3,81**	**4,31**

*Sumber: BRIN, Tahun 2025; Catatan: *= update Maret 2025*

2.4.4. Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam urusan pemerintahan daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Pemerintah Daerah berhasil melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Rekap capaian IKK urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.125**.

Tabel II.125. Capaian Indikator Kinerja Kunci Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024

No.	Urusan	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	N/A	60,24	65,48
2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	99,50	99,72	99,63
3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	98,27	98,26	98,59
4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	N/A	17,44	25,57
5	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	2,12	2,38	2,26
6	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	96,77	100	100
7	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100
8	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100
9	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100
10	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100
11	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
12	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100
13	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100
14	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
15	Kesehatan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
16	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100

No.	Urusan	IKK Outcome	2022	2023	2024
17	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100
18	Kesehatan	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100
19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	44,04	64,34	70,54
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	-	-	-
21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	-	-
22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	98,64	97,91	98,37
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97,56	99,29	99,34
24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100	100
25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	93,87	97,52	98,12
26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100
27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100
28	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100
29	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100
30	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	100	100	100
31	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,60	0,35	0,27
32	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	100	100
33	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100
34	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100
35	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100

No.	Urusan	IKK Outcome	2022	2023	2024
36	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100
37	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100
38	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100
39	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	7,61	11,12	10,91
40	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100	100
41	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100
42	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100
43	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	68,69	59,37	59,39
44	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp juta)	86,48	169,84	121,42
45	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	57,79	34,59	78,14
46	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	53,23	54,31	54,33
47	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	23,12	20,52	29,14
48	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100	100	100
49	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,03	8,80	8,51
50	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	32,21	71,75	146,79
51	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	98,76	100	100
52	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	100	100
53	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	98,76	100	60
54	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-	-	-
55	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	100	100
56	Pertanahan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100

No.	Urusan	IKK Outcome	2022	2023	2024
57	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	56,66	57,93	61,03
58	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	99,52	99,35	96.83
59	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	0	50
60	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,48	98,48	99,05
61	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	42,04	51,57	69,47
62	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	96,06	97,34	97,79
63	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100	100	100
64	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	-	-	-
65	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	-	-	-
66	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,1	1,71	2,42
67	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	76,52	77,31	68,14
68	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	6,10	6,09	6,15
69	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,59	0,77	0,93
70	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,54	0,54	0,54
71	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100
72	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100
73	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	100	100
74	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	51,54	65,36	67,36
75	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausahaan	70,70	100	100
76	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-17,96	59,92	13,86
77	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,57	1,89	1,78
78	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,74	4,57	5
79	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	393	32	33

No.	Urusan	IKK Outcome	2022	2023	2024
80	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100
81	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100
82	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	76,28	84,65	86,05
83	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	100	100
84	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	67,35	67,35	87,99
85	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	79,31	54,69	57,93
86	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	100	100	100
87	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100	100	100
88	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	104,33	70,47	99,99
89	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	212,19	79,66	40,93
90	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	73,80	75,50	75,63
91	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	70,33	71,60	72,05
92	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,87	2,93	3,04
93	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	20,50	21,82	23,25
94	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	126,02	0	1,42
95	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	11,58	7,32	-15,29
96	Kehutanan	-	-	-	-
97	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	-	-	-
98	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	77,51	100	100
99	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	-	-	-
100	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku,	100	100	100
101	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	24,14	129,17	20
102	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	-	-	-
103	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100
104	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	100	100
105	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	-	-	-

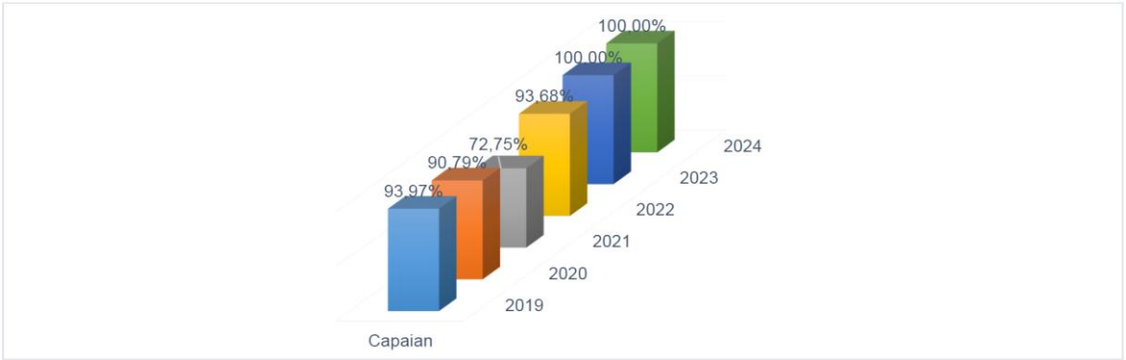
No.	Urusan	IKK Outcome	2022	2023	2024
106	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100	100
107	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-
108	Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	12,00	10,59	13,45
109	Keuangan	Rasio PAD	53,79	52,38	52,18
110	Unsur Pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3
111	Unsur Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3
112	Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer *expenditures*)	47,19	45,27	70,5
113	Keuangan	Opini Laporan Keuangan	8	8	9
114	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0
115	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	73,61	88,67	73,45
116	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	99,31	72,50	63,73
117	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	12,15	3,56	39,75
118	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	94,29	94,04	95,09
119	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20,44	23,55	25,11
120	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	42,72	43,79	59,64
121	Keuangan	*Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	5,91	2,64	0,76
122	Keuangan	*Revenue mobilization*: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	22,54	10,84	16,39
123	Keuangan	Manajemen Aset	4	4	4
124	Keuangan	*Cash Management*: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	14,84	5,97	4,82
125	Keuangan	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	96,43	97,20	96,62
126	Keuangan	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2024

2.5. Standar Pelayanan Minimum

Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah ketentuan yang menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diterima setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM memiliki peran yang sangat penting, baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Bagi pemerintah daerah, SPM berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan standar kualitas dan kuantitas layanan publik, serta menjadi indikator untuk menilai kinerja Kepala Daerah dalam meningkatkan mutu dan ragam pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, bagi masyarakat, SPM menjamin hak mereka untuk memperoleh layanan yang layak, yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dipenuhi.

Capaian penerapan SPM di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2019-2024 disajikan dalam **Gambar II.39**, di mana peningkatan capaian penerapan SPM terjadi kembali pada tahun 2022 hingga pada tahun 2024 berhasil mencapai status Tuntas Paripurna.



Gambar II.39. Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019-2024
Sumber: Aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2025

Rekapitulasi penerapan SPM per bidang layanan selama tahun 2022-2024 disajikan dalam **Tabel II.126**, di mana capaian SPM tahun 2022 yang telah tuntas paripurna adalah pada urusan Kesehatan dan Perumahan Rakyat yaitu sebesar 100%. Rata-rata capaian penerapan SPM pada tahun 2022 adalah sebesar 93,68% dengan predikat Tuntas Utama. Capaian penerapan SPM tahun 2023 dan 2024 telah berhasil meraih angka maksimal, yaitu 100% untuk seluruh bidang urusannya. Dengan demikian pada tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah berpredikat Tuntas Paripurna.

Tabel II.126. Rekapitulasi Penerapan Capaian SPM per bidang Layanan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Urusan SPM	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Penerima Layanan	Mutu Layanan	Hasil Akhir	Penerima Layanan	Mutu Layanan	Hasil Akhir	Penerima Layanan	Mutu Layanan	Hasil Akhir
Pendidikan	71,96%	14,12%	86,08%	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%
Kesehatan	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%
Pekerjaan Umum	70,03%	11,66%	81,69%	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%
Perumahan Rakyat	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	80,00%	18,67%	98,67%	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%
Sosial	80,00%	15,67%	95,67%	80,00%	20,00%	100,00%	80,00%	20,00%	100,00%
IP SPM			**93,68%**	**IP SPM**		**100,00%**	**IP SPM**		**100%**

Sumber: Aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2024

2.6. Kerja Sama Pembangunan Daerah

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam berbagai bidang. Kerja sama ini bersifat saling menguntungkan dan karakteristiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Pada tahun 2024 daftar kerja sama dengan daerah lain disajikan dalam **Tabel II.127**.

Tabel II.127. Kerja Sama antar Daerah Dalam Negeri Tahun 2024

NO	MITRA KERJA SAMA	NOMOR/TANGGAL	RUANG LINGKUP
1.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah	Nomor: 2/KB134.4/Dikominfosantik/II/2020 Nomor : 134.43/363/Pem/2020 3 Februari 2020	a. Bidang Komunikasi dan Informatika; b. Bidang Kesehatan; c. Bidang Pendidikan; d. Bidang Lingkungan Hidup; e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah; f. Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian Perkotaan; g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK
2.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah	Nomor : 134.432/625/Pem/2020 Nomor: MOU/16/TKKSD-MJL/IX/2020 29 September 2020	a. Bidang komunikasi dan informatika; b. Bidang lingkungan hidup; c. Bidang perdagangan dan perindustrian; d. Bidang kebudayaan dan pariwisata; e. Bidang pertanian dan perikanan; f. Bidang koperasi dan usaha kecil menengah; dan g. Bidang ketahanan pangan.
3.	Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Tentang Penanganan Persampahan Kota Tangerang Selatan Di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Cilowong Kota Serang	Nomor : 800/1092- DLH/2022 660/16443- DLH/2022 Tanggal : (08-08-2022)	a. PENGIRIMAN SAMPAH PADA TAHUN 2022 DI TPAS CILOWONG SEBANYAK 108.000 (SERATUS DELAPAN RIBU) TON/TAHUN. b. PENGIRIMAN SAMPAH PADA TAHUN 2023 DI TPAS CILOWONG SEBANYAK 120.000 (SERATUS DUA PULUH RIBU) TON/TAHUN.
4.	Perjanjian Kerja Sama, Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Di Wilayah Perbatasan	Nomor : 119/103/PKS/KS-Banhuk/IX/2022 526/683-DKPPP/2022 Tanggal : (28-09-2022)	a. Pengawasan Keamanan Pangan Di Pasar Dan Tingkat Produsen Dalam Wilayah Kabupaten Bogor Dan Kota Tangerang Selatan; b. Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Pangan Segar Di Pasar Dan Tingkat Produsen Dalam Wilayah Kabupaten Bogor Dan Kota Tangerang Selatan; Melakukan Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Pangan Segar Yang Beredar Di Pasar Dan Tingkat Produsen Dalam Wilayah Kabupaten Bogor Dan Kota Tangerang Selatan Dari Kandungan Cemaran Berbahaya Untuk Dikonsumsi; Dan

NO	MITRA KERJA SAMA	NOMOR/TANGGAL	RUANG LINGKUP
			c. Pertukaran Informasi Terkait Lalu Lintas Peredaran Dan Hasil Pemeriksaan Pangan Segar Dari Dan Ke Wilayah Kabupaten Bogor Dan Kota Tangerang Selatan.
5.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Ternate Dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tentang Replikasi Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk Dan Keluar, Aplikasi Pengamanan Dokumen, Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online, Dan Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik	Nomor : 556/237/2022 134.43/4607/TAPEM/2022 Tanggal : (30-11-2022)	a. Perencanaan Kebutuhan Sistem; b. Instalasi Aplikasi Sisumaker, Amando, Simponie, dan Sistem Informasi MPP; c. Pelatihan Teknis Aplikasi Sisumaker, Amando, Simponie, dan Sistem Informasi MPP Serta Pendampingan Operasional; Dan d. Konsultasi Implementasi Aplikasi Sisumaker, Amando, Simponie, dan Sistem Informasi MPP.
6.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tangerang Dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tentang Kerja Sama Antar Daerah	Nomor : B/400.1.5.4/2903/VIII/ Setda/MoU/2023 Nomor: 100.3.7.1/3138/TAPEM/ 2023 (08-08-2023)	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. Pelaksanaan; b. Pembiayaan; c. Jangka Waktu; dan d. Addendum dan /atau amandemen.
7.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lebak Dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah	Nomor: 102/MoU-13/TPKS/2023 Nomor: 100.3.7.1/3841/Tapem/ 2023 (09-09-2023)	Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri atas: (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; e. perumahan dan kawasan permukiman; dan f. sosial. (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

NO	MITRA KERJA SAMA	NOMOR/TANGGAL	RUANG LINGKUP
			i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olahraga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. (3) Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. perdagangan; dan e. perindustrian. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh Para Pihak terkait kerja sama antar Daerah.
8.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Tangerang Dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah	Nomor : 147.54/ -Bag.Tapem/2023 Nomor: 100.3.7.1/3922/Tapem/ 2023 (02-10-2023)	Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. sosial; d. pangan; e. perhubungan; f. lingkungan hidup; g. komunikasi dan informatika; h. pekerjaan umum dan penataan ruang; i. perumahan dan kawasan permukiman; j. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; k. pemberdayaan masyarakat; l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; m. koperasi, usaha kecil, dan menengah; n. kepemudaan dan olahraga; o. pariwisata; dan p. bidang-bidang lain yang disepakati oleh Para Pihak.
9.	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Wilayah Perbatasan	Nomor : 100.3.7.1/2119/BPDB/PKS/2023 Nomor : 100.3.7.1/1905/ BPDB Kota Tangerang/2023 (07-12-2023)	Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi: 1. Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Bencana, meliputi: a. Tahapan Pra Bencana Bidang Pencegahan dan Kearsipan, meliputi: 1) Perencanaan penanggulangan bencana; 2) Pengurangan risiko bencana; 3) Pencegahan; 4) Kesiapsiagaan; 5) Peringatan dini; 6) Mitigasi;

NO	MITRA KERJA SAMA	NOMOR/TANGGAL	RUANG LINGKUP
			7) Pendidikan dan pelatihan; dan 8) Penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan. 2. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, meliputi: b. Tahapan Pra Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi: 1) Perencanaan penanggulangan bencana; 2) Pengurangan risiko bencana; 3) Pencegahan; 4) Kesiapsiagaan; 5) Peringatan dini; 6) Mitigasi; 7) Pendidikan dan pelatihan; dan 8) Penelitian dan Pengembangan di bidang kebencanaan. c. Tahap saat Bencana Bidang Kedaruratan dan Logistik, meliputi: 1) Pelaksanaan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak bencana; 2) Pengerahan sumber daya dan logistic; 3) Pemulihan keamanan dan ketertiban; dan 4) Pemulihan dan pembersihan lingkungan terdampak bencana. d. Tahap saat Bencana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi: 1) Penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan; 2) Pemenuhan kebutuhan dasar; 3) Pelayanan Kesehatan; 4) Pelayanan Psikososial; 5) Pemulihan sosial, budaya dan ekonomi; 6) Pemulihan Keamanan dan ketertiban; dan 7) Pemulihan dan Pembersihan lingkungan terdampak bencana. 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pelaksanaan Kegiatan

NO	MITRA KERJA SAMA	NOMOR/TANGGAL	RUANG LINGKUP
			monitoring, mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kerja sama Para Pihak.
10.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tentang Pengembangan Potensi Daerah Dan Peningkatan Pelayanan Publik	Nomor : 48/DG.02.02.01/PEMOTDA Nomor : 100.3.7.1/3311/Setda/Tapem/2024 Tanggal (25 Juli 2024)	a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; b. urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; c. urusan pemerintahan pilihan; dan d. bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok Dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Pelayanan Tempat Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah (Tppas) Regional Untuk Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Dan Kota Tangerang Selatan	Nomor : 00.3.7.1/4208/Setda/Tapem/2024 Tanggal (24 September 2024)	a. penyediaan lahan; b. pembangunan fasilitas TPPAS Regional; c. pengelolaan TPPAS Regional; d. pelayanan TPPAS Regional; e. pembiayaan TPPAS Regional; f. Kompensasi Jasa Pelayanan; g. Kompensasi Dampak Negatif; h. pemeliharaan jalan; dan i. kerja sama dengan Badan Usaha.
12.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten Dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nomor: 100.3.7/16-pemotda/2024 Nomor: 100.3.7.1/5925/Setda/2024 25 November 2024	a. bidang pendidikan; b. bidang kesehatan; c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d. bidang perumahan dan kawasan permukiman; e. bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; f. bidang sosial; g. bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan; h. bidang lingkungan hidup; i. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; j. bidang perhubungan; k. bidang komunikasi dan informatika; l. bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; m. bidang perindustrian dan perdagangan; n. bidang penanaman modal; o. bidang pariwisata; p. bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana; q. bidang kepemudaan dan olahraga;

NO	MITRA KERJA SAMA	NOMOR/TANGGAL	RUANG LINGKUP
			r. bidang pengembangan sumber daya manusia; s. bidang promosi dan pengembangan industri, dan perdagangan; t. bidang penanggulangan bencana; u. bidang keuangan; v. bidang perpustakaan dan kearsipan; w. bidang ketenagakerjaan; dan/atau x. bidang-bidang lain yang disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak**.
13.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten Dengan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Nomor : 100.3.7.1/06-Pemotda/2024 Nomor: 100.3.7.1/5966/Setda/2024 28 November 2024	a. Optimalisasi penerimaan; dan b. sinergi pendanaan dan kegiatan.
14.	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemadaman Kebakaran Dan Penyelamatan Di Wilayah Perbatasan	Nomor: 300.2.1/2628/BPBD/PKS/2024 Nomor: 100.4.7/1038/Damkar/PKS/2024 Nomor: 000.4.1.1/341/XI/BPBD/2024	a. pra bencana; b. penanggulangan bencana, tanggap darurat bencana; c. pasca bencana; dan d. pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Selain bekerja sama dengan daerah lain, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga menjalin kerja sama dengan lembaga dan stake holder lain. Selama kurun waktu tahun 2020-2024, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan 210 kerja sama, di mana sebesar 72,70% dari jumlah kerja sama tersebut tetap dilanjutkan dan sebesar 27,30% tidak dilanjutkan karena kendala komitmen mitra, lemahnya komunikasi, serta pergeseran prioritas di lapangan. Gambaran tersebut mencerminkan masih diperlukannya penguatan tata kelola kerja sama daerah. Adapun upaya strategis yang akan dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan manfaat kerja sama daerah yang masih berlanjut adalah sebagai berikut:

1. Penetapan tujuan dan spesifikasi kerja sama yang jelas, di mana setiap kerja sama harus memiliki tujuan yang terukur dan jelas. Untuk itu, setiap kerja sama yang dilaksanakan di tingkat kota akan dijabarkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun bersama mitra dan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang masing-masing. Hal

ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat mengetahui peran dan tanggung jawabnya dengan jelas;

2. Pengembangan Perjanjian Kerja Sama yang terukur dan terjadwal, di mana Perjanjian Kerja Sama yang disusun harus memiliki indikator kinerja yang jelas serta target yang dapat diukur. Setiap perjanjian akan mencakup pencapaian hasil dan dampak yang diinginkan, serta jadwal evaluasi yang teratur dan terstruktur. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan dan memastikan kerja sama berjalan sesuai rencana;
3. Penguatan inisiatif dan peran Perangkat Daerah. Untuk mengatasi tantangan kurangnya inisiatif dari perangkat daerah, penting untuk menciptakan forum koordinasi yang lebih sering antara Perangkat Daerah dan mitra Kerja Sama. Forum ini akan memberikan kesempatan bagi setiap Perangkat Daerah untuk lebih memahami manfaat dan tujuan dari setiap kerja sama yang dilakukan. Selain itu, Perangkat Daerah juga akan diharapkan untuk lebih proaktif dan terlibat dalam seluruh proses perencanaan dan implementasi kerja sama.
4. Penyajian contoh kerja sama yang sukses. Salah satu cara untuk mendorong perangkat daerah lebih aktif dalam melaksanakan kerja sama adalah dengan menyajikan contoh kerja sama yang telah berhasil dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Contoh-contoh kerja sama yang sukses ini akan digunakan sebagai studi kasus untuk menunjukkan potensi dampak nyata dari kerja sama yang dilakukan, sehingga perangkat daerah dapat melihat manfaat langsung dan pentingnya keterlibatan mereka.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan kerja sama yang dilaksanakan akan menjadi lebih efektif, terkoordinasi dengan baik, dan memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan daerah.

Salah satu bentuk kerja sama pembangunan daerah yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah kerja sama pembiayaan. Tingginya kebutuhan masyarakat akan pembangunan dan pelayanan publik sementara Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki keterbatasan kapasitas fiskal daerah, mendorong perlu adanya upaya inovasi untuk mencari alternatif-alternatif pendanaan pembangunan melalui kerja sama dengan pihak lain. Berbagai pendekatan kerja sama pendanaan pembangunan seperti kerja sama pemerintah dengan swasta, pemanfaatan Barang Milik Daerah, hingga pendanaan lainnya seperti Ziswaf (Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf), dapat menjadi alternatif. Hal tersebut juga sejalan dengan visi kolaboratif yang diusung untuk lima tahun ke depan. Elaborasi bentuk-bentuk inovasi pendanaan alternatif yang dapat diupayakan adalah:

1) Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

   Proyek-proyek yang potensial untuk skema KPBU perlu diidentifikasi, baik untuk pembangunan baru maupun peningkatan kualitas infrastruktur eksisting. Regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk pelaksanaannya. Terdapat 22 jenis infrastruktur, di antaranya insfrastruktur transportasi, infrastruktur air minum, infrastruktur kesehatan, infrastruktur ekosistem industri, dan lain-lain.

   Pengembalian investasi kepada badan usaha dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), Pembayaran oleh Pengguna (*User charge*), maupun skema lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik proyek.

Pengembalian investasi skema lainnya dimungkinkan melalui sumber pendapatan non-tarif (*non-fare revenue*), seperti pendapatan dari periklanan, pemanfaatan papan reklame, hak penamaan (*naming rights*), serta penyewaan ruang usaha atau area komersial

2) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Mengoptimalkan aset-aset daerah yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan daerah dapat diupayakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bentuk-bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat diupayakan adalah Sewa, Pinjam Pakai, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

3) Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan, Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau *Land Value Capture* (LVC)
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan, P3NK adalah alternatif pendanaan untuk Penyediaan Infrastruktur berbasis kewilayahan dan/atau dalam radius/koridor zonasi yang memungkinkan penyediaan infrastruktur untuk didanai dari proporsi peningkatan nilai atas dampak penciptaan nilai yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang diperoleh dari Penerima Manfaat serta hasil pengembangan Kawasan. Konsep ini memungkinkan pemerintah kota untuk menangkap nilai peningkatan lahan (land value capture) yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur. Misalnya, jika pembangunan jalan baru meningkatkan nilai properti di sekitarnya, sebagian dari kenaikan nilai tersebut dapat diambil kembali untuk mendanai proyek infrastruktur lain atau melunasi biaya proyek awal. Ini sangat relevan untuk Tangerang Selatan yang terus berkembang pesat dengan harga properti yang cenderung meningkat. Untuk konteks daerah, implementasi P3NK membutuhkan juga regulasi berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur instrumen P3NK, pengelolaan dana P3NK, dan pengelola P3NK.

4) Pembiayaan Utang Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, terdapat opsi untuk melakukan pendanaan melalui Pembiayaan Utang Daerah. Ini dapat menjadi alternatif untuk membiayai proyek-proyek strategis dengan skala besar yang membutuhkan dana awal yang signifikan. Bentuk-bentuk Pembiayaan Utang Daerah mencakup Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah. Pinjaman Daerah telah menjadi praktik yang lazim dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagai contoh melalui program Pinjaman Pemulihan ekonomi Nasional atau Pinjaman-PEN. Untuk Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, belum ada pemerintah daerah yang menerbitkannya. Pemerintah Kota perlu menyusun studi kelayakan dan analisis kapasitas fiskal secara menyeluruh sebelum memilih untuk menggunakan skema Pembiayaan Utang Daerah.

5) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)
Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Tangerang Selatan memiliki kewajiban dan kesempatan untuk berkontribusi pada pembangunan melalui program TJSL atau CSR. Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengatur hal tersebut. Pemerintah Kota dapat memfasilitasi dan mengarahkan dana CSR dari berbagai perusahaan untuk proyek-proyek infrastruktur berskala kecil hingga menengah ataupun kegiatan pengembangan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan taman kota, perbaikan lingkungan, dan sarana berusaha bagi pengusaha mikro.

6) ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf)
Pemanfaatan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf merupakan bentuk pendanaan alternatif yang berbasis syariah. Regulasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 001/MUNAS-IX/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat memberikan legitimasi syariah untuk penggunaan dana-dana ini. Fatwa tersebut secara spesifik membolehkan pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, sepanjang kegiatan tersebut menunjang kesejahteraan dan kemaslahatan umum, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan (mustahik). Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penggunaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang tidak hanya terbatas pada konsumsi langsung, tetapi juga dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas lingkungan yang memiliki dampak jangka panjang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umat.

2.7. Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangerang Selatan merupakan instrumen strategis Pemerintah Kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat pendapatan asli daerah. BUMD dibentuk untuk mengelola potensi sumber daya daerah secara profesional dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan asas manfaat bagi masyarakat. Melalui pembentukan dan pengembangan BUMD, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya menciptakan sinergi antara sektor publik dan bisnis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Salah satu BUMD yang telah ada di Kota Tangerang Selatan adalah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS).

BUMD PITS semula dibentuk berupa *holding company* dengan nama PT.PITS hingga tahun 2023, kemudian berubah menjadi Perseroda yang bergerak pada bidang Air Minum. Perseroan Daerah (Perseroda) PITS Kota Tangerang Selatan dibentuk untuk mendukung pelayanan publik pengelolaan sektor air minum di Kota Tangerang Selatan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dalam pelaksanaannya, PITS diharapkan dapat dikelola secara profesional dan transparan, mengikuti prinsip-prinsip korporasi yang sehat agar mampu menjamin keberlangsungan pelayanan sekaligus menjadi entitas usaha yang mandiri secara finansial.

Gambaran tentang BUMD PITS dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengacu laporan audit atas kinerja Perseroda PITS sebagaimana disajikan

dalam **Tabel II.128** dan **Tabel II.129**. Analisis kondisi dan kinerja keuangan BUMD PITS selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

A. Likuiditas mengalami fluktuatif dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024. *Current Ratio* di atas 100% menunjukkan likuiditas kuat, tetapi volatilitas tinggi mengindikasikan manajemen aset lancar yang tidak stabil. *Cash Ratio* menunjukan trend yang tidak stabil selama tahun 2020-2024. Lonjakan pada 2023-2024 disebabkan oleh penyertaan modal berupa uang tunai (Rp26 Miliar) dan aset (Rp165,56 Miliar) dari Pemda, yang meningkatkan kas secara signifikan. Penguatan likuiditas pada 2023-2024 disebabkan adanya injeksi modal, tetapi tingginya cash ratio (252.55%) menunjukkan kas menganggur (*idle cash*) yang belum dioptimalkan untuk investasi produktif.
B. Profitabilitas mengalami *turnaround* signifikan pada tahun 2024. ROA dan ROE menunjukan pola positif pada tahun 2020, lalu negatif pada tahun 2021-2023, di mana puncak kerugian terjadi pada tahun 2022. Pada tahun 2024, ROA dan ROE mencapai nilai positif. BOPO yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 menunjukan efisiensi operasional yang lebih baik dibandingkan tahun 2020-2023. *Net Profit Margin* (NPM) mengalami perbaikan pada tahun 2024 yang mengindikasikan bahwa setiap penjualan mulai menghasilkan laba. EBITDA Margin juga mengalami perbaikan pada tahun 2024 yang menegaskan kesehatan operasional inti. Perbaikan profitabilitas pada tahun 2024 berkat fokus pada operasional air minum pasca transformasi dari holding company. Efisiensi operasional dan peningkatan pendapatan menjadi kunci peningkatan kinerja BUMD Perseroda PITS.
C. Solvabilitas menggambarkan struktur modal yang masih sehat dan konservatif. *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang stabil dan rendah menunjukkan struktur pendanaan konservatif dengan ketergantungan utang rendah. Ini memberikan ruang untuk leverage di masa depan. Utang jangka panjang dominan dan stabil (sekitar Rp22-25 Miliar), sementara utang jangka pendek meningkat moderat (dari Rp3,8 Miliar pada 2021 ke Rp10,5 Miliar pada 2024), tetapi masih dalam batas wajar. Gambaran tersebut menggambarkan Risiko finansial sangat rendah dengan dasar keuangan yang cukup kuat untuk ekspansi.
D. Aktivitas kinerja BUMD Perseroda PITS menegaskan kondisi perbaikan pada tahun 2024 dengan adanya peningkatan efisiensi operasional yang signifikan. Perputaran Aset meningkat dua kali lipat dari 9.20% (2023) menjadi 18.36% (2024), menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, tingkat kolektivitas melonjak dari 44.99% (2023) menjadi 94.21% (2024), mengindikasikan penagihan piutang yang baik dan terjadi perbaikan arus kas. NRW (*Non-Revenue Water*) yang mengalami penurunan dari 25.97% menjadi 15.13%, mencerminkan pengurangan kebocoran air yang signifikan juga. Peningkatan efisiensi operasional, khususnya dalam penagihan dan pengurangan kebocoran adalah *driver* utama *turnaround* profitabilitas.
E. Neraca keuangan BUMD perseroda menggambarkan transformasi modal dan pemulihan ekuitas. Total Aset meningkat dari Rp175,95 Miliar (2022) ke Rp 226,41 Miliar (2024), didorong oleh penyertaan modal berupa aset (Rp 165,56 Miliar) pada 2023. Sementara itu, ekuitas mengalami penurunan akibat akumulasi kerugian (2020-2023), namun pulih pada 2024 berkat laba bersih dan penyertaan modal. Saldo rugi berkurang dari Rp 29,76 Miliar (2023) ke Rp 25,36 Miliar (2024). Perubahan dari penyertaan barang milik daerah menjadi penyertaan modal tunai dan aset, memberikan fleksibilitas lebih.

Tabel II.128. Laporan Auditor Independen Perseroan Daerah (Perseroda) PITS Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Neraca	2020	2021	2022	2023	2024
Aset	**191.391.987.720**	**187.182.110.188**	**175.951.436.938**	**221.036.637.625**	**226.409.262.138**
Aset Lancar	46.330.321.131	44.480.870.227	29.344.476.818	32.712.498.685	38.426.962.071
Aset tidak lancar	145.061.666.589	142.701.239.961	146.606.960.120	221.036.637.625	187.982.300.067
Kewajiban dan Ekuitas	**191.391.987.720**	**187.182.110.188**	**175.951.436.938**	**221.036.637.625**	**226.409.262.138**
Kewajiban	**30.177.528.892**	**28.927.482.713**	**27.395.466.842**	**32.139.870.154**	**33.116.965.694**
Kewajiban Jangka Pendek	5.310.492.828	3.867.888.149	4.351.786.016	9.542.833.605	10.501.276.908
Kewajiban Jangka Panjang	24.867.036.064	25.059.594.564	23.043.680.826	22.597.036.549	22.615.688.786
Ekuitas	**161.214.458.828**	**158.254.627.475**	**148.555.970.096**	**188.896.767.471**	**193.292.296.444**
Modal disetor	22.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000	191.558.177.669	191.558.177.669
- Penyertaan berupa uang tunai	N/A	N/A	N/A	26.000.000.000	26.000.000.000
- Penyertaan berupa aset	N/A	N/A	N/A	165.558.177.669	165.558.177.669
Tambahan modal disetor	44.000.000.000	44.000.000.000	44.000.000.000	27.096.185.531	27.096.185.531
Penyertaan Barang Milik Daerah	100.396.983.000	100.396.983.000	100.396.983.000		
Saldo Rugi	(7.542.146.830)	(8.142.355.525)	(17.841.012.904)	(29.757.595.729)	(25.362.066.756)

Sumber: Laporan Auditor Independen Perseroda Pembangunan Investasi Tangerang Selatan 2020-2024

Tabel II.129. Rasio Keuangan PITS Kota Tangerang Selatan Tahun 2023-2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
LIKUIDITAS					
Current Ratio	872,50%	1.150,27%	674,26%	342,80%	353,06%
Cash ratio	12,29%	48,34%	11,68%	143,25%	252,55%
PROFITABILITAS					
Return on Asset (ROA)	1,23%	-1,59%	-5,28%	-3,38%	1,94%
Return on Equity (ROE)	1,46%	-1,88%	-6,25%	3,95%	2,27%
Rasio Biaya Operasional (BOPO)	N/A	N/A	N/A	141,12%	91,67%
Net Profit Margin	19,07%	-18,94%	-61,91%	-36,71%	10,55%
EBITDA *Margin*	N/A	N/A	N/A	-19,48%	22,86%
SOLVABILITAS					
Debt to Assets Ratio	15,77%	15,45%	15,57%	14,54%	14,83%
Debt to Equity Ratio	18,72%	18,28%	18,44%	17,01%	17,41%
AKTIVITAS					
Perputaran Aset	N/A	N/A	N/A	9,20%	18,36%
Tingkat Kolektivitas	N/A	N/A	N/A	44,99%	94,21%
NRW	N/A	N/A	N/A	25,97%	15,13%

Sumber: Laporan Auditor Independen Perseroda Pembangunan Investasi Tangerang Selatan 2020-2024

Tantangan yang dihadapi oleh BUMD Perseroda PITS selanjutnya adalah memanfaatkan kondisi *turnaround* pada tahun 2024 untuk peningkatan profitabilitas yang berkelanjutan. Tantangan tersebut dapat diupayakan oleh BUMD Perseroda PITS melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Restrukturisasi Utang untuk mengonversi sebagian besar utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang dengan suku bunga yang lebih baik. Ini akan meringankan beban keuangan dan mengurangi risiko likuiditas;

b. Optimalisasi Teknologi melalui Investasi pada sistem SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) dan AMI (*Advanced Metering Infrastructure*) untuk memantau jaringan secara *real-time*, mengurangi NRW (target <12%), dan mendeteksi kebocoran lebih cepat;
c. Pemulihan Tarif berdasarka hasil studi kelayakan tarif yang komprehensif untuk mengajukan penyesuaian tarif air yang berkeadilan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, guna menutupi biaya operasi dan pemeliharaan;
d. Ekspansi jaringan dengan menggunakan hasil optimalisasi untuk memperluas jaringan distribusi ke daerah berpotensi yang belum terlayani (perumahan baru, kawasan bisnis);
e. Meluncurkan layanan yang bernilai tambah seperti layanan air minum dalam kemasan atau layanan perawatan meter air secara komersial;
f. Mengoptimalkan penggunaan lahan atau bangunan milik perusahaan yang belum produktif;
g. Mengembangkan aplikasi *mobile* untuk pembayaran tagihan, pengaduan, cek kualitas air, dan informasi dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional;
h. Melakukan efisiensi energi dengan cara seperti mengganti pompa-pompa air dengan teknologi yang lebih hemat energi dan pemasangan solar panel pada instalasi pengolahan air;
i. Melakukan inovasi Program CSR Berbasis Bisnis, seperti meluncurkan program "Sambung Air Bersih" untuk masyarakat kurang mampu dengan skema subsidi silang atau kerja sama dengan CSR perusahaan lain;
j. Mempersiapkan peta jalan untuk membuka akses pendanaan yang lebih luas dan meningkatkan tata kelola perusahaan.

Pada tahun 2025-2029, Pemerintah Kota Tangerang Selatan merencanakan akan membentuk BUMD baru sebagai bentuk diversifikasi BUMD dalam peningkatan layanan dasar, pengelolaan aset daerah yang lebih optimal, serta potensi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Rencana Rencana sektor strategis yang akan ditangani oleh BUMD baru selama tahun 2025-2029 yaitu sektor air minum, pasar, parkir dan sektor lainnya sesuai dengan kajian. Dalam pengelolaan BUMD, baik BUMD eksisting maupun BUMD baru, beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar BUMD-BUMD tersebut dapat berkinerja baik dan *profitable*, antara lain:

a. Merekrut direksi dan manajemen profesional berdasarkan kompetensi;
b. Pemberian insentif kepada manajemen BUMD berdasarkan kinerja (bonus berdasarkan pencapaian KPI keuangan dan operasional);
c. Menetapkan Perjanjian Kinerja Perusahaan (PKP) yang jelas, terukur, dan ambisius untuk setiap BUMD, mencakup target profit, ROI, dan kontribusi kepada daerah;
d. Memberikan ruang otonomi operasional kepada masing-masing BUMD dengan pengawasan ketat dari pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui komisaris yang kompeten.

2.8. Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran keuangan daerah atau yang biasa disebut Laporan Keuangan Daerah bertujuan menerangkan kondisi keuangan Pemerintah Daerah secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai

amanat pertanggungjawaban kepada publik dan *stakeholder*. Tujuan penggambaran Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, yaitu untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah terlaksana sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Transparansi, yaitu untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat akan realisasi anggaran dan penggunaan dana publik;
3. Evaluasi Kinerja, yaitu sebagai dasar penilaian kinerja Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu Pemerintah Daerah, DPRD, dan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan fiskal daerah.

Analisa gambaran keuangan daerah tahun 2020-2024 dilakukan melalui analisa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020-2024, yang strukturnya terdiri atas komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Analisa tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, analisa kondisi keuangan daerah juga diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Analisa gambaran keuangan daerah dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.8.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

2.8.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang rinciannya dijelaskan sebagai berikut:

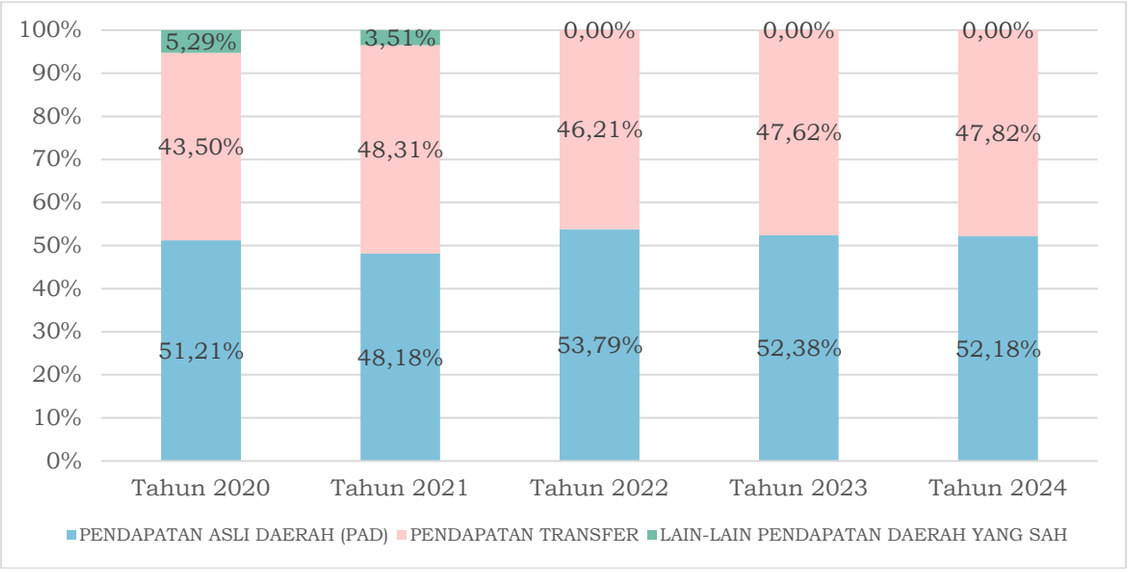
a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
   1. Penerimaan pajak daerah.
   2. Penerimaan retribusi daerah.
   3. Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan.
   4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Pendapatan Transfer, terdiri dari
   1. Transfer pemerintah pusat.
   2. Transfer antar daerah.

c. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari:
   1. Hibah.
   2. Dana darurat.
   3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.130**. Dari ketiga komponen pendapatan daerah, terlihat bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi dominan terhadap total pendapatan daerah, yaitu hampir selalu lebih dari 50%. Komponen pendapatan transfer menjadi komponen kedua terbesar penyumbang total pendapatan daerah Kota Tangerang

Selatan tahun 2020-2024, yaitu berkisar antara 43% hingga 48%. Sementara komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi bagian yang sangat kecil dari total pendapatan, bahkan pada tahun 2022-2024 kontribusinya 0%. Gambaran kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024 secara rinci disajikan dalam **Gambar II.40**.



Gambar II.40. Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 meningkat besarannya sebagaimana disajikan dalam **Gambar II.41**. Peningkatan tersebut menggambarkan kondisi dimulainya pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Pemulihan tersebut didukung oleh peningkatan realisasi pajak daerah dan pendapatan transfer, baik dari Pusat dan Provinsi Banten. Pada masa pemulihan ekonomi tersebut, kontribusi PAD masih lebih kecil dibandingkan pendapatan transfer. Pada tahun 2022-2024, pertumbuhan pendapatan daerah mulai stabil dengan mulai meningkatnya kontribusi PAD.



Gambar II.41. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tabel II.130. Kinerja Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata pertumbuhan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.004.516.465.478,00**	**3.556.806.263.231,00**	**3.750.652.293.945,00**	**4.116.770.328.970,00**	**4.498.470.692.841,00**	**10,72%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.538.705.693.438,00**	**1.713.722.415.531,00**	**2.017.364.068.366,00**	**2.156.287.719.241,00**	**2.347.128.663.052,00**	**11,21%**
4.1.01	Pajak Daerah	1.345.141.128.042,00	1.523.112.291.755,00	1.794.849.627.807,00	1.917.838.950.888,00	2.093.592.089.573,00	11,77%
4.1.02	Retribusi Daerah	62.630.682.276,00	50.433.166.050,00	29.551.491.739,00	47.503.933.981,00	130.996.951.091,00	43,91%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	731.439.035,00	771.586.632,00	701.475.939,00	-0,90%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	130.933.883.120,00	140.176.957.726,00	192.231.509.785,00	190.173.247.740,00	121.838.146.449,00	1,80%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.306.966.822.605,00**	**1.718.406.629.340,00**	**1.733.288.225.579,00**	**1.960.482.609.729,00**	**2.151.342.029.789,00**	**13,80%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	977.908.693.242,00	1.017.221.382.692,00	1.049.765.930.091,00	1.228.631.422.213,00	1.400.086.802.533,00	9,55%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	907.142.937.242,00	953.979.143.692,00	1.040.880.135.091,00	1.199.626.349.213,00	1.361.057.579.533,00	10,75%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	193.115.125.434,00	253.278.625.853,00	197.760.836.797,00	258.691.674.006,00	317.755.436.000,00	15,72%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	558.077.884.000,00	551.963.179.000,00	540.086.577.000,00	591.064.768.000,00	663.369.072.841,00	4,61%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	19.583.114.628,00	20.255.012.186,00	13.613.661.502,00	29.684.942.691,00	22.208.153.615,00	15,88%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik	136.366.813.180,00	128.482.326.653,00	289.419.059.792,00	320.184.964.516,00	357.724.917.077,00	35,46%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	70.765.756.000,00	63.242.239.000,00	8.885.795.000,00	29.005.073.000,00	0,00	32,46%

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata pertumbuhan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00	39.029.223.000,00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	329.058.129.363,00	701.185.246.648,00	683.522.295.488,00	731.851.187.516,00	751.255.227.256,00	30,07%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	284.058.129.363,00	681.236.636.144,00	661.212.816.858,00	726.965.676.816,00	744.614.942.256,00	37,31%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	45.000.000.000,00	19.948.610.504,00	22.309.478.630,00	4.885.510.700,00	6.640.285.000,00	-21,50%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**158.843.949.435,00**	**124.677.218.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.3.01	Hibah	158.843.949.435,00	11.032.055.500,00	0,00	0,00	0,00	-93,05%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	113.645.162.860,00	0,00	0,00	0,00	-

Sumber: LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 (audited)

Sebagaimana digambarkan dalam **Tabel II.130** bahwa komponen pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan data rincian pertumbuhan pada masing-masing komponen pendapatan yang disajikan dalam **Tabel II.131**, terlihat bahwa walaupun PAD merupakan kontribusi tertinggi namun pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan masih tergantung dengan pendapatan transfer. Perlambatan pertumbuhan pendapatan transfer pada tahun 2023-2024 berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan pendapatan daerah. Untuk itu, diperlukan penguatan struktur pendapatan daerah terutama pada komponen PAD melalui upaya diversifikasi sumber pendapatan non pajak, seperti optimalisasi pengelolaan aset daerah dan peningkatan profit BUMD; serta penguatan database wajib pajak melalui perluasan basis pajak dengan digitalisasi dan pemutakhiran data.

Tabel II.131. Rincian Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	Tahun				Rata-rata
		2021	2022	2023	2024	
4	Pendapatan Daerah	18,38%	5,45%	9,76%	9,27%	10,72%
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11,37%	17,72%	6,89%	8,85%	11,21%
4.2	Pendapatan Transfer	31,48%	0,87%	13,11%	9,74%	13,80%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-21,51%	-100,00%	0,00%	0,00%	-30,38%

Analisis kesehatan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada sisi pendapatan dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio PAD terhadap PDRB. Adapun analisis pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah pada pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari komponen kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan keseluruhan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan pendapatan asli daerahnya sebagai sumber pendapatan daerah tanpa bergantung kepada dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya. Tingkat kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah pendapatan transfer dan pinjaman. Berikut disajikan data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 beserta kriteria dari rasio tersebut dalam **Tabel II.132** dan **Tabel II.133**.

Tabel II.132. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Tabel II.133. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Anggaran dari Sumber Dana Eksternal (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Tingkat Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan Daerah	Pola Hubungan
2020	1.465.810.772.040,00	1.538.705.693.438,00	105%	Tinggi	Delegatif
2021	1.843.083.847.700,00	1.713.722.415.531,00	93%	Tinggi	Delegatif
2022	1.733.288.225.579,00	2.017.364.068.366,00	116%	Tinggi	Delegatif
2023	1.960.482.609.729,00	2.156.287.719.241,00	110%	Tinggi	Delegatif
2024	2.151.342.029.789,00	2.347.128.663.052,00	109%	Tinggi	Delegatif

Berdasarkan **Tabel II.133**, terlihat bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki kemampuan untuk mandiri dalam pembiayaan pembangunan daerah.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berikut disajikan data Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 beserta kriteria dari rasio tersebut dalam **Tabel II.134** dan **Tabel II.135**.

Tabel II.134. Kriteria Penilaian Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0-10	Sangat Kurang
10,1-20	Kurang
20,1-30	Cukup
30,1-40	Sedang
40,1-50	Baik
> 50	Sangat Baik

Tabel II.135. Tingkat Desentralisasi Fiskal Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	Tingkat Desentralisasi Fiskal
2020	51,21	Sangat Baik
2021	48,18	Baik
2022	53,79	Sangat Baik
2023	52,38	Sangat Baik
2024	52,18	Sangat Baik

Berdasarkan **Tabel II.135**, terlihat bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 rata-rata termasuk kategori Sangat Baik, yang menggambarkan bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan desentralisasi.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan untuk menganalisis ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi/Daerah lainnya. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total pendapatan daerah. Berikut disajikan data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota

Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 beserta kriteria dari rasio tersebut dalam **Tabel II.136** dan **Tabel II.137**.

Tabel II.136. Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
0-10	Sangat Kurang
10,1-20	Kurang
20,1-30	Cukup
30,1-40	Sedang
40,1-50	Tinggi
> 50	Sangat Tinggi

Tabel II.137. Tingkat Ketergantungan Keuangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	Tingkat Desentralisasi Fiskal
2020	43,50	Tinggi
2021	48,31	Tinggi
2022	46,21	Tinggi
2023	47,62	Tinggi
2024	47,82	Tinggi

Berdasarkan **Tabel II.137** tingkat ketergantungan keuangan Kota Tangerang Selatan terhadap pendapatan transfer masih berkategori Tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa penurunan dalam pendapatan transfer akan berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan pendapatan daerah.

4. Rasio PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Rasio PAD terhadap PDRB menggambarkan kemandirian fiskal daerah dan efektivitas pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Rasio ini juga dapat digunakan untuk menilai kesenjangan antara potensi ekonomi (PDRB) dan realisasi pendapatan asli daerah. Berikut disajikan data Rasio PAD terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 beserta kriteria dari rasio tersebut dalam **Tabel II.138** dan **Tabel II.139**.

Tabel II.138. Kategori Rasio PAD terhadap PDRB

Rasio PAD terhadap PDRB (%)	Tingkat Kemandirian	Interpretasi
>15%	Sangat Mandiri	Daerah mampu membiayai >50% kebutuhan APBD tanpa tergantung transfer pusat
10%-15%	Mandiri	PAD signifikan, tetapi masih butuh dukungan DAU/DBH
5%-10%	Cukup Mandiri	PAD terbatas; ketergantungan pada pusat moderat
<5%	Tidak Mandiri	Mayoritas APBD bergantung pada transfer pusat (DAU/DBH)

Tabel II.139. Rasio PAD terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Miliar Rp)	PDRB ADHB (MiliarRp)	Rasio PAD terhadap PDRB (%)	Tingkat Kemandirian
2020	1.538,70	82.531,47	1,86%	Tidak Mandiri

Tahun	PAD (Miliar Rp)	PDRB ADHB (MiliarRp)	Rasio PAD terhadap PDRB (%)	Tingkat Kemandirian
2021	1.713,72	88.065,80	1,96%	Tidak Mandiri
2022	2.017,36	96.135,92	2,09%	Tidak Mandiri
2023	2.156,29	104.386,99	2,06%	Tidak Mandiri
2024	2.347,13	112.213,99	2,09%	Tidak Mandiri

Berdasarkan rasio PAD terhadap PDRB dalam**Tabel II.139**, mayoritas APBD Kota Tangerang Selatan masih menunjukkan ketergantungan pada transfer pusat untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kondisi tersebut juga selaras dengan hasil analisis terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah pada **Tabel II.137**.

Jika dianalisis berdasarkan elastisitas pertumbuhan PAD terhadap PDRB sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.140**, terlihat bahwa rata-rata elastisitas >1 menunjukkan PAD responsif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Pada tahun 2021-2022 terlihat sangat elastis di mana PAD sangat responsif terhadap pertumbuhan PDRB, disebabkan karena pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang mendorong kenaikan pajak daerah (PKB, hotel, restoran). Pada tahun 2023-2024 terjadi penurunan elastisitas, di mana PDRB tumbuh stabil namun PAD melambat dan gapnya menyempit. Kondisi ini menggambarkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk menghasilkan PAD. Evaluasi diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat pertumbuhan PAD, seperti kurang efektifnya kebijakan terkait perluasan basis pajak dan penertiban retribusi, inefisiensi pemungutan pajak/retribusi, kebocoran pajak atau rendahnya kepatuhan wajib pajak serta meningkatnya pengeluaran wajib (belanja pegawai) yang mengurangi alokasi belanja pada sektor produktif yang dapat menghasilkan PAD.

Tabel II.140. Rasio PAD terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Pertumbuhan PAD (%)	Pertumbuhan PDRB (ADHB) (%)	Elastisitas
2021	11,37	6,70	1,70
2022	17,72	9,16	1,93
2023	6,89	8,58	0,80
2024	8,85	7,50	1,18

Elastisitas yang tinggi tidak selalu baik jika disebabkan oleh kenaikan pajak berlebihan yang membebani masyarakat. Berdasarkan analisis kontribusi masing-masing komponen PAD dalam **Tabel II.141**, terlihat bahwa komponen PAD Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 masih didominasi dari komponen Pajak Daerah. Untuk itu perlu ada analisis lebih lanjut terhadap struktur komponen PAD lainnya untuk mendorong diversifikasi sumber PAD. Berdasarkan

Tabel II.142 terlihat bahwa pertumbuhan komponen PAD non pajak masih perlu dioptimalkan, seperti intensifikasi dan penertiban retribusi daerah, peningkatan profitabilitas BUMD, optimalisasi hasil kerja sama daerah dengan BUMD dan pihak swasta dalam pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah BUMD, peningkatan pendapatan BLUD.

Tabel II.141. Kontribusi Komponen PAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
4.1.01	Pajak Daerah	87,42%	88,88%	88,97%	88,94%	89,20%
4.1.02	Retribusi Daerah	4,07%	2,94%	1,46%	2,20%	5,58%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,03%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8,51%	8,18%	9,53%	8,82%	5,19%

Tabel II.142. Pertumbuhan Komponen PAD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Pertumbuhan pada Tahun				Rata-rata
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**11,37%**	**17,72%**	**6,89%**	**8,85%**	**11,21%**
4.1.01	Pajak Daerah	13,23%	17,84%	6,85%	9,16%	11,77%
4.1.02	Retribusi Daerah	-19,48%	-41,40%	60,75%	175,76%	43,91%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00%	0,00%	5,49%	-9,09%	-0,90%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7,06%	37,13%	-1,07%	-35,93%	1,80%

Berdasarkan hasil analisis terhadap rasio-rasio di atas, Kota Tangerang Selatan menunjukkan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang unik, ditandai oleh kemampuan desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah yang baik, tetapi masih menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian fiskal sepenuhnya. Berdasarkan data yang tersaji, beberapa poin kritis dapat diidentifikasi:

a. Kota Tangerang Selatan telah berhasil mengimplementasikan prinsip desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengelola, dan mengeksekusi anggaran secara mandiri. Namun, kemampuan desentralisasi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemandirian pendanaan;

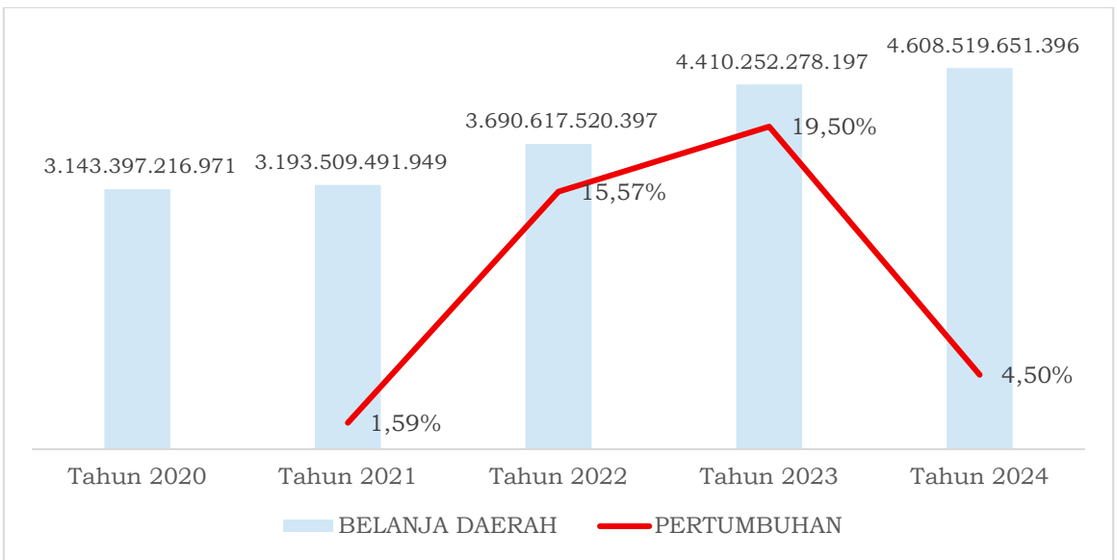
b. Dana transfer masih mendominasi APBD, terutama untuk belanja modal dan program strategis. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD belum menjadi tulang punggung utama pendanaan daerah;

c. PAD hanya menyumbang kecil dari total PDRB, mengindikasikan bahwa sektor ekonomi belum berkontribusi maksimal pada pendapatan daerah;

d. Pertumbuhan PDRB (rata-rata 7,5% per tahun) tidak diikuti oleh peningkatan PAD yang sepadan (elastisitas fluktuatif).

2.8.1.2. Belanja Daerah

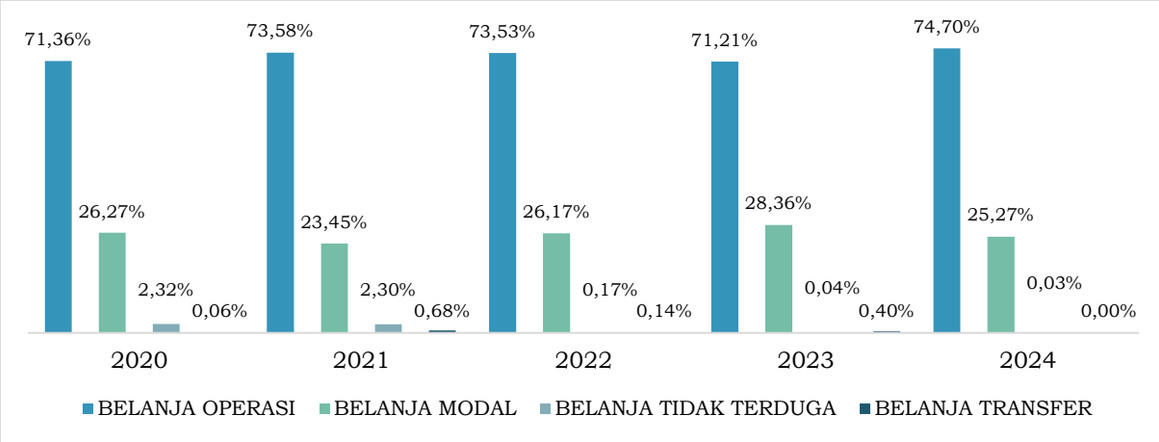
Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah terbagi ke dalam 4 pos belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, serta Belanja Transfer. Gambaran tren realisasi belanja daerah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan dalam **Gambar II.42** menunjukkan tren positif.



Gambar II.42. Tren Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020-2021, pertumbuhan belanja daerah sangat rendah (1,59%) disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 di mana pada tahun tersebut diberlakukan pembatasan aktivitas yang menghambat belanja pembangunan. Selain itu, prioritas belanja daerah pada kurun waktu tahun 2020-2021 difokuskan pada belanja darurat kesehatan, antara lain untuk vaksinasi dan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2021-2023 terjadi lonjakan pertumbuhan belanja daerah yang sangat signifikan sebesar 15,57% pada 2022 dan sebesar 19,50% pada 2023, menunjukkan pemulihan ekonomi dan peningkatan belanja infrastruktur, terutama pada proyek strategis yang tertunda pada saat pandemi Covid-19. Pada tahun 2024, pertumbuhan belanja daerah melambat drastis (4,50%), yang disebabkan karena penyesuaian anggaran karena penurunan pertumbuhan kapasitas fiskal daerah.

Untuk mengetahui komponen belanja daerah yang memengaruhi pertumbuhan belanja daerah dapat dilihat melalui gambaran proporsi komponen belanja daerah terhadap total belanja daerah, sebagaimana disajikan dalam **Gambar II.43**, di mana terlihat bahwa perlambatan pertumbuhan belanja daerah rata-rata disebabkan karena penurunan proporsi komponen belanja modal.



Gambar II.43. Tren Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Realisasi besaran komponen belanja daerah beserta rinciannya selama tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.143**. Komponen belanja transfer mencatatkan rata-rata pertumbuhan tertinggi di mana rincian belanjanya dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota Serang dalam rangka kerja sama pengelolaan sampah untuk penanganan sampah dari Kota Tangerang Selatan. Alokasi belanja bantuan sosial pada tahun 2021 meningkat signifikan karena sebagai upaya perlindungan sosial masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Realisasi surplus/defisit selama tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.144**.

Tabel II.143. Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun					rata-rata pertumbuhan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2	**BELANJA DAERAH**	**3.143.397.216.971,00**	**3.193.509.491.949,00**	**3.690.617.520.397,00**	**4.410.252.278.197,00**	**4.608.519.651.396,00**	**10,29%**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**2.243.113.362.305,00**	**2.349.626.059.070,00**	**2.713.826.400.703,00**	**3.140.481.084.493,00**	**3.442.519.710.653,00**	**11,40%**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.208.110.417.049,00	847.542.209.097,00	911.516.133.943,00	1.049.331.586.444,00	1.264.051.361.654,00	3,32%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	890.454.713.751,00	1.322.343.650.713,00	1.689.017.973.676,00	1.932.792.226.012,00	1.985.092.159.781,00	23,34%
2.1.3	Belanja Hibah	143.930.231.505,00	165.225.302.260,00	109.305.893.084,00	157.662.272.037,00	193.239.767.611,00	11,94%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	618.000.000,00	14.514.897.000,00	3.986.400.000,00	695.000.000,00	136.421.607,00	503,30%
2.2	**BELANJA MODAL**	**825.683.819.294,00**	**748.795.986.827,00**	**965.682.851.455,00**	**1.250.559.871.620,00**	**1.164.502.443.449,00**	**10,57%**
2.2.1	Belanja Modal	825.683.819.294,00	748.795.986.827,00	965.682.851.455,00	1.250.559.871.620,00	1.164.502.443.449,00	10,57%
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**72.774.406.372,00**	**73.372.090.052,00**	**6.108.268.239,00**	**1.711.322.084,00**	**1.497.497.294,00**	**-43,83%**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	72.774.406.372,00	73.372.090.052,00	6.108.268.239,00	1.711.322.084,00	1.497.497.294,00	-43,83%
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.825.629.000,00**	**21.715.356.000,00**	**5.000.000.000,00**	**17.500.000.000,00**	**0,00**	**290,62%**
2.4.1.	Belanja Bantuan Keuangan	1.825.629.000,00	21.715.356.000,00	5.000.000.000,00	17.500.000.000,00	0,00	290,62%

Sumber: LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 (Audited)

Tabel II.144. Surplus/Defisit APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata pertumbuhan
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
SURPLUS/(DEFISIT)	(138.880.751.493,00)	363.296.771.282,00	60.034.773.548,00	(293.481.949.227,00)	(110.048.958.555,00)	-2,74

Sumber: LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 (Audited)

Berdasarkan data dalam **Tabel II.144**, terlihat bahwa pada tahun 2021-2022 kinerja APBD Kota Tangerang Selatan mencatatkan realisasi surplus antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun-tahun tersebut baru dimulai pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di mana belanja daerah baru mulai proses penyesuaian setelah dilakukan pembatasan aktivitas. Pada Tahun 2023-2024 kinerja APBD Kota Tangerang Selatan mencatatkan realisasi defisit antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Defisit APBD tersebut harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.

2.8.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah mencakup semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang berjalan maupun di tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang menghasilkan Pembiayaan Netto.

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari: (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, (2) Pencairan dana cadangan, (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Penerimaan pinjaman daerah, (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau (6) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk: (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, (2) Penyertaan modal daerah, (3) Pembentukan dana cadangan, (4) Pemberian pinjaman daerah, dan/atau (5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian pembiayaan daerah Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.145**, di mana terlihat bahwa sumber penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah bagi BUMD. Selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan membentuk pembiayaan neto yang digunakan untuk menutup defisit APBD.

Realisasi surplus/defisit APBD ditambah dengan realisasi pembiayaan neto menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Daerah (SILPA). Pemerintah Daerah menganggarkan SILPA tahun berkenaan bersaldo nihil. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan; volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Sementara itu dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan. Data SILPA Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.146**, di mana SILPA Tahun Berjalan positif digunakan untuk penerimaan pembiayaan daerah, yang dicatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Tabel II.145. Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata pertumbuhan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
6	**Pembiayaan Daerah**						
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**249.350.271.104,35**	**110.469.519.611,00**	**473.766.290.893,00**	**523.829.325.526,00**	**220.347.491.299,00**	**56,45%**
61.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	249.350.271.104,35	110.469.519.611,00	473.766.290.893,00	523.829.325.526,00	220.347.491.299,00	56,45%
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**0,00**	**9.999.998.915,00**	**10.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	9.999.998.915,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00%
	Pembiayaan Netto	**249.350.271.104,35**	**110.469.519.611,00**	**463.766.291.978,00**	**513.829.325.526,00**	**220.347.491.299,00**	**54,45%**

Sumber: LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 (Audited)

Tabel II.146. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Realisasi Surplus/Defisit (Rp)	(138.880.751.493,00)	363.296.771.282,00	60.034.773.548,00	(293.481.949.227,00)	(110.048.958.555,00)
Pembiayaan neto (Rp)	249.350.271.104,35	110.469.519.611,00	463.766.291.978,00	513.829.325.526,00	220.347.491.299,00
SILPA (Rp)	**110.469.519.611,35**	**473.766.290.893,00**	**523.801.065.526,00**	**220.347.376.299,00**	**110.298.532.744,00**

Sumber: LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 (Audited)

Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dilakukan analisis terhadap komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.147**, di mana terdapat komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang berasal dari pelampauan penerimaan PAD yang cukup besar pada tahun 2022-2023, yaitu sebesar 8-11%. Kondisi perlu dilakukan evaluasi dalam proses perencanaan PAD untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan PAD. Pada tahun 2024, komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang berasal dari pelampauan penerimaan PAD mulai menurun, yaitu sebesar 4,97%. Kondisi ini perlu dipertahankan sehingga PAD dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Tangerang Selatan pada tahun rencana. Komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang berasal dari penghematan belanja juga perlu diupayakan menurun setiap tahun untuk dapat mencerminkan perencanaan penganggaran belanja semakin efisien.

Tabel II.147. Rincian Komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**110.469.519.611,00**	**473.766.290.893,00**	**523.829.325.526,00**	**220.347.491.299,00**
Pelampauan Penerimaan PAD	(121.490.312.744,00)	175.814.125.741,00	247.808.813.987,00	116.655.180.547,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	(128.986.447.728,00)	(9.045.298.587,00)	(58.382.429.672,00)	(81.877.829.332,00)
Pelampauan Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(51.654.874.815,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	1.778.752.253,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja	367.674.972.386,00	287.157.602.430,00	304.898.127.930,00	158.912.287.368,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	1.085,00	0,00
Sisa Belanja Lainnya	43.147.430.259,00	19.839.861.309,00	29.504.812.196,00	26.657.852.716,00

Sumber: LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 (Audited)

2.8.1.4. Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan Neraca Daerah sangat penting bagi manajemen Pemerintahan Daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Sebagai salah satu unsur yang dicakup dalam Laporan Neraca Daerah, aset dapat didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Aset dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terdiri

dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Unsur kedua dari Laporan Neraca Daerah yaitu Kewajiban yang didefinisikan sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Unsur terakhir dari Laporan Neraca Daerah adalah ekuitas yang didefinisikan sebagai kekayaan bersih Pemerintah Daerah. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Secara umum Neraca Daerah memiliki persamaan dasar yaitu :

$$Aset = Kewajiban + Ekuitas$$

Berikut merupakan kondisi Neraca Daerah Kota Tangerang Selatan Periode tahun 2019-2023, disajikan dalam **Tabel II.148**.

Tabel II.148. Laporan Neraca Daerah Kota Tangerang Selatan Periode tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	**ASET**	**23.131.755.059.124,30**	**24.194.777.606.820,80**	**25.048.368.746.464,00**	**25.779.780.599.745,70**	**26.627.420.318.117,00**	**3,58%**
11	**Aset Lancar**	**870.606.368.666,06**	**1.212.773.143.378,47**	**1.298.854.277.783,20**	**1.068.346.684.048,32**	**911.037.874.915,25**	**3,48%**
1101	Kas dan Setara Kas	110.469.567.611,35	473.766.290.893,00	524.162.883.361,00	220.412.939.549,00	110.364.288.336,00	57,91%
1102	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1103	Piutang Pajak Daerah	964.960.346.320,74	1.047.207.152.174,13	1.100.843.867.506,13	1.217.784.904.541,13	1.342.977.775.483,13	8,64%
1104	Piutang retribusi daerah	2.820.913.537,00	1.665.920.877,00	2.080.179.886,00	2.112.249.866,78	15.892.212.948,00	159,46%
1105	Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1106	Piutang lain-lain PAD yang sah	14.239.506.400,17	439.667.924.197,60	423.378.724.076,58	466.287.848.252,07	504.748.578.337,63	750,59%
1107	Piutang transfer Pemerintah Pusat	29.990.148.152,00	58.631.207,00	58.631.207,00	0,00	0,00	-49,95%
1108	Piutang transfer Antar Daerah	257.368.331.406,00	93.473.359.750,00	53.923.423.235,00	115.503.631.943,00	0,00	-22,95%
1109	Piutang Lainnya	493.305.102,48	496.564.412,00	428.450.412,00	519.546.219,00	517.227.219,00	1,94%
1110	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(593.678.336.894,64)	(933.783.699.846,84)	(882.362.865.637,43)	(1.030.790.524.495,07)	(1.147.990.734.915,09)	19,99%
1111	Beban Dibayar di Muka	6.401.424.693,81	5.032.477.045,09	5.317.580.549,57	9.577.667.892,01	11.272.218.978,12	20,52%
1112	Persediaan	77.541.162.337,15	85.188.522.669,49	71.023.403.187,35	66.938.420.280,40	73.256.308.528,46	-0,77%
1113	Aset untuk dikonsolidasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	**Investasi Jangka Panjang**	**162.815.452.282,30**	**158.420.218.114,49**	**159.106.602.839,89**	**198.896.766.386,00**	**203.292.295.359,00**	**6,24%**
1202	Investasi Jangka Panjang Permanen	162.815.452.282,30	158.420.218.114,49	159.106.602.839,89	198.896.766.386,00	203.292.295.359,00	6,24%
13	**Aset Tetap**	**21.937.975.811.287,20**	**22.664.772.962.469,60**	**23.399.122.549.915,20**	**24.294.946.044.494,20**	**25.368.896.022.855,70**	**3,70%**
1301	Tanah	16.238.056.174.914,70	16.648.407.747.817,70	16.810.452.824.739,60	16.978.527.398.350,60	17.391.459.667.021,30	1,73%
1302	Peralatan dan Mesin	1.374.020.004.884,62	1.618.653.468.754,68	1.789.781.018.224,17	2.036.461.458.942,87	2.209.085.010.230,94	12,66%
1303	Gedung dan Bangunan	3.414.026.334.763,74	3.545.124.708.443,95	3.712.891.495.994,18	4.116.653.000.619,63	4.474.289.270.415,57	7,03%
1304	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.624.253.562.201,83	4.074.440.547.174,47	4.540.261.576.217,47	5.233.776.675.290,85	5.901.207.588.120,77	12,97%
1305	Aset Tetap Lainnya	52.790.990.329,38	60.705.488.491,38	63.724.710.174,38	44.308.382.503,38	60.042.626.923,38	6,25%
1306	Konstruksi dalam Pengerjaan	121.985.477.432,85	74.576.030.352,00	290.982.855.606,00	218.605.936.655,00	221.004.051.300,00	56,89%
1307	Akumulasi Penyusutan	(2.887.156.733.239,89)	(3.357.135.028.564,54)	(3.808.971.931.040,60)	(4.333.386.807.868,17)	(4.888.192.191.156,26)	14,08%
15	**Aset Lainnya**	**160.357.426.888,70**	**158.811.282.858,20**	**191.285.315.925,69**	**217.591.104.817,21**	**90.616.313.147,00**	**-6,28%**
1501	Tagihan Jangka Panjang	15.486.309,52	16.350.000,00	0,00	0,00	123.000,00	-94,38%
1502	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	126.056.150.029,89	126.056.150.029,89	86.373.182.340,00	86.373.182.340,00	32.795.370.500,00	-23,38%
1503	Aset Tidak Berwujud	19.947.256.073,00	19.959.242.673,00	20.032.390.463,00	15.400.575.851,00	14.668.287.554,00	-6,86%
1504	Aset lain-lain	49.343.728.184,68	48.287.481.492,68	74.950.214.090,42	76.181.508.783,30	81.562.760.324,94	15,45%
1505	Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	(19.358.536.451,50)	(19.658.609.901,50)	(19.893.970.665,00)	(15.343.005.305,00)	(14.409.438.100,00)	-6,55%
1506	Akumulasi penyusutan aset lainnya	(15.646.657.256,89)	(15.849.331.435,87)	(18.790.503.308,73)	(30.960.901.852,09)	(24.000.790.131,94)	15,54%

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1508	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	48.614.003.006,00	85.939.745.000,00	0,00	-5,81%
16	**Properti Investasi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.577.811.840,00**	**0,00%**
1601	Properti Investasi Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	53.577.811.840,00	0,00%
2	**KEWAJIBAN**	**116.068.939.028,67**	**57.453.905.601,93**	**33.125.981.178,94**	**34.211.421.562,43**	**28.996.465.341,64**	**-26,20%**
21	**Kewajiban Jangka Pendek**	**116.068.939.028,67**	**57.453.905.601,93**	**33.125.981.178,94**	**34.211.421.562,43**	**28.996.465.341,64**	**-26,20%**
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	376.496,00	11.002.387,00	0,00	292.342,00	656,24%
2102	Utang bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2103	Utang pinjaman jangka pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2104	Bagian lancar utang jangka panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2105	Pendapatan diterima di muka	26.379.713.107,67	21.548.041.765,93	5.562.235.010,94	9.367.933.304,68	13.504.448.139,64	5,02%
2106	Utang belanja	89.689.225.921,00	35.905.487.340,00	27.196.366.487,00	23.722.677.270,75	14.381.462.307,00	-34,09%
2107	Utang jangka pendek lainnya	0,00	0,00	356.377.294,00	1.120.810.987,00	1.110.262.553,00	53,39%
22	**Kewajiban Jangka Panjang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2201	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2202	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2203	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2204	Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	**EKUITAS**	**23.015.686.120.095,60**	**24.137.523.701.218,90**	**25.015.242.765.285,00**	**25.745.569.178.183,20**	**26.598.423.852.774,40**	**3,69%**
31	**Ekuitas**	**23.015.686.120.095,60**	**24.137.523.701.218,90**	**25.015.242.765.285,00**	**25.745.569.178.183,20**	**26.598.423.852.774,40**	**3,69%**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**23.131.755.059.124,30**	**24.194.977.606.820,80**	**25.048.368.746.463,90**	**25.779.780.599.745,60**	**26.627.420.318.116,00**	**3,58%**

Sumber: LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024 (Audited)

Berdasarkan **Tabel II.148**, maka dapat dianalisis posisi keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk neraca keuangan daerah adalah rasio lancar dan rasio cepat (*quick*). Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar utang/ kewajiban jangka pendek yang segera harus dipenuhi dengan aset lancar, dihitung menggunakan perbandingan antara nilai aset lancar dengan nilai kewajiban lancar. Sedangkan rasio cepat (*quick*) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, yaitu membandingkan antara nilai aset lancar yang telah dikurangi dengan nilai persediaan dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi nilai rasio lancar menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki semakin baik. Rasio likuiditas keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.149**.

Tabel II.149. Analisa Rasio Likuiditas Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
A. Rasio Lancar	7,50	21,11	39,21	31,23	31,42
B. Rasio Cepat (*quick*)	6,83	19,63	37,07	29,27	28,89

Berdasarkan tren rasio likuiditas sebagaimana tersaji dalam **Tabel II.149**, terlihat bahwa secara rata-rata rasio likuiditas keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset yang dimilikinya. Gambaran ini terlihat juga tren penurunan kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020-2024.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan rasio utang terhadap total aset menggunakan perbandingan antara total utang terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan seberapa besar pengaruh utang terhadap aset. Selain itu, rasio solvabilitas juga dihitung menggunakan rasio utang terhadap modal/ekuitas yang menunjukkan seberapa perlu utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Rasio solvabilitas keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.150**.

Tabel II.150. Analisa Rasio Solvabilitas Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
A. Rasio Utang terhadap Total Aset	0,005	0,002	0,001	0,001	0,001
B. Rasio Utang terhadap Modal	0,005	0,002	0,001	0,001	0,001

Berdasarkan tren rasio solvabilitas sebagaimana tersaji dalam **Tabel II.150**, terlihat bahwa secara pengaruh utang terhadap kemampuan pembiayaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat kecil. Selain itu, nilai total utang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan hingga saat ini masih berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak bergantung pada utang.

C. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Rasio aktivitas yang digunakan adalah rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang/ mengubah piutang menjadi kas. Semakin lama jangka waktu pelunasannya, semakin besar pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Rata-rata umur piutang dihitung dengan rumus:

Rata-rata Umur Piutang = 365 : perputaran piutang,

di mana perputaran piutang = pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah.

Rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan. Semakin tinggi persediaan berputar dalam satu tahun menandakan efektivitas manajemen persediaan. Sebaliknya, jika perputaran persediaan rendah menunjukkan pengendalian atas persediaan kurang efektif. Rata-rata umur persediaan dihitung dengan rumus:

Rata-rata Umur Persediaan = 365 : perputaran persediaan,

di mana perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi rata-rata nilai persediaan.

Rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel II.151**.

Tabel II.151. Rasio Aktivitas Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
A. Rata-rata umur piutang	22,04	23,20	21,98	22,83	21,61
B. Rata-rata umur persediaan	352,05	320,44	384,35	407,81	372,64

Berdasarkan data dalam **Tabel II.151** terlihat bahwa rata-rata umur piutang yang dapat diubah menjadi kas antara 21-23 hari. Jika ditinjau dari tren piutang, terlihat bahwa piutang pendapatan asli daerah mengalami peningkatan pada tahun 2023-2024 dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan perlu adanya upaya peningkatan efektivitas penagihan piutang yang bersumber dari pendapatan asli daerah agar lebih cepat dan tepat sehingga piutang tersebut dapat diubah menjadi lebih likuid untuk pembiayaan pembangunan daerah dan meningkatkan kemampuan *cash flow* keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Beberapa upaya peningkatan efektivitas penagihan terhadap piutang PAD antara lain:

1. Penguatan Sistem Pemutakhiran Data Wajib Bayar melalui:
   - Integrasi database wajib pajak/retribusi dengan Dukcapil, Samsat, dan sistem perdagangan (contoh: memadukan antara data *Booking*.com dan registrasi usaha untuk intensifikasi pajak hotel);
   - Menggunakan *data analytics* untuk identifikasi wajib bayar yang belum mendaftar.
2. Optimalisasi Penagihan dengan Teknologi melalui penggunaan aplikasi penagihan digital (antara lain: dengan pesan whataps/email);
3. Menerapkan pembayaran secara elektronifikasi/transaksi elektronik (QRIS/*virtual account*) untuk memudahkan pembayaran pajak dan retribusi;
4. Penegakan hukum yang konsisten;
5. Restrukturisasi dan pemberian insentif seperti pengurangan denda atau penawaran pembayaran cicilan untuk wajib pajak yang kesulitan dan pemberian reward bagi wajib pajak yang bayar tepat waktu;
6. Audit khusus untuk verifikasi piutang fiktif/usang;
7. Penyelesaian piutang macet melalui upaya hapus buku (*write off*) piutang yang sudah tidak mungkin ditagih (dengan persetujuan DPRD);
8. Penguatan sosialisasi dan edukasi melalui media sosial

Adapun piutang yang berasal pendapatan transfer, perlu dilakukan upaya optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten. Sementara itu, rata-rata umur persediaan cenderung meningkat yang menggambarkan perlunya peningkatan efektivitas manajemen persediaan sehingga penggunaan persediaan untuk pelayanan publik dapat lebih cepat.

2.8.1.5. Proporsi Anggaran Belanja Pegawai

Analisa proporsi belanja pegawai bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar alokasi anggaran daerah digunakan untuk membiayai aparatur pemerintah (seperti gaji dan tunjangan) dibandingkan dengan belanja pembangunan atau pelayanan publik. Analisa dilakukan dengan membandingkan antara belanja pegawai dengan total pengeluaran daerah (belanja + pengeluaran pembiayaan) sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.152**, di mana terlihat mulai tahun 2020-2023 proporsi belanja pegawai menurun hingga di bawah 30% sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2024, belanja pegawai mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan karena adanya penyesuaian belanja atas penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Walaupun mengalami kenaikan persentase belanja pegawai pada tahun 2024, namun proporsinya masih di bawah 30%.

Tabel II.152. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur tahun 2020-2024

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2020	1.208.110.417.049	3.143.397.216.971	38,43%
2	2021	847.542.209.097	3.193.509.491.949	26,54%
3	2022	911.516.133.943	3.700.617.519.312	24,63%
4	2023	1.049.331.586.444	4.420.252.278.197	23,74%
5	2024	1.264.051.361.654	4.608.519.651.396	27,43%

Sumber: LKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2024 (Audited)

2.8.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030

Proyeksi kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah dalam kurun waktu tahun 2025-2030 disusun berdasarkan kinerja keuangan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 sebagaimana disampaikan pada Subbab sebelumnya, kebijakan keuangan dan kondisi lingkungan yang dinamis. Kerangka pendanaan daerah tahun 2025-2030 bersifat indikatif berupa proyeksi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah, disajikan dalam **Tabel II.153**. Kerangka pendanaan daerah pada tahun 2030 merupakan kerangka pendanaan transisi untuk RPJMD Tahun 2030-2034.

Tabel II.153. Proyeksi Kerangka Pendanaan Indikatif Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025 (status RAPBD)	Proyeksi Keuangan Daerah					Rata-rata pertumbuhan
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4	PENDAPATAN DAERAH	4.498.470.692.841,00	4.915.590.688.267,00	5.027.386.580.877,44	5.198.754.149.586,00	5.544.066.601.864,00	5.913.404.778.659,00	6.311.630.420.729,00	5,83%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.347.128.663.052,00	2.993.696.773.132,00	3.238.037.122.267,44	3.488.029.710.183,00	3.757.861.428.960,00	4.049.114.901.397,00	4.363.500.901.676,00	7,41%
4.1.01	Pajak Daerah	2.093.592.089.573,00	2.704.873.310.643,00	2.921.263.175.494,44	3.154.964.229.534,00	3.407.361.367.897,00	3.679.950.277.329,00	3.974.346.299.515,00	7,42%
4.1.02	Retribusi Daerah	130.996.951.091,00	152.212.272.464,00	171.027.505.459,00	184.709.705.895,00	199.486.482.367,00	215.445.400.956,00	232.681.033.033,00	10,09%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	701.475.939,00	629.151.223,00	701.475.939,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,16%
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	121.838.146.449,00	135.982.038.802,00	145.044.965.375,00	147.655.774.754,00	150.313.578.696,00	153.019.223.112,00	155.773.569.128,00	4,25%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.151.342.029.789,00	1.921.893.915.135,00	1.789.349.458.610,00	1.710.724.439.403,00	1.786.205.172.904,00	1.864.289.877.262,00	1.948.129.519.053,00	-1,45%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.400.086.802.533,00	1.503.294.748.203,00	1.372.758.119.000,00	1.391.424.439.403,00	1.458.326.172.904,00	1.528.544.507.262,00	1.602.221.787.953,00	2,42%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.361.057.579.533,00	1.489.191.869.203,00	1.358.758.119.000,00	1.377.424.439.403,00	1.444.326.172.904,00	1.514.544.507.262,00	1.588.221.787.953,00	2,77%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	317.755.436.000,00	347.772.823.000,00	347.772.823.000,00	337.604.501.479,00	347.732.636.524,00	358.164.615.619,00	368.909.554.088,00	2,59%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	663.369.072.841,00	729.628.055.000,00	599.160.647.000,00	629.118.679.350,00	660.574.613.317,50	693.603.343.983,38	728.283.511.182,54	2,02%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	22.208.153.615,00	12.894.584.000,00	9.500.000.000,00	9.444.613.040,00	9.444.613.040,00	9.400.151.736,00	8.460.136.562,00	-13,22%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik	357.724.917.077,00	398.896.407.203,00	402.324.649.000,00	404.641.321.717,00	424.873.387.803,00	446.117.057.193,00	468.422.910.053,00	4,66%

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025 (status RAPBD)	Proyeksi Keuangan Daerah					Rata-rata pertumbuhan
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	14.102.879.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	-0,12%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	39.029.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,67%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	751.255.227.256,00	418.599.166.932,00	416.591.339.610,00	319.300.000.000,00	327.879.000.000,00	335.745.370.000,00	345.907.731.100,00	7,89%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	744.614.942.256,00	418.599.166.932,00	416.591.339.610,00	319.300.000.000,00	327.879.000.000,00	335.745.370.000,00	345.907.731.100,00	8,61%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	6.640.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,67%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.01	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	BELANJA DAERAH	4.646.185.379.496,00	5.025.889.221.011,00	5.137.386.580.876,54	5.258.835.149.586,00	5.604.066.601.864,00	5.973.404.778.659,00	6.371.630.420.729,00	5,43%
5.1	BELANJA OPERASI	3.480.185.438.753,00	3.582.446.508.756,60	3.386.144.916.940,56	3.387.333.489.753,00	3.595.039.961.118,00	3.914.132.369.221,00	4.031.363.192.799,00	2,58%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.301.717.089.754,00	1.590.561.610.083,19	1.873.887.973.755,35	2.067.033.332.221,67	2.067.033.332.221,67	2.105.435.363.846,10	2.105.435.363.846,10	8,69%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.985.092.159.781,00	1.832.001.324.273,41	1.290.543.974.770,21	1.170.300.157.531,33	1.378.006.628.896,33	1.558.697.005.374,90	1.775.927.828.952,90	-0,30%
5.1.05	Belanja Hibah	193.239.767.611,00	159.883.574.400,00	221.615.992.280,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	250.000.000.000,00	150.000.000.000,00	2,61%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	136.421.607,00	0,00	96.976.135,00					
5.2	BELANJA MODAL	1.164.502.443.449,00	1.417.113.516.254,40	1.726.241.663.935,98	1.856.501.659.833,00	1.999.026.640.746,00	2.049.272.409.438,00	2.330.267.227.930,00	12,49%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.497.497.294,00	6.329.196.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	63,44%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.497.497.294,00	6.329.196.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	63,44%
5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-31,94%

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025 (status RAPBD)	Proyeksi Keuangan Daerah					Rata-rata pertumbuhan
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-31,94%
7	PEMBIAYAAN DAERAH	220.347.491.299,00	110.298.532.744,00	110.000.000.000,00	60.081.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-15,95%
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	220.347.491.299,00	110.298.532.744,00	110.000.000.000,00	110.081.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	-8,37%
7.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	220.347.491.299,00	110.298.532.744,00	110.000.000.000,00	110.081.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	-8,37%
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00%
7.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00%
APBD		**4.646.185.379.496,00**	**5.025.889.221.011,00**	**5.137.386.580.876,54**	**5.308.835.149.586,00**	**5.654.066.601.864,00**	**6.023.404.778.659,00**	**6.421.630.420.729,00**	**5,56%**

Pada proyeksi pendapatan daerah, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat tambahan potensi pendapatan asli daerah dari beberapa pajak yang semula merupakan komponen bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Banten. Untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah perlu diupayakan beberapa kebijakan, antara lain:

a) Penguatan Sistem Pemutakhiran Data Wajib Bayar melalui:
   - Integrasi *database* wajib pajak/retribusi dengan Dukcapil, Samsat, dan sistem perdagangan (contoh: memadukan antara data *Booking*.com dan registrasi usaha untuk intensifikasi pajak hotel);
   - Penggunan *data analytics* untuk identifikasi wajib bayar yang belum mendaftar.
b) Penyederhanaan prosedur dan optimalisasi penagihan menggunakan teknologi melalui penggunaan aplikasi penagihan digital (antara lain: dengan pesan whataps/email);
c) Penerapan pembayaran secara elektronifikasi/transaksi elektronik (QRIS/*virtual account/e-commerce*) untuk memudahkan pembayaran pajak dan retribusi;
d) Restrukturisasi pembayaran pajak dan retribusi seperti pengurangan denda atau penawaran pembayaran cicilan;
e) Pemberian insentif bagi wajib pajak/retribusi yang bayar tepat waktu dan/atau yang membayar menggunakan sistem pembayaran digital;
f) Penguatan sosialisasi dan edukasi melalui media sosial atau kegiatan tatap muka untuk peningkatan literasi masyarakat dalam hal kemudahan pembayaran pajak dan retribusi menggunakan transaksi digital;
g) Optimalisasi pengawasan bersama terhadap Wajib Pajak, bekerja sama dengan Kanwil DJP Banten, KPP Pondok Aren dan KPP Serpong
h) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
i) Peningkatan koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten dalam rangka peningkatan alokasi pendapatan transfer yang menjadi bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j) Mendukung program-program Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan.
k) Mengupayakan inovasi pembiayaan yang bersumber dari sektor non pemerintah, baik melalui KPBU, CSR dan/atau *creative financing* lainnya;
l) Mengoptimalkan pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah (BMD);
m) Mendorong penyelenggaraan BLUD dan BUMD yang sehat dan *profitable*.

Proyeksi kerangka pendanaan untuk belanja pegawai pada belanja daerah tahun 2025-2029, terhitung proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen). Hal tersebut disebabkan penerimaan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2025, yang merupakan konvesi dari pegawai honorer. Kebijakan dalam kerangka pendanaan belanja daerah yang akan diterapkan pada kurun waktu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a) Belanja urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk penguatan pencapaian dan peningkatan kualitas standar pelayanan minimal;
b) Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar;

c) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung target prioritas pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah dan kemampuan daerah;
d) Belanja daerah yang berasal dari pendapatan transfer yang telah ditentukan penggunaannya, dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) Belanja daerah diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi dan fokus program pembangunan KDH/WKDH tahun 2025-2029.
f) Belanja Tidak Terduga dianggarkan secara memadai mengantisipasi kejadian luar biasa di luar kewenangan daerah atau kondisi darurat/ mendesak di luar perencanaan, tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat atau diamanatkan peraturan perundang-undangan;
g) Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasikan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan kemampuan keuangan daerah setelah pemenuhan urusan pelayanan wajib.
h) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, belanja daerah dialokasikan untuk pendanaan fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi pendanaan fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas pembelajaran yang inklusif dan berdaya saing;
i) Belanja daerah dialokasikan untuk pendanaan Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi pendanaan kesehatan diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan daerah, termasuk transformasi kemandirian pembiayaan kesehatan, dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi pada seluruh siklus kehidupan;
j) Pendanaan untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi, dialokasikan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k) Pendanaan layanan pengawasan untuk kegiatan pengawasan dan peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l) Pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat (ekonomi, sosial dan lingkungan) di Kelurahan, dialokasikan sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) setiap Kelurahan;
m) Pendanaan program dan kegiatan yang diusulkan melalui aspirasi langsung (Musrenbang dan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan) dialokasikan sebesar Rp250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Rupiah) atau sesuai kemampuan keuangan daerah;
n) Pendanaan untuk peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana (baik pencegahan, mitigasi dan penanganan), termasuk untuk pemadaman kebakaran dan penyelamatan, dialokasikan paling sedikit 1% (satu persen) dari total belanja daerah.
o) Pendanaan untuk pengelolaan sampah melalui PLTSA dan/atau kerja sama dengan daerah lain, dialokasikan sesuai dengan perjanjian yang berlaku.
p) Dalam rangka pemajuan riset dan inovasi daerah sebagai pengungkit pembangunan ekonomi daerah, dialokasikan belanja riset dan inovasi paling sedikit 0,02% dari total belanja daerah;
q) Dalam kurun waktu tahun 2025-2029, dialokasikan penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk pendanaan BUMD, baik BUMD eksisting

dan/atau rencana BUMD yang akan dibentuk oleh Kota Tangerang Selatan selama tahun 2025-2029. Salah satu BUMD Kota Tangerang Selatan yang akan dibentuk adalah BUMD pasar/aneka usaha dan BUMD parkir.

2.9. Permasalahan dan Isu Strategis

2.9.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Rumusan permasalahan pembangunan daerah merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan pembangunan daerah diidentifikasi melalui berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pembangunan daerah diidentifikasi terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan.

Permasalahan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 diidentifikasikan berdasarkan gambaran umum daerah dengan memerhatikan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045, Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029, dan hasil penjaringan aspirasi, sebagaimana disajikan pada **Tabel II.154**.

Tabel II.154. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Gambaran Umum Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Hasil Penjaringan Aspirasi	Penafisan untuk Permasalahan Daerah RPJMD Tahun 2025-2029
Aspek Geografi dan Demografi				
1. Jumlah penduduk yang tinggi (> 1 juta) dan pertumbuhan kota yang pesat memicu tingginya penggunaan lahan yang berdampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta penurunan kinerja jasa lingkungan hidup; 2. Pembangunan perkotaan yang belum berorientasi pada kelestarian lingkungan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup (pencemaran air, udara dan tanah) dan peningkatan suhu permukaan; 3. Kota Tangerang Selatan memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana gempa bumi, banjir, cuaca ekstrem dan kegagalan teknologi. Sementara itu ketahanan daerah terhadap potensi bencana tersebut masih belum optimal, terutama dalam hal kesiapsiagaan masyarakat dan pengembangan pemulihan bencana yang terintegrasi dan efektif; 4. Ketahanan pangan daerah masih belum optimal ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk yang tidak mendapatkan asupan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif; 5. Beban ketergantungan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia lansia	1. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 2. Kinerja jasa lingkungan hidup berkategori rendah; 3. Tangerang Selatan memiliki potensi bencana yang tinggi, namun tingkat adaptasi dan mitigasi bencana masyarakat masih rendah; 4. Belum optimalnya kualitas konsumsi pangan; 5. Belum semua rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi dan air minum yang aman.	1. Daya Dukung Lingkungan Hidup Menurun; 2. Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Belum Optimal; 3. Pengelolaan Persampahan yang Terpadu dan Ramah Lingkungan Belum Optimal;	1. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan tekanan besar pada lingkungan, termasuk lahan yang semakin sempit dan masalah-masalah perkotaan seperti pencemaran, kemacetan, banjir, dan risiko kebakaran yang meningkat 2. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dan pengambil kebijakan terhadap adaptasi dan mitigasi kebencanaan serta kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup 3. Belum optimalnya tata kelola pencegahan dan penanganan bencana serta tata kelola pembangunan yang ramah lingkungan	1. Kualitas Lingkungan Hidup menurun 2. Kota Tangerang Selatan masih rentan pangan (terutama keterjangkauan untuk masyarakat miskin), air, bencana dan perubahan iklim 3. Perkembangan demografi Kota Tangerang Selatan menuju demografi penuaan/ *aging population* yang membutuhkan perlindungan sosial inklusif
Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Diversifikasi potensi ekonomi daerah berbasis produk unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah belum optimal; 2. Ketimpangan ekonomi meningkat dan tingkat kemiskinan masih berfluktuasi yang mengindikasikan belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan yang adaptif dan inklusif; 3. Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi belum merata, di mana masih terdapat peningkatan prevalensi stunting dan status keluarga sehat di Kota Tangerang Selatan masih berkategori Pra Sehat; 4. Partisipasi pendidikan dasar dan kualitas pembelajaran belum merata dan inklusif;	1. Penuntasan kemiskinan dan perluasan perlindungan yang adaptif belum optimal; 2. Masih terdapat penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan di Kota Tangerang Selatan, terutama TBC dan Kusta	1. Percepatan Penuntasan Kemiskinan dan Perluasan Perlindungan yang Adaptif Belum Optimal; 2. Belum optimalnya kualitas SDM yang berdaya saing global; 3. Penguatan Norma Keluarga dan Masyarakat Belum Optimal.	1. Kesejahteraan penduduk belum sepenuhnya optimal. Biaya hidup yang terus meningkat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat; 2. Masih kurang efektifnya upaya-upaya pengentasan kemiskinan karena kurangnya inovasi dalam program yang mendukung masyarakat miskin agar dapat mandiri secara ekonomi 3. Perubahan budaya dan nilai sosial dalam gaya hidup masyarakat perkotaan memengaruhi nilai-nilai tradisional dan adat istiadat yang mulai tergerus sehingga memengaruhi identitas kolektif masyarakat sehingga meningkatkan	1. Pertumbuhan ekonomi daerah melambat, ketimpangan meningkat dan upaya pengentasan kemiskinan belum efektif karena kurangnya inovasi program, dapat berdampak pada peningkatan masalah sosial dan kesejahteraan; 2. Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi belum merata 3. Akses dan kualitas pendidikan belum merata, inklusif dan unggul

Gambaran Umum Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Hasil Penjaringan Aspirasi	Penafisan untuk Permasalahan Daerah RPJMD Tahun 2025-2029
5. Masih terdapat dinamika dalam kerukunan umat beragama; 6. Belum optimalnya upaya pembangunan kebudayaan; 7. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam partisipasi ekonomi dan kepemimpinan.			kesenjangan sosial dan kurangnya gotong royong di masyarakat	4. Kehidupan sosial yang berbudaya, aman dan harmonis belum optimal
Aspek Daya Saing Daerah				
1. Kota Tangerang Selatan masih mengalami bonus demografi namun mengalami penurunan partisipasi angkatan kerja yang berpotensi meningkatkan beban ketergantungan. Kota Tangerang Selatan belum optimal dalam upaya peningkatan kualitas SDM usia produktif hingga menjadi sumber tenaga kerja yang unggul dan profesional; 2. Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi kreatif yang merupakan indikator peralihan dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis pengetahuan, kreativitas, dan inovasi. Kondisi tersebut juga diperkuat dengan kinerja inovasi daerah dan kapabilitas inovasi yang menurun; 3. Kewirausahaan daerah potensi aktivitas perekonomian yang sangat penting, baik dari segi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan memajukan potensi lokal mengalami penurunan.; 4. Aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan dan keterampilan pekerja dalam menggunakan teknologi digital terkait pekerjaan masih belum optimal; 5. Kontribusi ekspor terhadap PDRB mengalami penurunan; 6. Kualitas layanan infrastruktur belum optimal, terutama kualitas fisik dan integrasinya; 7. Belum optimalnya fasilitas perkotaan untuk mendukung tingkat kelayakan huni di Kota Tangerang Selatan, terutama terkait kualitas penyediaan fasilitas kesenian budaya, fasilitas pejalan kaki dan fasilitas kelompok rentan; 8. Potensi pajak daerah belum tergali optimal; 9. Iklim investasi daerah belum efisien.	1. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan; 2. Pengembangan potensi ekonomi dan daya tarik daerah belum optimal; 3. Belum optimalnya kontribusi sektor UMKM dan Ekraf terhadap sektor perdagangan di Tangerang Selatan; 4. Produktivitas tenaga kerja belum optimal	1. Produktivitas Tenaga Kerja Belum Optimal; 2. Pengembangan Potensi Ekonomi dan Daya Tarik Daerah Berbasis Riset Belum Optimal; 3. Infrastruktur, Layanan Perkotaan dan Pemenuhan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman Belum Sesuai Standar, Terintegrasi dan Inklusif Sesuai Kebutuhan Masyarakat; 4. Penataan Ruang yang Belum Terintegrasi, Berkeadilan dan Berkelanjutan	1. Belum optimalnya pertumbuhan sektor basis ekonomi selain konstruksi dan *real estat*; 2. Belum dikembangkannya kawasan wisata tematik yang mengintegrasikan produk wisata inovatif dan ekonomi digital Kota Tangerang Selatan; 3. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur serta kondusivitas lingkungan untuk meningkatkan daya tarik Kota Tangerang Selatan sebagai destinasi bisnis dan wisata; 4. Belum optimalnya link and match antara kualifikasi dan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja di Kota Tangerang Selatan; 5. Rendahnya riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kualitas SDM untuk bersaing dengan pencari kerja dari daerah lain; 6. Belum optimalnya pengembangan sub sektor ekonomi kreatif, pemanfaatan inovasi teknologi hasil riset yang tepat guna, dan kesiapan kapasitas produksi UMKM; 7. Kurangnya moda transportasi publik yang terintegrasi dan inklusif; 8. Rendahnya adopsi teknologi untuk hal yang produktif, dan konten digital lokal yang belum memadai, menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi daerah;	1. Kualitas SDM tenaga kerja belum unggul dan berdaya saing 2. Pengembangan dan diversifikasi produk unggulan daerah belum optimal 3. Inovasi dan adopsi teknologi belum optimal untuk peningkatan produktivitas daerah 4. Daya tarik pariwisata daerah belum berdaya saing; 5. Kontribusi sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian daerah belum optimal 6. Peningkatan investasi daerah berbasis potensi unggulan belum berkelanjutan 7. Kualitas perkotaan yang layak huni belum optimal 8. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum digali optimal
Aspek Pelayanan Umum				
1. Pelayanan publk yang prima, responsif dan berbasis solusi belum optimal;		1. Belum Optimalnya Peran Riset, Inovasi dan Teknologi dalam	1. Kurangnya inovasi dalam skema kerja sama daerah dengan multi pihak	1. Tata kelola pemerintahan daerah

Gambaran Umum Daerah	KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Hasil Penjaringan Aspirasi	Penafisan untuk Permasalahan Daerah RPJMD Tahun 2025-2029
2. Integritas instansi penyelenggara pemerintahan belum optimal; 3. Penyelenggaraan HAM terutama bagi penduduk dengan disabilitas dan kelompok rentan belum optimal; 4. Kapabilitas inovasi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah mengalami penurunan; 5. Belum optimalnya daya saing daerah, terutama dalam hal pemerataan kualitas keterampilan SDM dan ekosistem inovasi; 6. Upaya peningkatan rasa aman dan nyaman di Kota Tangerang Selatan belum optimal		mendukung pengembangan ekonomi Daerah; 2. Kerja Sama Multihelix Dalam Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal; 3. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik Belum optimal	membuat kerja sama yang ada kurang efektif dan belum mampu menghasilkan solusi yang kreatif untuk mengatasi berbagai permasalahan daerah; 2. Masih adanya kebijakan pemerintah yang belum inklusif (belum mengakomodir kebutuhan khusus bagi kelompok rentan); 3. Belum efektifnya pelaksanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif penyediaan sarana prasarana perkotaan yang membutuhkan biaya sangat besar dan teknologi tinggi; 4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum terintegrasi dan belum responsif secara *real-time*, sehingga pelayanan publik masih belum efisien dan efektif	yang profesional, berorientasi pelayanan prima, inklusif dan berintegritas belum optimal; 2. Kebijakan daerah yang dihasilkan belum berbasis riset dan belum inklusif;

Berdasarkan penafisan dari identifikasi permasalahan daerah sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.154**, maka dirumuskan masalah pokok daerah yang akan memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.155**.

Tabel II.155. Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Penafisan untuk Permasalahan Daerah RPJMD Tahun 2025-2029	Masalah	Masalah Pokok
Kualitas Lingkungan Hidup menurun	Belum optimalnya kualitas lingkungan perkotaan sebagai kota layak huni	Belum optimalnya pembangunan kewilayahan yang inklusif, terintegrasi, berketahanan sosial, budaya dan ekologi
Kualitas perkotaan yang layak huni belum optimal		
Kehidupan sosial yang berbudaya, aman dan harmonis belum optimal	Belum optimalnya ketahanan sosial dan budaya daerah	
Kota Tangerang Selatan masih rentan pangan (terutama keterjangkauan untuk masyarakat miskin), air, bencana dan perubahan iklim	Belum optimalnya ketahanan daerah terhadap pangan, air dan bencana (termasuk perubahan iklim)	
Pertumbuhan ekonomi daerah melambat	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan	Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi
Pengembangan dan diversifikasi produk unggulan daerah belum optimal		
Peningkatan investasi daerah berbasis potensi unggulan belum berkelanjutan		
Daya tarik pariwisata daerah belum berdaya saing;		
Kontribusi sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian daerah belum optimal		
Inovasi dan adopsi teknologi belum optimal untuk peningkatan produktivitas daerah		
Kualitas SDM tenaga kerja belum unggul dan berdaya saing	Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah	
Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi belum merata	Belum optimalnya pemerataan kesehatan berkualitas dan terjangkau	Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera
Akses dan kualitas pendidikan belum merata, inklusif dan unggul	Belum optimalnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif	
Perkembangan demografi Kota Tangerang Selatan menuju demografi penuaan/ aging population yang membutuhkan perlindungan sosial inklusif	Belum optimalnya perlindungan sosial dan penurunan ketimpangan yang inklusif	

Penafisan untuk Permasalahan Daerah RPJMD Tahun 2025-2029	Masalah	Masalah Pokok
Ketimpangan dan beban ketergantungan meningkat serta upaya pengentasan kemiskinan belum efektif karena kurangnya inovasi program, dapat berdampak pada peningkatan masalah sosial dan kesejahteraan		
Tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pelayanan prima, inklusif dan berintegritas belum optimal	Belum optimalnya reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola yang profesional, inovatif, dan berintegritas	Belum optimalnya reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola yang profesional, inovatif, dan berintegritas
Kebijakan yang dihasilkan belum berbasis riset dan belum inklusif		
Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum digali optimal		
Kerja sama pembangunan belum efektif		

2.9.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis daerah untuk RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 disimpulkan dari permasalahan daerah, isu strategis sesuai lingkungan dinamis dan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

2.9.2.1. Potensi Daerah dan Modalitas Daerah

1. Posisi strategis Tangerang Selatan dalam konstelasi regional dan Kawasan aglomerasi Jabodetabek

Kebijakan pengembangan wilayah dalam perspektif kota adalah strategi dan rencana yang dibuat oleh pemerintah kota untuk mengatur pertumbuhan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya di wilayah Kota Tangerang Selatan. Tujuan utama dari kebijakan pengembangan wilayah ini adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh wilayah. Namun demikian, pengembangan Kota Tangerang Selatan harus sejalan dengan pengembangan daerah sekitar. Semakin eratnya hubungan daerah Jabodetabekpunjur mengarah pada perencanaan membentuk wilayah megalopolitan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta membentuk kawasan aglomerasi. Adapun tujuan dari pengembangan kawasan aglomerasi yaitu untuk menyinkronkan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitar (Pasal 51 ayat 1). Kawasan Aglomerasi di sekitar Daerah Khusus Jakarta minimal melingkupi Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Dengan pengembangan kawasan aglomerasi tersebut, maka perlu

untuk dilakukan sinkronisasi dokumen rencana Tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan Kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota Yang termasuk dalam cakupan Kawasan Aglomerasi. Selanjutnya, sinkronisasi dilakukan melalui penyusunan dokumen rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang mencakup seluruh atau sebagian wilayah kawasan aglomerasi. Dokumen rencana tata ruang tersebut memuat fungsi dan struktur ruang yang dapat menjamin keselarasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada kawasan aglomerasi.

Dalam konstelasi Kawasan aglomerasi Jabodetabek, Kota Tangerang Selatan akan mengambil perannya sebagai *supporting system* bagi Kawasan Aglomerasi Jabodetabek. Kota Tangerang Selatan menjadi tempat yang menarik untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman kelas menengah atas dibandingkan dengan kota-kota satelit yang lainnya. Hal ini karena kedekatannya dengan Jakarta sebagai tempat aktivitas bekerja dan berusaha, ditambah dengan konektivitas antar moda sehingga penghuni kawasan-kawasan permukiman di Kota Tangerang Selatan dapat dengan mudah melaju dari rumah ke kantor.

Dari satu sisi, maraknya pembangunan kawasan hunian akan mendorong perekonomian Kota Tangerang Selatan melalui pertumbuhan konsumsi. Banyak pekerja di Jakarta yang akan membelanjakan pendapatannya di Kota Tangerang Selatan sebagai tempat tinggalnya. Kondisi ini akan mendorong tumbuhnya aktivitas-aktivitas ekonomi yang terkait dengan pelayanan dan jasa seperti sekolah, rumah sakit, pertokoan, hiburan, pasar, mall, kuliner, dan sebagainya. Keunggulan ini tentunya harus dioptimalkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.

Peran Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dalam kawasan aglomerasi Jabodetabek menjadi semakin penting. Penataan ruang permukiman menjadi kunci untuk menghadapi peningkatan kepadatan penduduk yang semakin tinggi dan urbanisasi Jabodetabek yang tidak terkendali. Studi terkait daya dukung dan daya tampung perlu dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keberlanjutan Kota Tangerang Selatan sebagai kota hunian. Selain itu pemanfaatan teknologi dan pengembangan inovasi juga menjadi penting untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan. Integrasi infrastruktur abu-abu (*grey infrastructure*) dan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) dapat menjadi terobosan untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan menjadi kota hunian yang modern dengan tetap mengusung prinsip berkelanjutan.

2. Potensi Ekonomi Daerah dalam kategori Cepat Maju dan Tumbuh Pesat

Kota Tangerang Selatan memiliki utilitas permukiman yang relatif lengkap. Kota Tangerang Selatan memiliki kelengkapan dari sisi sarana dan prasarana perbelanjaan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan perkantoran. Berdasarkan tinjauan terhadap PDRB per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi, perekonomian Kota Tangerang Selatan termasuk dalam kategori Cepat Maju dan Tumbuh Pesat, dengan sektor ekonomi penggerak terdapat pada sektor tersier perdagangan dan jasa. Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dalam kawasan aglomerasi Jabodetabek dapat dioptimalkan perannya dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

3. Pembangunan SDM di Kota Tangerang Selatan Berkategori Sangat Tinggi

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam pembangunan berkelanjutan yakni sebagai modalitas utama pembangunan

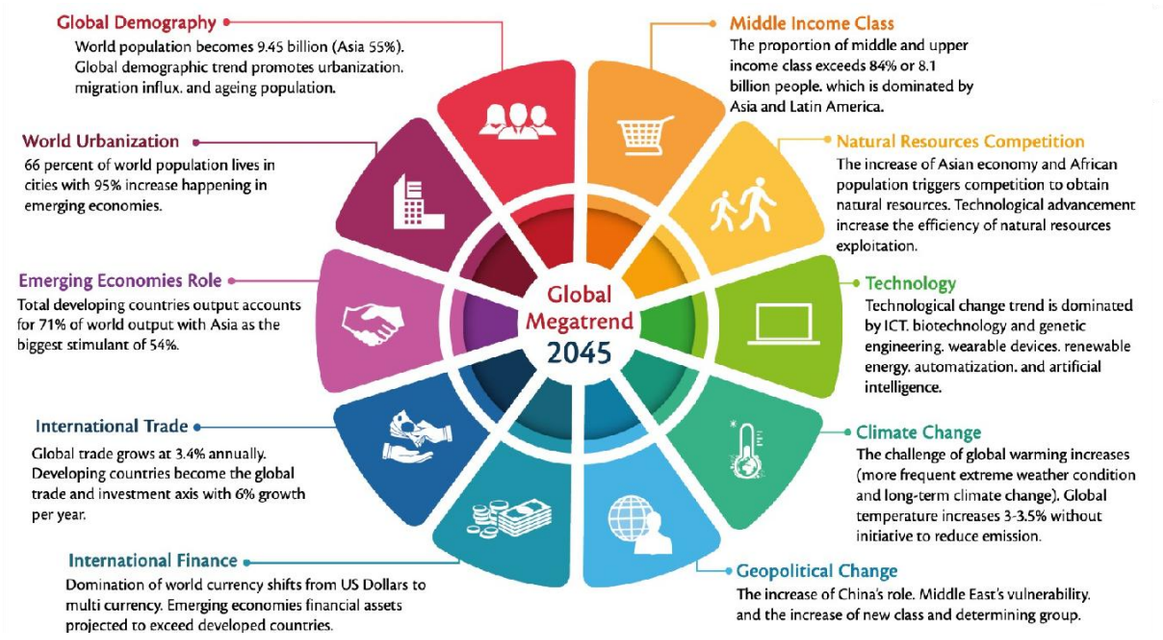
daerah. Kota Tangerang Selatan telah mendapatkan bonus demografi di mana penduduk Kota Tangerang Selatan didominasi oleh usia produktif yang merupakan Generasi X dan Generasi Milenial. Rata-rata penduduk Kota Tangerang Selatan menamatkan pendidikan menengah dengan harapan melanjutkan pendidikan hingga jenjang Diploma. Penduduk Kota Tangerang Selatan juga memiliki tingkat kesehatan yang tinggi, di mana usia harapan hidup penduduknya paling tinggi di Provinsi Banten.

Pembangunan manusia dan pembangunan gender di Kota Tangerang Selatan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi (IPM > 80 dan IPG > 90) serta pemberdayaan gender dalam kategori tinggi (IDG > 70). Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan juga tercatat sangat rendah secara nasional, yaitu di bawah 5 persen. Rata-rata penduduk Kota Tangerang Selatan melek teknologi informasi di mana sebagian penduduknya mengakses internet.

2.9.2.2. Isu Global

Upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah akan menghadapi isu dan tantangan yang dinamis. Tantangan global cukup relevan sebagai salah satu pertimbangan dalam merumuskan isu strategis RPJMD Kota Tangerang Selatan sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan di masa mendatang. Isu dan tantangan pembangunan perlu dimitigasi dan dioptimalisasi menjadi peluang untuk mencapai sasaran jangka menengah serta trajektori pembangunan jangka panjang.

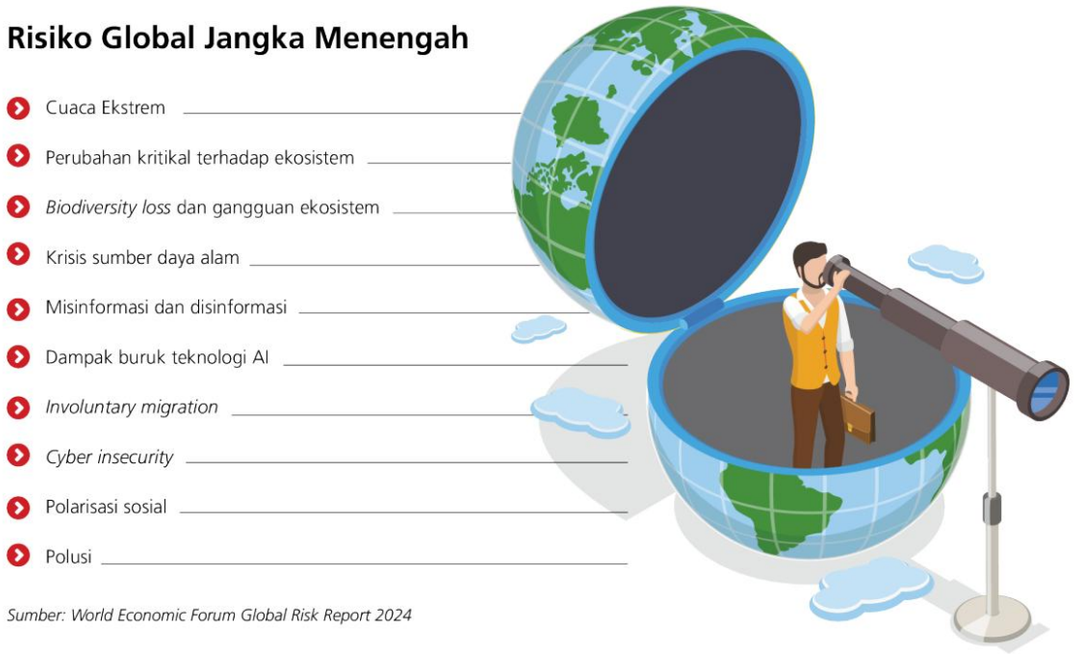
Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Megatren global yang dapat memengaruhi perkembangan Kota Tangerang Selatan disajikan dalam **Gambar II.44**.



Gambar II.44. Isu Megatrend Global

World Economic Forum Global Risk Report tahun 2024 mengemukakan sejumlah risiko global yang perlu diantisipasi dalam kerangka pembangunan

jangka menengah. Di antara risiko tersebut adalah cuaca ekstrem, perubahan kritikal ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan gangguan ekosistem, krisis SDA, misinformasi dan disinformasi, dampak buruk *AI*, *involuntary* migrasi, keamanan *cyber*, polarisasi sosial dan polusi sebagaimana disajikan dalam **Gambar II.45**.



Gambar II.45. Risiko Global Jangka Menengah

2.9.2.3. Isu Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Pembangunan jangka menengah dalam RPJMD 2025-2029 berperan penting sebagai fondasi awal untuk mencapai visi jangka panjang Kota Tangerang Selatan. Upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah akan menghadapi isu dan tantangan yang dinamis tidak hanya pada konstelasi regional, melainkan juga nasional. Berikut ini merupakan sejumlah tantangan dalam pembangunan jangka menengah nasional yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2025-2029:

1) Rendahnya Produktivitas
2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat
4) Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif
5) Krisis Lingkungan
6) Geopotitik dan Geoekonomi
7) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Terdapat isu pada RPJMN 2025-2029 dalam sasaran Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang tertuang pada Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Berikut ini merupakan sejumlah isu perkotaan dalam pembangunan jangka menengah nasional yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2025-2029:

1) Setiap 1 persen pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia hanya meningkatkan 1,4 persen PDB perkapita, kontribusi ekonomi yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan Cina dan rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik (Bank Dunia, 2019).

2) Pemanfaatan lahan perkotaan yang belum efisien dan pengendalian ruang yang kurang efektif telah mendorong laju urbanisasi lebih tinggi di pinggiran kota yang menyebabkan permukiman tumbuh menyerak dan keluar dari control.

3) Ketersediaan dan akses layanan perkotaan berupa rumah layak huni, layanan air minum, sanitasi, dan infrastruktur perkotaan masih terbatas, sementara pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, serta sarana pendidikan dan kesehatan belum inklusif dan memadai.

4) Pembangunan dan penyediaan infrastruktur khusus di wilayah metropolitan belum merata, memiliki kualitas yang terbatas, serta tidak terintegrasi secara kewilayahan.

5) Rendahnya kesempatan kerja, penanganan sektor ekonomi informal yang belum optimal, serta tingginya kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kriminalitas masih menjadi tantangan utama perkotaan pada bidang sosial-ekonomi.

6) Tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan yang semakin tinggi di perkotaan, ditambah dengan rendahnya ketangguhan perkotaan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, menciptakan tantangan besar bagi keberlanjutan hidup di perkotaan.

7) Belum ada regulasi yang mengatur perkotaan secara terpadu, kurang dinamisnya kelembagaan, serta belum inovatifnya pembiayaan pengelolaan perkotaan untuk mengatasi kompleksitas perkotaan di 2045.

8) Tingginya konsentrasi penduduk Indonesia di Pulau Jawa (sebesar 56,10 persen) utamanya di Wilayah Metropolitan Jakarta menyebabkan beban Jakarta dan daerah sekitarnya meningkat, sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan peningkatan dampak kerugian ekonomi.

Terdapat isu pada RPJMN 2025-2029 dalam Arah Pembangunan Wilayah Jawa. Berikut ini merupakan sejumlah isu Wilayah Jawa dalam pembangunan jangka menengah nasional yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2025-2029:

1) Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, dibuktikan dengan rata-rata nilai Metropolitan Performance Index di Pulau Jawa masih berada di bawah 50 persen.

2) Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah (industri di Jawa masih memiliki rasio robot density 5:10.000, bandingkan dengan Malaysia 55:10.000 dan Korea Selatan 1.000:10.000).

3) Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan.

4) Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa.

5) Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan-industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri, dengan tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023 masing-masing sebesar 9,31 persen dan 8,15 persen.

6) Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Jawa mencapai 20 persen (2023).
7) Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk.
8) Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11 persen (2023). Program pengurangan kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi pemberdayaan ekonomi pada daerah kantong-kantong kemiskinan tinggi.

2.9.2.4. Isu Regional Provinsi Banten

Isu dalam konstelasi regional yang akan memengaruhi arah pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan adalah isu pembangunan Provinsi Banten, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang Belum Berkualitas

Kualitas sumber daya manusia dibentuk dari berbagai aspek, beberapa diantaranya adalah aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek perlindungan sosial. Momentum bonus demografi Provinsi Banten menjadi titik penting dalam mengakselerasi pembangunan. Maka dari itu diperlukan strategi khusus untuk memanfaatkan momentum ini secara optimal hingga akhirnya berdampak sebesar-besarnya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Pembangunan Ekonomi yang Belum Optimal

Perekonomian yang baik dapat dilihat dari meratanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang merata terbentuk dari optimalnya pengelolaan sektor-sektor unggulan serta inovasi dan investasi yang kuat. Di Provinsi Banten, hal-hal tersebut dinilai belum optimal karena pertumbuhan ekonomi daerah utara dan selatan masih belum sama, sektor-sektor unggulan belum dikelola secara maksimal, dan inovasi yang mendorong investasi masih perlu ditingkatkan.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Tata kelola pemerintah merupakan isu yang penting dalam harmonisasi hubungan antar pemerintah dan kelembagaan. Tata kelola pemerintah yang belum optimal dapat menjadi kendala utama dalam penyediaan layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan tata kelola pemerintah Banten antara lain indeks persepsi anti korupsi yang rendah yang menghambat implementasi kebijakan pelayanan publik. Selain itu, tantangan tata kelola pemerintah Banten adalah pengelolaan keuangan daerah dan kapasitas fiskal daerah yang masih perlu perbaikan. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) merupakan ukuran kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah yang dihitung dengan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. DDF Provinsi Banten berada dalam kategori “baik”, tetapi dalam 10 tahun terakhir DDF Banten fluktuatif dan cenderung menurun.

4. Manajemen Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Belum Optimal

Kondisi Lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa aspek, beberapa diantaranya adalah aspek daya dukung, kualitas, dan ancaman bencana. Kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten dilihat dari aspek daya dukungnya dinilai belum dikelola dengan optimal, dari aspek kualitasnya juga dinilai belum optimal, dan dari aspek kebencanaannya memiliki risiko bencana yang masih tinggi.

2.9.2.5. Isu Strategis dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Isu dalam konstelasi regional berikutnya yang juga akan memengaruhi arah pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan adalah isu pembangunan jangka panjang di Kota Tangerang Selatan 2025-2045. Isu strategis RPJPD Kota Tangerang Selatan 2025-2045 yang perlu disintesis dan diintegrasikan ke dalam isu strategis jangka menengah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. **Kualitas SDM yang sehat, cerdas, adaptif teknologi dan berdaya saing global**

Di era globalisasi dan pesatnya perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM sesuai tuntutan zaman akan mendorong keberhasilan dalam berbagai aspek pembangunan. Di masa depan, dunia akan menghadapi perubahan yang jauh lebih cepat daripada yang pernah dialami sebelumnya, terutama dipicu oleh megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Perubahan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, dan daerah untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul. Situasi ini akan dapat jauh lebih menantang dengan semakin berkembangnya teknologi yang dalam beberapa hal, dapat menggantikan peran manusia. Oleh karena itu, peningkatan daya saing menjadi keniscayaan bagi Kota Tangerang Selatan. Hanya melalui tenaga kerja yang berdaya saing maka bonus demografi dapat benar-benar menjadi bonus.

2. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis riset yang maju, tangguh dan berkeadilan**

Pada tahun 2045, Indonesia menargetkan posisinya sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Profil Indonesia 2045 menjadi peta jalan (*roadmap*) yang harus diejawantahkan oleh seluruh daerah termasuk Kota Tangerang Selatan. Pemerintah daerah secara konsisten mendayagunakan seluruh sumberdayanya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Transformasi ekonomi dapat diwujudkan dengan sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Kota Tangerang Selatan bersama Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

3. **Tata kelola yang profesional, inovatif dan kolaboratif**

Tata kelola diperlukan dalam rangka agar Pemerintah Daerah bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola yang efektif, kebijakan yang transparan, dan administrasi publik yang responsif memainkan peran penting dalam mendukung kemajuan daerah. Belum optimalnya implementasi manajemen aparatur sipil negara, reformasi akuntabilitas kinerja dan belum optimalnya penataan kelembagaan serta proses bisnis untuk transformasi pelayanan publik merupakan kondisi atau hal yang ke depannya menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan

ke depan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pada akhirnya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, profesional, transparan, dan bertanggungjawab adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas pemerintahan daerah yang bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.

4. Penyediaan infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang mendukung kenyamanan dan produktivitas

Optimalisasi penataan ruang dan sistem permukiman yang berkeadilan dan berkelanjutan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dalam hal ini terjadinya *gated community* harus mulai diantisipasi agar tidak terus meningkat ke depannya. Sistem permukiman yang berkeadilan dan berkelanjutan harus diwujudkan terutama melalui integrasi kawasan-kawasan permukiman di mana fasilitas dan infrastruktur yang saat ini hanya bisa diakses dan dimanfaatkan oleh penghuni perumahan harus mulai diserahkan pengelolaannya ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan sehingga fasilitas dan infrastruktur tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Selain pemerataan standarisasi dan integrasi infrastruktur, hal lain yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya kinerja *smart city* terutama dalam memantau kebutuhan infrastruktur berdasarkan pola mobilitas penduduk. Ke depan pemanfaatan teknologi digital ini akan sangat penting. Bahkan juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan kota. Teknologi digital akan mempermudah, mempercepat, dan meringankan kinerja pelayanan serta akan meningkatkan kapasitas infrastruktur baik itu infrastruktur dasar maupun infrastruktur ekonomi. *Smart city* juga diharapkan mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan perkotaan.

5. Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi

Wilayah perkotaan ke depan dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Isu lingkungan hidup dan perubahan iklim merupakan bagian penting yang perlu diantisipasi. Laju pembangunan kota terus didorong guna mencapai target pertumbuhan, menjadikan wilayah Kota Tangerang Selatan memiliki posisi strategis terhadap wilayah di sekitarnya, khususnya hub ekonomi bagi Jakarta. Dalam perkembangan skala kawasan, kawasan megaurban Jakarta-Bandung diprediksi akan berkembang pesat di masa mendatang. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi tersebut, maka perkembangan kota ke depan akan semakin beragam dan berkembang pesat. Hal ini tentu perlu diantisipasi dengan terus mendorong penataan lingkungan wilayah perkotaan yang selaras dengan menghadirkan karakter lingkungan perkotaan yang sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pelaksanaan setiap program pembangunan yang dilakukan di daerah perlu dengan cermat memperhitungkan perkiraan dampak serta risiko lingkungan

6. Hunian modern dan nyaman bagi kawasan Megapolitan Jabodetabek

Dalam konstelasi ruang megapolitan Jabodetabek, Kota Tangerang Selatan menjadi tempat yang menarik menjadi kawasan permukiman kelas menengah atas dibandingkan dengan kota-kota satelit yang lainnya. Hal ini karena kedekatannya dengan Jakarta sebagai tempat aktivitas bekerja dan berusaha, sehingga penghuni kawasan-kawasan permukiman di Kota Tangerang Selatan dapat dengan mudah melaju dari rumah ke kantor. Ke

depan segregasi sosial ini perlu diatasi agar Kota Tangerang Selatan dapat bertransformasi menjadi kota hunian yang nyaman dan berkelanjutan. Peran Kota Tangerang Selatan sebagai penyangga Jakarta dalam konteks hunian akan menjadi semakin penting. Penataan ruang permukiman menjadi kunci untuk menghadapi peningkatan kepadatan penduduk yang semakin tinggi. Studi terkait daya dukung dan daya tampung perlu dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keberlanjutan Kota Tangerang Selatan sebagai kota hunian. Selain itu pemanfaatan teknologi dan pengembangan inovasi juga menjadi penting untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan. Integrasi infrastruktur abu-abu (*grey infrastructure*) dan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) dapat menjadi terobosan untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan menjadi kota hunian yang modern dan berkelanjutan. Di kota-kota pada negara maju, hal ini sudah banyak dilakukan dengan pendekatan yang dinamakan dengan NBS (*Nature Based Solutions*).

2.9.2.6. Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025- 2029

Negara-negara di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah berkomitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai 8 *Millenium Development Goals* (MDGs) (hingga tahun 2015) dan dilanjutkan 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2030. Seluruh komponen negara, tidak terkecuali seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus berkontribusi dalam pencapaian SDGs di daerahnya masing-masing. KLHS RPJMD Kota Tangerang Selatan menganalisis pencapaian indikator TPB hingga tahun 2023. Hasil kajian tersebut menghasilkan tiga isu Pembangunan Berkelanjutan paling prioritas yang perlu diakomodir dalam dokumen RPJMD sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.156**.

Tabel II.156. Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Prioritas dan Justifikasi Pendukungnya pada KLHS RPJMD 2025-2029

No	Isu PB Paling Strategis	Justifikasi Pendukung terhadap Isu Paling Strategis
1	Pemenuhan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang Sesuai Standar Belum Optimal	Permasalahan yang dihadapi terkait Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman adalah seluruh Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman belum terintegrasi sesuai kebutuhan masyarakat, antara lain belum terintegrasinya antara jaringan jalan, fasilitas perparkiran dengan sistem transportasi menyebabkan terjadinya kemacetan. Sistem drainase yang belum terintegrasi dengan sistem jaringan SDA menyebabkan Kota Tangerang Selatan mengalami genangan bahkan banjir. Terkait dengan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah yaitu masih adanya rumah tangga yang belum terlayani SPALD dan SPAM jaringan perpipaan menggambarkan bahwa belum semua rumah tangga di Kota Tangerang Selatan mengakses sanitasi dan air minum yang aman. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian karena pelayanan air limbah dan air minum perpipaan merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi. Dalam rangka menjaga konservasi air tanah. Ditinjau dari standar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan sehat, masih adanya Rumah Umum Tidak Layak Huni

No	Isu PB Paling Strategis	Justifikasi Pendukung terhadap Isu Paling Strategis
		menggambarkan bahwa masih adanya perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kota Tangerang Selatan yang perlu diintervensi. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian PSU perumahan dan kawasan permukiman yang harus disediakan sesuai standar. Keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan menjadi RTH publik dan tingginya harga lahan merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam penyediaan RTH publik sesuai standar di Kota Tangerang Selatan.
2	Penanganan kualitas lingkungan hidup belum optimal	Belum optimalnya pengurangan sampah dan daur ulang sampah, serta besarnya timbulan sampah yang dibuang ke TPA Cipeucang menjadikan TPA Cipeucang yang lahannya terbatas menjadi penuh, sehingga kinerja pengolahan sampah terkendala. Dalam analisis D3TLH disampaikan kecenderungan ketersediaan air di Kota Tangerang Selatan semakin hari semakin menurun, Untuk daya dukung pangan, jika mengacu pada selisih ketersediaan dan kebutuhan menunjukkan defisit pangan. Dengan demikian, perlunya memaksimalkan ketersediaan logistik pangan dari daerah lain untuk memastikan kecukupan pangan di Kota Tangerang Selatan, mengingat Kota Tangerang Selatan bukan daerah penghasil komoditi pangan. Dalam Laporan Kualitas Udara Dunia Tahunan ke-6 yang dirilis oleh perusahaan teknologi kualitas udara asal Swiss, IQAir. Tangerang Selatan menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia sepanjang 2023, lebih buruk dari Jakarta hingga Palembang. Adapun hasil analisis AQMS dan Data Satelit, Konsentrasi NO2 yang lebih tinggi terlihat di wilayah-wilayah dengan lalu lintas kendaraan yang tinggi dan aktivitas perkotaan yang padat. Ditinjau dari kinerja jasa lingkungan di Kota Tangerang Selatan yang dianalisis berdasarkan basis data tahun 2018, menunjukkan bahwa kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air, kondisi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia pangan, kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air, kinerja jasa lingkungan pengaturan kualitas udara, kinerja jasa lingkungan pengaturan perlindungan banjir, dan kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan iklim berkategori rendah.
3	Ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim belum optimal	Ketahanan daerah Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi potensi bencana, berada pada kategori sedang. Ditinjau dari aspek kerentanan, Kota Tangerang Selatan sangat rentan terhadap bencana gempa bumi, banjir, kekeringan, kebakaran gedung dan permukiman, epidemi dan wabah penyakit, kegagalan teknologi, konflik sosial, dan pandemi Covid-19, di mana potensi penduduk yang akan terpapar dalam kategori tinggi. Pengembangan sistem pemulihan bencana dan secara keseluruhan wilayah Kota Tangerang Selatan dalam kategori rendah. Selama periode 2005-2018 telah terjadi kenaikan suhu permukaan lahan sebagai akibat dari perubahan tutupan vegetasi, dengan peningkatan rata-rata suhu permukaan sekitar 0,4 - 0,70°C setiap tahunnya.

2.9.2.7. Isu Strategis Daerah Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan identifikasi isu-isu global, nasional, regional, RPJMD Kota Tangerang Selatan dan isu berdasarkan KLHS serta potensi/modalitas yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan, maka dirumuskan isu strategis daerah yang disajikan dalam **Tabel II.157**.

Tabel II.157. Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Modalitas	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Provinsi Banten Tahun 2025-2045	Isu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045	KLHS RPJMD 2025-2029	Isu RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Pembangunan SDM di Kota Tangerang Selatan Berkategori Sangat Tinggi	Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera	1. Polarisasi sosial 2. Dampak Buruk AI	1. Masalah Sosial-Ekonomi di Masyarakat Perkotaan 2. *Aging Population* Negara Maju	1. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Penanggulangan kemiskinan 3. Penanggulangan pengangguran terintegrasi	Kualitas SDM yang sehat, cerdas, adaptif teknologi dan berdaya saing global		1. Peningkatan kualitas SDM yang unggul, produktif dan berdaya saing global 2. Pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan yang inklusif 3. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
Posisi strategis Tangerang Selatan dalam konstelasi regional dan Kawasan aglomerasi Jabodetabek	Belum optimalnya pembangunan kewilayahan yang inklusif, terintegrasi, berketahanan sosial, budaya dan ekologi	*Involuntary* migrasi	Pemenuhan Layanan Perkotaan yang Belum Memadai dan Inklusif	Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan	Penyediaan infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang mendukung kenyamanan dan produktivitas	Pemenuhan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang Sesuai Standar Belum Optimal	Pengembangan transportasi publik dan pengelolaan sampah secara terpadu dalam konstelasi Kawasan Aglomerasi
			Pola Pembangunan Perkotaan yang Menyerak		Hunian modern bagi kawasan megapolitan Jabodetabek		Penyediaan prasarana, sarana dan layanan perkotaan yang berkualitas, terintegrasi dan inklusif
		1. Polusi 2. Cuaca Ekstrem		Penguatan kelestarian	Peningkatan ketahanan	Penanganan kualitas lingkungan	Pembangunan perkotaan yang

Modalitas	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Provinsi Banten Tahun 2025-2045	Isu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045	KLHS RPJMD 2025-2029	Isu RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
		3. Perubahan kritikal ekosistem 4. Hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem *5.* krisis SDA	1. Penerapan standar *Suistainability* yang tinggi di level global 2. Degradasi Lingkungan Perkotaan dan Rendahnya Ketangguhan Bencana	lingkungan dan mitigasi potensi bencana	sosial, budaya dan ekologi	hidup belum optimal Ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim belum optimal	berkelanjutan dan berketahanan
	Belum optimalnya reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola yang profesional, inovatif, dan berintegritas	1. Keamanan *cyber* 2. Misinformasi dan disinformasi	1. Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral 2. Tata Kelola yang Belum Profesional, Inovatif, dan Kolaboratif	Pemantapan reformasi birokrasi yang bersih dan melayani	Tata kelola yang profesional, inovatif dan kolaboratif		Tata kelola yang profesional, inovatif dan kolaboratif disertai pengembangan *science/evidence-based policy*
Potensi Ekonomi Daerah dalam kategori Cepat Maju dan Tumbuh Pesat	Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi		1. Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian nasional 2. Transisi energi untuk pemerataan	Peningkatan produktivitas ekonomi wilayah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis riset yang maju, tangguh dan berkeadilan;		Penguatan daya saing pariwisata berbasis potensi kesehatan (*health tourism*), ritel, budaya, dan MICE Peningkatan produktivitas UMKM dan sektor ekonomi kreatif berbasis riset dan inovasi Penataan sektor ekonomi informal

Rumusan isu strategis daerah berdasarkan penapisan dalam **Tabel II.157** dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang unggul, produktif dan berdaya saing global

Pesatnya perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, menuntut sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM sesuai tuntutan zaman akan mendorong keberhasilan dalam berbagai aspek pembangunan. Di masa depan, dunia akan menghadapi perubahan yang jauh lebih cepat daripada yang pernah dialami sebelumnya, terutama dipicu oleh megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Perubahan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, dan daerah untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul.

Kota Tangerang Selatan masih mengalami bonus demografi hingga tahun 2045, yang dicirikan dengan nilai rasio ketergantungan (*dependency ratio*) di bawah 66. Bonus demografi memiliki periode waktu (*window of opportunity*) yang terbatas sehingga perlu manfaatkan secara optimal. Situasi bonus demografi dapat memberikan dampak yang positif khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Tetapi, bonus ini tidak serta merta langsung berwujud pada manfaat riil yang diterima melainkan membutuhkan upaya sehingga bonus ini dapat benar-benar berbuah positif seperti pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Bous demografi perlu dikapitalisasi untuk dapat meraih manfaat yang ditawarkannya (Chen et al. 2023).

Fase-fase dalam kerangka bonus demografi penting untuk diidentifikasi karena masing-masing fase membutuhkan kebijakan yang tepat guna dapat merealisasikan secara maksimal manfaat positif yang ditawarkan oleh bonus demografi. Seberapa jauh daerah dapat memanfaatkan bonus demografi akan sangat ditentukan oleh kebijakan yang diterapkan (Chen et al., 2023). Menggunakan kerangka kerja *Demographic Dividend Framework* yang disusun oleh Cardona et al. (2020), terdapat enam sektor yang perlu diintervensi untuk dapat mengkapitalisasi bonus demografi meliputi 1) tata kelola dan kelembagaan ekonomi, 2) keluarga berencana, 3) kesehatan ibu dan anak, 4) pendidikan, 5) pemberdayaan perempuan, dan 6) ketenagakerjaan. Intervensi yang dilakukan hanya pada salah satu atau beberapa dari keenam sektor tersebut adalah perlu namun tidak cukup (*necessary but insufficient*) untuk dapat memaksimalkan potensi bonus demografi, melainkan membutuhkan intervensi multisektoral (Cardona et al., 2020). Masing-masing sektor tersebut kemudian dilengkapi dengan program dan intervensi spesifik yang dibutuhkan sehingga *Demographic Dividend Framework* tersebut dapat memberikan panduan kebijakan hingga ke level yang detail.

Pada sektor pendidikan, Kota Tangerang Selatan telah menunjukkan kinerja yang cukup baik namun juga masih memiliki sejumlah tantangan. Kota Tangerang Selatan memiliki persoalan tingkat pendidikan penduduk usia produktif yang didominasi oleh penduduk berpendidikan menengah atas. Tingkat pendidikan SMA sederajat yang ditamatkan pada berbagai generasi menunjukkan angka sebesar 54,32% pada generasi milenial, 40,56% pada Generasi X, dan 30,41% pada *Baby Boomer* (BPS,2020). Terdapat korelasi antara pendidikan dan daya saing tenaga kerja. Pencari kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar tenaga kerja karena tingkat pendidikan

yang lebih tinggi sering kali dikaitkan dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja. Pendidikan yang lebih tinggi juga dapat membuka peluang kerja yang lebih baik dan memberikan akses ke jaringan profesional yang lebih luas. Situasi ini terkait peningkatan kualitas SDM di Kota Tangerang Selatan akan dapat jauh lebih menantang dengan semakin berkembangnya teknologi yang dalam beberapa hal dapat menggantikan peran manusia.

Komposisi penduduk perempuan yang jumlahnya berimbang dengan penduduk laki-laki sementara kinerja pemberdayaan gender pada tahun 2024 mengalami penurunan mengamanatkan perlunya upaya yang lebih tepat sasaran dan komprehensif terutama dalam pelibatan perempuan dalam kepemimpinan dan sumber-sumber ekonomi strategis. sehingga kualitas SDM perempuan di Kota Tangerang Selatan juga dapat berdaya saing global seperti halnya laki-laki.

2. Pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan yang inklusif

Pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan di Kota Tangerang Selatan menghadapi tantangan berkaitan dengan struktur demografi selama kurun tahun 2025-2029, di mana pada kurun waktu tersebut, walaupun Kota Tangerang Selatan masih memiliki bonus demografi, namun juga terjadi peningkatan penduduk usia lanjut. Jika pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan tidak diupayakan secara inklusif maka dapat memperdalam jurang kemiskinan.

Dengan bonus demografi yang masih terjadi di Kota Tangerang Selatan, perluasan akses terhadap pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi, akses kesehatan dan akses terhadap lapangan kerja formal sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas SDM. Selain itu, program pemberdayaan berbasis keahlian digital dan kewirausahaan bagi generasi muda, juga diperlukan sehingga potensi bonus demografi dapat terkonversi menjadi pertumbuhan inklusif.

Peningkatan populasi lansia membutuhkan sistem jaminan kesehatan dan pensiun yang memadai, sehingga lansia tidak bergantung pada keluarga atau pekerjaan informal tanpa perlindungan sosial. Beban ganda muncul ketika generasi produktif harus menanggung kebutuhan lansia sekaligus anak-anak, memperparah kemiskinan antar-generasi.

3. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja

Kota Tangerang Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar, didukung oleh lokasi strategis di kawasan metropolitan Jakarta dan struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif. Rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja menjadi tantangan utama dalam mendorong produktivitas daerah yang berkelanjutan. Selain itu, ketidaksesuaian (*mismatch*) antara keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan industri, serta kurangnya inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga akan menambah hambatan pertumbuhan ekonomi, memperlebar ketimpangan, dan mengurangi daya saing daerah di tingkat nasional maupun global. Diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan semua pihak (Pemerintah Daerah, sektor privat, dan masyarakat) untuk dapat mentransformasi bonus demografi menjadi SDM unggul yang mendorong pertumbuhan inklusif. Langkah konkret seperti pelatihan berbasis teknologi (*Digital Upskill Programme*), sertifikasi kompetensi, pemberdayaan kelompok rentan (perempuan dan disabilitas) dan kolaborasi industri-pendidikan akan mempercepat terciptanya lapangan kerja berkualitas sekaligus menguatkan fondasi ekonomi daerah di masa depan.

4. Pengembangan transportasi publik dan pengelolaan sampah secara terpadu dalam konstelasi Kawasan Aglomerasi

Laju pembangunan kota terus didorong guna mencapai target pertumbuhan, menjadikan wilayah Kota Tangerang Selatan memiliki posisi strategis terhadap wilayah di sekitarnya, khususnya hub ekonomi bagi Jakarta. Dalam perkembangan skala Kawasan aglomerasi Jabodetabek akan semakin berkembang pesat di masa mendatang. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi tersebut, maka perkembangan kota ke depan akan semakin beragam dan berkembang pesat. Upaya-upaya untuk mendorong penyediaan infrastruktur yang dapat meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi antar wilayah akan mendorong terus melesatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Penyediaan infrastruktur konektivitas yang paling strategis adalah penyediaan transportasi publik yang terintegrasi dan inklusif. Penyediaan transportasi publik yang terintegrasi dan inklusif membawa berbagai manfaat bagi masyarakat dan kota secara keseluruhan, yaitu:

a. Kemudahan Akses dan Mobilitas: Dengan transportasi publik yang terintegrasi, perjalanan menjadi lebih mudah dan efisien karena pengguna dapat berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya dengan mudah, tanpa perlu berpindah kendaraan secara berulang-ulang. Ini juga mempermudah mobilitas bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau;

b. Pengurangan kemacetan lalu lintas: Sistem Transportasi yang baik dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan pada akhirnya mengurangi kemacetan lalu lintas. Hal ini berkontribusi pada perjalanan yang lebih cepat dan lebih nyaman bagi semua pengguna jalan;

c. Efisiensi biaya: Transportasi publik yang terintegrasi dan inklusif biasanya lebih ekonomis dibandingkan dengan memiliki dan mengoperasikan kendaraan pribadi. Ini menguntungkan terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang mungkin sulit untuk membeli dan memelihara kendaraan pribadi;

d. Lingkungan yang lebih bersih: Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Transportasi publik yang ramah lingkungan, seperti bus listrik atau kereta api yang menggunakan energi terbarukan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;

e. Keadilan sosial: Sistem transportasi inklusif memastikan bahwa semua lapisan masyarkat termasuk penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya memiliki akses yang sama terhadap transportasi. Hal ini mendukung kesetaraan sosial dan memungkinkan semua orang untuk mengakses peluang pekerjaan, pendidikan dan layanan kesehatan;

f. Pengembangan ekonomi: Sistem transportasi yang baik medukung pengembangan ekonomi dengan meningkatkan akses ke pusat-pusat bisnis, pasar dan area komersil. Hal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja;

g. Keamanan dan kenyamanan: Transportasi publik yang dirancang dengan baik biasanya lebih aman daripada perjalanan dengan kendaraan pribadi, terutama jika dilengkapi dengan fitur keamanan seperti pencahayaan yang baik, pemantauan video, dan perugas keamanan. Hal ini juga mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

Persoalan perkotaan lainnya yang menjadi isu di Kota Tangerang Selatan adalah penanganan dan pengelolaan persampahan. Persampahan yang dihadapi Kota Tangerang Selatan adalah jumlah timbunan sampah yang terus meningkat, sementara kapasitas tampung TPA Cipeucang terbatas.. Upaya peningkatan optimalisasi TPS3R dan Bank sampah perkotaan serta program pemberdayaan pengelolaan sampah merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dimasa mendatang. Mengingat lahan di Kota Tangerang Selatan sangat terbatas, maka kerja sama dengan wilayah sekitarnya secara terpadu dalam pengelolaan sampah merupakan upaya strategis dalam jangka menengah sampai dengan beroperasinya PLTSA di Kota Tangerang Selatan.

5. Penyediaan prasarana, sarana dan layanan perkotaan yang berkualitas, terintegrasi dan inklusif

Optimalisasi penataan ruang dan sistem permukiman yang berkeadilan dan berkelanjutan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dalam hal terjadinya *gated community* harus mulai diantisipasi agar tidak terus meningkat ke depannya. Sistem permukiman yang berkeadilan dan berkelanjutan harus diwujudkan terutama melalui integrasi kawasan-kawasan permukiman di mana fasilitas dan infrastruktur yang saat ini hanya bisa diakses dan dimanfaatkan oleh penghuni perumahan tertentu harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan.

Integrasi prasarana dan sarana perkotaan, termasuk pengelolaannya menjadi penting agar tidak terjadi segregasi sosial yang mengancam keberlanjutan. Ketimpangan akses terhadap fasilitas dan infrastruktur publik akan dapat memicu konflik sosial yang akan mengancam keberlanjutan. Dalam hal ini integrasi kawasan diharapkan dapat menciptakan keadilan, karena pada prinsipnya tidak boleh ada diskriminasi dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur.

Dengan kondisi lahan yang terbatas, maka struktur ruang yang kompak menjadi salah satu strategi yang harus diupayakan. Sayangnya, tidak meratanya kualitas infrastruktur yang ada saat ini di Kota Tangerang Selatan menghambat aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi sehingga struktur ruang kota menjadi timpang dan terfragmentasi. Beban kawasan dengan infrastruktur dasar dan ekonomi yang berkualitas akan semakin tinggi karena terjadi penumpukan aktivitas di kawasan tersebut. Hal ini tentunya akan mengurangi kenyamanan dan sekaligus akan mengurangi produktivitas.

Upaya-upaya untuk peningkatan kualitas dan integrasi infrastruktur dan layanan perkotaan sebagai modal dasar pembangunan kota perlu didorong dalam jangka menengah ini. Diperlukan pengaturan dan pengelolaan yang lebih baik agar infrastruktur dan layanan perkotaan juga dapat diakses oleh semua warga sesuai dengan kapasitasnya

6. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berketahanan

Wilayah perkotaan ke depan dihadapkan pada tantangan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang terus menurun. Hal ini tentu perlu diantisipasi melalui pembangunan dan penataan perkotaan yang menghadirkan karakter lingkungan perkotaan yang sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pelaksanaan setiap program pembangunan yang dilakukan dengan cermat memperhitungkan perkiraan dampak serta risiko lingkungan.

Ketahanan pangan, bencana serta perubahan iklim menjadi landasan yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan. Dari sisi ketahanan pangan, Kota Tangerang Selatan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dalam hal penyediaan pangan karena mengandalkan hampir seluruh pasokan pangannya dari luar kota. Ketergantungan pangan yang tinggi pada pasokan dari luar wilayah dapat membuat Kota Tangerang Selatan rentan terhadap berbagai gangguan dalam rantai pasokan, seperti bencana alam atau masalah logistik. Oleh karena itu, Kota Tangerang Selatan perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan membangun dan menguatkan kerja sama antar daerah terutama dengan daerah produsen pangan.

Kota tangguh bencana dan perubahan iklim menjadi salah satu upaya besar Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim. Tantangan global yang menjadi perhatian dunia adalah dinamika perubahan iklim semakin besar ke depan, sementara aktivitas masyarakat dalam penggunaan energi dari fosil juga belum dapat dikurangi secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Alston dan Whittenbury (2013), memperkirakan akan adanya krisis bencana alam dari perubahan iklim yang tidak terkendali, di mana pada tahun 2030, variabilitas iklim akan mengancam ketahanan pangan dan kebutuhan air karena pada saat itu populasi dunia sudah menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan mencapai 50% lebih besar dari kondisi saat ini, 45% lebih banyak energi yang dibutuhkan dan 30% lebih banyak air bersih yang dibutuhkan. Dengan gambaran saat ini di mana kesiapsiagaan sebagian besar wilayah di Kota Tangerang Selatan masih rendah untuk menghadapi bencana dan perubahan iklim, maka isu terkait peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi sangat penting dalam rencana pembangunan daerah jangka menengah.

Mengingat ketergantungan Kota Tangerang Selatan pada energi listrik yang sangat tinggi (mencapai 100 persen, BPS Provinsi Banten, 2021), maka pengembangan kota di masa mendatang perlu mengedepankan penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, tantangan terberat dalam implementasinya adalah mencari terobosan atau inovasi untuk bertransformasi atau ber-transisi dari penggunaan energi fosil menjadi energi bersumber dari alam yang bersifat regeneratif.

7. Tata kelola yang profesional, inovatif dan kolaboratif disertai pengembangan *science/evidence-based policy*

Tata kelola diperlukan agar Pemerintah Daerah bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola yang efektif, kebijakan yang transparan, dan administrasi publik yang responsif memainkan peran penting dalam mendukung kemajuan daerah. Tata kelola tersebut masih menjadi kendala utama di Kota Tangerang Selatan dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Belum optimalnya implementasi manajemen sistem merit bagi aparatur sipil negara, reformasi akuntabilitas kinerja dan belum optimalnya penataan kelembagaan serta proses bisnis untuk transformasi pelayanan publik merupakan kondisi atau hal yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan perlu berinovasi guna beradaptasi dengan kompleksitas permasalahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Sebagai sebuah organisasi publik sangat membutuhkan sistem birokrasi yang efektif dan efisien sehingga roda organisasi dapat bergerak dengan cepat dan taktis secara komprehensif

dengan tujuan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Sistem birokrasi yang baik tidak memiliki format baku yang tetap, sehingga pemerintah dituntut agar terus melakukan perubahan-perubahan positif guna menyesuaikan dinamika perubahan di masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.

Perkembangan teknologi saat ini dan ke depan berdampak besar terhadap cara kerja pemerintahan. Teknologi membuka peluang baru dalam transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumberdaya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan akan mengubah interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Digitalisasi pemerintahan menghadapi tantangan terkait dengan tata kelola keamanan, keterpaduan data dan informasi serta belum meratanya literasi digital. Kompleksitas digitalisasi semakin dirasakan terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan. Memanfaatkan potensi dan keberadaan berbagai perguruan tinggi, lembaga kajian, swasta dan para profesional yang ada di Kota Tangerang Selatan menjadi modal tersendiri bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat melakukan kerja sama untuk menjawab dan beradaptasi terhadap tantangan ke depan. Kerja sama multihelix ini akan membantu dan memperingan kerja-kerja pemerintahan ke depan dalam menjawab tantangan ke depan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang.

8. Penguatan daya saing pariwisata berbasis potensi kesehatan (*health tourism*), ritel, budaya, dan MICE

Kemudahan akses dari Kota Tangerang Selatan daerah lainnya menjadikan Kota Tangerang Selatan dipilih sebagai tujuan masyarakat khususnya Jabodetabek untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan penyelenggaraan berbagai acara *Meeting, Incentive, Convention,* dan *Exhibition* (MICE) serta perbelanjaan. Pangsa pasar MICE-*government* terutama dari Kementerian dan Lembaga Negara merupakan berkontribusi signifikan dalam kegiatan MICE di hotel-hotel di Kota Tangerang Selatan. *Health tourism* akan menjadi program prioritas pengembangan pariwisata di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan memiliki prasarana kesehatan yang cukup lengkap, baik yang memberikan layanan kesehatan medis, layanan perawatan estetika dan spa, sebagai potensi dalam penyelenggaraan *health tourism*

9. Peningkatan produktivitas UMKM dan sektor ekonomi kreatif berbasis riset dan inovasi

Nasional menargetkan pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US$23.000-30.300. Nasional mengarahkan transformasi ekonomi yang difokuskan pada peningkatan daya saing yang tinggi secara internasional dan berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan peran dalam *Global Value Chain*, penguasaan teknologi menengah dan tinggi. Jika transformasi yang dimaksud oleh Nasional menitikberatkan pada industrialisasi, maka dalam konteks Kota Tangerang Selatan akan bertransformasi menuju perdagangan dan jasa, UMKM dan Ekonomi Kreatif. Analisis terhadap struktur PDRB menunjukkan bahwa terdapat beberapa sektor lapangan usaha yang merupakan basis dengan kontribusinya yang cukup potensial dan berkembang terhadap PDRB namun belum berstatus prima sementara terdapat beberapa sektor lapangan usaha yang merupakan sektor prima penopang perekonomian Kota Tangerang Selatan diperkirakan akan

menurun kontribusinya karena daya dukung lahan yang terbatas. Untuk itu, Kota Tangerang Selatan perlu mempertimbangkan upaya cepat mempersiapkan shifting sektor ekonomi prima sebagai bentuk transformasi ekonomi, salah satunya dengan memperkuat kontribusi pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif.

Kemudahan akses dari Kota Tangerang Selatan daerah lainnya menjadikan Kota Tangerang Selatan dipilih sebagai tujuan masyarakat khususnya Jabodetabek untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan penyelenggaraan berbagai acara *Meeting, Incentive, Convention,* dan *Exhibition* (MICE) serta perbelanjaan. Pangsa pasar MICE-*government* terutama dari Kementerian dan Lembaga Negara merupakan berkontribusi signifikan dalam kegiatan MICE di hotel-hotel di Kota Tangerang Selatan. *Health tourism* akan menjadi program prioritas pengembangan pariwisata di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan memiliki prasarana kesehatan yang cukup lengkap, baik yang memberikan layanan kesehatan medis, layanan perawatan estetika dan spa, sebagai potensi dalam penyelenggaraan *health tourism*

10. Penataan sektor ekonomi informal

Penataan sektor ekonomi informal adalah proses yang bertujuan untuk mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan ekonomi yang sebelumnya tidak terdaftar atau tidak diatur ke dalam kerangka ekonomi formal. Sektor ekonomi informal sering kali mencakup usaha kecil, pekerjaan mandiri, dan aktivitas yang tidak terdaftar atau tidak diatur secara resmi. Penataan sektor ini penting dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, melindungi hak pekerja, dan memaksimalkan potensi kontribusi sektor ini terhadap perekonomian secara keseluruhan.

BAB III.
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi dan Misi

3.1.1. Visi

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai keadaan/ kondisi daerah yang diinginkan/ terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Walaupun Visi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan Visi Kepala Daerah terpilih, namun untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Daerah dalam konstelasi nasional dan regional maka Visi tersebut akan diselaraskan dengan Visi Nasional dan Provinsi Banten.

Adapun Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan terpilih yang ditetapkan oleh KPUD Kota Tangerang Selatan, yaitu:

1. Tangerang Selatan Unggul, Inklusif, Inovatif dan Kolaboratif Menuju Kota Lestari sebagai Visi Alternatif 1, dan
2. Tangerang Selatan Unggul dan Inovatif Menuju Kota Lestari sebagai Visi Alternatif 2.

Setelah melalui proses pembahasan dan penajaman bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan terpilih masa jabatan tahun 2025-2030, maka dipilih Visi pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"Tangerang Selatan Unggul, Inklusif, Inovatif, Kolaboratif Menuju Kota Lestari"

Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 tersebut merupakan bagian pencapaian Visi jangka panjang Kota Tangerang Selatan tahun 2045, yaitu "Hunian Nyaman, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan". Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 menggabungkan keunggulan kompetitif, prinsip inklusivitas, terobosan inovatif, dan semangat kolaborasi yang berorientasi pada masa depan untuk mencapai keberlanjutan kemajuan kota (*sustainability)*. Dengan pendekatan holistik tersebut, Kota Tangerang Selatan bertransformasi menjadi kota modern yang tetap memegang nilai kemanusiaan dan kelestarian lingkungan.

Adapun kata kunci yang terkandung pada rumusan visi tersebut beserta penjelasannya dijabarkan sebagai berikut:

1. Unggul, berkaitan dengan **Daya Saing, Berkualitas, Berprestasi**

   Kota Tangerang Selatan berkomitmen menjadi kota yang unggul dalam berbagai aspek, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Keunggulan ini tercermin dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing global melalui:

   a. Pendidikan dan pelatihan berstandar tinggi, peningkatan derajat kesehatan pada semua siklus kehidupan yang paripurna dan peningkatan kesejahteraan;
   b. Pembangunan ekonomi yang tumbuh pesat berbasis produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif yang didukung teknologi;
   c. Pencapaian prestasi di tingkat regional maupun nasional dalam tata kelola pemerintahan dan inovasi.

2. Inklusif, berkaitan dengan **Kesetaraan, Partisipatif, Ramah Difabel, Tanpa Diskriminasi**

   Sebagai kota yang inklusif, Tangerang Selatan menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Prinsip inklusivitas diwujudkan melalui:

   a. Kebijakan yang adil dan aksesibilitas fasilitas umum bagi semua kalangan;
   b. Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif);
   c. Program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial.

3. Inovatif, berkaitan dengan **Kreatif, Berbasis Teknologi, Solutif**

   Inovasi menjadi pendorong utama kemajuan Tangerang Selatan, dengan fokus pada:

   a. Penerapan *smart city* berbasis teknologi digital untuk efisiensi layanan publik;
   b. Pengembangan wirausaha kreatif dan startup lokal;
   c. Solusi berbasis riset untuk masalah perkotaan seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, transportasi dan pengelolaan sampah.

4. Kolaboratif, berkaitan dengan **Sinergi, Kemitraan, Gotong Royong**

   Kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi/perguruan tinggi, dan komunitas/masyarakat, media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM)/NGO dan tokoh masyarakat (tokoh agama/adat) adalah kunci keberhasilan pembangunan. Bentuk kolaborasi dapat meliputi:

   a. Kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dan pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing daerah;
   b. Program komunitas yang mendorong partisipasi warga, misalnya gerakan kebersihan, *urban farming*, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan kegiatan pemberdayaan sosial-ekonomi lokal;
   c. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk pengembangan inovasi, penelitian terapan, serta peningkatan kualitas SDM yang kompetitif;
   d. Kolaborasi dengan media massa dalam mendukung edukasi publik, kampanye pembangunan berkelanjutan, desiminasi capaian pembangunan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah;
   e. Kemitraan dengan LSM/NGO dalam pendampingan masyarakat, advokasi kebijakan publik, pemberdayaan kelompok rentan, serta penguatan agenda pembangunan berwawasan lingkungan, inklusi sosial, dan kesetaraan gender;
   f. Peran tokoh agama dan tokoh adat dalam menjaga kohesi sosial, memperkuat nilai budaya dan spiritual, serta menjadi agen perubahan dalam pembentukan perilaku masyarakat yang mendukung pembangunan;
   g. Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator utama yang menjamin tersedianya regulasi yang kondusif, penyediaan data terbuka (open data), serta ruang kolaborasi yang memungkinkan sinergi lintas sektor dapat berjalan optimal.

5. Menuju Kota Lestari, berkaitan dengan Berkelanjutan dan Resilien

   Visi ini menekankan pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan lingkungan dan kualitas hidup generasi mendatang melalui:

   a. Pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengendalian kerusakan lingkungan;
   b. Pengelolaan sampah terpadu dan penyediaan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan ruang publik untuk interaksi sosial;
   c. Perwujudan Kota yang berketahanan (resilien).

Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Banten, berupaya mendukung pencapaian Visi Provinsi yang juga secara bersama-sama berupaya untuk mendukung pencapaian Visi Nasional. Keterkaitan Visi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMN Tahun 2025-2029 dan Visi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, ditunjukkan pada **Gambar III.1**.



Gambar III.1. Keterkaitan Visi Kota Tangerang Selatan 2025-2029 dengan Visi Nasional 2025-2029 dan Visi Provinsi Banten 2025-2029

Gambar III.1 menunjukkan bahwa, kata kunci Unggul pada Visi RPJMD Kota Tangerang Selatan telah selaras dengan kata kunci Maju, baik pada visi RPJMN maupun pada visi RPJMD Provinsi Banten. Kemudian kata kunci Inklusif telah selaras dengan kata kunci Bersama dan Indonesia Emas 2045 pada visi RPJMN, serta selaras dengan kata kunci Adil dan Merata pada visi RPJMD Provinsi Banten. Kata kunci Inovatif telah selaras dengan kata kunci Maju baik pada visi RPJMN maupun pada visi RPJMD Provinsi Banten. Selanjutnya kata kunci Kolaboratif telah selaras dengan kata kunci Bersama dan Indonesia Emas 2045 pada visi RPJMN, serta selaras dengan kata kunci Adil dan Tidak Korupsi pada visi RPJMD Provinsi Banten. Terakhir kata kunci Lestari telah selaras dengan kata kunci Indonesia Emas 2045 pada visi RPJMN, dan kata kunci Adil dan Tidak Korupsi pada visi RPJMD Provinsi Banten. Sementara itu, keterkaitan Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dengan Visi Nasional Tahun 2025-2029 dan Visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 digambarkan dalam **Gambar III.2.**



Gambar III.2. Keterkaitan Visi Kota Tangerang Selatan 2025-2029 dengan Visi Nasional 2025-2029 dan Visi Kota Tangerang Selatan 2025-2045

3.1.2. Misi

Misi Tahun 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi. Sama halnya seperti Visi, misi RPJMD harus selaras dengan misi Nasional dan Provinsi Banten. Adapun misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan terpilih masa jabatan tahun 2025-2030 yang ditetapkan oleh KPUD Kota Tangerang Selatan, terdiri dari 4 (empat) misi, yaitu:

Misi 1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Global;

Misi 2. Meningkatkan ekonomi lokal berbasis inovasi dan teknologi;

Misi 3. Membangun Birokrasi yang Profesional dan Kolaboratif, dan;

Misi 4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif, dan Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan terpilih masa jabatan tahun 2025-2030 serta hasil penyelarasan misi dengan kaidah-kaidah perencanaan pembangunan, maka dirumuskan Misi pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Berdaya Saing Global dan Sejahtera

Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) serta transformasi digital yang ditandai dengan Revolusi Industri 4.0 menuju Society 5.0, kualitas SDM menjadi faktor utama kemajuan daerah. Kota Tangerang Selatan sebagai kawasan urban yang dinamis, membutuhkan kebijakan sistematis untuk mentransformasi SDM agar mampu bersaing di tingkat global. Misi ini selaras dengan SDGs Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), Tujuan 5 (Kesetaraan Gender) dan Tujuan 8 (Pekerjaan Layak), dan Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan). Dengan pendekatan multisektoral dan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek pendidikan, kesehatan, teknologi, dan inklusi sosial, Kota Tangerang Selatan ditujukan

menghasilkan SDM kompeten sekaligus agen perubahan (*change-makers*) yang mampu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi

Perekonomian Kota Tangerang Selatan yang inklusif, berdaya saing, berkeadilan dan berkelanjutan menjadi kunci untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus pengurangan ketimpangan. Dalam perspektif ekonomi regional, pertumbuhan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan strategi yang memanfaatkan keunggulan komparatif (produk unggulan daerah, budaya, SDM) dan keunggulan kompetitif (nilai tambah, pasar ekspor). Misi ini selaras dengan SDGs Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan). Misi ini akan memadukan pendekatan *bottom-up* (berbasis potensi lokal) dan *top-down* (dukungan kebijakan dan teknologi) untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi, Kota Tangerang Selatan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga membangun ketahanan ekonomi jangka panjang untuk memperkuat daya saing daerah di era ekonomi digital.

Misi 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas

Reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola pemerintahan merupakan suatu kebutuhan dalam menghadapi tantangan kompleksitas pembangunan, tuntutan pelayanan publik yang efisien, dan dinamika perubahan global. Birokrasi yang profesional, inovatif, dan berintegritas menjadi prasyarat utama terciptanya *good governance* dan landasan dalam mencapai visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Misi ini selaras dengan SDGs Tujuan 9 (Industri, Inovasi, & Infrastruktur), Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan kolaboratif, Kota Tangerang Selatan diarahkan menjadi model penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas..

Misi 4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan

Dalam menghadapi tantangan urbanisasi yang pesat, perubahan iklim, serta kompleksitas masalah perkotaan, pembangunan kota yang berketahanan (resilien), terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan menjadi suatu kebutuhan di Kota Tangerang Selatan. Misi ini selaras dengan SDGs Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), Tujuan 9 (Industri, Inovasi, & Infrastruktur), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan). Membangun kota berketahanan, terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan memerlukan pendekatan transformatif yang holistik dan partisipatif. Dengan mengintegrasikan aspek ketahanan, keterpaduan, keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, Tangerang Selatan dapat menjadi model kota masa depan yang tangguh, manusiawi, dan berdaya saing global.

Penyelarasan misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dengan Asta Cita RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 disajikan dalam **Tabel III.1**.

Tabel III.1. Penyelarasan Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	**Misi RPJMN Tahun 2025-2029**	**Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029**	**Misi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045**
Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Berdaya Saing Global dan Sejahtera	PN 4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan **Pemberantasan Kemiskinan**	Misi 3, Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif	Misi 1 Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kretaif, sejahtera dan berdaya saing
Misi 2 Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, **Ekonomi Digital**, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru; PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk **Pertumbuhan Ekonomi**, **Pemerataan Ekonomi**, dan Pemberantasan Kemiskinan	Misi 2, Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial	Misi 2 Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas
Misi 3 Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas	PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Misi 1, Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila Dan Demokratis Berlandaskan Iman Dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, Dan Tangguh	Misi 3 Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah.

Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029	Misi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045
Misi 4 Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan	PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, **Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;** PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, **Ekonomi Digital**, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru; PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatal Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.	Misi 4, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas Misi 5, Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik Dan Resiliensi Terhadap Bencana	Misi 4 Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 diturunkan dari Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. serta telah mencakup beberapa prioritas pembangunan untuk mendukung Asta Cita. Sedangkan Sasaran RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Selanjutnya penjabaran Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran beserta targetnya, disajikan pada **Tabel III.2**. Target tujuan dan sasaran pada tahun 2030 merupakan target transisi untuk RPJMD Tahun 2030-2034.

Tabel III.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Unggul, Inklusif	**Misi 1. Meningkatkan Kualitas SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera**	**T1. Terwujudnya SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**84,16**	**84,42-84,68**	**84,54-84,82**	**85,20**	**85,80**	**86,18**	**86,50**	**86,18**
			S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11,86	12,04	12,19	12,34	12,49	12,64	12,79	12,64
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,70	15,12	15,35	15,58	15,81	16,04	16,27	16,04
				Kemampuan Literasi SD	Skor	67,17	69,67	72,17	74,67	77,17	79,67	82,17	79,67
				Kemampuan Literasi SMP	Skor	81,28	82,38	83,48	84,58	85,68	86,78	87,88	86,78
				Kemampuan Numerasi SD	Skor	57,30	60,20	63,10	66,00	68,90	71,80	74,70	71,80
				Kemampuan Numerasi SMP	Skor	69,61	71,11	72,61	74,11	75,61	77,11	78,61	77,11
			S2. Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,80	76,21	76,65	77,12	77,62	78,15	78,72	78,15

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			siklus kehidupan untuk semua										
			S3. Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial	Tingkat Kemiskinan	%	2,36	1,91-2,25	1,84-2,10	1,80-2,00	1,70-1,90	1,66-1,90	1,60-1,88	1,66-1,90
				Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	N/A	58,91	59,15	59,38	59,62	59,86	60,11	59,86
			S4. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,65	65,70	65,97	66,60	67,22	67,85	68,48	67,85
				Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,176	0,174	0,172	0,170	0,160	0,150	0,140	0,150
				Indeks Perlindungan Anak	Indeks	73,00	73,05	73,10	73,15	73,20	73,25	73,30	73,25
			S5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,86	55,96	56,00	56,30	56,50	56,80	57,00	56,80
			S6. Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	87,99	88,49	90,59	92,19	93,04	93,5	93,74	93,5
Unggul, Inklusif, Inovatif	**Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah,**	**T2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan berbasis**		**Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)**	**%**	**5,02**	**5,40-6,31**	**5,60-6,45**	**6,30-6,90**	**6,80-7,40**	**7,52-8,52**	**8,00-8,88**	**7,52-8,52**
				PDRB (ADHB) Per Kapita	**Juta Rp**	**80,18**	**86,03-87,82**	**91,59-95,99**	**98,00-103,00**	**108,00-110,00**	**110,00-115,08**	**115,00-120,00**	**110,00-115,08**
				Kontribusi PDRB terhadap Provinsi Banten	**%**	**12,84**	**13,01-13,08**	**13,10-13,15**	**13,05**	**12,95**	**12,30**	**12,20**	**12,30**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	inovasi dan teknologi	**potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi**		**Rasio Gini**	**Indeks**	**0,395**	**0,353-0,380**	**0,345-0,353**	**0,340-0,350**	**0,330-0,350**	**0,320-0,330**	**0,310-0,330**	**0,320-0,330**
				Tingkat Pengangguran Terbuka	**%**	**5,09**	**4,76-5,65**	**4,60-5,42**	**4,50-5,20**	**4,40-4,90**	**4,40-4,73**	**4,30-4,50**	**4,40-4,73**
			S1. Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	69,53	69,60	69,70	69,80	69,85	69,90	69,95	69,90
				Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,04	3,11	3,19	3,27	3,36	3,44	3,52	3,44
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	11,19	11,64	11,71	11,78	11,86	11,93	12,00	11,93
				Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	51,38	52,40	52,80	53,60	54,20	54,70	55,00	54,70
				Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,99	2,15	2,68	3,00	3,32	3,65	3,97	3,65
			S2. Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Juta Rp	121,42	127,96-129,10	135,12-137,42	142,95-146,48	151,43-156,34	160,58-166,98	170,41-178,47	160,58-166,98
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	58,13	60,50	61,46	61,97	62,47	62,98	63,48	62,98
			S3. Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	%	43,34	44,00	44,80	45,60	46,20	46,80	47,50	46,80
				Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Triliun Rp	8,48	8,70	9,39	10,42	11,98	14,60	17,97	14,60
Unggul, Inovatif,	**Misi 3. Mewujudkan**	**T3. Terwujudnya**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**85,61**	**86,50**	**87,50**	**88,50**	**89,50**	**90,50**	**91,50**	**90,50**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kolaboratif	**Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas**	**reformasi birokrasi dan tata kelola yang profesional, inovatif dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan**	S1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,25	4,25	4,26	4,27	4,28	4,29	4,30	4,29
			S2. Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	49,82	49,87	49,92	49,97	50,02	50,07	50,12	50,07
				Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	65,45	66,36	67,09	67,82	68,54	69,27	70	69,27
			S3. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel, transparan dan efisien	Nilai SAKIP	Nilai	69,06	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	78,00
				Jumlah kerja sama antar Pemerintah Daerah	angka	4	5	6	7	7	8	8	8
				Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	%	1,87	1,92	1,98	2,04	2,10	2,17	2,24	2,17
				Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	N/A	2,00	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30	2,25
			S4. Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,16	99,3	99,34	99,38	99,42	99,46	99,5	99,46
			S5. Meningkatnya profesionalisme ASN yang	Indeks Sistem Merit	Indeks	326	330	334	338	342	346	350	346
				Indeks BerAkhlak	Indeks	79,75	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	82,50

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	86,00	84,00
			S6. Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	76,25	77,00	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	79,50
			S7. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi daerah	Angka	50,45	52,00	54,00	57,00	60,00	63,00	65,00	63,00
				Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
				Persentase kebijakan berbasis bukti	%	N/A	50	51	52	53	54	55	54
Inklusif, Inovatif, Kolaboratif, Menuju Kota Lestari	**Misi 4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan**	**T4. Terwujudnya Kota Layak Huni yang berketahanan, lestari dan inklusif**		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah**	**Indeks**	**61,03**	**48.23*)**	**48,52**	**48,82**	**49,11**	**49,40**	**49,69**	**49,40**
				Indeks Kota Layak Huni	**Indeks**	**70,03**	**70,04**	**70,05**	**70,06**	**70,07**	**70,08**	**70,09**	**70,08**
				Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	**%**	**N/A**	**18,45**	**19,02**	**19,54**	**20,03**	**20,44**	**20,85**	**20,44**
			S1 Meningkatnya ketahanan pangan daerah yang merata dan berkelanjutan	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)	%	3,13	2,96	1,35	1,31	1,28	1,24	1,21	1,24
			S2. Menurunnya potensi risiko bencana yang berbasis pengurangan	Indeks Risiko Bencana	Indeks	68,10	63,20	62,59	61,47	60,35	58,27	53,34	58,27

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			dampak dan penguatan ketangguhan masyarakat										
			S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64,00	71,00	71,20	71,40	71,60	71,80	72,00	71,80
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	71,59	34,93	35,43	35,93	36,43	36,93	37,43	36,93
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	36,38	33,73	33,8	33,87	33,94	34,01	34,08	34,01
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	96,83	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	98,00	97,00
				Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	N/A	70	70	70	70	70	71	70
			S4. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang andil, inklusif, dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,29	8,30	8,31	8,32	8,34	8,36	8,37	8,36
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	21	21	22	23	25	30	34	30
				Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	%	99,73	99,74	99,77	99,87	99,97	100	100	100
				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	N/A	16,00	18,700	21,40	24,10	29,50	32,20	29,50
				Indeks Harmoni	Indeks	7,29	7,40	7,45	7,50	7,55	7,60	7,65	7,60

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	52,60	53,10	54,10	55,20	56,30	57,50	58,60	57,50
				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	72,39 (2023)	77,5	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	79,50
				Indeks Demokrasi	Indeks	86,04	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	88,50
				Indeks Rasa Aman	Angka	66.97	73,70	74,21	74,91	75,62	76,32	77,03	76,32

*Keterangan : *) target berdasarkan SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No 129 tahun 2024*
Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKPD dengan mempertimbangkan (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan semua stakeholder (Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat)

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

3.3.1. Strategi Pembangunan Daerah

Tema pembangunan RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2025–2029 merupakan tahap penguatan fondasi dalam kerangka pembangunan menuju Kota Tangerang Selatan Unggul, Inklusif, Inovatif, dan Kolaboratif Menuju Kota Lestari, sebagaimana disajikan dalam **Tabel III.3**. Strategi pembangunan daerah dirumuskan sebagai rencana tindakan komprehensif yang mencakup optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penentuan lokus dan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang Selatan 2025-2029, sebagaimana disajikan dalam **Tabel III.4**. Strategi tersebut disusun dengan mengacu pada: 1) Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 periode pertama; 2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tangerang Selatan Tahun 2025-2029; dan 3) Program Kepala Daerah terpilih sebagai prioritas utama sebagaimana yang dijanjikan pada kampanye dan dilampirkan pada dokumen yang disampaikan kepada KPU. Selain itu strategi juga memerhatikan: 1) Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029; 2) Arah Pembangunan Kewilayahan Rancangan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029; 3) Rancangan Awal Rencana Induk Kawasan Aglomerasi Jakarta; dan 4) Program Indikatif Periode Pertama Rancangan RTRW Kota Tangerang Selatan 2025-2045. Strategi

pembangunan tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode berikutnya.

Tabel III.3. Tema Pembangunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

TEMA: Penguatan Fondasi Dalam Kerangka Pembangunan Menuju Tangerang Selatan Unggul, Inklusif, Inovatif, Kolaboratif Menuju Kota Lestari				
Tahun 2025-2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Fokus: Transformasi awal pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, layanan dasar perkotaan serta tata kelola yang inklusif dan berbasis data	Fokus: Penguatan potensi ekonomi lokal (pariwisata perkotaan, UMKM dan Koperasi serta ekonomi kreatif), pemanfaatan inovasi dan teknologi, peningkatan investasi dan produktivitas tenaga kerja melalui integrasi SDM dengan ekonomi daerah	Fokus: Konektivitas antar prasarana, Digitalisasi pelayanan, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, dan mitigasi bencana berbasis komunitas	Fokus: Konsolidasi seluruh program: SDM unggul, pertumbuhan ekonomi berkeadilan, birokrasi adaptif, dan menuju kota berketahanan sosial-ekologis.	Fokus: Akselerasi berbasis teknologi: *smart city governance*, ekonomi digital hijau, dan tata kelola inovatif berbasis data dan riset

Tabel III.4. Strategi Penahapan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Misi	**Strategi Pembangunan Daerah**					
	Tahun 2025	**Tahun 2026**	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Berdaya Saing Global dan Sejahtera	• Revitalisasi sarana dan prasarana PAUD, SD/MI/sederajat dan SMP/Mts/sederajat yang inklusif/ramah difabel sesuai kajian kebutuhan secara berjenjang, termasuk pembangunan USB SMP; • Pelatihan guru dan tenaga kependidikan terkait STEAM; • Pendataan dan identifikasi anak tidak sekolah secara komprehensif; • Penyaluran bantuan biaya pendidikan inklusif	• Penetapan standar kurikulum dan pengajaran berorientasi mutu global dan berfokus pada STEAM, keterampilan bahasa dan digital, pengembangan *soft skill*, etika, *leadership* dan *entrepreneurship*; • Pengembangan layanan digital terpadu untuk sekolah kesetaraan dan peningkatan kapasitas pembelajaran digital di SD dan SMP; • Akselerasi program pengentasan anak tidak sekolah melalui advokasi	• Pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tingkat dasar • Peningkatan akses bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa pendidikan sarjana • Peningkatan pendidikan vokasi dan kolaborasi dengan dunia usaha/industri untuk jenjang SMP ke atas dalam batas kewenangan pemkot, fokus pada keterampilan dasar dan pra-vokasi	• Evaluasi dan Penyempurnaan kurikulum sesuai kebutuahn lokal dan global pada jenjang dasar, antara lain melalui integrasi STEAM dasar dan *computational thinking*, penggunaan bahasa inggris komunikatif dan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*); • Digitalisasi proses belajar untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) dan Integrasi Teknologi Pendidikan,	• Integrasi pendidikan formal-nonformal melalui penyatuan kurikulum & pengakuan kredit kompetensi; • Optimalisasi program sekolah kesetaraan dengan sistem pemantauan digital untuk mengurangi anak tidak sekolah secara signifikan; • Penguatan budaya literasi digital dan program kesadaran global;	• Konsolidasi dan pengembangan skema pembiayaan pendidikan berkelanjutan yang inklusif hingga jenjang pendidikan tinggi dengan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi dan pusat • Inovasi berkelanjutan dalam transformasi digital layanan pendidikan, menjadikan pembelajaran lebih

Misi	Strategi Pembangunan Daerah					
	Tahun 2025	**Tahun 2026**	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
	• Penguatan peran *stakeholder* melalui pelibatan dalam pengambilan keputusan pendidikan dan mentoring siswa;	keluarga dan masyarakat, memasukkan kembali anak usia sekolah pada jenjang formal atau melalui sekolah kesetaraan sebagai jalur alternatif; • Pelatihan lanjutan untuk guru dalam penguasaan teknologi pendidikan, bahasa dan inovasi pengajaran • Pelatihan guru inklusi; • Ekspansi program beasiswa inklusif mencakup siswa berprestasi, kurang mampu, difabel, dan penghapal kitab suci • Pemetaan kebutuhan kompetensi peserta didik sesuai Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); • Perluasan jaringan internet cepat dan pengembangan SDM TIK dasar di sekolah-sekolah prioritas;	• Optimalisasi peran sekolah kesetaraan sebagai jalur pendidikan inklusif, dengan dukungan digitalisasi dan penguatan kompetensi pengajar • Perluasan jangkauan layanan internet dan digitalisasi administrasi sekolah • Pengembangan *platform* pembelajaran daring berbasis lokal; • Peningkatan standar kualitas guru, dengan 6 Pilar Utama Program, yaitu: pelatihan pedagogi urban, pelatihan kepemimpinan pendidikan, sertifikasi teknologi pendidikan, peningkatan jejaring kolaborasi, pemberian insentif dan *reward*, serta pendampingan lapangan • Perkuatan sistem penjaminan mutu pendidikan melalui evaluasi standar kurikulum dan pengajaran	termasuk pada jenjang kesetaraan • Program *sister school* antara sekolah umum dengan sekolah agama; • Penguatan kemitraan antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk mentoring dan pengalaman belajar berbasis dunia nyata; • Pengembangan dan pembaruan *platform* pembelajaran digital dan daring lokal yang user centric bagi siswa dan guru (*Platform Hybrid Learning);* • *Manajemen Data Real-Time* (*Dashboard* "Satu Data Pendidikan Kota" pemantauan *real-time* dan Sistem *Early Warning* deteksi dini putus sekolah); • Inovasi Ruang Belajar Alternatif (contoh: *Pop-up School*" di mal/perpustakaan untuk pendidikan kesetaraan, Perpustakaan keliling)	• Pertukaran budaya pembelajaran baik secara virtual dengan sekolah luar negeri; • Penguatan bahasa asing komunikatif; • Penguatan monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu pendidikan berbasis kompetensi; • Peningkatan inklusivitas layanan bantuan finansial pendidikan	personal, efektif, dan mudah diakses • Akselerasi pendidikan inklusif • Penguatan dan pembinaan berkelanjutan untuk tenaga pendidik sebagai agen perubahan pendidikan berkualitas • Penguatan sistem pemantauan pendidikan kota (*dashboard real time* partisipasi sekolah dan kesenjangan) dan mekanisme perbaikan berkelanjutan; • Replikasi keberhasilan melalui diseminasi praktik terbaik ke seluruh sekolah dan penguatan kapasitas sekolah tertinggal; • Pengembangan Ekosistem SDM Berbasis Inovasi untuk Mendukung Strategi Ekonomi Jangka Panjang
	• Optimalisasi fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) dan peningkatan sarana/prasarana RSU milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan; • Peluncuran program pemeriksaan kesehatan	• Peningkatan akses layanan dasar melalui perluasan cakupan UHC hingga 100% secara bertahap dan pelaksanaan layanan ngider sehat premium • Gerakan “Tangsel Bebas Stunting” melalui	• Penerapan digitalisasi dasar meliputi sistem e-rekam medis terpadu di seluruh fasilitas kesehatan dan aplikasi untuk *booking* dan triase mandiri • Peningkatan kualitas layanan kesehatan	• Perluasan cakupan layanan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif, terutama bagi kelompok rentan (ibu hamil, balita, lansia); • Penguatan akreditasi fasilitas kesehatan untuk peningkatan kualitas	• Peningkatan kualitas Layanan lansia dan disabilitas aktif & sehat • Pengembangan dan penguatan layanan kesehatan pencegahan penyakit tidak menular (PTM) dan penyakit tropis terabaikan;	• Konsolidasi dan penguatan sistem kesehatan daerah yang mandiri dan berkelanjutan berbasis teknologi informasi; • Pengembangan inovasi dan layanan

Misi	Strategi Pembangunan Daerah					
	Tahun 2025	**Tahun 2026**	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
	gratis, termasuk MCU dan layanan gigi mulut; • Penguatan layanan kesehatan ibu, anak, dan balita dengan pemberian makan bergizi di sekolah/madrasah serta posyandu; • Penyediaan layanan dan pembinaan kesehatan mental, penyakit kronis, serta promosi hidup sehat; • Penyederhanaan proses bisnis layanan kesehatan dengan digitalisasi pendaftaran	Program 1000 HPK berbasis keluarga • Optimalisasi sistem pemantauan *realtime* status gizi ibu hamil dan balita serta konsultasi kesehatan dasar; • Revitalisasi layanan posyandu untuk ibu, anak dan lansia; • Penguatan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi dalam sistem kesehatan; • Pelaksanaan layanan kesehatan mental dan ketergantungan obat secara komprehensif; • Penguatan advokasi/ kampanye dan pemberdayaan masyarakat untuk PHBS dan pencegahan penyakit di sekolah dan lingkungan permukiman • Pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas yang berkompeten	remaja, dan kesehatan mental • Perluasan program pengasuhan lansia dan pendampingan kesehatan untuk lanjut usia (Posbindu Plus, BKL); • Peningkatan mutu layanan kesehatan ibu-anak dan kesehatan reproduksi; • Pengembangan dan penguatan program pencegahan stunting di wilayah kota • Penguatan pengelolaan dan tata kelola sistem kesehatan daerah, termasuk pembiayaan dan kesiapsiagaan kedaruratan; • Peningkatan kualitas SDM kesehatan, antara lain melalui pelatihan *"Basic Trauma Life Support"* dan sertifikasi konselor gizi • Peningkatan kualitas deteksi dini penyakit degeneratif melalui layanan pengecekan kesehatan gratis secara berkala dan terintegrasi dengan sistem e-rekam medis terpadu • Pengembangan layanan unggulan di RSUD dan puskesmas, fokus pada penyakit prioritas (Kanker, Jantung, Stroke, TBC, Kusta)	layanan inti, termasuk sertifikasi ISO untuk layanan maternal-neonatal • Pemanfaatan teknologi kesehatan berupa *telemedicine* dan *AI diagnostic tool*, bermitra dengan *platform* kesehatan swasta serta *Health Command Centre* terintegrasi dengan *smart city*. • Penguatan jejaring pelayanan kesehatan primer menuju rujukan. • Peningkatan kualitas SDM dokter umum melalui *fellowship* dokter umum ke RS pendidikan untuk menguasai kompetensi spesifik yang dibutuhkan pada pelayanan primer perkotaan dengan model *Skill Based Fellowship* (fokus pada kemampuan praktis) pada bidang prioritas, antara lain: *Urban Emergency Medicine* (penanganan trauma perkotaan akibat kecelakaan lalu lintas atau kekerasan), *Community Cardiology and Diabetes* (deteksi dini, tata laksana dan teknik edukasi pasien), • *Geriatric Primary Care* (pendekatan komprehensif lansia di permukiman padat) • Pengembangan rumah sakit umum daerah unggulan sesuai spesialisasi prioritas	• Komprehensif peningkatan pelayanan kesehatan berbasis komunitas dan kerja sama multisektor • Kemitraan swasta, terutama untuk pembiayaan inovatif • Penguatan sistem rujukan dan ketahanan sistem kedaruratan melalui integrasi sistem antar fasilitas kesehatan (contoh: *Digital Referral System* terhubung RS swasta/pemerintah), • penyediaan cadangan strategis obat dan BMHP. • Pemberdayaan keluarga sehat • *Mental Health in Urban Setting* (Skrining gangguan mental akibat stres perkotaan dan Terapi singkat berbasis bukti)	unggulan dalam kesehatan ibu-anak, penyakit kronis, dan kesehatan mental; • Penguatan layanan cakupan kesehatan semesta sesuai kewenangan • Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui pendidikan dan keterlibatan aktif masyarakat • Teknologi kesehatan berbasis AI • Integrasi pendidikan kesehatan dalam pendidikan keluarga

Misi	Strategi Pembangunan Daerah					
	Tahun 2025	**Tahun 2026**	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
				(mental health, kanker, tumbuh kembang anak)		
	• Pemutakhiran dan validasi data sasaran program penanggulangan kemiskinan lebih presisi; • Pemberian bantuan alat bantu kesehatan/non-kesehatan untuk penyandang disabilitas; • Sosialisasi dan pemberian perlindungan sosial bagi pekerja rentan dan masyarakat miskin • Launching program bantuan sosial adaptif untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia	• Pemutakhiran dan validasi data sasaran program penanggulangan kemiskinan lebih presisi, terpadu dan berbasis spasial • Perluasan cakupan dan efektivitas program perlindungan sosial dasar yang inklusif dan terpadu (contoh: integrasi bantuan tunai, bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, dan bantuan sembako) secara bertahap • Penguatan akses dan distribusi layanan bansos dan perlindungan sosial berbasis satu data • Pendampingan penerima sasaran yang melibatkan kader sosial berbasis satuan kewilayahan (contoh: satu RW satu Kader Sosial); • Pemantapan pelatihan dan pembinaan keterampilan kerja untuk masyarakat miskin/pekerja rentan	• Penguatan rujukan kesejahteraan sosial terpadu, melalui Sistem Rujukan Digital Terpadu, Posko Rujukan, Pelatihan Kader Rujukan, Integrasi Layanan di Tingkat Kecamatan dan Pemantauan & Evaluasi *Real-Time* dengan *dasboard* "Pantau Sejahtera" yang memantau progres rujukan • Integrasi program sosial dengan sektor lain (kesehatan, pendidikan) untuk membangun ekosistem keluar dari kemiskinan • Bantuan sosial produktif, yaitu program bantuan yang tidak hanya memberikan dana atau barang, tetapi juga meningkatkan kemampuan ekonomi penerima agar mandiri dan berdaya secara berkelanjutan • Penerapan kebijakan inklusif seperti kuota untuk warga miskin yang terlibat dalam pekerjaan proyek pemerintah dan prioritas program pemerintah untuk warga miskin • Penyediaan akses permodalan berupa kredit mikro 0% untuk usaha	• Integrasi data sosial-keuangan yaitu penyatuan basis data kesejahteraan sosial (seperti penerima bansos, lansia, disabilitas) dengan data keuangan (transaksi perbankan/kepemilikan aset) untuk targeting bantuan lebih tepat, efisien, dan adil • Digitalisasi layanan bansos • Penyediaan infrastruktur sosial seperti akses air bersih gratis dan bantuan transportasi untuk penerima sasaran • Optimalisasi akses masyarakat miskin ke perumahan layak, air bersih, dan layanan sanitasi	• Pemantapan integrasi bantuan sosial adaptif bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui satu pintu pelayanan • Bansos berbasis kinerja keluarga yaitu program bantuan sosial yang pemberiannya dikaitkan dengan pencapaian tertentu oleh keluarga penerima, dengan tujuan mendorong perubahan perilaku positif dan kemandirian • Penyaluran Bansos Berbasis sistem distribusi bantuan sosial yang menggunakan teknologi penyimpanan data terdesentralisasi (pendaftaran penerima sasaran menggunakan NIK/biometrik, pencairan dana langsung ke penerima dan dapat dilacak secara *real time)* • Penguatan pendidikan keluarga untuk pencegahan kemiskinan antar generasi • Pelatihan dan peningkatan kapasitas pekerja rentan untuk peningkatan daya saing kerja	• Evaluasi capaian program perlindungan sosial dan skala kemandirian ekonomi keluarga miskin • Konsolidasi dan inovasi strategi pengentasan kemiskinan berbasis data terpadu, berbasis komunitas, teknologi digital dan penguatan kelembagaan • Pemberian *reward* bagi kelurahan berprestasi yang memiliki program kemandirian sosial • Bansos adaptif siklus hidup yaitu program bantuan sosial yang dirancang sesuai tahapan usia dan kebutuhan spesifik penerima, dari masa kanak-kanak hingga lansia, untuk memastikan intervensi yang tepat dan berkelanjutan • Penguatan pelayanan Sosial Berbasis Komunitas, yaitu penguatan pendekatan layanan kesejahteraan sosial yang melibatkan

Misi	Strategi Pembangunan Daerah					
	Tahun 2025	**Tahun 2026**	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
			mikro dan literasi tabungan masa depan • Evaluasi program bansos daerah		• Penyelenggaraan kemitraan dalam pemberdayaan produktif bagi warga miskin, contoh: *Social Business Hub* kolaborasi dengan korporasi/UMKM	masyarakat secara aktif dalam identifikasi masalah, perencanaan, hingga pelaksanaan solusi di tingkat lokal
	• Penguatan data dan pemetaan keluarga rentan, perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan serta kebutuhan kelompok inklusif lainnya (lansia, pemuda dan disabiltas) • Fasilitasi komunitas inklusif (Forum anak, kelompok pemuda, forum lansia, forum disabilitas dan kebutuhan khusus); • Sosialisasi hak-hak perempuan dan anak, serta kampanye anti-kekerasan berbasis gender dan anak; • Penguatan program Bina Keluarga Lansia (BKL) sebagai bagian perawatan keluarga inklusif; • Pemenuhan hak dasar kelompok inklusif secara bertahap termasuk perlindungan dari; kekerasan dan diskriminasi; • Pelatihan gender bagi OPD dan kader pemberdayaan;	• Pengembangan program perlindungan anak yang komprehensif termasuk pencegahan kekerasan dan pelembagaan layanan ramah anak; • Peningkatan program pemberdayaan kelompok inklusif melalui pelatihan keterampilan dan akses ke sumber daya ekonomi; • Optimalisasi pendampingan keluarga rentan melalui layanan sosial terintegrasi dan dukungan advokasi • Peningkatan kapasitas tenaga pelaksana perlindungan anak dan pemberdayaan kelompok inklusif	• Implementasi program monitoring dan evaluasi berbasis data intervensi keluarga dan anak • Pelaksanaan program edukasi dan mentoring anak dan remaja terkait perlindungan diri, kesehatan reproduksi, dan kesetaraan gender • Inkubasi kewirausahaan pemuda, perempuan dan lansia • Peningkatan akses modal mikro inklusif • Pelatihan digital inklusif; • Pendidikan kepemimpinan dan peningkatan Partisipasi politik kelompok inklusif • Pembentukan dan penguatan gugus tugas keluarga dan fasilitator keluarga yang terintegrasi dengan kader kesehatan/kader pemberdayaan; • Perluasan cakupan sekolah ramah anak	• Penguatan sistem rujukan dan layanan terpadu perlindungan anak dan perempuan tingkat kelurahan/kecamatan • Penguatan kemitraan multisektor dan pemberdayaan komunitas dalam pengasuhan dan perlindungan anak • Penerapan kebijakan inklusif melalui pemberian kuota khusus yang adil dan proporsional bagi kelompok inklusif dalam program pembangunan • Peningkatan partisipasi inklusif seperti pertemuan inklusif, fleksibilitas waktu bagi ibu bekerja dan disabilitas, penerapan sistem Umpan Balik Anonim agar kritik/masukan dari introvert/disabilitas bisa tersampaikan • Fasilitasi dan pendampingan usaha mandiri kelompok inklusif • Pengembangan sistem pelaporan *online* kekerasan anak • Penguatan P2TP2A yang melayani layanan	• Penyusunan kebijakan perlindungan keluarga • Peningkatan usaha mandiri kelompok inklusif yang terintegrasi dengan rantai pasok • Penyediaan pusat komunitas disabilitas dan lansia • Optimalisasi program perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi dengan basis data akurat dan sistem pelaporan responsif; • Pengembangan program kesejahteraan keluarga berdasarkan inklusi sosial dan dukungan ekonomi berkelanjutan • Pemantapan jaringan layanan sosial dan kesehatan bagi keluarga rentan dan anak-anak	• Konsolidasi dan inovasi program perlindungan anak, pemberdayaan kelompok inklusif, dan peningkatan kualitas keluarga • Peningkatan ekosistem pemberdayaan berkelanjutan • Penguatan institusi dan mekanisme partisipasi komunitas serta sektor swasta dalam program pemberdayaan dan perlindungan • Perluasan jejaring inklusif lokal-global • Promosi kesetaraan kelompok inklusif dan hak anak dalam berbagai program pembangunan serta peningkatan kesadaran masyarakat luas.

Misi	Strategi Pembangunan Daerah					
	Tahun 2025	**Tahun 2026**	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
	• Penguatan kebijakan keolahragaan di daerah melalui pembinaan dan pengembangan keolahragaan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga			konseling, mediasi dan rujukan kasus;		
	• Meningkatkan fasilitas perpustakaan dengan perangkat digital dan koleksi literatur elektronik serta mendirikan pojok digital di setiap perpustakaan; • Memastikan setiap perpustakaan memiliki akses internet cepat dan perangkat digital, mendukung aktivitas literasi digital	• Meningkatkan kapasitas pustakawan untuk mengelola perpustakaan digital dan memberikan bimbingan literasi digital kepada masyarakat; • Membentuk klub membaca di perpustakaan dan komunitas masyarakat untuk mendorong interaksi dan diskusi literasi secara aktif. • Mengadakan kegiatan rutin membaca bersama dan pengoperasian perpustakaan keliling untuk menjangkau masyarakat di berbagai lokasi	• Menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi lokal untuk pengembangan inovasi literasi digital dan dukungan teknologi perpustakaan • Membangun aplikasi mobile dan website perpustakaan digital yang mudah diakses untuk meningkatkan jangkauan literasi digital • Menggunakan teknologi multimedia dan elemen gamifikasi untuk meningkatkan daya tarik aktivitas membaca dan belajar di perpustakaan	• Pengembangan Smart Library dan Ruang Kreatif Digital • Meningkatkan Kolaborasi dengan Sekolah, Komunitas, dan Pelaku Seni untuk mengadakan acara literasi seperti pameran buku, festival baca, dan workshop kreatif	• Menyediakan layanan dan materi baca yang ramah untuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas • Menyelenggarakan evaluasi capaian literasi dan memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi	• Membangun jaringan kemitraan antara perpustakaan, pemerintah, swasta, dan komunitas untuk pelaksanaan program literasi berkelanjutan • Menyediakan program pembelajaran teknologi lanjutan yang didukung perpustakaan sebagai pusat inovasi literasi • Melakukan pemantauan berkelanjutan dan penyesuaian strategi berbasis hasil evaluasi untuk memastikan peningkatan kegemaran membaca dan literasi yang berdampak
Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan	• Pemetaan sektor unggulan berbasis wilayah (teknologi, jasa,	• Revitalisasi koperasi tradisional menjadi koperasi digital;	• Menyelenggarakan *coworking space* dan inkubator bisnis untuk	• Pengembangan inkubator bisnis dan teknologi untuk *start-up* lokal	• Diversifikasi Produk dan Inovasi Ekonomi	• Menerapkan *Smart Tourism* (Integrasi teknologi dalam

Misi	Strategi Pembangunan Daerah					
	Tahun 2025	**Tahun 2026**	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	ekonomi kreatif, pariwisata perkotaan) • Pengembangan akses transportasi, konektivitas internet cepat, dan fasilitas publik yang mendukung aktivitas ekonomi • Penguatan Kapasitas UMKM dan pelaku ekonomi kreatif melalui Pelatihan Digital (Pelatihan *digital marketing*, manajemen usaha, dan pemanfaatan *e-commerce*) agar siap bersaing di pasar domestik dan global; • Menyelenggarakan *event* seni, budaya, dan ekonomi kreatif secara rutin yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara	• Mendorong wirausaha muda dan inovatif melalui dukungan pelatihan, fasilitasi akses pasar, dan pembiayaan mikro digital • Membangun *platform* online untuk promosi pariwisata, produk ekonomi kreatif dan UMKM, serta integrasi ke *marketplace* nasional dan internasional; • Mendorong inovasi produk dan Diversifikasi Ekonomi Kreatif dengan sentuhan budaya lokal dan teknologi digital, seperti digital, konten multimedia, dan desain kreatif; • Pengembangan destinasi wisata unggulan (termasuk *health tourism destination*) dan penyelenggaraan *event* budaya dan ekonomi kreatif berskala regional untuk meningkatkan daya tarik wisata • Mengembangkan destinasi wisata kuliner dengan bazar dan pasar kreatif yang menonjolkan produk lokal serta penggabungan konsep *digital payment* • Digitalisasi *database* profil IKM/UMKM unggulan • Promosi digital produk lokal melalui *platform* pemerintah	startup ekonomi kreatif dan UMKM; • Melatih wirausaha berdasarkan peluang ekonomi aktual dan potensi digitalisasi sektor ekonomi unggulan, untuk memperbesar basis penyerapan tenaga kerja • Peningkatan daya saing SDM pariwisata melalui pelatihan pemandu dan *hospitality* • Penataan dan revitalisasi ruang publik seperti taman kota, alun-alun, dan pedestrian yang estetis dan nyaman untuk wisata keluarga dan komunitas; • Penambahan Fasilitas Pendukung Wisata Perkotaan seperti Penyediaan fasilitas seperti pusat informasi wisata (*tourist information center*), jalur sepeda, dan transportasi ramah lingkungan; • Akselerasi digitalisasi koperasi dan UMKM berbasis *e-commerce* • Penguatan jaringan distribusi produk lokal melalui pasar daring dan fisik • Penguatan kerja sama UMKM, pelaku ekonomi kreatif dan koperasi dengan pelaku industri, perusahaan teknologi dan investor untuk	• Memperluas digitalisasi dalam pengelolaan usaha UMKM dan pelaku ekonomi kreatif serta mendorong sertifikasi produk dan HAKI untuk meningkatkan daya saing global • Meningkatkan jaringan internet, sistem pembayaran digital, dan logistik untuk memperlancar transaksi dan distribusi produk lokal • Fasilitasi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dalam mengakses pembiayaan kreatif (akses pembiayaan digital, crowdfunding, dan fintech) • Kemitraan UMKM dengan investor besar melalui *business matching* • Kampanye branding kota sebagai destinasi pariwisata dan pusat ekonomi kreatif yang modern berbasis media sosial dan *influencer* • Membuat jalur wisata bertema (sejarah, seni, budaya, *eco-urban*, *health tourism*) yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi, fasilitas transportasi publik dan infrastruktur pendukung • Mendukung startup digital di bidang pariwisata, seperti *platform booking*, *experience sharing*, dan layanan *custom tour* berbasis data wisatawan	Kreatif Berbasis Teknologi • Pengembangan wisata hiburan kota yang aman, inklusif dan menawarkan hiburan kreatif seperti seni pertunjukan, night market, dan live musik • Kredit usaha rakyat berbasis produktivitas dan penilaian kinerja • Pembentukan koperasi tematik sektor kreatif dan pariwisata • Mendorong pelaku usaha lokal untuk aktif dalam pameran dan ajang bisnis internasional melalui dukungan pemerintah	layanan wisata) dan *Smart Creative Economy Hub* • Membangun kemitraan untuk pengembangan berkelanjutan ekonomi kreatif, dan UMKM dengan fokus inovasi dan teknologi • Membentuk sinergi antar destinasi wisata perkotaan dengan wilayah sekitar untuk paket wisata terintegrasi yang lebih menarik • Melakukan evaluasi menyeluruh dan adaptasi strategi berdasarkan hasil capaian serta tren ekonomi global dan teknologi terkini • Transformasi koperasi sebagai pusat distribusi dan pengembangan usaha lokal • Jejaring ekonomi kreatif regional dan internasional • Penyusunan regulasi insentif untuk pelaku usaha kreatif dan koperasi inovatif

Misi	Strategi Pembangunan Daerah					
	Tahun 2025	**Tahun 2026**	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
			pengembangan modal dan pemasaran digital; • Mengembangkan konsep pariwisata berkelanjutan dengan pelibatan masyarakat lokal dan pelestarian budaya			
	• Fasilitasi perizinan usaha mikro kecil berbasis OSS (*Online Single Submission*) • *Updating* Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) Tahun 2026–2030 • Pembentukan Tim Percepatan Investasi Daerah lintas OPD • Pelatihan OSS-RBA & perizinan elektronik bagi pelaku usaha dan petugas daerah	• Digitalisasi *database* potensi investasi • Pelaksanaan *event "Tangsel Investment Day"*	• Peningkatan cakupan integrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam satu sistem digital terpadu • Penambahan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat informasi investasi • Penyusunan regulasi insentif investasi daerah untuk sektor prioritas (teknologi, pariwisata, energi terbarukan) • Pengembangan *event "Tangsel Investment Day"* skala nasional • Pelibatan diaspora dan mitra universitas untuk promosi potensi investasi	• Misi dagang dan investasi ke provinsi/kota potensial dan negara mitra • Peluncuran *platform e-investment* dengan fitur *dashboard* peluang & izin otomatis • Inisiasi integrasi proses investasi dengan sistem nasional (BKPM, DJP, DJA) • Kerja sama dengan KADIN, HIPMI, dan investor diaspora dalam promosi proyek PPP (*Public Private Partnership*)	• Implementasi sistem *dashboard real-time* untuk pemantauan investasi daerah • Evaluasi efektivitas insentif dan iklim usaha setiap semester • Pengembangan *Tangsel Investment Intelligence Center* untuk analisis data peluang investasi • Pemeringkatan kelurahan dan kecamatan ramah investasi berbasis indikator OSS • Penyusunan regulasi zonasi investasi ramah lingkungan dan inklusif	• Penguatan branding *"*Tangsel Kota Investasi Cerdas*"* di forum nasional & internasional • Finalisasi integrasi seluruh proses investasi dengan sistem nasional (BKPM, DJP, DJA)
	• Memperluas dan meningkatkan kualitas program pelatihan berbasis teknologi dan inovasi lewat skema 3D (Dilatih, Disertifikasi, Ditempatkan) • Menyediakan program pelatihan tenaga kerja yang ramah gender dan inklusif bagi perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia produktif, serta	• Kolaborasi dengan sektor industri untuk magang, penempatan kerja, dan transfer teknologi serta penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan teknologi terbaru • Mengembangkan *platform* digital terpadu yang menyediakan materi pelatihan, informasi kerja, dan mentoring online yang mudah diakses masyarakat luas	• Melakukan kajian dan pemetaan menyeluruh terhadap kebutuhan keterampilan, peluang kerja, dan risiko disrupsi teknologi di berbagai sektor ekonomi lokal • *Upskilling* maupun *reskilling* kompetensi tenaga kerja berbasis teknologi seperti pelatihan coding, teknologi manufaktur digital, dan keterampilan ekonomi kreatif	• Mengimplementasikan sistem prediktif guna memetakan tren keterampilan dan kebutuhan pasar kerja sehingga pengembangan SDM lebih tepat sasaran • Penyediaan coworking space dan innovation hub yang menyediakan akses teknologi, mentoring, dan *networking* bagi tenaga kerja	• Mengembangkan Pusat Inovasi dan Inkubator Kreatif Tenaga Kerja bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset • Pengembangan kompetensi SDM berbasis teknologi tinggi yang terintegrasi dengan industri dan perguruan tinggi yang mendukung inovasi;	• Membangun dashboard dan portal integrasi data pasar kerja dengan pertumbuhan sektor ekonomi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan terarah • Memastikan akses terbuka serta penyesuaian program pelatihan

Misi	Strategi Pembangunan Daerah					
	Tahun 2025	**Tahun 2026**	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
	memastikan fasilitas pendukung aksesibilitas;		• Memastikan penetrasi teknologi dan pelatihan digital hingga ke kelompok inklusif dan sektor informal • Promosi dan Penghargaan untuk Tenaga Kerja Berprestasi dan Inovatif	• Program pemagangan sektor pariwisata dan kreatif bagi lulusan vokasi • Sertifikasi SDM lokal di sektor strategis (kuliner, seni, kerajinan) • Memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan terutama untuk pekerja rentan dan informal, pelatihan ulang, dan program peningkatan kapasitas teknologi secara terus-menerus		vokasi dan teknologi dengan pengembangan potensi sektor unggulan ekonomi dan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal dan global
Misi 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas	• Penyusunan dan finalisasi dokumen RPJMD 2025-2029 sebagai panduan pembangunan jangka menengah • Peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelatihan reformasi birokrasi dan penguatan sistem tata kelola berintegritas • Digitalisasi proses pelayanan publik, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dan transaksi keuangan • Penyusunan regulasi adaptif pendukung program reformasi birokrasi dan transformasi digital. • Penguatan kolaborasi antar OPD dan pemangku kepentingan sebagai fondasi kelembagaan jejaring • Audit kelembagaan Organisasi Perangkat	• Implementasi program perbaikan pelayanan publik berbasis digital dan terpadu pada sektor strategis • Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui sistem pelaporan dan monitoring berbasis teknologi informasi • Penyederhanaan proses bisnis layanan publik dan mendekatkan pelayanan publik kepada sasaran layanan • Pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi bagi ASN untuk meningkatkan profesionalisme • Penyusunan dan revisi regulasi yang mendukung percepatan pembangunan dan reformasi birokrasi • Peningkatan integritas dengan penerapan sistem	• Perluasan layanan publik digital yang inklusif dan terpadu • Pengembangan dan penguatan jejaring kelembagaan antar OPD, pemerintah, dan masyarakat • Pengembangan sistem pengawasan kinerja berbasis data untuk ASN dan institusi. • Revisi dan harmonisasi regulasi yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pembangunan • Pelatihan dan *coaching* kompetensi kepemimpinan adaptif ASN • Pengembangan kapasitas riset dan inovasi untuk mendukung kebijakan serta program pembangunan daerah • Kampanye integritas dan etika pemerintahan yang berkelanjutan	• Penguatan kapabilitas kelembagaan berbasis jejaring melalui pelatihan dan penyediaan sarana teknologi • Penyempurnaan mekanisme akuntabilitas dan transparansi berbasis digital • Perbaikan berkelanjutan regulasi dan kebijakan sesuai hasil evaluasi • Peningkatan digitalisasi arsip dan manajemen dokumen daerah • Penyusunan sistem informasi akuntabilitas OPD berbasis data *real-time* • Program lanjutan peningkatan kompetensi ASN berbasis hasil evaluasi kinerja; • Perluasan cakupan pelibatan lembaga riset, sektor swasta dan universitas untuk penguatan riset dan inovasi	• Optimalisasi sistem pelayanan publik digital dan pengintegrasian berbagai *platform* layanan • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelayanan publik • Optimalisasi jejaring kelembagaan untuk efisiensi dan efektivitas kerja Perangkat Daerah • Pembentukan regulasi inovatif yang mendukung percepatan pembangunan • Penegakan budaya kerja profesional dan integritas di seluruh lini ASN • Peningkatan output riset dan inovasi yang aplikatif untuk pembangunan daerah	• Konsolidasi sistem pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif • *Smart City Governance* berupa manajemen layanan publik berbasis teknologi/AI terintegrasi • Penetapan standar dan *best practice* transformasi digital sektor publik untuk keberlanjutan • Penyempurnaan kelembagaan berbasis jejaring dengan model kolaboratif optimal • ASN berbasis kompetensi, hasil, dan inovasi (meritokrasi penuh) • Pelaporan kinerja integritas pemerintahan secara transparan pada publik

Misi	Strategi Pembangunan Daerah					
	Tahun 2025	**Tahun 2026**	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
	Daerah dan analisis beban kerja ASN • Diversifikasi BUMD/ Pembentukan BUMD	pengawasan internal dan etika jabatan yang ketat • Penerapan *roadmap* Sistem Pemerintahan Digital dan *smart governance* secara bertahap • Penguatan riset dan inovasi melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan riset • Penguatan pembinaan BUMD untuk peningkatan kinerja manajerial dan operasional BUMD	• Pengembangan sistem *reward* dan *punishment* berbasis kinerja		• Pengembangan inovasi pelayanan publik antar-kecamatan • Penguatan jaringan kerja sama antar-daerah dan swasta untuk efisiensi layanan dan pembiayaan alternatif • Pemutakhiran sistem merit ASN berbasis kompetensi dan kinerja aktual • Peningkatan produktivitas dan profitabilitas BUMD	• Institusionalisasi budaya kerja kolaboratif, profesional, dan adaptif di seluruh Perangkat Daerah • Konsolidasi sistem riset dan inovasi sebagai pilar pembangunan jangka panjang
Misi 4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan	• Pemetaan dan penguatan ketahanan pangan lokal dengan pengembangan program pertanian perkotaan • Pengembangan sistem manajemen risiko bencana berbasis komunitas dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. • Penerapan program penghijauan kota dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan • Penataan infrastruktur dasar perkotaan yang responsif dan inklusif. berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi secara bertahap • Penguatan nilai sosial dan budaya melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis Pancasila dan HAM	• Pengembangan jaringan distribusi pangan yang berkelanjutan dan merata • Pembangunan posko dan fasilitas mitigasi bencana berbasis kewilayahan • Peningkatan kualitas program perbaikan kualitas udara dan air serta pengelolaan limbah • Pengembangan layanan transportasi dan fasilitas publik yang mudah diakses semua kalangan • Peningkatan integrasi hunian dengan akses air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, jaringan jalan lingkungan dan drainase serta penerangan • penguatan regulasi pengurangan sampah dari hulu • Program edukasi dan sosialisasi penciptaan	• Perluasan program ketahanan pangan dengan diversifikasi produk lokal dan pemanfaatan teknologi pertanian modern • Penguatan jejaring komunitas siaga bencana dan simulasi mitigasi secara berkala • Peningkatan ruang terbuka hijau dan area publik yang ramah lingkungan • Penyediaan fasilitas infrastruktur yang inklusif untuk kelompok rentan • Penguatan koordinasi dan sinergitas program pengendalian banjir pada kawasan rawan banjir (kawasan sekitar DAS Angke dan DAS Pesanggrahan) • Pembangunan infrastruktur ramah iklim (drainase berkelanjutan,	• Penanganan risiko bencana berdasarkan hasil evaluasi dan tren perubahan iklim • Penyempurnaan kebijakan dan regulasi lingkungan hidup dan infrastruktur berkelanjutan • Perluasan dan modernisasi sistem distribusi air bersih jaringan perpipaan (PDAM + air tanah terkendali) • Pelibatan swasta dalam penyediaan IPAL modular dan teknologi pengolahan limbah • Kemitraan dengan swasta untuk penyediaan rusunawa atau rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah • Kerja sama pembangunan IPLT regional • Penerapan sistem monitoring banjir berbasis IoT	• Optimalisasi sistem ketahanan pangan berbasis komunitas dan teknologi • Peningkatan sistem peringatan dini bencana dan kesiapsiagaan masyarakat • Perluasan jaringan transportasi publik dan jalur sepeda • Integrasi hunian dengan akses transportasi publik (*feeder* dan jalur sepeda) • Pemberian insentif untuk pengembang yang menyediakan kawasan permukiman ramah kelompok rentan dan adaptif iklim • Penetapan regulasi hunian inklusif dan terjangkau	• Evaluasi layanan infrastruktur sebagai dasar perencanaan pembangunan berkelanjutan berikutnya • Pengembangan kota hijau dan ramah lingkungan sebagai standar layak huni • Konsolidasi pencapaian ketahanan pangan sebagai bagian integral pembangunan daerah • Integrasi prinsip inklusi, keberlanjutan & ketahanan dalam semua kebijakan • Forum kolaborasi multipihak (pemerintah, swasta, warga) untuk

Misi	Strategi Pembangunan Daerah					
	Tahun 2025	**Tahun 2026**	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
	• Updating Peta Risiko Bencana dan Rencana Kontinjensi Wilayah • Penyediaan bantuan bedah rumah tidak layak huni dan Rehabilitasi kawasan kumuh secara bertahap dengan pendekatan inklusif • Kerja sama pengelolaan persampahan • Penguatan komunitas budaya melalui pendidikan dan pelibatan komunitas lokal • Inventarisasi data digital kekayaan budaya di Kota Tangerang Selatan baik berupa cagar budaya, manuskrip, tradisi, ritus, adat, seni, bahasa, permainan tradisional	kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan harmonis • Pemetaan kerentanan sosial dan kapasitas komunitas (RT/RW) • pembangunan fasilitas pengolahan akhir sampah P-SEL	sumur resapan, RTH baru) • Pembangunan dan peremajaan sistem transportasi publik melalui penyediaan angkutan massal baik angkutan jalan atau rel yang menggunakan energi bersih secara bertahap • Peningkatan akses jaringan air perpipaan terutama pada kawasan padat penduduk dan kawasan rawan kekeringan • Pembangunan/rehabilitasi IPAL komunal di kelurahan padat penduduk • Penyusunan regulasi teknis pemisahan air limbah domestik dan drainase • Penataan sistem perizinan instalasi pengolahan air limbah untuk bangunan baru • Peningkatan kualitas pelatihan kesiapsiagaan bencana dan adaptasi iklim untuk masyarakat dan sekolah • Pengendalian kerusakan dan rehabilitasi kawasan kritis (resapan air, bantaran sungai Cisadane, Angke dan Pesanggrahan) • Penegakan dan penguatan regulasi perlindungan lingkungan (pengawasan	• Peluncuran *feeder* transportasi hijau ke simpul transit (stasiun, terminal) • Peningkatan layanan digital mitigasi bencana (*early warning system*) berbasis warga • Operasionalisasi fasilitas pengolahan sampah P-SEL • Penguatan sinergi antar komunitas untuk menjaga nilai-nilai kemasyarakatan dan HAM • Integrasi pendidikan budaya berbasis muatan lokal dengan teknologi, contoh: Pengembangan modul digital interaktif (*e-book*, video) tentang sejarah dan budaya Tangerang Selatan untuk sekolah, lomba konten kreator budaya bagi pemuda • Penyelenggaraan pasar/festival budaya Tangerang Selatan tahunan • Revitalisasi Kawasan cagar budaya di Kota Tangerang Selatan	• Digitalisasi terpadu sistem infrastruktur (IoT untuk pemantauan jalan, air, udara) • Pengembangan pusat-pusat ketahanan pangan dan penguatan sistem pangan lokal berbasis koperasi dan bank pangan • Sertifikasi dan insentif bangunan hijau & kawasan rendah karbon bagi swasta • Perlindungan kawasan konservasi air dan zona perlindungan tanah kritis • Pemantapan program penguatan keterikatan sosial, penghormatan HAM, dan budaya demokrasi • Ekspansi budaya Tangerang Selatan ke ajang Nasional dan Internasional • Penguatan peran lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemajuan dan pelestarian objek budaya	adaptasi iklim jangka panjang dan pelibatan penuh warga dalam pemantauan lingkungan dan pelaporan bencana • Penetapan regulasi daerah tentang ketahanan pangan, air, dan energi serta perlindungan sosial-ekologis • Penguatan peran Forum Warga dalam pemeliharaan lingkungan hunian secara berkelanjutan

Misi	Strategi Pembangunan Daerah					
	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
			limbah industri & domestik) • Kampanye harmoni sosial lintas komunitas • Penguatan budaya inklusivitas, toleransi, serta partisipasi masyarakat melalui aktivitas sosial dan budaya • Pengembangan Kapasitas & Jejaring melalui penyelenggaraan festival budaya yang terintegrasi dengan UMKM dan ekonomi kreatif serta kolaborasi dengan universitas.			

3.3.2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja konseptual penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan berfungsi sebagai panduan filosofis dan kompas atas sasaran yang ingin dicapai. Arah kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 memerhatikan arah kebijakan periode pertama RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045, sebagaimana tertuang dalam **Tabel III.5**. Selain itu, arah kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 juga diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam **Tabel III.6**.

Tabel III.5. Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Penuntasan Pemenuhan Layanan Dasar Pendidikan,	1. Pemenuhan layanan dasar pendidikan secara merata dan	Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang inklusif, berbasis	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun yang inklusif (1

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	**Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD**	**Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029**	**Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029**	***Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029**
Kesehatan dan Perlindungan Sosial Yang Merata dan Berkualitas	berkualitas pada seluruh satuan pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan; 2. Penetapan sistem penjaminan mutu pendidikan daerah dalam hal standar kurikulum daerah dan standar pengajaran untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas global; 3. Pengelolaan Sekolah yang efektif untuk mendukung tujuan pendidikan, mencakup pengelolaan sumber daya yang efisien, kepemimpinan yang kuat, dan keterlibatan semua *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan; 4. Penerapan penilaian Berbasis Kompetensi yang dapat memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka secara holistik dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang relevan; 5. Pelatihan guru yang berkualitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pengajaran, yang dapat mencakup pelatihan penggunaan teknologi pendidikan, strategi pengajaran yang inovatif, dan pendekatan pedagogi terbaik; 6. Peningkatan akses dan partisipasi sekolah wajib pendidikan 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah) melalui peningkatan	yang Unggul, Berdaya Saing Global dan Sejahtera	teknologi dan terintegrasi dengan dunia kerja.	tahun pra sekolah, 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 2. Peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah hingga pendidikan tinggi antara lain dengan cara pemberian beasiswa; 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, salah satunya dengan adopsi pembelajaran STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) pada seluruh jenjang pendidikan baik milik Pemerintah dan Swasta; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar, inklusif dan aman bencana, termasuk sarana transportasi khusus peserta didik yang inklusif dapat diakses oleh siswa dengan disabilitas; 6. Penyelenggaraan pendidikan yang

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
	kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan usia dini, program bantuan finansial yang inklusif (beasiswa prestasi dan bantuan pendidikan) dan dukungan untuk siswa dengan kebutuhan khusus; 7. Penerapan kurikulum daerah yang relevan dengan tuntutan zaman, kebutuhan siswa dan DUDI, salah satunya melalui adopsi pembelajaran STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*); 8. Membangun kemitraan yang kuat antara sekolah, pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung pembelajaran siswa, yang dapat dilakukan melalui program-program seperti mentoring siswa, program sukarelawan, atau kerja sama dengan perusahaan lokal untuk memberikan pengalaman belajar yang berbasis pada dunia nyata; 9. Penggunaan teknologi pendidikan secara efektif untuk meningkatkan pembelajaran dan memfasilitasi akses pendidikan yang lebih luas.			berkualitas dan berkeadilan pada jenjang PAUD, SD dan SMP serta pendidikan kesetaraan dan non formal; 7. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan non formal berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 8. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik; 9. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 10. Pengembangan *Center of Excellence* (CoE) sebagai ruang untuk pengembangan keahlian khusus pada suatu bidang spesifik serta pemerataan dan peningkatan kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 11. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
				pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*); 12. Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK; 13. Penyediaan akses pendidikan yang setara, berkualitas dan terjangkau di sekolah untuk disabilitas
	1. Pemenuhan layanan dasar kesehatan yang merata dan berkualitas, termasuk penyediaan fasilitas medis, dan tenaga kerja kesehatan, untuk memastikan bahwa sistem kesehatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dalam jangka panjang; 2. Penguatan sistem kesehatan primer sebagai pintu masuk utama ke sistem kesehatan, dengan fokus pada pencegahan, pemantauan kondisi kesehatan, dan manajemen penyakit kronis, untuk membantu mengurangi beban pada sistem perawatan kesehatan yang lebih mahal dan kompleks; 3. Peningkatan kualitas program kesehatan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian kasus gizi makro-mikro, penyakit menular dan tidak menular serta	Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Berdaya Saing Global dan Sejahtera	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang inklusif, berbasis digital dan mendukung gaya hidup sehat perkotaan.	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan; 2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; 3. Peningkatan kualitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; 4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya;

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
	penyakit tropis terabaikan (terutama TBC dan Kusta); 4. Peningkatan keterjangkauan layanan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional aktif; 5. Peningkatan tata kelola kesehatan, termasuk tata kelola pembiayaan untuk membangun sistem kesehatan daerah yang tangguh dan sistem kedaruratan yang responsif.			5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; 6. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan; 7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; 8. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting; 9. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan; 10. Peningkatan kualitas gizi pada tingkat individu, dan keluarga; 11. Penataan tata kelola Rumah Sakit dalam rangka penyediaan layanan kesehatan berkelas dunia; 12. Pengembangan pelayanan kesehatan untuk menangani kesehatan mental; 13. Pengembangan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk lanjut usia dan disabilitas berupa perawatan medis khusus, terapi dan

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
				dukungan kesehatan mental; 14. Pengembangan pelayanan kesehatan untuk menangani kasus ketergantungan obat; 15. Pengembangan konsep *health tourism*, yang diselaraskan dengan pengembangan daya tarik wisata perkotaan;
	1. Peningkatan nilai manfaat dari program-program perlindungan sosial dan perluasan cakupan perlindungan sosial untuk memberikan perlindungan dan keamanan ekonomi bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin; 2. Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan sosial melalui transformasi akurasi data dengan menggunakan satu data regsosek yang terupdate dan tervalidasi; 3. Pemberian akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang terjangkau untuk meningkatkan kualitas hidupnya; 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan kelompok rentan Melalui program-program bantuan produktif, pelatihan keterampilan, dan pembinaan	Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Berdaya Saing Global dan Sejahtera	Meningkatkan upaya perlindungan sosial yang tersistem, terintegrasi, adaptif sesuai siklus hidup, dan berbasis data satu pintu.	1. Percepatan penuntasan kemiskinan; 2. Penyediaan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, dan rentan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien; 3. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
	usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kemampuan ekonominya sehingga mereka dapat mandiri secara finansial; 5. Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengelola dan mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan dengan lebih efektif dan efisien.			tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya terutama bagi kelompok rentan; 4. Perluasan penyediaan jaminan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua; 5. Pengembangan program komunitas untuk lansia, berupa kegiatan sosial dan rekreasi untuk lansia serta pusat komunitas;
	1. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia; 2. Penyediaan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga; 3. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Berdaya Saing Global dan Sejahtera	Meningkatkan perlindungan, pemberdayaan dan partisipasi aktif perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas melalui peningkatan akses dan kompetensi terhadap sektor ekonomi dan sektor strategis pembangunan lainnya.	1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
	4. Peningkatan kualitas keluarga dalam rangka menciptakan lingkungan pendukung untuk masyarakat yang berketahanan sosial.			2. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; 3. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan;
Pengembangan potensi sektor-sektor basis ekonomi Kota Tangerang Selatan berdasarkan riset dan inovasi	1. Peningkatan produktivitas Usaha Mikro dan Industri Mikro Kecil berbasis produk unggulan daerah. serta ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur, pelatihan dan pendampingan, kelembagaan ekonomi, dan pembiayaan; 2. Mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan seperti perbankan, dan kredit mikro untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan memperluas akses terhadap modal; 3. Industrialisasi koperasi melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi;	Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	Transformasi UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif melalui digitalisasi dan integrasi rantai nilai industri.	1. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi; 2. Pemberdayaan ekonomi mikro yang inklusif dan berbasis kerakyatan; 3. Peningkatan keterkaitan usaha mikro, industri mikro dan industri kecil pada rantai nilai domestik dan global sehingga produk-produknya berorientasi ekspor, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
	4. Mendorong tumbuhnya perusahaan rintisan (startup) yang berfokus pada pengembangan produk dan solusi inovatif; 5. Kolaborasi dan kerja sama antara universitas dan lembaga riset dengan pelaku usaha, terutama pelaku Usaha Mikro, Industri Mikro dan Kecil serta pelaku ekonomi kreatif untuk mendukung transfer teknologi, pengembangan produk, dan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan pasar.			teknologi dan kemitraan usaha; 4. Penguatan proses bisnis usaha mikro, industri mikro dan industri kecil melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;
	1. Peningkatan akses tenaga kerja terhadap pasar kerja, terutama pemuda dan perempuan; 2. Peningkatan kualitas tenaga kerja pada usia produktif melalui peningkatan jenjang pendidikan, *upskilling* maupun *reskilling*, terintegrasi dengan kebutuhan DUDI; 3. Memastikan lingkungan kerja yang mendukung kondisi kerja yang aman, nyaman, dan efisien; 4. Pengembangan beragam sektor ekonomi (diversifikasi ekonomi) untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, mengurangi risiko ekonomi dan menciptakan lebih banyak peluang kerja serta meningkatkan pendapatan per kapita.	Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	Memperkuat daya saing tenaga kerja dengan *upskilling* dan *re-skilling* vokasi adaptif, sertifikasi berbasis potensi daerah dan pemagangan produktif.	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui *upskilling* maupun *reskilling*, terintegrasi dengan kebutuhan DUDI; 2. Penyediaan program pelatihan dan penempatan kerja untuk disabilitas

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
	1. Penyediaan infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan efisiensi jaringan produksi dan distribusi; 2. Perbaikan iklim investasi menjadi lebih efisien untuk mendorong peningkatan investasi dengan penerapan regulasi yang ringkas, dan pelayanan perizinan berusaha yang cepat dan bebas pungutan liar; 3. Penciptaan ekosistem penerapan teknologi dan digitalisasi pada sektor strategis ekonomi melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan peningkatan kapasitas SDM digital dan AI.	Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	Memperluas peluang investasi inklusif melalui kawasan tematik serta digitalisasi *platform* promosi dan perizinan.	
	Peningkatan promosi pariwisata dan memperkuat MICE CITY sebagai daya tarik wisata.	Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	Meningkatkan daya saing pariwisata perkotaan yang terintegrasi dengan ekonomi berbasis komunitas sebagai motor pertumbuhan daerah.	1. *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism* dan *health tourism*; 2. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif melalui pendekatan 6A (atraksi, aktivitas, aksesibilitas, amenitas, *anciallary*, dan *available package*); 3. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
				dan dunia usaha/asosiasi usaha; 4. Peningkatan konektivitas antara kawasan strategis pariwisata dengan kawasan strategis/pertumbuhan ekonomi;
Membangun tata kelola dan regulasi yang adaptif dan berintegritas untuk penguatan pondasi tata kelola menuju transformasi	1. Penyusunan regulasi yang efektif; 2. Penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan kolaboratif; 3. Peningkatan kualitas ASN berbasis merit.	Misi 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM ASN yang responsif, adaptif, dan berkinerja tinggi	1. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah; 2. Peningkatan kualitas ASN; 3. Pengembangan karier ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
	1. Penerapan kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif; 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Universitas, Institusi Riset, Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis sebagai inisiasi Innovation Valley Kota Tangerang Selatan;	Misi 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, berkualitas, transparan, inklusif dan efisien.	1. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; 2. Penguatan tata kelola pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi;

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
	3. Peningkatan dukungan digitalisasi dalam ekosistem riset dan inovasi; 4. Penguatan kapasitas riset dan inovasi terapan di bidang ekonomi fokus pada pengembangan *platform* diseminasi produk penelitian dan inovasi terapan; 5. Peningkatan produktivitas, profitabilitas dan diversifikasi BUMD; 6. Transformasi tata kelola ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan daerah; 7. Peningkatan kapasitas fiskal daerah; 8. Peningkatan stabilitas daerah dan stabilitas ekonomi sebagai daya tarik ekonomi; 9. Penerapan sistem pencegahan korupsi yang efektif dan akuntabel; 10. Penataan regulasi kerja sama dan menguatkan kerja sama multihelix daerah dalam berbagai bidang pembangunan; 11. Penerapan inovasi dan *creative financing* yang berkelanjutan untuk prioritas pembangunan sektor strategis.			3. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance;* 4. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah; 5. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW; 6. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar daerah untuk pengelolaan kawasan perkotaan; 7. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; 8. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
				9. Penguatan pengendalian inflasi daerah; 10. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global; 11. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri; 12. Peningkatan produktivitas, profitabilitas dan diversitas BUMD
	1. Penerapan *smart government* berbasis teknologi informasi pada pelayanan publik dalam *platform* yang terintegrasi; 2. Melindungi hak-hak sipil masyarakat seperti mengakses informasi, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat;	Misi 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi dan digitalisasi yang terpadu, terpersonalisasi serta *user centric*	Percepatan digitalisasi pelayanan publik, peningkatan respons terhadap laporan masyarakat dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
	3. Penguatan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti lembaga swadaya masyarakat, karang taruna, dan lain-lain sebagai wahana penyalur aspirasi masyarakat; 4. Membangun kesadaran, partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan mereka.			
Pembangunan kewilayahan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi	1. Pemenuhan akses sanitasi yang aman melalui pendekatan aspek keterjangkauan, keberlanjutan, aman dan inklusif serta inisiasi SPALD Tingkat Kota; 2. Percepatan penyediaan dan pengembangan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan untuk meningkatkan akses pelayanan SPAM jaringan perpipaan yang berkualitas dan terjangkau; 3. Penyediaan infrastruktur layanan perkotaan, termasuk amenitas perkotaan, yang terintegrasi dan bertahap inklusif; 4. Penggunaan Internet of Things (IoT) pada layanan infrastruktur perkotaan strategis untuk mendukung pembangunan kota cerdas;	Misi 4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik (transportasi, drainase, air bersih, sanitasi) yang inklusif, terintegrasi dan ramah lingkungan.	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan dan sanitasi yang aman; 2. Peningkatan konektivitas dan kemantapan infrastruktur akses jalan yang terhubung pada jalan provinsi, nasional, jalan tol serta terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang memperlancar aktivitas logistik/barang/jasa 3. Penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan; 4. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan untuk

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
	5. Penyediaan sistem transportasi hijau (berbasis rel dan/atau berbasis jalan) yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan bangkitan perjalanan.			mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan; 5. Percepatan penyediaan SPAM jaringan perpipaan; 6. Percepatan penyediaan SPALD Tingkat Kota, termasuk IPLT Kota; 7. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/ atau berbasis jalan yang saling terintegrasi pada kawasan, termasuk kawasan TOD; 8. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal; 9. Percepatan pengadaan tanah sesuai LARAP-3C (*Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated*) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, *trust*, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
				dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
	1. Penyediaan rumah layak huni dan terjangkau; 2. Pencegahan dan penanganan kawasan kumuh perkotaan; 3. Penyediaan PSU Perumahan lainnya sesuai standar dan terintegrasi; 4. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sekaligus Ruang Publik untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan dan mendorong interaksi sosial yang positif.		Menata dan mengembangkan sistem permukiman yang layak, terjangkau, inklusif dan terintegrasi dengan transportasi publik, sarana dan prasarana perkotaan (seperti: air minum, air limbah, pengelolaan sampah, ruang hijau publik)	1. Penyediaan perumahan yang layak; 2. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau
	1. Penyediaan infrastruktur pengelolaan (Pengolahan dan Pemilahan/Pengurangan) sampah berbasis teknologi dan ramah lingkungan; 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkuler; 3. Kerja sama pengelolaan sampah 4. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta perubahan iklim; 5. Penegakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis;		Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan melalui inovasi, edukasi dan partisipatif	1. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan; 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy* melalui arah kebijakan pengurangan penggunaan sumber daya, perpanjangan daya guna produk dan material dan peningkatan daur ulang dan pemanfaatan sisa

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
	6. Penerapan insentif dan disinsentif tata ruang; 7. Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; 8. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan (termasuk standarisasi dan regulasi) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 9. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten untuk mengurangi pencemaran lingkungan; 10. Percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan penurunan emisi GRK.			produksi dan konsumsi pada sektor prioritas (pangan, retail, elektronik, konstruksi, tekstil dan sebagainya); 3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.
	1. Pengelolaan Krisis dan Bencana melalui pengembangan rencana tanggap darurat yang efektif dan pelaksanaan strategi mitigasi bencana untuk mengurangi dampak bencana alam atau krisis lainnya terhadap masyarakat perkotaan; 2. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air; 3. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya air, terutama dalam penanganan banjir melalui		Memperkuat ketahanan daerah terhadap pangan, bencana dan perubahan iklim melalui edukasi, inovasi, dan pendekatan partisipatif.	1. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim; 2. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim; 3. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap ketersediaan air; 4. Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan guna

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
	konservasi SDA, pengendalian daya rusak SDA, dan sebagainya; 4. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana; 5. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui pengembangan urban farming dan penguatan kerja sama dengan daerah-daerah penghasil pangan dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan.			mendukung ketahanan energi; 5. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green & grey infrastructure*); 6. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana
	Pengarusutamaan nilai budaya positif dan nilai agama dalam keluarga dan masyarakat untuk meminimalkan pengaruh kebudayaan luar di era globalisasi;		Meningkatkan ketahanan sosial, budaya dan harmoni masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pendidikan	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; 3. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan;

Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 Periode 1 Tahun 2025-2029	Fokus Arah Kebijakan periode 1 (Tahun 2025-2029) sesuai RPJPD	Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029	*Highlight* Transformatif pada Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
				4. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.

Tabel III.6. Penyelarasan Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dengan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029		RPJMD KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025-2029	
MISI	**ARAH KEBIJAKAN**	**ARAH KEBIJAKAN**	**MISI**
MISI 1, MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL PANCASILA DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA MELALUI REFORMASI BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN TANGGUH	Pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup terhadap berbagai aspek, deregulasi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas.	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, berkualitas, transparan, inklusif dan efisien.	Misi 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas
	Menciptakan ASN yang inovatif, adaptif, dan berintegritas melalui kesempatan pengembangan karir, adanya seleksi berbasis meritokrasi dalam penempatan talenta sesuai tingkat potensi dan kinerja untuk mendukung pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas serta terwujudnya kesejahteraan bagi birokrat Provinsi Banten.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM ASN yang responsif, adaptif, dan berkinerja tinggi.	
	Meningkatkan kualitas dan penguatan peran kelembagaan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik melalui kerja sama daerah dan pengendalian pembangunan.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM ASN yang responsif, adaptif, dan berkinerja tinggi.	
	Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memenuhi prinsip smart governance sebagai fondasi pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi dan digitalisasi yang terpadu, terpersonalisasi serta user centric.	
	Peningkatan birokrat yang berintegritas dan inovatif dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM ASN yang responsif, adaptif, dan berkinerja tinggi.	

RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029		RPJMD KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025-2029	
MISI	**ARAH KEBIJAKAN**	**ARAH KEBIJAKAN**	**MISI**
MISI 2, MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL	Penyiapan kebijakan peningkatan potensi investasi, pembiayaan dan perluasan akses dan peningkatan daya saing SDM untuk meningkatkan produktivitas ekonomi konvensional dan syariah melalui regulasi yang efisien serta fasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas produk lokal Banten, diversifikasi usaha pertanian, dan penguatan Koperasi serta UMKM, pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lain sebagainya dalam rangka mendorong desa unggul.	Transformasi UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif melalui digitalisasi dan integrasi rantai nilai industri.	Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi
	Peningkatan kebijakan, regulasi, pembiayaan dan teknologi dalam pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan dalam mengurus peirizinan berusaha menyiapkan infrastruktur yang berkualitas dalam menunjang kawasan industri.	Memperluas peluang investasi inklusif melalui kawasan tematik serta digitalisasi *platform* promosi dan perizinan.	
	Penyiapan regulasi efisiensi pembiayaan, pengelolaan aset dan pajak daerah serta penerapan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, kolaboratif dan berintegritas.	Misi 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas
	Penyiapan regulasi tata kelola sistem sosial dan politik untuk meningkatkan keamanan dan demokrasi di daerah untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, serta memiliki nilai-nilai luhur yang dapat menjadi pondasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.	Meningkatkan ketahanan sosial, budaya dan harmoni masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pendidikan.	Misi 4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan
	Penyiapan dan pengembangan regulasi, sarana dan prasarana akomodasi aman sementara, perlindungan sebagai pusat dukungan sosial, praktis, dan memberikan rasa aman dan harapan baru serta pemberdayaan sosial penyandang PPKS dan kaum rentan.	Meningkatkan upaya perlindungan sosial yang tersistem, terintegrasi, adaptif sesuai siklus hidup, dan berbasis data satu pintu.	Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Berdaya Saing Global dan Sejahtera
	Penyiapan dan pengembangan regulasi, sarana dan prasarana hingga kemudahan akses dan modal usaha petani dan nelayan kecil dan menengah agar manfaat industrialisasi dirasakan tidak hanya oleh korporasi besar.	-	-

RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029		RPJMD KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025-2029	
MISI	**ARAH KEBIJAKAN**	**ARAH KEBIJAKAN**	**MISI**
	Penyiapan regulasi pengembangan usaha kecil dan menengah serta koperasi, pembentukan pusat inovasi dan kewirausahaan, pemberian akses pembiayaan dan modal usaha dengan skema pembiayaan mikro dan hibah usaha, mendorong pemanfaatan IPTEK untuk kesejahteraan masyarakat serta bantuan modal dalam bentuk kompetisi usaha konvensional dan syariah.	Transformasi UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif melalui digitalisasi dan integrasi rantai nilai industri.	Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi
MISI 3, MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERINTEGRITAS, BERDAYA SAING, BERKUALITAS, INOVATIF, DAN TIDAK DISKRIMINATIF	Penguatan tata kelola dan inovasi layanan pendidikan inklusif melalui penerapan digitalisasi manajemen dan pelaporan pendidikan, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memperluas pemerataan sarana-prasarana sekolah di wilayah tertinggal dan komunitas rentan.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang inklusif, berbasis teknologi dan terintegrasi dengan dunia kerja.	Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Berdaya Saing Global dan Sejahtera
	Optimalisasi pembiayaan dan mutu layanan kesehatan, memperkuat pemenuhan standar akreditasi fasilitas kesehatan hingga tingkat puskesmas dan peningkatan prestasi olahraga di masyarakat.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang inklusif, berbasis digital dan mendukung gaya hidup sehat perkotaan.	
	Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak secara holistik, pusat layanan terpadu untuk konseling psikososial, advokasi hukum, dan pelatihan vokasi.	Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi aktif perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas melalui peningkatan akses dan kompetensi terhadap sektor ekonomi dan sektor strategis pembangunan lainnya.	
	Pengembangan akses kerja, kewirausahaan, dan peran pemuda, membangun *platform* digital job matching untuk mempertemukan pencari kerja dan industri, menyelenggarakan inkubasi startup dan pelatihan skill 4.0 beserta akses pendanaan mikro dan ventura.		
MISI 4, MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS	Penguatan regulasi, pembiayaan, kualitas SDM dan tekhnologi dalam pembangunan infrastruktur akses jalan yang baik, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman berupa tempat pembuangan akhir sampah, akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak dan energi.	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik (transportasi, drainase, air bersih, sanitasi) yang inklusif, terintegrasi dan ramah lingkungan.	Misi 4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan
	Penguatan kebijakan, pembiayaan, dan tekhnologi bagi masyarakat dan tempat berlindung sementara yang didirikan untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi tunawisma, pekerja migran, anak jalanan, pasien dan keluarganya dalam mengakses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan.	Menata dan mengembangkan sistem permukiman yang layak, terjangkau, inklusif dan terintegrasi dengan transportasi publik, sarana dan prasarana perkotaan (seperti: air	

RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029		RPJMD KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025-2029	
MISI	**ARAH KEBIJAKAN**	**ARAH KEBIJAKAN**	**MISI**
	Penguatan kebijakan, pembiayaan, dan tekhnologi pelayanan transportasi umum masal bagi seluruh lapisan masyarakat menghubungkan antar kota dan desa serta pusat ekonomi.	minum, air limbah, pengelolaan sampah, ruang hijau publik).	
MISI 5, MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA HOLISTIK DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA	Penguatan tata kelola, pembiayaan, dan kualitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian alam serta meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses air bersih dan sanitasi.	Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan melalui inovasi, edukasi dan partisipatif.	
	Penguatan regulasi, sarana dan prasarana serta kapasitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan mitigasi risiko bencana guna meminimalkan dampak dan potensi kerugian akibat bencana.	Memperkuat ketahanan daerah terhadap pangan, bencana dan perubahan iklim melalui edukasi, inovasi, dan pendekatan partisipatif.	
	Penguatan kebijakan, teknologi, pengembangan transisi energi terbarukan dan pengawasan penggunaan energi bersih secara holistik.	Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan melalui inovasi, edukasi dan partisipatif.	

Arah kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan arah kebijakan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 (**Tabel III.7**). Selain itu, arah kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 juga diselaraskan dengan arah pembangunan kewilayahan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, Rencana Induk Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur, dan RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam **Tabel III.8**.

Tabel III.7. Penyelarasan Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dengan Arah Pembangunan Kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029			**RPJMD KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025-2029**	
LOKASI	**ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN**	***HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI**	**ARAH KEBIJAKAN**	**MISI**
Kawasan Pertumbuhan Perkotaan Tangerang Raya (bagian dari Kawasan Aglomerasi Wilayah Metropolitan Jakarta)	Tata kelola pemerintahan tidak korupsi dan sistem merit dalam birokrasi	Pembentukan Unit Layanan Berpredikat Zona Integritas	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM ASN yang responsif, adaptif, dan berkinerja tinggi.	Misi 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas
		Sinergi peningkatan pendapatan daerah		
		Dukungan transformasi, efisiensi reformasi birokrasi dan perkuatan reformasi hukum, melalui: i) pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); ii) penanggulangan judi dan penyelundupan; dan iii) pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, berkualitas, transparan, inklusif dan efisien.	
Jakarta- Tangerang *International Bussiness Corridor*		Dukungan pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: i) penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital; ii) pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN; iii) digitalisasi layanan publik prioritas; dan iv) pengembangan ekosistem layanan publik digital	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi dan digitalisasi yang terpadu, terpersonalisasi serta *user centric*.	
	Investasi, kemudahan industri dan penyerapan tenaga kerja	Dukungan kemudahan izin usaha dalam mendorong penyediaan lapangan kerja dengan padat karya, akses dukungan permodalan bagi tuna karya serta pengutamaan tenaga kerja lokal	Memperluas peluang investasi inklusif melalui kawasan tematik serta digitalisasi *platform* promosi dan perizinan.	Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi
		Dukungan pembangunan dan pengembangan industri halal/industri hijau/industri biru khususnya pada industri unggulan, potensial, dan berorientasi ekspor sesuai potensi daerah yang ditetapkan oleh RTRW daerah	Transformasi UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif melalui digitalisasi dan integrasi rantai nilai industri.	
	Zona ekonomi baru, penguatan UMKM, dan pemerataan ekonomi	Dukungan pengembangan UMKM terhadap akses pasar, perbankan, peningkatan kompetensi dan kualitas produk usaha sesuai unggulan wilayah, pendampingan terhadap inovasi produk dan layanan, menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan wirausaha		
		Dukungan optimalisasi Koperasi Merah Putih		
		Dukungan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan ekonomi digital		
	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	Dukungan pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Banten, melalui: i) desa budaya; ii) pelindungan, pelestarian, dan revitalisasi warisan budaya; iii) pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan (cagar budaya, permuseuman, dan pusat kebudayaan lainnya); dan iv) jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, sertifikasi kompetensi pelaku budaya dan pemberdayaan masyarakat hukum adat	Meningkatkan ketahanan sosial, budaya dan harmoni masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pendidikan.	Misi 4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan

RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025-2029	
LOKASI	**ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN**	***HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI**	**ARAH KEBIJAKAN**	**MISI**
		Dukungan pengembangan pariwisata yang terintegrasi, berkualitas, berbasis masyarakat lokal dan berkelanjutan	Meningkatkan daya saing pariwisata perkotaan yang terintegrasi dengan ekonomi berbasis komunitas sebagai motor pertumbuhan daerah.	Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi
		Pengembangan pariwisata berupa *event tourism* internasional, wisata alam, budaya, religi, dan *event* lainnya yang akan diintervensi lintas sektoral		
		Dukungan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan ekonomi syariah		
		Dukungan pengembangan dan peningkatan *event*, infrastruktur, dan sistem informasi destinasi wisata berbasis MICE (*meetings, incentives, conventions, and exhibitions*)		
	Sekolah gratis untuk SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Provinsi Banten	Dukungan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah) melalui: i) perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); ii) revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas; iii) penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran; iv) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; v) revitalisasi pendidikan nonformal; vi) penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; vii) modernisasi dan akselerasi STEM (*Science, Technology, Engineering, And Mathematics*)	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang inklusif, berbasis teknologi dan terintegrasi dengan dunia kerja.	Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Berdaya Saing Global dan Sejahtera
		Dukungan pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita		
		Dukungan percepatan transformasi digital, melalui: i) penyederhanaan proses bisnis; ii) perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; iii) pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; iv) perluasan layanan penyiaran digital; dan v) layanan digital terpadu, terpersonalisasi dan berfokus pada user centric		
		Dukungan penguatan pendidikan, pelatihan vokasi, penyediaan, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja maupun layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pembangunan/pengembangan/peni ngkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan wilayah	Memperkuat daya saing tenaga kerja dengan *upskilling* dan re-skilling vokasi adaptif, sertifikasi berbasis potensi daerah dan pemagangan produktif.	Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi
		Pelaksanaan pendidikan gratis tingkat pendidikan menengah dan khusus	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang inklusif, berbasis teknologi dan terintegrasi dengan dunia kerja.	Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Berdaya Saing Global dan Sejahtera
		Pembangunan unit sekolah baru SMA, SMK dan pendidikan khusus (untuk anak berkebutuhan khusus) dengan memerhatikan kondisi wilayah		

RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025-2029	
LOKASI	**ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN**	***HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI**	**ARAH KEBIJAKAN**	**MISI**
	Akses kesehatan bagi warga dan pelayanan sosial tanpa diskriminasi	Dukungan optimalisasi fasilitas kesehatan (sarana dan prasarana yang memadai) dan program kesehatan yang adil dan merata	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang inklusif, berbasis digital dan mendukung gaya hidup sehat perkotaan.	Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Berdaya Saing Global dan Sejahtera
		Dukungan peningkatan pelayanan kesehatan untuk menangani kasus gigi dan mulut/kasus kesehatan mental/kasus multi-penyakit pada lanjut usia/kasus ketergantungan obat serta pembudayaan hidup sehat		
		Dukungan peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: i) Posyandra; ii) peningkatan kualitas layanan kesehatan promotif, pr*eventi*f, rehabilitatif, dan kuratif; iii) penyediaan sarana-prasarana kesehatan primer dan rujukan; iv) pemerataan pelayanan kesehatan serta penuntasan eliminasi penyakit prioritas, menular, dan tropis terabaikan; v) penurunan kematian ibu dan anak; vi) pencegahan dan penurunan stunting dan penuntasan TBC; vii) peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kesehatan reproduksi; dan viii) penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis		
		Dukungan penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: i) penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; dan ii) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan Dan Ii) Penguatan Tata Kelola Dan Pelembagaan Pug (Pengarusutamaan Gender) Dalam Proses Pembangunan	Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi aktif perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas melalui peningkatan akses dan kompetensi terhadap sektor ekonomi dan sektor strategis pembangunan lainnya.	
		Dukungan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terahdap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia secara inklusif dalam proses pembangunan	Meningkatkan upaya perlindungan sosial yang tersistem, terintegrasi, adaptif sesuai siklus hidup, dan berbasis data satu pintu.	
		Dukungan pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan dengan mengupayakan pengoptimalan pemanfaatan satu sistem Regsosek maupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)		
		Dukungan pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang inklusif, berbasis digital dan mendukung gaya hidup sehat perkotaan.	
		Dukungan Pencapaian UHC		
		Dukungan pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita		
		Dukungan pembangunan sekolah rakyat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang inklusif, berbasis teknologi	

RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025-2029	
LOKASI	**ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN**	***HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI**	**ARAH KEBIJAKAN**	**MISI**
			dan terintegrasi dengan dunia kerja.	
	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Dukungan intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)	Memperkuat ketahanan daerah terhadap pangan, bencana dan perubahan iklim melalui edukasi, inovasi, dan pendekatan partisipatif.	Misi 4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan
		Dukungan peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan yang berkelanjutan		
		Dukungan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sesuai krakteristik dan potensi daerah guna mendukung kemandirian pangan		
	Pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, sumber daya air dan hunian layak	Dukungan penyusunan masterplan penataan kawasan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah secara terpadu	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik (transportasi, drainase, air bersih, sanitasi) yang inklusif, terintegrasi dan ramah lingkungan.	Misi 4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan
		Pembangunan konektivitas kawasan produktif ekonomi (infrastruktur dan sistem logistik)		
		Pembangunan PJU, sarana dan prasarana perhubungan serta transportasi publik massal yang ramah lingkungan, nyaman, mudah diakses, aman, dan efisien		
		Dukungan pembangunan SPAM Regional Karian Serpong		
		Dukungan Pembangunan IPLT/IPAL dan SPAL Perkotaan		
		Pembangunan Kebinamargaan		
		Pembangunan PSU permukiman dan penataan permukiman kumuh terpadu kewenangan Provinsi	Menata dan mengembangkan sistem permukiman yang layak, terjangkau, inklusif dan terintegrasi dengan transportasi publik, sarana dan prasarana perkotaan (seperti: air minum, air limbah, pengelolaan sampah, ruang hijau publik).	
		Dukungan Pembangunan rumah/hunian murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial		
		Dukungan penyelesaian masalah persampahan Terintegrasi Hulu-Hilir	Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan melalui inovasi, edukasi dan partisipatif.	
		Dukungan pengembangan kawasan perkotaan Tangerang Raya (bagian dari kawasan Aglomerasi Jakarta)	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik (transportasi, drainase, air bersih, sanitasi) yang inklusif, terintegrasi dan ramah lingkungan.	
		Dukungan rintisan Kerata Api Tangerang Raya-Serang		
		Dukungan penyediaan infrastrukur layanan dasar (air baku, air minum, penanganan limbah/sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perkotaan, rumah/hunian layak huni dan ruang terbuka hijau)	Menata dan mengembangkan sistem permukiman yang layak, terjangkau, inklusif dan terintegrasi dengan transportasi publik, sarana dan prasarana perkotaan (seperti: air minum, air limbah, pengelolaan sampah, ruang hijau publik).	
		Dukungan reformasi pengelolaan sampah dan sanitasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang berkelanjutan, melalui: i) perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan;	Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan melalui inovasi, edukasi dan partisipatif.	

RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025-2029	
LOKASI	**ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN**	***HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI**	**ARAH KEBIJAKAN**	**MISI**
		ii) peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan di TPA/LUR; iii) adopsi teknologi pemrosesan sampah dan sanitasi yang berkelanjutan; dan iv)) dukungan pembangunan TPST di Tangerang Raya		
		Dukungan Pembangunan Transportasi Massal Aglomerasi DKJ (MRT East-West dan Transjakarta), Transportasi Massal Perkotaan, dan TOD	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik (transportasi, drainase, air bersih, sanitasi) yang inklusif, terintegrasi dan ramah lingkungan.	
		Dukungan Pembangunan Transportasi Massal Aglomerasi DKJ MRT Lebak Bulus-Serpong dan Transjakarta dan MRT Lebak Bulus- Pondok Cabe-Rawa Buntu (Jakarta-Tangerang Selatan) beserta TOD		
		Dukungan pembangunan jalan Tol Serpong-Balaraja dan Tol Bogor- Serpong (via Parung)		
		Dukungan optimalisasi Wilayah Sungai Cisadane dalam mendukung pemenuhan kebutuhan konservasi dan air minum		
	Lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan serta resiliensi terhadap bencana	Dukungan peningkatan ketahanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (khususnya ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di Kawasan Aglomerasi Jakarta (Tangerang Raya) termasuk penerapan SIH3 dan FEWS)	Memperkuat ketahanan daerah terhadap pangan, bencana dan perubahan iklim melalui edukasi, inovasi, dan pendekatan partisipatif.	Misi 4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan
		Resiliensi bencana dan adaptasi perubahan iklim guna mendukung ketahanan daerah melalui proses pendidikan dan penyadaran sejak dini		
		Dukungan *Nature-Based Solution dan Gray Infrastructure* untuk mitigasi		
		Dukungan percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: i) pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan; ii) penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi; iii) adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik; iv) penerapan *internet of things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time*; dan v) perluasan penggunaan kendaraan listrik	Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan melalui inovasi, edukasi dan partisipatif.	
		Dukungan perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi		
		Dukungan Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Dan Danau Melalui Pengurangan Beban Pencemar Dari Sumber Domestik Dan Hal Lainnya Sebagai Upaya Mengembalikan Mutu Air		
		Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi		

Tabel III.8. Penyelarasan Arah Kebijakan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dengan Arah Pembangunan Kewilayahan Nasional, Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur, dan Rancangan Akhir RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

RPJMN Tahun 2025-2029			**Rencana Induk Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur**		**Rancangan Akhir RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045**			**RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029**
Arah Pembangunan Kewilayahan			**Arah Pembangunan Kewilayahan**		**Indikasi Program Kewilayahan**			**Arah Kebijakan**
Arah Kebijakan	**Lokasi Prioritas**	**Proyek/ *Highlight* Indikasi Intervensi**	**Strategi**	**Tinjauan Program**	**Program Utama**	**Indikasi Program**	**Lokasi**	
Program Prioritas	Seluruh Wilayah	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	Strategi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Sesuai Koridor Pembangunan	Perumahan layak huni dan terjangkau beserta infrastruktur penunjang yang mendukung kehidupan perkotaan	Kawasan Perumahan	Pengembangan kawasan perumahan dengan konsep hunian berimbang	Kota Tangerang Selatan	Arah kebijakan pada Misi 4: Menata dan mengembangkan sistem permukiman yang layak, terjangkau, inklusif dan terintegrasi dengan transportasi publik, sarana dan prasarana perkotaan (seperti: air minum, air limbah, pengelolaan sampah, ruang hijau publik)
						Pengembangan perumahan baru vertikal secara proporsional dengan memerhatikan daya dukung wilayah dan tingkat pelayanan infrastruktur perkotaan		
						Penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan perumahan vertikal		
					Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota, Taman Kecamatan Pemeliharaan dan penataan Pemakaman Pengembangan taman-taman pada jalur hijau	Kota Tangerang Selatan	Arah kebijakan pada Misi 4: Menata dan mengembangkan sistem permukiman yang layak, terjangkau, inklusif dan terintegrasi dengan transportasi publik, sarana dan prasarana

RPJMN Tahun 2025-2029			Rencana Induk Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur		Rancangan Akhir RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045			RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Arah Pembangunan Kewilayahan			**Arah Pembangunan Kewilayahan**		**Indikasi Program Kewilayahan**			**Arah Kebijakan**
Arah Kebijakan	**Lokasi Prioritas**	**Proyek/ *Highlight* Indikasi Intervensi**	**Strategi**	**Tinjauan Program**	**Program Utama**	**Indikasi Program**	**Lokasi**	
						Penyerahan PSU Perumahan serta Inventarisasi Aset Pemerintah Kota yang dapat dimanfaatakan sebagai RTH Pengembangan Jalur Hijau Jalan Pengembangan Konsep Taman Vertikal / Taman di Atas Bangunan / Gedung Rehabilitasi Kawasan Sempadan Sungai		perkotaan (seperti: air minum, air limbah, pengelolaan sampah, ruang hijau publik)
			Strategi Pembangunan bidang Perumahan	Hunian Layak dan Berkelanjutan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Kawasan Perumahan	Penanganan Kawasan Kumuh	Kota Tangerang Selatan	Arah kebijakan pada Misi 4: Menata dan mengembangkan sistem permukiman yang layak, terjangkau, inklusif dan terintegrasi dengan transportasi publik, sarana dan prasarana perkotaan (seperti: air minum, air limbah, pengelolaan sampah, ruang hijau publik)
Kawasan Aglomerasi Jakarta/	Jakarta-Tangerang International	Pembangunan MRT Lebakbulus-Serpong	Strategi Pembanguna	Rencana pengembangan TOD Ciputat-	Kawasan Transportasi	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan transportasi	Kota Tangerang Selatan	Arah kebijakan pada Misi 4: Meningkatkan kualitas infrastruktur

RPJMN Tahun 2025-2029			Rencana Induk Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur		Rancangan Akhir RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045			RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Arah Pembangunan Kewilayahan			**Arah Pembangunan Kewilayahan**		**Indikasi Program Kewilayahan**			**Arah Kebijakan**
Arah Kebijakan	**Lokasi Prioritas**	**Proyek/ *Highlight* Indikasi Intervensi**	**Strategi**	**Tinjauan Program**	**Program Utama**	**Indikasi Program**	**Lokasi**	
WM Jakarta	*Business Corridor* dan *Jakarta Global City Urban Tourism* (*Central-South*) Provinsi Banten: Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang		n Bidang Transportasi	Jurangmangu dan TOD Rawa Buntu		Optimalisasi dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi	Kota Tangerang Selatan	publik (transportasi, drainase, air bersih, sanitasi) yang inklusif, terintegrasi dan ramah lingkungan
						Penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda yang terintegerasi	Kota Tangerang Selatan	
						Pengembangan kawasan berorientasi transit yang saling terintegerasi	Kota Tangerang Selatan	
1. Kawasan Aglomerasi Jakarta/ WM Jakarta 2. Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang (A1); Kawasan Pengembnagan	1. Provinsi Banten: Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan 2.Kota Cilegon, Kota Serang, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang,	1. Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan 2. Peningkatan Ketahanan Banjir Perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan	Strategi Pembangunan Bidang Penanggulangan Banjir	Mitigasi peningkatan frekuensi dan intensitas banjir akibat perubahan iklim dan urbanisasi, intervensi dan kolaborasi lintas sektoral di kawasan hulu, tengah, dan hilir	Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir	Pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir	Sungai Cisadane; Sungai Pesanggrahan; Sungai Angke; Sungai Jeletreng; Sungai Cibarengkok; Sungai Cirompang; Sungai Cisalak; Sungai Cisengkol; Sungai Cibenda; Sungai Ciater; Sungai Ciputat; Sungai Kedaung; Sungai Serua;	Arah Kebijakan pada Misi 4: Memperkuat ketahanan daerah terhadap pangan, bencana dan perubahan iklim melalui edukasi, inovasi, dan pendekatan partisipatif

RPJMN Tahun 2025-2029			Rencana Induk Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur		Rancangan Akhir RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045			RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Arah Pembangunan Kewilayahan			**Arah Pembangunan Kewilayahan**		**Indikasi Program Kewilayahan**			**Arah Kebijakan**
Arah Kebijakan	**Lokasi Prioritas**	**Proyek/ *Highlight* Indikasi Intervensi**	**Strategi**	**Tinjauan Program**	**Program Utama**	**Indikasi Program**	**Lokasi**	
Industri Cilegon-Serang-Tangerang (A2), dan Jakarta-Tangerang *International Business Corridor*	Kota Tangerang Selatan						Sungai Kali Baru; Sungai Cantiga; Sungai Enggram Gintung; Sungai Inlet Pesanggrahan I; Sungai Inlet Pesanggrahan II; Sungai Outlet Gintung.	
					Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir	Pengembangan Tandon	Tandon Bukit Pamulang Indah; Tandon Ciater; Tandon Nusaloka/Maruga Pond Park; Tandon Jurang Mangu Barat; Tandon Jeletreng River Park; Tandon Lengkong Wetan; Tandon Lengkong Karya; Tandon Pondok Jagung; Tandon Puri Bintaro Hijau I; Tandon Puri Bintaro Hijau II; Tandon Kampung Bulak; Tandon Griya	

RPJMN Tahun 2025-2029			Rencana Induk Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur		Rancangan Akhir RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045			RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Arah Pembangunan Kewilayahan			Arah Pembangunan Kewilayahan		Indikasi Program Kewilayahan			Arah Kebijakan
Arah Kebijakan	**Lokasi Prioritas**	**Proyek/ *Highlight* Indikasi Intervensi**	**Strategi**	**Tinjauan Program**	**Program Utama**	**Indikasi Program**	**Lokasi**	
							Asri; Tandon Pondok Aren; Tandon Serua River Park; Tandon Sawah Lama I; Tandon Sawah Lama II; Tandon Puri Sentosa; Tandon Babakan; Tandon Pamulang Asri; Tandon Buaran; Tandon Sarana Indah Permai; Tandon Citra Kencana Legoso; Tandon Puri Bintaro Indah; Tandon Puspiptek/BRIN; Tandon Kodiklat; dan Tandon Sutera Telaga Biru	
						Pemeliharaan Situ	Situ Pondok Tujuh Muara/Ciledug; Situ Bungur; Situ Legoso/Kuru; Situ Parigi; Situ Pondok Jagung;	

RPJMN Tahun 2025-2029			Rencana Induk Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur		Rancangan Akhir RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045			RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Arah Pembangunan Kewilayahan			**Arah Pembangunan Kewilayahan**		**Indikasi Program Kewilayahan**			**Arah Kebijakan**
Arah Kebijakan	**Lokasi Prioritas**	**Proyek/ *Highlight* Indikasi Intervensi**	**Strategi**	**Tinjauan Program**	**Program Utama**	**Indikasi Program**	**Lokasi**	
							Situ Pamulang; Situ Rompong; Situ Looksome; Situ Gintung; Situ Kayu Antap; Situ Pondok Tujuh Muara/Ciledug;	
-	-	-	Strategi Pembangunan Bidang Transportasi	Penataan sistem transportasi terpadu	Jalan Tol	Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan	Jalan Bebas Hambatan Serpong-Balaraja	Arah kebijakan pada Misi 4: Meningkatkan kualitas infrastruktur publik (transportasi, drainase, air bersih, sanitasi) yang inklusif, terintegrasi dan ramah lingkungan
					Rencana Jaringan Kereta Api	Pengembangan Jaringan Kereta Api Antar Kota	Kota Tangerang Selatan	
						Pengembangan Jalur Kereta Api Perkotaan		
					Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C		
					Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Optimalisasi sarana dan prasarana transportasi	Kota Tangerang Selatan	Arah kebijakan pada Misi 4: Meningkatkan kualitas infrastruktur publik (transportasi, drainase, air bersih, sanitasi) yang inklusif, terintegrasi dan ramah lingkungan
					Pengembangan jaringan jalan	Jalan arteri sekunder, kolektor primer, kolektor	Kota Tangerang Selatan	Arah kebijakan pada Misi 4: Meningkatkan kualitas infrastruktur

RPJMN Tahun 2025-2029			Rencana Induk Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur		Rancangan Akhir RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045			RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Arah Pembangunan Kewilayahan			**Arah Pembangunan Kewilayahan**		**Indikasi Program Kewilayahan**			**Arah Kebijakan**
Arah Kebijakan	**Lokasi Prioritas**	**Proyek/ *Highlight* Indikasi Intervensi**	**Strategi**	**Tinjauan Program**	**Program Utama**	**Indikasi Program**	**Lokasi**	
						sekunder, lokal sekunder, dan tol		publik (transportasi, drainase, air bersih, sanitasi) yang inklusif, terintegrasi dan ramah lingkungan
					Perwujudan Sistem Jaringan Drainase	Pengembangan Jaringan Drainase Primer, Sekunder dan Tersier	Kota Tangerang Selatan	Arah kebijakan pada Misi 4: Meningkatkan kualitas infrastruktur publik (transportasi, drainase, air bersih, sanitasi) yang inklusif, terintegrasi dan ramah lingkungan
-	-	-	Strategi pembangunan bidang air baku dan air minum	Pemberlakuan diskresi (kekhususan) di Kawasan Aglomerasi Jakarta	Kawasan Perlindungan Setempat	Pemeliharaan dan pengembangan jalur hijau di sepanjang sempadan sungai	Kota Tangerang Selatan	Arah kebijakan pada Misi 4: Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan melalui inovasi, edukasi dan partisipatif
						Mempertahankan fungsi sempadan situ, sempadan tandon, sempadan sungai/kali dan mengendalikan perkembangannya	Kota Tangerang Selatan	
-	-	-			Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan Unit Air Baku	Kecamatan Pamulang,Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Setu	Arah kebijakan pada Misi 4: Meningkatkan kualitas infrastruktur publik (transportasi, drainase, air bersih, sanitasi) yang inklusif,

RPJMN Tahun 2025-2029			Rencana Induk Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur		Rancangan Akhir RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045			RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Arah Pembangunan Kewilayahan			**Arah Pembangunan Kewilayahan**		**Indikasi Program Kewilayahan**			**Arah Kebijakan**
Arah Kebijakan	**Lokasi Prioritas**	**Proyek/ *Highlight* Indikasi Intervensi**	**Strategi**	**Tinjauan Program**	**Program Utama**	**Indikasi Program**	**Lokasi**	
								terintegrasi dan ramah lingkungan
Proyek Strategis Nasional	DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semaraang, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado	Program Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Strategi Pembangunan Bidang Persampahan	Optimalisasi/Rehabilitasi /Peningkatan TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan, termasuk Pembangunan PLTSa	Pengembangan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Pengembangan Infrastruktur Pembangkitan tenaga Listrik Tenaga Sampah	Kecamatan Serpong dan/atau Kecamatan Setu	Arah Kebijakan pada Misi 4: Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan melalui inovasi, edukasi dan partisipatif
Kawasan Aglomerasi Jakarta/ WM Jakarta	Jakarta-Tangerang International Business Corridor dan Jakarta *Global City Urban Tourism* (*Central-South*): Provinsi Banten: Kota Tangerang Selatan,	Pembangunan TPST Regional Tangerang Raya		Regionalisasi Pelayanan Sistem Persampahan pada Tahap Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan	Pengembangan TPS 3R	Seluruh Kecamatan	Arah Kebijakan pada Misi 4: Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan melalui inovasi, edukasi dan partisipatif
						Pengembangan TPST	Kecamatan Serpong dan Pondok Aren	
		Pengembangan SPAL Regional Tangerang dan Tangerang Selatan			Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPLT)	Kecamatan Setu	Arah Kebijakan pada Misi 4: Meningkatkan kualitas infrastruktur publik (transportasi, drainase, air bersih, sanitasi) yang inklusif, terintegrasi dan ramah lingkungan

RPJMN Tahun 2025-2029			Rencana Induk Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur		Rancangan Akhir RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045			RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Arah Pembangunan Kewilayahan			**Arah Pembangunan Kewilayahan**		**Indikasi Program Kewilayahan**			**Arah Kebijakan**
Arah Kebijakan	**Lokasi Prioritas**	**Proyek/ *Highlight* Indikasi Intervensi**	**Strategi**	**Tinjauan Program**	**Program Utama**	**Indikasi Program**	**Lokasi**	
	Kota Tangerang							
			Strategi bidang pengelolaan bidang lingkungan hidup	Pajak lingkungan hidup yang dapat diberlakukan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas ekonomi yang mencemari lingkungan				Arah Kebijakan pada Misi 4: Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan melalui inovasi, edukasi dan partisipatif
Program Hasil Terbaik Cepat	Seluruh Wilayah	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	Strategi pembangunan bidang kesehatan	Pengembangan pelayanan publik bidang kesehatan	-	-	-	Arah Kebijakan pada Misi 1: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang inklusif, berbasis digital dan mendukung gaya hidup sehat perkotaan
-	-	-	Strategi pembangunan bidang pendidikan	Peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan	-	-	-	Arah Kebijakan pada Misi 1: Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang inklusif, berbasis teknologi dan terintegrasi dengan dunia kerja
-	-	-	-	-	Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan CBD dan TOD	Arah kebijakan pada misi 2: Memperluas peluang investasi inklusif melalui kawasan tematik serta

RPJMN Tahun 2025-2029			Rencana Induk Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur		Rancangan Akhir RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045			RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Arah Pembangunan Kewilayahan			**Arah Pembangunan Kewilayahan**		**Indikasi Program Kewilayahan**			**Arah Kebijakan**
Arah Kebijakan	**Lokasi Prioritas**	**Proyek/ *Highlight* Indikasi Intervensi**	**Strategi**	**Tinjauan Program**	**Program Utama**	**Indikasi Program**	**Lokasi**	
								digitalisasi *platform* promosi dan perizinan
					Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pengembangan kegiatan jasa dan perdagangan pada pusat-pusat kegiatan kawasan	Kota Tangerang Selatan	Arah kebijakan pada misi 2: Memperluas peluang investasi inklusif melalui kawasan tematik serta digitalisasi *platform* promosi dan perizinan
					Kawasan Campuran	Pengembangan Kawasan Secara Berimbang	Kota Tangerang Selatan	Arah Kebijakan pada Misi 2: Memperluas peluang investasi inklusif melalui kawasan tematik serta digitalisasi *platform* promosi dan perizinan
					Kawasan Perkantoran	Penataan dan pengoptimalan pengembangan kawasan kantor pemerintahan skala nasional, provinsi dan kota yang sudah berkembang	Kota Tangerang Selatan	Arah Kebijakan pada Misi 2: Memperluas peluang investasi inklusif melalui kawasan tematik serta digitalisasi *platform* promosi dan perizinan
					Kawasan Infrastruktur Perkotaan	Pengembangan dan penataan kawasan infrastruktur perkotaan yang serasi	Kota Tangerang Selatan	Arah Kebijakan pada Misi 4: Meningkatkan kualitas infrastruktur publik (transportasi, drainase, air bersih, sanitasi) yang inklusif,

RPJMN Tahun 2025-2029			Rencana Induk Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur		Rancangan Akhir RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045			RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Arah Pembangunan Kewilayahan			**Arah Pembangunan Kewilayahan**		**Indikasi Program Kewilayahan**			**Arah Kebijakan**
Arah Kebijakan	**Lokasi Prioritas**	**Proyek/ *Highlight* Indikasi Intervensi**	**Strategi**	**Tinjauan Program**	**Program Utama**	**Indikasi Program**	**Lokasi**	
								terintegrasi dan ramah lingkungan
					Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Riset dan Teknologi Tinggi	Pengembangan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Riset dan Teknologi Tinggi	Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie BRIN	Arah kebijakan pada Misi 3: Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi dan digitalisasi yang terpadu, terpersonalisasi serta *user centric.*
-	-	-	Strategi pembangunan bidang pariwisata	Pengembangan potensi *medical tourism*, kota pendidikan, serta pusat perbelanjaan sebagai daya tarik tambahan.	-	-	-	Arah kebijakan pada misi 2: Meningkatkan daya saing pariwisata perkotaan yang terintegrasi dengan ekonomi berbasis komunitas sebagai motor pertumbuhan daerah
-	-	-		Penyelenggaraan acara berkelas dunia seperti festival budaya, olahraga, dan MICE untuk menarik wisatawan internasional	-	-	-	Arah Kebijakan pada Misi 2: Meningkatkan daya saing pariwisata perkotaan yang terintegrasi dengan ekonomi berbasis komunitas sebagai motor pertumbuhan daerah

RPJMN Tahun 2025-2029			Rencana Induk Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur		Rancangan Akhir RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045			RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Arah Pembangunan Kewilayahan			**Arah Pembangunan Kewilayahan**		**Indikasi Program Kewilayahan**			**Arah Kebijakan**
Arah Kebijakan	**Lokasi Prioritas**	**Proyek/ *Highlight* Indikasi Intervensi**	**Strategi**	**Tinjauan Program**	**Program Utama**	**Indikasi Program**	**Lokasi**	
-	-	-	Strategi Pembangunan Bidang Pengelolaan UMKM dan Sektor Informal	Kolaborasi dan sinkronisasi kebijakan UMKM dan Koperasi	-	-	-	Arah kebijakan pada misi 2: Transformasi UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif melalui digitalisasi dan integrasi rantai nilai industri
-	-	-	-	-	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	Pengembangan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	Kota Tangerang Selatan	Arah kebijakan pada Misi 4: Meningkatkan ketahanan sosial, budaya dan harmoni masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pendidikan
					Kawasan Cagar Budaya	Pelestarian Kawasan Cagar Budaya		
					Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Mempertahankan perkantoran dan instansi pertahanan dan keamanan	Kota Tangerang Selatan	Arah kebijakan pada Misi 4: Meningkatkan ketahanan sosial, budaya dan harmoni masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pendidikan
					Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi bencana	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana	Kota Tangerang Selatan	Arah Kebijakan pada Misi 4: Memperkuat ketahanan daerah terhadap pangan, bencana dan perubahan iklim melalui edukasi, inovasi, dan pendekatan partisipatif

RPJMN Tahun 2025-2029			Rencana Induk Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur		Rancangan Akhir RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045			RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029
Arah Pembangunan Kewilayahan			**Arah Pembangunan Kewilayahan**		**Indikasi Program Kewilayahan**			**Arah Kebijakan**
Arah Kebijakan	**Lokasi Prioritas**	**Proyek/ *Highlight* Indikasi Intervensi**	**Strategi**	**Tinjauan Program**	**Program Utama**	**Indikasi Program**	**Lokasi**	
					Kawasan Pertanian Hortikultura	Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu sebagai pusat ketahanan pangan	Kecamatan Serpong	Arah Kebijakan pada Misi 4: Memperkuat ketahanan daerah terhadap pangan, bencana dan perubahan iklim melalui edukasi, inovasi, dan pendekatan partisipatif
-	-	-	Strategi pembangunan bidang pendidikan	Kolaborasi Institusi pendidikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) agar siswa memiliki keterampilan yang relevan, utamanya bagi siswa sekolah kejuruan/vokasi	-	-	-	Arah kebijakan pada misi 2: Memperkuat daya saing tenaga kerja dengan *upskilling* dan re-skilling vokasi adaptif, sertifikasi berbasis potensi daerah dan pemagangan produktif Arah kebijakan pada Misi 1: Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang inklusif, berbasis teknologi dan terintegrasi dengan dunia kerja

3.4. Program-Program Prioritas Daerah

Program Prioritas Daerah merupakan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Program ini diturunkan melalui teknik *cascading* (penjenjangan) kinerja, dimulai dari misi sampai dengan outcome, serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Setiap program prioritas saling berkontribusi antar misi untuk mewujudkan visi. Nomenklatur program prioritas daerah mengacu pada nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya. Program prioritas RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 disajikan dalam **Tabel III.9**.

Tabel III.9. Program Prioritas RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Unggul, Inklusif	**Misi 1. Meningkatkan Kualitas SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera**	**T1. Terwujudnya SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera**			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	
			S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	
					Harapan Lama Sekolah	
					Kemampuan Literasi SD	
					Kemampuan Literasi SMP	
					Kemampuan Numerasi SD	
					Kemampuan Numerasi SMP	
				Meningkatnya Akses Pendidikan untuk semua	Persentase Penduduk Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Program Pengelolaan Pendidikan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	
					Persentase Penduduk Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	
					Persentase Penduduk Usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)	
					Persentase Penduduk Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)	
				Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program Pengembangan Kurikulum
					Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum inklusif dan pembelajaran berbasis STEAM	
				Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	
					Indeks Pemerataan Guru	
			S2. Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus		Usia Harapan Hidup	
				Meningkatnya kualitas kesehatan	Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan nifas lengkap	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			kehidupan untuk semua	perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Persentase Diabetes dalam pengendalian	
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	
					Persentase penyakit menular yang ditangani sesuai standar	
					Persentase remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah	
					Presentase lanjut usia yang mandiri	
					Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	
					Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	
					Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	
				Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	
				Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Daya Manusia Kesehatan
				Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			S3. Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial		Tingkat Kemiskinan	
					Indeks Kesejahteraan Sosial	
				Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok miskin dan rentan	Persentase kelompok miskin dan rentan yang menerima layanan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial
				Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi masyarakat miskin, kelompok rentan dan potensi sumber kesejahteraan sosial	Persentase masyarakat miskin, keluarga rentan dan potensi sumber kesejahteraan sosial yang berdaya	Program Pemberdayaan Sosial
				Meningkatnya Kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Sosia	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Sosial	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	
				Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok miskin dan rentan	Persentase kelompok miskin dan rentan yang menerima layanan perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Meningkatnya layanan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang menerima layanan perlindungan sosial	Program Penanganan Bencana
			S4. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak		Indeks Pembangunan Keluarga	
					Indeks Ketimpangan Gender	
					Indeks Perlindungan Anak	
				Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG serta peran perempuan dalam pembangunan	Persentase lembaga pemerintah yang menjadi kewenangan kab/kota yang telah melakukan pelembagaan PUG	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota yang melakukan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahteran (KS)	Persentase keluarga yg mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
				Meningkatnya layanan komprehensif terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan
				Meningkatnya kualitas pembelajaran keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Pusat Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
				Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
				Terjaminnya pemenuhan hak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				semua anak secara komprehensif.		
				Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Program Perlindungan Khusus Anak
					Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	
				Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	Program Pengendalian Penduduk
					TFR (Angka Kelahiran Total)	
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
					Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	
					Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR)	
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
					Indeks Lansia Berdaya	
					Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	
			S5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Pemuda	
				Meningkatnya daya saing pemuda	Rasio wirausaha pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	
				Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
				Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Cabor yang Masuk Pelatnas	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
					Persentase atlet yang masuk Pelatnas	
			S6. Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital		Tingkat Kegemaran Membaca	
				Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Rasio kecukupan koleksi Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
					Rasio Kecukupan Tenaga Perpustakaan	
					Persentase Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP	
				Meningkatnya Ketermanfaatan Perpustakaan	Persentase Ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Unggul, Inklusif, Inovatif	**Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi**	**T2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi**			**Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)**	
					PDRB (ADHB) Per Kapita	
					Kontribusi PDRB terhadap Provinsi Banten	
					Rasio Gini	
					Tingkat Pengangguran Terbuka	
			S1. Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global		Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	
					Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
					Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	
					Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	
					Rasio Kewirausahaan Daerah	
				Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
					Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Hotel Berbintang) (ribu orang)	
				Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
				Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Meningkatnya produktivitas industri kecil dan menengah pada level kota	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
				Meningkatnya kualitas perizinan berusaha di sektor industri	Persentase izin usaha industri yang terbit	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
				Meningkatnya pemanfaatan informasi industrI	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
				Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
				Meningkatnya pelaku usaha berorientasi ekspor	Persentase IKM yang berhasil difasilitasi ekspor	Program Pengembangan Ekspor
				Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
				Meningkatnya penggunaan dam pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
				Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
				Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Mikro
					Pertumbuhan wirausaha (Persentase)	
				Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM yang menjalin kemitraan dan ekspor	Program Pengembangan UMKM
			S2. Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi		Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	
				Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan	Presentase Rencana Tenaga Kerja yang diacu dan dilaksanakan menjadi kegiatan ketenagakerjaan	Program Perencanaan Tenaga Kerja
				Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Tersertifikasi Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
					Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja
					Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kota	
				Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Program Hubungan Industrial
					Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	
			S3. Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	
					Nilai investasi (PMDN dan PMA)	
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal dalam menjaring investor baru	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal
				Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
				Meningkatnya pemanfaatan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Unggul, Inovatif, Kolaboratif	**Misi 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas**	**T3. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola yang profesional, inovatif dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan**			**Indeks Reformasi Birokrasi**	
			S1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif		Indeks Pelayanan Publik	
				Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Program Pendaftaran Penduduk
					Persentase Penduduk Memiliki KTP	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	
				Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil
					Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	
				Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Program Perizinan Penggunaan Arsip
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai pelimpahan wewenang pada Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sesuai Pelimpahan yang dilaksanakan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
				Meningkatnya koordinasi pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan	Presentase Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			S2. Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis		Indeks Masyarakat Digital Indonesia	
					Tingkat Digitalisasi Arsip	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PEMDI)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan arsip	Program Pengelolaan Arsip

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
				Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
			S3. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel, transparan dan efisien		Nilai SAKIP	
					Jumlah kerja sama antar Pemerintah Daerah	
					Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	
					Opini BPK atas Laporan Keuangan	
					Indeks Pengelolaan Aset	
				Meningkatnya tata kelola anggaran yang efektif	Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen anggaran daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
					Persentase anggaran belanja yang dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	
				Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	
					Persentase realisasi penerimaan dana transfer	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya tatakelola akuntasi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	
					Persentase laporan keuangan sesuai Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)	
					Persentase rekomendasi audit laporan keuangan yang ditindaklanjuti	
				Meningkatnya tata kelola barang milik daerah yang tertib, inovatif, dan kolaboratif	Persentase realisasi pendapatan yang bersumber dari optimalisasi BMD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
					Persentase ketepatan waktu penetapan RKBMD, penyampaian laporan BMD dan penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian	
					Persentase tindak lanjut rekomendasi LHP BPK terkait BMD	
					Persentase BMD yang bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
					Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya Digitalisasi Pelayanan	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	
				Meningkatnya Implementasi Kebijakan Perekonomian	Persentase Efektfititas Pelaksanaan Kebijakan perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan
					Indeks Akses Keuangan Daerah	
					Return on Assets (ROA) BUMD	
				Meningkatnya Implementasi Kebijakan Adminstrasi Pembangunan	Persentase Efektfititas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan	
				Meningkatnya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	
					Persentase Pemenuhan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	
					Tingkat Kematangan UKPBJ	
				Meningkatnya Kerja sama Daerah	Persentase Efektivitas Kerja sama Daerah	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
				Meningkatnya Implementasi Kebijakan HAM	Capaian aksi HAM (%)	
				Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Zakat Nasional	
					Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				Meningkatnya fasilitasi pelayanan publik	Persentase Unit Layanan Publik dengan Nilai IKM A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Setda
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kelembagaan	Persentase Kebijakan Kelembagaan dan Manajemen SDM yang disusun	
				Meningkatnya kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai komponen pelaporan dalam LHE SAKIP Kota	
				Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					Persentase pemanfaatan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	
				Meningkatnya sinkronisasi	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra OPD	Program Koordinasi dan Sinkronisasi

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	Perencanaan Pembangunan Daerah
				Meningkatnya pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
					Persentase penetapan Ranperda Tahun N	
				Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	
			S4. Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan		Indeks Reformasi Hukum	
				Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang dihasilkan	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
			S5. Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima		Indeks Sistem Merit	
					Indeks BerAkhlak	
					Indeks Profesionalitas ASN	
				Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program Kepegawaian Daerah
					Persentase Keterisian formasi CPNS dan calon PPPK dalam	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					penerimaan CPNS dan Calon PPPK	
				Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	
				Meningkatnya tata kelola pengembangan karier ASN	Persentase pengembangan karier ASN sesuai dengan kompetensinya	
					Persentase ASN yang telah mengikuti assestment	
				Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	
				Meningkatnya Tingkat Kedisiplinan ASN	Persentase Penyelesaian Kasus Disiplin ASN	
				Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial, dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	
			S6. Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan		Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	
				Menurunnya terjadinya penyelewengan atau	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				penyimpangan, baik yang bersifat anggaran, proses, maupun kewenangan	Persentase perangkat daerah yang memperoleh predikat SAKIP A hasil evaluasi internal	
				Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
					Rasio jumlah temuan terhadap jumlah kegiatan Pemerintah Daerah	
			S7. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah		Indeks Inovasi daerah	
					Indeks Kapabilitas Inovasi	
					Persentase kebijakan berbasis bukti	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan riset dan inovasi daerah	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah
					Persentase pelaksanaan fasilitasi dan supervisi riset dan inovasi	
					Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berbasis bukti yang dimanfaatkan untuk penyelesaian permasalahan daerah dan pengembangan potensi unggulan daerah	
Inklusif, Inovatif, Kolaboratif,	**Misi 4. Membangun Kota Berketahanan,**	**T4. Terwujudnya Kota Layak Huni yang**			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah**	
					Indeks Kota Layak Huni	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Menuju Kota Lestari	**Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan**	**berketahanan, lestari dan inklusif**			**Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**	
			S1 Meningkatnya ketahanan pangan daerah yang merata dan berkelanjutan		Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)	
				Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah Sarana Logistik Pangan di sepanjang rantai pasok Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
				Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
					Angka Kecukupan Energi (Kkal/Kapita/Hari)	
					Angka Kecukupan Protein (Gram/Kapita/Hari)	
					Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Daerah Penghasil Pangan	
					Persentase Perubahan Harga Pangan Pokok Strategis	
				Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Terlibat Dalam Kegiatan *Food Bank* dan *Food Sharing*	Program Penanganan Kerawanan Pangan
					Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
				Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
					Peningkatan Sarana Edukasi Pertanian	
				Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				Meningkatnya Keamanan Pangan Produk Hewan	Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	
			S2. Menurunnya potensi risiko bencana yang berbasis pengurangan dampak dan		Indeks Risiko Bencana	
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			penguatan ketangguhan masyarakat	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	
				Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non-Kebakaran
				Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pemenuhan Sarpras yang Terstandarisasi Sesuai SPM	
				Meningkatnya Kualitas SDM Pemadam Kebakaran	Persentase pegawai yang memenuhi standar kulifikasi aparatur pemadam di daerah	
				Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan longsor	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir dan longsor	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
			S3. Meningkatnya kualitas lingkungan		Indeks Kualitas Air (IKA)	
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			hidup perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	
					Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	
					Proporsi Rumah Tangga (RT)dengan Layanan Pengumpulan Sampah	
				Meningkatnya efektivitas dokumen perencanaan lingkungan untuk memitigasi dampak pembangunan	Persentase rekomendasi dokumen perencanaan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
				Menurunnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Udara	
				Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkelola	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
				Meningkatnya penanganan limbah B3 yang aman	Persentase limbah B3 yang terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang di terbitkan	Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				Meningkatnya kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Orang/Komunitas/Kelompok/ Organisasi lingkungan hidup yang di tingkatkan kapasitasnya	Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
				Meningkatnya Kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Sampah
			S4. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang andil, inklusif, dan berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	
					Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (akses aman)	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	
					Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
					Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Konsumsi Air Minum Layak (BJP dan JP) (%)	
					Kapasitas Air Baku (Liter/Detik)	
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
				Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik dan Laik Fungsi	Program Penataan Bangunan Gedung
				Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan
					Persentase jalan (termasuk simpang dan jembatan) yang dilebarkan	
				Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
					Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang	
					Persentase penanganan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang	
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (%)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
					Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	
				Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah.	Persentase penyediaan dan rehabilitsi rumah tidak layak huni bagi korban bencana dan atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah kota sesuai SPM	Program Pengembangan Perumahan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan perumahan	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	Program Kawasan Permukiman
				Meningkatnya penanganan rumah tidak layak huni untuk pencegahan kawasan pemukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
				Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
				Meningkatnya penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
				Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Program Pengelolaan Tanah Kosong
				Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Program Penatagunaan Tanah

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila		Indeks Harmoni	
					Indeks Pembangunan Kebudayaan	
					Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	
					Indeks Demokrasi	
					Indeks Rasa Aman	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
				Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sejarah Lokal	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Program Pembinaan Sejarah
				Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketentraman umum dan Ketertiban Umum
				Meningkatnya penanganan gangguan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				ketentraman dan ketertiban umum		
				Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	
				Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	
				Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
				Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase masyarakat (kader partai politik) yang memahami etika dan budaya politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika dan Budaya Politik
				Meningkatnya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat	Persentase fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Persentase fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika didaerah	Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
					Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya yang dilaksanakan	
				Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Dalam pelaksanaan program prioritas RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029, terdapat rencana tindak/program unggulan (*highlight intervensi*) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam melaksanakan misi pembangunan tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan dalam **Tabel III.10**.

Tabel III.10. Rencana Tindak/Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029

No.	Fokus/Proyek/*Highlight Intervensi*
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Berdaya Saing Global dan Sejahtera	
1	Pembangunan 7 Unit Sekolah Baru Tingkat SMP
2	Optimalisasi Sekolah Kesetaraan Paket C
3	Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Untuk Siswa
4	BOSDA PAUD, SD Dan SMP
5	Bantuan biaya Pendidikan bagi 9000 siswa SMP setiap tahun (Rp1.800.000/tahun)
6	Bantuan biaya Pendidikan PAUD bagi 50.000 anak dalam 5 tahun (Rp1.800.000/tahun)
7	Peningkatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana PAUD
8	Bantuan Pendidikan Sarjana Bagi 1000 Guru PAUD Dan Tenaga Kependidikan Setiap Tahun
9	Beasiswa Berprestasi, Kurang Mampu, Difabel Dan Penghapal Kitab Suci Sebanyak 5.000 Siswa per tahun (Rp750.000/Siswa/Tahun)
10	Insentif bagi kepala sekolah swasta dan guru swasta (Rp250.000/orang/bulan)
11	Pelatihan Guru Yang Berbasis Kompetensi Dan Keterampilan Pengajaran
12	Peningkatan akses layanan kesehatan untuk semua melalui perluasan cakupan UHC 100%
13	Ngider sehat premium (Ngider sehat dengan tenaga dokter dan layanan ambulan, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan (MCU) gratis
14	Pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas pelayanan kesehatan
15	Pemberian Makanan Tambahan di Pos Gizi dan Posyandu – balita, ibu hamil, lansia
16	Lansia Sehat Berdaya/Posbindu Plus (Pendampingan Kesehatan dan psikologi di Posbindu)
17	Pengasuhan Lansia di Rumah diintergrasikan program BKL (Bina Keluarga Lansia)
18	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan Rujukan (3 RSUD, 29 RS swasta, dan 35 Puskesmas)
19	Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Unggulan: a. RSU Kota Tangerang Selatan diprioritaskan pada pelayanan Penyakit Kanker, Jantung, Stroke, Urenonefrologi - Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA); b. RSU Pondok Aren diprioritaskan pada Pelayanan Mental Health Treatment dan Kesehatan Tradisional c. RSU Serpong Utara diprioritaskan pada pelayanan Tumbuh Kembang Anak dan Trauma Center
20	Peningkatan Kelas RSUD Kota Tangerang Selatan berbasis layanan
21	Pengembangan layanan kesehatan tradisional pada RSU dan Puskesmas
22	Griya Lansia (Termasuk Untuk Disabilitas) Melalui Pembangunan/Kerja Sama dengan Panti
23	Lomba Kelurahan Sehat Dilakukan Setiap Tahun
24	Penanganan Penyandang Disabilitas
25	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

No.	Fokus/Proyek/*Highlight Intervensi*
26	Bantuan Alat Bantu Kesehatan Yang Tidak Tercakup BPJS Atau Alat Bantu Non Kesehatan Bagi Total 500 Penyandang Disabilitas Selama 5 Tahun (100 Orang Per Tahun)
27	Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Rentan Dengan Total Target 45.000 Orang Selama 5 Tahun
28	Pembangunan Sarana Olahraga Standar Nasional
Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	
29	Penyelenggaraan *Event* Skala Nasional dan Internasional
30	Pengembangan 5 Kawasan Tematik Pariwisata Perkotaan
31	Pendampingan Entrepreneur Dan Peningkatan Literasi Digital Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
32	Pembentukan *Hub* dan *Channeling* Bagi Para Pelaku Ekonomi Kreatif
33	Peningkatan Jumlah Pendampingan Legalitas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
34	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Pemasaran Produk IKM Dan UMKM
35	Pengembangan Budidaya Anggrek, Budidaya Anggur dan Komoditas Kuliner
36	Peningkatan Jumlah Pendampingan Legalitas Usaha (antara Lain Pembuatan NIB, Sertifikat Produksi P-IRT)
37	Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi 1000 Pelaku Usaha, Termasuk Sertifikasi Halal *Self Declare* Sebanyak 10.000 Produk
38	Kerja Sama Peningkatan Akses Permodalan Bagi Pelaku UMKM Dan Koperasi
39	Pengembangan Koperasi Menjadi Koperasi Serba Usaha
40	Penyelenggaraan Kegiatan Bursa Lowongan Kerja *One Stop Career Solution* Terintegrasi 4 Kali dalam Setahun
41	Penyediaan Portal Lowongan Kerja Pada Tangsel *Single Window Solution*
42	Peningkatan Kompetensi SDM Tenaga Kerja Melalui Program 3D Sebanyak 2500 Orang Termasuk 200 Orang Penyandang Disabilitas
43	Peningkatan Pelayanan Perizinan Yang Cepat, Murah Dan Transparan
Misi 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas	
44	*Corporate University*
45	Beasiswa Tematik Bagi ASN
46	Pengembangan Kompetensi ASN Dalam Pemanfaatan Teknologi Pelayanan Publik (*Digital Talent*)
47	Pemetaan Organisasi Birokrasi Secara Berkala
48	Peningkatan Partisipasi Melalui Perencanaan Tematik
49	Pemetaan Kebutuhan Pegawai Struktural, Fungsional Umum Dan Fungsional Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan
50	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE)
51	Kerja Sama Pembiayaan Pembangunan melalui *Creative Financing* / Pembiayaan Pembangunan Kreatif
52	Peningkatan PAD Melalui Elektronifikasi/Transaksi Digital Pemungutan PAD
53	Pembentukan BUMD Pasar/Aneka Usaha, BUMD Parkir dan BUMD lain sesuai kajian kebutuhan
54	Peningkatan Kerja Sama Dengan Kabupaten/Kota Penghasil Kebutuhan Bahan Pokok Melalui BUMD
55	Kerja Sama Pembangunan dan Pelayanan pada Kawasan Aglomerasi
56	Penambahan 1000 Titik WIFI Gratis
57	Penambahan Kecepatan Pada WIFI Publik Yang Telah Terpasang
Misi 4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan	

No.	Fokus/Proyek/*Highlight Intervensi*
58	Penambahan 100 Titik Program RW Mantap
59	Penyediaan Stok Bahan Pokok Sesuai Standar Melalui BUMD Pasar
60	Penyediaan Posko Penanggulangan Bencana Dan Penyelamatan Bersama Menjadi 14 Titik
61	Pembangunan Alun-Alun Kota/ Ruang Terbuka Publik inklusif di Kecamatan Setu, Serpong Dan Ciputat
62	Implementasi Rencana Aksi Menuju Bangunan Nol Emisi Karbon
63	Program Kampung Iklim Yang Disinergikan Dengan Program Penataan Kawasan Kumuh
64	Gerakan Penanaman Satu Juta Pohon dan Gerakan Sejuta Biopori
65	Pembangunan dan penataan taman
66	Pelaksanaan Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)
67	Program Penyediaan Sarana Tempat Sampah Terpilah Rumah Tangga Dan Pengangkutan Sampah Terpilah Dilakukan Dengan Angkutan Terpilah
68	Kerja Sama Pengelolaan Sampah
69	Penambahan Frekuensi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car free day*) Sebanyak 2 Kali Dalam 1 Bulan
70	Pembangunan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) Di Setiap Kecamatan
71	Peningkatan Pengelolaan Sampah Di TPS3R
72	Revitalisasi TPS3R 38 Unit
73	Pembangunan Jalur Pedestrian Dan Sepeda Pada Beberapa Ruas Di Jalan Kota
74	Penyediaan Ducting Utilitas Di 25 Ruas Jalan
75	Tindaklanjut Rencana Perpanjangan MRT Lebak Bulus-Serpong
76	Penambahan 10 Unit Bis Sekolah dan Peningkatan Kerja Sama dengan Pihak Sekolah
77	Kerja Sama Perwujudan *Transit Oriented Development* (TOD)
78	Kerja sama penyediaan perlintasan tidak sebidang dengan Provinsi Banten yang berlokasi di Stasiun Sudimara/Pasar Jombang dan Stasiun Serpong/Pasar Serpong berupa *flyover* dan atau *underpass*
79	Kerja Sama Pelebaran jalan dengan Provinsi Banten pada ruas Jl. Pondok Cabe-Cinere, dan ruas Jl. Siliwangi Segmen Parakan – Jl. Puspiptek Raya
80	Pelebaran 8 Titik Simpang Sebidang yang berlokasi antara lain di ruas Jl. Viktor, ruas Jl. Kampung Utan, ruas Jl. Pondok Cabe, melalui pembebasan lahan, perbaikan geometric, dan pembangunan simpang sebidang
81	Kerja Sama Pembangunan 3 Protected U-Turn Antara Lain Jl. Raya Serpong, Jl. Ciater, Jalan Depan Delatinos
82	Pelebaran 2 ruas jalan kota Jl. Viktor-Jl. Rawa Buntu Dan Jl. Benda Raya/Maruga - Jl. Aria Putra
83	Penambahan Titik *Area Traffic Control System* (ATCS) Menjadi 5 Titik
84	Penataan lokasi parkir dengan Smart Parking berbasis IoT untuk memberikan kemudahan kepada pengguna
85	Pembangunan Sambungan Rumah (SR) Air Minum Perpipaan Aman Dengan Total 106.137 Rumah Tangga
86	Pembangunan Total 1.000 Unit SPAL Domestik (Tangki Septic)
87	Kerja Sama Pembangunan dan Penyediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
88	Program Peningkatan Kualitas RUTLH/Bedah Rumah Sebanyak 2.500 Unit
89	Penataan Kawasan Kumuh kewenangan Pemerintah Kota
90	Peningkatan Drainase Lingkungan Sepanjang 300 Km
91	Peningkatan Jumlah Titik Tangsel Terang Sebanyak 15.000 Titik
92	Pembangunan dan Operasional TPU Sarimulya
93	Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Sepanjang 166,2 Km

No.	Fokus/Proyek/*Highlight Intervensi*
94	Pembangunan 10 Titik Tandon dan *Long storage*
95	Optimalisasi Kualitas Penataan Kota dan Jalan
96	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kota Terintegrasi Dengan Rencana Sistem Saluran Drainase
97	Pemeliharaan Dan Pembangunan Drainase Perkotaan
98	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terintegrasi
99	Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Longsor
100	Koordinasi Penataan DAS Dan Sempadan Situ Dengan Provinsi Banten Dan BBWS
101	Koordinasi Normalisasi Kali Angke Dan Sempadan Kali Angke
102	Pemeliharaan Rusunawa Dan Mengembangkan Kerja Sama Pembangunan Perumahan ASN
103	Peningkatan Pembinaan Komunitas Seni Dan Budaya
104	Peningkatan Pemeliharaan Cagar Budaya
105	Pembentukan Unit Penataan Kota Untuk Penerapan Insentif Dan Disinsentif

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap rencana tindak/program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada **Tabel III.10**, pelaksanaan rencana tindak/program unggulan tersebut pada dasarnya didanai dari APBD Kota Tangerang Selatan. Dalam rangka untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah yang memiliki keterbatasan, maka dipetakan rencana tindak/program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebanyak 65 rencana tindak/program unggulan yang berpotensi mendapatkan dukungan dari skema pembiayaan alternatif di luar APBD sebagai upaya diversifikasi pendanaan pembangunan, yang dituangkan dalam **Tabel III.11.** Pemetaan diversifikasi pendanaan tersebut menggambarkan bahwa strategi pendanaan yang direkomendasikan cukup beragam dengan memanfaatkan kombinasi CSR, ZISWAF, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), *user charge*, hingga pembiayaan utang daerah. Program-program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagian besar diarahkan untuk memanfaatkan CSR dan ZISWAF, mencerminkan upaya pemerintah kota dalam mengoptimalkan sumber pembiayaan filantropi dan tanggung jawab sosial dunia usaha. Hal ini sejalan dengan kebutuhan intervensi yang sifatnya berbasis kesejahteraan masyarakat dan relatif tidak menuntut pengembalian investasi.

Sementara itu, proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, sarana olahraga, transportasi (MRT, TOD, pelebaran jalan), air minum, drainase, pengelolaan sampah, hingga perumahan ASN banyak diarahkan melalui skema KPBU, pemanfaatan BMD (BGS/BSG, KSP, KSPI), maupun surat berharga daerah. Pola ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik dengan kebutuhan investasi besar lebih realistis jika didorong melalui kerja sama dengan sektor swasta atau melalui instrumen pembiayaan jangka panjang. Adapun beberapa program layanan publik berbasis operasional, seperti air minum perpipaan atau pengelolaan sampah terpilah, mengkombinasikan *user charge* dengan sumber pembiayaan lainnya, sehingga berpotensi meningkatkan keberlanjutan fiskal daerah.

Strategi diversifikasi pendanaan pembangunan untuk dapat berjalan optimal, dibutuhkan prasyarat kelembagaan dan regulasi yang kuat. Transparansi tata kelola CSR dan ZISWAF menjadi penting untuk memastikan kontribusinya tepat sasaran, sementara skema KPBU dan pemanfaatan BMD menuntut kesiapan dokumen studi kelayakan, kepastian hukum, serta kapasitas kelembagaan pengelola investasi daerah. Jika

prasyarat ini dipenuhi, kombinasi antara APBD dan pembiayaan alternatif tidak hanya mempercepat realisasi program prioritas, tetapi juga mengurangi tekanan pada APBD, sekaligus mendukung pembangunan Kota Tangerang Selatan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan secara kolaboratif dengan semua pihak.

Tabel III.11. Alternatif Skema Pendanaan Non APBD Rencana Tindak/Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029

No.	Fokus/Proyek/*Highlight* Intervensi	Alternatif Sumber Pembiayaan										
		CSR	ZISWAF	KPBU			Pemanfaatan BMD				Pembiayaan Utang Daerah	
				AP	*User charge*	Lainnya	Sewa	BGS/ BSG	KSP	KSPI	Pinjaman Daerah	Surat Berharga Daerah
1	Pembangunan 7 Unit Sekolah Baru Tingkat SMP	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
2	Peningkatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana PAUD	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
3	Bantuan Pendidikan Sarjana Bagi 1000 Guru PAUD Dan Tenaga Kependidikan Setiap Tahun	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Beasiswa Berprestasi, Kurang Mampu, Difabel Dan Penghapal Kitab Suci Sebanyak 5.000 Siswa per tahun (Rp750.000/Siswa/Tahun)	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pemberian Makanan Tambahan di Pos Gizi dan Posyandu – balita, ibu hamil, lansia	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lansia Sehat Berdaya/Posbindu Plus (Pendampingan Kesehatan dan psikologi di Posbindu)	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pengasuhan Lansia di Rumah diintergrasikan program BKL (Bina Keluarga Lansia)	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Unggulan	-	-	✓	-		-	-	-	-	✓	-
9	Griya Lansia (Termasuk Untuk Disabilitas) Melalui Pembangunan/Kerja Sama dengan Panti	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-
10	Lomba Kelurahan Sehat Dilakukan Setiap Tahun	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Penanganan Penyandang Disabilitas	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Bantuan Alat Bantu Kesehatan Yang Tidak Tercakup BPJS Atau Alat Bantu Non Kesehatan Bagi Total 500 Penyandang Disabilitas Selama 5 Tahun (100 Orang Per Tahun)	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pembangunan Sarana Olahraga Standar Nasional	-	-	✓	✓		-	✓	✓	-	✓	✓

No.	Fokus/Proyek/*Highlight* Intervensi	Alternatif Sumber Pembiayaan										
		CSR	ZISWAF	KPBU			Pemanfaatan BMD				Pembiayaan Utang Daerah	
				AP	*User charge*	Lainnya	Sewa	BGS/ BSG	KSP	KSPI	Pinjaman Daerah	Surat Berharga Daerah
15	Pengembangan 5 Kawasan Tematik Pariwisata Perkotaan	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
16	Pendampingan Entrepreneur Dan Peningkatan Literasi Digital Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pembentukan Hub dan Channeling Bagi Para Pelaku Ekonomi Kreatif	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Peningkatan Jumlah Pendampingan Legalitas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Pemasaran Produk IKM Dan UMKM	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-
20	Pengembangan Budidaya Anggrek, Budidaya Anggur Dan Komoditas Kuliner	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-
21	Peningkatan Jumlah Pendampingan Legalitas Usaha (Antara Lain Pembuatan NIB, Sertifikat Produksi P-IRT)	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi 1000 Pelaku Usaha, Termasuk Sertifikasi Halal *Self Declare* Sebanyak 10.000 Produk	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kerja Sama Peningkatan Akses Permodalan Bagi Pelaku UMKM Dan Koperasi	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Pengembangan Koperasi Menjadi Koperasi Serba Usaha	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Peningkatan Kompetensi SDM Tenaga Kerja Melalui Program 3D Sebanyak 2500 Orang Termasuk 200 Orang Penyandang Disabilitas	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Penambahan 100 Titik Program RW Mantap	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Penyediaan Posko Penanggulangan Bencana Dan Penyelamatan Bersama Menjadi 14 Titik	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pembangunan Alun-Alun Kota/ Ruang Terbuka Publik yang ramah Komunitas Lansia, Penyandang Disabilitas Dan Anak Berkebutuhan Khusus di Kecamatan Setu, Serpong Dan Ciputat	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Fokus/Proyek/*Highlight* Intervensi	Alternatif Sumber Pembiayaan										
		CSR	ZISWAF	KPBU			Pemanfaatan BMD				Pembiayaan Utang Daerah	
				AP	*User charge*	Lainnya	Sewa	BGS/ BSG	KSP	KSPI	Pinjaman Daerah	Surat Berharga Daerah
29	Implementasi Rencana Aksi Menuju Bangunan Nol Emisi Karbon	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Program Kampung Iklim Yang Disinergikan Dengan Program Penataan Kawasan Kumuh	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
31	Gerakan Penanaman Satu Juta Pohon	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Gerakan Sejuta Biopori	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Pelaksanaan Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-
34	Program Penyediaan Sarana Tempat Sampah Terpilah Rumah Tangga Dan Pengangkutan Sampah Terpilah Dilakukan Dengan Angkutan Terpilah	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
35	Penambahan Frekuensi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car free day*) Sebanyak 2 Kali Dalam 1 Bulan	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Pembangunan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) Di Setiap Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
37	Peningkatan Pengelolaan Sampah Di TPS3R	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Revitalisasi TPS3R 38 Unit	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
39	Pembangunan Jalur Pedestrian Dan Sepeda Pada Beberapa Ruas Di Jalan Kota	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
40	Penyediaan Ducting Utilitas Di 25 Ruas Jalan	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
41	Tindaklanjut Rencana Perpanjangan MRT Lebak Bulus-Serpong	-	-	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
42	Penambahan 10 Unit Bis Sekolah Dan Peningkatan Kerja Sama dengan Pihak Sekolah	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-
43	Kerja Sama Perwujudan *Transit Oriented Development* (TOD)	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
44	Pelebaran 8 Titik Simpang Sebidang yang berlokasi antara lain di ruas Jl. Viktor, ruas Jl. Kampung Utan, ruas Jl. Pondok Cabe, melalui pembebasan lahan, perbaikan geometric, dan pembangunan simpang sebidang	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-

No.	Fokus/Proyek/*Highlight* Intervensi	Alternatif Sumber Pembiayaan										
		CSR	ZISWAF	KPBU			Pemanfaatan BMD				Pembiayaan Utang Daerah	
				AP	*User charge*	Lainnya	Sewa	BGS/ BSG	KSP	KSPI	Pinjaman Daerah	Surat Berharga Daerah
45	Pelebaran 2 ruas jalan kota Jl. Viktor-Jl. Rawa Buntu Dan Jl. Benda Raya/Maruga - Jl. Aria Putra	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
46	Penambahan Titik *Area Traffic Control System* (ATCS) Menjadi 5 Titik	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
47	Pembangunan Sambungan Rumah (SR) Air Minum Perpipaan Aman Dengan Total 106.137 Rumah Tangga	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
48	Pembangunan Total 1.000 Unit SPAL Domestik (Tangki Septic)	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
49	Kerja Sama Pembangunan dan Penyediaan Instalasi Pengolhan Lumpur Tinja (IPLT)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓
50	Program Peningkatan Kualitas RUTLH/Bedah Rumah Sebanyak 2.500 Unit	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
51	Penataan Kawasan Kumuh kewenangan Pemerintah Kota	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
52	Peningkatan Drainase Lingkungan Sepanjang 300 Km	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
53	Peningkatan Jumlah Titik Tangsel Terang Sebanyak 15.000 Titik	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
54	Pembangunan Dan Operasional TPU Sarimulya	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
55	Pemeliharaan Dan Peningkatan Jalan Lingkungan Sepanjang 166,2 Km	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
56	Pembangunan 10 Titik Tandon dan *Long storage*	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
57	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kota Terintegrasi Dengan Rencana Sistem Saluran Drainase	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
58	Pemeliharaan dan Pembangunan Drainase Perkotaan	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
59	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
60	Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Longsor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
61	Pemeliharaan Rusunawa Dan Mengembangkan Kerja Sama Pembangunan Perumahan ASN	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓

No.	Fokus/Proyek/*Highlight* Intervensi	Alternatif Sumber Pembiayaan										
		CSR	ZISWAF	KPBU			Pemanfaatan BMD				Pembiayaan Utang Daerah	
				AP	*User charge*	Lainnya	Sewa	BGS/ BSG	KSP	KSPI	Pinjaman Daerah	Surat Berharga Daerah
62	Peningkatan Pembinaan Komunitas Seni dan Budaya	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Peningkatan Pemeliharaan Cagar Budaya	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Penambahan 1000 Titik WIFI Gratis	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
65	Penambahan Kecepatan Pada WIFI Publik Yang Telah Terpasang	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:
AP: Pembayaran ketersediaan layanan (*Availability payment*)
User charge: Biaya pengguna/ tarif
KSP: kerja sama pemanfaatan
KSPI: kerja sama penyediaan infrastruktur
BGS: Bangun Guna Serah
BSG: Bangun Serah Guna
CSR: *Corporate Social Reponsibility* (tanggung jawab sosial dan lingkungan)
ZISWAF: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf

BAB IV.
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam BAB IV Rencana Strategis Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Rencana program tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah sekaligus menjadi pijakan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 yang akan dijalankan oleh Kepala Daerah periode Tahun 2030-2034. Program-program perangkat daerah dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 disajikan dalam **Tabel IV.1.**

Tabel IV.1. Indikatif Program Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					994.181.605.478		1.032.316.623.203		1.066.278.389.428		1.153.201.157.209		1.496.792.268.255	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					602.777.060.169		607.125.686.800		613.196.943.660		625.460.639.827		656.732.691.287	
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	11.204.623.832	100	9.453.495.825	100	9.548.030.779	100	9.738.991.394	100	10.225.940.964	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	500.000.000	100	664.999.999	100	671.649.995	100	685.082.995	100	719.337.145	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	591.072.436.337	100	597.007.190.976	100	602.977.262.886	100	615.036.565.438	100	645.787.413.178	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					378.317.589.087		410.512.633.629		437.091.859.966		508.426.139.864		805.482.577.914	
Meningkatnya Akses Pendidikan untuk semua	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	77,56	77,97	78,38	378.317.589.087	78,79	410.512.633.629	79,20	437.091.859.966	79,61	508.426.139.864	80,02	805.482.577.914	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Penduduk Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs) (%)	98,68	98,82	98,95		99,09		99,23		99,37		99,51		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Penduduk Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	56,76	59,94	63,12		66,30		69,48		72,67		75,71		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Penduduk Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI) (%)	98,68	98,82	98,95		99,09		99,23		99,37		99,51		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) (%)	24,34	29,32	34,30		39,28		44,25		49,23		54,21		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					1.400.000.000		1.414.000.000		1.428.140.000		1.456.702.800		1.529.537.940	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	N/A	75,88	77,40	1.400.000.000	78,95	1.414.000.000	80,52	1.428.140.000	82,13	1.456.702.800	83,78	1.529.537.940	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum inklusif dan pembelajaran berbasis STEAM (%)	N/A	55,95	61,55		67,70		74,47		81,92		90,11		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					11.686.956.222		13.264.302.774		14.561.445.802		17.857.674.718		33.047.461.114	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	34,58	34,58	35,27	11.686.956.222	35,98	13.264.302.774	36,70	14.561.445.802	37,43	17.857.674.718	38,18	33.047.461.114	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	33,12	33,12	33,78		34,45		35,14		35,85		36,56		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	75,15	71,43	72,18		72,93		73,68		74,43		75,18		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					825.884.719.601		942.175.506.878		948.075.506.878		958.075.506.878		963.075.506.878	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					635.900.285.516		640.898.944.939		649.674.121.547		657.408.936.097		664.171.776.297	
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	231.162.999.833	100	236.161.659.256	100	244.936.835.864	100	252.671.650.414	100	259.434.490.614	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0035 - RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.02.0045 - RUMAH SAKIT UMUM SERPONG UTARA
	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.02.0047 - RUMAH SAKIT UMUM PONDOK AREN
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	404.372.371.041	100	404.372.371.041	100	404.372.371.041	100	404.372.371.041	100	404.372.371.041	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0035 - RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0045 - RUMAH SAKIT UMUM SERPONG UTARA
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0047 - RUMAH SAKIT UMUM PONDOK AREN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	364.914.642	100	364.914.642	100	364.914.642	100	364.914.642	100	364.914.642	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0035 - RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0035 - RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0045 - RUMAH SAKIT UMUM SERPONG UTARA
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0045 - RUMAH SAKIT UMUM SERPONG UTARA
	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0047 - RUMAH SAKIT UMUM PONDOK AREN
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0047 - RUMAH SAKIT UMUM PONDOK AREN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					186.654.117.185		297.946.235.039		295.071.048.431		297.306.223.881		295.533.373.681	
Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar (%)	91,67	91,67	91,67	58.257.543.112	93,06	168.563.993.103	94,44	165.994.117.503	95,83	168.342.006.953	97,22	166.491.570.753	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	N/A	58,57	58,57		60,95		64,13		67,30		70,47		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan nifas lengkap (%)	N/A	89	89	8.271.483.843	90	8.271.483.843	91	8.271.483.843	92	8.271.483.843	93	8.271.483.843	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	N/A	60	60		65		70		75		80		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Diabetes dalam pengendalian (%)	90	15	15		30		50		80		80		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase penyakit menular yang ditangani sesuai standar (%)	N/A	90	90		90		95		95		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah (%)	94,62	65,00	65,00		67,00		70,00		75,00		77,00		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	77	77	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun. (%)	2,83	25,00	25,00		24,00		22,00		20,00		18,00		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	N/A	1,7	1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	21,8	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar (%)	94,0	89,5	89,5	120.125.090.230	89,5	121.110.758.093	89,5	120.805.447.085	89,5	120.692.733.085	91,0	120.770.319.085	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan pengelolaan sistem informasi RS milik Pemerintah Daerah sistem informasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0035 - RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
	Persentase pemenuhan alat kesehatan RS milik Pemerintah Daerah (%)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.02.0035 - RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
	Persentase pemenuhan rujukan pada RS milik Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0035 - RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS milik Pemerintah Daerah dalam kondisi baik (%)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.02.0035 - RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
	Persentase pemenuhan sarana promosi RS milik Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0035 - RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
	Persentase pengelolaan limbah RSUD (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0035 - RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0035 - RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
	Cakupan pengelolaan sistem informasi RS milik Pemerintah Daerah sistem informasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0045 - RUMAH SAKIT UMUM SERPONG UTARA
	Persentase pemenuhan alat kesehatan RS milik Pemerintah Daerah (%)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.02.0045 - RUMAH SAKIT UMUM SERPONG UTARA
	Persentase pemenuhan rujukan pada RS milik Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0045 - RUMAH SAKIT UMUM SERPONG UTARA
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS milik Pemerintah Daerah dalam kondisi baik (%)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.02.0045 - RUMAH SAKIT UMUM SERPONG UTARA
	Persentase pemenuhan sarana keperawatan pada RS milik Pemerintah Daerah (%)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.02.0045 - RUMAH SAKIT UMUM SERPONG UTARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pemenuhan sarana promosi RS milik Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0045 - RUMAH SAKIT UMUM SERPONG UTARA
	Persentase pengelolaan limbah RSUD (%)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.02.0045 - RUMAH SAKIT UMUM SERPONG UTARA
	Cakupan pengelolaan sistem informasi RS milik Pemerintah Daerah sistem informasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0047 - RUMAH SAKIT UMUM PONDOK AREN
	Persentase pemenuhan alat kesehatan RS milik Pemerintah Daerah (%)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.02.0047 - RUMAH SAKIT UMUM PONDOK AREN
	Persentase pemenuhan rujukan pada RS milik Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0047 - RUMAH SAKIT UMUM PONDOK AREN
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS milik Pemerintah Daerah dalam kondisi baik (%)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.02.0047 - RUMAH SAKIT UMUM PONDOK AREN
	Persentase pemenuhan sarana keperawatan pada RS milik Pemerintah Daerah (%)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.02.0047 - RUMAH SAKIT UMUM PONDOK AREN
	Persentase pemenuhan sarana promosi RS milik Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0047 - RUMAH SAKIT UMUM PONDOK AREN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.806.666.900		1.806.676.900		1.806.686.900		1.836.696.900		1.846.706.900	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	52	23	23	1.806.666.900	23	1.806.676.900	25	1.806.686.900	25	1.836.696.900	25	1.846.706.900	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	N/A	5,004	5,004		5,004		5,004		5,004		5,004		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase SDM Kesehatan terlatih pada RS milik Pemerintah Daerah (%)	60	62	62		64		66		68		70		1.02.0.00.0.00.02.0035 - RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
	Persentase SDM Kesehatan terlatih pada RS milik Pemerintah Daerah (%)	30	70	70		72		75		78		80		1.02.0.00.0.00.02.0045 - RUMAH SAKIT UMUM SERPONG UTARA
	Persentase SDM Kesehatan terlatih pada RS milik Pemerintah Daerah (%)	33,69	44,86	44,86		56,76		69,73		83,78		100		1.02.0.00.0.00.02.0047 - RUMAH SAKIT UMUM PONDOK AREN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					295.020.000		295.020.000		295.020.000		295.020.000		295.020.000	
Meningkatnya kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Jumlah desa yang dilakukan pembudayaan keamanan pangan (Sarana) (Angka)	N/A	8	8	295.020.000	8	295.020.000	8	295.020.000	8	295.020.000	8	295.020.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah pasar yang dilakukan pembudayaan keamanan pangan (Sarana) (Angka)	N/A	1	1		1		1		1		1		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Jumlah sekolah yang dilakukan pembudayaan keamanan pangan (Sarana) (Angka)	436	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	N/A	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman (%)	13,00	60,00	60,00		63,57		67,14		70,71		74,29		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu (%)	N/A	62,50	62,50		73,68		81,82		88,00		92,86		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	6,803	15,42	15,42		24,08		32,72		41,36		50,00		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase PIRT yang aman dan bermutu (%)	N/A	62,50	62,50		70,00		75,00		78,57		81,25		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	N/A	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan (%)	N/A	55	60		60		65		70		75		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	N/A	19	19		29		58		70		70		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.228.630.000		1.228.630.000		1.228.630.000		1.228.630.000		1.228.630.000	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	N/A	80	80	1.228.630.000	80	1.228.630.000	80	1.228.630.000	80	1.228.630.000	80	1.228.630.000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					1.079.646.527.705		1.081.954.392.038		1.261.450.013.920		1.178.528.459.312		1.281.040.355.879	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					88.278.518.579		88.982.570.406		102.039.955.570		96.131.004.638		101.215.317.934	
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	800.200.000	100	800.200.000	100	800.200.000	100	800.200.000	100	800.200.000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD Pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	487.577.715	100	501.606.753	100	677.359.729	100	597.824.991	100	666.260.071	1.03.0.00.0.00.03.0000 - DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.03.0000 - DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
Terpenuhinya pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah pada DInas Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	25.410.162.290	100	25.410.162.290	100	25.410.162.290	100	25.410.162.290	100	25.410.162.290	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.04.0001 - UPT PEMELIHARAAN BANGUNAN
	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.04.0002 - UPT PENGELOLAAN AIR MINUM
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	7.664.049.159	100	7.884.566.284	100	10.647.160.658	100	9.396.984.271	100	10.472.689.331	1.03.0.00.0.00.03.0000 - DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.03.0001 - UPTD PEMELIHARAAN ALAT BERAT
	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.03.0010 - UPTD LABORATORIUM KONSTRUKSI
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	25.844.075.480	100	25.505.854.480	100	25.505.854.480	100	25.505.854.480	100	25.505.854.480	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.04.0001 - UPT PEMELIHARAAN BANGUNAN
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.04.0002 - UPT PENGELOLAAN AIR MINUM
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	28.072.453.935	100	28.880.180.599	100	38.999.218.413	100	34.419.978.606	100	38.360.151.762	1.03.0.00.0.00.03.0000 - DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.03.0001 - UPTD PEMELIHARAAN ALAT BERAT
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.03.0010 - UPTD LABORATORIUM KONSTRUKSI
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					146.265.209.655		150.473.687.835		203.196.659.286		179.337.559.831		199.866.946.185	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Longsor	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan longsor (%)	70,34	72,00	75,00	146.265.209.655	77,00	150.473.687.835	79,00	203.196.659.286	81,00	179.337.559.831	83,00	199.866.946.185	1.03.0.00.0.00.03.0000 - DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					6.099.628.663		11.027.961.243		10.523.111.243		11.349.961.243		12.324.961.243	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Konsumsi Air Minum Layak (BJP dan JP) (%)	98,37	100	100	6.099.628.663	100	11.027.961.243	100	10.523.111.243	100	11.349.961.243	100	12.324.961.243	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (KK)	74.918	78.891	82.744		86.480		97.769		118.218		138.000		1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Kapasitas Air Baku (Liter/Detik)	997,86	1.568	1.853		2.138		2.423		2.708		2.993		1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Konsumsi Air Minum Layak (BJP dan JP) (%)	98,37	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.04.0002 - UPT PENGELOLAAN AIR MINUM
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (KK)	74.918	78.891	82.744		86.480		97.769		118.218		138.000		1.03.0.00.0.00.04.0002 - UPT PENGELOLAAN AIR MINUM
	Kapasitas Air Baku (Liter/Detik)	997,86	1.568	1.853		2.138		2.423		2.708		2.993		1.03.0.00.0.00.04.0002 - UPT PENGELOLAAN AIR MINUM
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					12.407.391.630		14.968.000.000		18.340.650.000		13.889.750.000		70.219.225.000	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman (KK)	N/A	N/A	291.183	12.407.391.630	297.165	14.968.000.000	303.281	18.340.650.000	309.536	13.889.750.000	315.933	70.219.225.000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					141.109.411.127		145.169.541.893		196.034.046.664		173.015.972.291		192.821.704.809	
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	51,59	51,59	53,09	141.109.411.127	54,69	145.169.541.893	56,34	196.034.046.664	58,04	173.015.972.291	59,79	192.821.704.809	1.03.0.00.0.00.03.0000 - DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					461.646.703.631		438.585.035.408		419.117.235.408		428.641.285.408		396.486.810.408	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik dan Laik Fungsi (%)	0,50	1,20	19,53	461.646.703.631	23,37	438.585.035.408	25,27	419.117.235.408	27,18	428.641.285.408	29,08	396.486.810.408	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik dan Laik Fungsi (%)	0,50	1,20	19,53		23,37		25,27		27,18		29,08		1.03.0.00.0.00.04.0001 - UPT PEMELIHARAAN BANGUNAN
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					203.969.086		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	N/A	N/A	13,25	203.969.086	17,20	1.500.000.000	21,15	1.500.000.000	25,09	1.500.000.000	29,08	1.500.000.000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					219.572.867.953		225.890.622.023		305.038.179.230		269.220.974.944		300.039.624.502	
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan (termasuk simpang dan jembatan) yang dilebarkan (%)	9,36	11,27	12,41	219.572.867.953	14,32	225.890.622.023	16,61	305.038.179.230	19,09	269.220.974.944	21,85	300.039.624.502	1.03.0.00.0.00.03.0000 - DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik (%)	83,38	85,38	87,38		89,38		91,38		93,38		95,38		1.03.0.00.0.00.03.0000 - DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.950.841.801		2.006.973.230		2.710.176.519		2.391.950.957		2.665.765.798	
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	34	46	50	1.950.841.801	53	2.006.973.230	56	2.710.176.519	60	2.391.950.957	64	2.665.765.798	1.03.0.00.0.00.03.0000 - DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.111.985.580		3.350.000.000		2.950.000.000		3.050.000.000		3.900.000.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang (%)	N/A	23,55	25,00	2.111.985.580	27,00	3.350.000.000	29,00	2.950.000.000	32,00	3.050.000.000	35,00	3.900.000.000	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Persentase kesesuaian penataan ruang (%)	N/A	74,35	75,00		77,00		79,00		82,00		85,00		1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Persentase penanganan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang (%)	N/A	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					363.519.820.020		369.078.611.068		374.078.611.068		382.694.211.068		395.525.211.068	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.935.231.065		40.640.564.397		40.321.767.445		41.457.739.048		42.362.568.025	
Terpenuhinya pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	6.214.004.039	100	6.692.440.611	100	6.374.528.809	100	6.518.545.841	100	6.671.876.867	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.2.10.0.00.05.0001 - UPTD JALAN DRAINASE I
	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.2.10.0.00.05.0002 - UPTD JALAN DRAINASE II
	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.2.10.0.00.05.0003 - UPTD JALAN DRAINASE III
	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.2.10.0.00.05.0004 - UPTD PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	750.000.000	100	765.000.000	100	765.000.000	100	787.950.000	100	811.588.500	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	31.971.227.026	100	33.183.123.786	100	33.182.238.636	100	34.151.243.207	100	34.879.102.658	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.2.10.0.00.05.0001 - UPTD JALAN DRAINASE I
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.2.10.0.00.05.0002 - UPTD JALAN DRAINASE II
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.2.10.0.00.05.0003 - UPTD JALAN DRAINASE III
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.2.10.0.00.05.0004 - UPTD PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					9.581.137.625		8.035.300.000		7.550.147.500		8.133.734.875		7.661.641.619	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase penyediaan dan rehabilitsi rumah tidak layak huni bagi korban bencana dan atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah kota sesuai SPM (%)	100	100	100	9.581.137.625	100	8.035.300.000	100	7.550.147.500	100	8.133.734.875	100	7.661.641.619	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					24.209.654.580		25.558.317.737		25.468.496.228		26.022.784.530		29.152.269.122	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas kawasan pemukiman dan perumahan	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	44,64	51,10	58,17	24.209.654.580	65,20	25.558.317.737	77,27	25.468.496.228	84,67	26.022.784.530	100	29.152.269.122	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					25.805.002.074		25.346.999.811		30.150.000.000		35.157.500.000		24.656.625.000	
Meningkatnya penanganan rumah tidak layak huni untuk pencegahan kawasan kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha (%)	0,47	14,76	26,76	25.805.002.074	43,56	25.346.999.811	62,00	30.150.000.000	82,00	35.157.500.000	100	24.656.625.000	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					264.988.794.676		269.497.429.123		270.588.199.895		271.922.452.615		291.692.107.302	
Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan dan Permukiman	Persentase perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	53,28	54,45	55,63	264.988.794.676	56,80	269.497.429.123	57,97	270.588.199.895	59,14	271.922.452.615	60,31	291.692.107.302	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	53,28	54,45	55,63		56,80		57,97		59,14		60,31		1.04.2.10.0.00.05.0001 - UPTD JALAN DRAINASE I
	Persentase perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	53,28	54,45	55,63		56,80		57,97		59,14		60,31		1.04.2.10.0.00.05.0002 - UPTD JALAN DRAINASE II
	Persentase perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	53,28	54,45	55,63		56,80		57,97		59,14		60,31		1.04.2.10.0.00.05.0003 - UPTD JALAN DRAINASE III
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					82.601.136.679		84.790.914.130		89.695.914.130		96.195.914.130		93.695.914.130	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					65.461.954.947		70.335.690.568		70.634.681.647		73.323.209.393		72.886.736.881	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	117.115.608	100	120.043.498	100	123.044.586	100	126.120.700	100	129.273.718	1.05.0.00.0.00.06.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.06.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	320.245.000	100	336.245.000	100	352.215.000	100	368.215.000	100	371.215.000	1.05.0.00.0.00.07.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.07.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	336.722.710	100	300.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	1.05.0.00.0.00.08.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.08.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	3.296.598.752	100	5.609.419.982	100	4.301.497.575	100	4.749.414.000	100	4.581.880.773	1.05.0.00.0.00.06.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	19.800.267.216	100	20.196.495.890	100	20.701.408.288	100	21.218.943.495	100	21.749.417.082	1.05.0.00.0.00.06.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	6.409.121.976	100	6.893.256.743	100	7.171.286.743	100	7.806.286.743	100	7.746.720.853	1.05.0.00.0.00.07.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	22.979.136.206	100	23.029.136.206	100	23.034.136.206	100	24.003.136.206	100	23.007.136.206	1.05.0.00.0.00.07.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	4.118.937.192	100	3.111.093.249	100	3.911.093.249	100	3.745.230.399	100	3.895.230.399	1.05.0.00.0.00.08.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	8.083.810.287	100	10.740.000.000	100	10.740.000.000	100	10.905.862.850	100	11.005.862.850	1.05.0.00.0.00.08.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.155.566.538		2.604.566.538		3.060.566.538		6.940.566.538		3.493.132.428	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	550.000.000	100	700.000.000	100	900.000.000	100	2.150.000.000	100	1.250.000.000	1.05.0.00.0.00.07.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	1.125.000.000	100	1.374.000.000	100	1.585.000.000	100	3.720.000.000	100	1.625.000.000	1.05.0.00.0.00.07.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100	350.000.000	100	380.000.000	100	400.000.000	100	900.000.000	100	400.000.000	1.05.0.00.0.00.07.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	90	90	100	130.566.538	100	150.566.538	100	175.566.538	100	170.566.538	100	218.132.428	1.05.0.00.0.00.07.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					3.495.699.999		2.100.000.000		2.300.000.000		4.200.000.000		4.950.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	100	100	1.150.000.000	100	700.000.000	100	800.000.000	100	1.500.000.000	100	1.800.000.000	1.05.0.00.0.00.08.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya Pelayanan Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	100	645.699.999	100	400.000.000	100	500.000.000	100	700.000.000	100	850.000.000	1.05.0.00.0.00.08.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	1.700.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.300.000.000	1.05.0.00.0.00.08.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					11.487.915.195		9.750.657.024		13.700.665.945		11.732.138.199		12.366.044.821	
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persentase kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran (%)	100	100	100	1.411.852.446	100	788.966.623	100	893.348.603	100	929.279.124	100	966.830.891	1.05.0.00.0.00.06.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	100	100	100	5.442.540.000	100	4.710.297.083	100	4.867.993.750	100	5.047.393.458	100	5.248.563.109	1.05.0.00.0.00.06.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pemenuhan Sarpras Sesuai SPM (%)	100	100	100	3.768.522.749	100	3.332.018.318	100	6.958.929.842	100	4.712.077.179	100	5.042.192.962	1.05.0.00.0.00.06.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Meningkatnya Kualitas SDM Pemadam Kebakaran	Persentase pegawai yang memenuhi standar kulifikasi aparatur pemadam di daerah (%)	100	100	100	865.000.000	100	919.375.000	100	980.393.750	100	1.043.388.438	100	1.108.457.859	1.05.0.00.0.00.06.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					27.758.951.845		28.035.272.745		30.535.272.745		32.535.272.745		34.535.272.745	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.921.921.476		17.012.460.589		18.144.053.477		18.027.161.103		17.766.002.472	
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	3.849.788.516	100	3.478.957.279	100	4.391.728.305	100	4.154.326.707	100	3.877.869.974	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	146.829.694	100	187.224.580	100	218.058.267	100	239.864.094	100	242.262.735	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100	100	12.925.303.266	100	13.346.278.730	100	13.534.266.905	100	13.632.970.302	100	13.645.869.763	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					651.336.839		519.309.559		593.455.993		615.657.256		624.208.828	
Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi masyarakat miskin, kelompok rentan dan potensi sumber kesejahteraan sosial	Persentase masyarakat miskin, keluarga rentan dan potensi sumber kesejahteraan sosial yang berdaya (%)	25,00	28,57	28,86	429.104.624	29,15	280.245.670	29,44	322.282.520	29,73	333.555.346	30,03	339.535.899	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
Meningkatnya Kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	25,39	44,92	57,81	20.000.000	70,70	20.000.000	83,59	23.000.000	96,48	23.230.000	100	23.462.300	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Sosial	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	46,11	46,11	64,07	202.232.215	76,05	219.063.889	94,01	248.173.473	100	258.871.910	100	261.210.629	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					3.235.649.637		1.797.591.506		2.368.378.807		3.144.515.264		4.117.304.614	
Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok miskin dan rentan	Persentase Kelompok miskin dan rentan yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial (%)	100	100	100	3.235.649.637	100	1.797.591.506	100	2.368.378.807	100	3.144.515.264	100	4.117.304.614	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					5.835.512.020		7.753.958.360		8.262.638.828		9.285.444.354		10.191.643.109	
Meningkatnya layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok miskin dan rentan	Persentase Kelompok Miskin dan Rentan yang menerima layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	61,88	82,09	66,43	5.835.512.020	73,02	7.753.958.360	74,07	8.262.638.828	76,67	9.285.444.354	79,16	10.191.643.109	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					731.240.362		570.208.927		727.740.266		935.688.319		1.203.945.983	
Meningkatnya layanan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang menerima layanan perlindungan sosial (%)	100	100	100	731.240.362	100	570.208.927	100	727.740.266	100	935.688.319	100	1.203.945.983	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					383.291.511		381.743.804		439.005.374		526.806.449		632.167.739	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	383.291.511	100	381.743.804	100	439.005.374	100	526.806.449	100	632.167.739	1.06.0.00.0.00.09.0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					16.872.975.847		17.083.138.682		17.633.138.682		19.133.138.682		20.133.138.682	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.913.078.057		13.095.100.892		13.212.585.542		13.467.996.042		13.845.496.042	
Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	105.393.734	100	105.393.734	100	133.120.915	100	184.440.915	100	206.369.665	2.07.0.00.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA
	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.07.0.00.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	1.220.834.489	100	1.322.857.324	100	1.382.015.793	100	1.462.015.793	100	1.538.015.793	2.07.0.00.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	11.586.849.834	100	11.666.849.834	100	11.697.448.834	100	11.821.539.334	100	12.101.110.584	2.07.0.00.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					11.860.000		40.000.000		40.000.000		100.000.000		110.000.000	
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan	Presentase Rencana Tenaga Kerja yang diacu dan dilaksanakan menjadi kegiatan ketenagakerjaan (%)	100	100	100	11.860.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	2.07.0.00.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.412.094.650		1.412.094.650		1.512.094.650		1.952.094.650		2.174.594.650	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Tersertifikasi Kompetensi (%)	35,41	35,41	35,46	1.412.094.650	35,51	1.412.094.650	35,57	1.512.094.650	35,62	1.952.094.650	35,71	2.174.594.650	2.07.0.00.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.486.193.140		1.486.193.140		1.636.814.490		2.341.403.990		2.711.403.990	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan (Orang)	23	71	119	1.486.193.140	167	1.486.193.140	215	1.636.814.490	263	2.341.403.990	313	2.711.403.990	2.07.0.00.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA
	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kota (Unit)	1	1	1		1		1		1		1		2.07.0.00.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA
	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)	54,33	55,00	56,00		57,00		58,00		59,00		60,00		2.07.0.00.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.049.750.000		1.049.750.000		1.231.644.000		1.271.644.000		1.291.644.000	
Meningkatnya Pekerja Yang Terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	8.903	8.903	8.903	1.049.750.000	8.903	1.049.750.000	8.903	1.231.644.000	8.903	1.271.644.000	8.903	1.291.644.000	2.07.0.00.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	45,00	45,00	49,03		53,06		55,00		57,90		59,00		2.07.0.00.0.00.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					25.191.234.860		25.788.085.297		26.707.115.164		27.321.570.952		28.827.776.588	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.540.779.110		17.264.622.711		17.892.252.075		18.884.980.829		19.638.633.441	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	264.103.250	100	268.413.129	100	269.755.195	100	276.499.074	100	283.411.551	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Terpenuhinya pelayanan umum dan Kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	702.675.860	100	713.215.998	100	716.782.078	100	734.701.631	100	753.069.171	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	15.574.000.000	100	16.282.993.584	100	16.905.714.802	100	17.873.780.124	100	18.602.152.719	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					2.475.659.750		2.509.794.646		2.521.343.619		2.579.377.210		2.638.861.640	
Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah yang menjadi kewenangan kab/kota yang telah melakukan pelembagaan PUG (%)	97,37	100	100	255.317.450	100	256.147.212	100	256.427.948	100	257.838.647	100	259.284.613	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota yang melakukan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi (%)	50	50	60	2.220.342.300	70	2.253.647.434	80	2.264.915.671	90	2.321.538.563	100	2.379.577.027	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					1.622.196.000		1.646.528.940		1.654.761.585		1.696.130.624		1.738.533.890	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya layanan komprehensif terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	1.622.196.000	100	1.646.528.940	100	1.654.761.585	100	1.696.130.624	100	1.738.533.890	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.2.14.0.00.11.0062 - UPT P2TP2A
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					1.928.800.000		1.703.982.000		1.962.285.100		1.703.035.614		2.008.710.238	
Meningkatnya kualitas pembelajaran keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar (%)	100	100	100	1.928.800.000	100	1.703.982.000	100	1.962.285.100	100	1.703.035.614	100	2.008.710.238	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					275.200.000		279.328.000		280.724.640		71.935.689		287.742.756	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	50,00	52,63	57,89	275.200.000	63,16	279.328.000	68,42	280.724.640	73,68	71.935.689	78,95	287.742.756	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					147.000.000		149.205.000		149.951.025		84.168.938		155.804.024	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	68,99	68,99	69,01	147.000.000	69,02	149.205.000	69,03	149.951.025	69,04	84.168.938	69,05	155.804.024	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					2.201.600.000		2.234.624.000		2.245.797.120		2.301.942.048		2.359.490.599	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	87,08	87,08	87,48	2.201.600.000	87,68	2.234.624.000	87,88	2.245.797.120	88,08	2.301.942.048	88,28	2.359.490.599	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.2.14.0.00.11.0062 - UPT P2TP2A

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					18.760.667.192,83		23.875.149.830		24.185.149.830		24.945.149.830		25.730.149.830	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.546.617.192,83		17.708.359.350		17.773.359.350		17.838.359.350		17.903.359.350	
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	5.173.425.700,83	100	3.308.359.350	100	3.373.359.350	100	3.438.359.350	100	3.503.359.350	2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	228.872.600	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	11.144.318.892	100	14.100.000.000	100	14.100.000.000	100	14.100.000.000	100	14.100.000.000	2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					22.476.674		232.500.000		265.000.000		297.500.000		400.000.000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Sarana Logistik Pangan di sepanjang Rantai Pasok Pangan (%)	N/A	N/A	20	22.476.674	40	232.500.000	60	265.000.000	80	297.500.000	100	400.000.000	2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.899.020.504		4.614.290.480		4.818.425.000		5.194.290.480		5.656.790.480	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Angka Kecukupan Energi (Kkal/Kapita/Hari)	2.098	2.100	2.100	1.899.020.504	2.100	4.614.290.480	2.100	4.818.425.000	2.100	5.194.290.480	2.100	5.656.790.480	2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Angka Kecukupan Protein (Gram/Kapita/Hari)	65,6	57,0	57,0		57,0		57,0		57,0		57,0		2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Perjanjian Kerjasama dengan Daerah Penghasil Pangan (Dokumen)	N/A	0	0		1		1		1		1		2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Perubahan Harga Pangan Pokok Strategis (%)	N/A	0	10		10		10		10		10		2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					62.552.822		805.000.000		805.000.000		1.015.000.000		1.120.000.000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Jumlah Pelaku Usaha yang terlibat dalam Kegiatan food bank dan food sharing (Pelaku Usaha)	N/A	0	1	62.552.822	1	805.000.000	1	805.000.000	1	1.015.000.000	1	1.120.000.000	2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. (%)	20	20	18		17		16		15		14		2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					230.000.000		515.000.000		523.365.480		600.000.000		650.000.000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	95,55	95,60	95,70	230.000.000	95,80	515.000.000	95,90	523.365.480	96,00	600.000.000	96,10	650.000.000	2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					190.000.000		1.638.600.000		1.638.600.000		2.023.000.000		2.192.000.000	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					0		750.000.000		750.000.000		1.050.000.000		1.200.000.000	
Meningkatnya penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	N/A	0	0	0	100	750.000.000	100	750.000.000	100	1.050.000.000	100	1.200.000.000	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					0		351.800.000		351.800.000		390.000.000		400.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (%)	N/A	100	100	0	100	351.800.000	100	351.800.000	100	390.000.000	100	400.000.000	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					190.000.000		536.800.000		536.800.000		583.000.000		592.000.000	
Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (%)	N/A	100	100	190.000.000	100	536.800.000	100	536.800.000	100	583.000.000	100	592.000.000	1.04.2.10.0.00.05.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					239.389.379.181		268.538.335.732		356.550.232.299		556.550.232.299		560.819.208.178	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					74.974.148.255		76.122.807.813		77.645.263.969		79.198.169.248		80.782.132.633	
Meningkatnya kualitas Perencanaan OPD	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	150.000.000	100	153.000.000	100	156.060.000	100	159.181.200	100	162.364.824	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Terpenuhinya pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	27.494.736.306	100	28.043.807.624	100	28.604.683.777	100	29.176.777.452	100	29.760.313.001	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.11.0.00.0.00.13.0001 - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.11.0.00.0.00.13.0002 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	47.329.411.949	100	47.926.000.189	100	48.884.520.192	100	49.862.210.596	100	50.859.454.808	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.11.0.00.0.00.13.0001 - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.11.0.00.0.00.13.0002 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					2.385.392.000		2.433.079.840		2.481.741.837		2.531.377.074		2.582.025.015	
Meningkatnya efektivitas dokumen perencanaan lingkungan untuk memitigasi dampak pembangunan	Persentase rekomendasi dokumen perencanaan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	2.385.392.000	100	2.433.079.840	100	2.481.741.837	100	2.531.377.074	100	2.582.025.015	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					6.251.177.080		6.376.200.621		6.503.724.634		6.633.799.127		6.766.475.109	
Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	64,0	71,0	71,2	6.251.177.080	71,4	6.376.200.621	71,6	6.503.724.634	71,8	6.633.799.127	72,0	6.766.475.109	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	71,59	34,93	35,43		35,93		36,43		36,93		37,43		2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Air (Indeks)	64,0	71,0	71,2		71,4		71,6		71,8		72,0		2.11.0.00.0.00.13.0001 - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	71,59	34,93	35,43		35,93		36,43		36,93		37,43		2.11.0.00.0.00.13.0001 - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN					16.789.646.410		17.125.439.338		17.467.948.125		17.817.307.087		18.173.653.229	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														
Meningkatnya pengelolaan RTH	Persentase RTH terkelola (%)	5,09	5,14	5,19	16.789.646.410	5,24	17.125.439.338	5,30	17.467.948.125	5,35	17.817.307.087	5,40	18.173.653.229	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					225.000.000		258.750.000		297.562.500		342.196.875		393.526.406	
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3), Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	100	100	100	225.000.000	100	258.750.000	100	297.562.500	100	342.196.875	100	393.526.406	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					450.000.000		459.000.000		468.180.000		477.543.600		487.094.472	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang di terbitkan	Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan (%)	N/A	40	52	450.000.000	54	459.000.000	56	468.180.000	58	477.543.600	60	487.094.472	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					3.868.365.044		3.945.732.345		4.024.646.992		4.105.139.932		4.187.242.731	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Orang/Komunitas/Kelompok/ Organisasi lingkungan hidup yang di tingkatkan kapasitasnya (%)	100	100	100	3.868.365.044	100	3.945.732.345	100	4.024.646.992	100	4.105.139.932	100	4.187.242.731	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					430.000.000		438.600.000		447.372.000		456.319.440		465.445.829	
Meningkatnya Kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	92,55	92,75	93,00	430.000.000	94,4	438.600.000	94,8	447.372.000	95,35	456.319.440	95,83	465.445.829	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					1.682.000.000		1.715.640.000		1.749.952.800		1.784.951.856		1.820.650.893	
Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup (%)	100	100	100	1.682.000.000	100	1.715.640.000	100	1.749.952.800	100	1.784.951.856	100	1.820.650.893	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					132.333.650.392		159.663.085.775		245.463.839.442		443.203.428.060		445.160.961.861	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	53,80	54,00	54,88	132.333.650.392	55,43	159.663.085.775	55,98	245.463.839.442	56,54	443.203.428.060	57,11	445.160.961.861	2.11.0.00.0.00.13.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	53,80	54,00	54,88		55,43		55,98		56,54		57,11		2.11.0.00.0.00.13.0002 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					32.582.753.136		38.586.937.502		38.636.937.502		39.536.937.502		40.536.937.502	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.431.726.636		34.926.937.502		34.176.937.502		34.501.937.502		35.351.937.502	
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	249.000.000	100	405.000.000	100	405.000.000	100	405.000.000	100	405.000.000	2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Terpenuhinya pelayanan umum dan Kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	1.917.594.000	100	8.217.594.000	100	7.467.594.000	100	7.347.594.000	100	7.217.594.000	2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	26.265.132.636	100	26.304.343.502	100	26.304.343.502	100	26.749.343.502	100	27.729.343.502	2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					3.826.026.500		2.925.000.000		3.525.000.000		4.000.000.000		4.050.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	4,72	5,82	10,00	3.826.026.500	20,00	2.925.000.000	30,00	3.525.000.000	40,00	4.000.000.000	50,00	4.050.000.000	2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	71,02	83,91	83,92		83,93		83,94		83,95		84,05		2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Penduduk Memiliki KTP (%)	99,04	99,08	99,10		99,12		99,14		99,16		99,18		2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					150.000.000		350.000.000		500.000.000		500.000.000		600.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100	150.000.000	100	350.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					170.000.000		375.000.000		425.000.000		525.000.000		525.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (%)	100	100	100	170.000.000	100	375.000.000	100	425.000.000	100	525.000.000	100	525.000.000	2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	100	5.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	2.12.0.00.0.00.14.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7.530.142.950		7.295.125.094		7.426.095.227		6.811.639.439		7.305.433.803	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.157.800.000		918.952.000		1.367.002.319		887.709.375		1.484.847.683	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka)	5,4	5,2	5,1	1.157.800.000	5,0	918.952.000	4,8	1.367.002.319	4,7	887.709.375	4,6	1.484.847.683	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	1,71	1,98	2,10		2,10		2,10		2,10		2,10		2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					4.460.642.950		4.435.797.594		4.109.015.530		3.925.100.752		3.771.786.075	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	15,13	14,93	14,73	4.460.642.950	14,53	4.435.797.594	14,23	4.109.015.530	14,03	3.925.100.752	13,83	3.771.786.075	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (%)	90,74	91,6	92,3		93,0		93,7		94,2		94,8		2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (%)	68,14	68,16	68,18		68,2		68,22		68,24		68,26		2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	6,15	6,13	6,11		6,09		6,07		6,06		6,05		2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.911.700.000		1.940.375.500		1.950.077.378		1.998.829.312		2.048.800.045	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	88,9	89,6	90,4	1.911.700.000	91,1	1.940.375.500	91,8	1.950.077.378	92,4	1.998.829.312	92,9	2.048.800.045	2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	N/A	57,7	58,2		58,7		59,2		59,7		60,2		2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga. (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.2.14.0.00.11.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					137.064.121.158		139.474.064.129		141.593.997.961		143.853.729.364		155.910.445.783	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					56.660.955.070		57.166.975.020		57.207.885.847		57.259.885.847		58.128.365.847	
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	16.864.363.745	100	17.127.508.918	100	17.127.919.745	100	17.129.919.745	100	17.816.674.745	2.15.0.00.0.00.28.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.15.0.00.0.00.28.0001 - UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	249.999.733	100	300.000.000	100	340.000.000	100	389.000.000	100	400.000.000	2.15.0.00.0.00.28.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.15.0.00.0.00.28.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	39.546.591.592	100	39.739.466.102	100	39.739.966.102	100	39.740.966.102	100	39.911.691.102	2.15.0.00.0.00.28.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.15.0.00.0.00.28.0001 - UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					80.403.166.088		82.307.089.109		84.386.112.114		86.593.843.517		97.782.079.936	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (%)	62,5	75,0	80,0	80.403.166.088	85,0	82.307.089.109	90,0	84.386.112.114	95,0	86.593.843.517	100	97.782.079.936	2.15.0.00.0.00.28.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	80,62	83,78	87,67		91,42		95,04		98,48		100		2.15.0.00.0.00.28.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Konektivitas Darat (%)	62,5	75,0	80,0		85,0		90,0		95,0		100		2.15.0.00.0.00.28.0001 - UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					63.119.176.158		63.930.062.079		65.842.062.079		64.745.262.079		68.638.782.079	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.604.373.500		17.793.087.508		17.720.680.198		17.926.746.444		18.124.847.883	
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	150.000.000	100	165.000.000	100	181.500.000	100	199.650.000	100	219.614.997	2.16.2.20.2.21.15.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.15.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Terpenuhinya pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	3.391.658.234	100	3.457.602.792	100	3.357.602.792	100	3.464.381.178	100	3.592.517.620	2.16.2.20.2.21.15.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	14.062.715.266	100	14.170.484.716	100	14.181.577.406	100	14.262.715.266	100	14.312.715.266	2.16.2.20.2.21.15.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					9.662.873.932		9.843.299.654		10.401.771.590		10.108.947.862		11.322.556.048	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	80,44	80,84	81,25	9.662.873.932	81,65	9.843.299.654	82,06	10.401.771.590	82,47	10.108.947.862	82,88	11.322.556.048	2.16.2.20.2.21.15.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					35.851.928.726		36.293.674.917		37.719.610.291		36.709.567.773		39.191.378.148	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) (Indeks)	N/A	N/A	2,00	35.851.928.726	2,00	36.293.674.917	2,10	37.719.610.291	2,10	36.709.567.773	2,15	39.191.378.148	2.16.2.20.2.21.15.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,48	3,50	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		2.16.2.20.2.21.15.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					23.741.852.960		24.520.839.048		26.020.839.048		26.020.839.048		27.020.839.048	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.364.852.960		14.912.339.048		15.921.639.048		15.821.639.048		16.479.799.048	
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	222.500.000	100	244.750.000	100	282.672.448	100	296.147.500	100	325.762.250	2.17.0.00.0.00.16.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.17.0.00.0.00.16.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Terpenuhinya pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	2.617.460.000	100	2.708.706.000	100	2.828.576.600	100	2.921.734.260	100	3.034.907.686	2.17.0.00.0.00.16.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	11.524.892.960	100	11.958.883.048	100	12.810.390.000	100	12.603.757.288	100	13.119.129.112	2.17.0.00.0.00.16.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					150.000.000		180.000.000		259.200.000		259.200.000		311.040.000	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	5,06	5,11	5,16	150.000.000	5,21	180.000.000	5,27	259.200.000	5,32	259.200.000	5,37	311.040.000	2.17.0.00.0.00.16.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					630.000.000		650.000.000		700.000.000		700.000.000		730.000.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	10,87	11,00	11,00	630.000.000	11,00	650.000.000	11,00	700.000.000	11,00	700.000.000	11,00	730.000.000	2.17.0.00.0.00.16.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					1.525.500.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.750.000.000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	28,61	30,00	35,00	1.525.500.000	40,00	1.600.000.000	45,00	1.700.000.000	50,00	1.700.000.000	55,00	1.750.000.000	2.17.0.00.0.00.16.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					675.000.000		758.500.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	12,00	15,79	17,11	675.000.000	18,42	758.500.000	19,74	800.000.000	21,05	900.000.000	22,37	1.000.000.000	2.17.0.00.0.00.16.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					5.180.000.000		5.200.000.000		5.400.000.000		5.400.000.000		5.500.000.000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke formal (%)	30,43	31,96	33,55	5.180.000.000	35,23	5.200.000.000	36,99	5.400.000.000	38,84	5.400.000.000	40,79	5.500.000.000	2.17.0.00.0.00.16.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pertumbuhan Wirausaha (%)	60,59	60,71	60,82		60,94		61,05		61,17		61,28		2.17.0.00.0.00.16.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.216.500.000		1.220.000.000		1.240.000.000		1.240.000.000		1.250.000.000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	11,18	11,74	12,33	1.216.500.000	12,94	1.220.000.000	13,59	1.240.000.000	14,27	1.240.000.000	14,98	1.250.000.000	2.17.0.00.0.00.16.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					37.534.382.749		37.143.283.938		38.643.283.938		39.143.283.938		40.643.283.938	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.457.405.376		34.672.735.697		36.049.176.786		36.419.471.427		37.783.280.802	
Meningkatnya kualitas Perencanaan OPD	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	173.205.208	100	181.865.468	100	190.958.742	100	200.506.679	100	210.532.013	2.18.0.00.0.00.17.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.18.0.00.0.00.17.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	5.189.437.045	100	5.448.908.897	100	5.721.354.341	100	6.007.382.061	100	6.307.793.162	2.18.0.00.0.00.17.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	30.094.763.123	100	29.041.961.332	100	30.136.863.703	100	30.211.582.687	100	31.264.955.627	2.18.0.00.0.00.17.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					120.826.338		416.619.655		437.450.638		459.323.170		482.289.328	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	100	100	100	120.826.338	100	416.619.655	100	437.450.638	100	459.323.170	100	482.289.328	2.18.0.00.0.00.17.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					932.844.800		979.457.040		1.028.461.392		1.079.884.462		1.133.878.685	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal dalam Menjaring Investor Baru	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	100	100	100	932.844.800	100	979.457.040	100	1.028.461.392	100	1.079.884.462	100	1.133.878.685	2.18.0.00.0.00.17.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					666.324.241		699.640.453		734.622.475		771.353.599		809.921.279	
Meningkatnya pelayanan penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	93,3	93,5	93,7	666.324.241	93,9	699.640.453	94,1	734.622.475	94,3	771.353.599	94,5	809.921.279	2.18.0.00.0.00.17.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					306.982.185		322.331.294		338.447.858		355.370.252		373.138.764	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	100	100	100	306.982.185	100	322.331.294	100	338.447.858	100	355.370.252	100	373.138.764	2.18.0.00.0.00.17.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					49.999.809		52.499.799		55.124.789		57.881.028		60.775.080	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	49.999.809	100	52.499.799	100	55.124.789	100	57.881.028	100	60.775.080	2.18.0.00.0.00.17.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					133.888.128.240		50.457.725.180		51.057.725.180		52.057.725.180		53.057.725.180	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.618.493.480		24.949.889.941		25.402.306.363		25.081.889.941		25.494.306.363	
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	415.000.000	100	415.000.000	100	427.450.000	100	415.000.000	100	427.450.000	2.19.0.00.0.00.18.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Terpenuhinya pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	6.078.493.480	100	5.905.207.556	100	6.337.223.978	100	6.037.207.556	100	6.429.223.978	2.19.0.00.0.00.18.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	15.125.000.000	100	18.629.682.385	100	18.637.632.385	100	18.629.682.385	100	18.637.632.385	2.19.0.00.0.00.18.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					6.006.628.000		6.186.826.840		6.372.431.646		6.563.604.595		6.760.512.733	
Meningkatnya daya saing pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi (Angka)	5	5	5	6.006.628.000	5	6.186.826.840	5	6.372.431.646	5	6.563.604.595	5	6.760.512.733	2.19.0.00.0.00.18.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Rasio wirausaha pemuda (Rasio)	1,78	1,80	1,80		1,83		1,86		1,90		1,96		2.19.0.00.0.00.18.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					104.620.744.611		17.617.478.386		17.516.351.257		18.580.595.653		18.904.322.043	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet yang masuk Pelatnas (%)	6,67	6,67	6,67	104.620.744.611	6,67	17.617.478.386	6,67	17.516.351.257	6,67	18.580.595.653	6,67	18.904.322.043	2.19.0.00.0.00.18.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase Cabor yang Masuk Pelatnas (%)	1,7	1,7	1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		2.19.0.00.0.00.18.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase atlet yang masuk Pelatnas (%)	6,67	6,67	6,67		6,67		6,67		6,67		6,67		2.19.0.00.0.00.18.0006 - UPTD PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
	Persentase Cabor yang Masuk Pelatnas (%)	1,7	1,7	1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		2.19.0.00.0.00.18.0006 - UPTD PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.642.262.149		1.703.530.013		1.766.635.914		1.831.634.991		1.898.584.041	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	N/A	0,1	0,3	1.642.262.149	0,5	1.703.530.013	0,7	1.766.635.914	0,9	1.831.634.991	1,1	1.898.584.041	2.19.0.00.0.00.18.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,63	2,63	2,68	200.000.000	2,68	220.000.000	2,74	242.000.000	2,74	266.200.000	2,79	292.820.000	2.16.2.20.2.21.15.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					600.000.000		660.000.000		726.000.000		798.600.000		878.460.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					600.000.000		660.000.000		726.000.000		798.600.000		878.460.000	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	550	740	760	600.000.000	780	660.000.000	800	726.000.000	820	798.600.000	840	878.460.000	2.16.2.20.2.21.15.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3.812.720.000		3.823.377.200		3.861.610.972		3.938.843.191		4.135.785.350	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.357.720.000		1.391.297.200		1.405.210.172		1.433.314.375		1.504.980.094	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	N/A	60,48	60,48	1.357.720.000	61,69	1.391.297.200	62,92	1.405.210.172	64,18	1.433.314.375	65,47	1.504.980.094	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					1.425.000.000		1.439.250.000		1.453.642.500		1.482.715.350		1.556.851.117	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	100	100	100	1.425.000.000	100	1.439.250.000	100	1.453.642.500	100	1.482.715.350	100	1.556.851.117	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					330.000.000		333.300.000		336.633.000		343.365.660		360.533.943	
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sejarah Lokal	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	N/A	0	20	330.000.000	25	333.300.000	30	336.633.000	35	343.365.660	40	360.533.943	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					700.000.000		659.530.000		666.125.300		679.447.806		713.420.196	
Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	33	33	33	700.000.000	33	659.530.000	33	666.125.300	33	679.447.806	33	713.420.196	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					18.907.474.214		18.996.980.046		19.672.430.046		20.576.080.046		22.006.905.046	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.970.655.375		16.911.143.147		17.477.680.046		18.119.050.000		19.234.905.046	
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	62.238.240	100	78.000.000	100	83.900.000	100	92.700.000	100	113.000.000	2.24.2.23.0.00.19.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.24.2.23.0.00.19.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Terpenuhinya pelayanan umum dan Kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	3.268.036.899	100	3.614.143.147	100	3.859.750.000	100	4.062.350.000	100	4.524.000.000	2.24.2.23.0.00.19.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	13.640.380.236	100	13.219.000.000	100	13.534.030.046	100	13.964.000.000	100	14.597.905.046	2.24.2.23.0.00.19.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.936.818.839		2.085.836.899		2.194.750.000		2.457.030.046		2.772.000.000	
Meningkatnya Ketermanfaatan Perpustakaan	Persentase Ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat (%)	17,53	24,36	32,56	283.999.537	41,44	394.337.735	51,01	435.000.000	61,26	493.000.000	72,19	580.000.000	2.24.2.23.0.00.19.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (%)	62,82	66,61	70,4	1.652.819.302	74,19	1.691.499.164	77,98	1.759.750.000	81,77	1.964.030.046	85,56	2.192.000.000	2.24.2.23.0.00.19.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	Rasio kecukupan koleksi Perpustakaan (Rasio)	64,19	64,33	64,46		64,60		64,74		64,87		65,01		2.24.2.23.0.00.19.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Rasio Kecukupan Tenaga Perpustakaan (Rasio)	38,77	55,86	64,40		72,94		81,48		90,02		100		2.24.2.23.0.00.19.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					252.785.429		359.500.000		384.050.000		480.400.000		549.575.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					185.953.461		227.000.000		252.975.000		337.500.000		377.125.000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	100	100	100	185.953.461	100	227.000.000	100	252.975.000	100	337.500.000	100	377.125.000	2.24.2.23.0.00.19.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					24.820.000		77.000.000		72.800.000		77.900.000		97.450.000	
Meningkatnya perlindungan dan peyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	100	100	100	24.820.000	100	77.000.000	100	72.800.000	100	77.900.000	100	97.450.000	2.24.2.23.0.00.19.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					42.011.968		55.500.000		58.275.000		65.000.000		75.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	100	100	100	42.011.968	100	55.500.000	100	58.275.000	100	65.000.000	100	75.000.000	2.24.2.23.0.00.19.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					3.495.223.216,95		1.275.000.000		1.300.000.000		1.375.000.000		1.425.000.000	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					3.115.256.965,87		625.000.000		650.000.000		675.000.000		700.000.000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	312,68	320,99	328,97	3.115.256.965,87	337,11	625.000.000	345,40	650.000.000	353,90	675.000.000	360,98	700.000.000	2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					379.966.251,08		650.000.000		650.000.000		700.000.000		725.000.000	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	29,52	29,66	29,81	379.966.251,08	29,96	650.000.000	30,11	650.000.000	30,26	700.000.000	30,41	725.000.000	2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					21.330.947.878		22.633.101.173		25.633.101.173		26.633.101.173		29.633.101.173	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.756.316.108		15.342.101.173		17.042.101.173		17.898.101.173		20.258.101.173	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	3.26.0.00.0.00.20.0000 - DINAS PARIWISATA
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.26.0.00.0.00.20.0000 - DINAS PARIWISATA
Terpenuhinya pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	3.115.000.000	100	2.995.000.000	100	3.450.000.000	100	3.760.000.000	100	4.049.750.000	3.26.0.00.0.00.20.0000 - DINAS PARIWISATA
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	11.141.316.108	100	11.847.101.173	100	13.092.101.173	100	13.638.101.173	100	15.708.351.173	3.26.0.00.0.00.20.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.800.000.000		2.100.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Hotel Berbintang) (ribu orang) (Orang)	399,06	420,10	441,14	1.800.000.000	462,18	2.100.000.000	483,22	1.750.000.000	504,26	1.750.000.000	525,30	1.750.000.000	3.26.0.00.0.00.20.0000 - DINAS PARIWISATA
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	2,99	2,99	4,98		10,00		14,94		19,94		20,00		3.26.0.00.0.00.20.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					2.556.000.000		2.591.000.000		2.626.000.000		2.655.000.000		2.680.000.000	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	N/A	16,67	21,43	2.556.000.000	23,53	2.591.000.000	28,57	2.626.000.000	29,63	2.655.000.000	31,43	2.680.000.000	3.26.0.00.0.00.20.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	21,23	23,58	25,94	500.000.000	28,30	500.000.000	30,66	500.000.000	33,02	500.000.000	35,58	500.000.000	3.26.0.00.0.00.20.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.718.631.770		2.100.000.000		3.715.000.000		3.830.000.000		4.445.000.000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	12,97	19,08	25,20	1.718.631.770	31,31	2.100.000.000	37,43	3.715.000.000	43,55	3.830.000.000	49,66	4.445.000.000	3.26.0.00.0.00.20.0000 - DINAS PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					6.102.726.440,22		3.985.000.000		4.150.000.000		4.315.000.000		4.480.000.000	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					5.635.000.000		3.200.000.000		3.300.000.000		3.400.000.000		3.500.000.000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton)	15	16	17	5.635.000.000	18	3.200.000.000	19	3.300.000.000	20	3.400.000.000	21	3.500.000.000	2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Peningkatan Sarana Edukasi Pertanian (Unit)	N/A	0	0		0		1		1		1		2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					467.726.440,22		785.000.000		850.000.000		915.000.000		980.000.000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	N/A	87	88	242.726.440,22	89	440.000.000	90	470.000.000	91	500.000.000	92	530.000.000	2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	N/A	87	88		89		90		91		92		2.09.3.27.3.25.12.0001 - UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN
Meningkatnya Keamanan Pangan Produk Hewan	Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (%)	75,76	75,76	77,00	225.000.000	79,00	345.000.000	81,00	380.000.000	83,00	415.000.000	85,00	450.000.000	2.09.3.27.3.25.12.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					22.615.287.546		22.969.080.473		23.436.032.699		24.204.544.246		24.605.496.235	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.073.657.912		20.244.206.912		20.376.457.548		20.901.410.439		21.345.588.954	
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	256.191.718	100	256.191.718	100	321.315.552	100	372.141.863	100	421.462.104	3.30.3.31.0.00.21.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.30.3.31.0.00.21.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Terpenuhinya pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	1.274.615.371	100	1.346.295.180	100	1.212.288.303	100	1.399.869.316	100	1.565.216.085	3.30.3.31.0.00.21.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	18.542.850.823	100	18.641.720.014	100	18.842.853.693	100	19.129.399.260	100	19.358.910.765	3.30.3.31.0.00.21.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					120.400.180		126.000.200		142.180.206		158.810.612		73.235.992	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	100	100	100	120.400.180	100	126.000.200	100	142.180.206	100	158.810.612	100	73.235.992	3.30.3.31.0.00.21.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.458.136.427		1.535.057.899		1.679.385.021		1.743.444.172		1.978.180.249	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	28,00	33,88	40,99	1.458.136.427	49,60	1.535.057.899	60,02	1.679.385.021	72,62	1.743.444.172	87,88	1.978.180.249	3.30.3.31.0.00.21.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	28,00	33,88	40,99		49,60		60,02		72,62		87,88		3.30.3.31.0.00.21.0001 - UPTD PENGELOLAAN PASAR
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					370.659.112		420.000.000		461.339.999		551.020.200		575.324.856	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	100	100	100	370.659.112	100	420.000.000	100	461.339.999	100	551.020.200	100	575.324.856	3.30.3.31.0.00.21.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					161.833.915		179.815.462		185.209.925		240.766.223		267.989.210	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase IKM yang berhasil difasilitasi ekspor (%)	16,67	18,33	20,17	161.833.915	22,18	179.815.462	24,40	185.209.925	26,84	240.766.223	29,53	267.989.210	3.30.3.31.0.00.21.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					360.400.000		386.000.000		511.120.000		526.342.400		271.669.248	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	360.400.000	100	386.000.000	100	511.120.000	100	526.342.400	100	271.669.248	3.30.3.31.0.00.21.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.30.3.31.0.00.21.0002 - UPTD PELAYANAN METROLOGI LEGAL
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					70.200.000		78.000.000		80.340.000		82.750.200		93.507.726	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	100	100	100	70.200.000	100	78.000.000	100	80.340.000	100	82.750.200	100	93.507.726	3.30.3.31.0.00.21.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					3.165.506.773		3.146.000.000		3.679.047.774		3.410.536.227		1.509.584.238	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					2.974.006.773		2.911.000.000		2.996.097.774		2.927.419.729		1.220.362.454	
Meningkatnya produktivitas industri kecil dan menengah pada level kota	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota (%)	N/A	53,3	55,6	2.974.006.773	58,0	2.911.000.000	60,3	2.996.097.774	62,6	2.927.419.729	65,0	1.220.362.454	3.30.3.31.0.00.21.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					110.500.000		145.000.000		191.150.000		217.480.500		183.713.064	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor industri	Persentase izin usaha industri yang terbit (%)	98,9	98,9	98,9	110.500.000	98,9	145.000.000	98,9	191.150.000	98,9	217.480.500	98,9	183.713.064	3.30.3.31.0.00.21.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					81.000.000		90.000.000		491.800.000		265.635.998		105.508.720	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini (%)	94,44	94,44	94,44	81.000.000	94,44	90.000.000	94,45	491.800.000	94,46	265.635.998	94,47	105.508.720	3.30.3.31.0.00.21.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					197.021.519.478		197.927.789.132		198.577.789.132		199.577.789.132		200.077.789.132	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					147.618.388.139		148.297.403.394		148.783.623.130		149.354.234.569		149.703.563.915	
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	55.639.472.915	100	55.895.385.171	100	56.076.678.270	100	56.183.755.009	100	56.253.572.943	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	249.012.539	100	250.157.996	100	250.983.511	100	252.238.423	100	252.995.133	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Terpenuhinya Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (%)	100	100	100	2.733.464.376	100	2.746.038.311	100	2.755.100.236	100	2.768.875.735	100	2.777.182.360	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Terpenuhinya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	87.888.203.309	100	88.292.489.036	100	88.583.854.238	100	89.026.773.495	100	89.293.853.799	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kelembagaan	Persentase Kebijakan Kelembagaan dan Manajemen SDM yang disusun (%)	100	100	100	336.600.000	100	338.148.360	100	339.264.249	100	340.960.570	100	341.983.451	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Publik	Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Nilai IKM A (%)	N/A	70	72	272.030.000	74	273.281.338	76	274.183.165	78	275.554.080	80	276.380.741	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pelaporan dalam LHE SAKIP Kota oleh KEMENPAN RB (Nilai)	10,09	10,16	10,23	499.605.000	10,30	501.903.182	10,37	503.559.461	10,44	506.077.257	10,51	507.595.488	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					46.347.973.039		46.561.173.711		46.714.825.579		47.128.817.442		47.270.203.888	
Meningkatnya Implementasi Kebijakan HAM	Capaian aksi HAM (%)	97,5	97,5	97,6	3.640.014.500	97,7	3.656.758.566	97,8	3.668.825.869	97,9	3.687.169.998	98,0	3.698.231.507	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	N/A	100	100	986.430.310	100	990.967.888	100	994.238.081	100	999.209.269	100	1.002.206.895	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	0,82	0,83	0,83	39.980.676.229	0,84	40.164.587.339	0,84	40.297.130.476	0,85	40.679.033.870	0,85	40.801.070.971	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	N/A	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kerjasama Daerah	Persentase Efektifitas Kerjasama Daerah (%)	N/A	80	82	856.506.000	85	860.445.927	87	863.285.397	87	867.601.822	87	870.204.626	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (%)	100	100	100	884.346.000	100	888.413.991	100	891.345.756	100	895.802.483	100	898.489.889	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					3.055.158.300		3.069.212.027		3.079.340.423		3.094.737.121		3.104.021.329	
Meningkatnya Implementasi Kebijakan Adminstrasi Pembangunan	Persentase Efektfititas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	N/A	100	100	1.032.860.300	100	1.037.611.457	100	1.041.035.573	100	1.046.240.750	100	1.049.379.471	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Implementasi Kebijakan Perekonomian	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	5,03	5,05	5,07	992.518.000	5,08	997.083.582	5,09	1.000.373.956	5,11	1.005.375.824	5,11	1.008.391.950	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (%)	N/A	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,94	2,00	2,11		1,87		4,27		4,55		5,04		4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Nilai)	N/A	21,59	22,1	1.029.780.000	22,13	1.034.516.988	22,15	1.037.930.894	23,11	1.043.120.547	25,11	1.046.249.908	4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Pemenuhan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (%)	N/A	40	50		55		56		58		60		4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Tingkat Kematangan UKPBJ (%)	N/A	9	9		9		9		9		9		4.01.0.00.0.00.22.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					140.203.875.341		140.534.183.379		141.653.183.379		144.053.183.379		146.053.183.379	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					97.165.281.309		97.315.281.309		97.415.281.309		98.715.281.309		100.740.281.309	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	362.805.000	100	362.805.000	100	362.805.000	100	362.805.000	100	362.805.000	4.02.0.00.0.00.23.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.23.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	8.519.446.335	100	8.619.446.335	100	8.719.446.335	100	9.619.446.335	100	9.819.446.335	4.02.0.00.0.00.23.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	88.283.029.974	100	88.333.029.974	100	88.333.029.974	100	88.733.029.974	100	90.558.029.974	4.02.0.00.0.00.23.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					43.038.594.032		43.218.902.070		44.237.902.070		45.337.902.070		45.312.902.070	
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	100	100	100	37.982.362.732	100	38.162.670.770	100	39.181.670.770	100	40.281.670.770	100	40.126.670.770	4.02.0.00.0.00.23.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.23.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	5.056.231.300	100	5.056.231.300	100	5.056.231.300	100	5.056.231.300	100	5.186.231.300	4.02.0.00.0.00.23.0000 - SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01 - PERENCANAAN					30.345.879.374		31.485.294.074		32.910.294.074		34.315.294.074		34.750.294.074	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.962.707.868		28.001.019.671		28.859.543.884		29.718.068.097		30.576.592.310	
Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	150.107.500	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	150.000.000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.24.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Terpenuhinya pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	3.500.369.184	100	3.200.399.600	100	3.327.899.600	100	3.273.899.600	100	3.295.199.600	5.01.5.05.0.00.24.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	23.312.231.184	100	24.650.620.071	100	25.381.644.284	100	26.244.168.497	100	27.131.392.710	5.01.5.05.0.00.24.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.116.801.750		2.170.000.000		2.320.000.000		2.755.000.000		2.720.000.000	
Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) (%)	100	100	100	2.116.801.750	100	2.170.000.000	100	2.320.000.000	100	2.755.000.000	100	2.720.000.000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase pemanfaatan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.24.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.266.369.756		1.314.274.403		1.730.750.190		1.842.225.977		1.453.701.764	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD (%)	100	100	100	974.845.656	100	1.011.722.434	100	1.412.895.191	100	1.544.749.656	100	1.199.624.578	5.01.5.05.0.00.24.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra OPD (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.24.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	291.524.100	100	302.551.969	100	317.854.999	100	297.476.321	100	254.077.186	5.01.5.05.0.00.24.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.02 - KEUANGAN					147.621.487.193		137.442.483.061		139.942.483.061		141.942.483.061		143.942.483.061	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					103.763.651.946		106.491.975.411		107.837.941.061		109.004.570.861		110.152.484.797	
Meningkatnya kualitas perencanaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	186.386.009	100	271.500.000	100	279.300.000	100	287.100.000	100	294.800.000	5.02.0.00.0.00.25.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	503.500.000	100	524.999.500	100	547.417.000	100	570.791.700	100	595.164.500	5.02.0.00.0.00.26.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
Terpenuhinya pelayanan umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	18.967.945.000	100	19.663.277.000	100	20.296.839.000	100	20.970.264.000	100	21.685.255.000	5.02.0.00.0.00.26.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
Terpenuhinya pelayanan umum dan kepegawaian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	2.701.182.971	100	3.633.239.940	100	3.758.130.000	100	3.872.585.800	100	3.977.983.736	5.02.0.00.0.00.25.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.25.0007 - UPTD PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	27.822.362.846	100	28.341.137.842	100	28.908.947.782	100	29.488.545.782	100	30.080.158.782	5.02.0.00.0.00.25.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	53.582.275.120	100	54.057.821.129	100	54.047.307.279	100	53.815.283.579	100	53.519.122.779	5.02.0.00.0.00.26.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					29.562.909.983		15.622.600.000		15.789.600.000		15.958.746.200		16.126.035.264	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola anggaran yang efektif	Persentase anggaran belanja yang dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah (%)	100	100	100	26.678.110.001	100	12.515.000.000	100	12.594.000.000	100	12.671.000.000	100	12.746.000.000	5.02.0.00.0.00.25.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen anggaran daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.25.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	97,58	97,59	97,60	1.442.961.999	97,61	1.565.600.000	97,62	1.606.600.000	97,63	1.652.600.000	97,64	1.697.800.000	5.02.0.00.0.00.25.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase realisasi penerimaan dana transfer (%)	92	92	92		92		92		92		92		5.02.0.00.0.00.25.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tata kelola akuntasi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan sesuai Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) (%)	100	100	100	1.441.837.983	100	1.542.000.000	100	1.589.000.000	100	1.635.146.200	100	1.682.235.264	5.02.0.00.0.00.25.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.25.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase rekomendasi audit laporan keuangan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.25.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3.612.209.564		4.330.500.000		4.963.000.000		5.092.000.000		5.220.000.000	
Meningkatnya tata kelola barang milik daerah yang tertib, inovatif, dan kolaboratif	Persentase BMD yang bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah (%)	7,0	9,3	11,6	3.612.209.564	13,9	4.330.500.000	16,3	4.963.000.000	18,6	5.092.000.000	20,9	5.220.000.000	5.02.0.00.0.00.25.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase ketepatan waktu penetapan RKBMD, penyampaian laporan BMD dan penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.25.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase realisasi pendapatan yang bersumber dari optimalisasi BMD (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.25.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase tindak lanjut rekomendasi LHP BPK terkait BMD (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.25.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase BMD yang bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah (%)	7,0	9,3	11,6		13,9		16,3		18,6		20,9		5.02.0.00.0.00.25.0007 - UPTD PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
	Persentase ketepatan waktu penetapan RKBMD, penyampaian laporan BMD dan penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.25.0007 - UPTD PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
	Persentase realisasi pendapatan yang bersumber dari optimalisasi BMD (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.25.0007 - UPTD PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase tindak lanjut rekomendasi LHP BPK terkait BMD (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.25.0007 - UPTD PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					10.682.715.700		10.997.407.650		11.351.942.000		11.887.166.000		12.443.963.000	
Meningkatnya Digitalisasi Pelayanan	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (Indeks)	98,30	99,00	99,00	1.047.790.099	99,00	1.051.070.713	99,00	1.076.626.467	99,00	1.114.554.484	99,00	1.154.955.975	5.02.0.00.0.00.26.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (%)	N/A	100	100	9.634.925.601	100	9.946.336.937	100	10.275.315.533	100	10.772.611.516	100	11.289.007.025	5.02.0.00.0.00.26.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	52,18	60,90	64,41		67,09		67,78		68,47		69,13		5.02.0.00.0.00.26.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					29.177.206.165		29.282.831.647		30.172.831.647		31.172.831.647		32.172.831.647	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.212.206.165		26.169.581.647		26.905.731.647		27.905.731.647		28.905.731.647	
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	105.000.000	100	110.250.000	100	114.450.000	100	114.450.000	100	114.450.000	5.03.5.04.0.00.27.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.03.5.04.0.00.27.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Terpenuhinya pelayanan umum dan Kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	3.250.000.000	100	3.412.500.000	100	3.566.000.000	100	3.566.000.000	100	3.566.000.000	5.03.5.04.0.00.27.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Prensentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	22.857.206.165	100	22.646.831.647	100	23.225.281.647	100	24.225.281.647	100	25.225.281.647	5.03.5.04.0.00.27.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.965.000.000		3.113.250.000		3.267.100.000		3.267.100.000		3.267.100.000	
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	5,47	5,33	6,77	900.000.000	8,55	945.000.000	10,32	989.500.000	12,10	989.500.000	13,87	989.500.000	5.03.5.04.0.00.27.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti assestment (%)	40	50	60	500.000.000	70	525.000.000	80	550.000.000	90	550.000.000	100	550.000.000	5.03.5.04.0.00.27.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	3,36	3,41	32,42		20,51		28,02		32,42		20,51		5.03.5.04.0.00.27.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	100	100	100	255.000.000	100	267.750.000	100	276.850.000	100	276.850.000	100	276.850.000	5.03.5.04.0.00.27.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Keterisian formasi CPNS dan calon PPPK dalam penerimaan CPNS dan Calon PPPK (%)	100	100	100	1.120.000.000	100	1.176.000.000	100	1.231.750.000	100	1.231.750.000	100	1.231.750.000	5.03.5.04.0.00.27.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.03.5.04.0.00.27.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya Tingkat Kedisiplinan ASN	Persentase Penyelesaian Kasus Disiplin ASN (%)	100	100	100	190.000.000	100	199.500.000	100	219.000.000	100	219.000.000	100	219.000.000	5.03.5.04.0.00.27.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.300.000.000		2.415.000.000		2.525.000.000		2.525.000.000		2.525.000.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.300.000.000		2.415.000.000		2.525.000.000		2.525.000.000		2.525.000.000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	2,86	2,62	3,36	800.000.000	3,36	840.000.000	5,14	880.000.000	6,03	880.000.000	6,91	880.000.000	5.03.5.04.0.00.27.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	2,61	2,71	3,41	1.500.000.000	4,30	1.575.000.000	5,18	1.645.000.000	6,07	1.645.000.000	6,96	1.645.000.000	5.03.5.04.0.00.27.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.060.000.000		1.130.000.000		1.205.000.000		1.300.000.000		1.365.000.000	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.060.000.000		1.130.000.000		1.205.000.000		1.300.000.000		1.365.000.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan riset dan inovasi daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	1.060.000.000	100	1.130.000.000	100	1.205.000.000	100	1.300.000.000	100	1.365.000.000	5.01.5.05.0.00.24.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.24.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase riset dan inovasi yang difasilitasi dan disupervisi (%)	N/A	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.24.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					41.528.376.068		41.953.239.284		43.153.239.284		44.153.239.284		46.153.239.284	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					40.943.326.068		41.355.095.784		42.538.822.284		43.123.774.284		44.251.324.284	
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	4.993.497.472	100	5.063.497.472	100	5.173.497.472	100	5.461.767.000	100	6.061.767.000	6.01.0.00.0.00.29.0000 - INSPEKTORAT
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	27.900.000	100	29.853.000	100	32.212.000	100	34.382.000	100	38.700.000	6.01.0.00.0.00.29.0000 - INSPEKTORAT
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100	100	35.921.928.596	100	36.261.745.312	100	37.333.112.812	100	37.627.625.284	100	38.150.857.284	6.01.0.00.0.00.29.0000 - INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					165.050.000		176.603.500		190.542.000		203.905.000		224.150.000	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase perangkat daerah yang memperoleh predikat SAKIP A hasil evaluasi internal (%)	100	100	100	165.050.000	100	176.603.500	100	190.542.000	100	203.905.000	100	224.150.000	6.01.0.00.0.00.29.0000 - INSPEKTORAT
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti (%)	84,09	85,00	86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		6.01.0.00.0.00.29.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					420.000.000		421.540.000		423.875.000		825.560.000		1.677.765.000	
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan melalui kebijakan, pendampingan, dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).	3,12	3,15	3,18	420.000.000	3,21	421.540.000	3,24	423.875.000	3,27	825.560.000	3,30	1.677.765.000	6.01.0.00.0.00.29.0000 - INSPEKTORAT
	Rasio jumlah temuan terhadap jumlah kegiatan Pemerintah Daerah (%)	20	20	19		18		17		16		15		6.01.0.00.0.00.29.0000 - INSPEKTORAT
7.01 - KECAMATAN					331.117.033.039,54		334.601.136.473		336.481.136.473		343.681.136.473		350.281.136.473	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					209.288.685.806,74		211.854.703.860		214.413.721.424		219.328.042.538		223.570.587.211	
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah pada Kecamatan Ciputat	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	4.321.794.344	100	4.592.275.067	100	4.722.925.121	100	4.872.500.158	100	4.931.501.054	7.01.0.00.0.00.31.0000 - KECAMATAN CIPUTAT
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah pada Kecamatan Ciputat Timur	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	7.546.435.800	100	7.291.276.179	100	7.230.000.000	100	7.375.500.000	100	7.530.500.000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN CIPUTAT TIMUR
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah pada Kecamatan Pamulang	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	8.018.436.603	100	7.845.000.000	100	7.845.000.000	100	8.253.612.436	100	8.753.612.436	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KECAMATAN PAMULANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah pada Kecamatan Serpong	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	3.664.285.560	100	4.074.285.560	100	4.024.285.560	100	3.924.285.560	100	4.074.285.560	7.01.0.00.0.00.34.0000 - KECAMATAN SERPONG
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah pada Kecamatan Serpong Utara	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	5.452.164.620,54	100	5.130.000.000	100	5.358.000.000	100	6.121.129.600	100	6.421.129.600	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KECAMATAN SERPONG UTARA
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah pada Kecamatan Pondok Aren	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	6.953.840.053	100	7.353.840.053	100	7.283.840.053	100	7.683.840.053	100	7.578.840.053	7.01.0.00.0.00.36.0000 - KECAMATAN PONDOK AREN
Terpenuhinya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah pada Kecamatan Setu	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	4.145.000.000	100	4.145.000.000	100	4.145.000.000	100	4.245.073.353	100	4.170.073.353	7.01.0.00.0.00.37.0000 - KECAMATAN SETU
Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Ciputat	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	276.345.326	100	253.800.000	100	260.800.000	100	268.800.000	100	270.800.000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - KECAMATAN CIPUTAT
	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.31.0000 - KECAMATAN CIPUTAT
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Ciputat Timur	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	171.000.000	100	185.000.000	100	192.000.000	100	199.500.000	100	199.500.000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN CIPUTAT TIMUR
	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN CIPUTAT TIMUR
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Pamulang	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	314.100.000	100	314.100.000	100	314.100.000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KECAMATAN PAMULANG
	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.33.0000 - KECAMATAN PAMULANG
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Serpong	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - KECAMATAN SERPONG
	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.34.0000 - KECAMATAN SERPONG
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Serpong Utara	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	240.000.000	100	285.000.000	100	285.000.000	100	305.000.000	100	305.000.000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KECAMATAN SERPONG UTARA
	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.35.0000 - KECAMATAN SERPONG UTARA
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Pondok Aren	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	250.000.000	100	295.000.000	100	340.000.000	100	390.000.000	100	440.000.000	7.01.0.00.0.00.36.0000 - KECAMATAN PONDOK AREN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.36.0000 - KECAMATAN PONDOK AREN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Setu	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	207.000.000	100	207.000.000	100	207.000.000	100	207.000.000	100	207.000.000	7.01.0.00.0.00.37.0000 - KECAMATAN SETU
	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.37.0000 - KECAMATAN SETU
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah pada Kecamatan Ciputat	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	19.962.325.583	100	20.060.997.333	100	20.232.341.022	100	20.402.800.663	100	20.579.344.440	7.01.0.00.0.00.31.0000 - KECAMATAN CIPUTAT
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah pada Kecamatan Ciputat Timur	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	19.247.675.129,6	100	19.494.834.751	100	19.555.334.751	100	19.942.334.751	100	20.367.334.751	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN CIPUTAT TIMUR
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah pada Kecamatan Pamulang	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	23.458.634.771,8	100	24.458.634.772	100	24.463.334.772	100	24.465.258.772	100	24.465.258.772	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KECAMATAN PAMULANG
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah pada Kecamatan Serpong	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	28.220.795.058	100	28.296.150.462	100	29.176.150.462	100	30.176.150.462	100	30.226.150.462	7.01.0.00.0.00.34.0000 - KECAMATAN SERPONG
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah pada Kecamatan Serpong Utara	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	20.212.176.473	100	20.490.176.473	100	20.862.176.473	100	21.239.796.873	100	21.939.796.873	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KECAMATAN SERPONG UTARA
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah Pada Kecamatan Pondok Aren	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	33.629.306.262,8	100	33.751.359.857	100	34.126.359.857	100	34.626.359.857	100	35.481.359.857	7.01.0.00.0.00.36.0000 - KECAMATAN PONDOK AREN
Terpenuhinya pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah pada Kecamatan Setu	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	22.786.470.222	100	23.120.073.353	100	23.565.073.353	100	24.090.000.000	100	25.090.000.000	7.01.0.00.0.00.37.0000 - KECAMATAN SETU
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					82.212.988.901,8		83.162.597.177		83.547.379.613		84.635.790.935		84.943.246.262	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan sesuai pelimpahan wewenang pada Kecamatan Ciputat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Sesuai Pelimpahan Yang dilaksanakan (%)	100	100	100	12.188.226.101,8	100	12.355.996.156	100	12.507.002.413	100	12.608.967.735	100	12.741.423.062	7.01.0.00.0.00.31.0000 - KECAMATAN CIPUTAT
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan sesuai pelimpahan wewenang pada Kecamatan Ciputat Timur	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Sesuai Pelimpahan Yang dilaksanakan (%)	100	100	100	9.959.385.600	100	10.241.223.821	100	10.275.000.000	100	10.825.000.000	100	10.825.000.000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN CIPUTAT TIMUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan sesuai pelimpahan wewenang pada Kecamatan Pamulang	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Sesuai Pelimpahan Yang dilaksanakan (%)	100	100	100	16.980.000.000	100	16.980.000.000	100	16.980.000.000	100	17.152.196.000	100	17.152.196.000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KECAMATAN PAMULANG
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang pada Kecamatan Serpong	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Sesuai Pelimpahan Yang dilaksanakan (%)	100	100	100	10.470.756.800	100	10.520.756.800	100	10.470.756.800	100	10.445.756.800	100	10.520.756.800	7.01.0.00.0.00.34.0000 - KECAMATAN SERPONG
Meningkatnya Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang pada Kecamatan Serpong Utara	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Sesuai Pelimpahan Yang dilaksanakan (%)	100	100	100	10.079.620.400	100	10.429.620.400	100	10.529.620.400	100	10.718.870.400	100	10.718.870.400	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KECAMATAN SERPONG UTARA
Meningkatnya Penyelengaraan Pemerintahan dan pelayanan sesuai pelimpahan wewenang pada Kecamatan Pondok Aren	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Sesuai Pelimpahan Yang dilaksanakan (%)	100	100	100	16.585.000.000	100	16.685.000.000	100	16.835.000.000	100	16.935.000.000	100	17.035.000.000	7.01.0.00.0.00.36.0000 - KECAMATAN PONDOK AREN
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan sesuai pelimpahan wewenang pada Kecamatan Setu	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Sesuai Pelimpahan Yang dilaksanakan (%)	100	100	100	5.950.000.000	100	5.950.000.000	100	5.950.000.000	100	5.950.000.000	100	5.950.000.000	7.01.0.00.0.00.37.0000 - KECAMATAN SETU
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					34.418.858.331		34.152.335.436		33.123.535.436		33.890.993.000		35.345.993.000	
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Ciputat	Presentase Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kecamatan (%)	100	100	100	5.470.000.000	100	5.520.000.000	100	4.920.000.000	100	5.440.000.000	100	5.870.000.000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - KECAMATAN CIPUTAT
Meningkatnya keterampilan dan wawasan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Ciputat Timur	Presentase Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kecamatan (%)	100	100	100	3.790.000.000	100	3.850.000.000	100	3.860.000.000	100	3.870.000.000	100	4.270.000.000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN CIPUTAT TIMUR
Meningkatnya Keterampilan dan wawasan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Pamulang	Presentase Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kecamatan (%)	100	100	100	5.653.269.000	100	5.287.335.436	100	5.348.535.436	100	5.760.993.000	100	6.260.993.000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KECAMATAN PAMULANG
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Serpong	Presentase Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kecamatan (%)	100	100	100	5.777.188.071	100	5.635.000.000	100	5.085.000.000	100	4.810.000.000	100	4.835.000.000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - KECAMATAN SERPONG
Meningkatnya keterampilan dan wawasan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Serpong Utara	Presentase Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kecamatan (%)	100	100	100	4.318.401.260	100	4.400.000.000	100	4.400.000.000	100	4.400.000.000	100	4.400.000.000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KECAMATAN SERPONG UTARA
Meningkatnya keterampilan dan wawasan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Pondok Aren	Presentase Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kecamatan (%)	100	100	100	6.180.000.000	100	6.180.000.000	100	6.180.000.000	100	6.230.000.000	100	6.280.000.000	7.01.0.00.0.00.36.0000 - KECAMATAN PONDOK AREN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Keterampilan dan wawasan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Setu	Presentase Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kecamatan (%)	100	100	100	3.230.000.000	100	3.280.000.000	100	3.330.000.000	100	3.380.000.000	100	3.430.000.000	7.01.0.00.0.00.37.0000 - KECAMATAN SETU
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.106.500.000		2.256.500.000		2.206.500.000		2.361.310.000		2.511.310.000	
Meningkatnya koordinasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan Ciputat	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan (%)	100	100	100	646.500.000	100	546.500.000	100	546.500.000	100	546.500.000	100	546.500.000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - KECAMATAN CIPUTAT
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Pada Kecamatan Ciputat Timur	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan (%)	100	100	100	310.000.000	100	410.000.000	100	410.000.000	100	410.000.000	100	410.000.000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN CIPUTAT TIMUR
Meningkatnya koordinasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan Pamulang	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan (%)	100	100	100	350.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	554.810.000	100	554.810.000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KECAMATAN PAMULANG
Meningkatnya Koordinasi pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Serpong	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan (%)	100	100	100	150.000.000	100	200.000.000	100	150.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - KECAMATAN SERPONG
Meningkatnya koordinasi pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan Serpong Utara	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan (%)	100	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KECAMATAN SERPONG UTARA
Meningkatnya koordinasi pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Pondok Aren	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan (%)	100	100	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	7.01.0.00.0.00.36.0000 - KECAMATAN PONDOK AREN
Meningkatnya koordinasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan Setu	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan (%)	100	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	7.01.0.00.0.00.37.0000 - KECAMATAN SETU
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3.090.000.000		3.175.000.000		3.190.000.000		3.465.000.000		3.910.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Ciputat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	630.000.000	100	640.000.000	100	730.000.000	100	780.000.000	100	980.000.000	7.01.0.00.0.00.31.0000 - KECAMATAN CIPUTAT
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Pada Kecamatan Ciputat Timur	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	510.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	100	530.000.000	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN CIPUTAT TIMUR
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Pamulang	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	250.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	7.01.0.00.0.00.33.0000 - KECAMATAN PAMULANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada Kecamatan Serpong	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	250.000.000	100	400.000.000	100	250.000.000	100	200.000.000	100	400.000.000	7.01.0.00.0.00.34.0000 - KECAMATAN SERPONG
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada Kecamatan Serpong Utara	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	7.01.0.00.0.00.35.0000 - KECAMATAN SERPONG UTARA
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Pada Kecamatan Pondok Aren	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	550.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	7.01.0.00.0.00.36.0000 - KECAMATAN PONDOK AREN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Setu	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	400.000.000	100	425.000.000	100	450.000.000	100	475.000.000	100	500.000.000	7.01.0.00.0.00.37.0000 - KECAMATAN SETU
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					27.070.956.961		27.312.487.071		28.312.487.071		141.312.487.071		29.312.487.071	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.320.613.862		13.317.214.325		13.409.765.661		14.117.326.332		14.341.335.529	
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	250.000.000	100	275.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	8.01.0.00.0.00.30.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Terpenuhinya pelayanan umum dan Kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan operasional Perangkat daerah (%)	100	100	100	3.483.266.240	100	3.448.327.552	100	3.508.681.526	100	4.183.325.620	100	4.373.626.583	8.01.0.00.0.00.30.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah (%)	100	100	100	9.587.347.622	100	9.593.886.773	100	9.601.084.135	100	9.609.000.712	100	9.617.708.946	8.01.0.00.0.00.30.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					3.119.508.032		3.275.483.433		3.439.257.605		3.611.220.485		3.791.781.509	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	3.119.508.032	100	3.275.483.433	100	3.439.257.605	100	3.611.220.485	100	3.791.781.509	8.01.0.00.0.00.30.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					4.564.705.910		4.603.967.570		4.795.464.847		116.361.155.221		4.899.059.623	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase masyarakat yang memahami etika dan budaya politik (%)	N/A	100	100	4.564.705.910	100	4.603.967.570	100	4.795.464.847	100	116.361.155.221	100	4.899.059.623	8.01.0.00.0.00.30.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					534.293.063		561.007.716		589.058.102		1.618.511.007		649.436.557	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	N/A	N/A	55	534.293.063	60	561.007.716	65	589.058.102	70	1.618.511.007	75	649.436.557	8.01.0.00.0.00.30.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					2.152.668.362		2.156.774.203		2.161.085.337		2.165.612.027		2.170.365.051	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat	Persentase fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah (%)	100	100	100	2.152.668.362	100	2.156.774.203	100	2.161.085.337	100	2.165.612.027	100	2.170.365.051	8.01.0.00.0.00.30.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika didaerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		8.01.0.00.0.00.30.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya yang dilaksanakan (%)	100	100	100		100		100		100		100		8.01.0.00.0.00.30.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					3.379.167.732		3.398.039.824		3.917.855.519		3.438.661.999		3.460.508.802	
Meningkatnya penanganan konflik sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	N/A	100	100	3.379.167.732	100	3.398.039.824	100	3.917.855.519	100	3.438.661.999	100	3.460.508.802	8.01.0.00.0.00.30.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					**5.137.386.580.876,54**		**5.258.835.149.586**		**5.604.066.601.864**		**5.973.404.778.659**		**6.371.630.420.729**	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengukuran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan disajikan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 meliputi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berlaku untuk Tahun 2025-2030, di mana kinerja pada tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah tahun berikutnya.

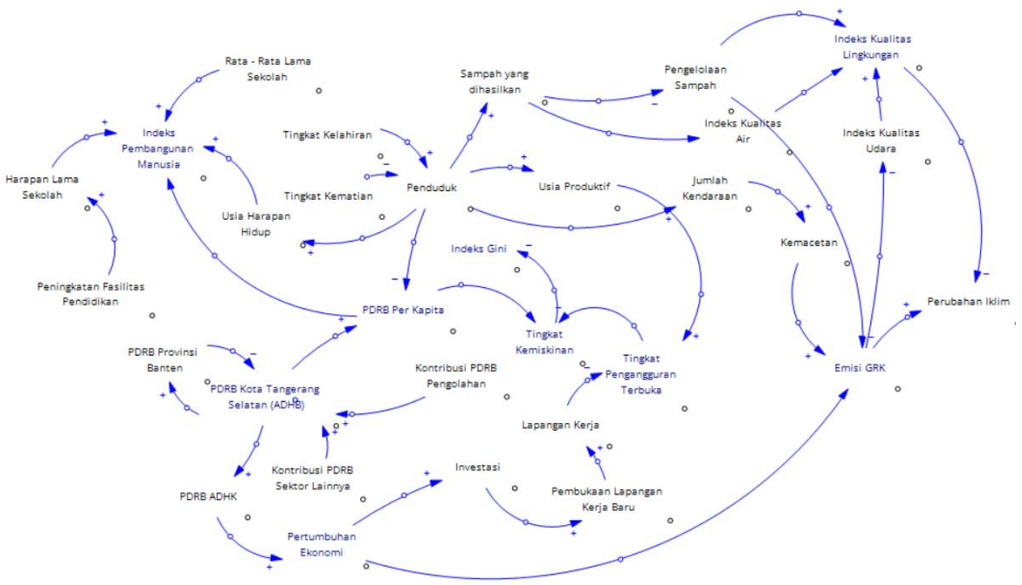
4.2.1. Indikator Makro

Indikator makro pembangunan adalah ukuran-ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini bersifat komprehensif dan strategis serta mencerminkan capaian pembangunan secara menyeluruh. Indikator makro dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 disajikan dalam **Tabel IV.2**.

Tabel IV.2. Daftar Indikator Makro RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029

No	INDIKATOR	SATUAN	KET
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	Ukuran Kinerja Pembangunan Ekonomi
2	PDRB ADHB per Kapita	Juta Rupiah	
3	Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap PDRB Provinsi Banten	%	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	
5	Rasio Gini	Indeks	
6	Tingkat Kemiskinan	%	Ukuran Kinerja Pembangunan Sosial
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	Ukuran Kinerja Pembangunan Lingkungan
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	Indeks	

Keterkaitan antar indikator makro di atas disajikan dengan metode Sistem Dinamik sebagaimana digambarkan dalam **Gambar IV.1**.



Gambar IV.1. Diagram sebab akibat *(causal loop diagram)* kinerja pembangunan Kota Tangerang Selatan

4.2.1.1. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang positif menandakan bahwa aktivitas perekonomian yang ada di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan. Munculnya aktivitas perekonomian pada suatu sektor bisa berdampak pada sektor lain sehingga menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*). Dari sisi pengeluaran, peningkatan aktivitas perekonomian di Kota Tangerang Selatan ditopang dari sisi konsumsi Rumah Tangga dan investasi. Selama lima tahun terakhir (2020–2024) konsumsi Rumah Tangga menyumbang rata-rata sebesar 70,63 persen terhadap PDRB Kota Tangerang. Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menjadi cerminan investasi berkontribusi rata–rata sebesar 46,13 persen terhadap PDRB pengeluaran. Pertumbuhan positif dari sisi investasi selama lima tahun terakhir juga menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian di Kota Tangerang Selatan masih menjadi lokasi yang potensial untuk menjalankan aktivitas perekonomian.

Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan disajikan dalam **Tabel IV.3**, dengan asumsi kunci:

a. Memerhatikan tren historis pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2024;

b. Memerhatikan arahan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Banten;

c. Produktivitas tenaga kerja tumbuh minimal 1,5 persen per tahun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 15.000 orang/tahun;

d. Akselerasi investasi terutama pada sektor digital/*Information and Communication Technology* (ICT) untuk mendorong pertumbuhan sektor ini minimal 6-8 persen per tahun, melalui pemberian insentif bagi sektor ICT (contoh: pengembangan software/AI, *Data center/cloud computing*, Startup digital skalabilitas nasional) dengan kriteria jumlah penyerapan tenaga kerja, nilai investasi dan lama investasi di Kota Tangerang Selatan;

e. Konektivitas dengan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Strategis Provinsi Banten;

Tabel IV.3. Proyeksi PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030

PDRB ADHK (Trilliun Rupiah)							
Tahun	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	(Realisasi)						
Moderat	73,05	76,99	81,31	86,43	92,31	99,25	107,19
Optimis		77,66	81,96	87,62	94,10	102,12	111,18
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)							
Moderat	5,02	5,40	5,60	6,30	6,80	7,52	8,00
Optimis		6,31	6,45	6,90	7,40	8,52	8,88

Skenario moderat dianalisis dengan menyeimbangkan tren historis dan target yang direkomedasikan oleh Provinsi Banten, dengan sektor penopang pada dominasi sektor jasa, sedangkan skenario optimis dianalisis dengan asumsi dukungan kebijakan ekstra berupa investasi pada sektor teknologi, adaptasi cepat teknologi dan peningkatan konektivitas dengan Jabodetabekjur. Sektor penopang pada skenario optimis adalah sektor jasa tetap dominan ditambah sektor teknologi tumbuh eksponensial.

Sebagaimana disampaikan diatas bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi merupakan komponen dominan dalam mendorong peningkatan produktivitas ekonomi daerah. Untuk mendukung pencapaian proyeksi target LPE pada **Tabel IV.3**, maka konsumsi Rumah Tangga perlu didorong pertumbuhannya sebesar 5-7 persen per tahun. Selain itu, investasi juga perlu didorong pertumbuhannya rata-rata sebesar 9-10 persen.

Kebijakan yang perlu dilakukan untuk mencapai target LPE sesuai skenario, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur ekonomi, baik transportasi, energi, maupun logistik;
2. Mempercepat konektivitas dengan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur, antara lain: percepatan pembangunan MRT/LRT perpanjangan Lebak Bulus dan perluasan penyediaan *feeder* terkoneksi dengan Trans-Jakarta;
3. Mendorong percepatan adaptasi teknologi dan ekonomi hijau pada sektor ekonomi strategis dengan pemberian insentif, contoh: pemberian insentif pajak untuk industri daur ulang, subsidi bunga KUR untuk UMKM dan sektor ekonomi kreatif yang berbasis teknologi;
4. Mendorong pertumbuhan *Internet of Thing* (IoT) dengan perluasan infrastruktur digital dan peningkatan jaringan broadband berkecepatan tinggi, contoh: perluasan internet 5G;
5. Penguatan daya saing SDM teknologi melalui program re-skilling dan up skilling tenaga kerja di bidang AI, logistik, coding, dan teknologi digital berkolaborasi dengan BUMD maupun sektor swasta;
6. Mitigasi risiko perekonomian berupa diversifikasi ekspor baik berupa diversifikasi produk maupun diversifikasi tujuan ekspor;
7. Meningkatkan daya beli masyarakat, antara lain dengan pemberian insentif pajak untuk produk UMKM makanan dan *fashion*, dan pemberian bantuan tunai bersyarat untuk keluarga berpendapatan rendah;

8. Meningkatkan akses kredit, dengan program KUR untuk sektor ritel dan jasa, serta edukasi keuangan digital untuk memperluas transaksi non-tunai;
9. Menstabilkan harga pangan dengan penyediaan cadangan pangan daerah dan pasar murah untuk mengendalikan inflasi;
10. Gerakan "Belanja di Tangsel" dengan pemberian insentif atau *cashback* belanja guna memperkuat ekonomi lokal;
11. Pemberian insentif fiskal untuk investasi di sektor digital dan hijau;
12. Meningkatkan kemudahan berusaha, melalui penyederhanaan perizinan via *online single submission* (OSS) dengan target lama perizinan kurang dari 3 hari dan pelayanan 24 jam untuk investasi asing;
13. Meningkatkan koordinasi dengan BKPM dan berkolaborasi dengan diaspora warga Kota Tangerang Selatan untuk promosi investasi ke pasar global.
14. Mendorong inklusivitas pertumbuhan antar-wilayah, dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar kawasan Serpong–BSD, sehingga manfaat pertumbuhan lebih merata.
15. Mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata kota, melalui *event* berbasis seni, budaya, kuliner, dan ekosistem startup kreatif sebagai motor tambahan pertumbuhan.
16. Memperkuat agenda hijau dan energi terbarukan, misalnya melalui pengembangan transportasi rendah emisi, energi bersih, dan sirkular ekonomi di tingkat kota
17. Meningkatkan tata kelola smart city berbasis data, dengan pemanfaatan big data dan AI untuk perencanaan ekonomi, prediksi pasar, serta pelayanan publik yang lebih pro-bisnis.

4.2.1.2. Proyeksi PDRB ADHB Per Kapita

Perhitungan PDRB Per Kapita dihitung dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Hal ini karena PDRB ADHB menjadi cerminan kondisi ekonomi aktual (harga saat ini) yang relevan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau daya beli aktual masyarakat. Selain itu penggunaan PDRB ADHB juga menunjukkan pendapatan per kapita dalam suatu wilayah pada nilai uang yang berlaku saat itu. Analisa proyeksi PDRB ADHB dan Pendapatan Per Kapita menggunakan dua kondisi, yaitu moderat dan optimis. Adapun skenario optimis dalam analisis ini adalah skenario yang sama dengan analisis laju pertumbuhan ekonomi. Data hasil simulasi proyeksi PDRB ADHB per Kapita disajikan dalam **Tabel IV.4**. Proyeksi PDRB ADHB per kapita tersebut sudah menginternalisasikan asumsi inflasi 2,5 persen. Kebijakan peningkatan produktivitas yang diperlukan untuk mencapai proyeksi target PDRB ADHB per Kapita tersebut antara lain melalui program "Smart Manufacturing" dengan pemberian insentif bagi UMKM yang mengadopsi IoT dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi.

Tabel IV.4. Proyeksi PDRB ADHB dan PDRB ADHB per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030

PDRB ADHB (Triliun Rupiah)							
Tahun	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Moderat	112,21	120,62	128,69	138,00	152,45	155,67	163,20
Optimis		123,12	134,87	145,04	155,27	162,86	170,30

Proyeksi Penduduk (jiwa)		1.402.180	1.405.060	1.408.170	1.411.540	1.415.180	1.419.140
PDRB ADHB Per Kapita (Juta Rupiah)							
Moderat	80,18	86,02	91,59	98,00	108,00	110,00	115,00
Optimis		87,81	95,99	103,00	110,00	115,08	120,00

4.2.1.3. Proyeksi Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap Provinsi Banten

Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap Provinsi Banten menunjukkan bagaimana peranan Kota Tangerang Selatan dalam struktur ekonomi wilayah di Provinsi Banten. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk perencanaan di level Provinsi Banten agar selaras dengan tujuan Pembangunan Provinsi Banten. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi Provinsi Banten untuk melakukan alokasi sumber daya, investasi atau pemberian bantuan keuangan kepada Kota Tangerang Selatan. Secara umum Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu wilayah yang berkembang di Provinsi Banten karena posisinya yang strategis dan berbatasan dengan Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Perekonomian di Kota Tangerang Selatan relatif sudah mapan yang ditopang dari perdagangan dan jasa. Pada perekonomian yang sudah mapan seperti Kota Tangerang Selatan, umumnya laju pertumbuhan cenderung melambat karena kapasitas ruang sudah berkurang untuk ekspansi perekonomian. Ekspansi perekonomian biasanya bergerak ke area yang masih luas seperti kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Kondisi ini menyebabkan adanya pergeseran aktivitas ekonomi ke wilayah lain sehingga bisa menyebabkan kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap Provinsi Banten mengalami penurunan. Proyeksi kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap PRDB Provinsi Banten yang menperhatikan rekomendasi Provinsi Banten sebesar 13,01-12,30 persen selama tahun 2025-2029, disajikan dalam **Tabel IV.5**.

Tabel IV.5. Proyeksi Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap PRDB Provinsi Banten Tahun 2025– 2030

Uraian	Tahun 2024 (realisasi)	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap PRDB Provinsi Banten (%)	12,84	13,01-13,08	13,1-13,15	13,05	12,95	12,3	12,2

4.2.1.4. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil dari pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah. IPM dibangun dari tiga indeks yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Indeks pendidikan dihitung berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan indeks kesehatan dihitung berdasarkan Usia Harapan Hidup (UHH) dan indeks pengeluaran dihitung berdasarkan PDRB per kapita. Selain itu, proyeksi IPM juga memerhatikan data historis selama tahun 2020-

2024 dan target dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045. Proyeksi IPM disajikan dalam **Tabel IV.6**.

Tabel IV.6. Proyeksi IPM dan Indeks Penyusunnya Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	84,42-84,68	84,54-84,82	85,2	85,8	86,18	86,5
Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	12,04	12,19	12,34	12,49	12,64	12,79
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,12	15,35	15,58	15,81	16,04	16,27
Usia Harapan Hidup (Tahun)	76,21	76,65	77,12	77,62	78,15	78,72
PDRB per Kapita (Juta Rp)	86,50	93,40	100,99	109,19	118,20	128,04

Beberapa program unggulan seperti optimalisasi program paket C, bantuan operasional sekolah, bantuan pendidikan serta beasiswa dialokasikan untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah yang akan berimplikasi terhadap peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah maupun Harapan Lama Sekolah. Selain intervensi pada aspek pendidikan, intervensi pada aspek kesehatan melalui program peningkatan *Universal Health Coverage* (UHC), penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemeriksaan kesehatan gratis dan pelayanan kesehatan inklusif untuk sasaran lansia diharapkan dapat meningkatkan Usia Harapan Hidup.

4.2.1.5. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

Peningkatan jumlah penduduk khususnya peningkatan penduduk usia produktif di Kota Tangerang Selatan dalam periode lima tahun ke depan (2025–2030) akan sangat berpengaruh kepada tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu mempersiapkan kebijakan yang dapat memastikan adanya penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja bagi penduduk berusia produktif di Kota Tangerang Selatan. Dengan menggunakan pendekatan sistem dinamik sederhana berbasis hubungan antara TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang akan memengaruhi penyerapan tenaga kerja (*demand side*), proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025-2030 disajikan dalam **Tabel IV.7**. Adapun asumsi dalam analisa proyeksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan angkatan kerja mengikuti tren peningkatan TPAK;
b. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh LPE, di mana semakin tinggi LPE, semakin banyak lapangan kerja baru tercipta;
c. *Elasticity Employment* terhadap LPE pada skenario moderat rata-rata sebesar 0,25–0,30 (artinya 1 persen LPE = 0,25-0,30 persen penyerapan tenaga kerja tambahan) dan skenario optimis rata-rata sebesar 0,35–0,40;
d. Rekomendasi target dari Provinsi Banten yaitu 5,09-5,65 persen (tahun 2025) dan 4,52-4,73 persen (tahun 2029).

Tabel IV.7. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Skenario Moderat	5,65	5,42	5,20	4,90	4,73	4,50
Skenario Optimis	4,76	4,60	4,50	4,40	4,40	4,30

Adapun intervensi kebijakan yang diperlukan untuk dapat mencapai proyeksi target TPT tersebut antara lain:

a. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui program *up skilling* dan *re-skilling* mahir coding dan AI berkolaborasi dengan startup atau perusahaan swasta, dan lembaga pendidikan tinggi;
b. Pemberian insentif fiskal seperti insentif pajak atau kemudahan perizinan bagi perusahaan yang merekrut lebih dari 50% tenaga kerja lokal, serta insentif tambahan untuk perusahaan yang mempekerjakan kelompok rentan;
c. Pemetaan pasar kerja berbasis digital melalui *Job Matching* Tangsel yang inklusif, terintegrasi dan mudah diakses, serta dilengkapi *real-time* monitoring berbasis big data untuk memprediksi tren kebutuhan tenaga kerja;
d. Penanganan pengangguran terselubung melalui program *freelance hub* dan *platform* pekerjaan fleksibel yang dapat diakses oleh pelajar, ibu rumah tangga, dan kelompok rentan lainnya;
e. Pemberian jaring pengaman sosial adaptif seperti pemberian bantuan uang sementara untuk pengangguran yang sedang mengikuti pelatihan.
f. Penguatan *link and match* pendidikan–industri agar kurikulum sekolah selaras dengan kebutuhan dunia kerja, sekaligus memperkuat program magang dan sertifikasi kompetensi.
g. Inkubasi dan dukungan wirausaha muda dengan memberikan fasilitas pelatihan, akses permodalan, mentoring bisnis, dan perluasan akses pasar agar generasi muda tidak hanya menjadi pencari kerja tetapi juga pencipta lapangan kerja.
h. Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah seperti ekonomi kreatif, *green jobs*, serta sektor jasa modern yang menjadi kekuatan Tangerang Selatan, sekaligus memperkuat kerja sama multipihak dengan BUMD, CSR, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal.

4.2.1.6. Proyeksi Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang mencerminkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin tinggi nilai Rasio Gini, semakin timpang distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Dalam konteks Kota Tangerang Selatan, nilai Rasio Gini sempat mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024, dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2024 sebesar 0,395, menunjukkan perlunya perhatian lebih serius terhadap isu ketimpangan sosial-ekonomi.

Mengacu pada target RPJPD Kota Tangerang Selatan, Rasio Gini diharapkan menurun menuju rentang 0,336–0,353 pada tahun 2025, dan terus menurun hingga 0,280–0,300 pada tahun 2045. Rekomendasi dari Provinsi Banten juga mengarahkan Rasio Gini menuju 0,353–0,380 pada 2025 dan 0,330–0,344 pada 2029. Melalui pendekatan sistem dinamik yang mempertimbangkan interaksi antar variabel makroekonomi seperti laju

pertumbuhan ekonomi (LPE), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan PDRB per kapita, proyeksi Rasio Gini Kota Tangerang Selatan tahun 2025–2030 disajikan dalam **Tabel IV.8**.

Tabel IV.8. Proyeksi Rasio Gini Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rasio Gini	0,353-0,380	0,345-0,353	0,340-0,350	0,33-0,350	0,320-0,33	0,31-0,33

Nilai proyeksi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dapat ditekan secara bertahap apabila didukung oleh kebijakan ekonomi yang inklusif, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan produktivitas masyarakat, khususnya di sektor informal dan usaha kecil. Untuk memastikan target penurunan Rasio Gini tercapai, kebijakan strategis yang perlu diimplementasikan, yaitu:

a. Memperkuat inklusivitas pertumbuhan ekonomi, dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor padat karya seperti UMKM, ekonomi kreatif dan jasa produktif;
b. Memperluas kesempatan kerja dengan meningkatkan efektivitas pelatihan vokasi berbasis permintaan pasar kerja dan meberikan insentif bagi sektor swasta yang merekrut pekerja dari kelompok rentan (perempuan dan penyandang disabilitas);
c. Memperkuat jaring pengaman sosial produktif, melalui bantuan sosial produktif (program bantuan modal usaha mikro, subsidi pelatihan atau inkubasi bisnis) dan memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk sektor informal;
d. Penajaman alokasi anggaran untuk program-program pengurangan ketimpangan. Memastikan program pembangunan dan belanja daerah lebih pro-poor dan pro-equity, sehingga manfaat pembangunan dirasakan kelompok berpendapatan rendah.
e. Pemerataan akses pendidikan dan keterampilan. Memberikan layanan pendidikan berkualitas, terutama pendidikan vokasi dan keterampilan digital, untuk meningkatkan mobilitas sosial kelompok miskin dan rentan.
f. Penguatan akses kesehatan dan gizi. Menjamin layanan kesehatan dasar dan pemenuhan gizi anak dari keluarga miskin untuk memutus rantai ketimpangan antar generasi.
g. Peningkatan akses perumahan dan layanan dasar. Memperluas program hunian layak, penyediaan sanitasi, dan air bersih, sekaligus melakukan penataan permukiman kumuh yang berhubungan langsung dengan dimensi ketimpangan.
h. Kolaborasi multipihak dan pemerataan infrastruktur wilayah. Mendorong dunia usaha, BUMD, CSR, lembaga keagamaan, serta perguruan tinggi untuk terlibat dalam pengurangan ketimpangan, sekaligus memperkuat pembangunan infrastruktur di wilayah terpinggirkan agar akses ekonomi lebih merata.

4.2.1.7. Proyeksi Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan selama lima tahun terakhir cenderung stagnan pada kisaran 2,3–2,5 persen, bahkan sempat mengalami peningkatan di tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan perlunya

pendekatan baru yang lebih menyasar akar permasalahan kemiskinan, termasuk akses pekerjaan produktif, pemerataan ekonomi, dan intervensi sosial yang tepat sasaran.

Melalui pendekatan sistem dinamik yang mempertimbangkan rasio gini dan tingkat pengangguran terbuka, serta mengacu pada target RPJPD dan rekomendasi Provinsi Banten, proyeksi tingkat kemiskinan tahun 2025–2030 disajikan dalam **Tabel IV.9**. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan dapat ditekan secara bertahap dari rentang 1,91–2,25 persen pada tahun 2025 menjadi 1,66–2,09 persen pada tahun 2029. Rentang ini menggambarkan dua skenario utama, yaitu:

a. Skenario Moderat: jika reformasi sosial-ekonomi berjalan dalam kecepatan normal, dengan efektivitas program kemiskinan saat ini ditingkatkan secara bertahap.
b. Skenario Optimis: jika terdapat intervensi signifikan dalam penciptaan lapangan kerja inklusif, perlindungan sosial produktif, dan pengurangan ketimpangan pendapatan.

Untuk memastikan target penurunan tingkat kemiskinan tercapai, kebijakan strategis yang perlu diimplementasikan, yaitu:

a. Penguatan program perlindungan sosial yang produktif, melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai produktif, pelatihan keterampilan dan kemudahan akses modal mikro untuk kelompok miskin serta integrasi data terpadu kesejahteraan sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran;
b. Pengembangan sektor UMKM dan wirausaha produktif sebagai sumber pendapatan baru bagi kelompok miskin, termasuk akses ke pasar, teknologi, dan permodalan;
c. Insentif bagi pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok miskin dan rentan, termasuk dukungan fiskal dan regulasi;
d. Pengembangan program penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah (kelurahan prioritas) dengan pendekatan komunitas;
e. Perluasan akses kerja formal dan *link and match* dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, termasuk pelibatan perempuan, pemuda miskin dan penyandang disabilitas dalam program pelatihan keterampilan, inkubasi wirausaha, dan penempatan kerja;
f. Peningkatan integrasi layanan dasar bagi kelompok miskin, seperti integrasi bantuan pendidikan bagi siswa miskin dengan layanan kesehatan dasar berkualitas; dan
g. Perluasan cakupan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja informal, termasuk skema perlindungan risiko kerja dan jaminan hari tua;
h. Penguatan tata kelola dan data kemiskinan, melalui monitoring *real-time* dan pemanfaatan big data untuk penentuan sasaran bantuan;
i. Gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan dan literasi keuangan, untuk mendorong kemandirian dan pengelolaan ekonomi keluarga miskin;
j. Peningkatan akses perumahan layak dan lingkungan sehat, termasuk penyediaan rumah layak huni, sanitasi, air bersih, dan penataan permukiman kumuh.
k. Kolaborasi multipihak, dengan dunia usaha, BUMD, program CSR, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dan komunitas lokal dalam pengentasan kemiskinan.

Tabel IV.9. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tingkat Kemiskinan	1,91-2,25	1,84-2,1	1,80-2,00	1,70-1,90	1,66-1,90	1,60-1,88

4.2.1.8. Proyeksi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah

Pada aspek lingkungan, evaluasi terhadap capaian pembangunan berkelanjutan salah satunya juga dapat menggunakan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH memberikan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi lingkungan hidup di suatu daerah pada periode tertentu. Indeks kualitas lingkungan hidup dihitung disusun berdasarkan nilai komposit dari tiga indeks utama yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Tangerang Selatan. Sebagai wilayah dengan karakteristik perkotaan, permasalahan kualitas udara merupakan salah satu permasalahan yang krusial apalagi jika tidak ada upaya untuk penanganan sumber pencemar tersebut. Permasalahan kualitas tutupan lahan dan air juga merupakan hal yang perlu diperhatikan karena wilayah kota yang terbatas sehingga upaya untuk menata ruang terbuka hijau dan perlindungan sumber daya air menjadi penting.

Proyeksi IKLH Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2029 mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan dalam **Tabel IV.10**.

Tabel IV.10. Proyeksi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	48.23	48,52	48,82	49,11	49,40	49,69
Indeks Kualitas Udara (IKU)	34,93	35,43	35,93	36,43	36,93	37,43
Indeks Kualitas Air (IKA)	71,00	71,20	71,40	71,60	71,80	72,00
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	33,73	33,80	33,87	33,94	34,01	34,08

Untuk dapat mencapai target IKLH beserta komponennya, maka kebijakan yang perlu diimplementasikan, yaitu:

a. Perluasan penggunaan transportasi publik ramah lingkungan;
b. Pengetatan emisi kendaraan;
c. Gerakan penanaman pohon dan penguatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
d. Rehabilitasi dan perlindungan badan air;
e. Perluasan sistem IPAL komunal dan domestik;
f. Pengawasan limbah dari kegiatan usaha dan limbah domestik;
g. Penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam menjaga kawasan lindung;
h. Pemberian insentif bagi kawasan komersil dan permukiman yang melakukan penghijauan dan perluasan RTH.
i. Pengelolaan sampah terpadu, termasuk pengurangan plastik sekali pakai, pemilahan sejak sumber, serta pengembangan ekonomi sirkular;

j. Peningkatan efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan pada fasilitas publik, kawasan komersial, dan permukiman;

k. Peningkatan kualitas pemantauan lingkungan berbasis digital, termasuk sistem monitoring kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan secara real time;

l. Edukasi dan partisipasi masyarakat melalui program kampanye lingkungan berkelanjutan, sekolah hijau, dan komunitas peduli lingkungan;

m. Penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor agar kebijakan pengelolaan lingkungan berjalan secara integratif dan berkelanjutan.

4.2.1.9. Proyeksi Penurunan Intensitas Gas Rumah Kaca

Konsep pembangunan berkelanjutan sudah menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan termasuk di Kota Tangerang Selatan, karena saat ini tekanan terhadap ekosistem semakin berat sementara pertumbuhan penduduk dan aktivitas perekonomian terus meningkat yang bisa berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam konteks lingkungan adalah perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak pada wilayah perkotaan diantaranya dengan peningkatan suhu yang semakin panas dan adanya fenomena cuaca seperti *el nino* maupun *la nina* yang pada akhirnya bisa berdampak terhadap bencana kekeringan atau banjir di wilayah perkotaan. Penyebab utama dari perubahan iklim khususnya adalah peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (CO_2, CH_4, dan N_2O) di atmosfer yang akhirnya menangkap pantulan cahaya matahari yang seharusnya dikeluarkan.

Pemerintah Indonesia telah menyusun dokumen *Nationally Determined Contribution* (*NDC*) yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Dokumen *NDC* bertujuan untuk memberikan arah implementasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Terdapat lima sektor prioritas yang menjadi fokus penurunan emisi GRK di Kota Tangerang Selatan yaitu peternakan, pertanian, persampahan, transportasi, dan limbah.

Tabel IV.11. Proyeksi Penurunan Intensitas Emisi GRK Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030

Kabupaten/Kota	Target Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)					
	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Kab Pandeglang	16,43	17,04	17,55	17,97	18,34	18,65
Kab Lebak	16,84	17,40	17,97	18,37	18,81	19,10
Kab Tangerang	18,21	18,65	19,03	19,36	19,62	19,86
Kab Serang	16,63	17,03	17,38	17,68	17,92	18,15
Kota Tangerang	23,47	24,19	24,84	25,46	25,98	26,49
Kota Cilegon	22,77	23,55	24,25	24,91	25,47	26,00
Kota Serang	18,45	19,04	19,58	20,06	20,47	20,86
Kota Tangerang Selatan	18,45	19,02	19,54	20,03	20,44	20,85
Banten	19,40	19,91	20,49	20,89	21,35	21,66

(Sumber: Provinsi Banten, 2025)

Target penurunan emisi GRK di Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari target penurunan emisi GRK Provinsi Banten, sebagaimana disajikan dalam **Tabel IV.11**. Analisis target penurunan emisi GRK di Kota Tangerang Selatan merupakan imperatif dari target penurunan emisi GRK

Provinsi Banten. Target penurunan intensitas emisi GRK Kota Tangerang Selatan periode 2025–2030 berada pada kisaran 18,45% hingga 20,85%. Angka ini hampir sama dengan Kota Serang, namun relatif lebih rendah dibanding Kota Tangerang dan Kota Cilegon yang memiliki basis industri besar.

Adapun kebijakan yang perlu diimplementasikan agar target penurunan emisi GRK dapat tercapai yaitu:

a. Mengoptimalisasi sistem daur ulang, melalui perluasan fasilitas daur ulang di tingkat rumah tangga dan kawasan komersial;
b. Melakukan percepatan kesiapan infrastruktur PLTSA, termasuk uji coba operasional sebelum tahun 2028 agar dapat langsung memberi dampak saat resmi beroperasi;
c. Mendorong integrasi pengolahan air limbah domestik dengan program pengurangan GRK berbasis kawasan;
d. Memperkuat peran swasta dan masyarakat dalam rantai daur ulang dan pemanfaatan energi dari limbah;
e. Mengeembangkan sistem pemantauan emisi berbasis data spasial dan *digital dashboard*;
f. Melakukan kampanye berkelanjutan tentang pengurangan sampah, pemilahan sejak sumber, dan pengurangan emisi rumah tangga.

4.2.1.10.Target Indikator Makro Tahun 2025-2030

Berdasarkan proyeksi 9 (sembilan) indikator makro dalam **Tabel IV.3** s/d **Tabel IV.11**, maka target indikator makro Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2030 disajikan dalam **Tabel IV.12** berikut ini. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode berikutnya.

Tabel IV.12. Proyeksi Target Indikator Makro Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2030

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Wali data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	%	5,02	5,40-6,31	5,60-6,45	6,30-6,90	6,80-7,4	7,52-8,52	8,00-8,88	BPS
2	PDRB (ADHB) per Kapita	Juta Rupiah	80,18	86,03-87,82	91,59-95,99	98,00-103,00	108,00-110,00	110,00-115,08	115,00-120,00	BPS
3	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi Banten	%	12,84	13,01-13,08	13,1-13,15	13,05	12,95	12,30	12,20	BPS
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,16	84,42-84,68	84,54-84,82	85,20	85,80	86,18	86,50	BPS
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,09	4,76-5,65	4,6-5,42	4,50-5,20	4,40-4,90	4,40-4,73	4,30-4,50	BPS
6	Rasio Gini	Indeks	0,395	0,353-0,380	0,345-0,353	0,340-0,350	0,33-0,350	0,320-0,33	0,310-0,330	BPS
7	Tingkat Kemiskinan	%	2,36	1,91-2,25	1,84-2,1	1,80-2,00	1,70-1,90	1,66-1,90	1,60-1,88	BPS
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	61,03	48.23*)	48,52	48,82	49,11	49,40	49,69	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup
9	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	N/A	18,45	19,02	19,54	20,03	20,44	20,85	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup

Keterangan : *) perubahan perhitungan target berdasarkan SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No 129 tahun 2024

4.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dinilai melalui pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan indikator terseleksi. Pencapaian IKU RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 pada umumnya merupakan hasil dari *crosscutting* beberapa urusan atau program. IKU RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 tertuang dalam **Tabel IV.13**. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode berikutnya.

Tabel IV.13. Proyeksi Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2030

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Tujuan													
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,16	84,42-84,68	84,54-84,82	85,20	85,80	86,18	86,50	86,18		BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
2	Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	%	5,02	5,40-6,31	5,60-6,45	6,30-6,90	6,80-7,4	7,52-8,52	8,00-8,88	7,52-8,52		BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
3	PDRB (ADHB) Per Kapita	Juta Rp	80,18	86,03-87,82	91,59-95,99	98,00-103,00	108,00-110,00	110,00-115,08	115,00-120,00	110,00-115,08		BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
4	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi Banten	%	12,84	13,01-13,08	13,10-13,15	13,05	12,95	12,30	12,20	12,30		BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
5	Rasio Gini	Indeks	0,395	0,353-0,380	0,345-0,353	0,340-0,350	0,33-0,350	0,320-0,330	0,310-0,330	0,320-0,330		BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,09	4,76-5,65	4,6-5,42	4,50-5,20	4,40-4,90	4,40-4,73	4,30-4,50	4,40-4,73	Urusan Tenaga Kerja	BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,61	86,50	87,50	88,50	89,50	90,50	91,50	90,50	Sekretariat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	Indeks	61,03	48.23	48,52	48,82	49,11	49,40	49,69	49,40	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup	*) target berdasarkan SK Dirjen Pengendalian

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
													Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No 129 tahun 2024 Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
9	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	70,03	70,04	70,05	70,06	70,07	70,08	70,09	70,08		Dinas/ Badan Urusan Penelitian dan Pengembangan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
10	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	N/A	18,45	19,02	19,54	20,03	20,44	20,85	20,44	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup	Proxy Indikator RPJPD Tahun 2025-2045 Penurunan Emisi GRK
Sasaran													
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11,86	12,04	12,19	12,34	12,49	12,64	12,79	12,64	Urusan Pendidikan	BPS, Dinas/Badan Urusan Pendidikan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,70	15,12	15,35	15,58	15,81	16,04	16,27	16,04	Urusan Pendidikan	BPS, Dinas/Badan Urusan Pendidikan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
3	Kemampuan Literasi SD	Skor	67,17	69,67	72,17	74,67	77,17	79,67	82,17	79,67	Urusan Pendidikan	Dinas/Badan Urusan Pendidikan	Proxy Indikator RPJPD Tahun 2025-2045: Persentase peserta didik dan satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi
4	Kemampuan Literasi SMP	Skor	81,28	82,38	83,48	84,58	85,68	86,78	87,88	86,78	Urusan Pendidikan	Dinas/Badan Urusan Pendidikan	
5	Kemampuan Numerasi SD	Skor	57,30	60,20	63,10	66,00	68,90	71,80	74,70	71,80	Urusan Pendidikan	Dinas/Badan Urusan Pendidikan	
6	Kemampuan Numerasi SMP	Skor	69,61	71,11	72,61	74,11	75,61	77,11	78,61	77,11	Urusan Pendidikan	Dinas/Badan Urusan Pendidikan	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,8	76,21	76,65	77,12	77,62	78,15	78,72	78,15	Urusan Kesehatan	BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
8	Tingkat Kemiskinan	%	2,36	1,91-2,25	1,84-2,10	1,80-2,00	1,70-1,90	1,66-1,90	1,60-1,88	1,66-1,90	Urusan Sosial	BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
9	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	N/A	58,91	59,15	59,38	59,62	59,86	60,11	59,86	Urusan Sosial	Kementerian Sosial, Dinas/Badan Urusan Sosial	
10	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,65	65,7	65,97	66,6	67,22	67,85	68,48	67,85	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	BKKBN, Dinas/Badan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
11	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,176	0,174	0,172	0,17	0,16	0,15	0,14	0,15	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	BPS, Dinas/Badan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
12	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	73,00	73,05	73,10	73,15	73,20	73,25	73,30	73,25	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas/Badan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
13	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,86	55,96	56,00	56,30	56,50	56,80	57,00	56,80	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas/Badan Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
14	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	87,99	88,49	90,59	92,19	93,04	93,5	93,74	93,5	Urusan Perpustakaan	Perpustakaan Nasional	
15	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	69,53	69,6	69,7	69,8	69,85	69,9	69,95	69,9		BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
16	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,04	3,11	3,19	3,27	3,36	3,44	3,52	3,44	Urusan Pariwisata	BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
17	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	11,19	11,64	11,71	11,78	11,86	11,93	12,00	11,93	Urusan Pariwisata	BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
18	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	51,38	52,40	52,80	53,60	54,20	54,70	55,00	54,70		BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
19	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,99	2,15	2,68	3,00	3,32	3,65	3,97	3,65	Urusan Kopersai dan UMKM	BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
20	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Juta Rp	121,42	127,96-129,10	135,12-137,42	142,95-146,48	151,43-156,34	160,58-166,98	170,41-178,47	160,58-166,98	Urusan Tenaga Kerja	BPS, diolah	
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	58,13	60,5	61,46	61,97	62,47	62,98	63,48	62,98	Urusan Tenaga Kerja	BPS, Dinas/Badan Urusan Tenaga Kerj,	
22	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	%	43,34	44,00	44,80	45,60	46,20	46,80	47,50	46,80		BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
23	Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Triliun Rp	8,48	8,7	9,39	10,42	11,98	14,60	17,97	14,60	Urusan Penanaman Modal	Dinas/Badan Urusan Penanaman Modal	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
24	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,25	4,25	4,26	4,27	4,28	4,29	4,30	4,29	Sekretariat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
25	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	49,82	49,87	49,92	49,97	50,02	50,07	50,12	50,07	Urusan Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Digital	Proxy Indikator RPJPD Tahun 2025-2045: Indeks Literasi Digital
26	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	65,45	66,36	67,09	67,82	68,54	69,27	70,00	69,27	Urusan Arsip	ANRI	
27	Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	%	1,87	1,92	1,98	2,04	2,10	2,17	2,24	2,17	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
28	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan	
29	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	N/A	2,00	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30	2,25	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan	
30	Nilai SAKIP	Nilai	69,06	70	72	74	76	78	80	78	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
31	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,16	99,3	99,34	99,38	99,42	99,46	99,50	99,46	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
32	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79	80	81	82	83	84	86	84	Unsur Kepegawaian	Dinas/Badan Unsur Kepegawaian	
33	Indeks BerAkhlak	Indeks	79,75	80,5	81	81,5	82	82,5	83	82,5	Unsur Kepegawaian	Dinas/Badan Unsur Kepegawaian	
34	Indeks Sistem Merit	Indeks	326	330	334	338	342	346	350	346	Unsur Kepegawaian	Dinas/Badan Unsur Kepegawaian	
35	Jumlah kerja sama antar Pemerintah Daerah	angka	4	5	6	7	7	8	8	8	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Proxy Indikator RPJPD Tahun 2025-2045: Hubungan Kerja sama Antar Pemerintah Kota/ Sister City
36	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	76,25	77,00	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	79,50	Unsur Pengawasan	Dinas/Badan Unsur Pengawasan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
37	Persentase kebijakan berbasis bukti	%	N/A	50	51	52	53	54	55	54	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Dinas/Badan Unsur Penelitian dan Pengembangan	
38	Indeks Inovasi daerah	Angka	50,45	52,00	54,00	57,00	60,00	63,00	65,00	63,00	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri RI (BSKDN)	
39	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	Unsur Penelitian dan Pengembangan	BRIN	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
40	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)	%	3,13	2,96	1,35	1,31	1,28	1,24	1,21	1,24	Urusan Pangan	Dinas/Badan Urusan Pangan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
41	Indeks Risiko Bencana	Indeks	68,1	63,2	62,59	61,47	60,35	58,27	53,34	58,27	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
42	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64,00	71,00	71,20	71,40	71,60	71,80	72,00	71,80	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup	*) target berdasarkan SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No 129 tahun 2024
43	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	71,59	34,93	35,43	35,93	36,43	36,93	37,43	36,93	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup	
44	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	36,38	33,73	33,8	33,87	33,94	34,01	34,08	34,01	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup	
45	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	96,83	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	98,00	97,00	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
46	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	N/A	70	70	70	70	70	71	70	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
47	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,29	8,3	8,31	8,32	8,34	8,36	8,37	8,36	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas/Badan Unsur Penelitian dan Pengembangan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
48	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	21	21	22	23	25	30	34	30	Urusan Pekerjaan Umum dab Penataan Ruang	Dinas/Badan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
49	Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	%	99,73	99,74	99,77	99,87	99,97	100	100	100	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas/Badan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
50	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	N/A	16,00	18,70	21,40	24,10	29,50	32,20	29,50	Urusan Pekerjaan Umum dan	Dinas/Badan Urusan Pekerjaan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
											Penataan Ruang	Umum dan Penataan Ruang	
51	Indeks Harmoni	Indeks	7,29	7,40	7,45	7,50	7,55	7,60	7,65	7,60	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kementerian Dalam Negeri RI, Kesatuan Bangsa dan Politik	
52	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	52,60	53,10	54,10	55,20	56,30	57,50	58,60	57,50	Urusan Kebudayaan	Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek, Dinas/Badan Urusan Kebudayaan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
53	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	72,39 (2023)	77,5	78	78,5	79	79,5	80	79,5	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
54	Indeks Demokrasi	Indeks	86,04	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	88,50	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
55	Indeks Rasa Aman	Angka	66.97	73,7	74,21	74,91	75,62	76,32	77,03	76,32	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045

4.2.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan alat ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. IKD RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 terdiri atas indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang disajikan per aspek. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan diselaraskan dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) sasaran kepentingan Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045. IKD RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 disajikan dalam **Tabel IV.14**. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode berikutnya.

Tabel IV.14. Proyeksi Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2030

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**												
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	88,67	89,50	90,50	91,30	92,00	92,70	93,30	92,70	Urusan Pangan	Dinas/ Badan Urusan Pangan	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)	%	3,13	2,96	1,35	1,31	1,28	1,24	1,21	1,24	Urusan Pangan	Dinas/Badan Urusan Pangan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
3	Konsumsi listrik per Kapita	kWh/kapita	3.108,97	3.217	3.330	3.447	3.568	3.693	3.822	3.693		BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Konsumsi Air Minum Layak (BJP dan JP)	%	98,37	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas/Badan Urusan Pekerjaan Umum	
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	21	21	22	23	25	30	34	30	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas/Badan Urusan Pekerjaan Umum	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	Indeks	61,03	48.23	48,52	48,82	49,11	49,40	49,69	49,40	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup	*) target berdasarkan SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No 129 tahun 2024 Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	N/A	16,00	18,70	21,40	24,10	29,50	32,20	29,50	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas/Badan Urusan Pekerjaan Umum	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	96,83	97	97	97	97	97	98	97	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
9	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	N/A	70	70	70	70	70	71	70	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
10	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	N/A	18,45	19,02	19,54	20,03	20,44	20,85	20,44	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup	Proxy Indikator RPJPD Tahun 2025-2045 Penurunan Emisi GRK
11	Indeks Risiko Bencana	Indeks	68,1	63,2	62,59	61,47	60,35	58,27	53,34	58,27	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
12	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64	71	71,2	71,4	71,6	71,8	72	71,8	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup	*) target berdasarkan SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No 129 tahun 2024
13	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	71,59	34,93	35,43	35,93	36,43	36,93	37,43	36,93	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup	
14	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	36,38	33,73	33,8	33,87	33,94	34,01	34,08	34,01	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas/ Badan Urusan Lingkungan Hidup	
15	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,58	0,67	0,71	0,74	0,77	0,79	0,80	0,79	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
16	Kapasitas Air Baku	lt/detik	997,86 (2023)	1.568	1.853	2.138	2.423	2.708	2.993	2.708	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas/Badan Urusan Pekerjaan Umum	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**												
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,16	84,42-84,68	84,54-84,82	85,2	85,8	86,18	86,5	86,18		BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
2	Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	%	5,02	5,40-6,31	5,60-6,45	6,30-6,90	6,80-7,4	7,52-8,52	8,00-8,88	7,52-8,52		BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
3	PDRB (ADHB) Per Kapita	Juta Rp	80,18	86,03-87,82	91,59-95,99	98,00-103,00	108,00-110,00	110,00-115,08	115,00-120,00	110,00-115,08		BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
4	Rasio Gini	Indeks	0,395	0,353-0,380	0,345-0,353	0,340-0,350	0,33-0,350	0,320-0,33	0,310-0,330	0,320-0,33		BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,09	4,76-5,65	4,6-5,42	4,50-5,20	4,40-4,90	4,40-4,73	4,30-4,50	4,40-4,73	Urusan Tenaga Kerja	BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
6	Tingkat Kemiskinan	%	2,36	1,91-2,25	1,84-2,10	1,80-2,00	1,70-1,90	1,66-1,90	1,60-1,88	1,66-1,90	Urusan Sosial	BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
7	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	N/A	58,91	59,15	59,38	59,62	59,86	60,11	59,86	Urusan Sosial	Kementerian Sosial	
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,27	0,25	0,23	0,2	0,18	0,15	0,12	0,15	Urusan Sosial	BPS	
9	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,05	0,04	0,035	0,03	0,025	0,02	0,015	0,02	Urusan Sosial	BPS	
10	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,8	76,21	76,65	77,12	77,62	78,15	78,72	78,15	Urusan Kesehatan	BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
11	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	10,5	9	7,54	7,05	6,59	6,16	6,16	6,16	Urusan Kesehatan	Dinas/Badan Urusan Kesehatan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
12	Jumlah Kematian Ibu	Orang	8	14	14	13	12	11	10	11	Urusan Kesehatan	Dinas/Badan Urusan Kesehatan	Proxy Indikator RPJPD Tahun 2025-2045: Angka Kematian Ibu
13	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	%	90	95	95	95	95	95	95	95	Urusan Kesehatan	Dinas/Badan Urusan Kesehatan	Proxy Indikator RPJPD Tahun 2025-2045: Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis
14	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	%	90	90	90	90	90	95	95	95	Urusan Kesehatan	Dinas/Badan Urusan Kesehatan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
15	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,6	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Kesehatan	Dinas/Badan Urusan Kesehatan, BPJS Kesehatan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
16	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11,86	12,04	12,19	12,34	12,49	12,64	12,79	12,64	Urusan Pendidikan	BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
17	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,7	15,12	15,35	15,58	15,81	16,04	16,27	16,04	Urusan Pendidikan	BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
18	Kemampuan Literasi SD	Skor	67,17	69,67	72,17	74,67	77,17	79,67	82,17	79,67	Urusan Pendidikan	Dinas/Badan Urusan Pendidikan	Proxy Indikator RPJPD Tahun 2025-2045: Persentase peserta didik dan satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk
19	Kemampuan Literasi SMP	Skor	81,28	82,38	83,48	84,58	85,68	86,78	87,88	86,78	Urusan Pendidikan	Dinas/Badan Urusan Pendidikan	
20	Kemampuan Numerasi SD	Skor	57,3	60,2	63,1	66	68,9	71,8	74,7	71,8	Urusan Pendidikan	Dinas/Badan Urusan Pendidikan	
21	Kemampuan Numerasi SMP	Skor	69,61	71,11	72,61	74,11	75,61	77,11	78,61	77,11	Urusan Pendidikan	Dinas/Badan Urusan Pendidikan	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
													literasi membaca dan numerasi
22	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	87,99	88,49	90,59	92,19	93,04	93,5	93,74	93,5	Urusan Perpustakaan	Perpustakaan Nasional	
23	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	57,93	62,32	64,71	67,1	69,49	71,88	74,27	71,88	Urusan Perpustakaan	Perpustakaan Nasional	
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	45	45	49,03	53,06	55	57,9	59	57,9	Urusan Tenaga Kerja	Dinas/Badan Urusan Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
25	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	72,39 (2023)	77,5	78	78,5	79	79,5	80	79,5	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
26	Indeks Harmoni	Indeks	7,29	7,4	7,45	7,5	7,55	7,6	7,65	7,6	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kementerian Dalam Negeri RI, Kesatuan Bangsa dan Politik	
27	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	52,6	53,1	54,1	55,2	56,3	57,5	58,6	57,5	Urusan Kebudayaan	Dinas/Badan Urusan Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
28	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	73	73,05	73,1	73,15	73,2	73,25	73,3	73,25	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas/Badan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
29	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,65	65,7	65,97	66,6	67,22	67,85	68,48	67,85	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	BKKBN, Dinas/Badan Urusan Pengendalian Penduduk Dan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
												Keluarga Berencana	
30	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,176	0,174	0,172	0,17	0,16	0,15	0,14	0,15	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	BPS, Dinas/Badan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
31	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,47	94,53	94,64	94,73	94,86	94,94	95,03	94,94	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	BPS, Dinas/Badan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
32	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,86	55,96	56	56,3	56,5	56,8	57	56,8	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas/Badan Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**												
1	Angka Ketergantungan	Nilai	40,05	40,2	40,38	40,6	40,86	41,14	41,72	41,14		BPS, diolah	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,09	8,18	8,27	8,36	8,46	8,56	8,65	8,56		BPS, diolah	
3	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	69,53	69,60	69,70	69,80	69,85	69,90	69,95	69,90		BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
4	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,04	3,11	3,19	3,27	3,36	3,44	3,52	3,44	Urusan Pariwisata	BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	11,19	11,64	11,71	11,78	11,86	11,93	12	11,93	Urusan Pariwisata	BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
6	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	51,38	52,40	52,80	53,60	54,20	54,70	55	54,70		BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,99	2,15	2,68	3,00	3,32	3,65	3,97	3,65	Urusan Koperasi dan UMKM	BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
8	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Juta Rp	121,42	127,96-129,10	135,12-137,42	142,95-146,48	151,43-156,34	160,58-166,98	170,41-178,47	160,58-166,98	Urusan Tenaga Kerja	BPS, diolah	
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	58,13	60,5	61,46	61,97	62,47	62,98	63,48	62,98	Urusan Tenaga Kerja	BPS, Dinas/Badan Urusan Tenaga Kerja	
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	40,01	43,40-43,70	44,10-44,80	44,80-45,90	45,60-47,10	46,60-48,40	47,80-49,80	46,60-48,40	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	BPS, Dinas/Badan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, BPS	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	%	43,34	44	44,8	45,6	46,2	46,8	47,5	46,8		BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
12	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan (kumulatif)	orang	23	71	119	167	215	263	313	263	Urusan Tenaga Kerja	Dinas/Badan Urusan Tenaga Kerja	Proxy Indikator RPJPD Tahun 2025-2045: Persentase penyandang disabilitas bekerja
13	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kota	unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Urusan Tenaga Kerja	Dinas/Badan Urusan Tenaga Kerja	Proxy Indikator RPJPD Tahun 2025-2045: Persentase penyandang disabilitas bekerja

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
14	Indeks Inovasi daerah	Angka	50,45	52,00	54,00	57,00	60,00	63,00	65,00	63,00	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri RI (BSKDN)	
15	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	Unsur Penelitian dan Pengembangan	BRIN	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
16	Total Anggaran Belanja Litbang/Riset dan Inovasi	%	0,02 (2023)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Dinas/Badan Unsur Penelitian dan Pengembangan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
17	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	49,82	49,87	49,92	49,97	50,02	50,07	50,12	50,07	Urusan Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Digital	Proxy Indikator RPJPD Tahun 2025-2045: Indeks Literasi Digital
18	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	5,03	5,05	5,07	5,08	5,09	5,11	5,11	5,11	Sekretariat Daerah	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS)	
19	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,29	8,3	8,31	8,32	8,34	8,36	8,37	8,36		Dinas/Badan Unsur Penelitian dan Pengembangan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
20	Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	%	99,73	99,74	99,77	99,87	99,97	100	100	100	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas/Badan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
21	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	70,03	70,04	70,05	70,06	70,07	70,08	70,09	70,08		Dinas/ Badan Urusan Penelitian dan Pengembangan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
22	Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	%	1,87	1,92	1,98	2,04	2,1	2,17	2,24	2,17	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
23	Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Triliun Rp	8,48	8,7	9,39	10,42	11,98	14,6	17,97	14,6	Urusan Penanaman Modal	Dinas/Badan Urusan Penanaman Modal	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
24	Nilai ICOR	nilai	7,72	7,50	6,00	5,50	5,00	4,40	4,00	4,40		BPS, diolah	
25	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Menengah ke atas	%	64,43 (2023)	65,39	66,24	67,1	67,95	68,81	69,66	68,81	Urusan Pendidikan	BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
26	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja	%	76,31	76,96	77,43	77,9	78,37	78,84	79,31	78,84	Urusan Tenaga Kerja	BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
27	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	%	70,93	71,02	71,29	71,51	71,74	71,97	72,2	71,97	Urusan Tenaga Kerja	BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
28	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Hotel Berbintang)	ribu orang	399,06	420,1	441,14	462,18	483,22	504,26	525,3	504,26	Urusan Pariwisata	Dinas/Badan Urusan Pariwisata	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
29	Proporsi Jumlah Usaha Mikro pada Level Kota	%	10	11,9	12,23	12,56	12,89	13,22	13,56	13,22	Urusan Koperasi dan UMKM	Dinas/Badan Urusan Koperasi dan UMKM	Proxy Indikator RPJPD Tahun 2025-2045: Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kota
30	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	46 (2023)	47	48	50	52	52	53	52	Urusan Koperasi dan UMKM	Dinas/Badan Urusan Koperasi dan UMKM	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
31	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi Banten	%	12,84	13,01-13,08	13,1-13,15	13,05	12,95	12,3	12,2	12,30		BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
32	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap WM Jakarta /Jabodetabekjur	%	2,17 (2023)	2,17	2,20-2,26	2,22-2,28	2,26-2,38	2,31-2,50	2,36-2,62	2,31-2,50		BPS, diolah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**												
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,61	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	90,5	Sekretariat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,16	99,3	99,34	99,38	99,42	99,46	99,5	99,46	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,48	3,50	-	-	-	-	-	-	Urusan Komunikasi dan Informatika	Dinas/Badan Urusan Urusan Komunikasi dan Informatika	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
4	Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)	Indeks	N/A	-	2,00	2,00	2,10	2,10	2,15	2,10	Urusan Komunikasi dan Informatika	Dinas/Badan Urusan Urusan Komunikasi dan Informatika/ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pengganti Indeks SPBE
5	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Nilai	98,3	99	99	99	99	99	99	99	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan	
6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,25	4,25	4,26	4,27	4,28	4,29	4,30	4,29	Sekretariat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
7	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	76,25	77	78	78,5	79	79,5	80	79,5	Unsur Pengawasan	Dinas/Badan Unsur Pengawasan	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
8	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	
9	Capaian Aksi HAM	%	97,5	97,5	97,6	97,7	97,8	97,9	98	97,9	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
10	Indeks Demokrasi	Indeks	86,04	86,5	87	87,5	88	88,5	89	88,5	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
11	Indeks Rasa Aman	Angka	66.97	73,7	74,21	74,91	75,62	76,32	77,03	76,32	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
12	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,31	4,31	4,33	4,35	4,36	4,38	4,40	4,38		Badan Riset Nasional	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
13	Return on Asset (ROA) BUMD	%	1,94	2,00	2.11	1.87	4.27	4.55	5.04	4.55	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah, BUMD	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045
14	Jumlah kerja sama antar Pemerintah Daerah	angka	4	5	6	7	7	8	8	8	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Proxy Indikator RPJPD Tahun 2025-2045: Hubungan Kerja sama Antar Pemerintah Kota/ Sister City (Jumlah)
15	Indeks Institusi	Indeks	4,14 (2023)	4,28	4,3	4,32	4,34	4,36	4,38	4,36		Badan Riset Nasional	Indikator RPJPD Tahun 2025-2045

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)	Urusan Leading Sektor	Wali Data	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
16	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	79	80	81	82	83	84	86	84	Unsur Kepegawaian	Dinas/Badan Unsur Kepegawaian	
17	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan	
18	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	65,45	66,36	67,09	67,82	68,54	69,27	70	69,27	Urusan Arsip	ANRI	
19	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	N/A	2	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3	2,25	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan	
20	Nilai SAKIP	Nlai	69,06	70	72	74	76	78	80	78	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
21	Indeks BerAkhlak	Indeks	79,75	80,5	81	81,5	82	82,5	83	82,5	Unsur Kepegawaian	Dinas/Badan Unsur Kepegawaian	
22	Indeks Sistem Merit	Indeks	326	330	334	338	342	346	350	346	Unsur Kepegawaian	Dinas/Badan Unsur Kepegawaian	
23	Persentase kebijakan berbasis bukti	%	N/A	50	51	52	53	54	55	54	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Dinas/Badan Unsur Penelitian dan Pengembangan	
24	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,82	0,83	0,83	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85	Sekretariat Daerah	BAZNAS	

Keterangan: Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKPD dengan mempertimbangkan (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan semua *stakeholder* (Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat)

BAB V.
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2025-2030 yang disusun secara holistik dan integratif. RPJMD ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengarahkan pembangunan Kota Tangerang Selatan untuk lima tahun ke depan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan publik yang berkualitas. RPJMD ini memuat strategi, arah kebijakan, program, serta kerangka pendanaan indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Beberapa hal penting terkait RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Pembangunan Berkelanjutan: RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketahanan air, ketahanan pangan, serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;
2. Isu Strategis: RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 telah mengidentifikasi isu strategis daerah, baik dari aspek global, nasional, regional, maupun lokal, yang menjadi tantangan dan peluang dalam pembangunan;
3. Visi dan Misi: Visi " Tangerang Selatan Unggul, Inklusif, Inovatif, Kolaboratif Menuju Kota Lestari " dijabarkan melalui misi-misi yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi, serta tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Program Prioritas: Program-program prioritas disusun untuk menjawab tantangan pembangunan, seperti pengelolaan sumber daya air, penanganan permukiman kumuh, peningkatan infrastruktur, dan penguatan inovasi digital;
5. Keterlibatan *Stakeholders*: Penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian dengan kebutuhan daerah;
6. Keselarasan: RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Banten

Tahun 202-2029 dan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045. Selain itu, dokumen ini juga memerhatikan substansi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ-PID), Rancangan Akhir RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dan dokumen perencanaan lainnya.

RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga mampu menjawab tantangan serta peluang yang muncul dalam periode perencanaan. Keberhasilan implementasi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, serta peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Perwujudan Visi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dikawal melalui kaidah pelaksanaan yang efektif dan pendanaan pembangunan yang memadai sebagaimana disajikan dalam **Gambar V.1**. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma yang memastikan visi dan misi Daerah dapat diimplementasikan dan diukur keberhasilannya. Selain itu, komunikasi publik yang efektif penting untuk membangun kesamaan pemahaman, meningkatkan rasa kepemilikan dan memperluas partisipasi seluruh pemangku pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Upaya mewujudkan Visi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 juga memerlukan lingkungan pendanaan yang kondusif untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah.



Gambar V.1. Kerangka Pengawalan Visi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Untuk memastikan RPJMD Kota Tangerang Selatan 2025–2029 dilaksanakan secara efektif dan sistematis, maka diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

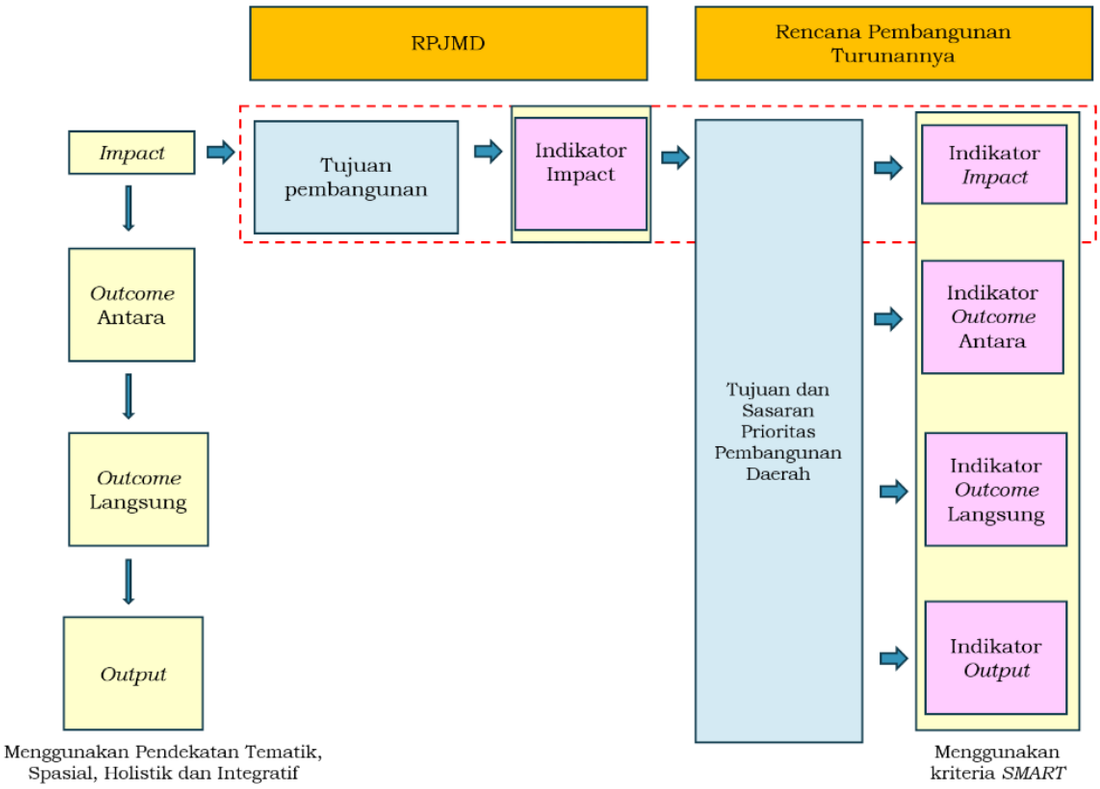
1. Koordinasi dan sinergi: Seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten dan pemangku kepentingan lainnya harus saling berkoordinasi secara terstruktur untuk menghindari tumpang tindih program dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya;
2. Pengarusutamaan pembangunan, meliputi: a) gender dan inklusi sosial; b) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs); c) transformasi digital; d) pembangunan rendah karbon; dan e) pembangunan berketahanan iklim, merupakan hal-hal yang harus dielaborasi dan mewarnai setiap program pembangunan daerah;
3. Penganggaran berbasis kinerja: Alokasi anggaran harus disesuaikan dengan outcome dan output yang telah ditetapkan untuk memastikan pencapaian target pembangunan;
4. Partisipasi masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas;
5. Penegakan Hukum dan Regulasi: Peraturan daerah dan kebijakan pendukung harus diterapkan secara konsisten untuk menciptakan kepastian hukum dalam pembangunan
6. Harmonisasi kebijakan: Harmonisasi kebijakan tidak hanya terkait antar dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah, namun juga dilakukan terhadap dokumen penganggaran untuk menjamin keterpaduan antara program yang ditetapkan didukung dengan efisiensi pendanaan;
7. Pemanfaatan Data dan Teknologi: Pelaksanaan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan termasuk data statistik pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

5.3. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dan dokumen perencanaan pembangunan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL/*Logical Framework*) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan daerah serta mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik dan Integratif, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tematik adalah penentuan tema prioritas pembangunan dalam suatu jangka waktu perencanaan, untuk menjawab tujuan pembangunan daerah;
2. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah;
3. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memerhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, transformasi digital, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), serta kebencanaan;
4. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (pemerintah pusat, daerah, dan pihak non pemerintah) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

KKL menggambarkan keterkaitan antara input-proses-output-outcome-impact. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 yang bersifat impact-outcome, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input melalui dokumen turunannya, yaitu rencana pembangunan Daerah tahunan (RKPD) dan rencana pembangunan Perangkat Daerah (Renstra PD dan Renja PD), sebagaimana disajikan dalam **Gambar V.2**.



Gambar V.2. Kerangka Kerja Logis RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan daerah, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant,* dan *Time-Bound* (SMART) sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 harus menjadi bagian dari Renstra PD Tahun 2025-2029.

5.4. Pendanaan Pembangunan

Pencapaian program-program pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 memerlukan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah (pusat dan daerah) maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran.

Peningkatan kapasitas pendanaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pendanaan, berupa perluasan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup: (i) Penguatan perencanaan pendanaan, meliputi penataan regulasi, pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, serta pengembangan inovasi mekanisme

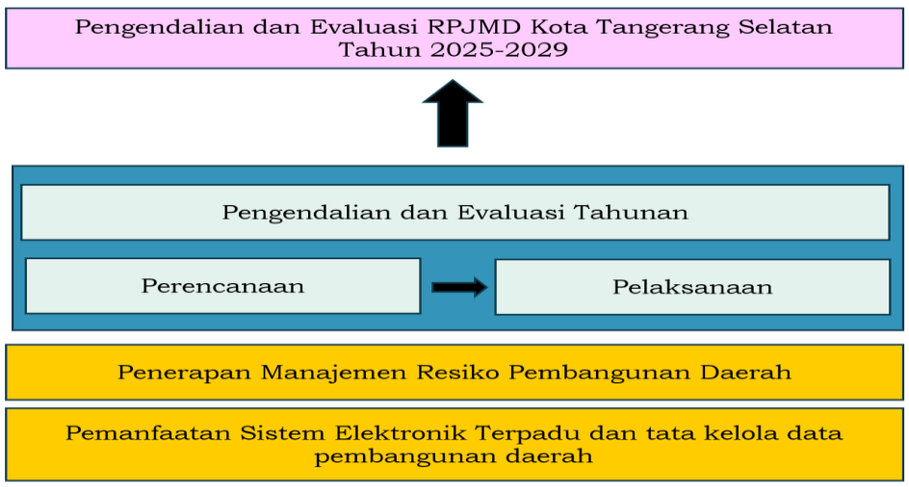
pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mengakses skema investasi yang berdampak (*impact investment*); (ii) Perluasan kerja sama antar daerah/pemangku kepentingan dan kerja sama keuangan lainnya, terutama untuk mengembangkan pendanaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan dan mendukung kerja sama ekonomi; (iii) Penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* pada sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) Penerapan skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan usaha lokal dan mendorong alih teknologi; (v) Optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan kawasan (*asset value capture*).

Peningkatan kapasitas pendanaan sektor non publik dapat dilakukan melalui inovasi pendanaan untuk merespons perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pendanaan hijau dan sirkular; serta penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja daerah yang berfokus pada kegiatan-kegiatan prioritas utama sesuai dengan tahapan pembangunan daerah. Selain itu juga dilakukan efisiensi belanja daerah yang berfokus pada belanja yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja program.

5.5. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dalam kerangka manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian dan evaluasi didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan daerah yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kerangka pengendalian dan evaluasi RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 disajikan dalam **Gambar V.3**.



Gambar V.3. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Pengendalian dan evaluasi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek/tahunan, yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Pengendalian dan evaluasi tahunan mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, dan dokumen RKPD ke dokumen rencana kerja Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko dan mitigasinya.

Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pengendalian dan evaluasi perencanaan.
   Pengendalian dan evaluasi pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian dan evaluasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
   Pengendalian dan evaluasi jangka menengah mencakup: (i) Penjabaran perencanaan dari RPJPD ke RPJMD, dan dari RPJMD ke Renstra PD; (ii) Kesiapan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; dan (iv) Identifikasi risiko dan langkah mitigasinya.

b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan.
   Pengendalian dan evaluasi pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan daerah sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan. Aktivitas ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah; (ii) pemantauan upaya mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pengendalian dan evaluasi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Perangkat Daerah terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah.

Kerangka kelembagaan pengendalian dan evaluasi yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian dan evaluasi yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal Perangkat Daerah. Selanjutnya, dalam rangka penjaminan terpadu atas pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang daerah, dapat dilakukan salah satunya melalui sinergi pengendalian dan pengawasan.

5.6. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, kelompok masyarakat dan pelaku lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja Perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator-indikator kinerja utama, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa penghargaan, dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5.7. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, target RPJMD dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemutakhiran target RPJMD dalam dokumen RKPD dilakukan berdasarkan evaluasi tahunan pelaksanaan rencana pembangunan.

RPJMD Kota Tangerang Selatan 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berorientasi pada inklusivitas, keberlanjutan, dan daya saing. Sebagai instrumen kebijakan strategis, RPJMD ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saing ekonomi Kota Tangerang Selatan di tingkat nasional maupun global.

Keberhasilan implementasi RPJMD ini sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi dalam menjalankan program serta kebijakan pembangunan yang telah dirancang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berbasis pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat guna menciptakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan adanya RPJMD ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mendorong pembangunan daerah yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global. Kota Tangerang Selatan memiliki potensi yang besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi, inovasi, dan keberlanjutan yang mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dengan sinergi dan kerja sama yang baik, visi pembangunan Kota Tangerang Selatan dapat terwujud demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkokoh peran daerah dalam menghadapi tantangan masa depan.

5.8. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah daerah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan daerah.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari 3 (tiga) hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi publik yang akurat, transparan, tepat waktu, mudah diakses dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok Masyarakat melalui metode komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan publik yang beragam, serta berbasis data yang valid.

Komunikasi publik RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan 3 (tiga) pemangku kepentingan utama, yaitu Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Komunikasi kepada Perangkat Daerah dilakukan melalui musyarawah atau rapat koordinasi agar Perangkat Daerah dapat memberikan masukan terhadap prioritas Pembangunan Daerah. Sedangkan komunikasi kepada Masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi Masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan Masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian dan evaluasi kebijakan Pembangunan Daerah.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE